



LAMPIRAN 1
MATRIKS PEMBANGUNAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2020 - 2024**



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2019

MATRIKS PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional 1: Ekonomi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2020 - 2024



MATRIK PEMBANGUNAN RANCANGAN RPJMN 2020-2024

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional*	13.4	14.5	15.7	17.9	19.5	190,327.2		
KP : Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Indeks Ketahanan Energi	68.5	68.6	69.2	69.6	70.6			
ProP : Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif)	11,511	13,398	14,911	16,577	19,231	190,275.1		
PLTA, dan PLT Mini Mikrohidro	Kapasitas terpasang (MW) - kumulatif	6,601	7,835	8,072	8,573	10,304	97,423.4	Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan	KESDM, BUMN, Swasta
PLT Panas Bumi (PLTP)	Kapasitas terpasang (MW) - kumulatif	2,273	2,353	2,485	2,785	3,160	42,270.0	Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, NTT, Jawa Timur	KESDM, BUMN, Swasta
PLT Bioenergi	Kapasitas terpasang (MW) - kumulatif	2,142.0	2,293.8	2,778.7	2,937.9	3,189.9	24,656.0		KESDM, BUMN, Swasta
PLT Surya (PLTS)	Kapasitas terpasang (MW) - kumulatif	351.4	736.0	1,034.1	1,371.8	1,557.3	17,931.6		KESDM, BUMN, Swasta
PLT Bayu (PLTB)	Kapasitas terpasang (MW) - kumulatif	143.5	173.5	533.5	902.5	1,012.5	7,919.8		KESDM, BUMN, Swasta
PLT EBT Lain	Kapasitas terpasang (MW) - kumulatif	-	7.0	7.0	7.0	7.0	74.3		KESDM, BUMN, Swasta
Pembangunan PLTN Komersial (Tambahkan Baru)	PLTN Komersial yang Dibangun	Terbentuknya MPTN	Terbentuknya Badan Pelaksana	Tersusunnya Pra FS, FS, dan DED PLTN Komersial	Dimulainya pembangunan PLTN Komersial Pertama	Pembangunan PLTN Komersial Pertama	0.0		Kementerian Riset dan Teknologi - DIKTI, KESDM
Pembangunan PLTN Komersial (Tambahkan Baru)	PLTN Komersial yang Dibangun	Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan	Mendorong penggunaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia	Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN	Melakukan analisis multikriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder.	Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional.	0.0	Pusat	KemenristekDIKTI, KESDM
KP : Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	Pemanfaatan biofuel untuk Domestik	10.0	10.2	14.2	14.6	17.4	50.0		
ProP : Akselerasi Pengembangan BBN							50.0		
Kilang BBN	Tahapan Pembangunan Green Refinery Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per Day di RU III Plaju	Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition)	Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision)	EPC	EPC	Mid 2024 Start Up dan On Stream	0.0		Pertamina

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Teknologi FCC untuk Pembuatan Green Gasoline berbasis CPO 100%	Penelitian dan Pengembangan Teknologi FCC untuk Green Gasoline berbasis CPO 100% hingga Pembuatan Desain Skala Komersial	-	1 (Penyempurnaan Pilot Plant (alat kontrol dan alat ukur))	1 (Simulasi menggunakan bahan baku Olein (Co-Product CPO))	1 (Simulasi menggunakan bahan baku RBDPO (refine, bleached, deodorized, palm oil) (Main Product CPO))	1 (FS dan DED skala komersial dan simulasi konversi minyak nabati menjadi green gasoline)	50.0		KESDM
KP : Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	Intensitas energi primer	139.5	138.0	136.6	135.2	133.8	2.1		
	penurunan Intensitas energi final	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8			
ProP : Perluasan Penerapan Efisiensi Energi							2.1		
Standar Kinerja Energi Minimum	Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya	3.0	2.0	1.0	-	-	2.1	34 Provinsi	KESDM
KP : Peningkatan pemenuhan energi bagi industri	Domestic Market Obligation (DMO) Batubara	155.0	168.0	177.0	184.0	187.0	0.0		
	Domestic Market Obligation (DMO) Gas untuk Industri	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0			
ProP : Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Energi							0.0		
DMO Batubara	DMO Batubara	155.0	168.0	177.0	184.0	187.0	0.0	34 Provinsi	KESDM, Kemenperin, Kemen PUPR
Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik	Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	0.0	34 Provinsi	KESDM
Produksi Gas Bumi	Produksi Gas Bumi	1,191.0	1,234.0	1,241.0	1,199.0	1,163.0	0.0		
KP : Pengembangan industri pendukung EBT	TKDN sektor pembangkit EBT	-	-	-	-	-	0.0		
ProP : Pengembangan Industri EBT							0.0		
TKDN Pembangkit PLT Bayu	TKDN Pembangkit PLT Bayu	40	40	40	40	40	0.0		KESDM
TKDN Pembangkit PLT Surya	TKDN Pembangkit PLT Surya	40	40	40	40	40	0.0		KESDM
TKDN Pembangkit PLT Air	TKDN Pembangkit PLT Air	70	70	70	70	70	0.0		KESDM
TKDN Pembangkit PLT Bioenergi	TKDN Pembangkit PLT Bioenergi	40	40	40	40	40	0.0		KESDM
TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi	TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi	30	30	33	33	35	0.0		KESDM
PP : Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity)	4.00	4.35	4.70	5.05	5.40	298,875.0		
KP : Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	65	65	65	65	65	6,406.5		
ProP : Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	7	7	7	7	7	1,984.2		
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	65	65	65	65	65	61.1		
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif	7	10	8	6	3	91.6		
Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	65	65	65	65	65	1,831.5		
ProP : Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	500	1,500	2,500	3,500	4,500	4,422.3		
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	552	552	552	552	552	120.1		KLHK
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	500	1,500	2,500	3,500	4,500	2,747.3		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11	22	33	44	55	54.9		
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,000.0		
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	1	1,6	1	0	0	500.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Pengelolaan hutan berkelanjutan	Luas kawasan hutan produksi	36	36.0	36	36.0	36	1,198.4		
ProP : Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	30	30	30	30	30	107.8		
Produksi HHBK	Jumlah Produksi HHBK	353,000	378,000	403,000	428,000	453,000	107.8		KLHK
Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi (air, panas bumi, dan karbon)	Jumlah unit pemanfaatan	20	20	20	20	20	0.0		
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati	Jumlah pilot IPTEK yang dimanfaatkan oleh satuan kerja terkait	-	10	10	10	10	0.0		
ProP : Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	20	40	60	80	110	1,090.7		
KPH yang masuk kategori Maju	Jumlah KPH yang masuk kategori Maju	20	40	60	80	110	180.0		KLHK, Kemendagri, Kemenperin, Kemendag
Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	4	8,5	9	9	3	830.0		KLHK
Peningkatan kapasitas SDM LHK di tingkat tapak	Jumlah SDM LHK ditingkat tapak yang kompeten	2310	3210	3210	3210	3210	80.7		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KP : Penyediaan air untuk pertanian							0.0		
ProP : Optimalisasi Hasil Hutan							0.0		
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.0	N.A.	-
ProP : Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		530	550	570	590	610	0.0		
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.0	N.A.	-
KP : Penyediaan air untuk domestik dan industri							0.0		
KP : Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi/penyelamatan danau dan infrastruktur hijau	Peningkatan tutupan hutan	375,000	385,000	425,000	450,000	475,000	119.5		
ProP : Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan dan lahan yang terrehabilitasi secara nasional	375,000	385,000	425,000	450,000	475,000	0.0		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	56,000	40,000	30,000	25,000	20,000	0.0		KLHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0.0		KLHK
Penanaman/pengkayaan pada hutan produksi	Luas penanaman di hutan produksi	310,000	330,000	370,000	400,000	400,000	0.0		KLHK
ProP : Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Indeks kualitas danau						119.5		
Pengendalian Kerusakan Danau	Jumlah danau yang dilakukan pengendalian kerusakannya	15	15	15	15	15	100.0		KLHK
Penyediaan sarana prasarana pendukung penyelamatan danau (KemenPUPR)	Jumlah Danau yang dikonservasi (kumulatif)	7	9	11	13	15	0.0		KemenPUPR
Pengembangan perikanan tangkap darat (KemenKP)	Jumlah usaha perikanan di luar danau	45	90	90	90	90	0.0		KemenKP
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah obyek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW)	3	2	2	2	2	19.5		Kementerian ATR/BPN
Fasilitasi Budidaya Pertanian berkaidah konservasi/ramah lingkungan (Kementan)	Jumlah danau yang terfasilitasi pertanian ramah lingkungan	15	30	30	30	30	0.0		Kementerian
KP : Optimalisasi pemanfaatan waduk multiguna	Jumlah volume tumpungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)	14	15.2	16	16.3	17	291,150.5		
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Jumlah pembangunan bendungan multiguna	11	14	15	13	10	180,994.5		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bendungan baru yang selesai dibangun	Jumlah bendungan baru yang selesai dibangun	11	11	12	7	4	38,025.7	Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pideko, Bendungan Tugu, Bendungan Karaloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Tigadiladji, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Bener, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Bulango Ulu, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Way Apu, Bendungan Meniting, Bendungan Jlantah, Bendungan Beringin Sila, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang, Bendungan Tiu Suntuk, Bendungan Jragung, Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Budong-Budong	Kementerian PUPR
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun	-	3	3	4	-	18,538.9	Tersebar	Kementerian PUPR
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun dengan skema KPBU	-	-	-	2	3	28,200.0	Tersebar	KPBU
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun	-	-	-	-	3	96,000.0	Tersebar	BUMN dan/atau Swasta
Bendungan yang direhabilitasi	Jumlah bendungan yang sedang direhabilitasi/ditingkatkan	2	1	1	1	-	230.0	Bendungan Wonogiri, Benanga, Bilibili, Sutami	Kementerian PUPR
ProP : Optimalisasi dan pemanfaatan tumpungan	Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (Kumulatif)	14	17	28	40	51	95,751.8		
Bendungan yang dimanfaatkan untuk PLTA	Jumlah energi listrik yang bersumber dari bendungan (MW)	113	2	27	34	2,262	68,251.4	Bendungan Bajulmati, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknomo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Tugu, Bendungan Karaloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meniting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang	BUMN dan/atau Swasta

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bendungan yang dimanfaatkan untuk air baku	Jumlah debit air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik)	6.19	0.85	10.03	5.55	0.86	3,522.0	Bendungan Paya Seunara, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Teritip, Bendungan Gondang, Bendungan Sei Gong, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pideko, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan	Kementerian PUPR
Bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi	Luas lahan irrigasi yang diairi dari bendungan (Ha)	105,461	14,697	116,375	53,959	52,057	23,978.4	Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pideko, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meniting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang	Kementerian PUPR
ProP : Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis	Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi	300	300	300	300	300	13,506.9		
Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	xxx	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	150.2	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rencana, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan DAS	xxx	34	34	34	34	34	61.1	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah
Penyediaan Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	xxx	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	839.5	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	xxx	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	12,210.2	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis	xxx	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4.3	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah
Rencana Indikasi Program Berbasis DAS	xxx	15	15	15	15	15	91.6	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah
Model Rekayasa Ekokhidrologi dalam Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	xxx	34	34	34	34	34	12.8	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah
Penyediaan Benih Berkualitas dan Materi Genetik Unggul	xxx	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	73.3	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah
Penyediaan Bibit Berkualitas	xxx	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	64.1	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah
ProP : Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air		550	550	550	550	550	897.3		
Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan konservasi	xxx	339	339	339	339	339	183.2	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air	xxx	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	73.1	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan konservasi	xxx	406	406	406	406	406	366.3	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air	xxx	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	274.7	Daerah	KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90.4	94.0	94.8	95.5	95.2	251,391.5		
	Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a))	2,100.0	2,100.0	2,100.0	2,100.0	2,100.0			
	Angka Kecukupan Protein (AKP)	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0			
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Under-nourishment/PoU)	6.2	5.8	5.4	5.1	4.9			
	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5.2	4.8	4.5	4.3	4.1			
KP : Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Konsumsi ikan (2.2.2(c))	58.3	58.9	59.5	60.2	60.9	5,697.5		
	Konsumsi daging	12.9				14.6			
	Konsumsi sayur dan buah	260.2	273.2	286.9	301.3	316.3			
	Konsumsi protein asal ternak	10.7				11.0			
	Akses terhadap beras biofortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	10-20%	40.0	60.0	0.8	1.0			
	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	70.0	75.0	80.0	0.9	0.9			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan							3,733.1		
Kawasan Ubi Kayu	Jumlah Kawasan Ubi Kayu	20000	20700	21425	22174	22950	283.1	18 provinsi	Kementerian
Kawasan Ubi Jalar	Jumlah Kawasan Ubi Jalar	2500	2588	2678	2772	2869	197.8	4 Provinsi	Kementerian
Kawasan Kacang Tanah	Jumlah Kawasan Kacang Tanah	30000	31050	32137	33262	34426	1,430.8	24 Provinsi	Kementerian
Kawasan Kacang Hijau	Jumlah Kawasan Kacang Hijau	20000	20700	21425	22174	22950	245.0	16 Provinsi	Kementerian
Kawasan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Kawasan Aneka kacang dan Umbi Lainnya	500	518	536	554	573	11.7	Jawa Barat, Banten	Kementerian
Benih sumber aneka umbi	Jumlah Benih sumber aneka umbi	170000	170000	170000	170000	170000	2.4	4 Provinsi	Kementerian
Benih sumber aneka kacang dan sereai lain	Jumlah benih sumber aneka kacang dan sereai lain	65000	65000	65000	65000	65000	5.5	17 Provinsi	Kementerian
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	25	25	25	25	25	33.6	Pusat	Kementerian
Pengembangan pangan lokal	Teroptimalkanya pangan lokal	20	20	20	20	20	64.7	13 provinsi	Kementerian
Obor Pangan Lestari (OPAL)	Terbinarnya kelompok pemakaian pekarangan	3500	3500	3500	3500	3500	975.0	Pusat, 34 provinsi	Kementerian
Obor Pangan Lestari (OPAL) Stunting	Terlaksananya intervensi stunting	800	800	800	800	800	272.3	Pusat, 32 provinsi	Kementerian
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terciptanya pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA	35	35	35	35	35	211.2	Pusat, 34 provinsi	Kementerian
ProP : Peningkatan Keamanan Pangan							1,458.8		
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (PSAT)	Terbitnya penjaminan keamanan pangan segar (PSAT)	349	390	424	465	512	187.6	Pusat, 34 provinsi	Kementerian
Pemenuhan persyaratan produk hewan	Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan	135	160	175	200	220	36.6	34 Provinsi	Kementerian
Pengawasan mutu dan keamanan produk	Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	29800	40000	40000	40000	40000	115.4	34 Provinsi	Kementerian
Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan	Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan	10	10	10	10	10	24.4	Pusat	Kementerian
Kebijakan Kerjasama nasional/Internasional	Kebijakan Kerjasama nasional/Internasional	4	4	4	4	4	18.9	Pusat	
Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan	Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan	4	4	4	4	4	13.4	Pusat	
Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	100	100	100	100	100	56.8	Pusat	Kementerian
Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	100	100	100	100	100	66.5	Pusat	Kementerian
Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	3	3	3	3	3	9.8	1 Provinsi	Kementerian
Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	4	4	4	4	4	32.4	1 Provinsi	Kementerian
Pengawasan dan Penindakan	Pengawasan dan Penindakan	20	20	20	20	20	54.9	33 Privinsi	Kementerian
Prasarana Infrastruktur PLBN	Prasarana Infrastruktur PLBN	250	250	250	250	250	58.0	3 Provinsi	Kementerian
Sarana PLBN	Sarana PLBN	60	60	60	60	60	34.2	4 Provinsi	Kementerian
Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi	Prasarana wilker sentra produksi, distribusi, dan importasi/pengembangan sapi/lainnya	250	250	500	500	750	52.5	3 Provinsi	Kementerian
Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	589.1	34 Provinsi	Kementerian
Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	10	10	10	10	10	70.8	1 Provinsi	Kementerian
Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat	Jumlah kab/kota fokus penurunan stunting	2	2	2	2	2	0.0		Kemenperin
Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan	Persentase ketersediaan bahan baku industri agro	55	56	57	58	60.0	37.4		Kemenperin
ProP : Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan							505.5		
Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Jumlah Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	10000	50000	100000	150000	200000	487.2	Sentra padi	Kementerian
Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	1	1	1	1	1	18.3	1 Provinsi	Kementerian
KP : Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Ketersediaan Beras	43.7				46.5	202,122.1		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Ketersediaan Protein Hewani	2.5				2.9			
	Produksi jagung	30.9				39.6			
	Produksi daging	4.1				4.6			
	Produksi umbi-umbian	23.3				26.2			
ProP : Peningkatan Produksi Padi							169,943.9		
Kawasan Padi	Jumlah Kawasan Padi	791000	791000	791000	791000	791000	7,475.7	Pusat, 32 provinsi	Kementerian
Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	Jumlah areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	2120000	2120000	2120000	2120000	2120000	3,315.1	Pusat, 33 provinsi	Kementerian
Benih Sumber Padi	Jumlah benih Sumber Padi	1044000	1044000	1044000	1044000	1044000	66.5	31 Provinsi	Kementerian
Produsen Benih Padi	Terlaksananya pemberdayaan produsen benih padi	5560	5560	5560	5560	5560	77.5	Pusat, 4 Provinsi	Kementerian
Areal sertifikat benih	Jumlah areal sertifikat benih	124500	124500	124500	124500	124500	244.8	31 Provinsi	Kementerian
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6	6	6	6	6	10.4	Pusat	Kementerian
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT	Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT	100000	100000	100000	100000	100000	1,495.7	Pusat	Kementerian
Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	Jumlah sertifikat/LHP Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	2450	2450	2485	2485	2485	54.9	Pusat	Kementerian
Penerapan Penanganan DPI	Terlaksananya Penerapan Penanganan DPI	550	560	570	580	590	19.9	22 Provinsi	Kementerian
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	5000	5000	5000	5000	5000	335.8	Pusat	Kementerian
Areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT	Jumlah areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT	44180	50000	51000	52000	53000	447.8	Pusat, 32 provinsi	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Tanaman Pangan	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Tanaman Pangan	10	10	10	10	10	8.5	Pusat	Kementerian
Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	Pengawasan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	34	34	34	34	34	53.7	Pusat	Kementerian
Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)	Pengawasan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)	32	32	32	32	32	360.8	32 Provinsi	Kementerian
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	34	34	34	34	34	40.3	Pusat	Kementerian
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	34	34	34	34	34	1,082.4	34 Provinsi	Kementerian
Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	Terlaksananya Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	10	10	10	10	10	25.6	Pusat	Kementerian
Model Percontohan Pertanian Modern	Jumlah Model Percontohan Pertanian Modern	1	1	1	1	1	91.6	Jawa Barat	Kementerian
Model Peramalan OPT	Jumlah Model Peramalan OPT	10	10	10	10	10	26.9	Jawa Barat	Kementerian
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9	9	9	9	9	7.3	Pusat	Kementerian
Galur Harapan Unggul Tanaman	Galur Harapan Unggul Tanaman	17	17	17	17	17	25.6	1 Provinsi	Kementerian
Kerja Sama Litbang Pertanian	Kerjasama penelitian dan pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	6	6	6	6	6	0.6	1 Provinsi	Kementerian
Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG	Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG	5	5	5	5	5	9.2	1 Provinsi	Kementerian
Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3	3	3	3	3	18.9	1 provinsi	Kementerian
Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	Sumber Daya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	3100	3100	3100	3100	3100	4.3	1 Provinsi	Kementerian
umber Daya Genetik Yang Terkarakterisasi, Terevaluasi, dan Terdokumentasi	Sumber Daya Genetik Yang Terkarakterisasi, Terevaluasi, dan Terdokumentasi	1150	1150	1150	1150	1150	3.7	1 Provinsi	Kementerian
Rekomendasi Hasil Litbang	Rekomendasi Hasil Litbang	2	2	2	2	2	1.8	1 Provinsi	Kementerian
Varietas Unggul Baru Komoditas Pertanian	Varietas Unggul Baru Komoditas Pertanian	4	4	4	4	4	4.3	1 Provinsi	Kementerian
Kerjasama Litbang Pertanian	Layanan Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Litbang Pascapanen	1	1	1	1	1	0.5	1 Provinsi	Kementerian
Rekomendasi Hasil Litbang	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim	2	2	2	2	2	6.1	1 Provinsi	Kementerian
Benih Padi	Benih Padi	700	700	700	700	700	49.6	32 Provinsi	Kementerian
Rekomendasi Hasil Litbangtan	Rekomendasi Hasil Litbangtan	49	49	49	49	49	36.0	33 Provinsi	Kementerian
Teknologi Spesifik Lokasi	Teknologi Spesifik Lokasi	105	105	105	105	105	128.2	33 Provinsi	Kementerian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kerjasama Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Kerjasama Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	33	33	33	33	33	14.7	33 Provinsi	Kementan
Diseminasi Teknologi Mektan	Diseminasi Teknologi Mektan	3	3	3	3	3	17.1	1 Provinsi	Kementan
Kerjasama Hasil Inovasi Inovasi Teknologi Mekanisasi Pertanian	Teknologi Mekanisasi Pertanian	1	2	3	3	3	36.0	1 Provinsi	Kementan
Rekomendasi Hasil Litbang	Kebijakan pembangunan peternakan, kesehatan hewan dan kelayakan ekonomi teknologi	5	5	5	5	5	2.4	1 Provinsi	Kementan
SDG ternak, tanaman pakan ternak serta Mikroba peternakan	SDG ternak, tanaman pakan ternak serta Mikroba peternakan	10	10	10	10	10	5.5	3 Provinsi	Kementan
Varietas Unggul Padi	Varietas Unggul Padi	2	3	3	3	3	15.3	1 Provinsi	Kementan
Teknologi produksi padi	Teknologi produksi padi	7	7	7	7	7	22.0	2 Provinsi	Kementan
Kerjasama Litbang Tanaman Pangan	Kerjasama Litbang Tanaman Pangan	14	14	14	14	14	5.5	3 Provinsi	Kementan
Rekomendasi Hasil Litbang Tanaman Pangan	Rekomendasi Kebijakan Komoditas Strategis Tanaman Pangan	6	6	6	6	6	15.3	1 Provinsi	Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	8	8	8	8	8	62.3		Kementan
Benih Padi	Jumlah Benih Padi yang Diproduksi	185	190	195	200	205	17.7	2 Provinsi	Kementan
Subsidi/Bantuan pupuk	Subsidi/Bantuan pupuk						142.500,0	34 Provinsi	
Aplikasi teknologi pengolahan beras metode Buhler							11.700,0		Swasta
ProP : Peningkatan Produksi Jagung		105	105	105	105	105	9,221,8		
Kawasan jagung	Jumlah kawasan jagung	50000	50000	50000	50000	50000	526,9	27 Provinsi	Kementan
Kawasan Serealia Lainnya	Jumlah Kawasan Serealia Lainnya	5000	5000	5000	5000	5000	33,0	20 Provinsi	Kementan
Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)	33	33	33	33	33	166,7		Kementan
Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	33	33	33	33	33	281,4	Pusat	Kementan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	33	33	33	33	33	54,9	33 Provinsi	Kementan
Peraturan/Norma/Pedoman Serealia	Peraturan/Norma/Pedoman Serealia	1	1	1	1	1	3,1	Pusat	Kementan
Area yang diberikan Bantuan Benih Jagung	Jumlah area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	8,022,1	Pusat, 31 Provinsi	Kementan
Benih Sumber Jagung	Jumlah Benih Sumber Jagung	71000	71000	71000	71000	71000	6,7	16 Provinsi	Kementan
Produsen Benih Jagung	Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Jagung	2000	2000	2000	2000	2000	65,9	Pusat	Kementan
Benih Jagung	Benih Jagung	158	158	158	158	158	22,6	10 Provinsi	Kementan
Kerjasama Litbang Pertanian	Kerjasama Litbang Pertanian Hortikultura	19	19	19	19	19	4,3	3 Provinsi	Kementan
Teknologi Budidaya Jagung	Teknologi Budidaya Jagung	3	2	2	2	2	9,8	1 Provinsi	Kementan
Varietas Unggul Jagung	Varietas Unggul Jagung	2	2	2	2	2	16,5	1 Provinsi	Kementan
Benih Jagung	Jumlah Benih Jagung yang Diproduksi	32	111	111	111	111	7,9	1 Provinsi	Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Kedelai							7,526,5		
Kawasan Kedelai	Jumlah Kawasan Kedelai	500000	517500	535613	554359	573267	5,621,7	26 Provinsi	Kementan
Produsen Benih Kedelai	Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Kedelai	1050	1050	1050	1050	1050	36,0	Pusat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara	Kementan
Benih Sumber Kedelai	Jumlah Benih Sumber Kedelai	192600	192600	192600	192600	192600	15,9	25 Provinsi	Kementan
Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya	Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya	150000	150000	150000	150000	150000	105,0	31 Provinsi	Kementan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6	6	6	6	6	29,3	Pusat	Kementan
Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	34	34	34	34	34	149,6	Pusat	Kementan
Peraturan/Norma/Pedoman	Peraturan/Norma/Pedoman	4	4	4	4	4	3,7	Pusat	Kementan
Benih Kedelai	Benih Kedelai	656	656	656	656	656	84,9	13 Provinsi	Kementan
Kerjasama Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah dokumen kerjasama yang terbentuk	33	33	33	33	33	14,7	33 Provinsi	Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	125	190	190	190	190	630,7	33 Provinsi	Kementan
Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi mendukung Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi mendukung Pengentasan Kemiskinan	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	641,0	3 Provinsi	Kementan
Galar/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Galar/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	21	21	21	21	21	34,8	3 Provinsi	Kementan
Teknologi peternakan dan veteriner	Teknologi peternakan dan veteriner	31	31	31	31	31	57,4	3 Provinsi	Kementan
Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi	Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi	100	100	100	100	100	1,2	1 Provinsi	Kementan

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis)	Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis)	82990	82990	82990	82990	82990	3.7	1 Provinsi	Kementerian
Bibit sumber ternak	Bibit Sumber Ternak	45250	45250	45250	45250	45250	55.6	3 Provinsi	Kementerian
Bibit sumber tanaman pakan ternak	Bibit sumber tanaman pakan ternak	10	10	10	10	10	1.2	1 Provinsi	Kementerian
Kerjasama penelitian dan pengembangan	Jejaring dan/ Kerjasama Penelitian, Pengembangan Peternakan dan veteriner yang Terbentuk	4	4	4	4	4	1.8	1 Provinsi	Kementerian
Diseminasi teknologi	Diseminasi dan penyiaian teknologi peternakan dan veteriner untuk dimanfaatkan penaguna	5	5	5	5	5	38.5	3 Provinsi	Kementerian
ProP : Peningkatan Produksi Daging							9,563.6		
Hijauan Pakan Ternak		2341	2341	2341	2341	2341	247.9		Kementerian
Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Produksi bahan pakan/pakan	8000	8500	9000	9500	10000	271.1	9 Provinsi	Kementerian
Mutu dan Keamanan Pakan	Pengawasan mutu dan keamanan bahan pakan/pakan	5000	6000	7000	8000	9000	65.9	24 Provinsi	Kementerian
Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	Terlaksananya penyusunan NSPK Pakan	4	4	4	4	4	15.3	Pusat	Kementerian
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	Jumlah Supervisi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	4	4	4	4	4	36.6	Pusat	Kementerian
Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Surveilans Penyakit Hewan	180000	325296	325296	325296	325296	384.6	Pusat, 9 Provinsi	Kementerian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengamanan PHMS	5167450	5167450	5167450	5167450	5167450	614.8	Pusat, 33 provinsi	Kementerian
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Surveilans Obat Hewan	1610	1610	1610	1610	1610	43.3	1 Provinsi	Kementerian
Obat Hewan dan Bahan Biologik	Penyedian vaksin dan bahan biologik	6030325	5471100	5471100	5471100	5471100	125.8	Pusat, 1 Provinsi	Kementerian
Kelembagaan Veteriner	Penguatan Kelembagaan Veteriner	10	10	10	10	10	214.9	Pusat, 9 Provinsi	Kementerian
Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	Tersusunnya Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	7	7	7	7	7	286.9	Pusat	Kementerian
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	Tersosialisasinya kegiatan kesehatan hewan	7	7	7	7	7	1.8	Pusat	Kementerian
Optimalisasi Reproduksi	Jumlah Akseptor IB, PKB, ATR dan Sinkronisasi	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	1,869.4	Pusat, 34 provinsi	Kementerian
Benih Ternak Unggul	Penyediaan Semen Beku dan Embrio Ternak	4940800	4940800	4940800	4940800	4940800	291.8	2 Provinsi	Kementerian
Bibit Ternak Unggul	Jumlah produksi bibit ternak unggul (Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Kerbau, Babi, Ayam dan Itik)	698057	698057	698057	698057	698057	345.5	Pusat, 8 Provinsi	Kementerian
Pengembangan ternak ruminansia potong	Pengembangan ternak ruminansia potong (Sapi Potong, Kerbau, Kambing/Domba)	5000	5000	5000	5000	5000	540.9	Pusat	Kementerian
Pengembangan ternak ruminansia perah	Pengembangan ternak ruminansia perah (Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah)	327	500	500	700	700	44.6	Pusat, 13 Provinsi	Kementerian
Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	Terlaksananya dukungan teknis kegiatan Perbibitan dan Produksi Ternak	6	6	6	6	6	370.0	Pusat	Kementerian
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Terlaksananya Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	6	6	6	6	6	95.9	Pusat, 6 Provinsi	Kementerian
Pengendalian Pemotongan Betina produktif	Penurunan Pemotongan Betina Produktif	82	82	82	82	82	39.1	33 Provinsi	Kementerian
Pengembangan unggas dan aneka ternak	Pengembangan unggas dan aneka ternak	8831800	8831800	8831800	8831800	8831800	3,382.8	Pusat, 1 Provinsi	Kementerian
Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	Terlaksananya fasilitasi sarana prasarana penjaminan keamanan produk hewan	6	10	16	20	25	6.7	3 Provinsi	Kementerian
Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyusunan NSPK Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	6	6	6	6	7.9	Pusat	Kementerian
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya supervisi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	9	9	9	9	9	97.7	Pusat, 2 Provinsi	Kementerian
Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Terlaksananya kelembagaan dan usaha peternakan	112	113	113	113	113	78.1	34 Provinsi	Kementerian
Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Terlaksananya dukungan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	3	3	3	3	3	2.4	Pusat	Kementerian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Terlaksananya Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3	3	3	3	3	81.8	Pusat	Kementerian
Galur Unggul Harapan Ternak Komoditas Strategis	Jumlah Galur Unggul Harapan Ternak Komoditas Strategis	0	0	0	0	0	0.0		Kementerian
Bibit Sumber Ternak Komoditas Strategis	Jumlah Bibit Sumber Ternak Komoditas Strategis	0	0	0	0	0	0.0		Kementerian
Teknologi peternakan dan veteriner komoditas strategis	Jumlah teknologi peternakan dan veteriner komoditas strategis	0	0	0	0	0	0.0		Kementerian
ProP : Peningkatan Produksi Cabai							515.9		
Kawasan Aneka Cabai	Luas Kawasan Aneka Cabai	13328	13328	13328	13328	13328	489.6	33 Provinsi	Kementerian
Benih bawang dan cabai	Jumlah Produksi Benih Bawang dan Cabai	39744	39744	39744	39744	39744	26.3	20 Provinsi	
Benih Cabai	Jumlah produksi benih cabai	100	110	120	130	140	0.0	1 Provinsi	Kementerian
ProP : Peningkatan Produksi Bawang Merah							951.2		
Kawasan Bawang Merah	Kawasan Bawang Merah	5704	5704	5704	5704	5704	925.5	33 Provinsi	Kementerian
Diseminasi Teknologi Pertanian	Diseminasi Teknologi Litbang Pascapanen	3	3	3	3	3	23.2	1 Provinsi	Kementerian
Rekomendasi Kebijakan Teknologi Pertanian	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pascapanen Pertanian	3	3	3	3	3	2.4	1 Provinsi	Kementerian
ProP : Peningkatan Mutu Hasil Pangan							4,399.3		
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Tersalurnya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	6191	7245	8245	9344	10454	3,501.9	34 Provinsi	Kementerian
Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	60	60	60	60	60	16.5	24 Provinsi	Kementerian
Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Tersalurnya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	168	168	168	168	168	108.7	23 Provinsi	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	5	5	5	5	5	3.1	Pusat	Kementerian
Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	33	33	33	33	33	138.6	Pusat	Kementerian
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1	1	1	1	1	18.3	Pusat	Kementerian
Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)	33	33	33	33	33	103.2	33 Provinsi	Kementerian
Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	100	100	100	100	100	94.0	33 Provinsi	Kementerian
Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Terlaksananya Sarana Pengolahan Pangan dan NonPangan	17	17	17	17	17	20.8	13 Provinsi	Kementerian
Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi Pertanian Yang Dihadarkan	17	18	19	20	21	39.7	1 Provinsi	Kementerian
Teknologi Pascapanen (Penanganan dan Pengolahan) Komoditas Strategis		0	0	0	0	0	0.0		Kementerian
Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian)	16	16	16	16	16	199.0	3 Provinsi	Kementerian
Diseminasi Teknologi Pertanian	Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian	9	9	9	9	9	97.1	3 Provinsi	Kementerian
Varietas Unggul Tanaman Pangan Lainnya	Varietas Unggul Tanaman Pangan Lainnya	4	4	4	4	4	40.9	2 Provinsi	Kementerian
Teknologi dan Inovasi Pengembangan Tanaman Pangan	Teknologi dan Inovasi Pengembangan Tanaman Pangan	0	0	0	0	0	0.0	1 Provinsi	Kementerian
Benih Tanaman Pangan Lainnya	Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya	120	122	124	126	128	17.7	2 Provinsi	Kementerian
Sistem rantai dingin hortikultura dan produk peternakan		35	35	35	35	35	0.0		Swasta
KP : Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, dan kepastian pasar	Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*)	36.2	38.5	40.8	43.1	45.4	23,003.2		
	Nilai tukar petani	103.0					105.0		
	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)	65 - 80					80-95		
ProP : Asuransi Pertanian							1,550.3		
Asuransi Usaha Ternak (AUT)	Jumlah ternak yang terlindungi asuransi	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	128.8	Pusat dan 20 provinsi	Kementerian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Asuransi Pertanian	Jumlah luas pertanaman pertanian yang terlindungi asuransi	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	905.3	Pusat dan 24 provinsi	Kementerian
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria lingkup pembiayaan pertanian	Jumlah pedoman/petunjuk lingkup pembiayaan pertanian yang tersedia	1	1	1	1	1	9.2	Pusat	Kementerian
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup pembiayaan pertanian	Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian	33	33	33	33	33	420.0	Pusat dan 32 provinsi	Kementerian
Penerapan pembiayaan dan asuransi Syariah sesuai fatwa DSN no 82							87.0	17.4	Swasta
ProP : Pendidikan Pertanian	Jumlah CGI Aparatur dan Non Aparatur Peserta Pelatihan	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	2,667.9		
Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Terjalinnya Kemitraan dengan Mahasiswa/Alumni dari Perguruan Tinggi Negeri dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian	1215	1750	1750	1750	1750	354.4	Pusat, 8 Provinsi	Kementerian
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Jumlah Dosen, Guru dan Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal S2 dan S3	300	300	300	300	300	127.0	Pusat	Kementerian
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	22427	22427	22427	22427	22427	190.5	Pusat, 5 Provinsi	Kementerian
Tenaga Pendidik, dan Tenaga kependidikan vokasi Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi yang Ditingkatkan Kualitasnya	315	350	400	450	500	63.1	Pusat, 11 Provinsi	Kementerian
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Jumlah Wirausahawan Muda Pertanian yang Ditumbuhkan	2090	2100	2110	2120	2130	423.6	Pusat, 11 Provinsi	Kementerian
Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll)	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	12	12	12	12	12	1,097.1	Pusat, 11 Provinsi	Kementerian
Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling)	Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling)	250	300	400	500	600	37.3	Pusat	Kementerian
Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)	3	3	3	3	3	0.0	3 Provinsi	Kementerian
Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	80	80	80	80	80	164.2	1 Provinsi	Kementerian
Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pengembangan Sumberdaya Manusia	1200	1200	1200	1200	1200	186.2	1 Provinsi	Kementerian
Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	45	45	45	45	45	9.8	1 Provinsi	Kementerian
Perjanjian Kerjasama Licensi Hasil Balitbangtan	Perjanjian Kerjasama Licensi Hasil Balitbangtan	10	10	10	10	10	14.7	1 Provinsi	Kementerian
ProP : Penyaluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan	90	90	90	90	90	4,843.1		
Penumbuhan dan penguatan P4S	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S	240	240	240	240	240	29.9	Pusat, 7 Provinsi	Kementerian
Tenaga Kediklatan Pertanian yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kediklatan yang Meningkat Kompetensinya	196	196	196	196	196	22.6	Pusat, 7 Provinsi	Kementerian
Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394	122.1	Pusat	Kementerian
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	35,322	35,322	35,322	35,322	35,322	575.7	Pusat, 7 Provinsi	Kementerian
Kinerja Penyaluhan yang ditingkatkan	Kinerja Penyaluhan yang ditingkatkan	43,150	43,150	43,150	43,150	43,150	2,512.3	34 Provinsi	Kementerian
SL Petani Mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian	SL Petani Mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian	23,250	45,000	75,000	75,000	75,000	332.1	34 Provinsi	Kementerian
Kelembagaan penyaluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Kelembagaan penyaluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	69.6	34 Provinsi	Kementerian
Kelembagaan Petani yang Dikembangkan	Tumbuh dan Berkembangnya Korporasi Petani	100	100	100	100	100	61.0	34 Provinsi	Kementerian
Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyaluhan Pertanian	Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyaluhan Pertanian	68	102	102	102	102	28.6	34 Provinsi	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Kegiatan pemantapan Sistem Penyaluhan Pertanian	Peraturan/Norma/Pedoman Kegiatan pemantapan Sistem Penyaluhan Pertanian	6	6	6	6	6	511.6	Pusat	Kementerian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani	Jumlah Petani yang Meningkat Kapasitasnya	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	24.4	Pusat, 8 Provinsi	Kementerian
Pengembangan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Meningkatnya Penerapan Praktek Teknis Budidaya Padi yang Lebih Baik	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	0.0		Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian	Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian	11	11	11	11	11	121.5	Pusat, 7 Provinsi	Kementerian
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	46	46	46	46	46	134.9	33 Provinsi	Kementerian
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	8	8	8	8	8	296.8	15 Provinsi	Kementerian
ProP : Korporasi Petani	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan	90	90	90	90	90	13,941.9		
Pengembangan Korporasi Usaha Tani	Terbentuknya korporasi usaha tani	23	23	23	23	23	62.2	Pusat, 17 Provinsi	Kementerian
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	45.4	Pusat, 7 Provinsi	Kementerian
Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelaanjutan Berbasis Korporasi	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelaanjutan Berbasis Korporasi	1	1	1	1	1	91.7	1 Provinsi	Kementerian
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan	Jumlah Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan	13	13	13	13	13	0.0	13 Provinsi	Kementerian
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan	Jumlah Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan	13	13	13	13	13	0.0	13 Provinsi	Kementerian
Digitalisasi rantai pasok pangan dgn ewallet syariah							1,450.0		Swasta
Grand desain model bisnis dan spasial							650.0		
Pembangunan korporasi petani berbasis Society 5.0							767.6		Swasta
Proyek Indonesia City Hajj							10,875.0		Swasta
KP : Peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (LP2B)	50	65	80	90	100	18,825.9		
	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*)	30-Aug	30-Aug	30-Aug	30-Aug	30-Aug			
	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*)	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250			
ProP : Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian							4,574.6		
Jaringan Irigasi Tersier	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	135,600	350,000	350,000	350,000	350,000	2,228.9	32 provinsi	Kementerian
Irigasi Perpompaan	Jumlah pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanam tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	761.9	32 provinsi	Kementerian
Embung Pertanian	Jumlah unit embung pertanian untuk penambahan areal pertanian	400	400	400	400	400	293.1	31 Provinsi	Kementerian
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup irigasi pertanian	Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup Irigasi Pertanian	33	33	33	33	33	894.5	Pusat	Kementerian
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	200	200	200	200	200	154.3	Pusat dan 22 provinsi	Kementerian
Irigasi Perpipaan	Jumlah unit irigasi perpipaan mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	138	138	138	138	138	84.3	21 provinsi	Kementerian
Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain Irigasi pertanian yang tersedia	10	10	10	10	10	36.7	10 provinsi	Kementerian
Dokumen Pinjaman Luar Negeri UPLAND	Jumlah dokumen pinjaman luar negeri kegiatan Upland yang tersedia	1	1	1	1	1	34.8	Pusat	Kementerian
Norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup irigasi pertanian	Jumlah pedoman/petunjuk lingkup irigasi pertanian yang tersedia	1	1	1	1	1	86.1	Pusat	Kementerian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian							14,251.3		
e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan Kartu Tani	Jumlah lokasi (Provinsi/Kabupaten) dalam rangka penyusunan e-RDKK mendukung penerapan Kartu Tani	521	521	521	521	521	597.1	Pusat dan 33 provinsi	Kementerian
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida	Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk dan pestisida	33	33	33	33	33	134.3	Pusat	Kementerian
Cetak Sawah Optimasi Lahan	Jumlah perluasan areal pertanian	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1,172.8	21 provinsi	Kementerian
	Jumlah lahan pertanian yang dioptimasi	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2,655.5	15 provinsi	Kementerian
Dokumen Pinjaman Luar Negeri FMSRB	Jumlah dokumen pinjaman luar negeri kegiatan FMSRB yang tersedia	1	1	1	1	1	66.1	Pusat	Kementerian
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup perluasan dan perlindungan lahan pertanian	Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup perluasan dan perlindungan lahan pertanian	33	33	33	33	33	161.9	Pusat dan 19 provinsi	Kementerian
Data Lahan Pertanian	Jumlah peta geospasial lahan cetak sawah yang tersedia	7	7	7	7	7	119.7	Pusat dan 7 provinsi	Kementerian
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia	23,440	56,547	56,547	56,547	56,547	7,142.1	Pusat dan 33 provinsi	Kementerian
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria lingkup alat dan mesin pertanian	Jumlah pedoman/petunjuk lingkup alat dan mesin pertanian yang tersedia	1	1	1	1	1	312.6	Pusat	Kementerian
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria lingkup pupuk dan pestisida	Jumlah pedoman/petunjuk lingkup pupuk dan pestisida yang tersedia	1	1	1	1	1	132.6	Pusat	Kementerian
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Jumlah unit pengolah pupuk organik yang tersedia	500	500	500	500	500	824.3	Pusat	Kementerian
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria lingkup perluasan dan perlindungan lahan pertanian yang tersedia	Jumlah pedoman/petunjuk lingkup perluasan dan perlindungan lahan pertanian yang tersedia	1	1	1	1	1	130.6	Pusat	Kementerian
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	305.3	Pusat	Kementerian
Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	17	17	17	17	17	165.5	Pusat dan 25 provinsi	Kementerian
Survei Investigasi dan Desain Cetak Sawah	Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain cetak sawah yang tersedia	10	10	10	10	10	108.1	10 Provinsi	Kementerian
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian	Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian	33	33	33	33	33	60.5	Pusat	Kementerian
Perbangkelan Alsintan	Jumlah perbangkelan Alsintan yang tersedia	18	18	18	18	18	78.8	Pusat	Kementerian
Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	3.1	1 Provinsi	
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1.8	1 Provinsi	
Peta Sumberdaya Lahan Pertanian	Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian	50	50	50	50	50	31.7	1 Provinsi	Kementerian
Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan	2	2	2	2	2	5.0	1 Provinsi	Kementerian
Kerjasama Litbang Pertanian	Kerjasama Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian	2	2	2	2	2	0.5	1 Provinsi	Kementerian
Teknologi Mekanisasi Pertanian	Teknologi Mekanisasi Pertanian	8	8	8	8	8	36.0	1 Provinsi	Kementerian
Alat dan Mesin Pertanian yang Diuji	Alat dan Mesin Pertanian yang Diuji	127	127	127	127	127	4.2	1 Provinsi	Kementerian
Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan	Rumusan Kebijakan Pembangunan Mektan	2	2	2	2	2	1.2	1 Provinsi	Kementerian
Upland							0.0		Kementerian
KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Global food security index	56.9	58.9	60.9	62.3	64.1	1,742.8		
ProP : Stabilisasi Harga Pangan							734.2		
Lumbung Pangan Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	99.5	Pusat, 28 provinsi	Kementerian
Lembaga Distribusi Pangan	Terbinanya lembaga Distribusi Pangan	800.0	800.0	800.0	800.0	800.0	604.4	Pusat, 22 provinsi	Kementerian
Pengembangan Pemasaran Peternakan	Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Peternakan	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6 Provinsi	Kementerian
Pengelolaan Informasi Pemasaran	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pemasaran	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	23.3	Pusat, 34 Provinsi	Kementerian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat							1,008.6		
Informasi Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan	Tersedianya informasi Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	750.9	Pusat, 34 provinsi	Kementerian
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0	67.1	Pusat, 34 provinsi	Kementerian
Pemantauan Stok, Akses, dan Kerawanan Pangan	Terlaksananya pemantauan Stok, Akses, dan Kerawanan Pangan	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	190.6	Pusat, 34 provinsi	Kementerian
ProP : Penyempurnaan Statistik Pertanian							0.0		
PP : Peningkatan pengelolaan kemitiriman dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*)	23.40	24.20	25.10	26.00	26.90	15,169.3		
	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	64	67	72	76	80			
KP : Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelola WPP (14.2.1(b))	11	11	11	11	11	577.4		
	Revitalisasi WPP dan menjamin akurasi pendataan stock dan pemanfaatan	11	11	11	11	11			
	Integrasi Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir	0	1	3	6	10			
ProP : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dikelola oleh lembaga	11	11	11	11	11	338.5		
Data dan/atau Informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	11	11	11	11	11	143.0	11 WPP	KKP
Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	Jumlah Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	11	11	11	11	11	19.2	11 WPP	KKP
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	11	11	11	11	146.1	11 WPP	KKP
Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	8	8	8	8	8	30.2	15 PUD	KKP
ProP : Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir							179.5		
Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Laut dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	6	6	6	6	8	41.9	32 perairan laut	KKP
Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki rencana zonasi dan rencana aksi pengelolaan ruang laut yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan	28	48	38	21	18	66.1	53 Kawasan	KKP
Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan zonasi	Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K	13	24	29	24	31	30.0	31 Provinsi	KKP
Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	22	34	34	34	34	41.5	34 Provinsi	KKP
ProP : Pemanfaatan Ruang Laut							59.4		
Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	22	34	34	34	34	41.5	34 Provinsi	KKP
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	Jumlah Kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya	4	5	5	5	5	17.9	Daerah	KKP

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan							360.2		
ProP : Pengembangan wisata bahari							318.2		
Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT	Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	100.0	18 Provinsi	KKP
Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif)	10,000,000	14,500,000	17,500,000	19,000,000	20,000,000	165.0	34 Provinsi	KKP
Keanelekagaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan	Jumlah Keanelekagaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	12	16	18	20	53.2	Pusat	KKP
ProP : Pengembangan marine bioproduct							42.0		
Pengelolaan Biofarmakologi	Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun	2	2	2	2	2	20.0	10 Provinsi	KKP
Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	6	6	7	7	7	22.0	Pusat	KKP
KP : Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan termasuk ikan, rumput laut dan garam	Produksi ikan	15.5	16.3	17.6	18.5	20.4	12,178.7		
	Produksi rumput laut	11.0	11.6	11.9	12.1	12.3			
	Produksi garam	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4			
ProP : Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Ikan	15.47	16.34	17.57	18.51	20.42	10,156.5		
Produksi induk unggul	Jumlah produksi induk unggul (ekor, non kumulatif)	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	327.1	34 provinsi	KKP
Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	48,960,722	50,000,000	51,000,000	52,000,000	54,000,000	163.1	34 provinsi	KKP
Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	158,520,000	159,000,000	160,000,000	161,000,000	162,000,000	127.1	34 provinsi	KKP
Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	8,277,000	7,700,000	7,800,000	7,900,000	8,000,000	259.8	34 provinsi	KKP
Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana UPT	15	10	10	10	10	339.1	10 provinsi	KKP
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan	80.0	110.0	120.0	140.0	150.0	114.0	34 provinsi	KKP
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha	551.0	700.0	800.0	900.0	1,000.0	351.7	34 provinsi	KKP
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan	38.0	125.0	125.0	125.0	125.0	674.2	10 provinsi	KKP
Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan pakan mandiri	91.0	100.0	110.0	120.0	130.0	147.0	34 provinsi	KKP
Kapal perikanan bantuan yang terbangun	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun	30	40	70	75	85	240.8	34 Provinsi	KKP
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	500	1,000	1,000	1,000	1,000	144.0	34 Provinsi	KKP
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Identifikasi dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera	6	6	6	6	6	1,110.4	6 lokasi	KKP
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Identifikasi dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara	15	16	16	18	18	824.0	18 lokasi	KKP
Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22.1	UPT Pusat dan UPT Daerah	KKP
Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	17,100	21,500	21,750	22,000	22,350	42.1		KKP

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) - Menu DAK Bidana KP	Jumlah pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan	60	70	80	90	100	1,670.0	32 Provinsi	Pemda/DAK
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil - Menu DAK Bidana KP	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil	350	350	350	350	350	3,600.0	34 Provinsi	Pemda/DAK
ProP : Pengembangan jaringan transportasi laut							0.0		
-							0.0		-
ProP : Peningkatan Produksi rumput laut	Jumlah Produksi Rumput Laut	11.0	16.8	17.8	18.9	20.0	82.0		
Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat	200,000	350,000.0	400,000.0	450,000.0	500,000.0	82.0	18 provinsi	KKP
ProP : Peningkatan Produksi garam	Jumlah Produksi Garam	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	880.1		
Lahan Garam yang difasilitasi	Jumlah lahan garam yang difasilitasi	600	750	750	750	750	405.0	32 provinsi	KKP
Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat	Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi/dibangun	74.0	100.0	100.0	100.0	100.0	235.1	15 provinsi	KKP
Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat	Jumlah sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	120.0	15 provinsi	KKP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam - Menu DAK	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana tambak garam	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	120.0	13 Provinsi	Pemda/DAK
ProP : Karantina Ikan dan jaminan mutu							1,060.2		
Sarana dan prasarana pengawasan karantina	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan karantina	25	28	30	32	32	448.7	10 Provinsi	KKP
Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan	Persentase pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara ekspor	98	98	98	98	98	136.9	34 Provinsi	KKP
Sarana dan prasarana pengujian mutu	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu	33	33	33	33	33	212.2	34 Provinsi	KKP
Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	167	167	167	167	167	103.6	34 Provinsi	KKP
Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan	95	95	95	95	95	27.9	34 Provinsi	KKP
Operasional pengawasan karantina ekspor impor dan domestik	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI	100	100	100	100	100	130.9	34 Provinsi	KKP
KP : Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (14.b.1(a))	34	34	34	34	34	398.2		
ProP : Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi	190,000	172,000	174,000	176,000	178,000	211.5		
Nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	170,000	150,000	150,000	150,000	150,000	185.5	34 Provinsi	KKP
Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi	Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	26.0	34 Provinsi	KKP
ProP : Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan							186.7		
Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	34.3	34 Provinsi	KKP
Kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata	Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata	40	60	60	60	60	42.5	25 Provinsi	KKP
Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (Bidang)	Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	19.3	23 Provinsi	KKP
Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan	Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan	15,000	15000	15,000	15,000	15,000	27.8	34 Provinsi	KKP
Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi	1,910	2000	2,050	2,100	2,150	31.7	34 Provinsi	KKP
Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif)	2,250	2400	2,550	2,750	3,000	16.6	34 Provinsi	KKP

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penumbuhan calon wirausaha KP	Jumlah calon wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan	100	100	100	100	100	11.0	34 Provinsi	KKP
Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP	Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	20	20	20	20	20	3.6	34 Provinsi	KKP
KP : Peningkatan SDM dan riset kematiriman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan	5	8	11	13	15	1,654.8		
ProP : Peningkatan SDM kelautan dan perikanan							1,075.7		
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	25,200	26,000	27,000	28,000	30,000	289.2	34 Provinsi	KKP
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluhan KP	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	41,000	42,000	43,000	44,000	45,000	543.6	34 Provinsi	KKP
Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Satuan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terstandar	7	7	7	7	10	242.9	Tegal, Banyuwangi, Ambon, Medan, Sukamandi, Bitung, Palembang	KKP
ProP : Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan							579.1		
Teknologi Hasil Riset Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan	30	30	30	30	30	108.4	5 Provinsi	KKP
Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	4	12	12	12	12	161.7	4 Provinsi	KKP
Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	7	7	7	7	7	216.2	7 Provinsi	KKP
Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	500	500	500	500	500	92.8	BROL-Perancak	KKP
PP : Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Rasio kewirausahaan nasional	3,55-3,80	3,67-3,77	3,70-3,90	3,72-4,02	3.95	6,240.7		
KP : Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan	7.0	7.8	8.5	9.3	10.0	534.6		
ProP : Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk							360.0		
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi produk	1,703	2,000	2,100	2,205	2,315	31.0	Pusat	Kemen KUKM
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distanadardisasi		250	300	350	400	450	43.7	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenparekraf
Jumlah Pengguna Pasar Lelang	Jumlah Pelaku Pengguna Pasar Lelang	430	430	430	430	430	9.5		Kemendag
Pembinaan Penerapan SPK bagi Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Jumlah pelaku usaha dan LPK yang mendapatkan bimbingan teknis SPK	225	300	300	300	300	43.2		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis	Jumlah stakeholder yang mendapatkan pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di kawasan industri yang telah eksisting	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	40.0		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Pengembangan IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	6	20	30	50	80	70.0		Kemenperin
Pengembangan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	8	20	40	60	80	52.7		Kemenperin
Pengembangan IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	6	20	30	50	80	70.0		Kemenperin
ProP : Perluasan Kemitraan Usaha							70.2		
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar	TERFASILITASINYA KEMITRAAN strategis ANTARA KUMK DENGAN USAHA MENENGAH (UM) DAN USAHA BESAR (UB)	150 KUMK di 3 Lokasi	170 KUMK di 3 Lokasi	179 KUMK di 3 Lokasi	187 KUMK di 3 Lokasi	197 KUMK di 4 Lokasi	38.8	Pusat	Kemen KUKM
Advokasi Kemitraan	Jumlah Advokasi Kemitraan	12	13	14	15	16	8.6	Pusat	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	Jumlah Perkara Pengawasan Kemitraan	18	19	20	22	24	21.1	Pusat	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan	2	3	4	5	6	1.6	Pusat	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra							104.4		
KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan	25	40	42	44	46	30.9	Pusat	Kemen KUKM
KUKM Sektor Perikanan dan Peternakan yang diperkuat kapasitas usaha melalui Kemitraan	Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang perikanan dan peternakan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan	25	40	42	44	46	33.4	Pusat	Kemen KUKM
KUKM bidang Industri dan Jasa yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan	KOPERASI/SENTRA USAHA MIKRO BIDANG INDUSTRI DAN JASA YANG DIPERKUAT KAPASITAS USAHANYA MELALUI KEMITRAAN	25	40	42	44	46	30.9	Pusat	Kemen KUKM
Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism	Jumlah Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism	20	21	22	23	24	9.3	Pusat	Kemen KUKM
KP : Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal (8.10.1(b))	25.2	26.5	27.8	29.3	30.8	558.5		
	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (8.10.1(b))	19.8	20.3	20.9	21.4	22.0			
	Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*)	2.4	2.8	3.4	4.1	5.0			
ProP : Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha							523.0		
Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (Start Up Capital)	Tersalurnya Dukungan Modal Awal Usaha kepada Wirausaha Pemula	1,900	2,000	2,100	2,205	2,315	167.1	Pusat	Kemen KUKM
Modal disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi		255	265	275	285	295	218.9	Pusat	Kemenparekraf
Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi		5,082	5,336	5,603	5,883	6,177	137.0	Pusat	Kemenparekraf
ProP : Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit							31.0		
Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang Didampingi Mengakses dan Mengelola Pembiayaan/Kredit KUR	Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi mangakses KUR	3,000	5,000	5,250	5,513	5,788	24.6	Pusat	Kemen KUKM
Usaha mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mengakses kredit melalui lembaga keuangan non bank	Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi melalui kerjasama dengan perusahaan fintech	-	750	788	827	868	6.5	Pusat	Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM							4.4		
Desain skema pembiayaan usaha	Jumlah skema pembiayaan yang dikembangkan	1	1	1	1	1	4.4		Kemen KUKM
KP : Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	216.4		
	Kenaikan volume usaha koperasi per tahun	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0			
ProP : Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi							169.8		
Petugas Penyaluh Koperasi Lapangan	Kenaikan jumlah PPKL	100	113	119	125	131	15.2		KemenKUKM
Pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan manajer koperasi	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	3,360	4,000	4,200	4,410	4,631	103.0	Pusat	Kemen KUKM
Pelatihan perkoperasian syariah bagi pengurus dan manajer koperasi	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	1,690	2,000	2,100	2,205	2,315	51.6	Pusat	Kemen KUKM
ProP : Pendampingan kelompok untuk membentuk koperasi							9.9		
Pendampingan kelompok pra koperasi untuk membentuk koperasi	Terlaksananya Penyaluhan Pembentukan Koperasi	500	300	331	347	599	9.9	Pusat	KemenKUKM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha							21.6		
Pengembangan akses dan jaringan koperasi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan jaringan dan akses ke dalam dan luar negeri	-	2	3	3	3	4.3	Pusat	Kemen KUKM
Konferensi Koperasi Nasional	Terselenggaranya Konferensi Koperasi	-	1	1	1	1	17.2	Pusat	Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Inovasi Koperasi							15.1		
Pengembangan inovasi koperasi	Jumlah Koperasi model baru yang dikembangkan	-	3	3	3	3	15.1	Pusat	Kemen KUKM
KP : Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha	Pertumbuhan wirausaha baru	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	4,877.6		
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0			
	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*)	18.5	18.9	19.3	19.6	20.0			
ProP : Pelatihan Kewirausahaan							2,771.4		
Pemberdayaan Kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan	Terlatihnya SDM KUMKM melalui pelatihan kewirausahaan	6,500	7,500	7,875	8,269	8,682	194.1	Pusat	Kemen KUKM
Wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	43,340	45,057	47,782	50,171	52,680	981.4	34 Provinsi	Kemnaker
Wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	Jumlah wirausaha usaha berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	5,000	5,250	5,513	5,788	6,078	150.7	34 Provinsi	Kemnaker
Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	Jumlah wirausaha muda pertanian yang ditumbuhkan	1,513	1,763	2,013	2,263	2,513	486.6	<i>Polbangtan (Medan, Bogor, Yogyakarta, Magelang, Malang, Gowa, Manokwari) dan SMK PP (Sembawa, Palembang, Banjarbaru Kalsel, Kupang NTT)</i>	
Pemuda yang difasilitasi sebagai kader wirausaha	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	46.9		KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Mahasiswa Mulai Berwirausaha	Jumlah Mahasiswa Mulai Berwirausaha	3,000	4,000	4,500	5,000	5,500	100.0	Pusat	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wirausaha yang Meningkat Pendapatannya Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Jumlah wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah tertinggal	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	41.8	Pusat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Techpreneur melalui Kerjasama Lembaga	Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi	1500	2000	2100	2205	2315	50.6	Pusat	Kemen KUKM
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	1,400	2,800	4,200	5,600	7,000	179.3	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenperin
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	1,400	2,800	4,200	5,600	7,000	156.8	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenperin
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	1,200	2,400	3,600	4,800	6,000	289.7	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenperin
SDM Koperasi dan UKM yang Difasilitasi Melalui SKKNI	Terfasilitasinya SDM KUKM Melalui SKKNI	2,400	2,520	2,646	2,778	2917	93.5	Pusat	Kemen KUKM
ProP : Inkubasi Usaha							504.6		
Fasilitasi Ide usaha melalui kompetisi dan inkubasi	Terlaksananya Jumlah Inkubator yang memberikan pendampingan pengembangan ide usaha	4	5	5	6	6	14.9	Pusat	Kemen KUKM
Wirausaha baru inkubasi bisnis	Jumlah wirausaha yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis	9,000	9,270	9,550	9,835	10,130	400.2	34 Provinsi	Kemnaker
Pre-Start Up yang Difasilitasi (termasuk melalui Digital Lab dan Digital Entrepreneurship)		250	300	350	400	450	89.5	Pusat	Kemenparekraf
ProP : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha							1,370.8		
Sarana prasarana layanan usaha terpadu	Terwujudnya pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (PLUT-KUMKM)	8	8	8	8	8	154.7	Pusat	Kemen KUKM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pedagang skala mikro informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi penetapan lokasi dan promosi	Tersedianya fasilitasi PKL untuk memperoleh kepastian tempat usaha	350	368	386	405	425	23,0	Pusat	Kemen KUKM
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta Permodalannya	Jumlah BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta Permodalannya	12	12	12	12	12	71,1		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	34	34	34	35	35	352,5	Pusat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peningkatan Kewirausahaan dan Bantuan Pemasaran	Jumlah bantuan sarana usaha perdagangan	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	644,8	Pusat	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan	Jumlah pelaku usaha dan aparatur yang mendapat pembinaan	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	74,7		KEMENTERIAN PERDAGANGAN
UMKM Go Online	Jumlah (Active Selling) UMKM Go Online	100,000	100,000	100,000	100,000	2,000	50,0		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ProP : Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah							230,8		
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur	Sentra IKM di Luar Pulau Jawa yang Beroperasi dan Sentra IKM yang Direvitalisasi	37	37	39	39	39	85,0		Kemenperin
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Sentra IKM di Luar Pulau Jawa yang Beroperasi dan Sentra IKM yang Direvitalisasi	36,0	37,0	39,0	39,0	40,0	62,3		Kemenperin
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Anakut	Sentra IKM di Luar Pulau Jawa yang Beroperasi dan Sentra IKM yang Direvitalisasi	22,0	24,0	26,0	29,0	32,0	83,5		Kemenperin
KP : Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Kontribusi usaha sosial	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	53,7		
ProP : Pendampingan akses permodalan bagi wirausaha sosial berbasis ekonomi kreatif							31,3		
Social Entrepreneur Mentoring Program		-	700	800	900	1,000	31,3		Kemenparekraf
ProP : Pembinaan Wirausaha Sosial							22,4		
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga		600	700	735	772	810	18,1	Pusat	Kemen KUKM
Forum Kewirausahaan Sosial		-	1	1	1	1	4,3	Pusat	Kemen KUKM
PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian	3,7					4,1	37,072,4	
	Kontribusi PDB kemaritiman	6,50	6,85	7,20	7,50	7,80			
	Pertumbuhan PDB industri (9.2.1(a))	5,00-5,40	5,10-6,56	5,22-7,23	5,45-7,45	5,93-8,35			
	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	4,80	5,00	5,20	5,30	5,50			
	Nilai tambah ekonomi kreatif	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689			
	Pertumbuhan investasi (PMTB)	6,00	5,8-6,5	5,9-6,9	6,0-7,5	6,1-8,0			
	Penyediaan lapangan kerja per tahun	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0			
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5			
	Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*)	14,2	14,6	14,95	15,3	15,7			
	Jumlah tenaga kerja industri	19,7	20,3	20,9	21,4	22			
	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*)	13	14	14	15	15			
	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19	20	20	21	21			
KP : Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	8,09-8,22	8,21-8,37	8,33-8,51	8,45-8,65	8,57-8,79	15,333,8		
	Kontribusi PDB industri (9.2.1*)	19,82-19,85	19,81-20,12	19,84-20,45	19,90-20,78	20,06-21,28			
	Pertumbuhan PDB industri non migas	5,58-6,00	5,68-7,24	5,79-7,92	5,94-8,09	6,11-8,36			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan Industri berbasis perkebunan							7,530,4		
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi	16000	16000	16000	16000	16000	1,010,4	24 Provinsi	Kementerian
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao	7150	7150	7150	7150	7150	570,8	14 Provinsi	Kementerian
Kawasan Karet	Kawasan Karet	13100	13100	13100	13100	13100	592,8	13 Provinsi	Kementerian
Kawasan Kelapa	Kawasan Kelapa	14205	14205	14205	14205	14205	323,0	15 Provinsi	Kementerian
Area Tanaman Sagu	Area Tanaman Sagu	300	300	300	300	300	4,9	1 Provinsi	Kementerian
Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahanan dan Penyegar Lainnya)	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahanan dan Penyegar Lainnya)	2220	2220	2220	2220	2220	64,7	5 Provinsi	Kementerian
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	69	69	69	69	69	70,8	15 Provinsi	Kementerian
Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	2800	2800	2800	2800	2800	37,9	15 Provinsi	Kementerian
Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan	7400	7400	7400	7400	7400	46,4	14 Provinsi	
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	1245	1245	1245	1245	1245	95,2	15 Provinsi	Kementerian
Perangkat Perlindungan Perkebunan	Perangkat Perlindungan Perkebunan	60	60	60	60	60	72,7	30 Provinsi	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Perlindungan Perkebunan	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Perlindungan Perkebunan	5	5	5	5	5	72,7	Pusat	Kementerian
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	15	15	15	15	15	7,3	13 Provinsi	Kementerian
Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	31	31	31	31	31	40,9	4 Provinsi	Kementerian
Penyediaan, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Sertifikasi dan pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	88734650	88734650	88734650	88734650	88734650	211,8	3 Provinsi	Kementerian
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	11425	11425	11425	11425	11425	459,7	13 Provinsi	Kementerian
Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya)	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya)	1380	1380	1380	1380	1380	40,9	10 Provinsi	Kementerian
Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	6	6	6	6	6	3,1	3 Provinsi	Kementerian
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah	38	38	38	38	38	56,8	20 Provinsi	Kementerian
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	75	75	75	75	75	41,5	32 Provinsi	Kementerian
Pemasaran Hasil Perkebunan	Pemasaran Hasil Perkebunan	35	35	35	35	35	14,0	17 Provinsi	Kementerian
Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	43500	43500	43500	43500	43500	943,8	22 Provinsi	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan rempah	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan rempah	4	4	4	4	4	56,2	Pusat	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	6	6	6	6	6	132,5	Pusat	Kementerian
Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Rekomendasi Benth Tanaman Perkebunan	203	203	203	203	203	68,4	33 Provinsi	Kementerian
Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan	Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan	101	101	101	101	101	48,2	33 Provinsi	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	4	4	4	4	4	78,1	Pusat	Kementerian
Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Tahanan dan Penyegar	Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Tahanan dan Penyegar	23	23	23	23	23	38,5	Pusat	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahanan dan Penyegar	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahanan dan Penyegar	7	7	7	7	7	64,1	Pusat	Kementerian
Nursery	Nursery	20	20	20	20	20	1,173,4	3 Provinsi	Kementerian
Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan	Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan	113	113	113	113	113	231,4	25 Provinsi	Kementerian
Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	146	146	146	146	146	269,2	27 Provinsi	Kementerian
Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	1915	1915	1915	1915	1915	216,1	33 Provinsi	Kementerian
Benih Tebu	Jumlah benih tebu yang dihasilkan	540	540	540	540	540	1,8	4 Provinsi	
Benih Tanaman Palma	Jumlah benih tanaman palma yang dihasilkan	196420	196420	196420	196420	196420	14,0	27 Provinsi	
Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	8	6	6	6	6	25,6	3 Provinsi	Kementerian

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Teknologi Tanaman Perkebunan	Teknologi Tanaman Perkebunan	22	22	22	22	22	50,7	3 Provinsi	Kementerian
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	3	3	3	3	3	93,4	2 Provinsi	Kementerian
Plasma Nutjah Tanaman Perkebunan	Plasma Nutjah Tanaman Perkebunan	5802	5802	5802	5802	5802	12,2	3 Provinsi	Kementerian
Kerjasama Litbang Perkebunan	Jejaring Kerjasama Litbang Perkebunan	5	5	5	5	5	4,3	3 Provinsi	Kementerian
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	14	14	14	14	14	28,7	3 Provinsi	Kementerian
Benih komoditas perkebunan non strategis	Benih komoditas perkebunan non strategis	1148520	1148520	1148520	1148520	1148520	54,9	27 Provinsi	Kementerian
Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB	Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB	1	1	1	1	1	37,2	3 Provinsi	Kementerian
VUB Bibit Tebu (Budget)	Jumlah VUB Bibit Tebu	3370000	3400000	3450000	3500000	4000000	5,5	2 Provinsi	Kementerian
Pendampingan Program Strategis	Jumlah Pendampingan Pragam Strategis	5	5	5	5	5	20,8	3 Provinsi	Kementerian
Benih Unggul Tebu Mendukung Kemandirian Benih	Jumlah Benih Unggul Tebu	0	0	0	0	0	0,0	2 Provinsi	Kementerian
Rekomendasi Kebijakan Perkebunan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkebunan	4	4	4	4	4	4,3	1 Provinsi	Kementerian
Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	18,7		Kemenperin
ProP : Pengembangan industri berbasis hortikultura							5,090,0		
Kawasan Bawang putih	Luas Kawasan Bawang putih	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	1,639,3	15 Provinsi	Kementerian
Kawasan Sayuran Lainnya	Luas Kawasan Sayuran Lainnya	760	760	760	760	760	78,1	Pusat, 12 provinsi	Kementerian
Benih Umbi	Luas Produksi Benih Umbi	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,570,000	106,9	31 Provinsi	Kementerian
Benih Batang	Luas Produksi Benih Batang	4,808,000	4,808,000	4,808,000	4,808,000	4,808,000	188,1	33 Provinsi	Kementerian
Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	32	32	32	32	32	30,6	Pusat	Kementerian
Penerapan PHT (PPHT)	Jumlah Penerapan PHT (PPHT)	180	180	180	180	180	48,3	30 Provinsi	Kementerian
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim	75	75	75	75	75	11,0	31 Provinsi	Kementerian
Sarana Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Jumlah Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	250	250	250	250	250	26,8		Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman	Peraturan/Norma/Pedoman	6	6	6	6	6	9,7	Pusat	Kementerian
Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	28	28	28	28	28	40,9	Pusat	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman	Peraturan/Norma/Pedoman	3	3	3	3	3	5,0	Pusat	Kementerian
GAP Buah dan Florikultura	Jumlah GAP Buah dan Florikultura	100	100	100	100	100	29,3	20 Provinsi	Kementerian
Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	15	15	15	15	15	32,9	Pusat	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman	Peraturan/Norma/Pedoman	9	9	9	9	9	14,6	Pusat	Kementerian
Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	17	17	17	17	17	51,9	Pusat	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman	Peraturan/Norma/Pedoman	4	4	4	4	4	6,0	Pusat	Kementerian
Registrasi Lahan Usaha		-	-	-	-	-	0,0		Kementerian
Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura	Jumlah Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura	50	50	50	50	50	20,1	17 Provinsi	Kementerian
Sertifikasi Benih Hortikultura	Jumlah Sertifikasi Benih Hortikultura	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	152,7	32 Provinsi	Kementerian
Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Jumlah Sarana Prasarana Benih Hortikultura	25	25	25	25	25	30,6	16 Provinsi	Kementerian
Kawasan Jeruk	Luas Kawasan Jeruk	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48,8	9 Provinsi	Kementerian
Kawasan Florikultura	Luas Kawasan Florikultura	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	274,8	12 Provinsi	Kementerian
Kawasan Buah Lainnya	Luas Kawasan Buah Lainnya	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	93,4	5 Provinsi	Kementerian
Kawasan Mangga	Luas Kawasan Mangga	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	67,8	7 Provinsi	Kementerian
Kawasan Manggis	Luas Kawasan Manggis	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	110,0	6 Provinsi	Kementerian
Kawasan Pisang	Luas Kawasan Pisang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	213,1	6 Provinsi	Kementerian
Kawasan Durian	Luas Kawasan Durian	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	87,9	10 Provinsi	Kementerian
Area Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah Area Pengendalian OPT Hortikultura	14,215	14,215	14,215	14,215	14,215	357,8	33 Provinsi	Kementerian
GHP Hortikultura	Jumlah GHP Hortikultura	50	50	50	50	50	12,8	16 Provinsi	Kementerian

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Jumlah Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura yang ter registrasi	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13.4	9 Provinsi	Kementerian
Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Sarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran hortikultura	462	462	462	462	462	305.9	34 Provinsi	Kementerian
Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Fasilitasi Prasarana Produk Hortikultura	46	46	46	46	46	68.4	19 Provinsi	Kementerian
Benih Kentang	Jumlah benih kentang yang dihasilkan	17,495	17,495	17,495	17,495	17,495	3.1	4 Provinsi	
Benih sayuran	Jumlah Benih Sayuran yang dihasilkan	-	-	-	-	-	0.0	7 Provinsi	
Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	5.0	2 Provinsi	Kementerian
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	3	3	3	3	3	93.4	2 Provinsi	Kementerian
Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura	Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura	17	20	23	25	27	26.8	3 Provinsi	Kementerian
Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	10	10	11	11	12	44.5	3 Provinsi	Kementerian
Benih Sayuran Lainnya	Benih Sayuran Lainnya	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	4.2	3 Provinsi	Kementerian
Benih Sumber Anggrek dan Tanaman Hias Lainnya	Benih Sumber Anggrek dan Tanaman Hias Lainnya	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0.0	1 Provinsi	Kementerian
Benih Sumber Krisan	Benih Sumber Krisan	360,000	370,000	380,000	390,000	400,000	3.2	1 Provinsi	Kementerian
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Hortikultura	Diseminasi, Inovasi, Teknologi Komoditas Hortikultura	12	12	12	12	12	63.4	3 Provinsi	Kementerian
Benih Bawang merah	Jumlah Benih Sumber dan Sebar Bawang Merah	34,400	35,890	37,380	38,870	40,360	0.0	1 Provinsi	Kementerian
VUB Bawang Merah dan Cabai	Jumlah VUB Bawang Merah dan Cabai	2	2	2	2	2	6.1	1 Provinsi	Kementerian
Benih bawang dan cabai	Jumlah Benih Bawang Merah dan Cabai	34,500	36,000	37,500	39,000	40,500	18.3	1 Provinsi	Kementerian
Teknologi Produksi Bawang Merah dan Cabai	Jumlah Teknologi Budidaya Bawang Merah dan Cabai	2	2	2	2	2	5.5	1 Provinsi	Kementerian
Rekomendasi Kebijakan Komoditas Hortikultura	Rekomendasi Kebijakan Komoditas Hortikultura	2	2	2	2	2	8.5	1 Provinsi	Kementerian
Benih kentang	Jumlah Benih Kentang	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0.5	1 Provinsi	Kementerian
Diseminasi Teknologi Pertanian	Jumlah paket teknologi yang terdiseminasi	125	190	190	190	190	630.6	33 Provinsi	Kementerian
ProP : Pengembangan industri berbasis tanaman obat							155.8		
GAP Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah GAP Sayuran dan Tanaman Obat	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	6.7	5 Provinsi	Kementerian
Kawasan Tanaman Obat	Luas Kawasan Tanaman Obat	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	47.6	11 Provinsi	Kementerian
Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	83.7	Pusat	Kementerian
Peraturan/Norma/Pedoman	Peraturan/Norma/Pedoman	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	Pusat	Kementerian
Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu	Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.8	1 Provinsi	Kementerian
ProP : Pengembangan industri berbasis kehutanan							81.6		
Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman (termasuk hutan energi), hutan rakyat, HTR, dll)	Jumlah produksi hasil hutan kayu	55	56	57	58	60	50.0		KLHK
Pengembangan industri kehutanan berbasis kayu	Jumlah Produk Kayu Olahan Bersertifikat Legalitas Kayu	45	45	45	45	45	6.8	Pusat	KLHK
Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu melalui Pembukaan Kran Ekspor Loo Terbatas	1	1	1	1	1	5.0	Pusat	KLHK, Kemenperin, Kemen Perdagangan, Kemenkeu
Pengembangan industri primer kehutanan berbasis nonkayu	Jumlah industri primer kehutanan berbasis nonkayu	6	6	7	7	7	13.0	Pusat	
Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (unit)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	6.8	Pusat	KLHK
ProP : Pengembangan industri Kemaritiman							1,520.0		
Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan	1	1	1	1	1	23.9		Kemenperin

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Industri Antara sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	jumlah produk hilir industri makanan, hasil laut dan perikanan	1	1	1	1	1	36.0		Kemenperin
Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan	Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang diadakan	35	40	45	45	45	385.2	34 Provinsi	KKP
Sarana distribusi hasil perikanan yang diadakan	Sarana Distribusi hasil perikanan yang diadakan	30	35	40	45	50	152.5	34 Provinsi	KKP
Pembangunan Pasar Ikan dan Sentra Kuliner	Pasar Ikan dan Sentra Kuliner yang dibangun	6	6	7	7	7	109.5	30 Provinsi	KKP
Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	Jumlah Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang dibangun	3	3	3	3	3	600.0	3 Provinsi	KKP
Promosi Skala internasional	Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional yang ditingkatkan	250	260	275	285	300	67.4	5 negara	KKP
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (dokumen)	2250	2500	2750	3000	3250	58.3	34 Provinsi	KKP
Penyediaan dan Optimalisasi Unit Pengolahan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan yang dimanfaatkan/dibangun	10	10	10	10	10	54.0	34 Provinsi	KKP
Sentra Pengolahan Hasil KP yang menerapkan konsep Zero Waste melalui pengembangan produk bernilai tambah	Jumlah Sentra Pengolahan Hasil KP yang menerapkan konsep Zero Waste melalui pengembangan produk bernilai tambah	1	1	1	1	1	21.4	5 Provinsi	KKP
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	200	200	200	200	200	11.9	34 Provinsi	KKP
ProP : Pengembangan industri Kimia, Farmasi dan Logam							955.9		
Pilot Project Industri daur ulang sampah plastik	Rasio impor bahan baku sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi terhadap PDB sektor industri non migas	2.07	2.06	2.04	2.02	1.99	37.0		Kemenperin
Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 - 2024)		75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	38.6		Kemenperin
Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	Jumlah Industri yang Terbangun	2	2	2	2	2	824.0	Pusat - Papua Barat	Kemenperin
Pengembangan Industri Antara sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyeagar	Peningkatan jumlah produk antara dan/atau hilir industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyeagar	-	1	1	1	1	56.3		Kemenperin
KP : Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa	5 KI - 8 KEK	9 KI - 8 KEK	12 KI - 8 KEK	15 KI - 8 KEK	16 KI - 8 KEK	1,298.6		
ProP : Pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi							1,227.7		
Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi Kawasan Industri	Kawasan Industri yang Difasilitasi Investasinya	3	5	7	9	11	1,189.2	Tersebar, kecuali Pulau jawa	Kemenperin
Database Kawasan Industri	Database Kawasan Industri	-	30.0	50.0	70.0	80.0	15.0		Kemenperin
Percepatan pembangunan smelter	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Smelter	4	26	1	-	-	23.5		KESDM
ProP : Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan nilai tambah							70.9		
Pengembangan Teknologi pembuatan logam neodium (logam tanah jarang) dari monazite untuk bahan permanen magnet	Pengembangan dan penelitian pembuatan strong magnet dari bahan baku monazite hingga rencangan skala komersial	Penelitian Teknologi solvent ekstraksi pembuatan neodium oksida	Pengembangan teknologi garam lebur dalam pembuatan logam neodium	Penelitian pencampuran logam neodium dengan boron dan besi untuk menjadi strong magnet permanen	Rancangan DED pembuatan strong magnet dari monazite skala komersial	-	11.0		KESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Teknologi pirolisis batubara untuk produksi syncrude oil ,COG dan batubara kualitas tinggi	Pembangunan dan pengembangan pilot plant teknologi pirolisis batubara hingga desain skala komersial	Pengadaan, perakitan, dan commissioning pilot plant pirolisis batubara di paliman dan kapasitas 25kg/jam	ujicoba formula produksi syncrude oil	ujicoba syncrude skala lab di Pertamina sebagai uji coba scale up pirolisis batubara skala komersial dan pemanfaatan syncrude pada kilang pertamina (satu rancangan bangun, 2 usulan naten)	-	-	9,8		
Pengembangan katalis sintetik untuk proses konversi syngas batubara menjadi DME	Pembuatan dan pengembangan katalis sintetik	Pembuatan dan uji aktifitas Katalis	Optimalisasi Pembuatan dan uji aktifitas Katalis terpilih	scale up pemanfaatan katalis	-	-	8,5		
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Mineral	Jumlah rekomendasi wilayah keprospekan mineral	14	16	16	16	16	40,8		KESDM
Dokumen Studi Kelayakan Mineral untuk mendukung Kawasan Industri	Jumlah dokumen studi kelayakan mineral untuk mendukung kawasan industri	4	4	4	4	4	0,8		KESDM
KP : Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan	3				8	16,188,4		
	Revitalisasi destinasi	0	0	1	1	1			
	Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas	25	25	25	25	25			
	Destinasi wisata bahari	8	8	8	8	8			
ProP : Pengembangan 25 Kawasan Hutan Prioritas untuk mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Destinasi wisata alam	25	25	25	25	25	1,800,0		
Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi (Bahari: TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate)	Jumlah Taman Nasional Laut	3	3	3	3	3	400,0		KLHK, KKP
Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) = TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanaama)	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	7	7	7	7	7	500,0		KLHK, Kemendikbud
Pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbang, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderawasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak)	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	15	15	15	15	15	900,0		KLHK
ProP : Pengembangan 21 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	Destinasi pariwisata prioritas						0,0		
ProP : Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 11 Destinasi Pariwisata Potensial							14,184,9		
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (KSPN Toba dskt dan KSPN Tanjung Kelayang dskt) + 4 DPP baru		2	4	6	6	6	72,0		Kemenparekraf
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (KSPN Borobudur dskt, KSPN Tanjung Lesung dskt, KSPN BTS dskt, KSPN Kota Tua-Kepulauan Seribu dskt) + 2 DPP baru		4	4	4	4	4	30,0		Kemenparekraf

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DPP Mandalika, DPP Morotai, KSPN Wakatobi, KSPN Labuan Bajo, Likupana)		5	5	5	5	5	45.0		Kemenparekraf
Revitalisasi Bali		1	1	0	0	0	3.0		Kemenparekraf
Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas		5	6	7	8	9	29.4		Kemenparekraf
Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas		15	15	15	15	15	21.0		Kemenparekraf
Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah		0	10	20	34	34	49.0		Kemenparekraf
KEK Danau Toba	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	17	13	13	13	1,333.0	Sumatera Utara	KemenPUPR
Lintas Utara Bali	Panjang jalan yang dibangun (m)		1083	1083	933		1,050.0	Bali	KemenPUPR
Jembatan Kapota	Panjang jembatan yang dibangun (m)					40	250.0	Sulawesi Tenggara	KemenPUPR
Akses KEK Mandalika	Panjang jalan yang dibangun (km)	(lahan)	6	6	6	0	1,399.8	Nusa Tenggara Barat	KemenPUPR
Akses KSPN Borobudur	Panjang jalan yang dibangun (km)		20				175.0	Yogyakarta	KemenPUPR
Akses KSPN Labuan Bajo	Panjang jalan yang dibangun (km)	6.681	21	21	21	21	1,402.2	Nusa Tenggara Timur	KemenPUPR
Akses KSPN Wakatobi	Panjang jalan yang dibangun (km)					30	225.0	Sulawesi Tenggara	KemenPUPR
Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	Panjang jalan yang dibangun (km)					20	223.0	Jawa Timur	KemenPUPR
Akses Likupang (KPBU)	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Sulawesi Utara	KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	Terbangunnya KA akses Bandara (km)		6				1,100.0	DIY	Kemenhub
Pelabuhan Benoa	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1	1	1	184.6	Bali	Kemenhub, Badan Usaha
6. Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	900.0	Kabupaten Badung-Bali	Kemenhub, BUMN
7. Bandara Lombok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	350.0	Nusa Tenggara Barat	Kemenhub, BUMN
9. Bandara Samratulangi	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	100.0	Sulawesi Utara	Kemenhub, BUMN
12. Bandara Kualanamu	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	200.0	Sumatera Utara	Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Matahara (Wakatobi)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	288.2	Kabupaten Wakatobi	Kemenhub
Pengembangan Bandara Labuhan Bajo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	391.0	Kabupaten Manggarai Barat	Kemenhub
Pengembangan Bandara Sibisa	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	0	80.0	Kabupaten Parapat	Kemenhub
Market sounding di destinasi investasi		0	4	4	4	4	16.0		Kemenparekraf
Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata		0	1	2	2	2	21.0		Kemenparekraf
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat		0	10	10	10	10	8.4		Kemenparekraf
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas		0	4	5	6	7	44.0		Kemenparekraf
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah		0	10	10	10	10	8.4		Kemenparekraf
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas		0	4	5	6	7	44.0		Kemenparekraf
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayahTimur		0	10	10	10	10	8.4		Kemenparekraf
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas		0	4	5	6	7	44.0		Kemenparekraf
Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		1	1	1	1	1	10.0		Kemenparekraf
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		8	8	8	8	8	1,629.0		Kemenparekraf
Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		7	7	7	7	7	45.0		Kemenparekraf
Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur		3	3	3	3	3	15.0		Kemenparekraf
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur		3	3	3	3	3	693.5		Kemenparekraf

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur		2	2	4	4	4	32,0		Kemenparekraf
Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo		1	1	1	1	1	3,7		Kemenparekraf
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksebilitas, Dan Amentitas Badan Otorita Labuan Bajo		11	11	11	11	11	960,0		Kemenparekraf
Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo		3	3	5	5	5	35,0		Kemenparekraf
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Rencana BO Wakatobi		1	0	0	0	0	2,0		Kemenparekraf
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Rencana BO BTS		1	0	0	0	0	2,0		Kemenparekraf
Layanan Investasi Badan Otorita Wakatobi		3	4	5	5	5	6,5		Kemenparekraf
Layanan Investasi Badan Otorita BTS		3	3	3	3	3	2,5		Kemenparekraf
Promosi Pariwisata Badan Otorita BTS		3	0	0	0	0	1,0		Kemenparekraf
Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP)		1	3	3	3	3	28,6		Kemenparekraf
Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas		5	5	5	5	5	12,5		Kemenparekraf
Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan		4	5	5	5	5	42,0		Kemenparekraf
Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata		2	3	4	5	5	28,5		Kemenparekraf
Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage)		4	5	6	5	0	29,0		Kemenparekraf
Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya		5	5	5	5	5	25,0		Kemenparekraf
Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha		0	5	5	5	8	23,0		Kemenparekraf
Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja		0	5	5	5	8	23,0		Kemenparekraf
Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya		0	5	5	5	8	23,0		Kemenparekraf
Peningkatan Bidding MICE Internasional		6	10	12	15	18	61,0		Kemenparekraf
Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan		10	12	14	15	15	69,3		Kemenparekraf
Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan		0	8	8	4	4	48,0		Kemenparekraf
Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahrani dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan		0	7	7	7	7	56,0		Kemenparekraf
Kajian Pengembangan Kepariwisataan		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0		Kemenparekraf
Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata		10,0	15,0	17,0	20,0	20,0	36,9		Kemenparekraf
Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata		2,0	5,0	8,0	10,0	10,0	17,5		Kemenparekraf
Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		Kemenparekraf
Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata		0,0	5,0	6,0	7,0	8,0	26,0		Kemenparekraf
Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0		Kemenparekraf
Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	40,0		Kemenparekraf
Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat		0,0	500,0	750,0	1,000,0	1,250,0	10,5		Kemenparekraf

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas		11.0	13.0	15.0	17.0	20.0	34.5		Kemenparekraf
ProP : Pengembangan 12 klaster destinasi wisata alam berbasis hutan dan ekosistem di dalamnya							144.0		
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)		0	5	5	5	5	40.0		Kemenparekraf
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)		0	5	7	7	7	52.0		Kemenparekraf
Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)		0	5	6	7	8	52.0		Kemenparekraf
ProP : Pengembangan 19 Destinasi Pariwisata Geopark							59.5		
Pusat informasi Geopark	Jumlah pusat informasi Geopark/Geologi	2	2	2	2	2	49.3		KESDM
Rekomendasi Penetapan Geoheritage	Jumlah Rekomendasi Penetapan Geoheritage	0	4	4	4	4	10.2		KESDM
KP : Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5.3	5,34-5,5	5,38-5,7	5,42-5,9	5,45-6,10	1,692.6		
	Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi	7,26-7,54	7,40-7,95	7,40-8,22	7,54-8,37	7,54-8,78			
	Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi	4	6	8	10	12			
	Jumlah klaster kreatif yang dikembangkan	8	8	8	8	10			
	Revitalisasi ruang kreatif	25	29	33	37	40			
ProP : Penyediaan insentif inovasi dan pengembangan brand	Skema pembiayaan berbasis HKI	1	1	1	1	1	134.7		
Geraipusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan (Geraipusat)		3	3	3	3	3	87.7		Kemenparekraf
Kebijakan Ekosistem Industri Film Nasional (termasuk Pilot Project) (Kebijakan)		1	1	1	1	1	47.0	Pusat	Kemenparekraf
ProP : Penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI							216.9		
Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)		4,300	4,400	4,500	4,600	4,700	81.7	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenparekraf
ProdukJasa Ekraf yang didaftarkan (ProdukJasa)		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	110.8	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenparekraf
Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)		200	210	220	230	240	24.4	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenparekraf
ProP : Fasilitasi rantai pasok dan scale-up karya dan platform kreatif unggulan							152.3		
Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (termasuk komersialisasi hasil riset)		25	25	25	25	25	152.3	Pusat	Kemenparekraf
ProP : Peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif							55.3		
Kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan		4	8	12	16	20	55.3	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenparekraf
ProP : Pengembangan 'start-up parks' dan center of excellence							384.2		
Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB, Friend Of Creative Economy Menjadi Suboutput)		5	5	5	5	5	149.2	Pusat	Kemenparekraf
Be Creative District (BCD)		2	2	2	2	2	235.0	Jawa Barat dan Banten	Kemenparekraf
ProP : Pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif							749.3		
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi		8,500	10,125	11,750	13,375	15,000	244.5	Pusat	Kemenparekraf

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif		4	4	4	4	4	47.0	0	Kemenparekraf
Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi		30	34	38	42	46	402.6	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenparekraf
Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif		3	4	5	6	7	55.2	Pusat	Kemenparekraf
KP : Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EODB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: -jumlah prosedur -waktu	menuju 40 10 prosedur 8 hari				menuju 40 5 prosedur 4 hari	2,385.6		
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	886	991,3	1128,30	1294,10	1.500,0			
	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	47.4	47.8	48.3	48.9	49.5			
	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	246,3	310.3	410,7	569,4	825,0			
	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksana Bertahap	Terlaksana Bertahap	Terlaksana Bertahap	Terlaksana Bertahap	Selesai			
	Capex BUMN	523,4-559,8	568,5-609,1	617,1-664,5	670,4-725,4	728,2-793,4			
ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi							931.6		
Standarisasi tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Jumlah usulan standard tatakelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	1	1	1	1	1	7.7	Pusat	BKPM
Standardisasi sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Jumlah usulan sistem informasi standarisasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	1	1	1	1	1	5.7	Pusat	BKPM
Rencana Aksi peningkatan peringkat EoDB	Jumlah rekomendasi usulan untuk meningkatkan kemudahan berusaha	10	10	10	10	10	21.1	Jakarta, Surabaya, Pusat	BKPM
Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	10	10	10	10	10	35.8	Pusat	BKPM
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	2	2	2	2	2	8.7	Pusat	BKPM
Pengawasan Pelaku Usaha	Jumlah kajian pengawasan persaingan usaha	7	8	9	10	11	21.4	Pusat	KPPU
Pengawasan Pelaku Usaha di Daerah	Jumlah pengawasan pelaku usaha di daerah	18	18	20	22	24	7.3	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel	KPPU
Investigasi Pelanggaran Persaingan Usaha	Jumlah investigasi pelanggaran persaingan usaha	100	105	110	115	120	39.4	Pusat	KPPU
Rekomendasi Perkara Persaingan Daerah	Jumlah rekomendasi perkara persaingan usaha di daerah	36	39	42	45	48	12.1	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel	KPPU
Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha	Jumlah perkara pelanggaran persaingan usaha yang ditindak	32	37	39	46	48	21.7	Pusat	KPPU
Penilaian Merger dan Akuisisi	Jumlah penilaian merger dan akuisisi	39	44	50	55	60	25.3	Pusat	KPPU
Penanganan Perkara Persaingan Usaha	Jumlah perkara persaingan usaha yang ditangani	45	48	51	53	56	76.4	Pusat	KPPU
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kmetrologian	Jumlah pejabat fungsional bidang kmetrologian yang diberikan pembinaan	400	400	400	400	400	3.1		Kementerian Perdagangan
Pengawasan Barang Beredar terhadap Ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi, dan Label	Jumlah pengawasan barang beredar terhadap ketentuan SNI, MKG, dan Label	660	670	680	690	700	34.8		Kementerian Perdagangan
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ	Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang diberikan pembinaan	115	115	115	115	115	17.7		Kementerian Perdagangan
Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN	Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN yang diberikan pembinaan	150	150	150	150	150	26.3		Kementerian Perdagangan
Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang diawasi	150	160	170	180	190	34.2		Kementerian Perdagangan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Daya Saing Sektor IKFT		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	24.9		Kemenperin
Peningkatan Peluang Investasi Sektoral dan Perwilayah	Jumlah LOI Investment yang Tersepakati	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0	9.3		Kemenperin
Partisipasi Indonesia Sebagai Partner Country Hannover Messe 2020	Jumlah Kesepakatan Industri Dalam Jaringan Produksi Global	10.0	2.0	2.0	2.0	2.0	498.7		Kemenperin
ProP : Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi							1,308.6		
Pengadaan Licensi/ATS yang mendukung OSS	Pengadaan Perpanjangan Licensi/ Annual Technical Support (ATS)	1.0					28.2	Pusat	BKPM
Pengembangan Data Center dan DRC yang mendukung OSS	Jumlah pengembangan data center, DRC, jaringan dan sistem keamanan informasi yang handal	1.0					30.9	Pusat	BKPM
Peningkatan mutu pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat	Tingkat mutu pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat	3.20					10.0	Pusat	BKPM
Partisipasi dalam kerjasama internasional	Jumlah Partisipasi dalam Kerjasama Internasional	14	16	16	20	20	28.0	Pusat	BKPM
Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal	Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal	14	16	16	20	20	3.4	Pusat	BKPM
Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan pemangku kepentingan usaha	Jumlah kerjasama penanaman modal dengan Pemangku Kepentingan Usaha di dalam dan luar negeri	3	3	4	4	4	5.7	Pusat	BKPM
Penyelenggaraan fasilitasi minat outward investment	Jumlah forum fasilitasi minat outward investment kepada perusahaan nasional	15	15	17	20	25	5.9	Pusat	BKPM
Perkuatan peta potensi dan peluang investasi daerah	Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	15	15	17	17	20	33.8	Daerah di 34 Provinsi	BKPM
Penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di luar negeri	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	235.9	Pusat	BKPM
Penyusunan analisis negara target dan negara pesaing	Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	2	4	4	5	5	11.1	Pusat	BKPM
Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional	Jumlah minat investasi melalui kegiatan pemasaran investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, Kl, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan)	1,700	1,750	1,750	1,800	1,900	154.5	Pusat	BKPM
Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri	350	350	350	350	350	26.4	Daerah di 34 Provinsi	BKPM
Keikutsertaan Pada Pameran Penanaman Modal di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah minat investasi yang dicapai melalui keikutsertaan pameran penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri	700	750	750	800	800	17.3	Pusat	BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I	20	20	22	24	24	14.6	Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat	BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II	33	33	35	35	37	13.0	Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat	BKPM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah III	50	60	65	65	67	13.2	Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat	BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	30	32	32	34	35	18.1	Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Pusat	BKPM
Penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP	PTSP yang Ditetapkan Kualifikasi Kinerja Lembaga dan pelaksanaan percepatan berusaha K/L dan Daerah	565	565	565	565	565	32.8	Daerah di 34 Provinsi	BKPM
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang terfasilitasi	10	10	10	10	10	4.1	Pusat	BKPM
Evaluasi Rencana Strategis BKPM	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Strategis BKPM	1	1	1	1	1	6.1	Pusat	BKPM
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	1	1	1	1	1	6.0	Pusat	BKPM
Fasilitasi rencana penanaman modal di bidang industri manufaktur	Jumlah Proyek di Sektor Industri Manufaktur yang terfasilitasi	6	6	6	6	6	4.1	Pusat	BKPM
Fasilitasi rencana penanaman modal di daerah	Jumlah Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	6	8	10	12	9.0	Daerah di 34 Provinsi	BKPM
Evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMP/RUPMK)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota	20	22	24	26	28	4.1	Daerah di 34 Provinsi	BKPM
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	Jumlah Profil Projek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	1	1	1	1	1	9.9	Pusat	BKPM
Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	Jumlah Proyek Prioritas Pemerintah yang Terfasilitasi	7	9	12	15	20	8.9	Pusat	BKPM
Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	5	5	5	6	7	3.7	Daerah di 34 Provinsi	BKPM
Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	3	3	3	3	3	11.5	Pusat	BKPM
Fasilitasi rencana investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs)	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBUs	5	5	5	7	7	7.6	Pusat	BKPM
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur	10	10	10	12	12	10.4	Pusat	BKPM
Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur 2020-2024	Jumlah kajian analisis strategik penanaman modal berbasis infrastruktur	1	1	1	1	1	1.8	Pusat	BKPM
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1	1	1	2	2	5.5	Pusat	BKPM
Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen tata kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8	8	8	10	12	23.2	Pusat	BKPM
Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Inventarisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Pusat dan Daerah	100	70	70	70	300	27.7	Daerah di 34 Provinsi	BKPM
Pengembangan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	5	5	5	5	90.6	Pusat	BKPM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	70	70	70	300	68.3	Daerah di 34 Provinsi	BKPM
Evaluasi Kebijakan Pemerintah	Jumlah kajian kebijakan terkait persaingan usaha	7	9	9	11	11	17.4	pusat	KPPU
Advokasi Persaingan Usaha	Jumlah advokasi persaingan usaha	15	15	16	17	18	10.9	pusat	KPPU
Harmonisasi Kebijakan Persaingan Daerah	Jumlah kebijakan daerah yang harmonis dengan nilai persaingan usaha sehat	18	22	26	30	36	19.5	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel	KPPU
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyebar	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	31.2	Pusat	Kemenperin
Perusahaan Restrukturisasi Industri Tekstil, Kult dan Alas Kaki	Jumlah Perusahaan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang melakukan transformasi IR 4.0	25.0	100.0	100.0	100.0	100.0	155.8		Kemenperin
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan galian Nonloam	Perusahaan yang melakukan transformasi IR 4.0 sektor Industri Semen Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	12.0		Kemenperin
Rekomendasi Sumber Daya Potensi Batubara	Jumlah rekomendasi Sumber Daya batubara	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	54.6		KESDM
Komitmen investasi perusahaan multinasional	Komitmen investasi perusahaan multinasional	-	2.0	3.0	4.0	5.0	13.0		Kemenperin
Layanan pendampingan investasi perusahaan multinasional	Layanan pendampingan investasi perusahaan multinasional	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	9.0		Kemenperin
ProP : Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial							126.8		
Perusahaan yang mendapatkan pemahaman mengenai penyusunan struktur skala upah	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang telah menerapkan struktur dan skala upah dan mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan pengupahan	500	500	500	500	500	14.1	34 provinsi	Kemnaker
Perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan SMK3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50.7	34 provinsi	Kemnaker
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja		8000	8,400	8,820	9,261	9,724	62.0	34 provinsi	Kemnaker
ProP : Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas, serta Daya Saing BUMN							18.6		
Pembentukan holding BUMN	Jumlah holding BUMN	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.8	Pusat	Kementerian BUMN
Peningkatan pasar ke luar negeri	Jumlah Negara Tujuan Eksport BUMN	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	15.9	Pusat	Kementerian BUMN
KP : Pengembangan industri halal	Pengeluaran perkapita untuk industri halal						173.4		
ProP : Pengembangan Infrastruktur Industri Halal							173.4		
Pengembangan kawasan industri halal	Jumlah kawasan industri halal	2	2	3	3	3	29.4	Pulo Gadung (DKI Jakarta), Cikande (Banten) dan Muko Kuning (Kepulauan Riau)	Kemenperin
Daerah Tertib Ukur	Jumlah Daerah Tertib Ukur	10	10	10	10	10	16.2	Pusat	Kementerian Perdagangan
Pengawasan Kemetrologian	Pengawasan Kemetrologian	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	55.6	Pusat	Kementerian Perdagangan
Perumusan Standar Nasional Indonesia bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal	Jumlah Standar Nasional Indonesia bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal yang ditetapkan	200	300	300	300	300	46.0	Pusat	Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Indonesia-Middle East and Islamic Countries Summit on Halal Industries 2020	1. Declaration on Halal Industry 2. Work Plan Strategies to Enhance Halal Industries Collaboration 3. Halal Industries Network and Forum	3	-	-	-	-	26.3	Pusat	Kemenlu
PP : Peningkatan ekspor bermilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	3,54-4,10	3,69-4,43	4,09-4,93	4,47-5,54	5,01-5,99	12,468.0		
	Neraca perdagangan barang	-0,6 s/d 2,0	-1,9 s/d 3,7	-2,8 s/d 5,9	-3,1 s/d 9,3	-1,2 s/d 15,0			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar)	19-21	21-24	24-27	26-29	28			
KP : Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pertumbuhan ekspor pertanian	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	759,9		
	Ekspor hasil pertanian	30.305,03				33.327,1			
	Ekspor hasil perikanan	6,17	6,63	7,13	7,66	8,24			
	Kontribusi ekspor industri	49,0-50,0	51,0-53,0	53,0-56,5	55,5-60,5	58,0-65,0			
	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	10,8-11,0	11,4-12,0	11,9-13,0	12,5-14,0	13,0			
	Pertumbuhan ekspor non migas	4,1-4,7	4,9-6,1	5,9-7,4	6,9-8,6	7,8-9,6			
	Rasio ekspor jasa terhadap PDB	2,6	2,6	2,6-2,7	2,6-2,8	2,7-2,9			
	Nilai ekspor produk industri kehutanan	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5			
ProP : Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa							286,7		
- Penyusunan Dokumen Business Plan Green Gasoline Stand Alone Berbahan Baku Minyak Kelapa Sawit	Percentase peningkatan penyerapan bahan baku dalam negeri	10	12	15	17	19	14,7		Kemenperin
- Penyusunan Studi Kelayakan industri IVO/ILO									
- Penyusunan Detail Engineering Design (DED) industri IVO/ILO									
Penyusunan Konsep Pengembangan Bill Of Materials Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	-	1	1	1	1	13,1		Kemenperin
Penyusunan Pedoman Teknis Penanganan Pengotor dan Peningkatan recovery rate kertas bekas dalam negeri sebagai bahan baku industri kertas	Recovery berpenerimaan kertas daur ulang dalam negeri untuk bahan baku	50	55	58	62	65	8,5		Kemenperin
Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi, peningkatan daya saing dan ekspor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Percentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	85,8		Kemenperin
Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah proyek investasi	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73,9		Kemenperin
Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri tekstil, kulit dan alas kaki [Base Line]	Peningkatan Kapasitas produksi Sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	10	10	10	10	10	17,9		Kemenperin
Pembangunan Center of Excellence Produk Kimia Hilir Lainnya berbasis minyak							40,0		Kemenperin
Fasilitasi Implementasi Industri 4.0 di Industri Makanan	Percentase peningkatan penyerapan bahan baku dalam negeri	5	5	5	5	5	0,0		Kemenperin
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor		400	500	525	551	579	32,9	Pusat	KemenKUKM
ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa							473,3		
Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah contoh/sampel yang diuji mutu barang	4,500,0	4,600,0	4,700,0	4,800,0	4,900,0	57,4		Kementerian Perdagangan
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Jumlah pejabat fungsional penguji mutu barang yang diberikan pembinaan	150	150	150	150	150	12,2		Kementerian Perdagangan
Pemantauan Mutu BOKOR	Jumlah pemantauan mutu bokor	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	15,1		Kementerian Perdagangan
Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat/sampel yang diuji layanan kalibrasi	7,100,0	7,120,0	7,140,0	7,160,0	7,180,0	20,3		Kementerian Perdagangan
Layanan Sertifikasi	Jumlah layanan sertifikasi	169	179	189	199	209	13,1		Kementerian Perdagangan
Peningkatan Peran Indonesian Design Development Center	Jumlah desain produk yang dikembangkan melalui IDDC	70	80	90	100	110	55,1		Kementerian Perdagangan
Fasilitasi Pengembangan produk Ekspor	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	16,1		Kementerian Perdagangan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Produk Ekspor Jasa dan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekspor sektor jasa dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0		Kementerian Perdagangan
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Jumlah pendidikan dan pelatihan ekspor	119	124	129	134	139	70.8		Kementerian Perdagangan
Export Coaching Program	Jumlah peserta export coaching program	125	150	175	200	225	26.4		Kementerian Perdagangan
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Jumlah fasilitasi kebijakan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertanian dan kehutanan	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	26.6		Kementerian Perdagangan
Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM	Jumlah UKM yang diberikan fasilitasi promosi dan diklat	500.0	550.0	600.0	650.0	700.0	99.4		Kementerian Perdagangan
Kebijakan Ekspor Produk Industri	Jumlah Peraturan Menteri terkait ekspor produk industri	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.6		Kementerian Perdagangan
KP : Peningkatan akses dan pendalamannya pasar ekspor	Jumlah negara tujuan ekspor	219.0	220.0	221.0	222.0	223.0	2,214.9		
	Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	0.8	1.3	1.8	2.3	2.8			
	Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2			
ProP : Peningkatan pangsa Pasar Produk Indonesia							757.2		
Pusat Promosi Ekspor Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pusat promosi ekspor dalam dan luar negeri	7	7	7	7	7	40.9	Sydney, Jeddah, Lagos, Hongkong, Skow, Nunukan, Atambua	Kementerian Perdagangan
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang utama	6	10	15	20	25	41.4	Pusat	Kementerian Perdagangan
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	4	7	10	15	20	27.9	Pusat	Kementerian Perdagangan
Layanan Customer Service Center (Export helpdesk) Online/Offline	Jumlah export helpdesk	1	1	1	1	1	19.5	Pengumpulan data dilakukan di daerah(Jateng, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku)	Kementerian Perdagangan
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang utama	11	15	20	25	30	101.0	Amerika Serikat, Eropa Barat, Vietnam, Jepang, Australia	Kementerian Perdagangan
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	4	10	15	20	25	138.8	Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Eropa Timur	Kementerian Perdagangan
Kegiatan Pencitraan	Jumlah kegiatan pencitraan	11	11	11	11	11	27.5	Pusat	Kementerian Perdagangan
Promosi Produk Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	Jumlah Promosi Produk Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	6	6	6	6	6	67.2	Jakarta, Surabaya	Kementerian Perdagangan
Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	5	5	5	5	5	12.6	Swiss, Amerika Serikat, RRT, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat	Kementerian Perdagangan
Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah kerjasama pengembangan ekspor	750	770	790	810	830	16.8	Jateng, Jatim, Kaltim, Sumut, Sumsel, Bali	Kementerian Perdagangan
Pengembangan Kerjasama Ekspor Sektor Jasa	Jumlah kerjasama pengembangan ekspor sektor jasa	2	2	2	2	2	3.2	Jabar, Banten	Kementerian Perdagangan
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama	6	6	6	6	6	7.0	Sulsel, NTT, Kalbar, Jabar, Yogyakarta, Jatim	Kementerian Perdagangan
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar		29	31	33	35	37	54.9		Kementerian Perdagangan
Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor	Jumlah informasi standar mitra tujuan ekspor	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	4.9		Kementerian Perdagangan
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Jumlah pengamanan dan perlindungan akses pasar	29	31	33	35	37	54.9		Kementerian Perdagangan
Buyer Inquiry	Jumlah buyer inquiry	9	12	15	18	21	75.0		Kementerian Perdagangan
Promosi dan Pemasaran Luar Negeri		140	200	210	221	232	63.7		KemenKUKM
ProP : Fasilitasi ekspor							514.2		

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor untuk Pelaku/Usaha Kreatif		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	158.2	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Kemenparekraf
Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif		10	11	12	13	14	57.5	Pusat	Kemenparekraf
Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri		32	32	32	32	32	258.8		Kemenparekraf
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor Melalui Intrade	Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui Intrade	1	1	1	1	1	10.8		Kementerian Perdagangan
Skema Fasilitasi Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia dan Fasilitasi Perdagangan Lainnya	Jumlah Skema Fasilitasi Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia dan Fasilitasi Perdagangan Lainnya	1	1	1	1	1	8.3		Kementerian Perdagangan
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	Jumlah Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	1	1	1	1	1	6.7		Kementerian Perdagangan
Dukungan terhadap Implementasi Fasilitasi Perdagangan (KNFP)	Jumlah layanan KNFP	1	1	1	1	1	13.8		Kementerian Perdagangan
ProP : Peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor							943.5		
Export Coaching bagi Dunia Usaha Sektor Industri Agro	Persentase perusahaan yang melakukan tindaklanjut peningkatan ekspor	5	5	5	5	5	31.2		Kemenperin
Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional	Persentase perusahaan yang melakukan tindaklanjut peningkatan ekspor	5	5	5	5	5	56.1		Kemenperin
Perusahaan Restrukturisasi Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	Perusahaan Industri TPT yang difasilitasi/didampingi/diberikan insentif (SDM, Teknologi, Manajemen/organisasi) dalam rangka penerapan industri 4.0	25.00	300.00	300.00	300.00	300.00	92.0		Kemenperin
Temu Bisnis Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian							142.0		Kemenperin
Industri permesinan dan alat mesin pertanian yang berkontribusi dalam peningkatan ekspor							32.0		Kemenperin
Rekomendasi industrial & market intelligent	Rekomendasi industrial & market intelligent	6	8	10	10	12	66.0		Kemenperin
Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Jumlah Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada tahun berjalan	10	10	10	10	10	6.9		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	Jumlah penilaian Akreditasi Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan yang diakreditasi pada tahun berjalan	1085	1200	1300	1400	1500	108.3		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran	Jumlah pembangunan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	1					70.0		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Penilaian Akreditasi Lembaga Sertifikasi	Jumlah penilaian akreditasi lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi pada tahun berjalan	360	400	500	600	700	52.4		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Sistem dan Skema Akreditasi	Jumlah sistem dan skema akreditasi	14	14	14	14	14	38.0		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Jumlah sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) yang terintegrasi	1	1	1	1	1	40.0		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Penelitian Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Jumlah penelitian, pengembangan, kajian bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)	4	10	10	10	10	43.7		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Roadmap pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Jumlah rekomendasi roadmap pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	1					1.0		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Pelatihan dan Pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)	3	3	3	3	3	36.4		Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Keahlian Spesifik Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi Standards Professionals Indonesia	Jumlah kegiatan pengembangan Keahlian Spesifik Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi Standards Professionals Indonesia	1					1.0		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Skema Penerapan Standar	Jumlah Skema Penerapan Standar	75	100	100	100	100	19.4		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Regulasi yang diharmonisasikan berdasarkan SPK	Jumlah Regulasi yang diharmonisasikan berdasarkan SPK	10	10	10	10	10	22.6		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi, dan Biologi	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	61	64	66	67	68	39.8		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia yang tertelusur dan diakui secara Internasional	69	72	75	76	75	44.9		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
KP : Pengelolaan impor	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	43.3				50	310.1		
	Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000			
	Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b))	310	320-333	330-355	340-378	350-400			
ProP : Penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri							310.1		
Industri Dalam Negeri (IDN) yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Industri	Jumlah Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	12	12	13	14	15	10.0		Kemenperin
Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri	9	10	10	11	12	26.2		Kemenperin
Industri alat kesehatan yang memproduksi alat kesehatan di dalam negeri	Jumlah alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri.	7	7	7	7	7	46.6	Industri Alkes di Provinsi/Kabupaten/Kota	Kemenkes
Pengawasan Post Border	Jumlah Pengawasan Post Border	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	137.2		Kementerian Perdagangan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	77.1		Kementerian Perdagangan
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Impor di Post Border	Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan impor di post border	1	1	1	1	1	13.0		Kementerian Perdagangan
KP : Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	25.0		
ProP : Pengembangan sistem katalog							25.0		
Dorongan penggunaan dalam negeri dalam Pengadaan barang & Jasa terkait TKDN melalui e-purchasing(Pusat P3DN)	Nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah (e-purchasing)	1.00	1.25	1.50	1.70	2.00	25.0		Kemenperin
KP : Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global	3	4	4	5	5	688.0		
ProP : Peningkatan investasi (inbound & outbound) industri GPN berbasis hilirisasi SDA, teknologi tinggi							688.0		
Kebijakan Impor Dalam Rangka Penguatan Struktur Impor Bahan Baku dan Penolong	Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Baku dan Penolong	9	8	7	6	5	11.8		Kementerian Perdagangan
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat	Peningkatan Kapasitas produksi sektor Industri Kimia Hulu	2.5	3.5	4.5	6	7	41.9		Kemenperin
Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah proyek investasi	1000	1000	1000	1000	1000	18.7		Kemenperin

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan Profil Investasi Industri Logam Dasar Non-Besi	Industri Logam yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, peningkatan ekspor dan substitusi impor	1	1	1	1	1	19.5		Kemenperin
Penyusunan Profil Investasi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Peningkatan Nilai Ekspor Industri Prioritas Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	1	1	1	1	1	30.0		Kemenperin
Penyusunan Profil Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyeagar	Jumlah proyek investasi	90	95	100	105	110	18.7		Kemenperin
Pengukuran Struktur Industri Elektronika dan Telematika	Peningkatan Utilisasi Industri Elektronika dan Telematika	65	65	70	70	80	47.4		Kemenperin
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Garam Industri							24.8		Kemenperin
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia							18.0		Kemenperin
Roadmap Pengembangan Industri Kedirgantaraan							0.8		Kemenperin
Peningkatan kemampuan industri kedirgantaraan (komponen pesawat terbang) melalui Bimbingan Teknis sertifikasi							40.0		Kemenperin
Temu Bisnis Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian							142.0		Kemenperin
Industri permesinan dan alat mesin pertanian yang berkontribusi dalam peningkatan ekspor							32.0		Kemenperin
Industri komponen yang terbangun	Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, peningkatan ekspor dan substitusi impor	1	1	1	1	1	31.0		Kemenperin
Peningkatan Kerjasama Pusat Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Fasilitasi pada Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam pengajuan insentif riset dalam peningkatan penanaman teknologi	1	1	1	1	1	130.9		Kemenperin
Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri							37.8		Kemenperin
Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	30	35	40	45	50	42.9		Kemenperin
KP : Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a))	18.5	20-21	22-23	23-26	26	5,416.6		
	Nilai ekspor ekonomi kreatif	21,5-22,6	22,25-23,4	23-24,2	23,75-25	24,5			
ProP : Branding Wonderful Indonesia							1,739.6		
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik		7	7	7	7	7	125.3		Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak		6	6	6	6	6	75.0		Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang		3	3	3	3	3	110.2		Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital		10	10	10	10	10	301.9		Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	236.4		Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	59.4		Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	332.1		Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	499.3		Kemenparekraf
ProP : Peningkatan efektivitas pemasaran melalui pemanfaatan big data							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru							2,600.7		
Pameran Wisata Destinasi Wisata Prioritas dan Destinasi Wisata Branding di Australia dan Oceania		4	4	4	4	4	23.9		Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania		4	4	4	4	4	15.8		Kemenparekraf
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania		65	65	65	65	65	23.4		Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator		8	8	8	8	8	96.5		Kemenparekraf
Promosi Penjualan Stakeholder MICE		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	18.3		Kemenparekraf
Pameran 1Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok		2	2	2	2	2	49.0		Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok		2	2	2	2	2	36.7		Kemenparekraf
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok		480	480	480	480	480	133.7		Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Tiongkok yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler		160,223.0	160,223.0	160,223.0	160,223.0	160,223.0	231.7		Kemenparekraf
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika		2	2	2	2	2	125.9		Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	51.5		Kemenparekraf
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika		225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	51.0		Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler		25,136.0	25,136.0	25,136.0	25,136.0	25,136.0	70.6		Kemenparekraf
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.3		Kemenparekraf
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	230.4		Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	47.9		Kemenparekraf
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa		340.0	340.0	340.0	340.0	340.0	122.4		Kemenparekraf
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	15.3		Kemenparekraf
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	98.9		Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	57.0		Kemenparekraf
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	27.5		Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Pasifik yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler		10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	82.8		Kemenparekraf
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.3		Kemenparekraf
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina		3	3	3	3	3	68.5		Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina		4	4	4	4	4	15.3		Kemenparekraf

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina		50	50	50	50	50	13.1		Kemenparekraf
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding		16	16	16	16	16	30.2		Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator		9	9	9	9	9	115.0		Kemenparekraf
Promosi Penjualan Stakeholder MICE		4	4	4	4	4	10.2		Kemenparekraf
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam		3	3	3	3	3	30.6		Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam		3	3	3	3	3	15.3		Kemenparekraf
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam		80	80	80	80	80	15.3		Kemenparekraf
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding		65	65	65	65	65	198.6		Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator		12	12	12	12	12	102.0		Kemenparekraf
Misi Penjualan Stakeholder Mice		6	6	6	6	6	32.9		Kemenparekraf
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea		3	3	3	3	3	75.0		Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea		3	3	3	3	3	25.5		Kemenparekraf
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea		75	75	75	75	75	27.2		Kemenparekraf
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding		8	8	8	8	8	17.6		Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator		2	2	2	2	2	12.8		Kemenparekraf
Partisipasi Indonesia dalam Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (Circumnavigation) oleh Magellan	Promosi Perekonomian Maluku Utara melalui Partisipasi pada Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (Circumnavigation)	2	-	-	-	-	1.5		Kemenlu
International MICE Bidding		5	5	5	5	5	25.5		Kemenparekraf
Promosi Wisata Gastronomi		4	4	4	4	4	51.0		Kemenparekraf
International MICE Bidding		2	2	2	2	2	51.0		Kemenparekraf
Promosi Wisata Gastronomi		2	2	2	2	2	25.6		Kemenparekraf
ProP : Perluasan pemasaran produk kreatif, termasuk melalui e-commerce							216.6		
Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitas promosi dalam negeri (termasuk melalui platform e-commerce dan event promosi berkelas internasional dalam negeri)		2,050	2,100	2,150	2,200	2,250	160.5		Kemenparekraf
Kampanye produk kreatif lokal (termasuk PON 2020)		10	10	10	10	10	56.1		Kemenparekraf
ProP : Perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran							574.8		
Pelatihan pelaku kreatif terkait manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce)		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	44.0		Kemenparekraf
Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	41.9	Pusat	Kemenparekraf

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelatihan akses permodalan ekonomi kreatif Sektor Perbankan		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	51.8	Pusat	Kemenparekraf
SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi		11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	289.3	Pusat	Kemenparekraf
Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	147.8	Pusat	Kemenparekraf
ProP : Peningkatan sistem pemasaran terintegrasi							284.8		
Kerjasama Pemasaran Produk Ekraf Luar Negeri Terintegrasi (termasuk Eksport Film)		11	11	11	11	11	284.8		Kemenparekraf
KP : Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	90	92	94	96	98	3,053.6		
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	70	72	74	76	78			
	Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	4	4	4	4	4			
	Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	8	8	8	8	8			
	PTA/FTA/CEPA yang disepakati	20 (kumulatif)	25 (kumulatif)	30 (kumulatif)	35 (kumulatif)	40 (kumulatif)			
ProP : Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri termasuk FTA Center							64.3		
FTA Center di Daerah	Jumlah FTA Center di Daerah	1	1	2	2	3	58.5	Jatim	Kementerian Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat, LN, dan Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat LN dan Daerah	2	2	2	2	2	5.8		Kementerian Perdagangan
ProP : Peningkatan jumlah kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerjasama ekonomi internasional							642.0		
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra	88	90	92	94	96	236.5		Kementerian Perdagangan
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	13	15	17	19	21	17.0		Kementerian Perdagangan
Dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional	7	7	7	7	7	40.8		Kementerian Perdagangan
Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah tindak lanjut perundingan perdagangan internasional	2	2	2	2	2	7.3		Kementerian Perdagangan
Peningkatan Akses Pasar Jasa di Pasar	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar sektor jasa di negara mitra	40	42	44	46	48	33.0		Kementerian Perdagangan
Koordinasi Perundingan Bidang Jasa	Jumlah dokumen koordinasi perundingan bidang jasa	1	1	1	1	1	21.0		Kementerian Perdagangan
Penyusunan Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa	Jumlah dokumen Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa	3	3	3	3	3	44.5		Kementerian Perdagangan
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Multilateral	29	31	33	35	37	43.4		Kementerian Perdagangan
Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	5	5	5	5	5	6.7		Kementerian Perdagangan
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum ASEAN dan Mitra ASEAN	110	115	120	125	130	58.2		Kementerian Perdagangan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundungan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundungan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	8	8	8	8	8	5.7		Kementerian Perdagangan
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral	Jumlah kegiatan perundungan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Bilateral	90	100	110	120	130	80.2		Kementerian Perdagangan
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Jumlah kegiatan perundungan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum APEC dan organisasi internasional	76	81	86	91	96	38.3		Kementerian Perdagangan
Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	Jumlah laporan Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	8	8	8	8	8	9.4		Kementerian Perdagangan
ProP : Promosi Terintegrasi							2,347.2		
Promosi penanaman modal dalam forum internasional	Jumlah minat investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal dalam forum internasional di dalam dan luar negeri	500	500	500	500	500	73.9	Pusat	BKPM
Penyelenggaraan Forum Internasional bekerjasama dengan Media Internasional	Jumlah minat investasi yang dicapai melalui forum internasional bekerjasama dengan media internasional	800	800	800	800	800	78.4	Pusat	BKPM
Persiapan Pelaksanaan World Dubai Expo 2020	Jumlah pelaksanaan WED 2020	1	1	1	1	1	189.0	Dubai	Kementerian Perdagangan
CA Expo Nanning China dan Penugasan Pameran Terintegrasi	Jumlah promosi terintegrasi	7	7	8	8	8	50.1		Kementerian Perdagangan
FTA Center	Jumlah layanan FTA Center	903	910	915	920	925	80.8	Jakarta, Sumut, Jabar, Jateng, Sulsel, Maluku	Kementerian Perdagangan
Pameran/Promosi dan Publikasi	Jumlah Laporan Promosi yang dilakukan	1,800	1,850	1,900	1,950	2,000	1,875.1	Prewakilan RI	Kemenlu
PP : Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	4,22-4,23	4,26-4,28	4,30-4,33	4,34-4,38	4,37-4,43	15,290.9		
	Biaya logistik terhadap PDB	23.2	22.2	21.1	20.1	18.0			
	Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index	40.0	37-39	35-37	32-36	29-34			
KP : Peningkatan pendalamam sektor keuangan	Rasio M2/PDB	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	78.0		
	Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*)	55.84	56.26	56.68	57.09	57.51			
	Jumlah Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*)	15.39	15.36	15.32	15.29	15.26			
ProP : Peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan							78.0		
Peningkatan Keuangan Inklusif	Indeks Keuangan Inklusif	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	25.0	Pusat	Kemenko Ekon
Peningkatan Pengembangan dan Pendalamam Pasar Keuangan Pemerintah	Turn over ratio Surat Berharga Negara	5.02	5.02	5.02	5.11	5.11	7.4	Pusat	
Peningkatan Pengembangan dan Pendalamam Pasar Keuangan Pemerintah	Jumlah daerah yang memperoleh fasilitasi dalam pengelolaan pinjaman daerah dan obligasi daerah	50	55	60	65	70	6.1		Kemendagri
Peningkatan Pengembangan dan Pendalamam Pasar Keuangan Pemerintah	Kajian perubahan PP terkait pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah	1	0	0	0	0	0.6	Pusat	Kemenkeu
Peningkatan Pengembangan dan Pendalamam Pasar Keuangan Pemerintah	Rekomendasi kebijakan terkait dampak dan kontribusi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) terhadap pendalamam pasar keuangan	1	0	0	0	0	0.7	Pusat	Kemenkeu
Penguatan stabilitas dan integritas sistem keuangan	Indeks Persepsi Tindak Pidana Pencucian Uang	5.15	5.3	5.3	5.3	5.3	0.0	Pusat	PPATK
Kebijakan akses permodalan ekonomi kreatif Sektor Perbankan (skema pembiayaan HKI)		2	2	2	2	2	38.2	Pusat	Kemparekraf
KP : Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0	Kontribusi ekonomi digital	3.17	3.51	3.86	4.26	4.66	864.6		
	Nilai transaksi e-commerce	260	345	430	515	600			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8,500	8,500	8,500	8,500	15,000			
ProP : Penguatan industri fintech, e-commerce, on-demand service, dan internet of things							18.2		
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Secara Elektronik	Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik	1	1	1	1	1	6.2		Kementerian Perdagangan
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pelatihan	Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan	200	300	400	500	600	12.0		Kementerian Perdagangan
ProP : Modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri							846.4		
Kerja Sama Akselerasi Penerapan Industri 4.0 Dengan National Research Council (NRC) Korea	Industri Logam yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)	-	-	-	-	-	12.5	Pusat	Kemenperin
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)	15	15	15	15	15	37.4	Pusat	Kemenperin
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Elektronika	Industri Elektronika dan Telematika yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)	5	5	5	5	5	42.8	Pusat	Kemenperin
Rencana Implementasi Making Indonesia 4.0		1	1	1	1	1	98.3	Pusat	Kemenperin
Data dan Informasi Industri 4.0	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	3	3	3	3	3	31.2		Kemenperin
Sistem Informasi Industri Nasional							29.0		Kemenperin
Optimalisasi supply chain melalui transformasi industri 4.0 di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyebar	Persentase peningkatan penyerapan bahan baku dalam negeri	1	1	1	1	1	96.4		Kemenperin
Pilot Project Industri 4.0 di sektor industri kimia hilir	Perusahaan yang melakukan transformasi IR 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	2	2	2	2	2	80.0		Kemenperin
Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Industri Kimia Hulu	Perusahaan yang melakukan transformasi IR 4.0 sektor Industri Kimia Hulu	-	1	1	1	1	80.0		Kemenperin
Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Daya Saing Sektor IKFT	Jumlah perusahaan yang melakukan transformasi Industri 4.0	25	25	25	25	25	16.5		Kemenperin
Pemanfaatan Inovasi Teknologi Industri Agro	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi	10	25	40	55	70	5.0		Kemenperin
Terfasilitasinya Penerapan Teknologi Industri KFTLMATE	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi	10	25	40	55	70	6.2		Kemenperin
	Hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	5	15	25	35	45	243.6		Kemenperin
	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi	20	40	60	80	100	67.7		Kemenperin
KP : Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga	Skor Logistic Performance Index	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	6,078.7		
	Tingkat inflasi (%)	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1			
ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik							5,754.2		
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	49	70	90	110	130	5,429.9		Kementerian Perdagangan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	Jumlah Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	3	10	20	30	40	51.5		Kementerian Perdagangan
Penataan Perdagangan Antar Provinsi	Jumlah Sistem Perdagangan Antar Provinsi	1	1	1	1	1	30.7		Kementerian Perdagangan
Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	Jumlah Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	6	12	17	22	27	28.0	Tanah Datar, Madiun, Kudus, Gorontalo, Tapin, Garut	Kementerian Perdagangan
Analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang	Jumlah analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang	7	7	7	7	7	23.2	Pusat	Kementerian Perdagangan
Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	50	55	60	65	70	19.5		Kementerian Perdagangan
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	29	30	32	34	35	171.3		KemenKUKM
ProP : Pengendalian Inflasi							324.5		
Verifikasi Data Gudang dan Stok Barang di Gudang	Jumlah verifikasi data gudang dan stok barang di gudang	1	1	1	1	1	82.9		Kementerian Perdagangan
Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat	Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat	12	12	12	12	12	183.8		Kementerian Perdagangan
Stabilitasasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	Jumlah stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN	82	82	82	82	82	44.2		Kementerian Perdagangan
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Konvensional	Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional	5	5	5	5	5	13.6		Kementerian Perdagangan
KP : Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a))	1,845	2,634	3,423	4,211	5,000	392.2		
	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1)	12	15	17	20	22			
ProP : Penerapan standar pariwisata berkelanjutan							115.1		
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi)		10	12	12	12	12	34.8		Kemenparekraf
Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO)		3	5	5	6	6	58.3		Kemenparekraf
Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bawah (amanat Perpres 83/2018)		5	6	7	8	9	17.5		Kemenparekraf
Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan		1	2	2	2	2	4.5		Kemenparekraf
ProP : Penerapan Industri Hijau	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a))						277.1		
Perumusan Standar Nasional Indonesia bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi yang ditetapkan	Jumlah Standar Nasional Indonesia bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi yang ditetapkan	150	200	200	200	200	37.0	Pusat	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Perumusan Standar Nasional Indonesia bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan	Jumlah Standar Nasional Indonesia bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan	150	200	200	200	200	37.0	pusat	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Restrukturisasi Komtek dan Pengelolaan Komtek baru	Jumlah komtek yang direstrukturisasi dan komtek baru yang dikelola	160	160				6.4	pusat	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Penurunan Emisi GRK Sektor Industri dan Limbah B3 Sektor Industri	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasikan	3	6	9	12	15	25.5	Pusat	Kemenperin
Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	9	9	9	10	10	15.0	Pusat	Kemenperin

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Standardisasi Industri							31,3		
Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Indeks peningkatan kapasitas layanan terhadap layanan jasa industri	3	3	3	3	4	125,0		Kemenperin
KP : Reformasi Fiskal	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a))	10,9-11,3	11,2-11,8	11,7-12,5	12,1-13,4	12,7-14,2	2,571,0		
	Pembentukan badan penerimaan pajak	0	0	1	1	1			
	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system)	13,8	42,7	73,7	100,0	Selesai			
	Porsi Surat Berharga Negara (SBN) dalam Utang Pemerintah	81,3	80,1	78,8	77,7	77			
	Transfer ke Daerah dan Dana Desa terhadap Belanja K/L	< Belanja K/L	< Belanja K/L	> Belanja K/L	> Belanja K/L	> Belanja K/L			
	Pengalihan Subsidi Harga (Pupuk, LPG, Listrik) menjadi Bantuan Sosial Tepat Sasaran	Terlaksana bertahap	Terlaksana bertahap	Terlaksana bertahap	Terlaksana bertahap	Selesai			
ProP : Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan							2,571,0		
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)		13,8	42,7	73,7	100,0	Selesai	2,571,0	Pusat	Kementerian Keuangan
KP : Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Ketersediaan data dan informasi statistik ekonomi kreatif	2	2	2	2	2	5,306,4		
	Ketersediaan data dan informasi statistik pariwisata	3	3	3	3	3			
	Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce	1	1	1	1	1			
	Ketersediaan data dan informasi statistik pangan dan pertanian	2	2	2	3	2			
ProP : Pengembangan statistik ekonomi kreatif							122,3		
Big Data Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan PDB, Ekspor dan tenaga kerja	3	3	3	3	3	122,3	Pusat	Kemenparekraf
ProP : Pengembangan statistik pariwisata							171,1		
Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu	69	69	69	69	69	145,6	Pusat	BPS
Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu	19	19	19	19	19	11,7	Pusat	BPS
Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jumlah publikasi/laporan Tourism Satellite Accounts (TSA)	1	1	1	1	1	13,8	Pusat	BPS
ProP : Pengembangan statistik e-commerce							62,5		
Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	Jumlah publikasi/laporan statistik e-commerce yang terbit tepat waktu	35	35	35	35	35	62,5	Pusat	BPS
ProP : Pengembangan statistik pangan dan pertanian							4,950,5		
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	515	515	515	515	515	277,6	Pusat	BPS
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu	506	506	506	506	506	361,1	Pusat	BPS
Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Pertanian			515	515	515	4,311,8	Pusat	BPS
	JUMLAH						826,834,9		

MATRIKS PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional 2: Kewilayahan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2020 - 2024



MATRIK PEMBANGUNAN RANCANGAN RPJM 2020-2024

PRIORITAS NASIONAL : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : Pembangunan Wilayah Sumatera	Laju pertumbuhan PDRB Sumatera (persen/tahun)	4.62	4.75	4.96	5.16	5.58	739,216.1		
	Share PDRB Wilayah Sumatera (persen)	21.67	21.72	21.75	21.79	21.83			
	IPM Wilayah Sumatera (min-maks)	69,87-76,22	70,37-76,70	70,88-77,18	71,39-77,68	71,90-78,19			
	Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (persen)	7.99	7.48	6.96	6.25	5.76			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	>1	>1	>1	>1	>1	95,198.7		
Provinsi Aceh									
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	>1	>1	>1	>1	>1	1,038.4		
Penyelegaraan Pembangunan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	Jumlah investasi yang akan muncul (MoU)				30.0		350.0	Kota Sabang	BP Sabang
Penyelegaraan Pembangunan Bandar Udara Ujung Seuke Mendukung Kemudahan Berusaha	Jumlah investasi yang akan muncul (MoU)					50.0	400.0	Kota Sabang	BP Sabang
	Percentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)			80.0	80.0	90.0	0.0		BP Sabang
Pengembangan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Sektor kepelabuhanan	Percentase Peningkatan Pendapatan dari Jasa Kepelabuhanan (%)			60.0	80.0	80.0	26.0	Kota Sabang	BP Sabang
Pengembangan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Sektor pariwisata	Percentase Peningkatan Pendapatan dari Kunjungan Wisatawan (%)			90.0	90.0	90.0	20.0	Kota Sabang	BP Sabang
Pengembangan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Sektor industri	Percentase peningkatan jumlah industri yang masuk ke kawasan sabang (%)			40.0	50.0	50.0	155.0	Kota Sabang	BP Sabang
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,128.0	2,340.8	2,574.9	2,832.4	3,115.6	87.4	Prov. Aceh	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KI/KEK Arun Lhokseumawe	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	>1	>1	>1	>1	>1	1,209.4		
Pembangunan Jalan Trans Sumatera	Panjang jalan yang dibangun						0.0	Prov. Aceh	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalur KA Langsa-Lhokseumawe (Krueng Geukeuh - Paloh)	Panjang jalur KA yang dibangun				20.0	20.0	1,044.0	Kab. Aceh Utara	Kementerian Perhubungan
Peningkatan Jalan mendukung KEK Lhoksumawe	Panjang jalan yang dibangun						0.0	Kota Lhokseumawe	Kementerian PUPR
Jalan akses KEK Arun Lhoksumawe	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	5	3	48.0	Aceh	KemenPUPR
Pembangunan infrastruktur tampungan air multi guna berbasis wilayah (Keureto)	Jumlah pembangunan waduk multi guna (unit)		1.0				0.0	Bendungan Keureto, Kab Aceh Utara	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KI/KEK Arun Lhoksumawe	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.1	30.0	Kab. Lhoksumawe dan Kab. Aceh Utara	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,128.0	2,340.8	2,574.9	2,832.4	3,115.6	87.4	Prov. Aceh	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Utara									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	>1	>1	>1	>1	>1	31,169.9		
Pembangunan Tol Trans Sumatera: Ruas Indrapura-Kisaran	Panjang jalan yang dibangun						0.0	Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Asahan	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Hub Belawan/Kuala Tanjung	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan	1	1	1	1	1	30,000.0	Kab. Batu Bara	Kementerian Perhubungan
Peningkatan jalan mendukung KEK Sei Mangke	Panjang jalan yang dibangun						0.0	Kab. Simalungun	Kementerian PUPR
Pembangunan Kereta Api Trans Sumatera	Panjang jalur KA yang dibangun						0.0	Kab. Simalungun	Kementerian Perhubungan
Akses KEK Seimangke	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	2	1	2	50.0	Sumatera Utara	KemenPUPR
Penyediaan air baku KEK Sei Mangkei	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.1	30.0	Kab. Simalungun	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sumatera (tahap pembangunan)	pembangunan fisik	pembangunan fisik	operasi	operasi	operasi	1,000.0	Sumatera Utara (Kab. Batubara/Kab. Simalungun)	KPBU
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7.0					0.8	Kab. Simalungun	BKPM
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,432.0	2,675.2	2,942.7	3,237.0	3,560.7	89.1	Prov. Sumatera Utara	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Kuala Tanjung	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	>1	>1	>1	>1	>1	30,289.1		
Pembangunan Tol Trans Sumatera : Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Prapat	Panjang jalan yang dibangun						0.0	Kab. Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Kab. Rantau Prapat	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Hub Belawan/Kuala Tanjung	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan	1	1	1	1	1	30,000.0	Sumatera Utara	Kementerian Perhubungan
Peningkatan jalan mendukung KI Kuala Tanjung	Panjang jalan yang dibangun						0.0	Kab. Batu Bara	Kementerian PUPR
Akses KI Kuala Tanjung	Panjang jalan yang dibangun (km)	42	29	21	38	21	185.0	Sumatera Utara	KemenPUPR
Pembangunan KA Trans Sumatera	Panjang jalur KA yang dibangun						0.0	Kab. Batu Bara	Kementerian Perhubungan
Penyediaan air baku KI Kuala Tanjung	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.1	15.0	Kab. Batu Bara	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,432.0	2,675.2	2,942.7	3,237.0	3,560.7	89.1	Prov. Sumatera Utara	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Danau Toba dan sekitarnya	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	>1	>1	>1	>1	>1	2,117.5		
Pembangunan Jalan Tol Siantar - Prapat	Panjang jalan yang dibangun						0.0	Kab. Pematang Siantar, Kab. Rantau Prapat	Kementerian PUPR
Akses KSPN Danau Toba	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	2	4	17	25	661.3	Sumatera Utara	KemenPUPR
Pembangunan Jembatan Tano Ponggol	Jumlah jembatan tangkul yang dibangun	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	400.0	Kab. Samosir	Kementerian PUPR
Pembangunan By Pass Balige	Panjang jalan yang dibangun	7.0	6.5				135.0	Kab. Toba Samosir	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara Sibisa	Jumlah bandara yang dikembangkan	1.0					25.0	Kab. Toba Samosir	Kementerian Perhubungan
Pembangunan pelabuhan penyeberangan KSPN Danau Toba	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan	1.0					160.0	Kab. Toba Samosir	Kementerian Perhubungan
Pembangunan KA Siantar-Danau Toba	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					10	336.0	Sumatera Utara	Kemenhub
Pengendalian Daya Rusak Sungai di Kab. Samosir	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tangkul yang dibangun atau ditingkatkan (Km)	10.0					100.0	Kab. Samosir	Kementerian PUPR
Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba Kab. Samosir	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tangkul yang dibangun atau ditingkatkan (Km)	2.0					68.6	Kab. Samosir	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengendalian Daya Rusak Pinggiran Danau Toba	Jumlah danau prioritas yang dikonservasi (Danau)	1.0					50.0	Kab. Tapanuli Utara	Kementerian PUPR
Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Danau Toba dan Desain Daya Rusak Pinggiran Danau Toba di Kab. Tobasa dan Kab. Taput	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	1.0					5.4	Kab Tobasa dan Kab Taput	Kementerian PUPR
Dokumen Lingkungan Penyediaan Air Baku Kawasan Prapat	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	1.0					0.7	Kab. Simalungun	Kementerian PUPR
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kawasan Prapat	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)	0.1					70.0	Kab. Toba Samosir	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KSPN Danau Toba (superprioritas)	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.1	15.0	Kab. Toba Samosir	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							0.0	Provinsi Sumatera Utara	Kementerian PUPR
Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan							0.0	Provinsi Sumatera Utara	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM							0.0	Provinsi Sumatera Utara	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM							0.0	Provinsi Sumatera Utara	Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3.0					1.4	Provinsi Sumatera Utara	BKPM
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,432.0	2,675.2	2,942.7	3,237.0	3,560.7	89.1	Prov. Sumatera Utara	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Barat									
ProP : Pembangunan DPP Baru Padang-Bukittinggi	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	>1	>1	>1	>1	>1	1,253.0		
Pembangunan Tol Trans Sumatera : Padang-Pekanbaru	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Kota Padang, Kota Pekanbaru	Kementerian PUPR
Peningkatan Jatur KA Padang - Pariaman ; Kayu Tanam - Batu Tabal	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	14		20	20	10	1,016.9	Sumatera Barat	Kemenhub
Pengembangan 10 Bandara Hub Primer: Bandara Minangkabau	Jumlah bandara yang ditingkatkan						0.0	Kota Padang	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Terminal (lanjutan) Tipe A Anak Air Padang	Jumlah terminal yang terbangun	1.0					41.0	Kota Padang	Kementerian Perhubungan
Penyediaan air baku KSPN Padang Bukittinggi	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.0	9.0	Kota Padang dan Kota Bukittinggi	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami						0.0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu), Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado), Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,480.0	2,728.0	3,000.8	3,300.9	3,631.0	186.2	Prov. Sumatera Barat	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Jambi									
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Kemingking	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Jambi	>1	>1	>1	>1	>1	1,349.6		
Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan						0.0	Kab. Tanjung Jabung Timur	Kementerian Perhubungan
Akses pelabuhan Ujung Jabung	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	0	0	0	42	1,258.4	Jambi	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jumlah bandara yang dikembangkan						0.0	Kota Jambi	Kementerian Perhubungan
Percepatan pembangunan jalan tol sumatera trase Betung-Tempino-Jambi	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Prov. Jambi	Kementerian PUPR

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan air baku KI Kemingking	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.1		15.0	Kab. Muaro Jambi	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,080.0	2,288.0	2,516.8	2,768.5	3,045.3	76.2	Prov. Jambi	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Selatan									
ProP : Percepatan Operasionalisasi KEK Tanjung Api-api	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Selatan	>1	>1	>1	>1	>1	429.2		
Pembangunan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Prov. Sumatera Selatan	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan						0.0	Kab. Banyuasin	Kementerian Perhubungan
Penanganan jalan akses Pelabuhan Tanjung Api-api	Panjang jalan yang terbangun (km)	-	-	-	5	4	25.6	Prov. Sumatera Selatan	Kementerian PUPR
Pembangunan KA Tanjung Enim-Tanjung Api-API	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					5	256.0	Prov. Sumatera Selatan	Kemenhub
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Api - api - (Simpang - Tj Api api)	Terbangunnya KA akses Pelabuhan (km)						0.0	Sumatera Selatan	Kemenhub
Penyediaan air baku KEK Tanjung Api-API	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.1		30.0	Kab. Banyuasin	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	4,160.0	4,576.0	5,033.6	5,537.0	6,090.7	117.6	Prov. Sumatera Selatan	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanjung Enim	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Selatan	>1	>1	>1	>1	>1	132.6		
Pembangunan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan yang dibangun						0.0	Prov. Sumatera Selatan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KI Tanjung Enim	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.1		15.0	Kab. Muara Enim	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	4,160.0	4,576.0	5,033.6	5,537.0	6,090.7	117.6	Prov. Sumatera Selatan	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Lampung									
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Way Pisang	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	>1	>1	>1	>1	>1	61.2		
Penyediaan air baku KI Way Pisang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.1		15.0	Kab. Lampung Selatan	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	1,632.0	1,795.2	1,974.7	2,172.2	2,389.4	46.2	Provinsi Lampung	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Sebalang	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	>1	>1	>1	>1	>1	61.2		
Penyediaan air baku KI Sebalang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.1	15.0	Kab. Lampung Selatan	Kementerian PUPR
Pengembangan Tol Trans Sumatera Koridor Lampung - Palembang	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	1,632.0	1,795.2	1,974.7	2,172.2	2,389.4	46.2	Provinsi Lampung	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Tanjung Kelayang/KEK Tanjung Kelayang	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Bangka Belitung	>1	>1	>1	>1	>1	53.6		
Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang (Tj. Nyato)	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1.0					24.8	Provinsi Bangka Belitung	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan						0.0	Kab. Belitung	Kementerian Perhubungan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku KEK/KSPN Tanjung Kelayang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.0	6.0	Kab. Belitung	Kementerian PUPR	
Pelimpahan kewenangan penerbitan perijinan di KEK	Jumlah perijinan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK		1.0				0.3	Prov. Bangka Belitung	Kementerian Perdagangan	
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	592.0	651.2	716.3	788.0	866.7	22.5	Provinsi Bangka Belitung	Kementerian Tenaga Kerja	
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Bangka Belitung	>1	>1	>1	>1	>1	67.5			
Jalan akses KI Sadai	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	0	0	-	30.0	Bangka Belitung	KemenPUPR	
Penyediaan air baku KI Sadai	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.1		15.0	Kab. Bangka Selatan	Kementerian PUPR	
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	592.0	651.2	716.3	788.0	866.7	22.5	Provinsi Bangka Belitung	Kementerian Tenaga Kerja	
Provinsi Kepulauan Riau										
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	>1	>1	>1	>1	>1	20,507.3			
Penyediaan lahan	Jumlah luas lahan yang tersedia (Ha)	50.0	100.0	40.0	40.0	40.0	450.0	Kota Batam	BP Batam	
Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Tahun)			350,000.0		650,000.0	4,507.0	Kota Batam	BP Batam	
Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	Jumlah Penumpang (Orang/Tahun)			6,000,000.0	6,500,000.0	6,700,000.0	7,000,000.0	Kota Batam	BP Batam	
Pengembangan fasilitas pelabuhan penumpang domestik dan internasional	Jumlah penumpang pelabuhan domestik (Orang/Tahun)	4,000,000.0		8,000,000.0			794.0	Kota Batam	BP Batam	
Penyelegaraan pembangunan prasarana jalan dan jembatan di KPBPB Batam	Jumlah sarana prasarana jalan dan jembatan kawasan yang dibangun (km)	60.0	50.0	30.0	40.0	4.0	1,288.0	Kota Batam	BP Batam	
Pengembangan fasilitas Pelabuhan bongkar muat Batu Ampar	Jumlah kapasitas bongkar muat pelabuhan (TEU'S)			800,000.0			1,000,000.0	Kota Batam	BP Batam	
Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil	Jumlah kapsitas bongkar muat barang (ton/jam)			1,000.0				300.0	Kota Batam	BP Batam
Penyediaan air baku untuk kawasan Barelang	Tambahan volume air baku yang tersedia (L/detik)	600.0	230.0			1,000.0	1,580.0	Kota Batam	BP Batam	
Pembangunan infrastruktur energi listrik	Jumlah peningkatan daya terpasang (MW)			200.0		200.0		4,200.0	Kota Batam	BP Batam
Pembangunan infrastruktur energi gas	Jumlah peningkatan daya terpasang (mbtu)					200.0		2,200.0	Kota Batam	BP Batam
Penyediaan TPA untuk persampahan	Luas TPA yang tersedia (Ha)				20.0			120.0	Kota Batam	BP Batam
Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3	Luas kawasan pengelolaan limbah B3 (Ha)				20.0		20.0	234.0	Kota Batam	BP Batam
Pengembangan sistem pengelolaan limbah cair domestik rumah tangga	Unit rumah tangga yang terlayani (Satuan Sambungan Rumah)					5,000.0		317.0	Kota Batam	BP Batam
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah fisik bangunan (unit)				1.0			134.0	Kota Batam	BP Batam
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah peralatan kesehatan (Lot)			5.0				200.0	Kota Batam	BP Batam
Penyelegaraan pembangunan sarana prasarana Kawasan BP KPBPB Karimun	Jumlah sarana prasarana kawasan							0.0	Kab. Karimun	BP Karimun
Penyelegaraan pembangunan sarana prasarana Kawasan BP KPBPB Bintan	Jumlah sarana prasarana kawasan							0.0	Kab. Bintan	BP Bintan
Peningkatan Jalan Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp	Panjang jalan yang terbangun	3.0						33.0	Kota Batam	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan	Jumlah jembatan yang terbangun							0.0	Kota Batam, Kab. Bintan	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	336.0	369.6	406.6	447.2	491.9	12.3	Prov. Kepulauan Riau	Kementerian Tenaga Kerja	
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	>1	>1	>1	>1	>1	58.0			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan KEK Galang Batang	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Kab. Bintan	Swasta (PT Bintan Alumina Indonesia)
Pelebaran Jalan Nusantara Km 18 - Simpang Pelabuhan Sei Kolak (5 Km)	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Kab. Bintan	Kementerian PUPR
Pelebaran Jalan Simpang Kawal - Simpang Korindo (16,6 Km)	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Kab. Bintan	Kementerian PUPR
Pelebaran Jalan Sp. Batu - Sp. Bandara - Sp. Tugu Tangan (2,5 Km)	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Kab. Bintan	Kementerian PUPR
Akses KEK Galang Batang I	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	28	15	15.7	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Penyediaan air baku KI/KEK Galang Batang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.1		30.0	Kab. Bintan	Kementerian PUPR
Perpanjangan Runway Bandara (500 m) Bandara Raja Haji Fisabilillah	Panjang landasan pacu pesawat yang terbangun						0.0	Kab. Bintan	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan	Jumlah jembatan yang terbangun						0.0	Kab. Bintan, Kota Batam	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	336.0	369.6	406.6	447.2	491.9	12.3	Prov. Kepulauan Riau	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan Aerospace	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	>1	>1	>1	>1	>1	5,401.3		
Pengembangan KI Bintan Aerospace							5,374.0	Kab. Bintan	Swasta (PT Bintan Aviation Investmens)
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan	Jumlah jembatan yang terbangun						0.0	Kab. Bintan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KI Bintan Aerospace	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.1		15.0	Kab. Bintan	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTG MPP (Mobile Power Plant) Tanjung Pinang	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	33.0					0.0	Tanjung Pinang	PLN
Pembangunan PLTU Bintan I	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	Kab. Bintan	PLN
Pembangunan PLTU Bintan II	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	Kab. Bintan	PLN
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	336.0	369.6	406.6	447.2	491.9	12.3	Prov. Kepulauan Riau	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Pembangunan DPP Baru Batam-Bintan	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	>1	>1	>1	>1	>1	0.0		
Penyediaan air baku DPP Batam - Bintan	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)						0.0	Prov. Kepulauan Riau	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja						0.0	Prov. Kepulauan Riau	Kementerian Tenaga Kerja
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Total nilai produksi (Ton) setiap komoditas unggulan di Pulau Sumatera						746.3		
Provinsi Aceh									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							20.3		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	63,130.7	63,130.7	63,130.7	63,130.7	63,130.7	20.3	Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara, Kab. Bener Meriah	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nilam							0.0		
Peningkatan produksi nilam	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Selatan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	28,505.9	29,023.6	29,551.0	30,086.5	30,637.2	0.0	Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							0.0		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	111,360.9	118,506.4	125,952.5	133,680.0	142,290.4	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							0.0		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	1109614.506	1190671.385	1276502.856	1366526.818	1470174.793	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	64,872.0	66,059.7	67,255.4	68,460.5	69,691.8	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pala							16.2		
Peningkatan produksi pala	Jumlah produksi (Ton)	5,918.0	5,918.0	5,918.0	5,918.0	5,918.0	16.2	Kab. Aceh Selatan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	202,051.1	204,862.7	207,694.8	210,586.8	213,521.4	0.0	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh	Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Utara									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							22.4		
Peningkatan produksi karet	Jumlah produksi (Ton)	477,127.2	477,127.2	477,127.2	477,127.2	477,127.2	22.4	Kab. Mandailing Natal, Kab. Langkat	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							22.4		
Peningkatan produksi kopi	Jumlah produksi (Ton)	62,256.5	62,256.5	62,256.5	62,256.5	62,256.5	22.4	Kab. Simalungun, Kab. Dairi	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							1.1		
Peningkatan produksi kelapa sawit	Jumlah produksi (Ton)	6,497,232.0	6,497,232.0	6,497,232.0	6,497,232.0	6,497,232.0	1.1	Kab. Asahan, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nilam							0.0		
Peningkatan produksi nilam	Jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Toba Samosir, Kab. Dairi, Kab. Padang Lawas Utara	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi (Ton)	553,462.0	561,910.0	570,419.4	579,108.7	587,926.4	0.0	Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tanjung Balai, Kota Medan, Kab. Asahan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan gambir							0.0		
Peningkatan produksi gambir	Jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	Jumlah produksi (Ton)	48,260.3	49,224.8	50,207.4	51,205.0	52,230.8	0.0	Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							0.0		
Peningkatan produksi kopi	Jumlah produksi (Ton)	21,226.8	22,841.9	24,506.4	26,218.1	28,075.8	0.0	Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							0.0		
Peningkatan produksi karet	Jumlah produksi (Ton)	169,988.4	179,630.0	189,677.2	200,104.1	211,722.4	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							0.0		
Peningkatan produksi kelapa sawit	Jumlah produksi (Ton)	1,779,193.4	1,889,959.4	2,007,249.9	2,130,269.6	2,271,906.8	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	Jumlah produksi (Ton)	72,260.4	73,792.7	75,335.5	76,890.3	78,479.0	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nilam							0.0		
Peningkatan produksi nilam	Jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	222,963.4	226,231.2	229,522.9	232,884.1	236,295.0	0.0	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							1.1		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	10,386,861.4	10,386,861.4	10,386,861.4	10,386,861.4	10,386,861.4	1.1	Kab. Rokan Hulu, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Rokan Hilir	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							46.7		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	381,548.7	381,548.7	381,548.7	381,548.7	381,548.7	46.7	Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	408,633.6	416,861.5	425,145.6	433,494.4	442,025.3	0.0	Kab. Indragiri Hilir	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	136,970.9	138,906.0	140,855.1	142,845.4	144,865.1	0.0	Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hilir, Kab. Indragiri Hulu	Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan emas							0.0		
Peningkatan produksi emas	jumlah produksi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi minyak dan gas	jumlah produksi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Rokan Hilir	Kementerian ESDM
Provinsi Jambi									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nilam							0.0		
Peningkatan produksi nilam	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Merangin, Kab. Kerinci	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							57.7		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	326,517.0	326,517.0	326,517.0	326,517.0	326,517.0	57.7	Kab. Batang Hari, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Bungo	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							1.0		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	2,463,891.7	2,463,891.7	2,463,891.7	2,463,891.7	2,463,891.7	1.0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Merangin, Kab. Muaro Jambi	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							0.0		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	70,727.3	73,890.1	77,149.8	80,501.7	84,139.7	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	112,641.8	114,715.5	116,803.4	118,907.5	121,057.6	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Muaro Jambi	Kementerian ESDM
Provinsi Sumatera Selatan									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							30.6		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	169,747.7	169,747.7	169,747.7	169,747.7	169,747.7	30.6	Kab. OKU Selatan, Kab. Muara Enim, Kab. Lahat	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							85.6		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	1,072,063.9	1,072,063.9	1,072,063.9	1,072,063.9	1,072,063.9	85.6	Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Muara Enim	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							1.2		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	4,133,623.4	4,133,623.4	4,133,623.4	4,133,623.4	4,133,623.4	1.2	Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kab. Banyuasin	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada							20.5		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan produksi lada	jumlah produksi (Ton)	8,386.3	8,386.3	8,386.3	8,386.3	8,386.3	20.5	Kab. OKU Selatan, Kab. OKU Timur, Kab. Empat Lawang	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Muara Enim	Kementerian ESDM
Peningkatan minyak dan gas	jumlah produksi (barel)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin	Kementerian ESDM
Provinsi Bengkulu									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							11.7		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	54,354.1	54,354.1	54,354.1	54,354.1	54,354.1	11.7	Kab. Kepahiang, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							25.5		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	126,664.5	126,664.5	126,664.5	126,664.5	126,664.5	25.5	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Seluma	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	3,466.6	3,544.6	3,624.1	3,704.8	3,787.8	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan emas							0.0		
Peningkatan produksi emas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							0.0		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	1,109,542.9	1,194,794.5	1,285,067.7	1,379,750.5	1,488,762.2	0.0	Kab. Mukomuko	Kementerian Pertanian
Provinsi Lampung									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							25.6		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	98,824.9	98,824.9	98,824.9	98,824.9	98,824.9	25.6	Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							0.0		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	175,989.9	184,805.5	193,991.7	203,525.3	214,148.0	0.0	Kab. Tulangbawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada							38.0		
Peningkatan produksi Lada	Jumlah produksi (Ton)	15,235.8	15,235.8	15,235.8	15,235.8	15,235.8	38.0	Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	36,217.8	36,787.9	37,368.6	37,958.3	38,564.6	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	Jumlah produksi (Ton)	94,956.5	96,887.4	98,831.5	100,790.7	102,792.7	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu							91.1		
Peningkatan produksi tebu	jumlah produksi (Ton)	682,044.0	692,444.1	702,877.1	713,361.8	9,065,000.0	91.1	Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi (Ton)	152,370.7	155,563.7	158,794.6	162,141.2	165,563.0	0.0	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kota Bandar Lampung	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada							204.2		
Peningkatan produksi Lada	Jumlah produksi (Ton)	37,924.0	37,924.0	37,924.0	37,924.0	37,924.0	204.2	Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							11.8		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	61,486.0	61,486.0	61,486.0	61,486.0	61,486.0	11.8	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan komoditas unggulan timah							11.8		
Peningkatan produksi timah	jumlah produksi (Ton)	61,486.0	61,486.0	61,486.0	61,486.0	61,486.0	11.8	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	199,944.5	202,480,162.8	205,034,304.9	207,642,454.4	210,289,140.1	0.0	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pangkal Pinang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							0.0		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	33,602.7	35,478.7	37,433.6	39,462.4	41,723.0	0.0	Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Lingga	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	160,315.6	162,628.4	164,958.1	167,337.0	169,751.1	0.0	Kota Batam	Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan produksi perikanan budidaya	jumlah produksi (Ton)	86,789.4	88,211.4	89,650.4	91,140.9	92,664.8	0.0	Kab. Karimun, Kab. Tanjung Pinang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera						547,385.7		
Provinsi Aceh									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Aceh)							79,015.1		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Banda Aceh	Kemenhub
Pembangunan KA Banda Aceh-Sigli-Bireuen	Panjang Jalur Kereta Api Regional (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Kota Banda Aceh	Kemenhub
Pembangunan KA Bireuen-Lhokseumawe	Panjang Jalur Kereta Api Regional (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)		13				307.5	Kota Lhokseumawe	Kemenhub
Pembangunan KA Lhokseumawe-Langsa	Panjang Jalur Kereta Api Regional (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Kota Lhokseumawe, Kota Langsa	Kemenhub
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun	1	0	0	0	0	97.7	Kota Banda Aceh (Polda Banda Aceh)	POLRI
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	75	196	362	453	634	1,120.1	Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa dan lainnya	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						244.9	Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Sabang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						6.0	Kota Banda Aceh	DAK
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						18.3	Kota Banda Aceh	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						1.0	Kota Sabang	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						111.6	Kota Banda Aceh	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Banda Aceh	Kennnaker
Jalan Tol Trans Sumatera:	Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-Sigli; Sigli-Lhokseumawe; Lhokseumawe-Langsa; Langsa-Binjai) yang dibangun (km)	75	135	135	110	16	76,910.1	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa	Kementerian PUPR, Swasta
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.08			0.27	0.08	126.2	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	3	3	3	3	3	15.0	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa	Kementerian PUPR
Provinsi Sumatera Utara									
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Medan	Persentase PDRB Metropolitan terhadap PDRB Pulau Sumatera	10.86	10.85	10.84	10.83	10.82	260,770.8		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah publikasi/laporan pengembangan data statistik metropolitan	0	0	0	1	1	8.3	WM Medan	BPS
Pengembangan pelabuhan utama (hub):							0.0		
-Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	1	1	1	1	1	30,000.0	WM Medan	Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:							0.0		
a. LRT Medan	Panjang jalur yang dibangun (Km)					1	12,400.0	Kota Medan	Kemenhub, Pemda
b. KA Komuter (Medan - Binjai - Besitang)	Panjang jalur yang dibangun/dikembangkan (Km)					20	828.6	Kota Medan, Kota Binjai	Kemenhub
c. BRT Medan	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)			1			1,000.0	Kota Medan	Kemenhub, Pemda
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	206	538	992	1,240	1,736	3,069.3	Provinsi Sumatera Utara	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBUs	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						24,791.7	WM Medan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						29,166.0	WM Medan	BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaran Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	4	4	4	4	40.0	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo	Kementerian PUPR
Jalan Tol Trans Sumatera:	Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-Sigli; Sigli-Lhokseumawe; Lhokseumawe-Langsang; Langsa-Binjai; Binjai-Medan) yang dibangun (km)	75	135	135	110	16	76,910.1	Kota Medan, Kota Binjai	Kementerian PUPR, Swasta
Jalan Tol Trans Sumatera:	Panjang Jalan Tol Koridor II (Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi; Tebing Tinggi-Kisaran; Kisaran-Rantau Prapat; Rantau Prapat-Sp. Sigambali-Dumai; Dumai-Kandis-Pekanbaru) yang dibangun (km)	61	60	100	175	135	71,939.9	Kota Medan	Kementerian PUPR, Swasta
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						3,349.0	Kota Medan, Kab. Deli Serdang	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						837.0	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						103.0	Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						1,251.2	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						209.9	Kota Medan	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						43.6	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo	DAK
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Medan	Kementerian ESDM
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0.7	WM Medan	Kemendagri
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBUs	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)						2,735.3	Kota Medan	KPBU
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)						1,107.3	Kota Medan	BU

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Medan	Kemennaker
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	2	2	2	2	2	10.0	Kota Medan, Kota Binjai	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	870.0	WM Medan	KPBU
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Utara)							20,272.8		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						218.0	Kota Pematangsiantar	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						3.0	Kota Gunungsitoli	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						189.2	Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						21.3	Kota Pematangsiantar	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						7.0	Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga	DAK
Jalan Tol Trans Sumatera:	Panjang Jalan Tol Koridor V Tebing Tinggi-Sibolga yang dibangun (km)	40	40	40	40	40	19,780.0	Kota Sibolga	Kementerian PUPR, Swasta
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)					0.18	54.3	Kota Gunungsitoli	Kementerian PUPR
Provinsi Sumatera Barat									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Barat)							4,134.4		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Padang	Kemenhub
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						1,061.0	Kota Padang	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						457.0	Kota Padang	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						48.0	Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						596.0	Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						67.4	Kota Padang, Kota Bukittinggi	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						16.3	Kota Padang, Kota Bukittinggi	DAK
Pengembangan bandara hub primer:							0.0		
Bandara Minangkabau	Jumlah bandara yang dikembangkan						500.0	Provinsi Sumatera Barat	Kemenhub
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun	1	0	0	0	0	97.7	Kota Padang (Polda Sumbar)	POLRI
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	77	202	372	465	651	1,151.0	Provinsi Sumatera Barat	Kementerian PUPR
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Padang	Kemennaker
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)					0.26	78.5	Kota Padang, Kota Bukittinggi	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Padang	Kementerian PUPR
Provinsi Riau									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Riau)							2,478.8		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Pekanbaru	Kemenhub
Pembangunan KA Duri-Dumai	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Kota Dumai	Kemenhub
Pembangunan KA Duri-Pekanbaru	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Kota Pekanbaru	Kemenhub
Pengembangan bandara hub primer: Bandara Sultan Syarif Kasim II	Jumlah bandara yang dikembangkan						0.0		
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	100	261	482	603	844	300.0 1,491.3	Provinsi Riau	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						37.0	Kota Dumai, Kota Pekanbaru	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						394.0	Kota Pekanbaru	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						110.0	Kota Pekanbaru	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						97.4	Kota Dumai	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Pekanbaru	Kementerian PUPR
Provinsi Jambi									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jambi)							1,433.6		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Pekanbaru	Kemenhub
Pembangunan KA Jambi-Betung	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Kota Jambi	Kemenhub
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						105.0	Kota Jambi	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						167.0	Kota Jambi	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						250.8	Kota Jambi	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						29.1	Kota Jambi	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						9.6	Kota Jambi	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	55	144	266	333	466	823.0	Provinsi Jambi	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Jambi	Kementerian PUPR
Provinsi Sumatera Selatan									
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang	Persentase PDRB Metropolitan terhadap PDRB Pulau Sumatera	10.86	10.85	10.84	10.83	10.82	171,906.2		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah publikasi/laporan pengembangan data statistik metropolitan	0	1	1	1	1	21.9	WM Palembang	BPS
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	WM Palembang	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Jalan Tol Trans Sumatera:	Panjang Jalan Tol Koridor III Pekanbaru-Palembang (Pekanbaru-Rengat; Rengat-Jambi; Jambi-Tempino-Betung; Betung-Palembang-Kayu Agung) yang dibangun (km)	75	100	190	191	112	84,800.1	Kota Palembang, Kab. Ogan Komering Ilir	Kementerian PUPR, Swasta
Jalan Tol Trans Sumatera:	Panjang Jalan Tol Palembang-Bakauheni (Kayu Agung-Pematang Panggang; Pematang Panggang-terbanggi besar; Terbanggi Besar-Bakauheni) yang dibangun (km)	50	85	50	70	80	38,290.0	Kab. Ogan Komering Ilir	Kementerian PUPR, Swasta
Jalan Tol Trans Sumatera:	Panjang Jalan Tol Palembang-Bengkulu (Palembang-Indralaya; Indralaya-Muara Enim; Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu) yang dibangun (km)	25	80	70	82	95	36,589.9	Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir	Kementerian PUPR, Swasta
Pembangunan KA Betung-Simpang	Panjang Jalur Kereta Api Regional (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	0	0	7.5	15	7.5	1,284.0	Kab. Banyuasin	Kemenhub
Pembangunan KA Khusus Lahat-Ogan Ilir	Panjang Jalur Kereta Api Regional (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					6	178.8	Kab. Ogan Ilir	Kemenhub
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)						5.0	Kota Palembang	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						1,267.0	Kota Palembang	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						382.0	Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						41.0	Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						112.8	Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						1,495.6	WM Palembang	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaran Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	4	4	4	4	40.0	Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Palembang	Kementerian ESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)						2,735.3	Kota Palembang	KPBU
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)						1,107.3	Kota Palembang	BU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelempara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)						0.8	Kota Palembang	BU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelempara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						0.8	Kota Palembang	BU
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik						0.7	WM Palembang	Kemendagri
Pengembangan kabupaten/kota/kawasan kreatif	Jumlah kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan						2.5	Kota Palembang	Kemenparekraf
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.32		0.83	0.48	0.35	590.9	WM Palembang	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Palembang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						559.5	WM Palembang	DAK
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya baru yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah (unit)						820.6	WM Palembang	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh di Perkotaan	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (hektar)						526.5	WM Palembang	Kementerian PUPR
Pembangunan dan pengembangan RTH Publik	Jumlah RTH publik yang dibangun dan dikembangkan (unit)						293.0	WM Palembang	Pemerintah Daerah
Peningkatan kemampuan jalan lingkungan	Jumlah jalan lingkungan yang ditingkatkan						314.6	WM Palembang	Pemerintah Daerah
Perluasan Sambungan Listrik Rumah Tangga Perkotaan	Jumlah sambungan listrik rumah tangga perkotaan (SR)						91.5	WM Palembang	BUMN dan/atau Swasta
Fasilitasi Pengembangan ekonomi kreatif dan digital	Jumlah kluster usaha yang dikembangkan						217.4	WM Palembang	Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Selatan)							184.3		
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						127.5	Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						5.5	Kota Lubuklinggau	DAK
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)					0.17	51.3	Kota Prabumulih	Kementerian PUPR
Provinsi Bengkulu									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Bengkulu)							776.1		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Bengkulu	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						104.0	Kota Bengkulu	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						140.7	Kota Bengkulu	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						10.1	Kota Bengkulu	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	31	81	150	188	263	464.1	Provinsi Bengkulu	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.03					8.1	Kota Bengkulu	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Bengkulu	Kementerian PUPR
Provinsi Lampung									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Lampung)							4,517.1		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Bandar Lampung	Kemenhub
Rehabilitasi dan pengembangan bandara yang mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI):							0.0		
Bandara Radin Inten Lampung	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan						99.9	Kota Bandar Lampung	Kemenhub
Pembangunan Sky Bridge Bandara Raden Inten dan Stasiun	Terbangunnya KA akses Bandara (km)			1			164.7	Kota Bandar Lampung	Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	132	344	634	793	1,110	1,961.6	Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
Pengembangan SPAM Kota Bandar Lampung	Jumlah SPAM Regional terbangun						43.5	Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						1,061.0	Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						300.0	Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						40.0	Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						442.4	Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						70.9	Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						20.6	Kota Bandar Lampung	DAK
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun	1					97.7	Kota Bandar Lampung (Polda Lampung)	POLRI
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)				0.57		170.8	Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Bangka Belitung)							618.6		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Pangkal Pinang	Kemenhub
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						5.5	Kota Pangkal Pinang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional (TPA Regional)	Jumlah TPA Regional yang terbangun (unit)						20.0	Provinsi Bangka Belitung	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						106.2	Kota Pangkal Pinang	
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						16.9	Kota Pangkal Pinang	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						2.8	Kota Pangkal Pinang	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	23	60	110	138	193	340.3	Provinsi Bangka Belitung	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)				0.28		82.8	Kota Pangkal Pinang	Kementerian PUPR
Provinsi Kepulauan Riau									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kepulauan Riau)							1,277.9		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Tanjungpinang	Kemenhub
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						137.2	Kota Tanjungpinang	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						271.0	Kota Batam	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						302.0	Kota Batam	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						10.0	Kota Tanjungpinang	Kementerian PUPR
Pembangunan KA akses Bandara Hang Nadim	Terbangunnya KA akses Bandara (km)						0.0	Kota Batam	Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	34	90	166	208	291	513.6	Provinsi Kepulauan Riau	Kementerian PUPR
KP 4: Peningkatan Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni						80,222.5		
Provinsi Aceh									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Aceh)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	61.00%	64.90%	68.70%	72.50%	76.30%	6,797.6		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	88.42%	91.32%	94.21%	97.11%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	71% layak (termasuk 13% aman)	72% layak (termasuk 14% aman)	74% layak (termasuk 14% aman)	77% layak (termasuk 14% aman)	80% layak (termasuk 15% aman)			
	Persentase rumah tangga yang terlayani pengangkutan sampah di perkotaan	58.58%	60.85%	65.39%	72.19%	79.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	75	196	362	453	634	1,120.1		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2819	2819	2819	2819	2819	283.3		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	537	2953	2953	4429	4429	459.1	Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Kota Banda Aceh	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	47826	68096	68096	102144	102144	1,929.6	Semua Kab./kota	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	1	1	1	1	86.0	Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	2	2	2	3	449.0	9 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	8531.03	12796.54	17062.05	21327.56	25593.08	1,101.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	53.68	80.52	107.36	134.20	161.04	1,368.8	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Sumatera Utara									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Sumatera Utara)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	69.12%	74.26%	79.40%	84.53%	89.67%	23,466.1		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	91.65%	93.74%	95.82%	97.91%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	70,7% (13%)	71.73% (14%)	73.8% (14%)	76.9% (14%)				
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	54.78%	57.92%	64.19%	73.59%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	206	538	992	1,240	1,736	3,069.3		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	7743	7743	7743	7743	7743	778.1		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	4	4	4	4	200.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	5333	10888	10888	16332	16332	4,184.1	Deli Serdang, Langkat, Kota Medan	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	8977	7432	7432	11148	11148	1,384.1	Asahan, Simalungun, Karo, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kota Binjai	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	74942	113753	113753	170630	170630	3,233.2	Semua Kab./kota	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	4	4	4	5	249.0	Simalungun, Langkat, Serdang Bedagai, Batubara, Kota Medan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	3	7	7	8	8	2,536.0	29 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	12303.92	18455.89	24607.85	30759.81	36911.77	622.8	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	282.73	424.10	565.46	706.83	848.20	7,209.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Sumatera Barat									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Sumatera Barat)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	57.87%	60.18%	62.49%	64.80%	67.11%	9,339.5		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	87.00%	90.25%	93.50%	96.75%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	64% (7%)	67% (7%)	71% (7%)	78% (8%)	85% (8%)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	59.11%	61.76%	67.07%	75.04%	83.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	77	202	372	465	651	1,151.0		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2900	2900	2900	2900	2900	291.4		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	3485	3485	5228	5228	1,219.9	Kota Padang	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	4574	2587	2587	3881	3881	525.3	Kota Padang	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	52813	72690	72690	109035	109035	2,042.0	Semua Kab./kota	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	1	1	2	2	103.0	Padang Pariaman, Agam, Kota Padang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	4	4	4	4	1,025.0	16 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	10887.14	16330.71	21774.27	27217.84	32661.41	1,078.4	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	74.65	111.98	149.30	186.63	223.96	1,903.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Riau									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Riau)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	74.00%	79.38%	84.77%	90.16%	95.55%	6,616.5		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	91.77%	93.83%	95.88%	97.94%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	81% (8%)	82% (9%)	84% (10%)	87% (13%)	90% (15%)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	61.48%	63.76%	68.32%	75.16%	82.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	100	261	482	603	844	1,491.3		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	3752	3752	3752	3752	3752	377.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	1623	1753	1753	2630	2630	727.3	Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	1603	1456	1456	2184	2184	266.5	Siak, Kampar, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	43900	76818	76818	115227	115227	2,052.0	Semua Kab./kota	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	2	2	2	2	122.0	5 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	1	1	2	2	377.0	6 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	6020.65	9030.97	12041.30	15051.62	18061.94	1,107.3	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	3.77	5.65	7.54	9.42	11.30	96.1	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Jambi									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Jambi)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	58.40%	61.07%	63.75%	66.42%	69.10%	4,517.8		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	83.57%	87.67%	91.78%	95.89%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	74% (4%)	75% (4%)	76% (5%)	78% (7%)	80% (8%)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	63.51%	65.68%	70.01%	76.50%	83.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	55	144	266	333	466	823.0		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2075	2075	2075	2075	2075	208.5		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	393	393	590	590	137.6	Kota Jambi	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	242	1952	1952	2927	2927	300.0	Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (SR)	26039	40029	40029	60043	60043	1,036.0	Semua Kab./kota	DAK; APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	0	1	2	2	319.0	5 Kab./Kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	11,572	17,358	23,144	28,930	34,716	1,189.5	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	20	30	40	49	59	504.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Sumatera Selatan									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Sumatera Selatan)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	57.95%	61.00%	64.00%	67.00%	70.00%	12,770.4		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	87.07%	90.30%	93.53%	96.77%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	73.87% (6%)	75.66% (8%)	79.24% (12%)	84.62% (17%)	90% (23%)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	61.05%	63.38%	68.04%	75.02%	82.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	125	326	602	753	1,054	1,862.6		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	4699	4699	4699	4699	4699	472.2		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)		4	4	4	4	200.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	2704	4135	4135	6202	6202	1,636.5	Lahat, Kota Palembang	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	1755	3250	3250	4875	4875	540.2	Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Lahat, Musi Rawas, Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (SR)	52493	92526	92526	138789	138789	2,489.7	Semua Kab./kota	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	2	0	1	1	0	97.0	3 kab/kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	3	1	2	2	1	395.0	9 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	14,697	22,046	29,394	36,743	44,091	2,072.4	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	118	177	236	295	354	3,004.9	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Bengkulu									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Bengkulu)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	49.93%	54.17%	58.41%	62.65%	66.90%	2,497.7		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	74.15%	80.61%	87.07%	93.54%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	73.20% (3%)	74.65% (4%)	76.83% (4%)	79% (5%)	79.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	64.44%	66.50%	70.63%	76.81%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	31	81	150	188	263	464.1		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	1163	1163	1163	1163	1163	116.8		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	548	652	652	977	977	125.6	Kota Bengkulu	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (SR)	14038	21708	21708	32561	32561	645.8	Semua Kab./kota	DAK; APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	2	2	2	1	233.0	7 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	3723.00	5584.50	7446.00	9307.50	11169.00	511.9	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	15.71	23.56	31.41	39.26	47.12	400.5	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Lampung									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Lampung)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	48.70%	50.00%	51.25%	52.54%	53.82%	8,437.7		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	77.45%	83.08%	88.72%	94.36%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	76.72% (4%)	78.20% (4%)	81.15% (5%)	85.57% (7%)	90% (8%)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	56.59%	58.86%	63.39%	70.20%	77.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	132	344	634	793	1,110	1,961.6		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	4940	4940	4940	4940	4940	496.4		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	4015	4015	6023	6023	1,405.3	Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	4848	2930	2930	4395	4395	584.9	Lampung Selatan, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	34369	76083	76083	114124	114124	1,833.7	Semua Kab./kota	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	3	3	3	4	162.0	5 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	3	3	2	2	862.0	10 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	3808	5712	7616	9520	11423	704.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	17	25	34	42	50	427.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Bangka Belitung)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	28.32%	28.56%	28.80%	29.00%	29.30%	1,520.6		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	82.14%	86.61%	91.07%	95.54%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	88.16% (5%)	88.36% (5%)	88.77% (6%)	89.39% (6%)	90% (7%)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	61.25%	63.66%	68.50%	75.75%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	23	60	110	138	193	340.3		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	862	862	862	862	862	86.6		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	0	137	137	206	206	20.6	Bangka	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	7310	9916	9916	14874	14874	279.6	Semua Kab./kota	DAK; APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	1	1	1	2	267.0	5 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	1920.26	2880.39	3840.52	4800.66	5760.79	490.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	1.40	2.10	2.80	3.50	4.20	35.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Kepulauan Riau									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Kepulauan Riau)	Percentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	69.12%	74.26%	79.40%	84.53%	89.70%	4,258.4		
	Percentase rumah tangga dengan akses air minum layak	0.91	0.93	0.96	0.98	1.00			
	Percentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	86.28% (10%)	86.69% (10%)	87.52% (10%)	88.76% (10%)	90% (10%)			
	Percentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	81.63%	81.79%	82.09%	82.54%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	34	90	166	208	291	513.6		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	1296	1296	1296	1296	1296	130.3		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	540	646	646	969	969	264.0	Kota Batam	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	1874	2132	2132	3198	3198	376.1	Karimun, Bintan, Kota Batam	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	12124	18230	18230	27345	27345	652.8	Semua Kab./kota	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	0	1	0	1	29.0	2 kab/kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	0	1	1	2	240.0	4 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	1643	2464	3285	4107	4928	153.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	74	112	149	186	223	1,899.5	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri						3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri	9,528.6	
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	10.97%	10.43%	10.33%	9.85%	9.48%			
	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	3 kawasan berkembang; 9 kawasan mandiri					1 kawasan berkembang; 9 kawasan mandiri; 2 kawasan berdaya saing		
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	7 kabupaten tertinggal					2 kabupaten tertinggal (5 kabupaten potensi entas)		
	Penduduk miskin di daerah tertinggal	18,4 - 18,9%	18,1 - 18,6%	17,8 - 18,3%	17,5 - 18%	17,2 - 17,7%			
	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	62,6 - 63,1	63,3 - 63,8	64 - 64,5	64,7 - 65,2	65,4 - 65,9			
Provinsi Aceh									

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	59.87	60.29	60.62	60.89	61.95	1.264.4		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	1306 desa	1522 desa	1943 desa	1453 desa	546 desa	147.4	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	62 desa	15.7	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	1306 desa	1522 desa	1943 desa	1453 desa	546 desa	251.7	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3228 orang	3236 orang	4103 orang	4056 orang	3343 orang	838.6	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	1 desa	2.3	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0.6	Aceh Tengah, Pidie, Aceh Timur	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur	63.05	65.79	68.52	71.26	74.00	80.0		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	1.1	Kabupaten Aceh Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	4.0	Kabupaten Aceh Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	34 paket	34 paket	34 paket	34 paket	34 paket	19.0	Kabupaten Aceh Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0.7	Kabupaten Aceh Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	13.3	Kabupaten Aceh Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1.1	Kabupaten Aceh Timur	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	0.8	Kabupaten Aceh Timur	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	40.0	Kabupaten Aceh Timur	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Aceh	3 kawasan mandiri	-	-	-	3 kawasan mandiri	87.6		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	3 SP	2 SP	2 SP	2 SP	63.9	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	720	1600	1000	800	1563.65	4.4	Kabupaten Bener Meriah	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	1	0	3	0	13.7	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	1	3	1	2	4.0	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	816	287	0	0	60	0.6	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	1600	1000	800	1564	1.0	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	816	287	0	0	60	0.0	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue	Kementerian ATR/BPN
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1.) 7,53% 2.) 2,85%	1.) 7,75% 2.) 2,94%	1.) 7,98% 2.) 3,04%	1.) 8,21% 2.) 3,13%	1.) 8,44% 2.) 3,23%	73.2		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang	4	4	4	4	5	11.3	Kota Sabang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-	-	1	1	2.0	Kota Sabang	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Khusus Perbatasan	Jumlah rumah khusus perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	-	-	10	10	10	3.6	Kota Sabang	Kementerian PUPR
Pengembangan Jarigan Perpipaan di Kawasan Perbatasan	Kapasitas jaringan perpipaan yang dikembangkan	11000	11000	11000	11000	11000	50.0	Kota Sabang	Kementerian PUPR
Fasilitasi Legislasi RDTR Sabang Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0.8	Kota Sabang	Kementerian ATR
Peningkatan mutu pelayanan & efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	Penambahan jaringan distribusi						0.0	Kota Sabang	Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	10	10	10	10	1.4	Kota Sabang	Kementerian ATR/BPN
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	50	50	50	50	0.1	Kota Sabang	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI	1 lokasi	4.0	Kota Sabang	Kementerian Kominfo				
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Aceh	3 kecamatan	13.7						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Pemerintah Daerah				
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Pemerintah Daerah				
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Pemerintah Daerah				
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Pemerintah Daerah				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Pemerintah Daerah				
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	6.0	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Kementerian Perdagangan
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-		30 paket	-	-	6.6	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Kementerian ESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	2	2	2	2	0.3	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	0.8	Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Langsa Barat	Kemendesa PDTT
Provinsi Sumatera Utara									
ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 20,9 - 21,4%; 2. 62 - 62,5	1. 20,6 - 21,1%; 2. 62,7 - 63,2	1. 20,2 - 20,7%; 2. 63,5 - 64	1. 19,9 - 20,4%; 2. 64,2 - 64,7	1. 19,6 - 20,1%; 2. 64,9 - 65,4	1,866,3		
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat	3 paket					18.9	Kab. Nias Selatan (Kec. Telukdalam, Maniamolo, dan Gomo, Ulususua)	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan (Karet)	Jumlah benih karet beredar yang memenuhi standar mutu benih	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	1.0	Kab. Nias Selatan (Kec. Somambawa, Lahusa, Gomo, Uluidanotae, Idanotae, Siduari, Fanayama, Maniamolo, Onolalu, Aramo, Amandraya, Hilimegai, Lolowau, Huruna, Lolomatua, Telukdalam)	Kementerian Pertanian
Pengembangan Tanaman Karet	Produktivitas dan Luas Panen Karet	200 Ha	206 Ha	212 Ha	220 Ha	227 Ha	10.3	Kab. Nias Selatan	Kementerian Pertanian
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia	40 paket	40 paket	40 paket	40 paket	40 paket	43.8	Kab. Nias Selatan (Kec. Umbunasi, Susua, Ulunoyo, Huruna, Simuk, Hibala, Pulau-Pulau Batu Barat)	Kementerian ESDM
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		1 paket	1 paket	2 paket	2 paket	6.6	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	5%		5%		5%	3.0	Kab. Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		40%	40%			4.3	Kab. Nias Selatan (KSPN Teluk Dalam dskt)	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	44	44	43	43	43	1.7	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar	1 Unit	1 Unit	1 Unit			6.6	Kab. Nias Selatan (P. Simuk)	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektifikasi di pulau kecil dan terluar (KK)	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan elektifikasi di pulau kecil dan terluar	73 KK	50 KK				6.2	Kab. Nias Selatan (P. Simuk)	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)	50 KK	50 KK	-	-	-	1.8	Kab. Nias Selatan	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	36.329 KPM	36.329 KPM	36.329 KPM	36.329 KPM	36.329 KPM	967.9	Kab. Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	66.142 KPM	66.142 KPM	66.142 KPM	66.142 KPM	66.142 KPM	595.3	Kab. Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan	Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)				0,401 m3/s	0,395 m3/s	199.0	Kab. Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat	Kementerian PUPR
Puksesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puksesmas baru yang dibangun	1 unit					0.0	Kab. Nias Selatan	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Sumatera Utara	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	4.9		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Pemerintah Daerah

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Pemerintah Daerah				
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Pemerintah Daerah				
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Pemerintah Daerah				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Pemerintah Daerah				
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	2	2	2	2	0.3	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	-	-	10 paket	10 paket	4.4	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	0.2	Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Suka	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	58.28	59.29	60.10	60.74	63.33	1,083.3		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	15 desa	6 desa	6 desa	6 desa	4 desa	41.6	DPP Danau Toba	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	470 desa	1338 desa	1528 desa	1143 desa	662 desa	121.5	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidiimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidiimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidiimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	470 desa	1338 desa	1528 desa	1143 desa	662 desa	192.2	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2697 orang	2704 orang	3429 orang	3390 orang	2794 orang	700.8	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Kementerian Desa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes						2.3	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	1.1	Langkat, Padang Lawas, Nias Utara, Gunung Sitoli, Simalungun	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	50.98; 68.18	56.99; 69.88	62.99; 71.59	68.99; 73.29	75.00; 75.00	91.8		
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	3.0	Kab. Samosir	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	0 unit	10 unit	10 unit	15 unit	20 unit	3.8	Kab. Toba Samosir	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 unit	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	1.3	Kab. Toba Samosir	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2.1	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1.6	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	80.0	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Kementerian ESDM
Provinsi Sumatera Barat									
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 12,1 - 12,6%; 2. 60,5 - 61	1. 11,8 - 12,3%; 2. 61,1 - 61,6	1. 11,6 - 12,1%; 2. 61,7 - 62,2	1. 11,3 - 11,8%; 2. 62,3 - 62,8	1. 11 - 11,5%; 2. 63 - 63,5	875.9		
Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Jumlah pelayanan rute angkutan laut perintis	1 rute	1 rute	1 rute	1 rute	1 rute	50.5	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandara Mentawai/Rokot Baru	Jumlah bandar udara yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			547.0	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Perhubungan
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2.2	Kepulauan Mentawai (Desa Sinaka, Desa Bulasan, Desa Silabu, Desa Matotonan, Desa Paskiat Taileeu, Desa Kature)	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	35.0	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Kominfo
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	-	0.05				1.0	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prakades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prakades di Daerah Tertinggal	1 paket	1 paket	-	-		2.2	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	11	11	11	11	10	0.4	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		0.4	0.4			4.3	Kab. Kepulauan Mentawai (KSPN Siberut dskt)	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal	-	1 unit	-	-	1 unit	3.0	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		8.0	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	100 Orang	120 Orang	144 Orang	173 Orang	207 Orang	3.7	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Desa PDTT
Penyelegaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	5.122 KPM	94.5	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Sosial				
Penyelegaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	9.273 KPM	83.5	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Sosial				
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	11.1	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)					0,118 m3/s	29.6	Kab. Kepulauan Mentawai	Kementerian PUPR
ProP: Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	68.48	68.78	69.02	69.22	69.99	223.6		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	1 desa	2 desa	5.0	DPP Baru Bukittinggi-Padang	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	417 desa	208 desa	182 desa	235 desa	0 desa	19.1	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	417 desa	208 desa	182 desa	235 desa	0 desa	38.1	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	518 orang	520 orang	659 orang	652 orang	537 orang	134.7	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	1 desa	2.3	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0.6	Pasaman, Pasaman Barat, Solok	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Agam	52.83	53.87	54.92	55.96	57.00	46.2		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	9 unit	9 unit	10 unit	10 unit	11 unit	3.2	Kab. Agam	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1.2	Kab. Agam	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Agam	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	0.8	Kab. Agam	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	40.0	Kab. Agam	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	1 kawasan mandiri	-	-	-	1 kawasan mandiri	17.5		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	-	1 SP	1 SP	-	12.4	Kabupaten Pesisir Selatan	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	450	0	0	0	0.1	Kabupaten Pesisir Selatan	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	0	1	0	0	3.0	Kabupaten Pesisir Selatan	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	1	1	0	1	1.5	Kabupaten Pesisir Selatan	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	112	0	0	0	639	0.5	Kabupaten Pesisir Selatan	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	450	0	0	0	0.0	Kabupaten Pesisir Selatan	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	112	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Pesisir Selatan	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Riau									
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Riau	10 kecamatan	10 kecamatan	10 kecamatan	10 kecamatan	10 kecamatan	18.8		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM						0.0	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	10 kecamatan	0.0	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Pemerintah Daerah				
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	10 kecamatan	0.0	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Pemerintah Daerah				
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	10 kecamatan	0.0	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	10 kecamatan	0.0	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	10 kecamatan	0.0	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Pemerintah Daerah				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	10 kecamatan	0.0	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Pemerintah Daerah				
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	7	7	7	7	1.0	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Kementerian ESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	40 paket	40 paket	-	-	17.6	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	0.2	Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Sungai Sembilan Kecamatan Medang Kampai	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	64.29	64.57	64.79	64.97	65.68	326.4		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	485 desa	377 desa	556 desa	197 desa	0 desa	33.5	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	485 desa	377 desa	556 desa	197 desa	0 desa	59.2	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	797 orang	799 orang	1014 orang	1001 orang	826 orang	207.1	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	1 desa	2.3	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Rokan Hulu, Kampar	Kemendesa PDTT				
Provinsi Jambi									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	64.05	64.32	64.53	64.70	65.39	300.6		

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	639 desa	290 desa	205 desa	509 desa	65 desa	30.8	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	639 desa	290 desa	205 desa	509 desa	65 desa	63.0	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	694 orang	696 orang	882 orang	872 orang	719 orang	180.3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	1 desa	2.3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0.4	Kerinci, Tanjung Jabung Timur	Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi	1 kawasan berkembang	-	-	-	1 kawasan berkembang	32.6		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	-	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	24.4	Kabupaten Bungo	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarana dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	1	0	0	1	6.1	Kabupaten Bungo	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	1	1	1	0	1.4	Kabupaten Bungo	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	590	0	0	750	0	0.6	Kabupaten Bungo	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	590	0	0	750	0	0.0	Kabupaten Bungo	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi	48.76	50.07	51.38	52.69	54.00	125.5		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	172 unit	172 unit	172 unit	172 unit	172 unit	81.9	Kab. Muaro Jambi	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1.8	Kab. Muaro Jambi	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Muaro Jambi	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	0.8	Kab. Muaro Jambi	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	40.0	Kab. Muaro Jambi	Kementerian ESDM
Provinsi Sumatera Selatan									
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	1 kawasan berkembang; 2 kawasan mandiri	-	-	-	3 kawasan mandiri	34.5		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	1 SP	2 SP	3 SP	1 SP	17.1	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	0	1283.46	0	0	0.4	Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	0	1	1	2	12.0	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	2	3	2	2	4.3	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	2120	0	0	0	0	0.6	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	1283	0	0	0.0	Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2120	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat	Kementerian ATR/BPN
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	60.15	60.60	60.96	61.25	62.41	559.1		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	321 desa	786 desa	892 desa	540 desa	12 desa	62.4	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	(diusulkan untuk DAK)

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	321 desa	786 desa	892 desa	540 desa	12 desa	100.0	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1427 orang	1430 orang	1814 orang	1793 orang	1478 orang	370.7	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Ogankomering Ilir, Muara Enim	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin	61.34	64.75	68.17	71.58	75.00	66.5		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	41 Unit	15.0	Kab. Banyuasin	Kementerian Pertanian				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	1.6	Kab. Banyuasin	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Banyuasin	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	0.8	Kab. Banyuasin	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8.1	Kab. Banyuasin	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	40.0	Kab. Banyuasin	Kementerian ESDM
Provinsi Bengkulu									
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	1 kawasan mandiri	-	-	-	1 kawasan berdaya saing	32.9		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	24.6	Kabupaten Bengkulu Utara	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	0	0	450	0	0.1	Kabupaten Bengkulu Utara	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasaranaanya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	0	0	1	0	7.4	Kabupaten Bengkulu Utara	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	0	0	1	0	0.5	Kabupaten Bengkulu Utara	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	1075	0	0	0	0	0.2	Kabupaten Bengkulu Utara	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	450	0	0.1	Kabupaten Bengkulu Utara	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1075	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Bengkulu Utara	Kementerian ATR/BPN
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	59.62	60.08	60.45	60.74	61.93	280.4		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	390 desa	290 desa	215 desa	314 desa	324 desa	29.7	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	390 desa	290 desa	215 desa	314 desa	324 desa	52.0	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	665 orang	667 orang	846 orang	836 orang	689 orang	172.9	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Kaur, Bengkulu Utara	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Bengkulu Tengah	53.76	54.82	55.88	56.94	58.00	124.9		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	172 unit	81.9	Kab. Bengkulu Tengah	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	2 unit	1.2	Kab. Bengkulu Tengah	Kementerian Pertanian				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Bengkulu Tengah	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	0.8	Kab. Bengkulu Tengah	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	40.0	Kab. Bengkulu Tengah	Kementerian ESDM				
Provinsi Lampung									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	64.72	64.94	65.12	65.26	65.81	496.1		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	683 desa	680 desa	404 desa	593 desa	408 desa	57.1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	683 desa	680 desa	404 desa	593 desa	408 desa	97.4	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1213 orang	1217 orang	1543 orang	1524 orang	1257 orang	315.3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1.7	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	0.8	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	53.79; 54.04;	59.09; 59.28	64.39; 64.52	69.70; 69.76	75.00; 75.00	210.6		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	334 unit	334 unit	334 unit	334 unit	334 unit	120.5	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	6.4	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2.1	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1.6	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	80.0	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Kementerian ESDM
ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 14,4 - 14,9%; 2. 64,4 - 64,9	1. 14 - 14,5%; 2. 65,2 - 65,7	1. 13,8 - 14,3%; 2. 66 - 66,5	1. 13,5 - 14%; 2. 66,8 - 67,3	1. 13,2 - 13,7%; 2. 67,6 - 68,1	416.9		
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Difasilitasi Pembangunannya	150 unit	151 unit	152 unit	153 unit	154 unit	75.0	Kab. Pesisir Barat	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)					0.19	47.4	Kab. Pesisir Barat	Kementerian PUPR
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit		25.2	Kab. Pesisir Barat	Kementerian Perdagangan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu		4 orang	4 orang	3 orang	3 orang	3 orang	0.4	Kab. Pesisir Barat	Kementerian Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	17 orang	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	0.6	Kab. Pesisir Barat	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	100 Orang	120 Orang	144 Orang	173 Orang	207 Orang	3.7	Kab. Pesisir Barat	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	11,687	11,687	11,687	11,687	11,687	105.2	Kab. Pesisir Barat	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	9,344	9,344	9,344	9,344	9,344	159.4	Kab. Pesisir Barat	Kementerian Sosial
Penyediaan Moda Transportasi Darat	Jumlah Moda Transportasi Darat yang Disediakan	2 unit					0.0	Kab. Pesisir Barat	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Penyediaan Moda Transportasi Air	Jumlah Moda Transportasi Air yang Disediakan	2 unit	2 unit				0.0	Kab. Pesisir Barat	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung	1 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	-	-	-	2 kawasan mandiri	30.8		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	-	1 SP	1 SP	2 SP	1 SP	19.5	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	1	0	1	1	9.1	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	1	1	2	0	2.0	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	401	0	0	0	0	0.2	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	401	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Bangka Belitung									
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	1 kawasan mandiri	-	-	-	1 kawasan berdaya saing	16.4		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	-	-	1 SP	-	1 SP	12.1	Kabupaten Bangka Selatan	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	0	0	150	0	0.0	Kabupaten Bangka Selatan	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	0	1	0	0	3.0	Kabupaten Bangka Selatan	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	1	0	1	0	1.0	Kabupaten Bangka Selatan	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	400	0	0	0	0	0.1	Kabupaten Bangka Selatan	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	150	0	0.0		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	400	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Bangka Selatan	Kementerian ATR/BPN
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	66.69	66.87	67.02	67.14	67.61	81.9		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	1 desa	2 desa	2 desa	5.0	DPP Tanjung Kelayang	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	50 desa	0 desa	122 desa	0 desa	50 desa	4.0	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	50 desa	0 desa	122 desa	0 desa	50 desa	7.2	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	153 orang	154 orang	195 orang	193 orang	159 orang	39.8	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Bangka Barat, Bangka	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	50.95; 44.33; 52.54	56.96; 49.50; 58.16	62.97; 54.66; 63.77	68.98; 59.83; 69.39	75.00; 65.00; 75.00	285.0		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkela sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	250 unit	2.2	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	62 unit	8.1	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	68 paket	38.1	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	6 unit	1.3	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	2 unit	26.7	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	172 unit	81.9	Kab. Bangka Selatan	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	2 unit	1.2	Kab. Bangka Selatan	Kementerian Pertanian				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3.2	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 kawasan	2.4	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Kemendesa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	3 unit	120.0	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Kementerian ESDM				
Provinsi Kepulauan Riau									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	59.82	60.34	60.75	61.08	62.41	81.4		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	197 desa	52 desa	70 desa	75 desa	0 desa	6.2	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	15 desa	5.6	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	197 desa	52 desa	70 desa	75 desa	0 desa	13.9	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	136 orang	137 orang	173 orang	171 orang	141 orang	35.4	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Natuna, Lingga	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan	71.60	72.45	73.30	74.15	75.00	44.9		
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Bintan	Kementerian Pariwisata				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Bintan	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	0.8	Kab. Bintan	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	40.0	Kab. Bintan	Kementerian ESDM				
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1.) 12,98% 2.) 1,43%	1.) 13,66% 2.) 1,59%	1.) 14,34% 2.) 1,76%	1.) 15,02% 2.) 1,93%	1.) 15,70% 2.) 2,10%	159.3		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna	4	4	4	4	5	11.0	Kabupaten Natuna	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-	-	3	-	6.0	Kabupaten Natuna	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Khusus Perbatasan*	Jumlah rumah khusus perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	-	10	10	10	10	8.2	Kabupaten Natuna	Kementerian PUPR
Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perbatasan	Kapasitas jaringan perpipaan yang dikembangkan	11000	11000	11000	11000	11000	50.0	Kabupaten Natuna	Kementerian PUPR
Fasilitasi Legislasi RDTR Ranai Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0.5	Kabupaten Natuna	Kementerian ATR/BPN
Peningkatan mutu pelayanan & efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	Penambahan jaringan distribusi						0.0	Kabupaten Natuna	Kementerian ESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	10	10	10	10	1.4	Kabupaten Natuna	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	-	2	-	2	-	2.2	Kabupaten Natuna	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pelabuhan penyebrangan Serasan	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	-	-	1	-	-	75.0	Kabupaten Natuna	Kementerian Perhubungan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	-	-	50	50	50	0.1	Kabupaten Natuna	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL / LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI	1 lokasi	4.0	Kabupaten Natuna	Kementerian Kominfo				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	0.2	Kabupaten Natuna	Kemendesa PDTT				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	0.7	Kabupaten Natuna	Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Kepulauan Riau	34 kecamatan	74.6						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM						0.0	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Seborg, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Pemerintah Daerah

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun						0.0	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	34 kecamatan	0.0	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Pemerintah Daerah				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan						0.0	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	34 kecamatan	0.0	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Pemerintah Daerah				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar						0.0	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	34 kecamatan	0.0	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Pemerintah Daerah				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	25	25	25	25	3.6	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	80 paket	80 paket	80 paket	80 paket	70.4	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Kementerian ESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital						0.6	Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Seborg, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Moro, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bungurang Barat, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji	Kemendesa PDTT
KP 6: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3.01	3.08	3.15	3.23	3.3	6,134.3		
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	32.3%	38.3%	44.3%	50.3%	56.3%			
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	91	105	121	135	164			
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	30	61	96	130	164			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	12077	13286	14641	16123	17743			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik								
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	30	61	96	130	164			
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah								
	Persentase capaian SPM di daerah	66.31%	74.73%	83.16%	91.58%	100.00%			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik								
Provinsi Aceh									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di Provinsi Aceh	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1558	1624	1724	1824	1924	94.6		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	3	2	2	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0		Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	833	-	-	-	4.4	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	7	13	19	24	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatür yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	7	13	19	24	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	10	12	15	18	20	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	69.56%	77.17%	84.78%	92.39%	100.00%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	24	24	24	24	24	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	7	13	19	24	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	7	13	19	24	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	7	13	19	24	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	7	13	19	24	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	13	19	24	24	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	24	24	24	24	24	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Aplikasi Umum Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah)	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	10	11	12	13	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnnya meningkat	11	14	17	20	24			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	13	16	19	23	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	8	12	16	20	24	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	7	13	19	24	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	7	13	19	24			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	7	13	19	24	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmun)	6	11	15	20	24	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	7	13	19	24			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	7	13	19	24	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Peningkatan penataan hubungan pusat daerah								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	2	2	2	2	2.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.								
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	-	-	1	1	-	2.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	1	1	1	1	1	7.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus	4	4	4	4	4	5.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanian							553.1		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) (Ha)	401443	401443	401443	401443	401443	349.7	Aceh	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) (Ha)	38376	38376	38376	38376	38376	0.4	Aceh	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker) (satker)	22	22	22	22	22	32.1	Aceh	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	1394	1394	1394	1394	1394	171.0	Aceh	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							13.7		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Aceh	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2.0	Kec. Bener Meriah	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	6	6	2.3	Aceh	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	4	5	6	5.2	Aceh	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	0	0	1	3.3	Aceh (KSN Kawasan Ekosistem Leuseur), KSN Bandar Aceh Darrusalam	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sumatera Utara									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Utara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1808	2000	2209	2440	2694	124.0		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	3	3	3	3	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0		Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	2000 KM2	-	-	36.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	2000 KM2	-	-	13.1	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	50	-	-	-	-	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Percentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	11	18	26	34	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	11	18	26	34	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	4	4	4	2.4	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	65.79%	74.34%	82.90%	91.45%	100.00%				
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	34	34	34	34	34	1.7	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	11	18	26	34	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	11	18	26	34	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	11	18	26	34	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	11	18	26	34	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Merefornasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	18	26	34	34	0.2	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	21%	27%	33%	39%	45%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	34	34	34	34	34	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	1	-	-	-	0.6	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	19	22	25	28	34			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	18	21	24	27	33	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	19	23	27	30	34	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	11	18	26	34	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjaanya berkualitas	3	11	18	26	34			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	11	18	26	34	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	13	18	24	29	34	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	11	18	26	34			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	11	18	26	34	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	3	5	5	5	5	4.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							797.8		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	80000	544330	544330	544330	544330	474.4	Sumatera Utara	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	88000	421366	421366	421366	421366	3.3	Sumatera Utara	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	26	26	26	26	26	32.1	Sumatera Utara	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	2348	2348	2348	2348	2348	287.9	Sumatera Utara	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							17.8		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Sumatera Utara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	9	11	3.6	Sumatera Utara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	2	0	4.0	Sumatera Utara (Nias Barat dan Nias Selatan)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	10	8.5	Sumatera Utara	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sumatera Barat									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1490	1649	1824	2016	2228	121.2		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	3	2	3	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	2000 KM2	-	-	36.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	2000 KM2	-	-	13.1	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	833	-	-	-	4.4	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Percentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	0	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	7	11	16	20	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	7	11	16	20	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	-	-	6	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	63.18%	72.38%	81.59%	90.79%	100.00%				
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	20	20	20	20	20	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	7	11	16	20	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	7	11	16	20	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	7	11	16	20	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	7	11	16	20	0.3		Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Merefomasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	11	16	20	20	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	69%	75%	81%	87%	93%				
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	20	20	20	20	20	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	9	11	13	15	20				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	8	10	12	14	19	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	17	18	19	19	20	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	3	7	11	16	20	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	7	11	16	20			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	7	11	16	20	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	13	16	18	20	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	7	11	16	20			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	7	11	16	20	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							563.5		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	52000	306642	306642	306642	306642	277.6	Sumatera Barat	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	71045	71045	71045	71045	71045	0.7	Sumatera Barat	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	20	20	20	20	20	32.1	Sumatera Barat	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	2064	2064	2064	2064	2064	253.1	Sumatera Barat	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							18.4		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Sumatera Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	1	0	0	0	2.0	Sumatera Barat (Kep Mentawai)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3.3	Sumatera Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	8	8.2	Sumatera Barat	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional Provinsi Riau	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	1	0	0	3.2	Sumatera Barat (KSN TN Kerinci Seblat, KSN Danau Maninjau)	Kementerian ATR/BPN
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Riau	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1310	1451	1606	1777	1964	78.4		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	4	3	2	3	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	-	833	-	5.3	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	-	-	-	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	8	11	13	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	6	8	11	13	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	67.87%	75.90%	83.94%	91.97%	100.00%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	13	13	13	13	13	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	8	11	13	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	8	11	13	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	8	11	13	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	8	11	13	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	8	11	13	13	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	27%	33%	39%	45%	51%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Sistem penilaian terpadu antar K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	13	13	13	13	13	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	6	7	8	9	13			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	5	6	7	8	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	8	9	11	12	13	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	6	8	11	13	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	8	11	13			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	8	11	13	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	10	11	12	12	13	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	8	11	13			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	8	11	13	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							596.0		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	122500	201964	201964	201964	201964	92.9	Riau	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	282519	282519	282519	282519	282519	2.8	Riau	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32.1	Riau	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	3819	3819	3819	3819	3819	468.2	Riau	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							9.2		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Riau	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	4	4	6	6	2.2	Riau	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	2	3	4	6	6	5.2	Riau	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Jambi									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jambi	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	880	978	1086	1204	1335	77.9		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	3	3	3	3	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	0	0	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3		Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	5	8	10	12	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	8	10	12	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	65.32%	73.99%	82.66%	91.33%	100.00%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	12	12	12	12	12	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	5	8	10	12	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	5	8	10	12	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	8	10	12	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	5	8	10	12	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Merefomasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	8	10	12	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	0.54	0.6	0.66	0.72	0.78			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kemendagri)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	13	13	13	13	13	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	9	10	11	12	12			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	8	9	10	11	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	11	12	12	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	5	8	10	12	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	5	8	10	12			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	5	8	10	12	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	7	8	10	11	12	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	5	8	10	12			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	5	8	10	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							444.9		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	168000	442371	442371	442371	442371	280.2	Jambi	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	353625	353625	353625	353625	353625	3.5	Jambi	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	12	12	12	12	32.1	Jambi	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	1053	1053	1053	1053	1053	129.2	Jambi	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							13.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Jambi	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	0	1	2.0	Jambi (Kab Sarolangun)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	5	7	2.3	Jambi	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	4	5	7	6.4	Jambi	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1.6	Jambi (KSN Cagar Budaya Muaro Jambi)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sumatera Selatan									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Selatan	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1648	1823	2015	2227	2459	218.9		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	3	2	2	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	2000 KM2	2000 KM2	2800 KM2	103.7	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	2000 KM2	2000 KM2	2800 KM2	39.6	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	100	-	-	-	-	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	10	13	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	8	10	12	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	1	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	69.50%	77.12%	84.75%	92.37%	100.00%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	18	18	18	18	18	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	10	13	18	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	10	13	18	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	10	13	18	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	10	13	18	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereforsmasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	10	13	18	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	34%	40%	46%	52%	58%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	18	18	18	18	18	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	9	11	13	15	18			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	8	10	12	14	17	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	10	13	15	18	0.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	6	10	13	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	10	13	18			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	10	13	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	8	11	13	16	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	10	13	18			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	10	13	18	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	1	1	1	3	1.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							826.7		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	272450	842774	842774	842774	842774	501.3	Sumatera Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	551837	551837	551837	551837	551837	5.4	Sumatera Selatan	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	16	16	16	16	16	32.1	Sumatera Selatan	Kementerian ATR/BPN
Perapatatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatatan batas (Km)	2348	2348	2348	2348	2348	287.9	Sumatera Selatan	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							14.3		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Sumatera Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	9	9	3.4	Sumatera Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	9	9	8.5	Sumatera Selatan	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1.7	Sumatera Selatan	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Bengkulu									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Bengkulu	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1761	1947	2152	2377	2625	77.8		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	2	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Percentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	7	9	11	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	57.45%	68.08%	78.72%	89.36%	100.00%				
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	11	11	11	11	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	5	7	9	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	5	7	9	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereforsasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	7	9	11	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	30%	36%	42%	48%	54%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	11	11	11	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	-	-	0.1	Kab. Seluma	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	9	9	9	9	11			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	8	8	8	8	10	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	8	9	10	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjaanya berkualitas	3	5	7	9	11			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	4	6	8	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	5	7	9	11			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	5	7	9	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							208.3		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	40000	149861	149861	149861	149861	109.3	Bengkulu	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	111000	122738	122738	122738	122738	1.1	Bengkulu	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32.1	Bengkulu	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	537	537	537	537	537	65.9	Bengkulu	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							12.8		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Bengkulu	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	7	2.6	Bengkulu	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	7	7.7	Bengkulu	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1.7	Bengkulu (KSN TN Bukit Barisan Selatan)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Lampung							81.6		
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Lampung	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	704	784	872	969	1076			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	3	2	3	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	-	833	-	5.3	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	30	34	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3		Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	9	12	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	6	9	12	16	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	65.17%	73.88%	82.58%	91.29%	100.00%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	16	16	16	16	16	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	9	12	16	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	9	12	16	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	9	12	16	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	9	12	16	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	9	12	16	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	25%	31%	37%	43%	49%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	16	16	16	16	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	1	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	9	10	11	12	16			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	8	9	10	11	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	5	8	11	13	16	0.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	6	9	12	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	9	12	16			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	9	12	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmuum)	9	11	13	14	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	9	12	16			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	9	12	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	4	4	5	2.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							381.1		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	200000	347311	347311	347311	347311	262.2	Lampung	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	104044	104044	104044	104044	104044	1.0	Lampung	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32.1	Lampung	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	700	700	700	700	700	85.9	Lampung	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							10.5		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Lampung	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	7	8	2.7	Lampung	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	7	8	6.9	Lampung	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kepulauan Riau									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kepulauan Riau	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	459	515	576	644	718	137.6		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	1716.25 KM2	-	-	-	-	18.9	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	1024.75 NLP	-	-	-	-	42.4	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	4	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	4	6	7	8	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	-	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	2	2	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Percentase pencapaian SPM di daerah	65.88%	74.41%	82.94%	91.47%	100.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	8	8	8	8	8	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	4	6	7	8	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	4	6	7	8	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	4	6	7	8	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	4	6	7	8	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	6	7	8	8	0.2		
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	26%	32%	38%	44%	50%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Sistem penilaian terpadu antar K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	8	8	8	8	8	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	3	4	6	7	8			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya			1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	4	5	6	7	8	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	4	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	4	6	7	8			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	4	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	2	4	5	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	4	6	7	8			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	4	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	15	30	45	60	75	3.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	5	5	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanian							311.4		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	39000	27450	27450	27450	27450	44.0	Kep. Riau	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	16489	16489	16489	16489	16489	0.2	Kep. Riau	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32.1	Kep. Riau	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	1917	1917	1917	1917	1917	235.1	Kep. Riau	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							14.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Kep. Riau	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2.0	Kep. Riau (Bintan)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	6	7	2.5	Kep. Riau	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	6.6	Kep. Riau	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	1	0	0	0	0	2.1	Serasan (Kep. Riau)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	459	515	577	645	720	83.8		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	-	-	1000	7.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	4	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	4	6	7	8	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaianan SPM di daerah	73.42%	80.07%	86.71%	93.36%	100.00%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	8	8	8	8	8	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	4	6	7	8	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	4	6	7	8	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	4	6	7	8	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	4	6	7	8	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	-	6	7	8	8	0.2		
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	25%	31%	37%	43%	49%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	8	8	8	8	8	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	1	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	7	7	8	8	8			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	6	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	7	8	8	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	4	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	4	6	7	8			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	4	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	5	6	7	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	4	6	7	8			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	4	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	15	30	45	60	75	3.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							220.5		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	52000	168528	168528	168528	168528	66.4	Kep. Bangka Belitung	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	111928	111928	111928	111928	111928	1.1	Kep. Bangka Belitung	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32.1	Kep. Bangka Belitung	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	986	986	986	986	986	120.9	Kep. Bangka Belitung	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							11.3		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Kep. Bangka Belitung	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	7	8	2.7	Kep. Bangka Belitung	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	7	8	6.9	Kep. Bangka Belitung	Kementerian ATR/BPN
PP : Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	Laju pertumbuhan PDRB Jawa-Bali (persen/tahun)	5.74	5.83	5.94	6.08	6.27	1,072,835.9		
	Share PDRB Wilayah Jawa-Bali (persen)	59.93	59.90	59.88	59.84	59.81			
	IPM Wilayah Jawa-Bali (min-maks)	72,24-82,07	72,86-82,61	73,46-83,15	74,03-83,69	74,60-84,23			
	Persentase penduduk miskin wilayah Jawa-Bali (persen)	7.73	7.45	7.00	6.31	5.93			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	>1	>1	>1	>1	>1	63,741.1		
Provinsi DKI Jakarta									
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas DPP Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi DKI Jakarta	>1	>1	>1	>1	>1	0.0		
Pengadaan Kapal untuk Penyeberangan Kepulauan Seribu	Jumlah kapal penyeberangan						0.0	Prov. DKI Jakarta	Kementerian Perhubungan
Penanganan jalan mendukung KSPN Kepulauan Seribu	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Prov. DKI Jakarta	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KSPN Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.1	0.0	Kab. Kepulauan Seribu	Kementerian PUPR
Provinsi Jawa Barat									
ProP : Pembangunan DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	>1	>1	>1	>1	>1	528.3		
Penyediaan air baku KSPN Bandung-Halimun-Ciletuh	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					2.1	0.0	Kab. Bandung, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Lebak	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	20,144.0	22,158.4	24,374.2	26,811.7	29,492.8	528.3	Prov. Jawa Barat	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Tengah									
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Borobudur dan sekitarnya	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	>1	>1	>1	>1	>1	13,216.8		
Penanganan Jalan mendukung KSPN Borobudur	Panjang jalan yang terbangun	21.0					219.5	Prov. Jawa Tengah	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Tol Trans Jawa	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Prov. Jawa Tengah	Kementerian PUPR
Pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta	Panjang jalan yang terbangun		15.0	25.0	35.0	29.0	6,090.0	Prov. Jawa Tengah, DIY	Kementerian PUPR
Akses KSPN Borobudur	Panjang jalan yang dibangun (km)	17	15	20	11	13	1,550.5	Jawa Tengah	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Adi Sumarmo	Jumlah bandara yang dikembangkan						0.0	Kab. Boyolali	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Jalur Kereta Api Yogyakarta-Solo	Panjang jalur kereta api yang terbangun						0.0	Prov. Jawa Tengah, DIY	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Jalur Kereta Api Bandara Adi Sumarmo	Panjang jalur kereta api yang terbangun	1.0					40.0	Prov. Jawa Tengah	Kementerian Perhubungan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan KA KSPN Borobudur Semarang-Magelang	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					10	472.8	Jawa Tengah	Kemenhub
Pembangunan infrastruktur tumpungan air multi guna berbasis wilayah: Waduk Bener	Pembangunan waduk multi guna (unit)				1.0		3,039.3	Kab. Purworejo	Kementerian PUPR
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Kawasan Strategis NYIA pada DAS Serang	Pembangunan prasarana pengendali banjir (km)						206.0	Kulon Progo	Kementerian PUPR
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Kawasan Strategis NYIA pada DAS Bogowonto	Pembangunan prasarana pengendali banjir (km)						800.0	Purworejo	Kementerian PUPR
Pembangunan Sabo Dam G. Merapi Kali Apu dan Kali Senowo Kab. Magelang	Pembangunan Sabo Dam (buah)	6.0					120.0	Magelang	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KSPN Borobudur dan sekitarnya (superprioritas)	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			0.2			60.0	Kab. Magelang	Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3.0					1.4	Prov. Jawa Tengah	BKPM
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							0.0	Prov. Jawa Tengah	Kementerian PUPR
Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan							0.0	Prov. Jawa Tengah	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM							0.0	Prov. Jawa Tengah	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM							0.0	Prov. Jawa Tengah	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	24,512.0	26,963.2	29,659.5	32,625.5	35,888.0	617.3	Prov. Jawa Tengah	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Pembangunan KI Brebes	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	>1	>1	>1	>1	>1	647.3		
Penyediaan air baku KI Brebes	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.1	30.0	Kab. Brebes	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	24,512.0	26,963.2	29,659.5	32,625.5	35,888.0	617.3	Prov. Jawa Tengah	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi DI Yogyakarta									
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Borobudur dan sekitarnya	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	>1	>1	>1	>1	>1	6,982.0		
Penanganan Jalan mendukung KSPN Borobudur	Panjang jalan yang terbangun	21.0					219.5	Prov. Jawa Tengah	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Tol Trans Jawa	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Prov. DIY	Kementerian PUPR
Pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta	Panjang jalan yang terbangun		15.0	25.0	35.0	29.0	6,090.0	Prov. Jawa Tengah, DIY	Kementerian PUPR
Pembangunan Bandara Kulon Progo	Jumlah bandara yang dikembangkan						0.0	Prov. DIY	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Jalur Kereta Api Yogyakarta-Solo	Panjang jalur kereta api yang terbangun	1.0					600.0	Prov. DIY, Jawa Tengah	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Kawasan Strategis NYIA pada DAS Serang	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan (Km)	2.0					0.0	Kab. Kulonprogo	Kementerian PUPR
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Kawasan Strategis NYIA pada DAS Bogowonto	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan (Km)	2.9					0.0	Kab. Purworejo	Kementerian PUPR
Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Perekonomian Terpadu (KAPET) Kab. Kulon Progo Tahap 2 (Konstruksi dan Supervisi)	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.2				0.0	Kab. Kulonprogo	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							0.0	Prov. DIY	Kementerian PUPR
Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan							0.0	Prov. DIY	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM							0.0	Prov. DIY	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM							0.0	Prov. DIY	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3.0					1.4	Prov. DIY	BKPM
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,032.0	2,235.2	2,458.7	2,704.6	2,975.1	71.1	Prov. DIY	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Timur									
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Madura	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	>1	>1	>1	>1	>1	1,495.3		
Penyediaan air baku KI Madura	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.1		15.0	Kab. Bangkalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa Timur	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Jawa Timur (tahap pembangunan)	Studi/Kajian (SP)	Studi/Kajian (OBC dan FBC)	pembangunan fisik	pembangunan fisik	operasi	1,002.0	Jawa Timur (Kab. Lamongan)	SWASTA
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	14,800.0	16,280.0	17,908.0	19,698.8	21,668.7	478.3	Prov. Jawa Timur	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Bromo-Tengger-Semeru	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	>1	>1	>1	>1	>1	2,786.1		
Pengembangan Bandara Juanda	Jumlah fasilitas bandara yang dikembangkan						0.0	Kota Surabaya	Kementerian Perhubungan
Penanganan jalan mendukung KSPN Bromo-Tengger-Semeru	Panjang jalan yang terbangun		6.0	15.0	15.0		1,252.8	Prov. Jawa Timur	Kementerian PUPR
Pengembangan jalur ganda Kereta Api Selatan Jawa	Panjang jalur ganda kereta api selatan						0.0	Prov. Jawa Timur	Kementerian Perhubungan
Peningkatan Jalur KA Surabaya - Malang	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)		30	30	30	20	1,055.0	Jawa Timur	Kemenhub
Penyediaan air baku KSPN Bromo-Tengger-Semeru	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					7.4	0.0	Kab. Malang	Kementerian PUPR
Pengembangan pelabuhan Probolinggo	Jumlah fasilitas pelabuhan yang dikembangkan						0.0		Kementerian Perhubungan
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	14,800.0	16,280.0	17,908.0	19,698.8	21,668.7	478.3	Prov. Jawa Timur	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Pembangunan DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	>1	>1	>1	>1	>1	25,320.4		
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)	20	35	45	35	38	23,402.2	Jawa Timur	KemenPUPR
Peningkatan Jalur KA Surabaya - Banyuwangi	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	15	30	40	40	40	1,440.0	Jawa Timur	Kemenhub
Penangan jalan tol trans Jawa	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Kab. Banyuwangi	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	14,800.0	16,280.0	17,908.0	19,698.8	21,668.7	478.3	Prov. Jawa Timur	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	>1	>1	>1	>1	>1	9.0		
Penyediaan air baku KEK Singhasari	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.0	9.0	Kab Malang	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja						0.0	Prov. Jawa Timur	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Banten									
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Tanjung Lesung/KEK Tanjung Lesung	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Banten	>1	>1	>1	>1	>1	5,514.4		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Reaktivasi KA Rangkasbitung-Pandeglang-Saketi-Labuhan	Panjang jalur kereta api yang terbangun						0.0	Prov. Banten	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa	Panjang jalan yang terbangun	45.0	50.0	55.0	40.0	35.0	4,950.0	Prov. Banten	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Akses KEK Tanjung Lesung, Jalan Koridor Tanjung Lesung-Sumur-Cabaliung-Bayah	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Prov. Banten	Kementerian PUPR
Jalan akses KEK Tanjung Lesung	Panjang jalan yang dibangun (km)	10	19	13	15	9	522.9	Banten	KemenPUPR
Penyediaan air baku KEK/KSPN Tanjung Lesung	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)					0.0	9.0	Kab. Pandeglang	Kementerian PUPR
Pelimpahan kewenangan penerbitan perijinan di KEK	Jumlah perijinan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK	1.0					0.3	Prov. Banten	Kemendag
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7.0					0.8	Prov. Banten	BKPM
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	1,072.0	1,179.2	1,297.1	1,426.8	1,569.5	31.4	Prov. Banten	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Bali									
ProP : Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Bali	>1	>1	>1	>1	>1	7,241.5		
Pelabuhan Tanjung Benoa	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	1	1	1	230.8	Bali	Badan Usaha
Pelabuhan Tanah Ampo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan						0.0	Bali	Kemenhub
Peningkatan Bandara Ngurah Rai	Jumlah fasilitas bandara yang dikembangkan						0.0	Kota Denpasar	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandara Bali Baru	Jumlah bandara baru yang dibangun	1	1	1	1	1	1,500.0	Kab. Buleleng	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jalan Strategis Lintas Utara - Selatan Bali	Panjang jalan yang terbangun (km)	1	1	2	2	1	535.6	Bali	KemenPUPR
Pembangunan Jalan Strategis Lintas Utara Bali	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	2	-	-	-	13.6	Bali	KemenPUPR
Pembangunan KA Mengwitani - Singaraja	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					5	250.0	Bali	Kemenhub
Pembangunan SPALD-T Skala Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Regional (SR)	0	24000	24000	24000	0	4,582.0	Provinsi Bali	
Penyediaan air baku DPP Bali (Revitalisasi)	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)				0.2		60.0	Prov. Bali	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami						15.0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu), Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado), Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	1,728.0	1,900.8	2,090.9	2,300.0	2,530.0	54.5	Prov. Bali	Kementerian Tenaga Kerja
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Total nilai produksi (Ton) setiap komoditas unggulan di Jawa Bali						118.6		
Provinsi DKI Jakarta									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	161,001.4	165,413.7	169,858.0	174,396.4	179,001.8	0.0	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Barat									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan teh							18.7		
Peningkatan produksi teh	jumlah produksi (Ton)	103,444.5	103,444.5	103,444.5	103,444.5	103,444.5	18.7	Kab. Cianjur	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan komoditas unggulan cengkeh							0.0		
Peningkatan produksi cengkeh	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Tasikmalaya, Kab. Sumedang	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nilam							0.0		
Peningkatan produksi nilam	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Kuningan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							0.0		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	21,380.9	22,331.2	23,310.6	24,317.7	25,410.8	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam							0.0		
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	96,821.8	98,835.5	100,862.9	102,906.1	104,993.9	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu							0.0		
Peningkatan produksi tebu	jumlah produksi (Ton)	79,497.1	80,811.0	82,125.0	83,443.3	84,768.1	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan emas							0.0		
Peningkatan produksi emas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan produksi perikanan budidaya	jumlah produksi (Ton)	1,293,944.7	1,322,064.6	1,350,518.4	1,379,991.7	1,410,126.4	0.0	Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Garut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan teh							0.0		
Peningkatan produksi teh	jumlah produksi (Ton)	9,205.1	9,616.4	10,034.1	10,458.2	10,901.7	0.0	Kab. Banjarnegara, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang	Kementerian Pertanian
ProP : Peningkatan komoditas unggulan tebu							0.0		
Peningkatan produksi tebu	jumlah produksi (Ton)	183,509.5	186,534.5	189,559.9	192,594.9	195,645.0	0.0	Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab. Pati	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							0.0		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	18,500.0	19,567.2	20,667.0	21,798.0	23,025.5	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	166,509.1	169,868.2	173,250.2	176,658.7	180,141.4	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Peningkatan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	374,257.8	379,679.7	385,140.9	390,717.7	396,376.8	0.0	Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Batang, Kab. Pemalang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
DI Yogyakarta									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	57,083.9	58,077.2	59,077.3	60,085.2	61,115.0	0.0	Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	1,343.7	1,364.1	1,385.0	1,406.1	1,427.9	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan produksi perikanan budidaya	jumlah produksi (Ton)	84,265.5	86,086.5	87,929.2	89,837.9	91,789.4	0.0	Kab. Sleman, Kab. Bantul	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Timur									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan komoditas unggulan tebu							47.8		
Peningkatan produksi tebu	jumlah produksi (Ton)	1,067,964.4	1,085,338.6	1,102,715.2	1,120,146.9	1,137,665.1	47.8	Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Mojokerto, Ngantuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Lamongan, Gresik	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							14.7		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	59,645.0	59,645.0	59,645.0	59,645.0	59,645.0	14.7	Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso	Kementerian Pertanian
ProP : Peningkatan produksi Garam							0.0		
Peningkatan produksi Garam	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep	Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	267,205.0	272,164.3	277,157.4	282,189.5	287,331.3	0.0	Kab. Banyuwangi, Kab. Sumenep	Kementerian Pertanian
Provinsi Banten									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	45,135.2	46,054.1	46,979.3	47,911.6	48,864.3	0.0	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	2,695.5	2,740.2	2,785.8	2,832.0	2,879.6	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan cengkeh							0.0		
Peningkatan produksi cengkeh	jumlah produksi (Ton)	1,949.3	2,082.3	2,219.4	2,360.4	2,513.4	0.0	Kab. Pandeglang	Kementerian Pertanian
Provinsi Bali									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							29.6		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	12,507.0	12,507.0	12,507.0	12,507.0	12,507.0	29.6	Kab. Tabanan, Kab. Badung	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							7.8		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	62,049.0	62,049.0	62,049.0	62,049.0	62,049.0	7.8	Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Badung, Kab. Gianyar	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	3,873.0	3,953.9	4,036.4	4,120.2	4,206.3	0.0		Kementerian Pertanian
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali						703,101.9		
Provinsi DKI Jakarta									
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)							238,765.9		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah publikasi/laporan pengembangan data statistik metropolitan	0	1	1	1	1	43.7	WM Jakarta	BPS
Pembangunan KA Cepat Jakarta-Surabaya	Terbangunnya KA (km)					432	57,000.0	DKI Jakarta	Kemenhub
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC)	Terbangunnya KA (km)		142				42,000.0	DKI Jakarta	Kemenhub
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:							0.0		
a. MRT North-South Phase II (km)	Panjang jalur yang dibangun (Km)					9	24,000.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda
b. MRT East-West Phase I (km)	Panjang jalur yang dibangun (Km)					9	11,370.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda
c. Perkeretaapian Jabodetabek (km)	Panjang jalur yang dibangun (Km)					33	4,210.0	DKI Jakarta	Kemenhub
d. Elevated Loopline	Panjang jalur yang dibangun (Km)				9	16	27,153.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda
e. KA Outer Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (Km)				5	5	1,500.0	DKI Jakarta	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
f. LRT DKI Fase II (Velodrome-Manggarai)	Jumlah panjang jalur yang dibangun (km)			12			345.0	DKI Jakarta	Pemda DKI
g. LRT Jabodebek Phase I dan II	Jumlah panjang jalur yang dibangun (km)		39			27	15,200.0	DKI Jakarta	Kemenhub, BUMN
h. BRT Trans Jakarta dan Jabodetabek	Jumlah jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)				1		220.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda
Pengembangan pelabuhan utama (hub):							0.0		
-Pelabuhan Tanjung Priok	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok	1	1	1	1	1	5,000.0	DKI Jakarta	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						5,123.0	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						4,265.0	DKI Jakarta	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						176.0	Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						3,885.7	DKI Jakarta	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						1,031.7	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						114.6	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	170	445	820	1,025	1,435	2,537.1	DKI Jakarta	
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						1,800.0	WM Jakarta	KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						131.4	WM Jakarta	BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	6	6	6	6	6	300.0	WM Jakarta	Kementerian PUPR
Pengembangan kawasan TOD	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan	1	1	1	1	1	10,000.0	Jabodetabek	Kemenhub, Pemda
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)						13,676.5	Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara,	KPBU
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)						5,536.6	Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara,	BU
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0.7	WM Jakarta	Kemendagri
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)						122.6	WM Jakarta	KPBU
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas						80.0	WM Jakarta	Kementerian ESDM
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	WM Jakarta	Kementerian PUPR
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)						1,800.0	WM Jakarta	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa						131.4	WM Jakarta	BLG

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rencana Aksi peningkatan peringkat EoDB	Jumlah rekomendasi usulan untuk meningkatkan kemudahan berusaha						7.0	DKI Jakarta	BKPM
Provinsi Jawa Barat									
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)							90,957.4		
Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)	14					1,300.0	Kota Bogor, Kab. Bogor	Kementerian PUPR, Swasta
Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					49	3,565.0	Kota Bogor	Kemenhub
Pengembangan SPAM Regional Jatiluhur	Jumlah SPAM Regional terbangun						43.5	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Kementerian PUPR
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBUs	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBUs)			1,000,000	1,000,000	1,000,000	46,500.0	Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bekasi	KPBUs
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)	321,775	321,775				15,502.5	Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bekasi	BU
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas						80.0	WM Jakarta di Jawa Barat	Kementerian ESDM
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)						1,800.0	WM Jakarta di Jawa Barat	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa						131.4	WM Jakarta di Jawa Barat	BIG
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	0	0	1	1	1	15.0	Kota Bogor	Kementerian PUPR
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Bekasi	Kemennaker
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelempara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)						4.0	Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi	
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelempara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						3.2	Kab. Bogor, Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok	
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						2,708.0	Kota Bekasi, Kota Depok	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						13,166.0	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur	Kementerian PUPR, Swasta
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						517.0	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						4,552.3	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						874.8	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						182.2	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur	DAK
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung							110,214.0		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah pengembangan data statistik metropolitan	0	0	1	1	1	15.7	WM Bandung	BPS
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
a. Jalur KA Komuter (Pembangunan Jalur Gand KA Kiara Condong - Cicalengka)	Panjang jalur yang dibangun (km)				10	17	2,100.0	WM Bandung	Kemenhub
b Metro Capsul Bandung	Panjang jalur yang dibangun (km)				8		336.0	Kota Bandung	Kemenhub, Pemda
c. LRT Bandung Raya	Panjang jalur yang dibangun (km)					6	13,030.0	WM Bandung	Kemenhub, Pemda
d. BRT Bandung Raya	Jumlah jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)				1		1,000.0	WM Bandung	Kemenhub, Pemda
Peningkatan Jalur KA Bandung - Banjar	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	156					209.0	Kota Bandung	Kemenhub
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC)	Terbangunnya KA (km)		142				42,000.0	WM Bandung	Kemenhub
Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)		10	30	30	30	1,170.0	Kota Bandung, Kab. Bandung	Kementerian PUPR
Pengembangan SPAM Regional Jatigede	Jumlah SPAM Regional terbangun						43.5	WM Bandung (Jingkup pelayanan)	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						17,605.0	Kota Bandung, Kab. Bandung	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						12,042.0	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang	Kementerian PUPR, Swasta
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						135.0	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						2,255.8	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						523.7	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						57.0	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	797	2,082	3,838	4,798	6,717	11,874.8	Provinsi Jawa Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						2,735.3	WM Bandung	KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						1,107.3	WM Bandung	BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	5	5	5	5	50.0	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)						0.0	WM Bandung	Kementerian PUPR
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0.7	WM Bandung	Kemendagri
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	2	2	2	2	2	25.0	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat	Kemennaker
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir						5.0	Kota Bandung	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1,890.0	WM Bandung	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						2.4	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)						0.8	Kota Bandung	KPBU
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Barat)							7,479.4		
Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)	14					1,300.0	Kota Sukabumi	Kementerian PUPR, Swasta
Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					49	3,565.0	Kota Sukabumi	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						1,557.0	Kota Sukabumi, Kota Cirebon	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						24.0	Kota Sukabumi, Kota Cirebon	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						359.1	Kota Sukabumi, Kota Cirebon	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						57.6	Kota Sukabumi, Kota Cirebon	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						20.8	Kota Sukabumi, Kota Cirebon	DAK
Pembangunan Bandara Sukabumi-Jabar	Jumlah bandara baru yang dibangun	1	1	1	1	1	550.0	Kota Sukabumi (lingkup pelayanan)	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.12					36.0	Kota Cirebon	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	2	2	2	2	2	10.0	Kota Sukabumi, Kota Cirebon	Kementerian PUPR
Provinsi Jawa Tengah									
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang							30,009.2		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah pengembangan data statistik metropolitan	0	0	0	0	1	6.1	WM Semarang	BPS
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan							0.0		
a. LRT	Panjang jalur yang dibangun (km)						6	3,080.0	WMSemarang, Pemda
b. BRT Semarang	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)						1	1,000.0	Kota Semarang, Pemda
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	Terbangunnya KA akses Pelabuhan (km)	1					7.5	WM Semarang	Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara Ahmad Yani	Terbangunnya KA akses Bandara (km)						0.0	WM Semarang	Kemenhub
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)	0	15	25	35	29	6,090.0	Kab. Semarang	Kementerian PUPR, Swasta
Pengembangan SPAM Regional Semarang Barat	Jumlah SPAM Regional terbangun						43.5	WM Semarang (lingkup pelayanan)	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						565.2	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Grobogan	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						165.0	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Grobogan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						651.2	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Grobogan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						13.1	Kab. Kendal, Kab. Semarang	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	560	1,463	2,698	3,373	4,722	8,347.6	Provinsi Jawa Tengah	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						2,735.3	WM Semarang	KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						1,107.3	WM Semarang	BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaran Bangunan Gedung dan Peningataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	6	6	6	6	6	60.0	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Grobogan	Kementerian PUPR
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik						0.7	WM Semarang	Kemendagri
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)						2,735.3	Kota Semarang	KPBU

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Semarang	Kemennaker
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas						80.0	WM Semarang	Kementerian ESDM
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	2	2	2	2	2	10.0	Kota Semarang, Kota Salatiga	Kementerian PUPR
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengaman pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)						1,800.0	WM Semarang	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa						131.4	WM Semarang	Badan Informasi Geospasial
Pengembangan SPAM Regional Wasosukas	Jumlah SPAM Regional terbangun						43.5	WM Semarang (lingkup pelayanan)	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBUs	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1,320.0	WM Semarang (Kedungsepur)	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						3.2	Kota Semarang, Kendal, Demak, Kota Salatiga	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)						0.8	Kota Semarang	KPBU
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Tengah)							4,418.2		
Jalan Tol Solo-Yogyakarta	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)		5	10	20	6	2,330.6	Kota Surakarta	Kementerian PUPR, Swasta
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						759.6	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						10.0	Kota Tegal	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						1,017.4	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						50.3	Kota Surakarta	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						83.3	Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Kementerian PUPR
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Surakarta	Kemennaker
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Surakarta	KESDM
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.08				0.1	52.0	Kota Pekalongan, Kota Surakarta	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	3	3	3	3	3	15.0	Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Kementerian PUPR
Provinsi DI Yogyakarta									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (DI Yogyakarta)							8,551.7		
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)	0	15	25	35	29	6,090.0	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR, Swasta
Pembangunan KA akses Bandara Kulonprogo	Terbangunnya KA akses Bandara (km)		7				800.0	Kota Yogyakarta	Kemenhub
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						83.5	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						275.9	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						17.0	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						210.3	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						54.8	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						3.6	Kota Yogyakarta	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	68	177	326	408	571	1,008.6	Provinsi DIY	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta risiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi						3.0	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR
Provinsi Jawa Timur									
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya							125,867.7		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah publikasi/laporan pengembangan data statistik metropolitan	0	0	0	1	1	23.0	WM Surabaya	BPS
Pembangunan KA akses Bandara Juanda	Terbangunnya KA akses Bandara (km)			6		1	330.0	WM Surabaya	Kemenhub
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan							0.0		
a. Tram/LRT Surabaya	jumlah Koridor yang dibangun (koridor)					1	6,700.0	Kota Surabaya	Kemenhub, Pemda
b. KA Komuter Gerbang Kertasusila	panjang jalur yang dibangun (km)					1	10,200.0	WM Surabaya	Kemenhub, Pemda
Pembangunan KA Cepat Jakarta-Surabaya	Terbangunnya KA (km)					432	57,000.0	WM Surabaya	Kemenhub
-Pelabuhan Tanjung Perak	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak	1	1	1	1	1	5,000.0	WM Surabaya	Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						3,386.2	Kota Surabaya	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						2,550.2	Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						179.0	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						2,233.6	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Lamongan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						371.5	Kab. Gresik, Kota Surabaya	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						64.7	Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	661	1,726	3,182	3,978	5,569	9,845.1	Provinsi Jawa Timur	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						2,735.3	WM Surabaya	KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						1,107.3	WM Surabaya	BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	7	7	7	7	7	70.0	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan	Kementerian PUPR
Pengembangan SPAM Regional Umbulan	Jumlah SPAM Regional terbangun						43.5	Kab Pasuruan dan sekitarnya	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	3,645.0	WM Surabaya (Gerbangkertasusila)	KPBU

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas						80.0	WM Surabaya	Kementerian ESDM
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)						1,800.0	WM Surabaya	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa						131.4	WM Surabaya	Badan Informasi Geospasial
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	7	4	7	7	7	35.0	Kota Surabaya, Mojokerto	Kementerian PUPR
Rencana Aksi peningkatan peringkat EoDB	Jumlah rekomendasi usulan untuk meningkatkan kemudahan berusaha						7.0	Kota Surabaya	BKPM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)						2,735.3	Kab. Sidoarjo	KPBU
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)	321,775	321,775				15,502.5	Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo	BU
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Surabaya	KESDM
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0.7	WM Surabaya	Kemendagri
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						4.0	Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan	KPBU
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Timur)							28,709.6		
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)	20	35	45	35	38	23,402.2	Kota Probolinggo	Kementerian PUPR, Swasta
Pembangunan Bandara Kediri-Jatim	Jumlah bandara baru yang dibangun		1	1	1		600.0	Kota Kediri (lingkup pelayanan)	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						1,286.8	Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						68.0	Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						441.4	Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						26.4	Kota Pasuruan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						64.6	Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Kediri	DAK
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)						5.0	Kota Malang	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)					0.19	57.4	Kota Batu, Kota Kediri	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	4	4	4	4	4	20.0	Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan	Kementerian PUPR
Pengembangan kabupaten/kota/kawasan kreatif	Jumlah kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan	1					2.5	Kota Malang	Kemenparekraf
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)						2,735.3	Kota Pasuruan	KPBU
Provinsi Banten									
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (labodetabekpuniur)							21,034.3		
Pengembangan bandara hub primer:							0.0		
Bandara Soekarno-Hatta	Jumlah bandara yang dikembangkan	1					5,000.0	WM Jakarta di Provinsi Banten	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)						5,470.6	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	KPBU
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)						2,214.6	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	BU
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas						80.0	WM Jakarta di Provinsi Banten	Kementerian ESDM
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)						1,800.0	WM Jakarta di Provinsi Banten	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa						131.4	WM Jakarta di Provinsi Banten	BIG
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						1,261.7	Kota Tangerang	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						2,058.1	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang	Kementerian PUPR, Swasta
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						224.0	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						2,381.0	Kota Tangerang, Kab. Tangerang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						250.4	Kota Tangerang, Kab. Tangerang	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						161.8	Kota Tangerang, Kab. Tangerang	DAK
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)						0.8	Kota Tangerang	
ProP : Pembangunan Kota Baru Maja							14,846.2		
Pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja	Panjang jalan yang dikembangkan (km)						6,000.0	Kota Baru Maja/ Kab Lebak (lingkup pelayanan)	Swasta
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						652.6	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						50.0	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						83.3	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						8.4	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	DAK
Be Creative District (Maja-Rangkasbitung)	Jumlah BCD yang dikembangkan (unit)						6,666.7	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	BUMN dan Swasta, Kemenparekraf
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)				0.29		86.8	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						0.8	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						726.5	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kementerian PUPR
Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh di Perkotaan	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (hektar)						4.2	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kementerian PUPR
Pembangunan dan pengembangan RTH Publik	Jumlah RTH publik yang dibangun dan dikembangkan (unit)						6.2	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Pemerintah Daerah
Perluasan SPAM	Jumlah sambungan rumah yang terlayani (SR)						290.5	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	BUMN dan/atau Swasta
Perluasan Layanan Transportasi perkotaan kecil dengan trayek tetap	Jumlah kelurahan yang terlayani (unit)						81.3	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kemenhub
Peningkatan kemampuan jalan lingkungan	Jumlah kelurahan dengan peningkatan jalan (unit)						5.9	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kementerian PUPR
Perluasan sambungan listrik rumah tangga perkotaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani perluasan sambungan listrik						1.0	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	BUMN dan/atau Swasta

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui APBN	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN)						175.9	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kementerian ESDM
Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan digital (online marketing untuk UMKM berorientasi ekspor)	Jumlah kluster usaha yang dikembangkan						6.3	Kota Baru Maja/ Kab Lebak	Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Banten)							10,349.0		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Serang	Kemenhub
Jalan Tol Serang-Panimbang	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)	30	25	20	9		5,300.0	Banten	Kementerian PUPR, Swasta
Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)				20	30	1,527.2	Banten	Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara Panimbang	Terbangunnya KA akses Bandara (km)						0.0	Banten	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						118.9	Kota Cilegon, Kota Serang	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						74.0	Kota Cilegon, Kota Serang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						451.5	Kota Cilegon, Kota Serang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						29.4	Kota Cilegon, Kota Serang	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						2,778.4	Provinsi Banten	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	2	2	2	2	2	10.0	Kota Cilegon, Kota Serang	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami						3.0	Provinsi Banten	Kementerian PUPR
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Serang	Kemennaker
Provinsi Bali									
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar							11,899.5		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	WM Denpasar	Kemenhub
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah publikasi/laporan pengembangan data statistik metropolitan	0	1	1	1	1	17.5	WM Denpasar	BPS
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)						1,885.8	WM Denpasar	BU
SPALD-T Skala Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Regional (SR)	0	24000	24000	24000	0	4,582.0	Provinsi Bali	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						470.3	Kab. Badung, Kota Denpasar	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						496.8	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						83.0	Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kota Denpasar	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						594.4	Kab. Tabanan, Kab Badung, Kab Gianyar	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						33.1	Kab Badung	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						36.2	Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. Badung	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	69	179	330	413	578	1,021.0	Provinsi Bali	Kementerian PUPR

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	4	4	4	4	40.0	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan	Kementerian PUPR
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0.7	WM Denpasar	Kemendagri
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Denpasar	KESDM
Pembangunan Bandara Bali Baru	Jumlah bandara baru yang dibangun	1	1	1	1	1	1,500.0	WM Denpasar	Kemenhub
Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara yang dikembangkan						500.0	Kab. Badung	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.17				0.33	148.3	WM Denpasar	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	4	4	4	4	4	20.0	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelempara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						2.1	Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelempara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)						1.6	Kota Denpasar, Kab. Gianyar	KPBU
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						68.9	WM Denpasar	DAK
Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (hektar)						108.9	WM Denpasar	Kementerian PUPR
Pembangunan dan pengembangan RTH Publik	Jumlah RTH publik yang dibangun dan dikembangkan (unit)						80.3	WM Denpasar	Pemerintah Daerah
Fasilitasi Pengembangan ekonomi kreatif dan digital	Jumlah kluster usaha yang dikembangkan						77.0	WM Denpasar	Kemenparekraf
KP 4: Peningkatan Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni						295,441.3		
Provinsi DKI Jakarta									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (DKI Jakarta)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	41.70%	43.23%	44.80%	46.32%	47.90%	41,448.2		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	97.38%	98.03%	98.69%	99.34%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	91.66%	92.58%	94.44%	97.22%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	170	445	820	1,025	1,435	2,537.1		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	6400	6400	6400	6400	6400	643.2		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	6	6	6	6	6	300.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	12529	12113	12113	18170	18170	5,117.0	Kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	24590	23611	23611	35417	35417	4,279.0	Seluruh kab/kota di DKI Jakarta	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	0	11973	11973	17960	17960	323.0	Seluruh kab/kota di DKI Jakarta	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	4	4	4	4	2	110.1	Kota Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	5	0	1	0	0	3,885.0	Seluruh kab/kota di DKI Jakarta	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)						0.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	951	1427	1902	2378	2853	24,253.8	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Provinsi Jawa Barat									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Jawa Barat)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	51%	53%	54%	56%	57%	113,692.0		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	93.03%	94.77%	96.52%	98.26%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	70% layak (termasuk 9% aman)	72% layak (termasuk 11% aman)	77% layak (termasuk 15% aman)	83% layak (termasuk 20% aman)	90% layak (termasuk 25% aman)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	61%	64%	69%	76%	83%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	797	2,082	3,838	4,798	6,717	11,874.8		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	29944	29944	29944	29944	29944	3,009.1		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	5	5	5	5	250.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	35294	58914	58914	88371	88371	23,091.0	Bandung, Garut, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	30241	244576	244576	366864	366864	37,594.0	25 Kab/Kota	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	411127	375287	375287	562931	562931	12,423.0	Seluruh kab/kota di Jawa Barat	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	3	31	31	31	32	2,255.8	23 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	7	4	4	4	4	8,964.4	23 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	39614.75	59422.12	79229.49	99036.87	118844.24	2,659.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	453.74	680.60	907.47	1134.34	1361.21	11,570.3	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Jawa Tengah									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Jawa Tengah)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	68.60%	72.00%	75.43%	78.90%	82.30%	50,057.7		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	94.94%	96.21%	97.47%	98.74%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	80% layak (termasuk 11% aman)	82% layak (termasuk 13% aman)	85% layak (termasuk 16% aman)	90% layak (termasuk 20% aman)	95% layak (termasuk 25% aman)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	45.75%	49.00%	55.50%	65.25%	75.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	560	1,463	2,698	3,373	4,722	8,347.6		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	21041	21041	21041	21041	21041	2,114.5		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	6	6	6	6	6	300.0		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	7287	19553	19553	29330	29330	3,152.0	26 Kab/Kota	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	202204	285991	285991	428986	428986	7,969.0	Seluruh kab/kota di Jawa Tengah	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	4	16	16	16	17	8,717.5	17 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	5	7	7	7	7	5,775.0	33 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	46,623	69,934	93,245	116,556	139,868	2,867.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	424	636	848	1,060	1,272	10,814.9	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi DI Yogyakarta									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (DI Yogyakarta)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	81.16%	82.65%	84.13%	85.62%	87.10%	4,447.6		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	96.06%	97.05%	98.03%	99.02%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	92% layak (termasuk 15% aman)	93% layak (termasuk 16% aman)	93% layak (termasuk 18% aman)	94% layak (termasuk 22% aman)	95% layak (termasuk 25% aman)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	56.39%	59.34%	65.26%	74.13%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	68	177	326	408	571	1,008.6		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2548	2548	2548	2548	2548	256.1		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	239	241	241	361	361	101.0	Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	1845	2224	2224	3335	3335	389.0	Bantul dan Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	9735	15365	15365	23048	23048	449.0	Seluruh kab/kota di DIY	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	4	4	4	3	123.0	Bantul dan Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	0	1	1	1	761.0	Kulon Progo, Sleman, Kota Yogyakarta	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	5,364	8,046	10,728	13,410	16,092	307.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	41	62	83	103	124	1,052.8	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Jawa Timur									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Jawa Timur)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	67.00%	69.70%	72.47%	75.24%	78.00%	58,635.6		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	95.77%	96.83%	97.89%	98.94%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	76% layak (termasuk 9% aman)	78% layak (termasuk 11% aman)	83% layak (termasuk 14% aman)	89% layak (termasuk 20% aman)	95% layak (termasuk 25% aman)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	51.71%	55.08%	61.81%	71.90%	82.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	661	1,726	3,182	3,978	5,569	9,845.1		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	24821	24821	24821	24821	24821	2,494.4		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	7	7	7	7	7	350.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	5809	9989	9989	14983	14983	3,903.0	Banyuwangi dan Kota Surabaya	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	20287	41481	41481	62221	62221	6,831.0	30 Kab/Kota	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	180396	335444	335444	503165	503165	9,550.0	Seluruh kab/kota di Jawa Timur	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	2	20	20	21	21	317.4	28 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	7	7	7	7	8	7,086.0	36 Kab/Kota	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	35,794	53,691	71,588	89,486	107,383	3,176.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	591	887	1,183	1,479	1,774	15,082.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Banten									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Banten)	Percentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	58.42%	61.25%	64.00%	66.90%	69.73%	18,098.1		
	Percentase rumah tangga dengan akses air minum layak	93.72%	95.29%	96.86%	98.43%	100.00%			
	Percentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	79% layak (termasuk 12% aman)	80% layak (termasuk 13% aman)	82% layak (termasuk 14% aman)	86% layak (termasuk 15% aman)	90% layak (termasuk 17% aman)			
	Percentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	62.19%	64.51%	69.13%	76.06%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	186	487	898	1,123	1,572	2,778.4		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	7004	7004	7004	7004	7004	703.9		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	4405	4405	6607	6607	1,542.0	Kota Tangerang	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	14444	23344	23344	35016	35016	3,935.0	Seluruh kab/kota di Provinsi Banten	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	92981	119949	119949	179923	179923	3,437.0	Seluruh kab/kota di Provinsi Banten	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	3	10	10	10	10	427.4	Seluruh kab/kota di Provinsi Banten	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	1	2	2	1	1	3,318.0	7 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	6,457	9,686	12,915	16,143	19,372	819.8	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	45	67	89	111	134	1,136.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Bali									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Bali)	Percentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	77.26%	79.66%	82.00%	84.50%	86.90%	9,062.2		
	Percentase rumah tangga dengan akses air minum layak	97.59%	98.19%	98.79%	99.40%	100.00%			
	Percentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	91% layak (termasuk 14% aman)	91% layak (termasuk 15% aman)	91% layak (termasuk 17% aman)	91% layak (termasuk 21% aman)	91% layak (termasuk 25% aman)			
	Percentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	76.61%	77.32%	78.74%	80.87%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	69	179	330	413	578	1,021.0		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2571	2571	2571	2571	2571	258.4		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaran Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	4	4	4	4	200.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	637	1342	1342	2014	2014	514.0	Badung dan Kota Denpasar	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	4067	3333	3333	4999	4999	622.0	Tabanan, Badung, Gianyar, Buleleng, Denpasar	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	10384	15461	15461	23192	23192	534.0	Seluruh kab/kota Provinsi Bali	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	2	2	2	1	1	757.3	Badung, Gianyar, Kota Denpasar	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	3	1	1	1	1	970.5	7 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	6,579	9,868	13,157	16,447	19,736	473.4	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	146	218	291	364	437	3,711.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri				197 desa berkembang; 2893 desa mandiri		5,935.3		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	10.84%	10.02%	9.14%	8.27%	7.34%			
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	-	-	-	-	-			
	Penduduk miskin di daerah tertinggal	-	-	-	-	-			
	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	-	-	-	-	-			
Provinsi Bali									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	71.70	71.97	72.19	72.36	73.04	141.4		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	133 desa	117 desa	75 desa	156 desa	133 desa	12.2	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	133 desa	117 desa	75 desa	156 desa	133 desa	21.3	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	316 orang	316 orang	401 orang	397 orang	327 orang	82.0	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1.7	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0.4	Gianyar, Buleleng	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Kab. Klungkung	62.39; NA	62.39; NA	64.29; NA	66.20; NA	68.10; NA	581.4		
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	3.0	Kab. Buleleng	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2.1	Kab. Buleleng dan Klungkung	Kemendesa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	1.6	Kab. Buleleng dan Klungkung	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	40.0	Kab. Buleleng	Kementerian ESDM				
Pemasangan Sambungan Rumah (SR) di Lembongan dan Jungutbatu sebanyak 2.178 SR	Jumlah sambungan rumah (SR) yang terpasang di Lembongan dan Jungutbatu	726 SR	726 SR	726 SR	0	0	6.5	Kab. Klungkung	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Baru Ruas Lingkar Barat - Selatan	Panjang jalan baru ruas barat - selatan yang terbangun	0	0	14.825 km	14.825 km	0	503.2	Kab. Klungkung	Kementerian PUPR
Rehabilitasi/Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Jungutbatu di Desa Jungutbatu	Panjang tanggul pengaman Pantai Jungutbatu di Desa Jungutbatu yang terbangun	0	0	1000 meter	0	0	25.0	Kab. Klungkung	Kementerian PUPR
Provinsi Banten									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	65.58	65.89	66.13	66.33	67.11	280.7		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	1 desa	2 desa	2 desa	5.0	DPP Tanjung Lesung	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	992 desa	326 desa	0 desa	340 desa	246 desa	28.7	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	992 desa	326 desa	0 desa	340 desa	246 desa	61.5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	614 orang	616 orang	781 orang	772 orang	636 orang	159.6	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Pandeglang, Lebak	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang	65.35	66.51	67.67	68.84	70.00	104.3		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	1.1	Kab. Pandeglang	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	31 unit	4.0	Kab. Pandeglang	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	34 paket	19.0	Kab. Pandeglang	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	3 unit	0.7	Kab. Pandeglang	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	13.3	Kab. Pandeglang	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Pandeglang	Kementerian Pariwisata				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	54 unit	19.7	Kab. Pandeglang	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 unit	1.6	Kab. Pandeglang	Kementerian Pertanian				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Pandeglang	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	0.8	Kab. Pandeglang	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	40.0	Kab. Pandeglang	Kementerian ESDM				
ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	0.5	0.75	0.9	1		338.5		
KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KUBe)	KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	1600 unit	1700 unit	1800 unit	1900 unit	2000 unit	16.0	Kabupaten Lebak dan Pandeglang	Kementerian Sosial
Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana	Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana	2 lokasi	6.0	Kabupaten Lebak dan Pandeglang	BNPB				
Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik	Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik	1 lokasi	2.5	Provinsi Banten	BNPB				
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian pra panen	79 Unit	10.6	Kabupaten Lebak dan Pandeglang	Kementerian Pertanian				
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berarsrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4 sekolah	3.2	Kabupaten Lebak dan Pandeglang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Pandeglang	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					4.6	Kabupaten Pandeglang	Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kota Serang	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					2.1	Kabupaten Serang	Pemerintah Kabupaten Serang
Pemulihan pascabencana di Provinsi Banten	Terpulihkannya 5 sektor di 2 Kab/Kota pascabencana	2 lokasi					39.9	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang	Pemerintah Provinsi Banten
Pemulihan pascabencana di Provinsi Banten	Terpulihkannya 5 sektor di 2 Kab/Kota pascabencana	2 lokasi					186.0	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat
Pemulihan pascabencana di Provinsi Banten	Terpulihkannya 5 sektor di 2 Kab/Kota pascabencana	2 lokasi					67.6	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang	Masyarakat dan Dunia Usaha
Provinsi DI Yogyakarta									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	74.01	74.24	74.43	74.58	75.17	100.7		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	231 desa	87 desa	0 desa	144 desa	0 desa	7.5	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman (diusulkan untuk DAK)	
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	231 desa	87 desa	0 desa	144 desa	0 desa	16.8	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	194 orang	195 orang	247 orang	244 orang	201 orang	50.5	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	0.5	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Kulon Progo, Bantul	Kemendesa PDTT				
Provinsi Jawa Barat									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	70.51	70.77	70.97	71.14	71.81	1,024.7		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	1 desa	2 desa	1 desa	1 desa	4.3	DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	841 desa	1311 desa	1374 desa	1382 desa	0 desa	113.2	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	841 desa	1311 desa	1374 desa	1382 desa	0 desa	194.0	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2635 orang	2642 orang	3350 orang	3312 orang	2730 orang	684.7	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	14 kabupaten	2.9	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi	46.38	47.53	48.69	49.84	51.00	128.5		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	172 unit	81.9	Kab. Sukabumi	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 unit	1.8	Kab. Sukabumi	Kementerian Pertanian				
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Sukabumi	Kementerian Pariwisata				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Sukabumi	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	0.8	Kab. Sukabumi	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	40.0	Kab. Sukabumi	Kementerian ESDM				
Provinsi Jawa Tengah									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	68.02	68.22	68.38	68.51	69.02	1,450.2		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	4 desa	17.0	DPP Borobudur	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	894 desa	1644 desa	1960 desa	1787 desa	0 desa	147.7	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	(diusulkan untuk DAK)

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Slragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Slragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	894 desa	1644 desa	1960 desa	1787 desa	0 desa	250.8	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Slragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3874 orang	3884 orang	4925 orang	4869 orang	4013 orang	1.006.6	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Slragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Slragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Slragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Kementerian Desa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes						1.7	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	12 kabupaten	2.5	Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Blora, Demak, Pemalang, Brebes, Pekalongan	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal	56.81; 56.42	59.61; 59.07	62.40; 61.71	65.20; 64.36	68.00; 67.00	170.4		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	172 unit	81.9	Kab. Kendal	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 unit	1.8	Kab. Kendal	Kementerian Pertanian				
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Magelang	Kementerian Pariwisata				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2.1	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	1.6	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	2 unit	80.0	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Kementerian ESDM				
Provinsi Jawa Timur									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	67.53	67.73	67.89	68.02	68.53	1,440.9		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	5 desa	6 desa	5 desa	4 desa	15.8	DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	550 desa	1996 desa	2494 desa	1009 desa	281 desa	158.9	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	(diusulkan untuk DAK)

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madura, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madura, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	550 desa	1996 desa	2494 desa	1009 desa	281 desa	242.9	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madura, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3830 orang	3840 orang	4870 orang	4814 orang	3968 orang	995.3	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madura, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madura, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madura, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Kementerian Desa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madura, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	12 kabupaten	2.5	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	NA; 89.45	NA; 90.84	NA; 92.22	NA; 93.61	NA; 95.00	173.5		
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan	2 unit	3.3	Kab. Pamekasan	Kementerian Pertanian				
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan	2000 ton	58.8	Kab. Pamekasan	Kementerian Pertanian				
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan	1500 Dosis	1545 Dosis	1591 Dosis	1639 Dosis	1688 Dosis	0.2	Kab. Pamekasan	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Banyuwangi	Kementerian Pariwisata				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2.1	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Kemendesa PDTT				
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaanya	1 kawasan	16.4	Kab. Pamekasan	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	1.6	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Kemendesa PDTT				
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	8.1	Kab. Pamekasan	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	2 unit	80.0	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Kementerian ESDM				
KP 6: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3.28	3.36	3.44	3.52	3.6	4,497.6		
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	56.9%	62.0%	67.1%	72.3%	77.4%			
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	79	90	101	111	129			
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	21	47	73	101	129			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	7153	8586	9514	10535	11658			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik								
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	21	47	73	101	129			
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	2	2	2	5	12			
	Persentase capaian SPM di daerah	71.86%	78.90%	85.93%	92.96%	100.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik								
Provinsi DKI Jakarta									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi DKI Jakarta	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	226	259	294	334	377	90.2		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0	0	0	0	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	-	-	-	11.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	-	-	-	3.6	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Percentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparat yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	1	1	1	1	1	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	-	-	1		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	55.34%	66.50%	77.67%	88.83%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	1	1	1	1	1	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan tata kelola program kesehatan (target nasional dalam miliar)	Jumlah kab/kota yang melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	1	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (target nasional dalam miliar)	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pendekatan keluarga dengan 100% keluarga terintervensi	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	1	1	1	1	1	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	1	1	1	1	1	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	100%	100%	100%	100%	100%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	1	1	1	1	1			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	0	0	0	0	0	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjaanya berkualitas	1	1	1	1	1			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	-	-	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	1	1	1	1	1			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	5	5	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah angkatan diklat Camat	5	5	5	5	5	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah angkatan diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	10	10	10	10	10	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah angkatan orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	3		1	2		0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	1 UU							
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	-	1	1	1	1	6.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	2	2	2	2	2	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus						0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							297.0		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	-	-	-	-	-	0.0	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	-	-	-	-	-	0.0	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32.1	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	28	28	28	28	28	3.4	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	1	1	1	1	1	212.5	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
Sosialisasi Peraturan Perundungan terkait Tanah Adat/Ulayat	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundungan terkait tanah adat/ulayat	34	34	34	34	34	49.0	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							1.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	1	0	0	0	0	0.1	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	0.1	DKI Jakarta	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Jawa Barat									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	2042	2256	2492	2751	3036	561.1		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	6	6	8	8	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	2000 KM2	-	-	36.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	2000 KM2	-	-	13.1	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	100	833	-	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Layanan Data Center (Hari)	360	360	361	361	362	327.3	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Pembangunan Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia (TerraByte)	300	1200	1200	1200	1200	110.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	9	16	22	28	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	11	32	32	32	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	-	5	5	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya						0.0		
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	74.80%	81.10%	87.40%	93.70%	100%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	28	28	28	28	28	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	9	16	22	28	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	9	16	22	28	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	9	16	22	28	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	3	9	16	22	28	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	16	22	28	28	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	41%	47%	53%	59%	65%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	28	28	28	28	28	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	1	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	4	2	3	4	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnnya meningkat	19	21	23	25	28			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	18	20	22	24	27	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	13	17	21	24	28	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	3	9	16	22	28	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	9	16	22	28			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	9	16	22	28	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	23	24	26	27	28	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	9	16	22	28			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	9	16	22	28	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	1	1	2	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0		
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							833.3		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	389566	486958	486958	486958	486958	418.7	Jawa Barat	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	99500	125961	125961	125961	125961	1.1	Jawa Barat	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	28	28	28	28	28	32.1	Jawa Barat	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	3110	3110	3110	3110	3110	381.3	Jawa Barat	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							19.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Jawa Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	7	9	11	12	4.5	Jawa Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	7	8	10	11	11.3	Jawa Barat	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1.7	Jawa Barat (KSN Kawasan Teropong Bintang Boscha)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Jawa Tengah									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Tengah	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1302	1442	1596	1766	1953	218.6		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	4	4	5	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	2000 KM2	2000 KM2	2800 KM2	103.7	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	2000 KM2	2000 KM2	2800 KM2	39.6	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	50	833	-	-	-	4.6	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	4	11	18	27	36	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparat yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	7	9	11	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	-	6	6	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	73.21%	79.90%	86.60%	93.30%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	36	36	36	36	36	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	4	11	18	27	36	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	4	11	18	27	36	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	4	11	18	27	36	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	4	11	18	27	36	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	18	27	36	36	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	51%	57%	63%	69%	75%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	36	36	36	36	36	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	25	27	29	31	36			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	24	26	28	30	35	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	31	32	34	35	36	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	4	11	18	27	36	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11	18	27	36			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	4	11	18	27	36	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmun)	30	32	33	35	36	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11	18	27	36			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	4	11	18	27	36	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0		
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							659.2		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1324000	122073	122073	122073	122073	244.2	Jawa Tengah	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	3403	3403	3403	3403	3403	0.1	Jawa Tengah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	36	36	36	36	36	32.1	Jawa Tengah	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	3123	3123	3123	3123	3123	382.9	Jawa Tengah	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							16.7		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Jawa Tengah	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	6	8	9	10	3.8	Jawa Tengah	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	6	7	8	9	9.5	Jawa Tengah	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1.7	Jawa Tengah (KSN Kawasan Sangiran)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi DI Yogyakarta									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi DI Yogyakarta	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	482	540	604	675	752	90.2		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	-	-	-	11.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	-	-	-	3.6	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2		
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	7	9	11	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	-	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	86.98%	90.23%	93.49%	96.74%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	6	6	6	6	6	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	4	5	5	6	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	4	5	5	6	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	4	5	5	6	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	3	4	5	5	6	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	5	5	6	6	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	62%	68%	74%	80%	86%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	6	6	6	6	6	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	5	5	6	6	6			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	4	4	5	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	6	6	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBu	3	4	5	5	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	4	5	5	6			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	4	5	5	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmun)	5	5	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	4	5	5	6			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	4	5	5	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0		
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.								
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	-	1	1	1	1	6.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	3	3	3	3	3	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus						0.0		
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							128.4		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	215000	43836	43836	43836	43836	69.7	Yogyakarta	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	8	8	8	8	8	0.8	Yogyakarta	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32.1	Yogyakarta	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	210	210	210	210	210	25.8	Yogyakarta	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							12.4		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Yogyakarta	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3.3	Yogyakarta	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	6	8	9	8.3	Yogyakarta	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Banten									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Banten	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	701	781	869	966	1073	90.4		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	3	2	2	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar skala besar	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	-	-	-	11.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	-	-	-	3.6	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	833	-	-	-	4.4	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Percentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	3	5	6	8	9	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	-	1	1	1	1	0.2	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	3	5	6	8	9	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	6	8	9	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	63.37%	72.53%	81.68%	90.84%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	9	9	9	9	9	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	5	6	8	9	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	5	6	8	9	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	6	8	9	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	-	6	8	9	9	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah						0.0		
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	5	6	8	9	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	34%	40%	46%	52%	58%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	9	9	9	9	9	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	1	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	3	2	3	4	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6	7	8	9			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya		1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	4	5	6	7	8	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	8	8	9	9	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	3	5	6	8	9	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	5	6	8	9			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	5	6	8	9	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	6	7	8	8	9	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	5	6	8	9			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	5	6	8	9	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	2	2	2	1.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0		
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							150.6		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	250000	46862	46862	46862	46862	58.6	Banten	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	4800	10799	10799	10799	10799	0.6	Banten	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32.1	Banten	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	483	483	483	483	483	59.3	Banten	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							7.5		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Banten	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	4	5	2.0	Banten	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	3	3	4	4.6	Banten	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Jawa Timur									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Timur	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1768	2602	2872	3169	3495	163.8		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	4	6	5	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	2000 KM2	2000 KM2	-	62.7	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	2000 KM2	2000 KM2	-	23.5	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	100	833	-	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	4	12	20	30	39	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	4	12	20	30	39	1.0	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (lokasi Kementerian)	
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	71.73%	78.80%	85.87%	92.93%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	39	39	39	39	39	1.7	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	4	12	20	30	39	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	4	12	20	30	39	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	4	12	20	30	39	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	4	12	20	30	39	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	20	30	39	39	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	68%	74%	80%	86%	92%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	39	39	39	39	39	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	3	2	3	4	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	20	24	28	32	39			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	19	23	27	31	38	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	16	22	28	33	39	1.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	4	12	20	30	39	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12	20	30	39			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	4	12	20	30	39	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	28	31	34	36	39	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12	20	30	39			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	4	12	20	30	39	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							914.0		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1375000	240076	240076	240076	240076	315.6	Jawa Timur	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	163000	521860	521860	521860	521860	4.3	Jawa Timur	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	40	40	40	40	40	32.1	Jawa Timur	Kementerian ATR/BPN
Perpatihan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perpatihan batas (Km)	4583	4583	4583	4583	4583	562.0	Jawa Timur	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							16.2		
Peninjauan Kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Jawa Timur	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2.0	Jawa Timur (Lamongan)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3.3	Jawa Timur	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	9	8.4	Jawa Timur	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1.7	Jawa Timur	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Bali									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Bali	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	632	705	786	874	972	120.2		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	2	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	-	2000 KM2	-	38.5	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	-	2000 KM2	-	14.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	5	7	8	10	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	7	8	10	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	4	4	4	2.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya						0.0		
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	77.62%	83.22%	88.81%	94.41%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	10	10	10	10	10	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	5	7	8	10	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	5	7	8	10	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	7	8	10	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	5	7	8	10	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	
Merefomasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	7	8	10	10	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	42%	48%	54%	60%	66%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	10	10	10	10	10	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	
	(5) Jumlah daerah yang meningkat pendapatan daerahnya dari pajak dan retribusi daerah	5	6	7	8	10			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	4	5	6	7	9	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	4	5	6	7	9	0.1		
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	7	8	9	9	10	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	5	7	8	10			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	5	7	8	10	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	5	6	8	9	10	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	5	7	8	10			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	5	7	8	10	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							98.4		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	63500	32702	32702	32702	32702	27.5	Bali	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	223	223	223	223	223	2.1	Bali	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	10	10	10	10	32.1	Bali	Kementerian ATR/BPN
Perpatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perpatan batas (Km)	299	299	299	299	299	36.7	Bali	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							9.3		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Bali	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	5	5	2.2	Bali	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	5	5	6.3	Bali	Kementerian ATR/BPN
PP : Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara (persen/tahun)	3.12	4.03	4.37	4.75	5.09	74,833.7		
	Share PDRB Wilayah Nusa Tenggara (persen)	1.49	1.50	1.50	1.51	1.51			
	IPM Wilayah Nusa Tenggara	65,90-68,87	66,51-69,63	67,12-70,38	67,74-71,14	68,35-71,91			
	Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara (persen)	16.85	16.41	15.80	14.53	13.69			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI / KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	>1	>1	>1	>1	>1	2,585.9		
Provinsi Nusa Tenggara Barat									
ProP : Perbaikan Attraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI / KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	>1	>1	>1	>1	>1	1,958.9		
Pengembangan Bandara Internasional Lombok	Jumlah bandara yang dikembangkan						0.0	Kab. Lombok Tengah	Kementerian Perhubungan
Akses KEK Mandalika	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	7	8	6	13	1,531.3	Nusa Tenggara Barat	KemenPUPR
Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan (Km)	10.0					113.8	Kab. Lombok Tengah	Kementerian PUPR
Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)						150.0	Kab. Lombok Tengah	Kementerian PUPR
SID Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga	Jumlah Dokumen yang disusun (dok)	2.0					2.0	Kab. Lombok Tengah	Kementerian PUPR
SID Penyediaan Air Baku Bendungan Meninting	Jumlah Dokumen yang disusun (dok)	1.0					2.0	Kab. Lombok Utara	Kementerian PUPR
Penyediaan Air Baku Bendungan Meninting	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			0.2			75.0	Kab. Lombok Utara	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KEK/KSPN Mandalika (superprioritas)	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.0				9.0	Kab. Lombok Tengah	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTMG MPP Sambelia	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kab. Lombok	PLN
Peningkatan dan pengembangan Gardu Induk Kuta	Jumlah kapasitas Gardu Induk (MVA)	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	Prov. Nusa Tenggara Barat	PLN
Pembangunan jaringan nirkabel melalui pengembangan menara telekomunikasi	Jumlah BTS yang terbangun (unit)						0.0	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kemenkominfo
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3.0					1.4	Prov. Nusa Tenggara Barat	BKPM
Pelimpahan kewenangan penerbitan perijinan di KEK	Jumlah perijinan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK	1.0					0.3	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kemendag
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							0.0	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kementerian PUPR
Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan							0.0	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM							0.0	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM							0.0	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami		1	1	1	1	15.0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu), Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado), Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	1,548.0	1,702.8	1,873.1	2,060.4	2,266.4	59.0	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Nusa Tenggara Timur									
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Labuan Bajo	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	>1	>1	>1	>1	>1	627.0		
Pembangunan jalan akses Pelabuhan Baru Labuhan Bajo (Nanga Bido)	Panjang jalan yang terbangun (Km)	18.0					182.0	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kementerian PUPR
Akses KSPN Labuan Bajo	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	5	9	6	2	130.0	Nusa Tenggara Timur	KemenPUPR
Pelabuhan Cruise Labuan Bajo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan	1					90.0	NTT	Kemenhub (KPBUI)
Desain Pengendalian banjir Sungai Waemese	Jumlah Dokumen yang disusun (dok)	1.0					5.0	Kab. Manggarai Barat	Kementerian PUPR
Pengendalian banjir Sungai Waemese	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan (Km)	12.0					150.0	Kab. Manggarai Barat	Kementerian PUPR
SID Penyediaan Air Baku DPP Labuan Bajo	Jumlah Dokumen yang disusun (dok)	1.0					2.0	Kab. Manggarai Barat	Kementerian PUPR
Penyediaan Air Baku KSPN Labuan Bajo (superprioritas)	Unit air baku yang dibangun (unit)		0.0				9.0	Kab. Manggarai Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTP Sokoria	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	Flores	Swasta (IPP)
Pembangunan PLTP Mataloko	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	Flores	PLN
Pembangunan PLTP Ulumbu 5	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	Flores	PLN
Pembangunan PLTM Wae Lega-Ruteng	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	1,8	0.0	0.0	0.0	0.0	Ruteng	Swasta (IPP)
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							0.0	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kementerian PUPR
Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan							0.0	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM							0.0	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM							0.0	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	640.0	704.0	774.4	851.8	937.0	59.0	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kementerian Tenaga Kerja
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Total nilai produksi (Ton) setiap komoditas unggulan di Pulau Nusa Tenggara						22.9		
Provinsi Nusa Tenggara Barat									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan jambu mete							0.0		
Peningkatan produksi jambu mete	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							0.0		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	5,514.4	5,788.9	6,071.8	6,362.7	6,678.5	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu							0.0		
Peningkatan produksi tebu	jumlah produksi (Ton)	4,200.0	4,200.0	4,200.0	4,200.0	4,200.0	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam							0.0		
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tembaga							0.0		
Peningkatan produksi tembaga	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan emas							0.0		
Peningkatan produksi emas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan produksi perikanan budidaya	jumlah produksi (Ton)	1,291,516.1	1,319,507.3	1,347,830.8	1,377,169.2	1,407,165.9	0.0	Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	184,980.7	187,937.9	190,916.5	193,958.1	197,044.7	0.0	Kab. Dompu, Kab. Bima,	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							22.9		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	19,787.1	19,787.1	19,787.1	19,787.1	19,787.1	22.9	Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan jambu mete							0.0		
Peningkatan produksi jambu mete	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Saburaijua, Kab. TTS, Kab. Lembata, Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	68,913.0	70,171.1	71,437.9	72,714.6	74,019.1	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	1,359.7	1,382.9	1,406.6	1,430.6	1,455.3	0.0	Kab. Sikka, Kab. Ende	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam							0.0		
Peningkatan produksi Garam	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Bima	Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan produksi perikanan budidaya	jumlah produksi (Ton)	2,059,938.9	2,111,650.5	2,163,976.3	2,218,176.8	2,273,593.5	0.0	Kab. Kupang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera						3,886.3		
Provinsi Nusa Tenggara Barat									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (NTB)							2,294.5		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Mataram	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						538.5	Kota Mataram	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						225.1	Kota Mataram	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						40.5	Kota Mataram	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						8.1	Kota Mataram	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	84	220	406	508	711	1,256.2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.08		0.5			174.0	Kota Mataram	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Mataram	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi						3.0	Lombok	Kementerian PUPR
Provinsi Nusa Tenggara Timur									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (NTT)							1,591.8		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Kupang	Kemenhub
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						235.6	Kota Kupang	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						42.5	Kota Kupang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						4.5	Kota Kupang	DAK
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						19.0	Kota Kupang	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	70	182	336	420	588	1,039.6	Provinsi NTT	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)			0.4			119.0	Kota Kupang	Kementerian PUPR
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Kupang	KESDM
KP 4: Peningkatan Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni						13,664.8		
Provinsi Nusa Tenggara Barat									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (NTB)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	66.30%	69.00%	71.90%	74.67%	77.50%	8,132.5		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	96.29%	97.22%	98.15%	99.07%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	76% layak (termasuk 6% aman)	77% layak (termasuk 7% aman)	79% layak (termasuk 9% aman)	81% layak (termasuk 12% aman)	84% layak (termasuk 15% aman)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	38.66%	40.92%	45.44%	52.22%	59.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	84	220	406	508	711	1,256.2		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	3165	3165	3165	3165	3165	318.1		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	82	12529	12529	18793	18793	1,882.0	Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Kota Mataram	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	42698	37460	37460	56191	56191	1,147.0	Seluruh kab/kota di Provinsi NTB	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	2	2	2	2	122.0	Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	1	2	2	2	901.0	7 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	6,263	9,395	12,526	15,658	18,790	443.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	81	121	162	202	243	2,063.1	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Nusa Tenggara Timur									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (NTT)	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	38.90%	44.00%	49.00%	54.12%	59.20%	5,532.3		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman	87.54%	90.66%	93.77%	96.89%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	64% layak (termasuk 1% aman)	65% layak (termasuk 2% aman)	69% layak (termasuk 2% aman)	75% layak (termasuk 4% aman)	80% layak (termasuk 5% aman)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	34.48%	36.76%	41.32%	48.16%	55.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	70	182	336	420	588	1,039.6		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2614	2614	2614	2614	2614	262.7		
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	38194	88274	88274	132411	132411	2,369.0	Seluruh kab/kota di Provinsi NTT	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	0	0	1	1	82.0	Kota Kupang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	3	3	3	4	608.0	13 Kab/Kota	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	8,517	12,775	17,034	21,292	25,551	902.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	11	16	21	26	32	268.4	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri				1079 desa berkembang; 143 desa mandiri		53,784.4		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	19.28%	18.77%	17.91%	17.40%	16.85%			
	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	4 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri				2 kawasan berkembang; 2 kawasan mandiri; 1 kawasan berdava saing			
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	14 kabupaten tertinggal				7 kabupaten tertinggal (7 kabupaten potensi entas)			
	Penduduk miskin di daerah tertinggal	25,4 - 25,9%	25,1 - 25,6%	24,9 - 25,4%	24,6 - 25,1%	24,4 - 24,9%			
	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	62,7 - 63,2	63,5 - 64	64,2 - 64,7	64,9 - 65,4	65,6 - 66,1			
Provinsi Nusa Tenggara Barat							13,583.3		
Prop : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	0.5	0.75	0.9	1				
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	2	2	2	2	2	10.0	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Koperasi dan UKM
LAYANAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN EKONOMI DI DAERAH PASCABENCANA	Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	7.0	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara	BNPB
Rekomendasi Bantuan Pendanaan dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah Rekomendasi Bantuan Pendanaan dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	3	3	3	3	3	2.0	Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara	BNPB
Layanan Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	Layanan Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	80 orang	80 orang				1.2	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	BNPB
Program Beasiswa Kurang Mampu	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	25000 orang	20000 orang	10000 orang	8000 orang	8000 orang	284.0	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Beasiswa Berprestasi Bagi Siswa Miskin	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	2.0	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	3.2	Lombok Utara	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Terselenggaranya Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	327455	327455	327455	327455	327455	5,345.9	Nusa Tenggara Barat	Kementerian Sosial
Terselenggaranya Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	481268	481268	481268	481268	481268	3,898.3	Nusa Tenggara Barat	Kementerian Sosial
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun	150 unit	150 unit	150 unit	150 unit	150 unit	375.0	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Peningkatan Kualitas)	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1100	1100	1100	1100	1100	27.5	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian PUPR
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah	700	700	500	500	500	12.5	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Embung Penyediaan Air Baku	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/s)					3.08	0.0	Lombok Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun	40	18				29.0	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian PUPR
PLTS Rooftop	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop	5	5				2.2	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian ESDM
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Barat	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					19.2	Kabupaten Lombok Barat	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Utara	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					19.1	Kabupaten Lombok Utara	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Tengah	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					54.8	Kabupaten Lombok Tengah	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Timur	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					89.6	Kabupaten Lombok Timur	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sumbawa Barat	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					67.7	Kabupaten Sumbawa Barat	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sumbawa	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					18.0	Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kota Mataram	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					11.4	Kota Mataram	Pemerintah Kota Mataram
Pemulihan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Terpulihkannya 5 sektor di 7 Kab/Kota pascabencana	7 lokasi					394.5	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemulihan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Terpulihkannya 5 sektor di 7 Kab/Kota pascabencana	7 lokasi					1,220.3	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat
Pemulihan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Terpulihkannya 5 sektor di 7 Kab/Kota pascabencana	7 lokasi					1,688.9	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram	Masyarakat dan Dunia Usaha
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 26,4 - 26,9%; 2. 65,7 - 66,2	1. 25,7 - 26,2%; 2. 66,7 - 67,2	1. 25,1 - 25,6%; 2. 67,7 - 68,2	1. 24,5 - 25%; 2. 68,7 - 69,2	1. 24 - 24,5%; 2. 69,6 - 70,1	706.6		
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prakades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prakades di Daerah Tertinggal	2 paket	-	-	-	-	2.3	Kab. Lombok Utara	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Percentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	-	5%				1.0	Kab. Lombok Utara	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	159 orang	159 orang	159 orang	159 orang	159 orang	6.3	Kab. Lombok Utara	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal	-	1 unit	1 unit	-	-	2.6	Kab. Lombok Utara	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun / ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)	3 km					3.4	Kab. Lombok Utara	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Percentase peningkatan kunjungan wiswatana ke desa wisata di daerah tertinggal	50%	-	50%	50%	-	8.6	Kab. Lombok Utara	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	100 Orang	120 Orang	144 Orang	173 Orang	207 Orang	3.7	Kab. Lombok Utara	Kementerian Desa PDTT
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	Jumlah Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	8 lokasi	8 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	15.3	Kab. Lombok Utara	Kementerian Pariwisata
Wirausaha Pemula Yang Didukung Modal Awal Usaha	Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula	625 orang	44.7	Kab. Lombok Utara	Kementerian KUKM				
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4 sekolah	3.2	Kab. Lombok Utara	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	75 KPM	1.0	Kab. Lombok Utara	Kementerian Sosial				
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	33.755 KPM	303.8	Kab. Lombok Utara	Kementerian Sosial				
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	19.939 KPM	309.6	Kab. Lombok Utara	Kementerian Sosial				
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)					0,004 m3/s	1.1	Kab. Lombok Utara	Kementerian PUPR
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	67.31	67.53	67.71	67.85	68.43	234.1		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata	8 desa	6 desa	6 desa	6 desa	4 desa	22.5	DPP Lombok-Mandalika	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	0 desa	157 desa	0 desa	639 desa	0 desa	19.2	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	0 desa	157 desa	0 desa	639 desa	0 desa	37.0	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	494 orang	495 orang	628 orang	620 orang	511 orang	128.3	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kementerian Desa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1.7	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	1.7	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Bima, Sumbawa Barat	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	49.11; 53.46; NA; 64.84	50.08; 54.84; NA; 67.38	51.06; 56.23; NA; 69.92	52.03; 57.61; NA; 72.46	53.00; 59.00; NA; 75.00	1.302.5		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	1.1	Kab. Lombok Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	4.2	Kab. Lombok Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	35 paket	35 paket	35 paket	35 paket	35 paket	19.6	Kab. Lombok Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0.9	Kab. Lombok Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	13.3	Kab. Lombok Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1.7	Kab. Sumbawa	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan	2000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	58.8	Kab. Sumbawa	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan	1239877.5 dosis	1239877.5 dosis	1239877.5 dosis	1239877.5 dosis	1239877.5 dosis	1.000.2	Kab. Sumbawa	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	10.1	Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok Tengah	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4.8	Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok Tengah	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4.3	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaanya	0 kawasan	0 kawasan	2 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	12.6	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	3.2	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	0 kawasan	0 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1 kawasan	7.9	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestic dan industri	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	160.0	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	-	-	-	1 kawasan mandiri; 1 kawasan berdaya saing	41.8		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	-	1 SP	2 SP	1 SP	1 SP	24.4	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	900	0	0	0	0.3	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	0	1	1	0	14.0	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	1	2	1	2	3.0	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	320	0	0	0	0	0.2	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	900	0	0	0	0.1	Kabupaten Bima	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	320	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Nusa Tenggara Timur									
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 25,02%; 2) 1,16%	1) 25,76; 2) 1,18%	1) 26,50; 2) 1,21%	1) 27,23; 2) 1,23%	1) 27,97; 2) 1,26%	373,6		
Penanganan jalan yang menghubungkan Pos Perbatasan Motain dan Motamasin (Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur: Motain-Haliven-Haikesak-Nualain-Latutus-Motamasin)	Panjang Jalan Parelel perbatasan (km) yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	-	40.8	-	-	-	244.8	Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Lasiolat	Kementerian PUPR
Pengembangan Terminal Barang dan PLBN Motain	Jumlah terminal barang yang dibangun/ditingkatkan	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	17.0	Kabupaten Belu	Kementerian Perhubungan
Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Jumlah moda kapal ternak yang disediakan di Kabupaten Belu	1 rute	1 rute	1 rute	1 rute	1 rute	38.5	Kabupaten Belu	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	1	-	-	-	16.0	Kabupaten Belu	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	-	1	1	-	8.0	Kabupaten Belu	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	1	-	-	-	9.0	Kabupaten Belu	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	-	-	10	10	10	14.1	Kabupaten Belu	Kementerian Perdagangan
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	-	2.4	Kabupaten Belu	Kementerian Kominfo
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	-	250	250	250	250	0.1	Kabupaten Belu	Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	-	250	250	250	250	0.1	Kabupaten Belu	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	-	250		250	250	0.2	Kabupaten Belu	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun	-	-	2	-	-	2.0	Kabupaten Belu	Kementerian Koperasi dan UKM
Pelatihan Vokasional	Jumlah peserta (orang) pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	100	-	100	1.0	Kabupaten Belu	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya	-	3	3	3	-	1.8	Kabupaten Belu	Kementerian Koperasi dan UKM
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas jagung	Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas jagung	0 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0.2	Kabupaten Belu	Kementerian Pertanian
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas bawang merah	Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas bawang merah	0 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0.2	Kabupaten Belu	Kementerian Pertanian
Pengembangan Sarana Industri Alat Mesin Pertanian Jagung	Jumlah (unit) sarana prasarana produksi pertanian jagung	0 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0.2	Kota Atambua	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Belu	Kementerian Pertanian
Pelatihan Penanganan penyakit ternak, teknologi produksi dan pembuatan pakan ternak	Pelatihan Penanganan penyakit ternak, teknologi produksi dan pembuatan pakan ternak	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Belu	Kementerian Pertanian
Pelatihan Sistem Agribisnis usahatani ternak sapi	Pelatihan Sistem Agribisnis usahatani ternak sapi	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Belu	Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	Pelatihan budidaya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Belu	Kementerian Pertanian
Pelatihan penanganan penyakit hama, teknologi produksi untuk komoditas jagung dan bawang merah	Jumlah pelatihan mengenai penanganan penyakit hama untuk komoditas jagung dan bawang merah	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Belu	Kementerian Pertanian
Pembangunan embung irigasi /embung teknis Balokama	Jumlah embung/irigasi teknis Balokama yang dibangun	-	1	1	-	-	12.0	Kabupaten Belu	Kementerian PUPR
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	4.0	Kabupaten Belu	Kemendesa PDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 43,66%; 2) 1,23%	1) 44,86; 2) 1,27%	1) 46,07; 2) 1,31%	1) 47,27; 2) 1,36%	1) 48,48; 2) 1,40%	818.9		
Pengembangan Pelabuhan Wini	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan fungsionalitasnya	1	-	-	-	-	45.0	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Terminal Barang dan Penumpang PLBN Wini	Jumlah terminal barang yang dibangun/ditingkatkan	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	25.2	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Perhubungan
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	-	500	500	500	500	0.2	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	-	250	250	250	250	0.2	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Kominfo
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	1	-	-	-	16.0	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	-	1	1	-	8.0	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	1	-	-	-	0.9	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	-	-	10	10	10	14.1	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Perdagangan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun	-	2	-	-	-	2.0	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya	-	3	3	3	-	1.8	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Koperasi dan UKM
Pembangunan Jalan Perbatasan Nusa Tenggara Timur (enclave sis utara)	Panjang Jalan Parelel perbatasan (km) yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	30	30	30	30	30	650.0	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian PUPR
Pembangunan jaringan irigasi tambak garam	Luas jaringan irigasi yang ditingkatkan (Ha)	-	-	2	-	-	2.1	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian PUPR
Rekontruksi embung ternak Kafmetan	Jumlah embung Kafmetan yang direhabilitasi	-	-	1	-	-	15.0	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian PUPR
Pembangunan Waduk Temef	Jumlah waduk yang dibangun	-	1	-	-	-	20.0	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kementerian PUPR
Pelaksanaan inseminasi buatan	Pelaksanaan inseminasi buatan	-	1000 Akseptor	1000 Akseptor	1000 Akseptor	1000 Akseptor	0.2	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi dan kambing	Jumlah pelatihan yang terlaksana untuk penggemukan sapi dan kambing	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Pertanian
Pelatihan pembuatan pakan ternak sapi dan kambing	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pakan ternak sapi dan kambing	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Pertanian
Pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos	Jumlah masyarakat yang difasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya kambing	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan budidaya kambing	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0.4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Pertanian
Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong	Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong	-	100	100	100	100	0.4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Pertanian
Lahan Garam yang difasilitasi	Luas lahan (ha) garam yang difasilitasi	-	20	20	20	20	10.0	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian KKP
Pembangunan sarana niaga garam rakyat	Jumlah (unit) sarana niaga garam rakyat yang dibangun	-	1	1	-	1	2.2	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian KKP
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	3.7	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov NTT	35 kecamatan	55.4						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM						0.0	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Pemerintah Daerah
		20 kecamatan							
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun						0.0	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Pemerintah Daerah
		20 kecamatan							
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan						0.0	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Pemerintah Daerah
		20 kecamatan							

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan						0.0	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	20 kecamatan	0.0	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	20 kecamatan	0.0	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Pemerintah Daerah				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan						0.0	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	20 kecamatan	20 kecamatan	20 kecamatan	20 kecamatan	2.2	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	60 paket	60 paket	60 paket		52.8	Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Kementerian ESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital						0.4	Kecamatan Amoango Timur, Kecamatan Miomafua Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Namaet Duabesi, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	54.66	55.78	56.67	57.39	60.25	803.5		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	4 desa	17.0	DPP Labuan Bajo	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	374 desa	612 desa	393 desa	656 desa	863 desa	61.5	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembuta, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembuta, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembuta, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembuta, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	374 desa	612 desa	393 desa	656 desa	863 desa	97.9	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembuta, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1512 orang	1516 orang	1922 orang	1900 orang	1566 orang	392.9	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kemendesa PDTT				
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	84 desa	84 desa	72 desa	72 desa	72 desa	204.3	Manggarai, Ngada, Sumba Timur	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	21 kabupaten	4.4	Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Rai Jua, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	53.03; 54.42; 38.29	54.25; 55.31; 39.97	56.01; 56.21; 41.64	57.51; 57.10; 43.32	59.00; 58.00; 45.00	192.1		
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan	1 unit	1.7	Kab. Sumba Timur	Kementerian Pertanian				
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan	2000 ton	58.8	Kab. Sumba Timur	Kementerian Pertanian				
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan	0 dosis	1000 dosis	1000 dosis	1000 dosis	1000 dosis	0.0	Kab. Sumba Timur	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	0 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	4.8	Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1.2	Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3.2	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	2.4	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	120.0	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 kawasan berkembang	-	-	-	2 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	46.1		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	2 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	31.1	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	1002.31	0	0	750	0.5	Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	0	1	1	0	8.5	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	3	2	2	2	4.8	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	1070	0	0	0	180	0.8	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	1002	0	0	750	0.2	Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1070	0	0	0	180	0.0	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur	Kementerian ATR/BPN
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 25,3 - 25,8%; 2. 62,5 - 63	1. 25,1 - 25,6%; 2. 63,2 - 63,7	1. 24,9 - 25,4%; 2. 63,9 - 64,4	1. 24,7 - 25,2%; 2. 64,6 - 65,1	1. 24,4 - 24,9%; 2. 65,3 - 65,8	35,626.5		
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia	1 paket					0.2	Kab. Belu	Kementerian ESDM
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana		1 unit					1.0	Kab. Malaka	Kementerian KUKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Sekolah SMP yang dibangun	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	43.1	Kab. Sumba Timur	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya pasar rakyat	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	56.7	Kab. Timor Tengah Selatan	Kementerian Perdagangan
Puksesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun	1 unit					0.0	Kab. Sumba Barat Daya	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	2 paket	5 paket	5 paket	4 paket	1 paket	20.4	Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, Belu	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	5%	5%	5%	5%	5%	9.0	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Malaka, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	6.4	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Malaka, Sumba Barat, Belu	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal		3 unit	4 unit	2 unit	2 unit	16.0	Kab. Kupang, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun / ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)	5,5 KM					6.4	Kab. Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Percentase peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal			40%	40%		4.3	Kab. Sumba Barat (KSPN Waikabubak-Manupeu-Tanah Daru dskt)	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1 unit	10.0	Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Manggarai Timur, Sumba Barat	Kementerian Desa PDTT				
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	100 Orang	120 Orang	144 Orang	173 Orang	207 Orang	3.7	Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	100 orang	12.5	Kab. Sumba Barat Daya	Kementerian Desa PDTT				
Penyele.nggaran pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)	90	90	-	-	-	2.2	Kab. Sumba Timur, Belu, Kupang, Sumba Barat Daya	Kementerian Sosial
Penyele.nggaran Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	245,527	245,527	245,527	245,527	245,527	3,682.9	Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembuta, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan	Kementerian Sosial
Penyele.nggaran Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	304,543	304,543	304,543	304,543	304,543	2,466.8	Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembuta, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan	Kementerian Sosial
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang Mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha	4 Tingkat Kemandirian Skala (Skala 1-5)	12.0	Kab. Sumba Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		0,439 m3/s	1,956 m3/s		0,047 m3/s	610.3	Kab. Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Malaka, Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah	Kementerian PUPR
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun (on-going)	2 unit	2 unit	2 unit			28,662.5	Kab. Timor Tengah Selatan (Bendungan Temef) dan Kab. Kupang (Bendungan Manikin)	Kementerian PUPR
KP 6: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyele.nggaran Pemerintahan Daerah (EPPD)	2.99	3.07	314	3.21	3.29	889.3		
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	18.5%	24.5%	30.5%	36.5%	42.5%			
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	19	22	25	28	34			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	6	13	19	27	34			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1075	1203	1343	1497	1667			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik								
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	6	13	19	27	34			
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	-	2	2	2	2			
	Persentase capaian SPM di daerah	59.8%	69.8%	79.9%	89.9%	100.0%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik								
Provinsi Nusa Tenggara Barat									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	518	580	648	723	805	147.5		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	3	3	3	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	-	2000 KM2	2000 KM2	-	50.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	-	2000 KM2	2000 KM2	-	20.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatuar yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	0	20	25	30	34	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	7	9	11	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	69.92%	77.44%	84.96%	92.48%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	11	11	11	11	11	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan tata kelola program kesehatan (target nasional dalam miliar)	Jumlah kab/kota yang melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	11	11	11	11	11	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (target nasional dalam miliar)	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pendekatan keluarga dengan 100% keluarga terintervensi	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	7	9	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	-	7	9	11	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Merefomasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten						0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	21%	27%	33%	39%	45%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	11	11	11	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	7	8	9	10	11			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	6	7	8	9	10	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	5	7	8	10	11	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	5	7	9	11			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	7	8	9	10	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	5	7	9	11			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	5	7	9	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							309.7		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	32500	590721	590721	590721	590721	38.9	NTB	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	45000	22256	22256	22256	22256	0.5	NTB	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	23	23	23	23	23	32.1	NTB	Kementerian ATR/BPN
Perpatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perpatan batas (Km)	1943	1943	1943	1943	1943	238.2	NTB	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							7.9		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	NTB	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	2	3	5	6	1.8	NTB	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2	3	5	6	1.9	NTB	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	0	0	1	3.3	NTB (KSN TN. Gunung Rinjani, KSN Kawasan Bima)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Nusa Tenggara Timur									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	557	623	695	774	862	77.5		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	6	6	8	8	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	8	12	18	23	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	0	20	25	30	34	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	8	12	18	23	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	1	1	1	1			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	49.64%	62.23%	74.82%	87.41%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	23	23	23	23	23	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan tata kelola program kesehatan (target nasional dalam miliar)	Jumlah kab/kota yang melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	3	8	12	18	23	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (target nasional dalam miliar)	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pendekatan keluarga dengan 100% keluarga terintervensi	3	8	12	18	23	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	8	12	18	23	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	8	12	18	23	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran						0.0		
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM						0.0		
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	12	18	23	23	0.2		
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	16%	22%	28%	34%	40%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	23	23	23	23	23	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	12	14	16	18	23			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	11	13	15	17	22	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	19	20	21	22	23	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	8	12	18	23	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjaanya berkualitas	3	8	12	18	23			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	8	12	18	23	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	10	13	17	20	23	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	8	12	18	23			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	8	12	18	23	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	3	5	6	6	4.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							324.8		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	160850	124198	124198	124198	124198	166.7	NTT	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	23500	43347	43347	43347	43347	0.8	NTT	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32.1	NTT	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	1021	1021	1021	1021	1021	125.2	NTT	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							22.0		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	NTT	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	1	1	1	2	12.0	NTT (Kab Flores Timur, Kab. Manggarai Timur, Kab. Malaka, Kab. Sumba Tengah, Kab Alor, Kab Sabu Raijua)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	2	3	5	5	1.3	NTT	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2	3	5	5	0.9	NTT	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	2	0	0	0	4.2	Haumeni Ana, Turiskain (NTT)	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	0	1	1.8	NTT (KSN Kawasan Mbay)	Kementerian ATR/BPN
PP : Pembangunan Wilayah Kalimantan	Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)	4.08	4.25	4.49	4.83	5.37	653,229.0		
	Share PDRB Wilayah Kalimantan (persen)	8.20	8.21	8.22	8.22	8.22			
	IPM Wilayah Kalimantan	68,56-77,12	69,23-77,64	69,89-78,17	70,55-78,71	71,22-79,25			
	Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (persen)	4.06	3.82	3.67	3.43	3.29			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (ner pulau/provinsi)	>1	>1	>1	>1	>1	11,987.6		
Provinsi Kalimantan Barat									
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	>1	>1	>1	>1	>1	6,711.8		
Pembangunan runway baru Bandara Supadio	Panjang landasan pacu bandara yang terbangun (Meter)						0.0	Kota Pontianak	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Pelabuhan Kijing	Jumlah pelabuhan yang dibangun (Unit)			1.0			2,000.0	Kab. Mempawah	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jalan Pendukung KI Ketapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	2	2	-	-	52.0	Kalimantan Barat	KemenPUPR
Penanganan jalan lintas tengah Trans Kalimantan	Panjang jalan yang terbangun (Km)	40.0	50.0	45.0	35.0	30.0	4,100.0	Prov. Kalimantan Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan Terminal di Aruk, Nanga Badau, dan Temajuk	Jumlah terminal penumpang dan barang yang terbangun (Unit)	1.0	1.0		1.0		120.0	Provinsi Kalimantan Barat	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandara Ketapang Baru	Jumlah bandara baru yang dibangun		1	1	1	1	250.0	Kab. Ketapang	Kementerian Perhubungan
Penanganan jalan akses Pelabuhan Ketapang	Panjang jalan yang terbangun (Km)	29.0					123.2	Kab. Ketapang	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KI Ketapang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			0.1			15.0	Kab. Kotawaringin Barat	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	1,760.0	1,936.0	2,129.6	2,342.6	2,576.8	51.6	Prov. Kalimantan Barat	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Pembangunan DPP Baru Sambas-Singkawang	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	>1	>1	>1	>1	>1	1,051.6		
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Jumlah bandara baru yang dibangun	1	1	1	1	1	1,000.0	Kab. Singkawang-Kalimantan Barat	Kemenhub
Penyediaan air baku DPP Sambas-Singkawang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)						0.0	Kab. Sambas - Singkawang-Kalimantan Barat	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	1,760.0	1,936.0	2,129.6	2,342.6	2,576.8	51.6	Prov. Kalimantan Barat	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Tengah									
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	>1	>1	>1	>1	>1	51.9		
Penyediaan air baku KI Surya Borneo	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			0.1			15.0	Kab. Kotawaringin Barat	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	896.0	985.6	1,084.2	1,192.6	1,311.8	36.9	Prov. Kalimantan Tengah	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Selatan									
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Batulicin	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Selatan	>1	>1	>1	>1	>1	1,198.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Pelabuhan Penyebrangan Batulicin	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan (Paket)						0.0	Kab. Tanah Bumbu	Kementerian Perhubungan
Penanganan jalan mendukung KI Batulicin	Panjang jalan yang terbangun (Km)						0.0	Kab. Tanah Bumbu	Kementerian PUPR
Akses KI Batulicin	Panjang jalan yang dibangun (km)	44	27	26	29	31	1,057.4	Kalimantan Selatan	KemenPUPR
Pembangunan infrastruktur tampungan air multi guna berbasis wilayah (Kusan)	Pembangunan waduk multi guna (unit)				1.0		0.0	Bendungan Kusan, Kab. Tanah Bumbu	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KI Batulicin	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			0.1			15.0	Kab. Tanah Bumbu	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	3,248.0	3,572.8	3,930.1	4,323.1	4,755.4	125.6	Prov. Kalimantan Selatan	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Jorong	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Selatan	>1	>1	>1	>1	>1	140.6		
Peningkatan Bandara Syamsuddin Noor	Jumlah sarana dan prasarana bandara yang dikembangkan (Unit)						0.0	Kab. Tanah Laut	Kementerian Perhubungan
Penanganan jalan mendukung KI Jorong	Panjang jalan yang terbangun (Km)						0.0	Kab. Tanah Laut	Kementerian PUPR
Pengembangan Bus Rapit Transit Banjabakula							0.0		
Penyediaan air baku KI Jorong-Tanah Laut	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			0.1			15.0	Kab. Tanah Laut	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	3,248.0	3,572.8	3,930.1	4,323.1	4,755.4	125.6	Prov. Kalimantan Selatan	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur									
ProP : Pembangunan DPP Baru Derawan-Berau	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur	>1	>1	>1	>1	>1	74.1		
Pengembangan Bandara Kalimaru	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi					35.4	Kab. Berau-Kalimantan Timur	Kemenhub
Penyediaan air baku KSPN Derawan-Berau	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.0				6.0	Kab. Berau	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	736.0	809.6	890.6	979.6	1,077.6	32.7	Prov. Kalimantan Timur	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur	>1	>1	>1	>1	>1	1,860.2		
Pengembangan Pelabuhan Maloy	Jumlah sarana prasarana pelabuhan yang dikembangkan (Paket)	1.0					121.5	Kab. Kutai Timur	Kementerian Perhubungan
Akses KEK Maloy	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	2	2	1	1	675.0	Kalimantan Timur	KemenPUPR
Penyediaan air baku KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			0.1			30.0	Kab. Penajam Paser Utara	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Kalimantan (tahap pembangunan)	Studi/Kajian (OBC dan FBC)	pembangunan fisik	pembangunan fisik	operasi	operasi	1,001.0	Kalimantan Timur (Kab. Kutai Timur/Kab. Kutai Kartanegara)	KPBU
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	736.0	809.6	890.6	979.6	1,077.6	32.7	Prov. Kalimantan Timur	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Utara									
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanah Kuning	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Utara	>1	>1	>1	>1	>1	899.3		
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun (Paket)						0.0	Kab. Bulungan	Kementerian Perhubungan
Penanganan Jalan Mendukung KI Tanah Kuning	Panjang jalan yang dibangun (Km)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	271.4	Prov. Kalimantan Utara	Kementerian PUPR
Akses KIPI Tanah Kuning	Panjang jalan yang dibangun (km)			29			382.8	Kalimantan Utara	KemenPUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Pelabuhan KIPI Tanah Kuning	Jumlah sarana dan prasana pelabuhan yang dibangun (Paket)			3.0	4.0	3.0	200.0	Kab. Bulungan	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Internasional Juwata	Jumlah sarana dan prasarana bandara yang dikembangkan (Paket)						0.0	Kota Tarakan	Kementerian Perhubungan
Penyediaan air baku KI Tanah Kuning	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.1				15.0	Kab. Bulungan	Kementerian PUPR
Pembangunan infrastruktur tumpungan air multi guna berbasis wilayah	Pembangunan waduk multi guna (unit)					1.0	0.0	Waduk Kayan, Kab. Bulungan	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	720.0	792.0	871.2	958.3	1,054.2	30.1	Prov. Kalimantan Utara	Kementerian Tenaga Kerja
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Total nilai produksi (Ton) setiap komoditas unggulan di Pulau Kalimantan						107.5		
Provinsi Kalimantan Barat									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							0.0		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	31,350.6	33,423.9	35,584.3	37,826.5	40,324.8	0.0	Kab. Sanggau, Kab. Sintang	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada							0.0		
Peningkatan produksi lada	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							0.0		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	327,449.6	348,045.6	369,854.8	392,729.2	419,065.5	0.0	Kab. Ketapang, Kab. Landak, Kab. Sanggau	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan bauksit							0.0		
Peningkatan produksi bauksit	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan emas							0.0		
Peningkatan produksi emas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan batu bara							0.0		
Peningkatan produksi batu bara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
Provinsi Kalimantan Tengah							0.0		
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							0.0		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	664,255.3	700,169.2	738,198.6	778,085.5	824,008.8	0.0	Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							0.0		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	180,208.6	193,886.1	208,138.7	222,930.2	239,411.6	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	615.5	622.7	630.1	637.6	645.2	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan emas							0.0		
Peningkatan produksi emas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Murung Raya	Kementerian ESDM
Peningkatan produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	159,806.1	161,973.4	164,156.5	166,385.8	168,648.0	0.0	Kab. Kotawaringin barat, Kab. Kapuas, Kab. Sukamara, Kab. Seruyan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Selatan									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							0.6		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	25,580.2	25,580.2	25,580.2	25,580.2	25,580.2	0.6	Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, kab. Tanah Bumbu	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							31.7		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	199,930.5	199,930.5	199,930.5	199,930.5	199,930.5	31.7	Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai, Kab. Tabalong, Kab. Balangan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
Peningkatan produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	262,523.5	266,281.9	270,067.6	273,933.3	277,856.2	0.0	Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							0.8		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	10,934.0	10,934.0	10,934.0	10,934.0	10,934.0	0.8	Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							15.5		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	10,142.4	10,623.3	11,124.5	11,644.7	12,224.2	15.5	Kab. Kutai Barat, Kab. Paser	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada							59.0		
Peningkatan produksi lada	jumlah produksi (Ton)	6,700.6	6,700.6	6,700.6	6,700.6	6,700.6	59.0	Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Penajem Paser Utara	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi minyak bumi	jumlah produksi (barel)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda	Kementerian ESDM
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda	Kementerian ESDM
Provinsi Kalimantan Utara									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit							0.0		
Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	0.0	Kab. Malinau, Kab. Nunukan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							0.0		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	83.8	85.9	88.1	90.4	92.9	0.0	Kab. Malinau	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	18,344.5	18,606.9	18,871.2	19,141.1	19,415.0	0.0	Kota Tarakan, Kab. Malinau	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan						599,124.3		
Provinsi Kalimantan Barat									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Barat)							17,773.8		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Pontianak	Kemenhub
Pengembangan pelabuhan utama (hub)							0.0		
-Pelabuhan Kijing	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Kijing	1	1	1	1	1	14,000.0	Kalimantan Barat	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
Pengembangan bandara hub primer:							0.0		
Bandara Supadio	Jumlah bandara yang dikembangkan						300.0	Kota Pontianak	Kemenhub
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Jumlah bandara baru yang dibangun	1	1	1	1	1	1,000.0	Kota Singkawang (lingkup pelayanan)	Kemenhub
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional (TPA Regional)	Jumlah TPA Regional yang terbangun (unit)						20.0	Provinsi Kalimantan Barat	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						501.9	Kota Pontianak	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						251.8	Kota Pontianak	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						34.0	Kota Pontianak, Kota Singkawang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						478.4	Kota Pontianak, Kota Singkawang	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						61.4	Kota Pontianak	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						13.0	Kota Pontianak	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	71	187	344	430	602	1,064.3	Provinsi Kalimantan Barat	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Singkawang	Kementerian PUPR
Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)	-	50.9	254.5	305.4	407.2	0.0	Kota Pontianak	BU
Provinsi Kalimantan Tengah							832.5		
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Tengah)									
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Palangkaraya	Kemenhub
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						154.3	Kota Palangkaraya	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						4.1	Kota Palangkaraya	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	42	110	202	253	354	625.0	Provinsi Kallimantan Tengah	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Palangkaraya	Kementerian PUPR
Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)	-	9.6	48.0	57.6	76.8	0.0	Kota Palangkaraya	BU
Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)	-	50.9	254.5	305.4	407.2	0.0	Kota Palangkaraya	BU
Provinsi Kalimantan Selatan									
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin	Share PDRB ADHB Metropolitan Terhadap Wilayah Pulau, Indeks Kota Berkelanjutin*)	6.26	6.3	6.33	6.37	6.4	33,162.8		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah publikasi/laporan pengembangan data statistik metropolitan	0	1	1	1	1	21.9	WM Banjarmasin	BPS
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Banjarmasin	Kemenhub
Pembangunan KA Tanjung Paringin-Barabai-Rantau-Martapura-Banjarmasin	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Kota Banjarmasin	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						338.4	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						66.0	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						181.6	Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						18.0	Kab Banjar	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						1.8	Kab Banjar	Kementerian PUPR, Swasta
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	69	180	332	415	581	1,027.2	Provinsi Kalimantan Selatan (WM Banjarmasin)	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	5	5	5	5	50.0	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.06			0.17		37.1	WM Banjarmasin	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Banjarmasin	Kementerian PUPR
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0.7	WM Banjarmasin	Kemendagri
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelegara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						3.2	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut	KPBU
Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)	-	26.1	130.5	156.6	208.8	30,000.0	Kota Banjarmasin	BU
Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)	-	9.6	48.0	57.6	76.8	0.0	Kota Banjarmasin	BU
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Ha)						529.9	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut	KLHK, Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (Unit)						10.4	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut	KLHK, Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan RTH Publik	Jumlah RTH publik yang dibangun dan dikembangkan (unit)						560.3	WM Banjarmasin	Pemerintah Daerah
Peningkatan kemantapan jalan lingkungan	Jumlah kelurahan dengan peningkatan jalan (unit)						251.7	WM Banjarmasin	Kementerian PUPR
Perluasan sambungan listrik rumah tangga perkotaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani perluasan sambungan listrik						15.4	WM Banjarmasin	BUMN dan/atau Swasta
Provinsi Kalimantan Timur									
Prop : Pembangunan Ibu Kota Negara							469,927.2		
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RUU tentang Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN)	1					3.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Revisi UU 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Pencabutan UU DKI Jakarta yang disahkan)	1					2.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Peraturan Penyiapan pemindahan dan insentif ASN	1					2.0	Pusat	Kementerian PAN/RB
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RPP/Raperpres tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara yang disusun	1					2.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Setkab
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RPP/Raperpres tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara (PNBP-earmarking, KPBU, Pengelolaan Aset)	1					2.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Setkab
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Revisi UU 27 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan	1					3.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendari,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RPP/Raperpres tentang Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah	1					2.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RPP/Raperpres tentang Deliniasi	1					2.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyiapan Kelembagaan Ibukota Negara	Raperpres Badan Otorita	1					2.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Setkab, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kementerian Keuangan
Perencanaan Ibukota Negara	Strategi Komunikasi dan Kegiatan Public Hearing sebagai sarana sosialisasi dan penampungan aspirasi bagi Penyusunan Rencana Pemindahan Ibukota Negara yang dilaksanakan	1	1				100.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, KSP, SKP, Kementerian Kominfo
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Masterplan yang disusun (Masterplan IKN, Detail Masterplan & Skematik, Sitemplan & Skematik Bangunan, serta Skematik Infrastruktur Dasar)	5					100.0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Rencana Tata Ruang yang disusun - RTR KSN IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Pemerintahan IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Kegiatan Ekonomi IKN	3					8.0	Pusat	Kementerian ATR/BPN
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Rencana Tata Ruang yang direvisi - Revisi RTR Pulau (matek PK) - Revisi RTRW Kaltim(matek dan raperda) - Revisi RTRW Kukar (matek dan raperda) - Revisi RTRW PPU(matek dan raperda) - Revisi RTR Pulau (matek dan raperpres) - Fasleg RTR Pulau (Perpres)	4	2				10.6		Kementerian ATR/BPN
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang disusun	1					6.0	Pusat	KLHK, Kementerian PPN/Bappenas
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Persiapan Infrastruktur Dasar	1					75.0	Pusat	Kementerian PUPR
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 6000 Ha	1					500.0	Pusat	Kementerian PUPR
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan IKN 40000 Ha	1					350.0	Pusat	Kementerian PUPR
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan, AMDAL, dan DED untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang disusun		1				2,400.0	Pusat	Kementerian PUPR
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Luas Kawasan IKN yang Dinventarisasi dan Verifikasi dengan Nilai Keaneharagaman Hayati Tinggi (Ha)	180.640	180.640	180.640	-	-	36.4	Provinsi Kalimantan Timur	KLHK
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN (dokumen)	1	-	-	-	-	1.3	Pusat	KLHK dan Bappenas
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihian Ekosistem pada kawasan IKN	Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	137.8	Provinsi Kalimantan Timur	KLHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihian Ekosistem pada kawasan IKN	Luas Pemulihian Ekosistem pada Kawasan Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi lokasi IKN) (Ha)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	95.7	Provinsi Kalimantan Timur	KLHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihian Ekosistem pada kawasan IKN	Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN (Ha)	175,000	-	-	-	-	10.0	Provinsi Kalimantan Timur	KLHK
Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim Skala 1:5000	Jumlah Kabupaten yang dibuat peta dasar skala 1:5000	2					8.9	Ibu Kota Negara	BIG

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Lanjutan Kegiatan Inventarisasi Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di dalam Kawasan Hutan di kawasan Perluasan IKN	Luas lahan yang diinventarisasi kegiatan P4T di kawasan hutan di kawasan perluasan IKN (Hektar)	73169					4.5	Ibu Kota Negara	Kementerian ATR/BPN
Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Transportasi	Tersusunnya dokumen perencanaan transportasi di IKN (Masterplan, FS, DED)						30.0	Ibu Kota Negara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di IKN	Pengembangan Terminal, Pengembangan dan Rehabilitasi Dermaga; Subsidi Operasional, Penetapan TTS (Traffic Separation Scheme); Pengembangan VTS, SBNP, Telkompel & Fasilitas Lainnya)						1,074.9	Ibu Kota Negara	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian di IKN	Pembangunan Stasiun, Kereta Api Subway, KRL, Jalur KA; Pengadaan Kereta Listrik						164,454.2	Ibu Kota Negara	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan KA Balikpapan-Samarinda dan Jaringan menuju IKN	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					30	976.1	Provinsi Kalimantan Timur	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di IKN	Pembangunan Terminal dan Pembangunan Halte, BRT, ITS, Kelengkapan Jalan, Bus Air, Pelabuhan Penyebrangan						3,193.4	Ibu Kota Negara	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di kawasan IKN	Terbangunnya jalan dan jembatan (Jalan Nasional (Tol) 57 km, Jalan Nasional (Non Tol) 898 km, Fasilitas Pejalan Kaki 955km, Lajur Sepeda 468 km, Rel Kereta 72 km)						4,315.4	Ibu Kota Negara	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Jalan Tol Balikpapan-Jembatan Penajam (7,6)	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)			5	3		477.0	Provinsi Kalimantan Timur	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di kawasan IKN	Tersedianya kebutuhan air baku sesuai standar 225lt/hr/orang, 4,21 m3/detik						7,835.9	Ibu Kota Negara	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan di IKN	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)					0.39	90.9	Ibu Kota Negara	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di kawasan IKN	Terbangunnya infrastruktur Permukiman (pengendali banjir, drainase, sanitasi, dan infrastruktur energi)						19,474.8	Ibu Kota Negara	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum & Badan Usaha
Penyediaan Perumahan Umum (KPBU)	Penyediaan Perumahan (307.879 unit)	971.2201285	8354241.302	12554574.11	16731597.64	4182850.85	51,507.5	Ibu Kota Negara	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum & Badan Usaha
Pengembangan Infrastruktur Transportasi Udara penunjang IKN	Pengembangan Bandar Udara Sepinggan dan AAP Samarinda						5,766.9	Ibu Kota Negara	PT Angkasa Pura & Badan Usaha Swasta
Penyediaan Perumahan Umum (Badan Usaha Milik Negara/Swasta Murni)	Penyediaan Perumahan (307.879 unit)	2822.175878	24275792.47	36481138.7	48618752.72	12154547.07	117,433.1	Ibu Kota Negara	BUMN dan Badan Usaha Swasta
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Terbangunnya jalan akses ke lokasi IKN						8,000.0	Ibu Kota Negara	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Terbangunnya ruang terbuka hijau						2,000.0	Ibu Kota Negara	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Istana Kepresidenan			1			480.0	Ibu Kota Negara	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Kodam Khusus Ibu Kota & SAT BKO						7,000.0	Ibu Kota Negara	Mabes TNI
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AD						2,250.0	Ibu Kota Negara	TNI AD
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AL						6,000.0	Ibu Kota Negara	TNI AL
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AU						10,000.0	Ibu Kota Negara	TNI AU

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Infrastruktur POLRI						7,352.0	Ibu Kota Negara	Slog Polri
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Penyediaan Perumahan Bagi VIP/Eselon I Setara						1,000.0	Ibu Kota Negara	
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Penyediaan Hunian Dinas						37,241.0	Ibu Kota Negara	
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pencadangan Tanah Akses Infrastruktur dan Kawasan Inti						8,000.0	Ibu Kota Negara	
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pencadangan Tanah Diplomatic Compound						110.0	Ibu Kota Negara	
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Timur)							44,250.5		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Samarinda	Kemenhub
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Jumlah bandara yang dikembangkan						400.0	Kota Balikpapan	Kemenhub
Pembangunan KA Kutai Barat-Pasai-Balikpapan	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Kota Balikpapan	Kemenhub
Jalan Tol Samarinda-Bontang	Panjang Jalan Tol yang dibangun (km)				25	75	9,100.0	Kota Samarinda	KemenPUPR
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						2,587.9	Kota Balikpapan, Kota Samarinda	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						522.5	Kota Balikpapan, Kota Samarinda	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						3.0	Kota Samarinda	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						587.0	Kota Samarinda	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						78.6	Kota Samarinda	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						5.6	Kota Samarinda	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	55	143	264	330	462	816.8	Provinsi Kalimantan Timur	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Balikpapan	Kementerian PUPR
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Samarinda	KESDM
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Samarinda	Kemennaker
Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)	-	26.1	130.5	156.6	208.8	30,000.0	Kota Balikpapan, Kota Samarinda	BU
Provinsi Kalimantan Utara									
ProP : pembangunan kota baru Tanjung Selor	Jumlah penduduk, indeks kota berkelanjutan*)	49,000	61,750	74,500	87,250	100,000	32,773.1		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						0.3	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						3.0	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	10	26	48	60	84	148.5	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)			0.27			80.2	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan	Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun	1	0	0	0	0	97.7	Kota Tanjung Selor (Polda Kalimantan Utara)	Polri
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun	0	0	0	0	1	32,000.0	Kab. Bulungan (Bendungan Kayan)	BUMN dan/atau Swasta

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perluasan SPAM	Jumlah sambungan rumah yang terlayani (SR)						102.9	Kota Tanjung Selor/Kab Bulungan	Kementerian PUPR
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui APBN	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN)						153.7	Kota Tanjung Selor/Kab Bulungan	Kementerian ESDM
Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (hektar)						7.7	Kota Tanjung Selor/Kab Bulungan	Kementerian PUPR
Pembangunan dan pengembangan RTH Publik	Jumlah RTH publik yang dibangun dan dikembangkan (unit)						3.9	Kota Tanjung Selor/Kab Bulungan	Pemerintah Daerah
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						11.8	Kota Tanjung Selor/Kab Bulungan	DAK
Perluasan Layanan Transportasi perkotaan kecil dengan trayek tetap	Jumlah kelurahan yang terlayani (unit)						108.0	Kota Tanjung Selor/Kab Bulungan	Kemenhub
Perluasan sambungan listrik rumah tangga perkotaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani perluasan sambungan listrik						1.0	Kota Tanjung Selor/Kab Bulungan	BUMN dan/atau Swasta
Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan digital (online marketing untuk UMKM berorientasi eksport)	Jumlah kluster usaha yang dikembangkan						10.4	Kota Tanjung Selor/Kab Bulungan	Kementerian KUKM
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Utara)							404.5		
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						11.0	Kota Tarakan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	607	1917	1917	2876	2876	306.0	Kota Tarakan	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Provinsi Kalimantan Utara	KESDM
KP 4: Peningkatan Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni						31,995.9		
Provinsi Kalimantan Barat									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Kalimantan Barat)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	64.68%	70.53%	76.38%	82.23%	88.09%	7,395.8		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	85.19%	88.89%	92.60%	96.30%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	73% layak (termasuk 4% aman)	75% layak (termasuk 4% aman)	77% layak (termasuk 4% aman)	80% layak (termasuk 6% aman)	83% layak (termasuk 7% aman)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	66.98%	68.76%	72.32%	77.66%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	71	187	344	430	602	1,064.3		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2685	2685	2685	2685	2685	269.8		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	1599	1599	2399	2399	560.0	Kota Pontianak	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	3004	2040	2040	3059	3059	396.0	Sambas, Melawi, Kubu Raya, Kota Pontianak	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	40372	55275	55275	82913	82913	1,787.0	Seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	1	1	1	1	70.0	Kubu Raya dan Kota Pontianak	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	3	3	3	3	861.0	12 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	7,374	11,061	14,748	18,435	22,122	943.1	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	57	85	113	142	170	1,444.5	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Kalimantan Tengah									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Kalimantan Tengah)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	54.19%	59.48%	64.77%	70.06%	75.35%	3,343.1		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	81.13%	85.85%	90.56%	95.28%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	68% layak (termasuk 5% aman)	69% layak (termasuk 6% aman)	72% layak (termasuk 6% aman)	76% layak (termasuk 6% aman)	80% layak (termasuk 7% aman)			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	70.22%	71.64%	74.48%	78.74%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	42	110	202	253	354	625.0		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	1576	1576	1576	1576	1576	158.4		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	336	275	275	413	413	51.0	Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	30535	41756	41756	62634	62634	1,212.0	Seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	DAK; APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	1	1	1	2	312.0	Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Pulang Pisau, Barito Timur, Palangkaraya	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	7,976	11,964	15,952	19,940	23,929	617.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	14	22	29	36	43	367.5	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Kalimantan Selatan									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Kalimantan Selatan)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	51.62%	55.09%	58.56%	62.03%	65.51%	8,535.4		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	78.96%	84.22%	89.48%	94.74%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	74.62%	75.99%	78.75%	82.87%	87.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	81.14%	81.35%	81.76%	82.38%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	69	180	332	415	581	1,027.2		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2588	2588	2588	2588	2588	260.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	1065	1240	1240	1860	1860	509.0	Kotabaru, Tanah Bumbu	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	219	2746	2746	4119	4119	418.0	6 kab/kota	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	34817	45268	45268	67902	67902	1,359.0	Seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	1	1	1	2	96.0	Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	4	1	1	1	2	413.0	9 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	15,175	22,763	30,351	37,939	45,526	1,407.5	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	119	179	239	299	358	3,045.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Kalimantan Timur									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Kalimantan Timur)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	72.72%	77.30%	81.88%	86.46%	91.03%	11,450.0		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	88.61%	91.45%	94.30%	97.15%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	84.70%	85.29%	86.47%	88.23%	90.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	87.47%	86.97%	85.98%	84.49%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	55	143	264	330	462	816.8		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	2063	2063	2063	2063	2063	207.4		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	4576	8143	8143	12214	12214	3,170.0	Kutai Timur, Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	7191	3181	3181	4772	4772	693.0	6 kab/kota	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	24454	29479	29479	44219	44219	971.0	Seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan Timur	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	1	0	1	0	49.0	Kutai Kartanegara	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	1	2	2	1	1,038.0	6 kab/kota	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	6,207	9,311	12,415	15,518	18,622	624.1	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	152	228	304	380	457	3,880.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Kalimantan Utara									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Kalimantan Utara)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	75.81%	79.50%	83.19%	86.89%	90.58%	1,271.6		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	93.00%	94.75%	96.50%	98.25%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	82.51%	83.34%	85.00%	87.50%	90.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	78.61%	79.10%	80.08%	81.54%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	10	26	48	60	84	148.5		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	379	379	379	379	379	38.1		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	607	1917	1917	2876	2876	306.0	Bulungan, Malinau, Kota Tarakan	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (RT)	4512	7465	7465	11198	11198	236.0	Seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan Utara	DAK; APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	0	0	0	1	0	20.0	Tarakan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	0	0	0	1	1	59.0	Malinau dan Nunukan	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	4,188	6,282	8,376	10,470	12,564	441.4	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	1	1	2	2	3	22.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri					1460 desa berkembang; 232 desa mandiri	6,014.3		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	6.37%	5.84%	5.03%	4.48%	3.93%			
	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	5 kawasan berkembang; 4 kawasan mandiri				2 kawasan berkembang; 5 kawasan mandiri; 2 kawasan berdaya saing			
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	-	-	-	-	-			
	Penduduk miskin di daerah tertinggal	-	-	-	-	-			
	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	-	-	-	-	-			
Provinsi Kalimantan Barat									
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 35,19%; 2) 13,80%	1) 36,07%; 2) 14,21%	1) 36,94%; 2) 14,62%	1) 37,81%; 2) 15,03%	1) 38,68%; 2) 15,44%	490.2		
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1	1	1	1	1	0.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Perindustrian
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah (unit) PLTS Roof Top yang dibangun	-	10	-	-	-	2.2	Kabupaten Sambas	Kementerian ESDM
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	1	-	-	-	8.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	-	1	1	-	8.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	1	-	-	-	9.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	-	-	10	10	10	14.1	Kabupaten Sambas	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Terminal Barang dan Penumpang PLBN Aruk	Jumlah terminal barang yang dibangun/ditingkatkan	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	73.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Ruas Temaju-Aruk	Panjang ruas jalan (km) menuju PLBN yang dibangun/ditingkatkan	-	61.93	-	-	-	364.4	Kabupaten Sambas	Kementerian PUPR
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	1	3.2	Kabupaten Sambas	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun	-	2	-	-	-	2.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Koperasi dan UKM
Pengembangan Area Sentra Industri Lada	Luas Area kawasan industri lada yang dikembangkan	300 Ha	350 Ha	400 ha	450 Ha	500 Ha	4.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Pertanian
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1	1	1	1	1	0.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Perindustrian
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	2.3	Kabupaten Sambas	Kemendesa PDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 34,89%; 2) 10,74%	1) 35,71%; 2) 10,95%	1) 36,53%; 2) 11,17%	1) 37,35%; 2) 11,38%	1) 38,17%; 2) 11,59%	360.1		
Pembangunan Jalan Poros Perbatasan	Panjang Jalan Poros (km) yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	10	10	-	-	-	190.0	Kabupaten Bengkayang	Kementerian PUPR
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas (ha) kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya	65 Ha	70 Ha	75 Ha	80 Ha	85 ha	6.9	Kabupaten Bengkayang	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Terminal Barang dan Penumpang PLBN Jagai Babang	Jumlah terminal barang yang dibangun/ditingkatkan	-	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	-	100.0	Kabupaten Sambas	Kementerian Perhubungan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	-	1	-	-	1	4.0	Kabupaten Bengkayang	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Khusus Perbatasan	Jumlah rumah khusus perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	-	10	10	10	10	4.8	Kabupaten Bengkayang	Kementerian PUPR
Jaringan Air baku yang dibangun/ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/det)	-	-	-	-	0.191	47.7	Kabupaten Bengkayang	Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL / LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI	1 lokasi	4.0	Kabupaten Bengkayang	Kementerian Kominfo				
Peningkatan mutu pelayanan & efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	Penambahan jaringan distribusi						0.0	Kabupaten Bengkayang	Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	10	10	10	10	1.4	Kabupaten Bengkayang	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	3 desa	0.3	Kabupaten Bengkayang	Kemendesa PDTT				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	1.0	Kabupaten Bengkayang	Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Kalimantan Barat	2 kecamatan	4.9						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Pemerintah Daerah				
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Pemerintah Daerah				
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Pemerintah Daerah				
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Pemerintah Daerah				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK-prasara SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	2 kecamatan	0.0	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Pemerintah Daerah				
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	2	2	2	2	0.3	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	-	20 paket	-	-	4.4	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	0.2	Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Siding	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	54.64	55.55	56.27	56.85	59.18	399.5		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	638 desa	319 desa	574 desa	0 desa	812 desa	42.1	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	638 desa	319 desa	574 desa	0 desa	812 desa	68.5	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1011 orang	1014 orang	1285 orang	1271 orang	1047 orang	262.7	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1.7	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0.6	Ketapang, Sambas, Sintang	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang dan Sambas	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang dan Kab. Sambas	49.36; 38.23; NA; 36.18	50.27; 40.42; NA; 38.39	51.18; 42.61; NA; 40.59	52.09; 44.81; NA; 42.80	53.00; 47.00; NA; 45.00	195.8		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	0 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	2.6	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1.3	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4.3	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	16.4	Kab.Kubu Raya	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	3.2	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8.1	Kab.Kubu Raya	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	160.0	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	1 kawasan berkembang; 2 kawasan mandiri	-	-	-	2 kawasan mandiri; 1 kawasan berdaya saing	25.1		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	-	1 SP	2 SP	1 SP	-	13.4	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	1283.57	392.15	0	0	0.5	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	0	2	0	0	6.2	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	3	1	2	3	4.5	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	555	0	0	0	0	0.3	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	1284	392	0	0	0.2	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	555	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Tengah									
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	1 kawasan berkembang	-	-	-	1 kawasan berkembang	35.5		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	27.1	Kabupaten Lamandau	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	720	0	0	0	200	0.1	Kabupaten Lamandau	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	1	0	0	1	6.1	Kabupaten Lamandau	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	0	1	1	0	1.8	Kabupaten Lamandau	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	728	0	0	0	0	0.3	Kabupaten Lamandau	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	0	0	0	200	0.1	Kabupaten Lamandau	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	728	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Lamandau	Kementerian ATR/BPN
ProP : Pembangunan Desa Terpadu									
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	492 desa	367 desa	314 desa	93 desa	392 desa	31.8	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	492 desa	367 desa	314 desa	93 desa	392 desa	52.2	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	711 orang	713 orang	904 orang	894 orang	737 orang	184.8	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1.7	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0.6	Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Kotawaringin Barat	55.96	58.22	60.48	62.74	65.00	80.0		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	1.1	Kab. Kotawaringin Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	4.0	Kab. Kotawaringin Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	34 paket	34 paket	34 paket	34 paket	34 paket	19.0	Kab. Kotawaringin Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0.7	Kab. Kotawaringin Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	13.3	Kab. Kotawaringin Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Kotawaringin Barat	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	0.8	Kab. Kotawaringin Barat	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestic dan industri	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	40.0	Kab. Kotawaringin Barat	Kementerian ESDM
Provinsi Kalimantan Selatan									
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Selatan	1 kawasan mandiri	-	-	-	1 kawasan mandiri	35.1		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	25.8	Kabupaten Barito Kuala	Kementerian Desa PDTT				
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	650	0	0	0	0.2	Kabupaten Barito Kuala	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarana dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	1	0	0	1	6.1	Kabupaten Barito Kuala	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	0	1	1	1	1.4	Kabupaten Barito Kuala	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	1720	1803	0	0	0	1.5	Kabupaten Barito Kuala	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	650	0	0	0	0.1	Kabupaten Barito Kuala	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1720	1803	0	0	0	0.0	Kabupaten Barito Kuala	Kementerian ATR/BPN
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	62.09	62.42	62.69	62.90	63.75	385.1		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	724 desa	356 desa	277 desa	478 desa	479 desa	41.6	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	724 desa	356 desa	277 desa	478 desa	479 desa	77.3	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	925 orang	927 orang	1176 orang	1162 orang	958 orang	240.3	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Kemendesa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	Indeks Pembangunan Kwasan Perdesaan di Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	63.14; 54.41	65.35; 56.31	67.57; 58.21	69.78; 60.10	72.00; 62.00	289.2		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	1.1	Kab. Banjar	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	31 unit	4.0	Kab. Banjar	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	34 paket	19.0	Kab. Banjar	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	3 unit	0.7	Kab. Banjar	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	13.3	Kab. Banjar	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	344 unit	163.8	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	6 unit	3.5	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Kementerian Pertanian				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2.1	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	1.6	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestic dan industri	2 unit	80.0	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Kementerian ESDM				
Provinsi Kalimantan Timur									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	60.95	61.36	61.69	61.95	63.01	199.0		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	1 desa	2 desa	1 desa	2 desa	5.0	DPP Baru Derawan-Berau	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	522 desa	193 desa	190 desa	139 desa	169 desa	20.2	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	522 desa	193 desa	190 desa	139 desa	169 desa	39.5	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	417 orang	418 orang	530 orang	524 orang	432 orang	108.4	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1.7	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0.4	Penajam Paser Utara, Kutai Barat	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	Indikator Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Berau dan Kab. Kutai Timur	48.27; 54.54	49.45; 56.91	50.63; 59.27	51.82; 61.64	53.00; 64.00	124.9		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	1.1	Kab. Berau	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	4.0	Kab. Berau	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	34 paket	34 paket	34 paket	34 paket	34 paket	19.0	Kab. Berau	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0.7	Kab. Berau	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	13.3	Kab. Berau	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	3.0	Kab. Kutai Timur	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2.1	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1.6	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	80.0	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	1 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	-	-	-	1 kawasan berkembang; 1 kawasan berdaya saing	48.7		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	2 SP	1 SP	1 SP	2 SP	1 SP	35.1	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasara, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	0	0	1	0	9.1	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	1	1	2	2	3.8	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	451	0	0	120	500	0.8	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	451	0	0	120	500	0.0	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Utara									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	47.63	48.48	49.16	49.71	51.88	108.8		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	106 desa	74 desa	0 desa	232 desa	0 desa	8.2	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung (diusulkan untuk DAK)	
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	106 desa	74 desa	0 desa	232 desa	0 desa	17.1	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	222 orang	222 orang	282 orang	279 orang	230 orang	57.6	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Malinau, Nunukan	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Bulungan	NA	NA	NA	NA	NA	43.9		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	5 unit	1.1	Kab. Bulungan	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1.0	Kab. Bulungan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Bulungan	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	0.8	Kab. Bulungan	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	40.0	Kab. Bulungan	Kementerian ESDM				
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 22,26%; 2) 8,41%	1) 22,49%; 2) 8,69%	1) 22,71%; 2) 8,97%	1) 22,94%; 2) 9,24%	1) 23,16%; 2) 9,52%	1,675.0		
Pembangunan Jalan lingkar Nunukan	Panjang Jalan lingkar (km) yang dibangun/ditingkatkan	46	46	46	46	46	1,350.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	1	-	-	-	16.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	-	1	1	-	8.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	1	-	-	-	9.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	-	-	10	10	10	14.1	Kabupaten Nunukan	Kementerian Perdagangan
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik	4	4	4	4	5	11.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian KKP

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	-	5	5	5	-	8.3	Kabupaten Nunukan	Kementerian KKP
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	-	2.4	Kabupaten Nunukan	Kementerian Kominfo
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	-	250	250	250	250	0.1	Kabupaten Nunukan	Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	-	250	250	250	250	0.1	Kabupaten Nunukan	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	-	250	250	250	250	0.2	Kabupaten Nunukan	Kementerian Kominfo
Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Mansapa	Jumlah (unit) sarana prasarana industri pengolahan yang dibangun	-	1	-	-	-	247.0	Kabupaten Nunukan	KPBU
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun	-	-	2	-	-	2.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraaan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya	-	3	3	3	-	1.8	Kabupaten Nunukan	Kementerian Koperasi dan UKM
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	5.0	Kabupaten Nunukan	Kemendesa PDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 22,26%; 2) 8,41%	1) 22,49%; 2) 8,69%	1) 22,71%; 2) 8,97%	1) 22,94%; 2) 9,24%	1) 23,16%; 2) 9,52%	1,008.8		
Pembangunan Jalan Poros Perbatasan*	Panjang Jalan Poros (km) yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	-	20.99	15.74	10.5	5.25	936.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian PUPR
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas (ha) kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya	70 Ha	72 Ha	74 Ha	76 Ha	80 Ha	7.4	Kabupaten Nunukan	Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	-	1	-	1	-	2.9	Kabupaten Nunukan	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Khusus Perbatasan*	Jumlah rumah khusus perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	-	-	10	10	10	3.6	Kabupaten Nunukan	Kementerian PUPR
Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perbatasan*	Kapasitas jaringan perpipaan yang dikembangkan	11000	11000	11000	11000	11000	50.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI	1 lokasi	4.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian Kominfo				
Peningkatan mutu pelayanan & efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	Penambahan jaringan distribusi						0.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	10	10	10	10	1.4	Kabupaten Nunukan	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	8 desa	0.8	Kabupaten Nunukan	Kemendesa PDTT				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	2.7	Kabupaten Nunukan	Kemendesa PDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 22,26%; 2) 8,41%	1) 22,49%; 2) 8,69%	1) 22,71%; 2) 8,97%	1) 22,94%; 2) 9,24%	1) 23,16%; 2) 9,52%	154.5		
Pembangunan Jalan Poros Perbatasan*	Panjang Jalan Poros (km) yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	5	5	-	-	-	90.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian PUPR
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas (ha) kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya	70 Ha	72 Ha	74 Ha	76 Ha	80 Ha	7.4	Kabupaten Nunukan	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	-	1	-	1	-	2.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Khusus Perbatasan*	Jumlah rumah khusus perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	-	-	10	10	10	6.2	Kabupaten Nunukan	Kementerian PUPR
Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perbatasan*	Kapasitas jaringan perpipaan yang dikembangkan	-	11000	11000	11000	11000	40.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI	1 lokasi	4.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian Kominfo				
Peningkatan mutu pelayanan & efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	Penambahan jaringan distribusi						0.0	Kabupaten Nunukan	Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	10	10	10	10	1.4	Kabupaten Nunukan	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	8 desa	0.8	Kabupaten Nunukan	Kemendesa PDTT				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	2.7	Kabupaten Nunukan	Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Kalimantan Utara	11 kecamatan	8.2						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM						0.0	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Pemerintah Daerah
		11 kecamatan							
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun						0.0	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Pemerintah Daerah
		11 kecamatan							
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan						0.0	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Pemerintah Daerah
		11 kecamatan							
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan						0.0	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Pemerintah Daerah
		11 kecamatan							

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi						0.0	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	0.0	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	0.0	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	10	10	10	10	1.4	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	-	15 paket	15 paket	-	6.6	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	0.2	Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Seimanggiris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat.	Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimanggiris	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	2 kawasan berkembang	-	-	-	2 kawasan mandiri	46.9		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	1 SP	1 SP	2 SP	1 SP	34.0	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	750	0	0	2318.06	0.9	Kabupaten Bulungan	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	0	0	1	1	6.6	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	1	1	1	1	4.2	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	2368	547	300	0	0	0.7	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	0	2318	0.4	Kabupaten Bulungan	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2368	547	300	0	0	0.0	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan	Kementerian ATR/BPN
KP 6: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3.06	3.13	3.2	3.28	3.35	3,999.3		
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	18.8%	24.8%	30.8%	36.8%	42.8%			
	Jumlah daerah yang penerimaan daerhnya meningkat	36	42	48	54	61			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	15	27	39	49	61			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	2854	3189	3558	3964	4411			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik								
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	15	27	39	49	61			
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	2	4	4	5	6			
	Persentase capaian SPM di daerah	63.6%	72.7%	81.8%	90.9%	100.0%			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik								
Provinsi Kalimantan Barat									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	955	1061	1177	1304	1445	76.9		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	9	12	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	6	9	12	15	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	2	2	2	2	1.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	56.15%	67.11%	78.07%	89.04%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	15	15	15	15	15	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	15	15	15	15	15	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	Daerah yang melakukan Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	1	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	9	12	15	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	9	12	15	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	9	12	15	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	9	12	15	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	9	12	15	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	15	15	15	15	15	0.3	Pusat	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	-	-	0.1	Kab. Ketapang	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0.1	Pusat	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	11	12	13	14	15			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	11	12	13	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	9	11	13	15	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	3	6	9	12	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	9	12	15			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	9	12	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	8	10	12	13	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	9	12	15			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	9	12	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	2	2	2	2	2.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							692.8		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	261000	929571	929571	929571	929571	210.5	Kalimantan Barat	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	72000	952995	952995	952995	952995	0.7	Kalimantan Barat	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	15	15	15	15	32.1	Kalimantan Barat	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	3666	3666	3666	3666	3666	449.5	Kalimantan Barat	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Kalimantan Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	7	1.3	Kalimantan Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	7	0.9	Kalimantan Barat	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Tengah									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Tengah	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	825	918	1019	1131	1254	135.3		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	1716.25 KM2	-	-	-	-	18.9	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	1024.75 NLP	-	-	-	-	42.4	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Percentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	9	12	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	6	9	12	15	1.0	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	61.02%	70.77%	80.51%	90.26%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	15	15	15	15	15	1.7	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	15	15	15	15	15	1.7	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	Daerah yang melakukan Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	1	1	1	1	1	0.2	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	9	12	15	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	9	12	15	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	9	12	15	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	9	12	15	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	9	12	15	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	19%	25%	31%	37%	43%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	15	15	15	15	15	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	1	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	10	11	12	13	15			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	9	10	11	12	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	13	14	14	15	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	3	6	9	12	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	9	12	15			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	9	12	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmun)	4	7	10	12	15	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	9	12	15			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	9	12	15	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							793.5		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	206000	308506	308506	308506	308506	166.4	Kalimantan Tengah	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	315400	315400	315400	315400	315400	3.6	Kalimantan Tengah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	15	15	15	15	32.1	Kalimantan Tengah	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	4823	4823	4823	4823	4823	591.4	Kalimantan Tengah	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Kalimantan Tengah	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	8	1.3	Kalimantan Tengah	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	8	0.9	Kalimantan Tengah	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Selatan									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Selatan	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	813	904	1005	1115	1237	183.8		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	-	2000 KM2	2800 KM2	79.5	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	-	2000 KM2	2800 KM2	30.1	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatuar yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	6	9	11	14	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	-	5	5	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	64.17%	73.13%	82.08%	91.04%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	14	14	14	14	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	14	14	14	14	14	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	Daerah yang melakukan Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	1	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	9	11	14	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	-	9	11	14	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	14	14	14	14	14	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	1	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	9	10	11	12	14			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	8	9	10	11	13	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	13	13	14	14	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	9	11	14			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	10	11	12	13	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	9	11	14			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanian							365.3		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	269000	247829	247829	247829	247829	181.8	Kalimantan Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	65500	15760	15760	15760	15760	0.7	Kalimantan Selatan	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	14	14	14	14	32.1	Kalimantan Selatan	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	1229	1229	1229	1229	1229	150.7	Kalimantan Selatan	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.1		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Kalimantan Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	7	8	1.3	Kalimantan Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	7	8	0.9	Kalimantan Selatan	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Timur									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Timur	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	42	56	71	89	108	136.6		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	2	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	1716.25 KM2	-	-	-	-	18.9	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	1024.75 NLP	-	-	-	-	42.4	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatür yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	7	9	11	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	73.82%	80.36%	86.91%	93.45%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	11	11	11	11	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	11	11	11	11	11	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	Daerah yang melakukan Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	1	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	5	7	9	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Merefomasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	7	9	11	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	39%	45%	51%	57%	63%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	11	11	11	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	1	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	3	5	7	9	11			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	2	4	6	8	10	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	8	9	10	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	5	7	9	11			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	4	6	8	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	5	7	9	11			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	5	7	9	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	5	5	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							1,170.1		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	105000	672476	672476	672476	672476	742.6	Kalimantan Timur	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	130000	678868	678868	678868	678868	1.5	Kalimantan Timur	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	10	10	10	10	32.1	Kalimantan Timur	Kementerian ATR/BPN
Perpatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perpatan batas (Km)	3213	3213	3213	3213	3213	394.0	Kalimantan Timur	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.9		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Kalimantan Timur	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	6	7	8	1.3	Kalimantan Timur	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	7	8	0.9	Kalimantan Timur	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Utara									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Utara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	219	251	286	325	367	69.2		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah NLP peta dasar skala besar	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	4	5	5	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	4	5	5	6	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	1	1	1	1			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	62.84%	72.13%	81.42%	90.71%	100%				
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	6	6	6	6	6	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	6	6	6	6	6	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	Daerah yang melakukan Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	1	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	4	5	5	6	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	4	5	5	6	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	4	5	5	6	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	4	5	5	6	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	5	5	6	6	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	6	6	6	6	6	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	3	4	5	6	6			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	5	5	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	4	5	5	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	4	5	5	6			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	4	5	5	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	1	2	4	5	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	4	5	5	6			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	4	5	5	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	1	1	1	1	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							359.6		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	105000	195429	195429	195429	195429	88.0	Kalimantan Utara	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	130000	143579	143579	143579	143579	1.5	Kalimantan Utara	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	5	5	5	5	5	32.1	Kalimantan Utara	Kementerian ATR/BPN
Perapatatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatatan batas (Km)	1941	1941	1941	1941	1941	238.0	Kalimantan Utara	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Kalimantan Utara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	7	8	1.3	Kalimantan Utara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	7	8	0.9	Kalimantan Utara	Kementerian ATR/BPN
PP : Pembangunan Wilayah Sulawesi		Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi (persen/tahun)	6.64	6.57	6.64	6.76	6.91	268,393.2	
	Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen)	6.21	6.21	6.21	6.21	6.23			
	IPM Wilayah Sulawesi	66,58-73,59	67,29-74,16	67,99-74,72	68,69-75,27	69,41-75,83			
	Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi (persen)	9.65	9.47	9.18	8.43	7.90			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI / KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	>1	>1	>1	>1	>1	64,953.8		
Provinsi Sulawesi Utara									
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KI/KEK Bitung	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	>1	>1	>1	>1	>1	35,725.4		
Pengembangan Pelabuhan Bitung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	34,400.0	Sulawesi Utara	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Jembatan Bitung - Lembeh (potensi)	Panjang jembatan yang dibangun (km)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Sulawesi Utara	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara Sam Ratulangi Manado	Jumlah fasilitas bandara yang dikembangkan						0.0	Kota Manado	Kementerian Perhubungan
Pembangunan KA Manado-Bitung	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						1,268.0	Sulawesi Utara	Kementerian Perhubungan
Penanganan pelabuhan penyeberangan long distance ferry Makassar-Mamuju-Poso-Paul-Bitung	Jumlah fasilitas pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan						0.0	Prov. Sulawesi Utara	Kementerian Perhubungan
Penanganan jalan mendukung KEK Bitung	Panjang jalan yang terbangun						0.0	Kota Bitung	Kementerian Perhubungan
Penyediaan air baku KI/KEK Bitung	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.1				30.0	Kota Bitung	Kementerian PUPR
Pembangunan infrastruktur tampungan air multi guna berbasis wilayah	Jumlah waduk yang terbangun (Unit)	1.0					0.0	Waduk Lolak, Waduk Kuwil Kawangkoan	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	656.0	721.6	793.8	873.1	960.4	27.4	Prov. Sulawesi Utara	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Pembangunan DPP Baru Manado-Likupang	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	>1	>1	>1	>1	>1	221.4		
Jalan akses Likupang	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	2	2	2	2	120.0	Sulawesi Utara	KemenPUPR
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Likupang	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan (Km)	1.0					10.0	Kab. Minahasa Utara	Kementerian PUPR
SID Embung Air Baku KEK Likupang	Jumlah dokumen yang disusun (dok)	2.0					2.0	Kab. Minahasa Utara	Kementerian PUPR
Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku KEK Likupang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	Kab. Minahasa Utara	Kementerian PUPR
Pembangunan Tampungan Air Hujan di P. Bunaken Kota Manado	Jumlah unit air baku yang dibangun (unit)	6.0					2.0	Kota Manado	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTMG Minahasa	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	Prov. Sulawesi Utara	PLN
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							0.0	Prov. Sulawesi Utara	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KSPN Manado-Likupang (Kawasan Superprioritas)	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.1				15.0		Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	656.0	721.6	793.8	873.1	960.4	27.4	Prov. Sulawesi Utara	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Tengah									
ProP : Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI/KEK Palu	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI / KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	>1	>1	>1	>1	>1	1,211.9		
Pengembangan Pelabuhan Donggala dan Wani	Jumlah sarana prasara pelabuhan yang dikembangkan (paket)						0.0	Prov. Sulawesi Tengah	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Pantoloan	Jumlah sarana prasara pelabuhan yang dikembangkan (Paket)						0.0	Kota palu	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan terdampak Bencana	Panjang jalan yang dibangun (km)	25.7	32.4	28.9	29.4	15.5	1,103.6	Sulawesi Tengah	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara Mutiara Sis-Aljufri Palu	Jumlah sarana prasara bandara yang dikembangkan (Paket)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	Kota palu	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku KI/KEK Palu	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.1				30.0	Kota Palu	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTU Palu III	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	Kota palu	PLN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelimpahan kewenangan penerbitan perijinan di KEK	Jumlah perijinan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK	1.0					0.3	Kota Palu	Kemendag
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	1,984.0	2,182.4	2,400.6	2,640.7	2,904.8	78.0	Prov. Sulawesi Tengah	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan									
ProP : Pembangunan DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	>1	>1	>1	>1	>1	27,109.3		
Pengembangan Jaringan Jalan Tol Mamisata	Panjang Jalan Tol yang terbangun (Km)						0.0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10,000.0	Sulawesi Selatan	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Lanjutan Pembangunan KA Makassar-Pare Pare Segmen 3 (Palanro - Baru - Pangkep - Mandai)	Terbangunnya KA (km)	48.0	30.0	34.0			1,217.1	Sulawesi Selatan	Kementerian Perhubungan
Pembangunan KA Makassar-Pare Pare (Segmen Palanro-Pare Pare, Mandai-Makassar)	Terbangunnya KA (km)		9.0	9.0	9.0	8.0	9,947.0	Sulawesi Selatan	Kementerian Perhubungan
Pembangunan KA Makassar-Pare Pare (Segmen F: Pangkep - Semen Tonasa; Mandai - Semen Bosopwa)	Terbangunnya KA (km)	14.0					1,650.0	Sulawesi Selatan	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara yang dikembangkan						400.0	Kota Makassar-Sulawesi Selatan	Kementerian Perhubungan
Pembangunan runway Bandara Baru Buntu Kunik	Panjang landasan pacu yang terbangun (Km)						0.0	Kab. Tana Toraja	Kementerian Perhubungan
Pengembangan LRT Makassar	Panjang jalur yang dibangun (Km)						12.0	1,715.0	Sulawesi Selatan
Pengembangan BRT Makassar	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)						1.0	1,000.0	Sulawesi Selatan
Pembangunan PLTM	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	11.3	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Belajen, Ussu malili, Bungin III, Madong	IPP
Pembangunan PLTA Malea	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kab. Tana Toraja	IPP
Pembangunan PLTA Bakaru II	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	Kab. Pinrang	PLN
Pembangunan PLTA Poko	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	Prov. Sulawesi Selatan	PLN
Pembangunan PLTNG Selayar II	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kab. Kepulauan Selayar	PLN
Pembangunan PLTG/MG/GU/MGU Makassar	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	Kota Makassar	PLN
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumapua	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua / Sumapapua (tahap pembangunan)	Studi/Kajian (OBC dan FBC)	pembangunan fisik	pembangunan fisik	operasi	operasi	1,001.0	Sulawesi Selatan (Kab. Barru/Kab. Pangkajene Kepulauan/Kab. Bantaeng/Kab. Gowa)	KPBU
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	4,672.0	5,139.2	5,653.1	6,218.4	6,840.3	179.2	Prov. Sulawesi Selatan	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Tenggara									
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Wakatobi	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara	>1	>1	>1	>1	>1	685.6		
Penyediaan air baku KSPN Wakatobi	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.0				6.0	Kab. Wakatobi	Kementerian PUPR
Akses KSPN Wakatobi	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	3	3	0	0	437.5	Sulawesi Tenggara	KemenPUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	752.0	827.2	909.9	1,000.9	1,101.0	242.1	Prov. Sulawesi Tenggara	Kementerian Tenaga Kerja
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Total nilai produksi (Ton) setiap komoditas unggulan di Pulau Sulawesi						574.1		
Provinsi Sulawesi Utara									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							21.8		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	246,243.3	246,243.3	246,243.3	246,243.3	246,243.3	21.8	Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Tenggara	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan cengkeh							62.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan produksi cengkeh	jumlah produksi (Ton)	17,409.3	17,409.3	17,409.3	17,409.3	17,409.3	62.0	Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pala							16.9		
Peningkatan produksi pala	jumlah produksi (Ton)	4,749.0	4,749.0	4,749.0	4,749.0	4,749.0	16.9	Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Sitaro	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							0.0		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	4,334.9	4,513.6	4,697.8	4,887.2	5,092.8	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	5,072.6	5,153.4	5,235.7	5,319.2	5,405.1	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	321,062.9	325,392.7	329,754.0	334,207.5	338,726.9	0.0	Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Minahasa Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tengah									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							59.8		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	123,702.7	123,702.7	123,702.7	123,702.7	123,702.7	59.8	Kab. Poso, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan cengkeh							6.3		
Peningkatan produksi cengkeh	jumlah produksi (Ton)	12,735.3	12,735.3	12,735.3	12,735.3	12,735.3	6.3	Kab. Parigi Moutong, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Donggala	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	196,936.4	200,509.4	204,106.8	207,732.4	211,436.9	0.0	Kab. Banggai, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Tojo Una-Una	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nikel							0.0		
Peningkatan produksi nikel	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan bijih besi							0.0		
Peningkatan produksi bijih besi	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan produksi perikanan budidaya	jumlah produksi (Ton)	1,473,659.5	1,507,753.5	1,542,252.5	1,577,987.5	1,614,524.4	0.0	Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Morowali	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	105,477.4	107,760.7	110,086.7	112,448.4	114,876.8	0.0	Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							65.4		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	36,244.5	38,082.4	39,976.7	41,924.5	44,038.6	65.4	Kab. Tana Toraja, Kab. Pinrang, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan cengkeh							17.8		
Peningkatan produksi cengkeh	jumlah produksi (Ton)						17.8	Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Luwu	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan jambu mete							0.0		
Peningkatan produksi jambu mete	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Sinjai, Kab. Pangkep, Kab. Sidrap	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nilam							0.0		
Peningkatan produksi nilam	jumlah produksi (Ton)						0.0	Kab. Enrekang	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nikel							0.0		
Peningkatan produksi nikel	jumlah produksi (Ton)						0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	327,100.9	331,994.2	336,923.0	341,956.0	347,063.5	0.0	Kab. Bulukumba, Kab. Bone, Kab. Sinjai,	Kementerian Kelautan dan Perikanan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan produksi perikanan budidaya	jumlah produksi (Ton)	3,904,326.4	3,991,998.8	4,080,712.5	4,172,604.7	4,266,558.9	0.0	Kab. Takalar, kab. Wajo, Kab. Luwu	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tenggara									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							248.9		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	114,160.9	114,160.9	114,160.9	114,160.9	114,160.9	248.9	Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka Timur	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan cengkeh							54.3		
Peningkatan produksi cengkeh	jumlah produksi (Ton)	12,138.1	12,138.1	12,138.1	12,138.1	12,138.1	54.3	Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas jambu mete							0.0		
Peningkatan produksi jambu mete	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Muna, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	46,737.6	47,557.5	48,383.0	49,215.0	50,065.0	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan nikel							0.0		
Peningkatan produksi nikel	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya							0.0		
Peningkatan produksi perikanan budidaya	jumlah produksi (Ton)	1,004,572.0	1,028,317.6	1,052,345.2	1,077,233.7	1,102,680.6	0.0	Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton Tengah	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Gorontalo									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							20.7		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	62,152.2	63,329.9	64,515.6	65,710.6	66,931.6	20.7	Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	4,035.2	4,098.5	4,163.0	4,228.5	4,295.8	0.0	Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas cengkeh							0.0		
Peningkatan produksi cengkeh	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara	Kementerian Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	57,430.2	58,708.4	60,010.4	61,332.4	62,691.8	0.0	Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	67,969.3	68,892.6	69,822.7	70,772.5	71,736.3	0.0	Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi						135,744.3		
Provinsi Sulawesi Utara									
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado							37,914.6		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah publikasi/laporan pengembangan data statistik metropolitan	0	0	0	0	1	4.0	WM Manado	BPS
Pembangunan KA Manado-Bitung	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						1,268.0	Sulawesi Utara	Kemenhub
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Manado	Kemenhub
Pengembangan bandara hub primer:							0.0		
Bandara Samratulangi	Jumlah bandara yang dikembangkan						300.0	Sulawesi Utara	Kemenhub
Pengembangan pelabuhan utama (hub)							0.0		
-Pelabuhan Bitung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung	1	1	1	1	1	34,400.0	Sulawesi Utara	Kemenhub; BUMN (Pelindo IV); Swasta
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						825.6	Kota Manado	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						168.3	Kota Manado	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						44.0	Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						133.7	Kota Tomohon, Kota Bitung	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	38	100	184	230	322	569.3	Provinsi Sulawesi Utara	
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.05					14.4	WM Manado	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir		1	1	1	1	5.0	Kota Manado	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	5	5	5	5	50.0	Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara	Kementerian PUPR
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0.7	WM Manado	Kemendagri
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Manado	KESDM
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Utara)							97.5		
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						43.7	Kota Kotamobagu	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						4.0	Kota Kotamobagu	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)				0.17		49.8	Kota Kotamobagu	Kementerian PUPR
Provinsi Sulawesi Tengah									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil							962.0		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Palu	Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	45	118	218	273	382	674.5	Provinsi Palu	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						18.0	Kota Palu	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						130.2	Kota Palu	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)			0.32			95.2	Kota Palu	Kementerian PUPR
Provinsi Sulawesi Selatan									
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar							84,383.8		
Pengembangan data statistik metropolitan (Metropolitan Statistical Area)	Jumlah publikasi/laporan pengembangan data statistik metropolitan	0	1	1	1	1	17.5	WM Makassar	BPS
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:							0.0		
a. KA Maminassata	Panjang jalur yang dibangun (Km)					12	1,715.0	WM Makassar	Kemenhub, Pemda
b. LRT Makassar	Jumlah Koridor yang dibangun (koridor)						0.0	Kota Makassar	Kemenhub, Pemda
c, BRT Makassar	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)					1	1,000.0	Kota Makassar	Kemenhub, Pemda
Pengembangan pelabuhan utama (hub)							0.0		
-Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar	1	1	1	1	1	10,000.0	Kota Makassar	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pembangunan KA Makassar-Pare Pare (Segmen Palanro-Pare Pare, Mandai-Makassar)	Terbangunnya KA (km)		9	9	9	8	9,947.0	Kota Makassar	Kemenhub
Pengembangan bandara hub primer:							0.0		
Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara yang dikembangkan						400.0	Kota Makassar	Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara Hasanuddin	Terbangunnya KA akses Bandara (km)					14	400.0	Kota Makassar	Kemenhub
Pembangunan SPAM Regional Mamminasata	Jumlah SPAM Regional yang terbangun						43.5	WM Makassar	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)						2,396.4	Kota Makassar	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						697.4	Kota Makassar Kab Gowa	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						81.0	Kota Makassar, Kab Gowa, Kab Takalar, Kab Maros	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						786.0	Kota Makassar	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						184.0	Kota Makassar	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						8.8	Kota Makassar	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						1,850.2	Provinsi Sulawesi Selatan	
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						24,791.7	WM Makassar	KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						29,166.0	WM Makassar	BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	4	4	4	4	40.0	Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		0.79		0.05		251.5	WM Makassar	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Makassar	Kementerian PUPR
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)						87.5	Kota Makassar	KESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0.7	WM Makassar	Kemendagri
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Makassar	Kemennaker
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						3.2	Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)						0.8	Kota Makassar	KPBU
Pembangunan dan pengembangan RTH Publik	Jumlah RTH publik yang dibangun dan dikembangkan (unit)						235.0	WM Makassar	Pemerintah Daerah
Perluasan sambungan listrik rumah tangga perkotaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani perluasan sambungan listrik						29.8	WM Makassar	BUMN dan/atau Swasta
Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan digital (online marketing untuk UMKM berorientasi eksport)	Jumlah kluster usaha yang dikembangkan						202.1	WM Makassar	Kementerian KUKM
Peningkatan kemampuan jalan lingkungan	Jumlah kelurahan dengan peningkatan jalan (unit)						31.5	WM Makassar	Kementerian PUPR
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Selatan)							10,116.6		
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						6.0	Kota Palopo	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						145.5	Kota Palopo, Kota Pare-Pare	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						13.2	Kota Pare-pare	Kementerian PUPR
Pembangunan KA Makassar-Pare Pare (Segmen Palano-Pare Pare, Mandai-Makassar)	Terbangunnya KA (km)		9	9	9	8	9,947.0	Kota Pare-pare	Kemenhub
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Palopo	Kementerian PUPR
Provinsi Sulawesi Tenggara									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Tenggara)							980.1		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Kendari	Kemenhub
Pembangunan KA Kolaka-Kendari	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Kota Kendari	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						137.1	Kota Kendari	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						217.7	Kota Kendari	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						10.7	Kota Kendari	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						7.4	Kota Kendari	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	37	97	178	223	312	550.7	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kementerian PUPR
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Kendari	Kemennaker
Provinsi Sulawesi Barat									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Barat)							468.4		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Mamuju	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan TPA Baru	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						36.9	Mamuju	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						5.0	Mamuju	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	19	50	92	115	161	284.6	Provinsi Sulawesi Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun	1	0	0	0	0	97.7	Mamuju (Polda Sulbar)	Polri
Provinsi Gorontalo									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Gorontalo)							821.3		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Gorontalo	Kemenhub
Pembangunan Bandara Pohuwato	Jumlah bandara baru yang dibangun	1	1	1	1	1	350.0	Kota Gorontalo (lingkup pelayanan)	Kemenhub
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						11.0	Kota Gorontalo	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						123.0	Kota Gorontalo	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						15.0	Kota Gorontalo	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						3.1	Kota Gorontalo	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	17	46	84	105	147	259.9	Provinsi Gorontalo	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)				0.03		10.3	Kota Gorontalo	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Gorontalo	Kementerian PUPR
KP 4: Peningkatan Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni						24,066.2		
Provinsi Sulawesi Utara									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni (Sulawesi Utara)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	65.90%	68.29%	70.69%	73.08%	75.48%	3,525.5		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	92.47%	94.35%	96.23%	98.12%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	80.38%	81.45%	83.58%	86.79%	90.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	69.67%	71.15%	74.11%	78.56%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	38	100	184	230	322	569.3		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	1443	1443	1443	1443	1443	145.0		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaran Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	3	3	3	3	3	150.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	1774	2103	2103	3155	3155	860.4	Kutai Timur, Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	837	1001	1001	1502	1502	175.3	6 kab/kota	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	12569	16547	16547	24821	24821	522.9	Seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan Timur	DAK; APBD
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	5,784	8,675	11,567	14,459	17,351	942.4	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	6	9	13	16	19	160.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Sulawesi Tengah									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni (Sulawesi Tengah)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	60.90%	64.82%	68.74%	72.66%	76.58%	2,857.7		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.19%	92.65%	95.10%	97.55%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	68.01%	68.57%	69.67%	71.34%	73.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	45.00%	47.33%	52.00%	59.00%	66.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	45	118	218	273	382	674.5		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	1693	1693	1693	1693	1693	170.1		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	0	0	0	0	0.0	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR	
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	827	1275	1275	1912	1912	216.0		
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	29032	40006	40006	60009	60009	1,100.3	DAK; APBD	
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	5,784	8,675	11,567	14,459	17,351	563.2		
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	5	8	10	13	16	133.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Sulawesi Selatan									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni (Sulawesi Selatan)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	64.35%	67.68%	71.01%	74.34%	77.67%	12,391.9		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	92.08%	94.06%	96.04%	98.02%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	85.50%	86.55%	88.66%	91.83%	95.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	74.28%	75.25%	77.19%	80.09%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	124	324	598	748	1,047	1,850.2		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	4657	4657	4657	4657	4657	468.0		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	4	4	4	4	200.0		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	5598	7329	7329	10994	10994	2,957.1	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR	
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	2276	6195	6195	9292	9292	997.5		
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	34964	43311	43311	64967	64967	1,266.1	DAK; APBD	
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	13,367	20,050	26,734	33,417	40,101	1,691.2		
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	116	174	232	290	348	2,961.8	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Sulawesi Tenggara									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni (Sulawesi Tenggara)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	64.55%	69.18%	73.82%	78.45%	83.09%	2,759.1		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	92.31%	94.23%	96.16%	98.08%	100.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	74.35%	75.09%	76.56%	78.78%	81.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	55.26%	57.56%	62.17%	69.09%	76.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	37	97	178	223	312	550.7		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	1389	1389	1389	1389	1389	139.5		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	0	0	0	0	0.0		Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	641	954	954	1431	1431	162.3		Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	20641	30948	30948	46422	46422	885.1		DAK; APBD
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	5,813	8,720	11,626	14,533	17,440	880.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	6	8	11	14	17	141.3	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Gorontalo									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni (Gorontalo)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	58.97%	61.81%	64.65%	67.49%	70.33%	1,338.6		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	95.58%	96.68%	97.79%	98.89%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	65.13%	65.67%	66.76%	68.38%	70.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	47.08%	49.40%	54.05%	61.03%	68.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	17	46	84	105	147	259.9		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	653	653	653	653	653	65.6		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	0	0	0	0	0.0		Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	0	0	0	0	0	0.0		Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	14199	15110	15110	22664	22664	428.5		DAK; APBD
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	3,686	5,529	7,372	9,215	11,058	355.7	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	9	13	18	22	27	228.9	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Sulawesi Barat									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni (Sulawesi Barat)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	53.04%	57.53%	62.03%	66.52%	71.02%	1,193.6		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	81.33%	85.99%	90.66%	95.33%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	68.62%	69.89%	72.41%	76.21%	80.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	36.50%	38.78%	43.34%	50.17%	57.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	19	50	92	115	161	284.6		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	712	712	712	712	712	71.6		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	0	0	0	0	0.0		Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	0	0	0	0	0	0.0		Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	15219	19314	19314	28971	28971	505.4		DAK; APBD
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	2,745	4,118	5,490	6,863	8,235	265.9	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	3	4	5	6	8	66.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri				1043 desa berkembang; 507 desa mandiri		39,772.9		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	12.10%	11.44%	10.59%	9.92%	9.22%			
	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	9 kawasan berkembang; 9 kawasan mandiri				2 kawasan berkembang; 14 kawasan mandiri; 2 kawasan berdaya saing			
	Jumlah Daerah Tertingga (Kab)	3 kabupaten tertinggal				0 kabupaten tertinggal (3 kabupaten potensi entas)			
	Penduduk miskin di daerah tertinggal	15,3 - 15,8	15,1 - 15,6	15 - 15,5	14,8 - 15,3	14,6 - 15,1			
	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	66,8 - 67,3	67,5 - 68	68,2 - 68,7	69 - 69,5	69,7 - 70,2			
Provinsi Sulawesi Utara									
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahunan	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 29,35%; 2) 4,38%	1) 29,65%; 2) 4,45%	1) 29,94%; 2) 4,52%	1) 30,23%; 2) 4,59%	1) 30,52%; 2) 4,66%	80.3		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud	4	4	4	4	5	11.0	Kepulauan Talaud	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	-	1	-	-	1	2.0	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Khusus Perbatasan	Jumlah rumah khusus perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	-	10	10	-	-	2.4	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian PUPR
Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perbatasan	Kapasitas jaringan perpipaan yang dikembangkan	-	11000	-	11000	11000	30.0	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	4.0	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian Kominfo
Fasilitasi Legislasi RDTR Tahunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0.5	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian ATR/BPN
Peningkatan mutu pelayanan & efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	Penambahan jaringan distribusi						0.0	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	10	10	10	10	1.4	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	-	5	-	5	-	5.5	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut Tahunan	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	-	-	-	22.6	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian Perhubungan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	-	20	20	20	20	0.0	Kabupaten Kep Sangihe	Kementerian ESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	0.2	Kabupaten Kep Sangihe	Kemendesa PDTT				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	0.7	Kabupaten Kep Sangihe	Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Sulawesi Utara	6 kecamatan	14.1						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Pemerintah Daerah				
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Pemerintah Daerah				
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	Jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Pemerintah Daerah				
Penyediaan alat-alat kesehatan	Jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	Jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Pemerintah Daerah				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Pemerintah Daerah				
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	5	5	5	5	0.7	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	-	30 paket	30 paket	-	13.2	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	0.2	Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kandahe, Kecamatan Kep Marore, Kecamatan Wori	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	64.21	64.40	64.55	64.67	65.16	320.2		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	2 desa	10.8	DPP Manado-Likupang	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	472 desa	231 desa	367 desa	287 desa	362 desa	31.8	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	19 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	472 desa	231 desa	367 desa	287 desa	362 desa	57.5	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	747 orang	749 orang	950 orang	939 orang	774 orang	194.1	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Desa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Minahasa Utara	38.29	39.97	41.64	43.32	45.00	128.5		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	172 unit	81.9	Kab. Minahasa Utara	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 unit	1.8	Kab. Minahasa Utara	Kementerian Pertanian				
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Minahasa Utara	Kementerian Pariwisata				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Minahasa Utara	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	0.8	Kab. Minahasa Utara	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	40.0	Kab. Minahasa Utara	Kementerian ESDM				
Provinsi Sulawesi Tengah									
ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	0.5	0.75	0.9	1		33,514.9		
Pembangunan Ruang SD dan Kelas Baru	Unit Sekolah Baru Yang dibangun	200 unit	100 unit	117 unit	120 unit		725.4	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Terselenggaranya Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	154839	154839	154839	154839	154839	2,527.9	Sulawesi Tengah	Kementerian Sosial
Terselenggaranya Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	202003	202003	202003	202003	202003	1,636.2	Sulawesi Tengah	Kementerian Sosial
Bantuan Kelompok Usaha Bersama Bagi Fakir Miskin	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	1000 KK	1100 KK	1200 KK	1300 KK	1300 KK	10.6	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian Sosial
Bantuan Sosial Bangunan Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	1000 KK	16.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian Sosial				
Bantuan Rumah Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	100 KK	200 KK	150 KK	250 KK	250 KK	16.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	2	2	2	2	2	10.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian Koperasi dan UKM
Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi sulawesi tengah dukungan rehabilitasi rumah rusak berat	Jumlah Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui Bantuan PSU Rumah Umum	998 unit	1000 unit	1500 unit	2000 unit	2000 unit	3,749.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya	500 unit	1000 unit	700 unit	1000 unit	1000 unit	2,100.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Pembangunan Baru)	Jumlah Rumah Swadaya yang Dibangun Baru	150 unit	375.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jamban/MCK Desa	Sistem Pengelolaan Air Limbah	25 KK	20.5	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR				
SPAL Kawasan Huntap Tondo (7500 KK)	Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 KK					13.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
SPAL Kawasan Hutan Petobo (2700 KK)	Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 KK					97.2	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Sampah	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota yang terbangun	1	3				37.3	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah kapasitas produksi unit SPAM baru	120 liter/detik	4,081.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR				
Perbaikan Hilir Sungai Palu	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km)	5	21 km				20.6	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Peningkatan Kapasitas Sungai Palu (Aliran Tengah)	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km)	15	5 km				84.5	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Jalan Nasional	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	6 km					659.7	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Jalan Propinsi	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	3 km	3 km	2 km			380.6	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Jalan Kabupaten/ Kota	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	21 km	21 km	24 km			4,781.4	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Jalan Desa	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	14 km	14 km				395.5	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Jembatan Nasional;	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	2 km	2 km	1 km			98.1	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR (PHLN)
Rehabilitasi Jembatan Propinsi	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	1 km	1 km				30.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR (PHLN)
Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	12 km	12 km	14 km	13 km	16 km	311.9	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan embung	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	1 buah	1.8	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR				
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Ikan Pasca Bencana	Pasar Ikan yang direhabilitasi dan direkonstruksi pascabencana	2 lokasi					10.0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Rekonstruksi Jembatan Jalur 2 Bambalemo	Jumlah jembatan Jalur yang direkonstruksi	2 lokasi					11.4	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Kementerian PUPR
Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana	Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana	4 lokasi	7.0	Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu	BNPB				
Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik	Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik	1 lokasi	2.5	Provinsi Sulawesi Tengah	BNPB				
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	250 m					325.0	Kota Palu	Kementerian PUPR (PHLN)
Rehabilitasi Ruas Jalan dalam Kota Palu dan Pembangunan Tsunami Dike	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	1 paket					157.4	Kota Palu	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Ruas Jalan dalam Kota Palu dan Pembangunan Tsunami Dike 2	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	1 paket					157.3	Kota Palu	Kementerian PUPR
Rekonstruksi Jalan Kalawara-Kulawi	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	12 km					90.3	Kabupaten Sigi	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Lingkungan Hunian Tetap	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	30 km					132.9	Kota Palu	Kementerian PUPR
Rekonstruksi Jalan Akses Danau Lindu	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	17 km					41.8	Kabupaten Sigi	Kementerian PUPR
Rekonstruksi Jalan Lingkar Dalam Kota Palu 1	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	25 km					79.1	Kota Palu	Kementerian PUPR
Rekonstruksi Jalan Lingkar Dalam Kota Palu 2	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	17 km					69.5	Kota Palu	Kementerian PUPR
Penanganan Lereng dan Raising Ruas Tambu-Tompe	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	7.5 km					150.5	Kabupaten Donggala	Kementerian PUPR
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan Sulawesi Tengah	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan						32.8	Kota Palu	Kementerian PUPR
Rekonstruksi Gedung Anutapura Medical Centre (AMC) RSUD Anutapura							227.7	Kota Palu	Kementerian PUPR
Pembangunan Sabo DAM di Kawasan Relokasi							1,441.9	Kota Palu	Kementerian PUPR
Perbaikan Dinding Saluran Sungai							0.0	Kota Palu	Kementerian PUPR
Pengeboran Horizontal dan Tangkapan Vertikal untuk Resesi Air Tanah	Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi						0.0	Kabupaten Donggala	Kementerian PUPR
Rekonstruksi IAIN Palu	Terbangunnya IAIN Palu						119.3	Kota Palu	Kementerian PUPR

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan SPAM Rakuta	Terlanyanya sistem penyediaan air minum untuk masyarakat terdampak bencana						100.0	Kabupaten Sigi	Kementerian PUPR
Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum	Terlanyanya sistem penyediaan air minum untuk masyarakat terdampak bencana						301.8	Kota Palu, Kabupaten Sigi	Kementerian PUPR
Pembangunan Pengaman Pantai	Panjang pengaman pantai yang dibangun (km)	6					262.4	Kota Palu	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gumbasa	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (km)	5	1.65				1,030.0	Kota Palu, Kabupaten Sigi	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Jaringan Air Baku Pasigala	Panjang jaringan air baku yang direhabilitasi (km)	42					274.4	Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala	Kementerian PUPR
Rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al Jufri Palu	Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandar Udara	1 lokasi	1 lokasi				327.4	Kota Palu	Kementerian Perhubungan (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			812.0	Kabupaten Donggala	Kementerian Perhubungan (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			130.5	Kabupaten Donggala	Kementerian Perhubungan (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			101.5	Kabupaten Donggala	Kementerian Perhubungan (PHLN)
Penyiapan/penataan lokasi berjualan bagi pelaku usaha mikro, koperasi yang direlokasi/ditempatkan beserta dukungan sarana tempat berjualan	Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang direlokasi/ditempatkan beserta dukungan sarana tempat berjualan	150	150	150	150	150	2.5	Taman Kota Kaombona Palu	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sultena
Peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan Koperasi terdampak bencana	Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang mendapatkan dukungan peralatan /modal kerja	50	50	50	50	50	7.5	Kota Palu	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sultena
Peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan Koperasi terdampak bencana	Jumlah pelaku usaha mikro,koperasi yang mendapatkan pelatihan	150	150	150	150	150	2.5	Kota Palu	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sultena
Pemulihan Sektor Transportasi	PersentaseKonsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana:	25%	25%	25%	25%	25%	35.1	Wilayah Kota Palu	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah (Jembatan IV dan Jembatan V) serta wilayah hunian baru;	Persentase Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;						0.0	Wilayah Kota Palu	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Melaksanakan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain terminal, pelabuhan laut dan bandara udara beserta jaringan pendukungnya;	Persentase Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;						0.0	Wilayah Kota Palu	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.	Persentase Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang						0.0	Wilayah Kota Palu	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Melaksanakan pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Hutan dan Huntara	Persentase infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntara	25%	25%	25%	25%	25%	7.5	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sigi	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					21.1	Kabupaten Sigi	Pemerintah Kabupaten Sigi

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Donggala	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana	1 lokasi					4.8	Kabupaten Donggala	Pemerintah Kabupaten Donggala
Pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah	Terpulihkannya 5 sektor di 4 Kab/Kota pascabencana	4 lokasi					1,865.4	Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat
Pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah	Terpulihkannya 5 sektor di 4 Kab/Kota pascabencana	4 lokasi					2,993.1	Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu	Masyarakat dan Dunia Usaha
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Sulawesi Tengah	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	7.1		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	3	3	3	3	0.4	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	-	15 paket	15 paket	-	6.6	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	1desa	1desa	1desa	1desa	1desa	0.1	Kecamatan Dampali Utara, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemeaan	Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	4 kawasan berkembang; 2 kawasan mandiri	-	-	-	1 kawasan berkembang; 4 kawasan mandiri; 1 kawasan berdaya saing	115.1		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	2 SP	3 SP	4 SP	1 SP	4 SP	83.2	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	4120	1703	0	1728.04	287.7	1.2	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	1	2	1	1	19.7	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	5	5	5	3	9.4	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	1204	0	100	0	90	0.8	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	4120	1703	0	1728	287	0.8	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Tajo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1204	0	100	0	90	0.0	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong	Kementerian ATR/BPN
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 15,3 - 15,8%; 2. 66,8 - 67,3	1. 15,1 - 15,6%; 2. 67,5 - 68	1. 15 - 15,5%; 2. 68,2 - 68,7	1. 14,8 - 15,3%; 2. 69 - 69,5	1. 14,6 - 15,1%; 2. 69,7 - 70,2	1,403.4		
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia	3 paket	3 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2.8	Kab. Tojo Una-una	Kementerian ESDM
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	14 km	14 km	14 km	14 km	14 km	287.0	Kab. Donggala	Kementerian PUPR
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	300 orang	360 orang	432 orang	519 orang	621 orang	11.2	Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	3 paket	3 paket	3 paket	-	-	10.8	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Percentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		5%				3.0	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit		6.0	Kab. Sigi, Tojo Una-una	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun / ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)	2					2.3	Kab. Sigi	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Percentase peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal				40%	40%	8.6	Kab. Tojo Una-una (KSPN Togean-Tomini dskt); Kab. Sigi (KSPN Lore Lindu dskt dan KSPN Lore Lindu dskt)	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	46	46	46	46	46	1.8	Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi	Kementerian Desa PDTT
Penyelegaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	42,046	42,046	42,046	42,046	42,046	630.7	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Kementerian Sosial
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	225	225	225	225	225	2.5	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Kementerian Sosial
Penyelegaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	53,673	53,673	53,673	53,673	53,673	434.8	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana		2 unit					2.0	Kab. Sigi, Donggala	Kementerian KUKM
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	60.62	61.24	61.74	62.13	63.73	395.0		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	853 desa	263 desa	695 desa	452 desa	221 desa	44.0	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	(diusulkan untuk DAK)

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	20 desa	19 desa	16 desa	5.7	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	853 desa	263 desa	695 desa	452 desa	221 desa	87.6	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	914 orang	916 orang	1162 orang	1148 orang	947 orang	237.4	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Banggai, Parigi Moutong	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Morowali, Kab. Buol dan Kab. Poso	27.86; 58.36; 53.45	29.65; 60.52; 55.09	31.43; 62.68; 56.73	33.22; 64.84; 58.36	35.00; 67.00; 60.00	312.8		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	250 unit	2.2	Kab. Poso dan Kab. Morowali	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	62 unit	8.1	Kab. Poso dan Kab. Morowali	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	69 paket	38.6	Kab. Poso dan Kab. Morowali	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	6 unit	1.3	Kab. Poso dan Kab. Morowali	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	2 unit	26.7	Kab. Poso dan Kab. Morowali	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Poso	Kementerian Pariwisata				
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	172 unit	81.9	Kab.Buol	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1.0	Kab.Buol	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3.2	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso	Kemendesa PDTT				
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesannya	1 kawasan	16.4	Kab.Buol	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 kawasan	2.4	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso	Kemendesa PDTT				
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	8.1	Kab.Buol	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	3 unit	120.0	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso	Kementerian ESDM				
Provinsi Sulawesi Selatan									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	64.40	64.75	65.02	65.25	66.13	454.2		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	1 desa	2 desa	2 desa	2 desa	5.6	DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	542 desa	435 desa	694 desa	487 desa	111 desa	47.2	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pimrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pimrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelaanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pimrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	20 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pimrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	542 desa	435 desa	694 desa	487 desa	111 desa	84.8	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pimrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1119 orang	1122 orang	1422 orang	1405 orang	1159 orang	290.7	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Waia	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Enrekang, Bone	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Luwu Timur dan Kab. Bone	46.91; 44.56; 53.52; 53.84	47.68; 46.17; 54.39; 54.88	48.45; 47.78; 55.26; 55.92	49.23; 49.39; 56.13; 59.96	50.00; 51.00; 57.00; 58.00	255.6		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	250 unit	2.2	Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	63 unit	8.2	Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	70 paket	39.2	Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	6 unit	1.3	Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	2 unit	26.7	Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Barru	Kementerian Pariwisata				
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	27 unit	4.0	Kab. Barru dan Kab. Luwu Timur	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	6 unit	3.5	Kab. Barru dan Kab. Luwu Timur	Kementerian Pertanian				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4.3	Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Luwu Timur, dan Kab. Bone	Kemendesa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	3.2	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	160.0	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	1 kawasan berkembang; 2 kawasan mandiri	-	-	-	1 kawasan berkembang; 2 kawasan mandiri	88.0		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	2 SP	1 SP	2 SP	2 SP	2 SP	63.4	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasaranan, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	1	2	1	0	19.2	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	2	2	1	1	3.9	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	2638	0	1075	0	307	1.5	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2638	0	1075	0	307	0.0	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tenggara									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	58.60	59.37	59.98	60.46	62.42	416.6		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	2 desa	10.8	DPP Wakatobi	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	605 desa	666 desa	497 desa	276 desa	175 desa	47.7	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	20 desa	19 desa	16 desa	5.7	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	605 desa	666 desa	497 desa	276 desa	175 desa	78.3	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	977 orang	979 orang	1242 orang	1228 orang	1012 orang	253.8	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Buton, Kolaka	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	NA; 45.46; 44.47	NA; 47.10; 46.85	NA; 48.73; 49.24	NA; 50.37; 51.62	NA; 52.00; 54.00	251.1		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	1.1	Kab. Konawe Selatan	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	32 unit	4.2	Kab. Konawe Selatan	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	35 paket	19.6	Kab. Konawe Selatan	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	3 unit	0.7	Kab. Konawe Selatan	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	13.3	Kab. Konawe Selatan	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Wakatobi	Kementerian Pariwisata				
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	172 unit	81.9	Kab. Muna	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 unit	1.8	Kab. Muna	Kementerian Pertanian				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3.2	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 kawasan	2.4	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Kemendesa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	120.0	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	2 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	-	-	-	3 kawasan tahap mandiri	95.0		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	2 SP	2 SP	3 SP	2 SP	2 SP	73.3	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	720	927	0	0	1509.71	0.8	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	2	1	0	2	15.2	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	1	3	2	3	4.6	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	1726	0	300	0	75	0.9	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	927	0	0	1510	0.3	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1726	0	300	0	75	0.0	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Gorontalo							2.5		
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Gorontalo	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan			
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	0.0	Kecamatan Anggrek	Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	0.0	Kecamatan Anggrek	Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	0.0	Kecamatan Anggrek	Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	0.0	Kecamatan Anggrek	Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	0.0	Kecamatan Anggrek	Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	0.0	Kecamatan Anggrek	Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	0.0	Kecamatan Anggrek	Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	2	2	2	-	0.2	Kecamatan Anggrek	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	5 paket	5 paket	-	-	2.2	Kecamatan Anggrek	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	1desa	1desa	1desa	1desa	1desa	0.1	Kecamatan Anggrek	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	64.96	65.24	65.46	65.64	66.35	147.7		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	433 desa	191 desa	0 desa	0 desa	224 desa	13.1	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	20 desa	19 desa	16 desa	5.7	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	433 desa	191 desa	0 desa	0 desa	224 desa	23.7	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	326 orang	327 orang	414 orang	410 orang	338 orang	84.7	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1.7	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0.6	Boalemo, Gorontalo, Pohuwato	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo Utara	NA; NA; 54.49	NA; NA; 55.37	NA; NA; 56.25	NA; NA; 57.12	NA; NA; 58.00	334.0		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	125 unit	1.1	Kab.Gorontalo Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	4.0	Kab.Gorontalo Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	34 paket	34 paket	34 paket	34 paket	34 paket	19.0	Kab.Gorontalo Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0.7	Kab.Gorontalo Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	13.3	Kab.Gorontalo Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	3.0	Kab.Gorontalo Utara	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	344 unit	344 unit	344 unit	344 unit	344 unit	163.8	Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	3.5	Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3.2	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	2.4	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	120.0	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pululuba	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	2 kawasan berkembang; 2 kawasan mandiri	-	-	-	3 kawasan mandiri; 1 kawasan berdaya saing	75.7		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	1 SP	2 SP	3 SP	2 SP	51.9	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	0	0	1646.97	787	0.7	Kabupaten Gorontalo	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	0	2	2	1	15.7	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	3	3	4	2	6.5	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	344	0	992	200	0	0.7	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	1647	787	0.1	Kabupaten Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	344	0	992	200	0	0.0	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Barat									
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	59.69	60.53	61.21	61.74	63.90	99.6		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	291 desa	88 desa	144 desa	59 desa	168 desa	12.3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	20 desa	19 desa	16 desa	5.9	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	291 desa	88 desa	144 desa	59 desa	168 desa	23.3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	144 orang	144 orang	184 orang	181 orang	149 orang	37.4	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Kemendesa PDTT				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	4 kabupaten	0.8	Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamasa	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah	49.10; 43.00	50.72; 44.75	51.55; 46.50	52.77; 48.25	54.00; 50.00	1,191.2		
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	1.1	Kab. Mamuju	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	31 unit	4.0	Kab. Mamuju	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	35 paket	19.6	Kab. Mamuju	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	3 unit	0.7	Kab. Mamuju	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	13.3	Kab. Mamuju	Kementerian Kelautan dan Perikanan				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3.3	Kab. Mamuju	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan	2000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	58.8	Kab. Mamuju	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit	1239877.5 dosis	1239877.5 dosis	1239877.5 dosis	1239877.5 dosis	1239877.5 dosis	1,000.2	Kab. Mamuju	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	3.0	Kab. Mamuju Tengah	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	0 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.4	Kab. Mamuju	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 unit	0unit	0 unit	0 unit	1 unit	1.0	Kab. Mamuju	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2.1	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1.6	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	80.0	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	2 kawasan mandiri	-	-	-	2 kawasan mandiri	70.3		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	2 SP	1 SP	1 SP	2 SP	1 SP	59.9	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	720	1378	0	0	0	0.4	Kabupaten Mamuju Tengah	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	1	0	0	1	6.1	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	1	1	2	1	3.7	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	320	0	0	0	0	0.2	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	1378	0	0	0	0.1	Kabupaten Mamuju Tengah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	320	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu	Kementerian ATR/BPN
KP 6: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelegaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3.02	3.1	3.17	3.24	3.32	3,281.9		
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	19.5%	25.5%	31.5%	37.5%	43.5%			
	Jumlah daerah yang penerimaan daerhanya meningkat	53	59	67	74	87			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjaanya berkualitas	18	36	51	66	87			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4424	4867	5352	5887	6475			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik								
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	18	36	51	66	87			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	4	5	5	6	8			
	Persentase capaian SPM di daerah	65.6%	74.2%	82.8%	91.3%	100.0%			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik								
Provinsi Sulawesi Utara									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di Provinsi Sulawesi Utara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	830	913	1004	1105	1215	151.8		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	2	2	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	-	1077 KM2	-	-	2800 KM2	52.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	-	1077 KM2	-	-	2800 KM2	19.7	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	-	-	1000	7.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	20	25	30	34	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	9	12	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	6	9	12	16	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	-	-	3	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	70.50%	77.88%	85.25%	92.63%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	16	16	16	16	16	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	9	12	16	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	9	12	16	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	9	12	16	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	9	12	16	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	18%	24%	30%	36%	42%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	16	16	16	16	0.3	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	1	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	14	14	15	15	16			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	13	14	14	15	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	2	6	9	13	16	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	3	6	9	12	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	9	12	16			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	9	12	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	3	6	10	13	16	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	9	12	16			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	9	12	16	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	3	4	6	6	6	5.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							227.2		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	69000	132387	132387	132387	132387	97.0	Sulawesi Utara	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	22112	22112	22112	22112	22112	0.4	Sulawesi Utara	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	14	14	14	14	32.1	Sulawesi Utara	Kementerian ATR/BPN
Perapatatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatatan batas (Km)	797	797	797	797	797	97.7	Sulawesi Utara	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							4.9		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Sulawesi Utara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1.3	Sulawesi Utara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0.9	Sulawesi Utara	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	0	1	1.8	Sulawesi Utara	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tengah									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Tengah	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1274	1401	1542	1696	1865	72.7		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	2	2	2	3	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	20	25	30	34	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	6	9	11	14	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	62.86%	72.14%	81.43%	90.17%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	14	14	14	14	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	9	11	14	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat pengembangan kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dalam hal penerapan SPM di daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	9	11	14	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	19%	25%	31%	37%	43%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	16	16	16	16	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	1	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	10	11	12	13	14	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	6	7	8	10	14				
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya				1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	6	7	8	9	13	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	2	5	8	11	14	0.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	9	11	14				
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)		8	10	11	13	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	9	11	14				
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.									
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri	

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanian							705.2		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	235700	337110	337110	337110	337110	305.0	Sulawesi Tengah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	64000	275632	275632	275632	275632	4.2	Sulawesi Tengah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	12	12	12	12	32.1	Sulawesi Tengah	Kementerian ATR/BPN
Perapatatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatatan batas (Km)	2968	2968	2968	2968	2968	363.9	Sulawesi Tengah	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Sulawesi Tengah	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1.3	Sulawesi Tengah	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0.9	Sulawesi Tengah	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Selatan									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Selatan	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	995	1095	1204	1324	1457	242.0		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	3	3	3	3	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	1716.25 KM2	1077 KM2	-	2000 KM2	2800 KM2	98.4	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	1024.75 NLP	1077 KM2	-	2000 KM2	2800 KM2	72.5	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	50	-	-	-	-	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	20	25	30	34	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	9	13	18	25	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatuar yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	9	13	18	25	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	2			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	2	2	2	2	1.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Percentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	4	4	4	2.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	64.13%	73.10%	82.07%	91.03%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	25	25	25	25	25	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	9	13	18	25	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	9	13	18	25	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	9	13	18	25	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	9	13	18	25	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	13	18	25	25	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	44%	50%	56%	62%	68%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	25	25	25	25	25	0.3	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	13	15	17	19	25			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	12	14	16	18	24	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	19	21	22	24	25	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUI	3	9	13	18	25	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjaanya berkualitas	3	9	13	18	25			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	9	13	18	25	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	14	17	20	22	25	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	9	13	18	25			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	9	13	18	25	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanian							695.3		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	131500	418568	418568	418568	418568	395.0	Sulawesi Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	233306	233306	233306	233306	233306	4.4	Sulawesi Selatan	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	25	25	25	25	25	32.1	Sulawesi Selatan	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	2151	2151	2151	2151	2151	263.7	Sulawesi Selatan	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							5.5		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Sulawesi Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	6	6	8	10	1.3	Sulawesi Selatan	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	8	10	0.9	Sulawesi Selatan	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1.6	Sulawesi Selatan (KSN Pare Pare)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tenggara									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Tenggara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	563	619	680	748	823	77.7		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	-	-	1000	7.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	20	25	30	34	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	7	10	13	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	7	10	13	18	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	63.92%	72.94%	81.96%	90.98%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	18	18	18	18	18	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	7	10	13	18	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	7	10	13	18	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	7	10	13	18	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	7	10	13	18	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	10	13	18	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	18	18	18	18	18	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	10	12	14	16	18			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	9	11	13	15	17	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	10	12	14	16	18	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	7	10	13	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	7	10	13	18			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	7	10	13	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	4	8	11	15	18	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	7	10	13	18			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	7	10	13	18	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	2	2	2	4	2.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							525.0		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	91500	213099	213099	213099	213099	233.7	Sulawesi Tenggara	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	25500	62913	62913	62913	62913	1.0	Sulawesi Tenggara	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32.1	Sulawesi Tenggara	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	2105	2105	2105	2105	2105	258.2	Sulawesi Tenggara	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							6.8		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Sulawesi Tenggara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2.0	Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Utara)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1.3	Sulawesi Tenggara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0.9	Sulawesi Tenggara	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1.7	Sulawesi Tenggara (KSN TN Rawa Aopa-Watomohai-Rawa Tinondo)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Gorontalo							72.4		
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Gorontalo	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	356	392	431	474	521			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	833	-	-	4.8	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	4	5	6	7	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Percentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Percentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	70.34%	77.76%	85.17%	92.59%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	7	7	7	7	7	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	4	5	6	7	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	4	5	6	7	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	4	5	6	7	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	4	5	6	7	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	13	19	24	24	0.2		
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	7	7	7	7	7	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	1	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnnya meningkat	6	6	7	7	7			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	5	5	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1	3	4	6	7	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	4	5	6	7			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	2	3	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	4	5	6	7			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							169.0		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	45000	55608	55608	55608	55608	55.6	Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	5439	5439	5439	5439	5439	0.1	Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	7	7	7	7	32.1	Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	662	662	662	662	662	81.2	Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							4.6		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	6	7	1.3	Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	0.9	Gorontalo	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1.6	Gorontalo (KSN Gorontalo-Paguyuman-Kwandang)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Barat									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	406	447	491	540	594	67.0		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	50	-	-	-	-	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparat yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	4	5	6	7	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	61.93%	71.45%	80.96%	90.48%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	7	7	7	7	7	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	4	5	6	7	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	4	5	6	7	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	4	5	6	7	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	4	5	6	7	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	13	19	24	24	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	7	7	7	7	7	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	1	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerhanya meningkat	4	5	6	7	7			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerhanya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerhanya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	3	4	5	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	3	4	5	6	7	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	4	5	6	7			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	2	3	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	4	5	6	7			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	4	5	6	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanian							248.7		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	30000	95761	95761	95761	95761	86.5	Sulawesi Barat	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	36996	36996	36996	36996	36996	0.7	Sulawesi Barat	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32.1	Sulawesi Barat	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	1055	1055	1055	1055	1055	129.4	Sulawesi Barat	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.1		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Sulawesi Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	5	6	1.3	Sulawesi Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	5	6	0.9	Sulawesi Barat	Kementerian ATR/BPN
PP : Pembangunan Wilayah Maluku	Laju Pertumbuhan PDRB Maluku	6.09	5.84	5.81	5.94	6.00	10,655.1		
	Share PDRB Wilayah Maluku	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55			
	IPM Wilayah Maluku	69,51-70,14	70,20-70,68	70,89-71,24	71,56-71,79	72,25-72,33			
	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	11.49	11.18	10.47	9.74	9.40			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	>1	>1	>1	>1	>1	535.6		
Provinsi Maluku									
Provinsi Maluku Utara									
ProP : Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Morotai/KEK Morotai	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	>1	>1	>1	>1	>1	225.6		
Jalan Lingkar Pulau Morotai	Panjang jalan yang dibangun (km)				13	13	39.1	Maluku Utara	KemenPUPR
Pembangunan Bandara Pitu Morotai	Jumlah sarana prasarana bandara yang dibangun (paket)	1.0					4.5	Kab. Pulau Morotai	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Penyeberangan Daruba	Jumlah sarana prasarana pelabuhan yang dikembangkan (paket)	1.0					50.0	Kab. Pulau Morotai	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jalan lingkar Morotai	Panjang jalan yang dibangun (Km)	3.0	4.0	4.0	3.0	0.0	126.0	Kab. Pulau Morotai	Kementerian PUPR
Perluasan pelabuhan barang dan penumpang Wayabula dan Sopi	Luas pelabuhan yang dikembangkan						0.0	Kab. Pulau Morotai	Kementerian Perhubungan
Penyediaan air baku KEK/DPP Morotai	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.0				6.0	Kab. Pulau Morotai	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja						0.0	Prov. Maluku Utara	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	>1	>1	>1	>1	>1	310.0		
Penyediaan air baku KI Teluk Weda	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.1				15.0	Kab. Halmahera Tengah	Kementerian PUPR
Pelabuhan Penyeberangan Weda (Malut)	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1.0					75.0	Maluku	Kemenhub
Pembangunan Bandara Weda	Jumlah bandara baru yang dibangun	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	220.0	Kab. Halmahera Tengah-Maluku Utara	Kementerian Perhubungan
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Total nilai produksi (Ton) setiap komoditas unggulan di Pulau Maluku						186.3		
Provinsi Maluku									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pala							17.6		
Peningkatan produksi pala	Jumlah produksi (Ton)	5,372.1	5,372.1	5,372.1	5,372.1	5,372.1	17.6	Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur, Kota Ambon	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan cengkeh							57.7		
Peningkatan produksi cengkeh	Jumlah produksi (Ton)	17,574.8	17,574.8	17,574.8	17,574.8	17,574.8	57.7	Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru Selatan	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							25.6		
Peningkatan produksi kelapa	Jumlah produksi (Ton)	106,382.0	108,225.5	110,081.6	111,952.2	113,863.6	25.6	Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Tenggara	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan komoditas unggulan emas							0.0		
Peningkatan produksi Emas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	619,965.9	629,198.2	638,497.6	647,993.6	657,629.9	0.0	Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Maluku Utara							22.0		
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							22.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	221,166.8	221,166.8	221,166.8	221,166.8	221,166.8	22.0	Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Barat, Kab. Kepulauan Sula	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pala							63.4		
Peningkatan produksi pala	jumlah produksi (Ton)	6,849.7	6,849.7	6,849.7	6,849.7	6,849.7	63.4	Kab. Halmahera Tengah, Kota Ternate, Kab. Halmahera Barat	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan cengkeh							0.0		
Peningkatan produksi cengkeh	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0	Kab. Halmahera Barat, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Halmahera Utara,	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	9,194.74	9,379.53	9,567.78	9,758.92	9,955.45	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi nikel	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	269,930.0	273,761.0	277,619.8	281,560.2	285,558.9	0.0	Kab. Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Maluku						2,422.6		
Provinsi Maluku Utara							1,163.5		
ProP : Pembangunan Kota Baru Sofifi									
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						2.0	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional (TPA Regional)	Jumlah TPA Regional yang terbangun (unit)						20.0	Provinsi Maluku Utara	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		0.21				62.8	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	Kementerian PUPR
Pembangunan Bandara Weda	Jumlah bandara baru yang dibangun	1	1	1	1	1	220.0	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan (lingkup pelayanan)	Kemenhub
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya baru yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah (unit)						700.0	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	Kementerian PUPR
Pembangunan dan pengembangan RTH Publik	Jumlah RTH publik yang dibangun dan dikembangkan (unit)						5.5	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	Pemerintah Daerah
Perluasan SPAM	Jumlah sambungan rumah yang terlayani (SR)						41.1	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						17.6	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	DAK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Perluasan Layanan Transportasi perkotaan kecil dengan trayek tetap	Jumlah kelurahan yang terlayani (unit)						33.4	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	Kemenhub
Perluasan sambungan listrik rumah tangga perkotaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani perluasan sambungan listrik						0.4	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	BUMN dan/atau Swasta
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui APBN	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN)						54.8	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	Kementerian ESDM
Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan digital (online marketing untuk UMKM berorientasi ekspor)	Jumlah kluster usaha yang dikembangkan						5.9	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan	Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi Maluku Utara)							469.2		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Ternate	Kemenhub
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						110.9	Kota Ternate	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						20.0	Kota Ternate	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						2.2	Kota Ternate	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						235.1	Provinsi Maluku Utara	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0.08	0.07				44.4	Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan	Kementerian PUPR
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Ternate	Kemennaker
Provinsi Maluku									
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi Maluku)							789.9		
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Ambon	Kemenhub
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						2.0	Kota Tual	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)						210.3	Kota Ambon	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)						25.7	Kota Ambon	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						6.6	Kota Ambon	DAK
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	22	57	106	133	186	328.0	Provinsi Maluku	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		0.51				152.7	Kota Ambon, Kota Tual	Kementerian PUPR
Penyusunan peta resiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta resiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	1	1	1	1	1	5.0	Kota Ambon	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami	1	1	1	1	1	3.0	Kota Ambon	Kementerian PUPR
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Ambon	Kemennaker
KP 4: Peningkatan Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni						3,414.9		
Provinsi Maluku									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	55.05%	57.15%	59.25%	61.35%	63.45%	1,757.5		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	95.02%	96.26%	97.51%	98.75%	100.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	70.63%	71.34%	72.75%	74.88%	77.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	62.71%	64.96%	69.47%	76.24%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	22	57	106	133	186	328.0		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	832	832	832	832	832	83.6		
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	18217	22920	22920	34380	34380	830.9	Semua Kab./kota	DAK; APBD
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	3,447	5,170	6,894	8,617	10,340	508.1	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	0	0	1	1	1	7.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Maluku Utara									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	57.98%	58.77%	59.56%	60.35%	61.14%	1,657.4		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	89.97%	92.48%	94.98%	97.49%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	69.67%	70.26%	71.45%	73.22%	75.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	78.55%	79.05%	80.03%	81.52%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	16	41	76	95	133	235.1		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	592	592	592	592	592	59.5		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	0	234	234	350	350	35.0	Halmahera Selatan	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	12285	17096	17096	25644	25644	564.0	Semua Kab./kota	DAK; APBD
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	3,521	5,281	7,041	8,802	10,562	429.2	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	13	20	26	33	39	334.4	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri				675 desa berkembang; 39 desa mandiri		3,110.2		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	12.10%	10.05%	6.93%	4.96%	3.01%			
	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	3 kawasan berkembang				2 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri			
	Daerah tertinggal yang terentaskan, termasuk daerah tertinggal dengan karakteristik kewilayahannya tertentu	8 kabupaten tertinggal				2 kabupaten tertinggal (6 kabupaten potensi entas)			
	Penduduk miskin di daerah tertinggal	18,7 - 19,2%	18,4 - 18,9%	18,2 - 18,7%	17,9 - 18,4%	17,7 - 18,2%			
	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	63,5 - 64	64,1 - 64,6	64,8 - 65,3	65,4 - 65,9	66,1 - 66,6			
Provinsi Maluku									
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	1 kawasan berkembang	-	-	-	1 kawasan berkembang	33.4		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	-	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	24.4	Kabupaten Maluku Tengah	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	750	0	450	0	0.3	Kabupaten Maluku Tengah	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	1	0	1	0	6.1	Kabupaten Maluku Tengah	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	0	1	1	1	1.4	Kabupaten Maluku Tengah	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	231	95	0	1004	0	0.7	Kabupaten Maluku Tengah	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	450	0	0.4	Kabupaten Maluku Tengah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	231	95	0	1004	0	0.0	Kabupaten Maluku Tengah	Kementerian ATR/BPN
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 22,6 - 23,1%; 2. 63,9 - 64,4	1. 22,2 - 22,7%; 2. 64,6 - 65,1	1. 21,9 - 22,4%; 2. 65,2 - 65,7	1. 21,7 - 22,2%; 2. 65,9 - 66,4	1. 21,4 - 21,9%; 2. 66,5 - 67	1,441.7		
Pengembangan Bandara Moa	Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan	1 lokasi	1 lokasi				41.2	Kab. Maluku Barat Daya	Kementerian Perhubungan
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1 paket	2 paket			2 paket	6.4	Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	5%	5%	5%		5%	7.0	Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	112 orang	112 orang	112 orang	111 orang	111 orang	4.5	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun / ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)	2 km		2 km	2 km		8.3	Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal rawan pangan	2Unit	2Unit	2Unit	2Unit	2Unit	20.0	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	200 orang	240 orang	288 orang	346 orang	414 orang	7.4	Kab. Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	4 km	4 km	4 km	4 km		24.0	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi	59 KK	59 KK	59 KK	59 KK	59 KK	14.8	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan	222 KK	222 KK	222 KK	222 KK	222 KK	18.5	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di pulau kecil dan terluar	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan elektrifikasi di pulau kecil dan terluar	0	0	100	100	100	15.0	Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimoranga, P. Kisar)	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	24.2	Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimoranga, P. Kisar)	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin*	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	46,836	46,836	46,836	46,836	46,836	702.5	Kab. Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur	Kementerian Sosial
*) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM) *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	56,742	56,742	56,742	56742 KPM	56,742	459.6	Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan	Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana		2 unit					2.0	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat	Kementerian KUKM
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	5 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	11.3	Kab. Maluku Barat Daya	Kementerian Kelautan dan Perikanan			
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		0.22				55.8	Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		0,051 m3/s	0,013 m3/s			19.3	Kab. Kepulauan Aru (Pulau Penambulai); Kab. Maluku Barat Daya (Pulau Kisar, Leti, Babar, Wetar, Metimarang, Lakor, Masela, Lirang)	Kementerian PUPR
Puksesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puksesmas baru yang dibangun	1 unit					0.0	Kab. Buru Selatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 21,46%; 2) 1,80%	1) 22,06%; 2) 1,85%	1) 22,65%; 2) 1,90%	1) 23,25%; 2) 1,96%	1) 23,84%; 2) 2,01%	137.9		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki	4	4	4	4	5	11.0	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian KKP
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	-	1	-	-	1	2.0	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Khusus Perbatasan	Jumlah rumah khusus perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	-	10	10	-	-	2.4	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian PUPR
Jaringan Air baku yang dibangun/ ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/det)	-	0.039	-	-	-	9.7	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian PUPR
Fasilitasi Legislasi RDTR Saumlaki Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0.8	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian ATR
Peningkatan mutu pelayanan & efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	Penambahan jaringan distribusi						0.0	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	10	10	10	10	1.4	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	-	5	-	5	-	5.5	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	-	20	20	20	20	0.0	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian ESDM
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut Saumlaki	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan	1	1	-	-	-	67.6	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian Perhubungan
Rehabilitasi dan pengembangan bandara yang mendukung kawasan prioritas: Bandara Saumlaki	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan	-	-	-	-	-	36.5	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kementerian Perhubungan
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	0.2	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kemendesa PDTT				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	0.7	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Provinsi Maluku	12 kecamatan	27.9						

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM						0.0	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	12 kecamatan	0.0	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Pemerintah Daerah				
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	12 kecamatan	0.0	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Pemerintah Daerah				
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	12 kecamatan	0.0	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	12 kecamatan	0.0	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	12 kecamatan	0.0	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Pemerintah Daerah				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan						0.0	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Pemerintah Daerah	
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan		-	12 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	1.3	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		-	40 paket	40 paket	40 paket	-	26.4	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital		2 desa	0.2	Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Pulau Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	52.57	53.40	54.07	54.60	56.74	418.1			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	357 desa	278 desa	397 desa	307 desa	57 desa	28.8	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Kementerian Desa PDTT	
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	(diusulkan untuk DAK)	
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Kementerian Desa PDTT	

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	20 desa	19 desa	16 desa	5.9	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	357 desa	278 desa	397 desa	307 desa	57 desa	52.1	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	500 orang	501 orang	636 orang	628 orang	517 orang	129.9	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1.7	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Kemendesa PDTT				
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	60 desa	60 desa	72 desa	72 desa	72 desa	180.9	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	0.6	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Maluku Tengah	49.58	50.44	51.29	52.15	53.00	69.7		
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	0 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.4	Kab. Maluku Tengah	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 unit	0unit	0 unit	0 unit	1 unit	1.0	Kab. Maluku Tengah	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Maluku Tengah	Kemendesa PDTT				
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaanya	1 kawasan	16.4	Kab. Maluku Tengah	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	0.8	Kab. Maluku Tengah	Kemendesa PDTT				
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	8.1	Kab. Maluku Tengah	Kemendesa PDTT				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	40.0	Kab. Maluku Tengah	Kementerian ESDM
Provinsi Maluku Utara									
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 7,1 - 7,6%; 2. 62,3 - 62,8	1. 6,9 - 7,4%; 2. 62,9 - 63,4	1. 6,8 - 7,3%; 2. 63,5 - 64	1. 6,7 - 7,2%; 2. 64,1 - 64,6	1. 6,6 - 7,1%; 2. 64,8 - 65,3	387.8		
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian pra panen	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	2.0	Kab. Kepulauan Sula	Kementerian Pertanian
Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Ikan yang Dibangun	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket		254.4	Kab. Kepulauan Sula	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	1.4	Kab. Kepulauan Sula	Kementerian KUKM
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	5%					1.0	Kab. Kepulauan Sula	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1 PAKET					1.2	Kab. Kepulauan Sula	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	17 ORANG	17 ORANG	16 ORANG	16 ORANG	16 ORANG	0.7	Kab. Kepulauan Sula	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal	-	-	-	-	1 Unit	2.0	Kab. Kepulauan Sula	Kementerian Desa PDTT
Penyelegaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	4.010 KPM	4.010 KPM	4.010 KPM	4.010 KPM	4.010 KPM	60.2	Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*	Kementerian Sosial
Penyelegaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	4.959 KPM	4.959 KPM	4.959 KPM	4.959 KPM	4.959 KPM	44.6	Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*	Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		0,081 m3/s				20.3	Kab. Kepulauan Sula	Kementerian PUPR
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	2 kawasan berkembang	-	-	-	1 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	66.4		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	-	2 SP	2 SP	2 SP	2 SP	48.8	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	750	0	0	0	0.2	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	1	1	1	1	14.0	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	0	0	2	2	2	2.9	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	283	0	144	0	0	0.2	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	0	0	0.3	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	283	0	144	0	0	0.0	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas Provinsi Maluku Utara	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Provinsi Maluku Utara	6 kecamatan	14.1						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Pemerintah Daerah				
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Pemerintah Daerah				
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Pemerintah Daerah				
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Pemerintah Daerah				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	6 kecamatan	0.0	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Pemerintah Daerah				
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	5	5	5	5	0.7	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	20 paket	20 paket	20 paket	-	13.2	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2 desa	0.2	Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	54.18	54.81	55.32	55.73	57.37	425.9		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	1 desa	2 desa	2 desa	5.0	DPP Morotai	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	386 desa	190 desa	257 desa	418 desa	49 desa	24.8	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelaanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	20 desa	19 desa	16 desa	5.9	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	386 desa	190 desa	257 desa	418 desa	49 desa	49.4	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	529 orang	530 orang	672 orang	665 orang	548 orang	137.4	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1.0	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	63 desa	63 desa	72 desa	72 desa	72 desa	183.8	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	0.4	Halmahera Selatan, Kepulauan Sula	Kemendesa PDTT				
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Morotai	57.99	59.00	60.00	61.00	62.00	87.3		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	125 unit	1.1	Kab. Morotai	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	32 unit	4.2	Kab. Morotai	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan	35 paket	19.6	Kab. Morotai	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun	4 unit	0.9	Kab. Morotai	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun	1 unit	13.3	Kab. Morotai	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	0 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.4	Kab. Morotai	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 unit	0unit	0 unit	0 unit	1 unit	1.0	Kab. Morotai	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	3.0	Kab. Morotai	Kementerian Pariwisata				
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1.1	Kab. Morotai	Kemendesa PDTT				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 kawasan	0.8	Kab. Morotai	Kemendesa PDTT				
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	1 unit	40.0	Kab. Morotai	Kementerian ESDM				
KP 6: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	2.82	2.89	2.95	3.02	3.09	985.6		
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnnya meningkat	14	16	18	20	23			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	6	10	15	19	23			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	1149	1284	1432	1596	1775			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik								
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	-	2	2	2	2			
	Persentase capaian SPM di daerah	62.76%	72.07%	81.38%	90.69%	100.00%			
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	6	10	15	19	23			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik								
Provinsi Maluku									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Maluku	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	306	347	391	440	494	77.0		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	-	-	1000	7.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	-	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	5	8	10	12	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	0	20	25	30	34	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	8	10	12	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	-	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	64.06%	73.04%	82.03%	91.01%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	12	12	12	12	12	1.7	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	5	8	10	12	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	5	8	10	12	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	8	10	12	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	5	8	10	12	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten						0.2	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	12	12	12	12	12	0.3	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	1	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahyanya meningkat	7	8	9	10	12			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahyanya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya					1	0.1	Pusat (lokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	7	8	9	10	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1	4	7	9	12	0.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	5	8	10	12	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	5	8	10	12			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	5	8	10	12	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmun)	3	5	8	10	12	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	5	8	10	12			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	5	8	10	12	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	3	3	3	2.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	12	12	12	12	12	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							436.8		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	59500	131408	131408	131408	131408	114.8	Maluku	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	59031	59031	59031	59031	59031	6.5	Maluku	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	7	7	7	7	32.1	Maluku	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	2311	2311	2311	2311	2311	283.4	Maluku	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							14.5		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Maluku	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	3	3	4	5	1.6	Maluku	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	3	3	5	1.9	Maluku	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	0	2	0	2	9.3	Maluku (Tepa, Tiakur, Benjina, Wonreli)	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Maluku Utara							76.7		
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Maluku Utara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	843	937	1041	1155	1281			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	-	-	1000	7.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	-	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	0	20	25	30	34	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	5	7	9	11	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	-	1	1	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	1	2	3	4	2.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	61.46%	71.09%	80.73%	90.36%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (seluruh daerah atau hanya daerah yang melaksanakan pilkada)	11	11	11	11	11	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	7	9	11	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	5	7	9	11	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Merefornasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	5	7	9	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	11	11	11	11	0.3	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	7	8	9	10	11			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	6	7	8	9	10	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1	4	6	9	11	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjaanya berkualitas	3	5	7	9	11			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	5	7	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmuum)	1	4	6	9	11	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	5	7	9	11			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	5	7	9	11	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	11	11	11	11	11	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							373.0		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	19300	112954	112954	112954	112954	32.5	Maluku Utara	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	60637	60637	60637	60637	60637	6.6	Maluku Utara	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32.1	Maluku Utara	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	2460	2460	2460	2460	2460	301.7	Maluku Utara	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							7.6		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Maluku Utara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	0	1	2.0	Maluku Utara (Kab. Pulau Taliabu)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	3	3	4	5	1.8	Maluku Utara	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	3	4	5	2.0	Maluku Utara	Kementerian ATR/BPN
PP : Pengembangan Wilayah Papua	Laju Pertumbuhan PDRB Papua	5.61	5.72	5.81	5.86	6.04	150,991.7		
	Share PDRB Wilayah Papua	1.95	1.95	1.95	1.95	1.96			
	IPM Wilayah Papua	61,19-65,04	61,89-65,58	62,57-66,12	63,25-66,69	63,94-67,24			
	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	23.28	22.48	21.49	20.36	19.02			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (ner pulau/provinsi)	>1	>1	>1	>1	>1	47,769.6		
Provinsi Papua									
ProP : Pembangunan DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Papua	>1	>1	>1	>1	>1	1,140.7		
Pembangunan Trans Pulau Biak	Panjang jalan yang dibangun (km)	12.86	18.89	18.15	17.62	16.61	1,054.4	Papua	KemenPUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	2,320.0	2,552.0	2,807.2	3,087.9	3,396.7	86.4	Papua	Kementerian Tenaga Kerja
Provinsi Papua Barat									
ProP : Percepatan operasionalisasi KEK Sorong	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	>1	>1	>1	>1	>1	44,610.0		
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong	Jumlah sarana prasarana pelabuhan penyeberangan yang dibangun (Paket)		1.0				80.0	Kota Sorong	Kementerian Perhubungan
Jalan mendukung KEK Sorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	2	55	32	22	853.0	Papua Barat	KemenPUPR
Pembangunan KA Sorong-Manokwari	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						0.0	Papua Barat	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Sorong	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong	1	1	1	1	1	32,800.0	Papua Barat	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penanganan jalan akses Pelabuhan Sorong	Panjang jalan yang dibangun (Km)						0.0	Kota Sorong	Kementerian PUPR
Pembangunan jalan Trans Papua	Panjang jalan yang dibangun (Km)	178.2	158.9	124.0	124.0	118.0	9,940.8	Kota Sorong	Kementerian PUPR
Pembangunan jembatan udara Papua	Pelayanan penerbangan perintis dan Tol Udara, serta pembangunan Bandara Nop Goliath-Dekai (pelebaran apron) (meter)	324 x 60	500 x 120	700 x 120	700 x 120	700 x 120	81.2	Kab. Yahukimo-Papua	Kementerian Perhubungan
Pembangunan jembatan udara Papua	Rekonstruksi runway m, taxiway dan apron Bandara Wamena (meter)	2.175 x 45	165.7	Kab. Jayawijaya-Papua	Kementerian Perhubungan				
Pembangunan jembatan udara Papua	Pelayanan penerbangan perintis dan Tol Udara, serta pengembangan dan operasional rutin Bandara Elelim (meter)	910 x 23	910x23	1.200x30	1.200x30	1.400x30	44.1	Kab. Yalimo-Papua	Kementerian Perhubungan
Pembangunan jembatan udara Papua	Pelayanan penerbangan perintis dan Tol Udara, serta perpanjangan runway Bandara Tanah Merah (meter)	1.080 x 30	1.200 x 30	1.400 x 30	1.400 x 30	1.600 x 30	121.8	Kab. Boven Digoel-Papua	Kementerian Perhubungan
Pembangunan jembatan udara Papua	Perluasan Bandara Mozes Kilangin-Timika, terminal baru (meter)	21,000.0	21,000.0	21,000.0	38,000.0	38,000.0	215.0	Kab. Mimika-Papua	Kementerian Perhubungan
Pembangunan jembatan udara Papua	Leveling runway Bandara Oksibil (meter)	1.350 x 30	1.350 x 30	1.700 x 30	1.700 x 30	1.800 x 30	86.1	Kab. Pegunungan Bintang-Papua	Kementerian Perhubungan
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7.0					0.8	Prov. Papua Barat	BKPM
Penyediaan air baku KEK Sorong	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.1				30.0	Kab. Sorong	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	480.0	2,848.0	5,684.8	9,060.5	13,054.4	191.5	Prov. Papua Barat	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	>1	>1	>1	>1	>1	1,625.8		
Penanganan jalan mendukung KI Teluk Bintuni	Panjang jalan yang terbangun (Km)	31	28	19	35	23	901.3	Papua	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Bintuni	Jumlah saran prasarana pelabuhan yang dikembangkan (Paket)						0.0	Kab. Teluk Bintuni	Kementerian Perhubungan
Rehabilitasi dan pengembangan Bandara Babo	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	516.6	Kab. Teluk Bintuni Papua Barat	Kemenhub
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3.0					1.4	Kab. Teluk Bintuni	BKPM
Penyediaan air baku KI Teluk Bintuni	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.1				15.0	Kab. Teluk Bintuni	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	480.0	2,848.0	5,684.8	9,060.5	13,054.4	191.5	Prov. Papua Barat	Kementerian Tenaga Kerja
ProP : Pembangunan DPP Baru Raja Ampat dan Sekitarnya	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	>1	>1	>1	>1	>1	393.1		
Pengembangan pelabuhan penyeberangan Raja Ampat	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan (Paket)		1.0				80.0	Kab. Raja Ampat	Kementerian Perhubungan
Jalan akses KSPN Raja Ampat	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	4	3	2	2	115.6	Papua Barat	KemenPUPR
Penyediaan air baku DPP Baru Raja Ampat	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		0.0				6.0	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR
Peningkatan kualitas SDM Angkatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja	480.0	2,848.0	5,684.8	9,060.5	13,054.4	191.5	Prov. Papua Barat	Kementerian Tenaga Kerja
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Total nilai produksi (Ton) setiap komoditas unggulan di Pulau Papua						69.3		
Provinsi Papua Barat									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pala							69.3		
Peningkatan produksi pala	jumlah produksi (Ton)	4,869.4	4,869.4	4,869.4	4,869.4	4,869.4	69.3	Kab. Fakfak	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	16,837.15	17,156.16	17,477.34	17,801.04	18,131.79	0.0		Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan komoditas unggulan sagu							0.0		
Peningkatan produksi sagu	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	160,695.9	162,914.9	165,149.9	167,432.2	169,748.2	0.0	Kab. Sorong, Kab. Fakfak	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Provinsi Papua									
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao							0.0		
Peningkatan produksi kakao	jumlah produksi (Ton)	10,193.2	10,377.2	10,564.7	10,755.1	10,950.9	0.0	Kab. Merauke, Kab. Biak Numfor, Kab. Sarmi	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan sagu							0.0		
Peningkatan produksi sagu	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi							0.0		
Peningkatan produksi kopi	jumlah produksi (Ton)	2,704.97	2,814.35	2,927.07	3,042.98	3,168.79	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							0.0		
Peningkatan produksi kelapa	jumlah produksi (Ton)	14,850.69	15,126.41	15,404.01	15,683.77	15,969.64	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet							0.0		
Peningkatan produksi karet	jumlah produksi (Ton)	4,607.74	4,832.53	5,066.78	5,309.88	5,580.76	0.0		Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan							0.0		
Peningkatan produksi batubara	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap							0.0		
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi (Ton)	247,661.8	251,243.9	254,852.1	258,536.5	262,275.4	0.0	Kab. Merauke, Kab. Biak Numfor	Kementerian Pertanian
ProP : Pengembangan komoditas unggulan emas							0.0		
Peningkatan produksi Emas	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan Tembaga							0.0		
Peningkatan produksi Tembaga	jumlah produksi (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0		Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Papua						37,568.7		
Provinsi Papua Barat									
ProP : Pembangunan Kota Baru Sorong							35,975.0		
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						2.0	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kementerian PUPR
Pengembangan pelabuhan utama (hub)	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong	1	1	1	1	1	0.0		
-Pelabuhan Sorong							32,800.0	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pembangunan KA Sorong-Manokwari	Panjang Jalur Kereta Api Regional (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	0	0	0	5	5	666.0	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kemenhub
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	1	1	1	1	12.5	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kemennaker

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management						0.8	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	KPBU
Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (hektar)						326.0	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)						121.5	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kementerian PUPR
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya baru yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah (unit)						245.0	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kementerian PUPR
Pembangunan dan pengembangan RTH Publik	Jumlah RTH publik yang dibangun dan dikembangkan (unit)						16.1	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Pemerintah Daerah
Perluasan SPAM	Jumlah sambungan rumah yang terlayani (SR)						489.0	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	BUMN dan/atau Swasta
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)						16.2	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)						161.5	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	DAK
Perluasan Layanan Transportasi Perkotaan Kecil dengan Trayek Tetap	Jumlah kelurahan yang terlayani (unit)						411.0	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kemenhub
Perluasan Sambungan Listrik Rumah Tangga Perkotaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani perluasan sambungan listrik						1.5	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	BUMN dan/atau Swasta
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui APBN	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN)						691.0	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kementerian ESDM
Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital (Online Marketing untuk UMKM berorientasi ekspor)	Jumlah kluster usaha yang dikembangkan						14.9	Kota Baru Sorong/Kota Sorong	Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil							266.2		
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	13	34	62	78	109	191.8	Provinsi Papua Barat	Kementerian PUPR
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Manokwari	Kemenhub
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Ha)						30.0	Manokwari	KLHK, Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (Unit)						0.2	Manokwari	KLHK, Pemerintah Daerah
Provinsi Papua							1,327.4		
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil									
Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan	Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan yang dikembangkan (BRT)						44.1	Kota Jayapura	Kemenhub
Pengembangan bandara hub primer:							0.0		
Bandara Sentani	Jumlah bandara yang dikembangkan	1	1	1	1	1	400.0	Kota Jayapura (lingkup pelayanan)	Kemenhub
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)						14.0	Kota Jayapura	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	50	131	242	303	424	748.7	Provinsi Papua	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		0.4				120.5	Kota Jayapura	Kementerian PUPR
KP 4: Peningkatan Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni						5,751.1		
Provinsi Papua									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni (Papua)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	26.40%	27.39%	28.39%	29.38%	30.37%	4,583.9		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	74.95%	81.22%	87.48%	93.74%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	37.73%	38.31%	39.49%	41.24%	43.00%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	68.67%	70.26%	73.45%	78.22%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	50	131	242	303	424	748.7		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	1895	1895	1895	1895	1895	190.5		
SPALD-T Skala Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	0	321	321	481	481	112.3	Merauke	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	808	379	379	568	568	81.1	Merauke, Jayapura	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	44097	82357	82357	123536	123536	2,265.4	Semua Kab./kota	DAK; APBD
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	639	959	1279	1598	1918	109.1	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	42	63	84	106	127	1,076.8	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Provinsi Papua Barat									
ProP : Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni (Papua Barat)	Persentase rumah tangga menghuni rumah layak huni	63.52%	69.18%	74.83%	80.49%	86.14%	1,167.2		
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	88.80%	91.60%	94.40%	97.20%	100.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	77.19%	78.39%	80.79%	84.40%	88.00%			
	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	65.03%	67.03%	71.02%	77.01%	83.00%			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	13	34	62	78	109	191.8		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	486	486	486	486	486	48.8		
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	680	1233	1233	1850	1850	205.4	Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, Tambrauw	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septic (SR)	11040	13367	13367	20051	20051	516.6	Semua Kab./kota	DAK; APBD
Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah (SR)	1,214	1,821	2,428	3,035	3,642	71.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
Pembangunan/Peningkatan SPAM	Jumlah Kapasitas Produksi unit SPAM (lpd)	5	8	10	13	16	132.9	Seluruh Kab./Kota	Kementerian PUPR
KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri				2449 desa berkembang; 30 desa mandiri		54,679.4		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	34.24%	33.40%	31.82%	31.00%	30.13%			
	Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	4 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri				3 kawasan berkembang; 2 kawasan mandiri			
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	30 kabupaten tertinggal				26 kabupaten tertinggal (4 kabupaten potensi entas)			
	Penduduk miskin di daerah tertinggal	31,1 - 31,6%	30,7 - 31,2%	30,2 - 30,7%	29,8 - 30,3%	29,4 - 29,9%			
	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	55 - 55,5	55,8 - 56,3	56,6 - 57,1	57,3 - 57,8	58,1 - 58,6			
Provinsi Papua									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Wilayah Adat Papua: Laa Pago	Peningkatan IPM di 10 Kabupaten: Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	47.5	48.4	49.4	50.4	51.4	21,960.5		
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan penugasan khusus di Papua dan Papua Barat	-	41 orang	41 orang	41 orang	41 orang	6.3	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah dokter spesialis yang ditugaskan melalui skema pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua dan Papua Barat	11 orang	1.5	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Kesehatan				
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Percentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	92.9	93.6	94.1	94.6	95	40.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	10 kabupaten	15 kabupaten	20 kabupaten	25 kabupaten	30 kabupaten	37.4	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis	6 kabupaten	8 kabupaten	14 kabupaten	21 kabupaten	25 kabupaten	59.6	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Percentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	77%	80%	85%	90%	95%	23.8	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat	65	70	75	80	85	11.3	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Percentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat	62	72	72	72	72	72.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	6.181 KPM	100.9	Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya	Kementerian Sosial				
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	223.573 KPM	1,810.9	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Kementerian Sosial				
KUBe (Kelompok Usaha Bersama)							0.0		
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan	-	70 KK	70 KK	70 KK	70 KK	3.6	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Kementerian Sosial
KPM yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah						0.0		
Cakupan Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Anak yang memiliki Akta Kelahiran	29%	47%	65%	82%	100%	0.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan layanan pendidikan melalui redistribusi Guru	Jumlah guru dalam layanan khusus	64 orang	16.0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Peningkatan Kompetensi Guru SMK	Jumlah guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi	100 orang	0.0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan sekolah terintegrasi satu atap berpola asrama	Jumlah unit sekolah baru SMP yang dibangun dan beroperasi	1 unit	15.4	Kab. Nduga, Kab. Yalimo, Kab. Jayawijaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama SMA	Jumlah unit sekolah baru SMA yang dibangun dan beroperasi	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	16.5	Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Puncak	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun/direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung industri pertanian (kopi) dan pariwisata (Danau Habema)	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi	1 unit	40.9	Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Lanny Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yalimo, Kab. Nduga	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Sekolah yang Melaksanakan Teaching Factory	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Teaching Factory	1 unit	0.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan	35700 orang	149.8	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Siswa mendapatkan pendidikan layanan khusus (Beasiswa Adem)	520 siswa	70.0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	16 paket	24.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar SD	Jumlah penerima Program Indonesia Pintar SD	52.000 orang	106.3	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar SMP	Jumlah penerima Program Indonesia Pintar SMP	5000 orang	15.0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar SMA	Jumlah penerima Program Indonesia Pintar SMA	1200 orang	5.0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar SMK	Jumlah penerima Program Indonesia Pintar SMK	1500 orang	6.4	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah penerima beasiswa ADIK	1290 orang	107.5	Tersebar	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
Pengembangan tanaman tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat	Luas perkebunan kopi dan kakao yang difasilitasi	133 Ha	2.2	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Kementerian Pertanian				
Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar Untuk Papua dan Papua Barat	Luas lahan ubi jalar yang difasilitasi	600 Ha	620 Ha	640 Ha	660 Ha	685 Ha	19.1	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	1.8	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Kementerian KUKM
Pelatihan Vocational	Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang dilatih	-	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	1.8	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	-	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	0.7	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Kementerian Perindustrian
Peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran	Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan mendapat bantuan pemasaran	-	195 PMKM	195 PMKM	195 PMKM	195 PMKM	10.0	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Jayawijaya	Pemerintah Daerah
Lembah Balem									
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik	-	200000 orang	200000 orang	300000 orang	300000 orang	2,381.6	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor	-	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	42.1	Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	30 unit	46 unit	47 unit	47 unit	47 unit	209.9	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10.6	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun	250 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	92.3	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah SPAM terbangun	-	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	392.0	Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani	-	9600 KK	9600 KK	9600 KK	9600 KK	736.0	Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Tolikara, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	-	1.129	-	-	-	282.4	Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Oksibil - Seredala	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	12 km	810.0	Papua	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jalan pada Ruas Nasional : Enarotali-Ilaga-Mulia-Wamena	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	10 km	10 km				160.0	Papua	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan pada Ruas Nasional : Wamena-Elelim-Jayapura	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	5 km	5 km				80.0	Papua	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan pada Ruas Nasional : Wamena-Habema-Mumugu	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	27 km	2,025.0	Papua	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Enarotali-Ilaga-Mulia-Wamena	Panjang jembatan yang dibangun	400 m	350 m	300 m	300 m	260 m	1,288.0	Papua	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Wamena - Elelim - Jayapura (Yetti)	Panjang jembatan yang dibangun	1800 m	1800 m	1300 m	1300 m	1219 m	2,967.6	Papua	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Wamena - Habema - Mumugu	Panjang jembatan yang dibangun	60 m	210.0	Papua	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Kenyam-Dekai	Panjang jembatan yang dibangun	500 m	700 m	500 m	500 m	620 m	1,974.0	Papua	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan pada ruas ruas Dekai-Oksibil	Panjang jembatan yang dibangun	300 m	300 m	500 m	150 m	215 m	732.5	Papua	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandar Udara Wamena	Panjang runway yang dilakukan peningkatan	1 paket	2,223.0	Kab. Jayawijaya	Kementerian Perhubungan				
Pengembangan Bandar Udara Dekai	Panjang runway yang dilakukan peningkatan	1 paket	1 paket	1 paket	283.7	173.4	1,306.6	Kab. Yahukimo	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Oksibil	Panjang runway yang dilakukan peningkatan	1 paket	1 paket	1 paket	67.7	95.3	398.9	Kab. Pegunungan Bintang,	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Elelim	Panjang runway yang dilakukan peningkatan	1 paket	1 paket	1 paket	15.9	138.4	770.7	Kab. Yalimo	Kementerian Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital				5%	5%	1.0	Kab. Tolikara	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		1 PAKET	4 PAKET	2 PAKET	9 PAKET	24.0	Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun / ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal		7,5 km	3 km	3 km	7,97 km	31.4	Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo, Kab. Tolikara, Kab. Yalimo, Kab. Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal	Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal		1 unit	3 unit	3 unit	3 unti	30.0	Kab. Puncak, Kab. Jayawijaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal	113 orang	112 orang	113 orang	113 orang	113 orang	4.5	Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo, Kab. Tolikara, Kab. Yalimo, Kab. Peg. Bintang, Kab. Nduga, Kab. Puncak, Kab. Jayawijaya	Kementerian Desa PDTT
ProP : Wilayah Adat Papua : Mee Pago	Peningkatan IPM di 6 Kabupaten: Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	58.8	59.3	59.8	60.4	60.9	5,259.2		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan penugasan khusus di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah dokter spesialis yang ditugaskan melalui skema pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat	13447 KPM	13447 KPM	13447 KPM	13447 KPM		217.9	Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiway, Kab. Mimika	Kementerian Sosial
Puksesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit		0.0	Kab. Nabire	Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Melalui Kartu Sembako Murah	98882 KPM	98882 KPM	98882 KPM	98882 KPM		801.0	Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiway, Kab. Mimika	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Cakupan Anak yang memiliki Akta Kelahiran	29%	47%	65%	82%	100%	0.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan layanan pendidikan melalui redistribusi Guru	Jumlah guru dalam layanan khusus	64 orang	16.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Penerapan sekolah satu atap terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMP yang dibangun dan beroperasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Pengembangan sekolah menengah kejuruan mendukung sektor energi, transportasi, dan pariwisata	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi	-	-	-	1 unit	1 unit	16.4	Tersebar	Pemerintah Daerah
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan	4000 orang	33.6	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM	300 siswa	40.5	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiway, Kab. Mimika	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah penerima beasiswa ADIK	648 orang	54.0	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiway, Kab. Mimika	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	-	-	-	-	4 paket	4.8	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Tanaman Tahanan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	Luas lahan kopi yang difasilitasi	-	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	8.9	Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiway	Kementerian Pertanian
Pengeolahan Sagu Papua dan papua Barat	Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.9	Kab. Mimika, Kab. Nabire	Kementerian Pertanian
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika	5					14.6	Kab. Mimika	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	-	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	0.6	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiway	Kementerian KUKM

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	-	9 IKM	9 IKM	9 IKM	9 IKM	1.3	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Panai	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Paniai	Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik	-	100000 orang	100000 orang	100000 orang	100000 orang	952.7	Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	7.7	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Mimika	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	10 unit	8 unit	7 unit	7 unit	7 unit	36.6	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	12 unit	6 unit	6 unit	6 unit	8.8	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus	25 unit	-	25 unit	-	-	10.3	Kab. Dogiyai	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	56.0	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	-	0.424	-	-	0,5 m3/s	106.0	Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani	-	9.600 KK	9.600 KK	9.600 KK	9.600 KK	736.0	Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Waghet - Timika	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	5 km	5 km				80.0	Papua	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Waghete - Timika	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	80 m	20 m	20 m	15 m	15 m	73.5	Papua	Kementerian PUPR
Pembangunan Bandara Baru Nabire	Jumlah bandara baru yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			819.8	Kab. Nabire	Kemenhub
Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin	Luas terminal baru yang terbangun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1,010.0	Kab. Mimika	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Nabire	LAYANAN KEPERLAHUPAN	1 lokasi					39.0	Kab. Nabire	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pomako	LAYANAN KEPERLAHUPAN		1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		90.0	Kab. Mimika	Kemenhub
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital			5%	5%	5%	1.0	Kab. Nabire	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		1 paket	1 paket	2 paket		6.0	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal (km)	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal (km)	4,27 km	3,5 km	2 km			12.7	Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal	42 orang	43 orang	43 orang	43 orang	43 orang	1.7	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Nabire	Kementerian Desa PDTT
ProP : Wilayah Adat Papua : Saireri	Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori	67.5	68.1	68.6	69.1	69.7	1,176.0		
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan penugasan khusus di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah dokter spesialis yang ditugaskan melalui skema pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	12707 KPM	12707 KPM	12707 KPM	12707 KPM	12707 KPM	207.5	Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	33975 KPM	33975 KPM	33975 KPM	33975 KPM	33975 KPM	275.2	Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Cakupan Anak yang memiliki Akta Kelahiran	29%	47%	65%	82%	100%	0.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan layanan pendidikan melalui redistribusi Guru	Jumlah guru dalam layanan khusus	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	16.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun dan beroperasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah Belajar	Jumlah orang Yang Memanfaatkan Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah Belajar						0.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan mendukung kamaritiman	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi	-	-	-	1 unit	-	8.2	Kab. Biak Numfor	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan	-	5000 orang	5000 orang	5000 orang	5000 orang	21.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM	168 siswa	168 siswa	168 siswa	168 siswa	168 siswa	22.7	Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah penerima beasiswa ADIK	648 orang	648 orang	648 orang	648 orang	648 orang	54.0	Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	-	-	-	-	4 paket	4.8	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak	4					12.0	Kab. Biak Numfor	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bibit Rumput Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat	Bibit rumput laut yang didistribusikan						0.0	Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Politeknik Perikanan	Jumlah Politeknik Yang Dibangun						0.0	Kab. Biak Numfor	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	-	6 IKM	6 IKM	6 IKM	6 IKM	0.9	Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori, Kab. Waropen	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori, Kab. Waropen	Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik	-	-	-	-	4.926 orang	238.2	Kab. Supiori	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	6.1	Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun	10 unit	6 unit	6 unit	6 unit	5 unit	30.6	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori	Kemenkominfo

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
“Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya”	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	5 unit	4 unit	4 unit	4 unit	6.5	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus	25 unit	-	25 unit	-	-	10.3	Kab. Biak Numfor	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	28.0	Kab. Kepulauan Yapen	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani	-	-	9.260 KK	-	-	177.5	Kab. Biak Numfor	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0.033	-	-	-	-	8.3	Kab. Supiori	Kementerian PUPR
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal	10 orang	0.4	Kab. Supiori	Kementerian Desa PDTT				
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan bencana	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal rawan bencana	1 unit	10.0	Kab. Supiori	Kementerian Desa PDTT				
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di daerah pulau kecil dan terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar	1 unit	1 unit	1 unit			6.6	Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi)	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di pulau kecil dan terluar	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan elektrifikasi di pulau kecil dan terluar	27 KK	50 KK				3.9	Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi)	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	12.0	Kab. Supiori	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan	111 KK	9.2	Kab. Supiori	Kementerian Desa PDTT				
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi	20 KK	6.3	Kab. Supiori	Kementerian Desa PDTT				
ProP : Wilayah Adat Papua : Tabi	Peningkatan IPM di 5 Kabupaten/Kota: Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	67	67.6	68.3	68.9	69.6	1,708.1		
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan penugasan khusus di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah dokter spesialis yang ditugaskan melalui skema pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Percentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Percentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Percentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	18219 KPM	18219 KPM	18219 KPM	18219 KPM	18219KPM	297.5	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui kartu sembako murah (KPM)	43439 KPM	43439KPM	43439 KPM	43439 KPM	43439 KPM	351.9	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Kementerian Sosial

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Cakupan Anak yang memiliki Akta Kelahiran	29%	47%	65%	82%	100%	0.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Dalam Negeri
Pembangunan Sekolah terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung industri pertanian dan kemaritiman	Jumlah sekolah yang bekerjasama dengan industri dan pendidikan dual system	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0.2	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung industri penerbangan	Jumlah paket bantuan peralatan pendidikan	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kabupaten Jayapura	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung industri penerbangan	Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi	-	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	0.1	Kabupaten Jayapura	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	40.9	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan	5000 orang	5000 orang	5000 orang	5000 orang	5000 orang	21.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM	132 siswa	132 siswa	132 siswa	132 siswa	132 siswa	17.8	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah penerima beasiswa ADIK						0.0	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	-	-	-	-	4 paket	4.8	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	0.0	Papua dan Papua Barat	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Cenderawasih	5 prodi	5 prodi	5 prodi	5 prodi	5 prodi	1.0	Kota Jayapura	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Pengembangan Tanaman Tahanan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	Luas lahan kakao dan kelapa yang difasilitasi	-	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	8.9	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	-	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	0.9	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	-	8 IKM	8 IKM	8 IKM	8 IKM	1.2	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura	Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Sentani	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Jayapura	Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik	-	-	12.522 orang	6.935 orang	-	476.3	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5.3	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	10 unit	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit	21.6	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	5 unit	4 unit	4 unit	4 unit	6.5	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom	Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat	-	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	84.0	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0.013	0.015	-	-	-	7.1	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani	-	-	-	6.881 KK	6.881 KK	263.8	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Kementerian PUPR
Pembangunan Pelabuhan Depapre	Layanan Kepelabuhanan		1 lokasi	1 lokasi			50.0	Kab. Jayapura	Kemenhub
Pengadaan moda transportasi darat	Jumlah moda darat	13 unit	13 unit	13 unit	10 unit	10 unit	0.0	Kab. Keerom	Pemda Provinsi Papua

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Percentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital				5%	5%	2.0	Kab. Keerom	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	-	-	1 UNIT	1 UNIT	-	4.5	Kab. Keerom, Kab. Mamberamo Raya	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal		2 KM				2.6	Kab. Mamberamo Raya	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal	19 ORANG	20 ORANG	20 ORANG	20 ORANG	19 ORANG	0.8	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan bencana	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan bencana	1 unit	10.0	Kab. Keerom	Kementerian Desa PDTT				
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM		12.0	Kab. Keerom	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan	111 KK	9.2	Kab. Keerom	Kementerian Desa PDTT				
Penyediaan elektifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektifikasi	20 KK	6.3	Kab. Keerom	Kementerian Desa PDTT				
ProP : Wilayah Adat Papua : Anim Ha	Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	60.3	61	61.6	62.2	62.9	2,002.8		
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat penugasan khusus di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah dokter spesialis yang ditugaskan melalui skema pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Percentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Percentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Percentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	6941 KPM	113.3	Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke	Kementerian Sosial				
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	52047 KPM	421.6	Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke	Kementerian Sosial				
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Cakupan Anak yang memiliki Akta Kelahiran	29%	47%	65%	82%	100%	0.0	Seluruh Kab /Kota	Kementerian Dalam Negeri
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	-	-	-	4 paket	4 paket	9.6	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA						0.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni dan Budaya	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni dan Budaya						0.0	Kab. Asmat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan layanan pendidikan melalui redistribusi Guru	Jumlah guru dalam layanan khusus	64 orang	16.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi	-	-		1 unit	1 unit	16.4	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan	9400 orang	39.4	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM	208 orrang	208 orang	208 orang	208 orang	208 orang	28.0	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK						0.0	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi	50 orang	0.0	Papua dan Papua Barat	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Musamus	4 prodi	1.0	Kab. Merauke	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
Fasilitas Budidaya Padi untuk Merauke	Luas lahan yang difasilitasi	11.000 Ha	146.0	Kab. Merauke	Kementerian Pertanian				
Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen	67 unit	8.4	Kab. Merauke	Kementerian Pertanian				
Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya	Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1.9	Kab. Mappi, Kab. Asmat	Kementerian Pertanian
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	-	6 IKM	6 IKM	6 IKM	6 IKM	0.9	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik	-	-	-	-	69242 orang	238.2	Kab. Mappi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL,/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya	Jumlah BTS terbangun	10 unit	47.6	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	Kemenkominfo				
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	23 unit	4 unit	4 unit	4 unit	9.7	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	Kemenkominfo
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	6.1	Kab. Asmat, Kab. Merauke	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	-	0.332	-	-	-	83.0	Kab. Asmat*, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Kementerian PUPR
*) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya									

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahannya	Jumlah sambungan rumah terlayani	-	9.600 KK	9.600 KK	9.600 KK	9.600 KK	736.0	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Agats	Layanan Kepelabuhanan	1 lokasi	30.0	Kab. Asmat	Kemenhub				
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital				5%	5%	2.0	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambang Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambang Prukades di Daerah Tertinggal				2 PAKET		3.0	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan di daerah tertinggal			1,91 KM	1,91 KM		6.3	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal	28 ORANG	27 ORANG	27 ORANG	27 ORANG	28 ORANG	1.1	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan bencana	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal rawan bencana	1 unit	10.0	Kab. Boven Digoel	Kementerian Desa PDTT				
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	12.0	Kab. Boven Digoel	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan	111 KK	9.2	Kab. Boven Digoel	Kementerian Desa PDTT				
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi	20 KK	6.1	Kab. Boven Digoel	Kementerian Desa PDTT				
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 6,14%; 2) 2,86%	1) 6,28%; 2) 2,93%	1) 6,41%; 2) 3,00%	1) 6,55%; 2) 3,07%	1) 6,68%; 2) 3,14%	988.5		
Pengembangan terminal barang dan penumpang PLBN Skouw	Jumlah terminal barang yang dibangun/ditingkatkan	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	23.8	Kota Jayapura	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jalan Perbatasan: Ruas Iwur -Warapko	Panjang jalan perbatasan (km) yang dibangun/ditingkatkan	-	58.04	14.43	9.62	4.81	729.1	Kota Jayapura	Kementerian PUPR
Pembangunan Anjungan Cerdas Perbatasan Skouw	Jumlah anjungan cerdas Skouw yang dibangun	1	1	1	1	1	135.0	Kota Jayapura	KPBU
Sistem Pengelolaan Drainase	Luas (hektar) yang difasilitasi sistem pengelolaan drainase	6	-	-	-	-	5.8	Kota Jayapura	Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	1	-	-	-	16.0	Kota Jayapura	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	-	1	1	-	8.0	Kota Jayapura	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	1	-	-	-	9.0	Kota Jayapura	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	-	-	10	10	10	14.1	Kota Jayapura	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian pra panen yang difasilitasi	10 Unit	1.0	Kota Jayapura	Kementerian Pertanian				
Penataan Perkampungan tradisional sebagai pendukung "Wisata Perbatasan"	Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	1	1	1	-	-	3.0	Kota Jayapura	Kementerian Pariwisata
Pembangunan Home Stay kampung Terapung Perbatasan	Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	1	1	1	1	1	4.0	Kota Jayapura	Kementerian Pariwisata
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun	-	-	2	-	-	2.0	Kota Jayapura	Kementerian Koperasi dan UKM
Pelatihan Vokasional	Jumlah peserta (orang) pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	100	-	100	-	1.0	Kota Jayapura	Kementerian Koperasi dan UKM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rehabilitasi Bendung Tami	Luas bendung tami yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	0.0	Kota Jayapura	Kementerian PUPR
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Koya	Panjang jaringan primer irigasi yang dibangun	-	-	-	-	-	0.0	Kota Jayapura	Kementerian PUPR
Pembangunan Bendung irigasi di Lereh Baru	Jumlah bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun (unit)	1	-	-	-	-	29.0	Kabupaten Jayapura	Kementerian PUPR
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Sekolah SMP yang dibangun	1	1	1	-	1	7.0	Kota Jayapura	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Fasilitasi Legislasi RDTR Jayapura Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0.8	Kota Jayapura	Kementerian ATR
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 28,85%; 2) 4,09%	1) 30,22%; 2) 4,21%	1) 31,79%; 2) 4,34%	1) 33,25%; 2) 4,46%	1) 34,72%; 2) 4,59%	1,059.9		
Pembangunan Daerah Irigasi Seluas 5.432 Ha	Luas area (Ha) Irigasi yang dibangun	5432	5432	5432	5432	5432	25.0	Kabupaten Merauke	Kementerian PUPR
Pengembangan breakwater yang dibangun/ditingkatkan di Pantai Okaba	Panjang (km) breakwater yang dibangun/ditingkatkan	0.1	-	-	-	-	14.5	Kabupaten Merauke	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Kali Bian	Panjang Jembatan (m) yang dibangun pada ruas Merauke-Okaba-Buraka-Wanam	-	500	-	-	-	450.0	Kabupaten Merauke	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Merauke	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan fungsionalitasnya	1 lokasi	200.0	Kabupaten Merauke	Kementerian Perhubungan				
Pengembangan Bandar Udara Merauke	Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (antara lain perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah, rehab gedung terminal, gedung operasional, dll)	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	-	-	300.0	Kabupaten Merauke	Kementerian Perhubungan
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	Jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1	1	1	1	1	0.0	Kabupaten Merauke	Kementerian Perindustrian
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	1	4.8	Kabupaten Merauke	Kementerian Kominfo
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah User aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	-	500	500	500	500	0.2	Kabupaten Merauke	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	-	250	250	250	250	0.2	Kabupaten Merauke	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun	1	-	1	-	-	2.0	Kabupaten Merauke	Kementerian Koperasi dan UKM
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke	4	4	4	4	5	11.0	Kabupaten Merauke	Kementerian KKP
Koperasi/UKM sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraaan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya	-	3	3	3	-	1.8	Kabupaten Merauke	Kementerian Koperasi dan UKM
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	1	-	-	-	16.0	Kabupaten Merauke	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	-	1	1	-	8.0	Kabupaten Merauke	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	-	1	-	-	-	9.0	Kabupaten Merauke	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	-	-	10	10	10	14.1	Kabupaten Merauke	Kementerian Perdagangan
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	3.4	Kabupaten Merauke	Kemendesa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten	1) 28,22%; 2) 27,57%	1) 28,78%; 2) 28,51%	1) 29,33%; 2) 29,45%	1) 29,88%; 2) 30,40%	1) 30,43%; 2) 31,34%	2,169.2		
Pengembangan Irigasi Waduk Digoel (D.I Digoel)	Luas area (Ha) Irigasi yang dibangun	1600	1600	1600	1600	1600	560.0	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian PUPR
Pembangunan Bendungan Digoel	Jumlah Bendungan Digoel (unit) yang dibangun	1	1	1	1	1	1,500.0	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian PUPR
Peningkatan dan Pembangunan Rumah Khusus Perbatasan	Jumlah rumah khusus perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	10	10	10	10	10	6.0	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian PUPR
Jaringan Air baku yang dibangun/ ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/det)	-	0.076	-	-	-	18.9	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian PUPR
Peningkatan mutu pelayanan & efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	Penambahan jaringan distribusi						0.0	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian ESDM
Pembangunan Bandara Manggelingum	Jumlah Bandara yang dibangun	-	1 lokasi	-	-	-	35.9	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandara Tanah Merah	Panjang runway yang dilakukan peningkatan	-	1 paket	-	-	-	45.1	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian Perhubungan
Fasilitasi Legislasi RDTR Tanah Merah Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0.8	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Materi Teknis RDTR PLBN Yeyetheun Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Materi Teknis dan Raperpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	1	-	-	-	-	2.1	Kabupaten Boven Digoel	Kementerian ATR/BPN
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	1 desa	0.1	Kabupaten Boven Digoel	Kemendesa PDTT				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0.3	Kabupaten Boven Digoel	Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Papua	26 kecamatan	55.9						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	26 kecamatan	0.0	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirot Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropka, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pemerintah Daerah				
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	26 kecamatan	0.0	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirot Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropka, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pemerintah Daerah				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan						0.0	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	26 kecamatan	0.0	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	26 kecamatan	0.0	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	26 kecamatan	0.0	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pemerintah Daerah				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	26 kecamatan	0.0	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pemerintah Daerah				
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	18	18	18	18	2.6	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Kementerian ESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital						0.5	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Kemendesa PDTT
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	80 paket	80 paket	80 paket	-	52.8	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ullin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Okbemtau, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Kementerian ESDM
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	35.92	36.59	37.14	37.57	39.30	1,401.3		
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	866 desa	0 desa	139 desa	524 desa	0 desa	19.5	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	20 desa	19 desa	16 desa	5.9	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Kementerian Desa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	866 desa	0 desa	139 desa	524 desa	0 desa	55.4	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2707 orang	2714 orang	3441 orang	3402 orang	2804 orang	703.3	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1.6	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Kementerian Desa PDTT				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	0 desa	0.7	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	215 desa	215 desa	226 desa	226 desa	226 desa	593.8	Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo, Sarmi, Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, Keerom, Dogiyai	Kemendesa PDTT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	4.6	Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Supiori, Yahukimo, Yalimo	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kota Jayapura dan Merauke	50.80; 32.49	51.85; 34.37	52.90; 36.25	53.95; 38.12	55.00; 40.00	90.1		
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	3.0	Kota Jayapura	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	0 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.4	Kab. Merauke	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 unit	0unit	0 unit	0 unit	1 unit	1.0	Kab. Merauke	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2.1	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1.6	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	80.0	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua	2 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	-	-	-	2 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	63.3		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	2 SP	2 SP	1 SP	1 SP	1 SP	41.5	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	1	2	1	1	17.7	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	2	2	2	2	4.0	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	746	0	0	0	0	0.1	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	746	0	0	0	0	0.0	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Papua Barat									
ProP : Wilayah Adat Papua : Domberay	Peningkatan IPM di 11 Kabupaten/Kota: Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	62.6	63.3	63.9	64.5	65.2	7,593.7		
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan penugasan khusus di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah dokter spesialis yang ditugaskan melalui skema pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Percentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Percentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	30255 KPM	493.9	Kota Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Tamrauw, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama	Kementerian Sosial				
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	81040 KPM	656.4	Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong	Kementerian Sosial				
KUBe (Kelompok Usaha Bersama)							0.0		
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan	Kepala Keluarga melaksanakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	264 KK	0.0						
KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	KPM yang memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah						0.0		
Cakupan Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Anak yang memiliki Akta Kelahiran	29%	47%	65%	82%	100%	0.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah asrama SMP dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah ruang kelas SMP dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah ruang kelas SMA dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Peningkatan layanan pendidikan melalui redistribusi Guru dan Penerapan Berpola Asrama	Jumlah guru dalam layanan khusus	64 orang	16.0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Mendukung industri kreatif, pariwisata, energi, dan pertanian (sagu, kakao)	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi	1 sekolah	40.9	Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Raja Ampat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Ruang Praktik Siswa/Keterampilan yang dibangun	Jumlah ruang praktik siswa/keterampilan yang dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Tersebar	Pemerintah Daerah
Sekolah yang Melaksanakan Teaching Factory	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Teaching Factory	-	-	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	0.0	Kab. Teluk Bintuni, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Siswa penerima program pendidikan layanan khusus (Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM))	Jumlah penerima beasiswa ADEM	504 orang	68.0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	16 paket	24.0	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar SD	Jumlah penerima Program Indonesia Pintar SD	52.000 orang	106.3	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar SMP	Jumlah penerima Program Indonesia Pintar SMP	5000 orang	15.0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar SMA	Jumlah penerima Program Indonesia Pintar SMA	1200 orang	5.0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar SMK	Jumlah penerima Program Indonesia Pintar SMK	3000 orang	12.7	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah penerima beasiswa ADIK	300 orang	24.8	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisasi Pembelajaran Lampau di Universitas Papua	4 prodi	1.0	Kabupaten Manokwari, Kota Sorong	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi	50 orang	0.0	Papua dan Papua Barat	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi	1 unit	9.5	Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kab. Sorong Selatan	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
Mahasiswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah						0.0	Papua dan Papua Barat	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Pengembangan tanaman tahunan dan penyebar di Papua dan Papua Barat	Luas lahan perkebunan kakao yang difasilitasi	-	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	4.4	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Kementerian Pertanian

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitas penerapan budidaya kacang tanah	Luas lahan kacang tanah yang difasilitasi	300 Ha	300 Ha	300 Ha	300 Ha	300 Ha	4.0	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Kementerian Pertanian
Kawasan sayuran lainnya	Luas lahan perkebunan sayur yang difasilitasi	315 Ha	350 Ha	350 Ha	350 Ha	350 Ha	31.0	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Kementerian Pertanian
Kawasan Tanaman Obat di Papua dan Papua Barat	Luas kawasan tanaman obat yang difasilitasi	310 Ha	310 Ha	310 Ha	310 Ha	310 Ha	3.0	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Kementerian Pertanian
Hijauan pakan ternak	Luas lahan hijauan pakan ternak yang difasilitasi	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	8.7	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat	Jumlah unit pengolahan sagu	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1.9	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	26 orang	26 orang	26 orang	26 orang	26 orang	2.0	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian KUKM
Pelatihan Vocational	Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang dilatih	-	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	1.8	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	-	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	0.3	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi DPP Baru Raja Ampat	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Raja Ampat	Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Anggi	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Pegunungan Arfak	Pemerintah Daerah

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		50.4	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Kementerian Perdagangan
Peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran	Jumlah wirausaha yang ditingkatkan dan mendapat bantuan pemasaran	214 PMKM	214 PMKM	214 PMKM	214 PMKM		13.8	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tamrauw, Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik	-	5.151 orang	5.960 orang	2.521 orang	21.641 orang	952.7	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor	5 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	33.9	Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tamrauw, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	20 unit	21 unit	20 unit	20 unit	20 unit	112.0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	30 unit	21 unit	21 unit	20 unit	20 unit	20.8	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tamrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun	200 unit	-	-	-	-	41.0	Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Raja Ampat, Kab. Pegunungan Arfak	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah SPAM terbangun	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	288.5	Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tamrauw, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani	-	5300 KK	-	5300 KK	-	203.2	Kab. Tamrauw, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni	Kementerian PUPR
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir terbangun	-	-	3 unit	1 unit	5 unit	140.6	Kab. Raja Ampat, Kab. Tamrauw, Kab. Sorong, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	-	0.216	-	-	-	53.9	Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab. Tamrauw	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandar Udara Rendani	Panjang runway yang ditingkatkan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	908.6	Kab. Manokwari	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Babo	Panjang runway yang ditingkatkan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	516.6	Kab. Teluk Bintuni	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Deo	Panjang runway yang ditingkatkan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	734.2	Kab. Sorong	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Waisai	Panjang runway yang ditingkatkan		1 paket				15.0	Kab. Raja Ampat	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara Baru Wasior	Jumlah bandara yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1,050.0	Kab. Teluk Wondama	Kementerian Perhubungan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Bandar Udara Baru Manokwari Selatan	Jumlah bandara yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			800.0	Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Percentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		5%	5%	5%	5%	7.0	Kab. Sorong, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Tamrauw	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan di daerah tertinggal				2 km	1,73 km	6.6	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Sorong	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1 PAKET	3 PAKET	3 PAKET	2 PAKET	1 PAKET	14.0	Kab. Sorong, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Tamrauw, Maybrat	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal	Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit	1 unit	21.0	Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Tamrauw, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Sorong Selatan	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal	111 KK	4.4	Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tamrauw	Kementerian Desa PDTT				
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan	6 unit	60.0	Kab. Sorong Selatan, Kab. Tamrauw, Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni	Kementerian Desa PDTT				
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	400 orang	480 orang	576 orang	692 orang	828 orang	14.9	Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Kementerian Desa PDTT
ProP : Wilayah Adat Papua : Bomberay	Peningkatan IPM di 2 Kabupaten: Kab. Fakfak, Kab. Kaimana	66.4	67	67.6	68.2	68.9	8,289.6		
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan penugasan khusus di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah dokter spesialis yang ditugaskan melalui skema pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Percentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Percentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Percentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat						0.0	Target dan Pendanaan sudah masuk di Wilayah Adat La Pago	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	5716 KPM	93.3	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Kementerian Sosial				
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	13501 KPM	109.4	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Kementerian Sosial				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Cakupan Anak yang memiliki Akta Kelahiran	29%	47%	65%	82%	100%	0.0	Seluruh Kab./Kota	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Pemerintah Daerah
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis pariwisata	Jumlah unit sekolah SMK yang direvitalisasi	-	-	-	-	1 sekolah	8.2	Kab. Kaimana	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM	96 orang	15.0	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	-	-	-	4 paket	4 paket	9.6	Tersebar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah penerima beasiswa ADIK	260 orang	21.7	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah di Papua dan Papua Barat	Luas lahan pala yang difasilitasi	2.180 Ha	57.7	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Kementerian Pertanian				
Bibit Rumput Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat	Jumlah bibit rumput laut yang didistribusikan	-	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	0.1	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	-	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	0.6	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi	-	3 IKM	3 IKM	3 IKM	3 IKM	0.4	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	DAK	DAK	DAK	0.0	Kab. Kaimana	Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik	-	-	-	-	14.487 orang	238.2	Kab. Kaimana	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	6.0	Kab. Kaimana	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	10 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	26.5	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	5.4	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	28.0	Kab. Kaimana	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit SPAL Domestik	-	-	-	-	6854 unit	131.4	Kab. Fak-Fak	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Konektivitas Fakfak (SP. Moyana) - Windesi	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	15,816 km	752.3	Papua Barat	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	13,6 km	446.9	Papua Barat	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	11,2 km	974.2	Papua Barat	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jalan Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat)	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	9,92 km	595.3	Papua Barat	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jalan bintuni -Susumuk	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		30 km	30 km	30 km	30 km	682.0	Papua Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan pada ruas Fakfak (SP. Moyana) - Windesi	Panjang Jembatan yang dibangun	774,2 m	1,858.0	Papua Barat	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jembatan pada ruas Sp.3 Moyana - Wanoma	Panjang Jembatan yang dibangun	113,2 m	271.7	Papua Barat	Kementerian PUPR				
Pembangunan Jembatan pada ruas Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat)	Panjang Jembatan yang dibangun		80 m	80 m			76.8	Papua Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan jembatan Inari	Panjang Jembatan yang dibangun		400 m	400 m	200 m		900.0	Papua Barat	Kementerian PUPR
Pembangunan Bandar Udara Baru Siboru	Jumlah bandara yang dibangun			1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	981.0	Kab. Fak-Fak	Kementerian Perhubungan
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Papua Barat	3 kecamatan	7.0						
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Pemerintah Daerah				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Pemerintah Daerah				
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Pemerintah Daerah				
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Pemerintah Daerah				
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Pemerintah Daerah				
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Pemerintah Daerah				
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan	3 kecamatan	0.0	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Pemerintah Daerah				
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	-	2	2	2	2	0.3	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun	-	15 paket	15 paket	-	-	6.6	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	1 desa	0.1	Kecamatan Kep Ayau, Kecamatan Sausapor, Kecamatan Ayau	Kemendesa PDTT				
Prop. Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	39.67	40.56	41.28	41.85	44.14	684.8		
Desa Wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	2 desa	1 desa	2 desa	2 desa	5.6	DPP Baru Raja Ampat	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	563 desa	0 desa	142 desa	281 desa	0 desa	12.6	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa (DAK)	Jumlah desa yang menetapkan batas desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	63 desa	15.8	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	(diusulkan untuk DAK)
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0.3	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	20 desa	20 desa	16 desa	5.9	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah desa yang melatih aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	563 desa	0 desa	142 desa	281 desa	0 desa	35.1	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	939 orang	941 orang	1193 orang	1180 orang	972 orang	243.9	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	61 desa	0.5	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1.6	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	0 desa	0.7	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tamrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	78 desa	78 desa	168 desa	168 desa	168 desa	361.8	Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak Fak, Kaimana, Maybrat	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	1.1	Sorong Selatan, Tamrauw, Kota Sorong, Manokwari, Pegunungan Arfak	Kemendesa PDTT
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Raja Ampat dan Manokwari	NA; 20.51	NA; 21.88	NA: 23.25	NA; 24.63	NA; 26.00	89.5		
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	3.0	Kab. Raja Ampat	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.0	Kab. Manokwari	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1.8	Kab. Manokwari	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2.1	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1.6	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestic dan industri	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	80.0	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Kementerian ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Weriangi Werabur dan Bomberay - Tomage	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	2 kawasan berkembang	-	-	-	1 kawasan berkembang; 1 kawasan mandiri	80.1		
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	1 SP	2 SP	3 SP	3 SP	2 SP	65.5	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	0	0	0	750	1373	0.6	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	0	1	1	1	0	9.1	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya	0	1	2	2	1	3.1	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	163	0	500	0	0	0.6	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	750	1373	1.0	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	163	0	500	0	0	0.0	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak	Kementerian ATR/BPN
KP 6: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	2.34	2.42	2.5	2.58	2.66	5,153.6		
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	21	25	29	33	44			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	6	16	25	34	44			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	872	979	1097	1227	1370			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik								
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	-	-	-	2	2			
	Persentase capaian SPM di daerah	55.56%	66.68%	77.79%	88.89%	100.00%			
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	6	16	25	34	44			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik								
Provinsi Papua									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Papua	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	352	397	447	502	562	125.7		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar skala besar	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	-	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	10	16	23	30	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	10	16	23	30	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	-	-	-	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0		
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya (1 saja per provinsi di 2021)	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	54.51%	65.89%	77.26%	88.63%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	30	30	30	30	30	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	30	30	30	30	30	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	Daerah yang melakukan Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	1	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	10	16	23	30	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	10	16	23	30	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	10	16	23	30	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	10	16	23	30	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	16	23	30	30	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	30	30	30	30	30	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	-	-	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerhnya meningkat	13	16	19	22	30			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerhnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerhnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	12	15	18	21	29	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1	8	16	23	30	1.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBUs	3	10	16	23	30	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	10	16	23	30			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	10	16	23	30	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmum)	2	9	16	23	30	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	10	16	23	30			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	10	16	23	30	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8		
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4		
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	8	10	12	14	16	15.0		
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	200	210	220	230	240	20.0		
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	2 Perdasi							
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus/Istimewa	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus/Istimewa	1	1	1	1	1	7.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/Istimewa	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/Istimewa	1	1	-	-	-	2.1	Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Regulasi daerah otonom khusus/ istimewa	Jumlah regulasi pelaksanaan kekhususan/keistimewaan daerah	1 UU					4.0		
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							3,165.1		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	19,000	1,211,375	1,211,375	1,211,375	1,211,375	1,577.3	Papua	Kementerian ATR/BPN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	7,700	1,369,100	1,369,100	1,369,100	1,369,100	115.6	Papua	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32.1	Papua	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	11744	11744	11744	11744	11744	1,440.1	Papua	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							28.1		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1.7	Papua	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	2	3	1	1	14.0	Papua (Kab. Dogiyai, Intanjaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Mappi, Nduga, Asmat)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	1	3	5	5	5	1.9	Papua	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	1	3	5	5	5	2.0	Papua	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	1	0	0	2	0	6.7	Yetekun, Hamadi, Merauke (Papua)	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1.7	Papua	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Papua Barat									
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Papua Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	520	582	650	725	808	93.6		
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	1	1	1	1	0.6	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan/ Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang;	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian ATR/BPN
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar skala besar	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	-	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	6	6	6	6	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	3	7	13	19	24	1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	11	11	32	32	32	0.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	-	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	-	-	-	1	1			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	1	1	2	2	0.9	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	10	10	10	7.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	10	22	34	46	58	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	1	-	-	-	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	100%	100%	100%	100%	1.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	100%	100%	100%	100%	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	56.61%	67.46%	78.31%	89.15%	100%			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	14	14	14	14	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	14	14	14	14	14	1.7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	Daerah yang melakukan Monev terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM	1	1	1	1	1	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	6	9	11	14	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	3	6	9	11	14	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	32	32	32	32	0.5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	9	11	14	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	12%	18%	24%	30%	36%			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	14	14	14	14	14	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	1	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	0.2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	8	9	10	11	14			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	7	8	9	10	13	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1	4	8	11	14	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	3	6	9	11	14			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Ilmun)	-	4	7	11	14	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	1	1	1	1	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(7) jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	3	6	9	11	14			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	3	6	9	11	14	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	1	1	1	1	0.3	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.								
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0.8	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	50.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	2	2	2	1.4	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	-	-	-	-	-	0.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	6	7	7	7	0.1	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	4	4	4	4	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	8	8	8	8	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	2	2	2	2	0.2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
	(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	2 Perdasi							

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	1	1	1	1	1	8.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	1	1	-	-	-	2.1	Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Revisi UU 21 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua	Terfasilitasi dan tersusunnya perubahan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	1					1.0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan Pelayanan Pertanahan							1,730.4		
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	13500	92685	92685	92685	92685	1,099.2	Papua Barat	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	77198	77198	77198	77198	77198	8.4	Papua Barat	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32.1	Papua Barat	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	4817	4817	4817	4817	4817	590.7	Papua Barat	Kementerian ATR/BPN
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang							10.7		
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0.9	Papua Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	1	1	1	0	6.0	Papua Barat (Kab. Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak)	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	3	5	5	5	1.9	Papua Barat	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	1	3	5	5	5	2.0	Papua Barat	Kementerian ATR/BPN
JUMLAH							2,970,154.6		

MATRIKS PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional 3: Pembangunan Manusia

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2020 - 2024



MATRIK PEMBANGUNAN RANCANGAN RPJMN 2020-2024

PRIORITAS NASIONAL : MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78.7				98	4,393.5		
	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65.2				80			
KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan							625.0		
ProP : Perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan							500.0		
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Percentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	90	95	97	98	100	125.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (16.9.1*)	N/A	N/A	N/A	N/A	100	0.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	Percentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	20	40	60	80	100	125.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	Percentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	20	40	60	80	100	125.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	Percentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	70	100	100	100	100	125.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat terhadap administrasi kependudukan							0.0		
ProP : Percepatan kepemilikan dokumen pendataran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus							125.0		
Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	112	112	112	112	112	125.0	23 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan							381.9		
ProP : Penguatan integrasi data administrasi kependudukan							250.0		
Penguatan integrasi data administrasi kependudukan melalui konesitas warehouse berbasis NIK Nasional	Jumlah K/L yang mengintegrasikan data melalui konesitas warehouse berbasis NIK Nasional	6	10	16	20	22	125.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan integrasi data administrasi kependudukan melalui konesitas NIK dalam pelaksanaan pendataan sensus, survei, dan kegiatan pencacahan lainnya	Jumlah K/L yang mengintegrasikan data melalui konesitas NIK dalam Pelaksanaan Sensus 2020	3	5	10	15	20	125.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020 (17.19.2 (a))	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020 (17.19.2 (a))						0.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Penguatan infrastruktur administrasi kependudukan							0.0		
ProP : Pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu							131.9		
Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk terhadap jumlah Kampung KB	50	60	68	75	80	6.9		BKKBN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	3	5	10	15	20	125.0	34 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri
KP : Pendampingan dan Layanan Terpadu	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	25	50	60	70	80	2,906.2		
	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15	30	50	60	70			
	Persentase Provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	15.69	30	40	50	60.95			
ProP : Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu							1,519.5		
Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir	Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir	107,200,000	109,600,000	110,700,000	111,800,000	112,900,000	419.6	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Tersedianya Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	6	6	6	6	6	631.7	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Pengembangan Sistem layanan dan rujukan terpadu	Daerah yang menyelenggarakan Sistem layanan dan rujukan terpadu (Kabupaten/Kota)	220	300	380	460	514	401.7	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan Pusat Kesejahteraan Sosial	600	760	920	1,028	900	66.5	34 Provinsi	Kementerian Sosial
ProP : Penguatan pendampingan masyarakat							1,386.7		
Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial	SDM kesejahteraan sosial yang memperoleh sertifikasi	27,695	32,000	35,000	38,000	40,000	170.9	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping Program Bantuan Tunai Bersvarat	SDM pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	559.7	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Akkreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan akreditasi (Lembaga)	5,000	12,000	18,000	20,000	23,000	310.9	34 Provinsi	Kementerian Sosial
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza	189	195	200	210	220	0.0		
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	200	214	221	228	195	0.0		
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Oranca	55	55	55	55	55	0.0		
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV	100	100	100	100	100	0.0		
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Anak	300	300	300	300	300	0.0		
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	50	100	100	150	150	0.0		
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0		
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	240	288	346	415	498	0.0		
	Pendamping Rehabilitasi Sosial dan Korban Perdagangan Orang	50	100	100	100	100	0.0		
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV	44	44	44	44	44	0.0		
	Pendamping Rehabilitasi Sosial anak	120	140	150	170	109	0.0		
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	110	250	350	450	520	0.0		
Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang memperoleh peningkatan kapasitas	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	56.4	34 Provinsi	Kementerian Sosial

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan	7,201	7,201	7,201	7,201	7,201	288.8	34 Provinsi	Kementerian Sosial
KP : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk							480.4		
ProP : Sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk							0.0		
ProP : Administrasi mobilitas penduduk							0.0		
ProP : Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang							20.8		
Tersusunnya GDPK yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah	Percentase pemerintah daerah yang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Percentase pemerintah daerah yang memanfaatkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah	30% Provinsi dan 21 % Kab/Kota	45% Provinsi dan 27 % Kab/Kota	60% Provinsi dan 33 % Kab/Kota	75% Provinsi dan 38 % Kab/Kota	100% Provinsi dan 45 % Kab/Kota	20.8		BKKBN
ProP : Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	Percentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	90	90	95	95	100	138.5		
Meningkatnya Kab/Kota yang memiliki kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan	Percentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	30% Provinsi dan 21 % Kab/Kota	45% Provinsi dan 27 % Kab/Kota	60% Provinsi dan 33 % Kab/Kota	75% Provinsi dan 38 % Kab/Kota	100% Provinsi dan 45 % Kab/Kota	28.5		BKKBN
Meningkatnya efektivitas kelompok kerja KKBPK Provinsi dan Kabupaten/Kota	Percentase kelompok kerja KKBPK Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	10% Provinsi dan 10 % Kab/Kota	20% Provinsi dan 20 % Kab/Kota	30% Provinsi dan 30 % Kab/Kota	40% Provinsi dan 40 % Kab/Kota	50% Provinsi dan 50 % Kab/Kota	20.8		BKKBN
Tersedianya sistem peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Percentase pemerintah daerah yang menyediakan sistem peringatan dini pendendalian penduduk	30% Provinsi dan 10% kab/kota	45% Provinsi dan 20% kab/kota	60% Provinsi dan 30% kab/kota	75% Provinsi dan 40% kab/kota	100% Provinsi dan 50% kab/kota	89.2		BKKBN
ProP : Pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Percentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan (termasuk hasil Pendataan Keluarga) - (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	20	25	30	35	40	321.1		
Data dan Informasi KKBPK yang dimanfaatkan	Indeks kepuasan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK	55.04	56.03	57.02	58.01	59.01	321.1		BKKBN
PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78.7				98	870,526.5		
KP : Sistem jaminan sosial nasional	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65.2				80			
ProP : Penguatan peraturan perundang-undangan jaminan sosial							170,125.0		
ProP : Pengembangan program jaminan sosial							0.0		
Peningkatan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	107	110	111	112	113	170,000.0	34 Provinsi	Kemkes
ProP : Penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional							170,000.0		
Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan	Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan	10	7	5	3	3	125.0	181 Kab/Kota; 11 Provinsi	Kemenko PMK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Penguatan sistem monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional							0.0		
KP : Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	695,036.8		
	Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000			
	Penyaluran Bantuan LPG 3 Kg	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000			
	Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000			
ProP : Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran							695,036.8		
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	154,422.2	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Kartu Sembako Murah	5,513,785	5,513,785	5,513,785	5,513,785	5,513,785	49,853.7	11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Kartu Sembako Murah	5,238,377	5,238,377	5,238,377	5,238,377	5,238,377	47,336.4	12 Provinsi; 151 Kab/Kota	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Kartu Sembako Murah	4,847,877	4,847,877	4,847,877	4,847,877	4,847,877	43,861.7	11 Provinsi; 182 Kab/Kota	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan subsidi listrik yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan	Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (RT)	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	127,986.0	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	-
Penyelenggaraan subsidi energi Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan	Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Energi Elpiji 3 kg (RT)	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	271,576.7	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	
Terwujudnya kemudahan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	Realisasi capaian penambangan pembangkit tenaga listrik	4,920					0.0		
KP : Perlindungan sosial adaptif	Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif						1,796.7		
ProP : Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif							1,796.7		
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana	Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa)	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	503.9	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam	Warga masyarakat di lokasi rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa)	226,324	226,324	226,324	226,324	226,324	838.0	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Perlindungan sosial bagi korban bencana sosial	Korban Bencana Sosial Yang Mendapat Pelayanan Kebutuhan Dasar	120,000	121,000	121,000	121,000	121,000	153.7	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Perlindungan sosial bagi korban bencana sosial	Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	43,018	43,018	44,000	44,000	44,000	301.0	34 Provinsi	Kementerian Sosial
ProP : Penguatan kelembagaan perlindungan sosial adaptif							0.0		
ProP : Pengembangan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi resiko perubahan iklim dan bencana alam							0.0		
KP : Kesejahteraan Sosial	Kawasan ramah lansia (kabupaten/kota/komunitas)						3,568.0		
	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)	18.9	20	22	24	25			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)	37.5	42	45	48	50			
	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kab/kota inklusif (%)	2.7	4.5	5.5	6.5	7.5			
ProP : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif							1,991.5		
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual	Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)	45000	45000	46000	46000	46000	982.1	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Penyediaan literasi khusus bagi penyandang disabilitas	Literasi khusus bagi penyandang disabilitas	47000	50000	52000	53000	55000	0.0		
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi lanjut usia	Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)	30200	31000	32000	33000	35000	644.0	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi anak	Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)	27000	27000	27500	27500	27500	365.4	34 Provinsi	Kementerian Sosial
ProP : Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)							0.0		
ProP : Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long-term Care)							0.0		
ProP : Penguatan pelayanan sosial kelompok rentan lainnya							1,576.6		
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza	Korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial (jiwa)	21714	25000	27000	28000	30000	1,192.6	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Pemberdayaan bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (Keluarga)	2667	3000	3500	4000	4500	384.0	Pusat	Kementerian Sosial
PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230.0	217.0	205.0	194.0	183.0	336,539.7		
	Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20.6	19.5	18.6	17.6	16.0			
	Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12.9	12.2	11.6	11.0	10.0			
	Prevalensi penggunaan kontrasepsi cara modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (persen)	61.8	62.2	62.5	62.9	63.4			
	Unmet needed KB (persen)	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4			
	ASFR WUS kelompok usia 15 – 19 Tahun (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25.0	24.0	21.0	20.0	18.0			
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	27.1	24.7	22.6	20.7	19.0			
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8.1	7.8	7.5	7.3	7.0			
	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18			
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272.0	252.0	231.0	211.0	190.0			
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325.0	345.0	365.0	385.0	405.0			
	Insidensi hepatitis B (persen)	1.68	1.54	1.39	1.24	1.09			
	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9.1	9.0	8.9	8.8	8.7			
	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8			

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase tekanan darah tinggi	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1			
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65.0	70.0	80.0	90.0	100.0			
	Persentase rumah sakit terakreditasi	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0			
	Unmet need pelayanan kesehatan (persen)	4.2	3.8	3.5	3.2	3.0			
KP : Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)	45	40	35	30	20	25,029.6		
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (persen)	64	68	71	75	90			
	Kesertaan KB MKJP (persen)	25.11	25.93	26.75	27.57	28.39			
ProP : Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	87	89	91	93	95	22,942.6		
	Cakupan kunjungan antenatal K4 (persen)	80	85	90	92	95			
	Cakupan kunjungan neonatal (persen)	86	88	90	92	95			
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	401	431	452	471	488			
Penguatan sistem integrasi pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan sistem pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian dalam mendukung pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H)	5	3	3	3	3	25.1	17 Provinsi	Kemkes
Pencatatan kematian ibu di fasyankes	Persentase fasyankes yang melakukan pencatatan dan pelaporan kematian ibu	40	50	60	70	80	23.9	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota	Kemkes
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92.9	93.6	94.1	94.6	95.0	308.0	32 Provinsi	Kemkes
Penyediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	Persentase kab/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap sesuai standar	91	92	93	94	95	6,596.2	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
Penyediaan obat dan perlengkapan kesehatan program kesehatan ibu dan anak	Jumlah kab/kota dengan ketersediaan obat kesehatan ibu dan anak	100	100	100	100	100	69.6	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal	960	960	960	960	960	159.0	34 Provinsi	Kemkes
Pelatihan tenaga kesehatan Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit yang dilatih	100	100	100	100	100	10.3	34 Provinsi	Kemkes
Pelaksanaan pelayanan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit	Jumlah RS dengan kemampuan melaksanakan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit	66	132	198	264	331	33.5	34 Provinsi	Kemkes
Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	29	32	35	38	40	101.2	34 Provinsi	BKKBN
Peningkatan sarana cold chain imunisasi	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dukungan peningkatan sarana cold chain imunisasi	684	1,230	-	-	-	339.2	684 Puskesmas	DAK/Pemda
Peningkatan sarana prasarana RS mampu PONEK	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan sarana prasarana RS mampu PONEK	514	514	514	514	514	1,430.2	514 Kab/Kota	DAK/Pemda
Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan	514	514	514	514	514	8,537.2	514 Kab/Kota	DAK/Pemda
Jaminan Persalinan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan jaminan persalinan	514	514	514	514	514	5,309.1	514 Kab/Kota	DAK/Pemda
ProP : Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop out/DO)	25.79	24.50	23.10	21.59	20.00	2,087.1		
	Kesertaan KB MKJP (persen)	25.11	25.93	26.75	27.57	28.39			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelayanan kesehatan usia reproduksi	Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	120	180	240	300	360	133.1	70 kab/kota	Kemkes
Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB	Presentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	38	46	54	62	70	1,477.7	34 provinsi	BKKBN
Peningkatan kualitas pelayanan KB	Indeks kualitas pelayanan KB (termasuk metode information index/MII)	78	80	82	84	86	10.5	34 provinsi	BKKBN
Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Presentase kesertaan KB di 100 Kab/Kota dengan kesertaan KB rendah	38	38	39	39	40	12.3	34 provinsi	BKKBN
Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi	indeks pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi remaja	59	61	63	64	65	236.2	34 provinsi	BKKBN
peningkatan kinerja penyuluh KB dalam capaian program KKBPK	Presentase penyuluh KB yang berkinerja baik	58	67	72	82	92	17.4	34 provinsi	BKKBN
Peningkatan komitmen dan peran serta mitra kerja dan pemangku kebijakan di seluruh tingkatan wilayah dalam peneladhanan program KKBPK	Presentase stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan proaram KKBPK	50	55	60	65	70	9.4	34 provinsi	BKKBN
Peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam proaram KKBPK	Indeks masyarakat yang terpapar isi pesan proaram KKBPK	70	71	73	74	75	190.5	34 provinsi	BKKBN
KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	40	45	50	55	60	169,498.1		
	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	16.0	14.5	13.0	11.5	10.0			
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	8.08	7.8	7.52	7.26	7.0			
ProP : Penurunan Stunting	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	51	70	90	100	100	169,498.1		
Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil	Persentase ibu hamil kurang energi kronis	16.0	14.5	13.0	11.5	10.0	1,213.9	514 kabupaten/Kota	Kemkes
Peningkatan asupan gizi pada balita kurus	Persentase balita yang naik berat badannya (N/S)	55	60	65	70	75	1,280.5	514 kabupaten/Kota	Kemkes
Penyediaan obat gizi	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat gizi	100	100	100	100	100	524.4	34 Provinsi	Kemkes
Suplementasi gizi mikro pada balita	Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro	90,000	140,000	190,000	240,000	290,000	227.8	514 kabupaten/Kota	Kemkes
Pelaksanaan surveilans gizi berkualitas di Kabupaten/kota	Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans dan intervensi gizi berkualitas	51	70	90	100	100	486.8	514 kabupaten/Kota	Kemkes
Pengawasan produk pangan fortifikasi	Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	88	89	90	90	13.6	34 Provinsi	BPOM
Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK (juta keluarga)	2,831,614	2,831,614	2,831,614	2,831,614	2,831,614	152.9	34 Provinsi	BKKBN
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	29,327	29,327	29,327	29,327	29,327	295.5	33 Provinsi	BKKBN
Keluarga Mengikuti Peningkatan Pengetahuan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	35,000	51,000	65,000	75,000	51,000	280.5	34 Provinsi	Kemdikbud
Provinsi yang Mendapatkan Sosialisasi tentang Konten Kesehatan dan Kesejahteraan Anak sebagai Upaya Penurunan Stunting	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang konten kesehatan dan kesejahteraan anak sebagai upaya penurunan stunting	4.0	7.0	7.0	8.0	8.0	3.9	34 Provinsi	Kemen PPPA
Diseminasi Informasi Publik Tentang Stunting	Jumlah orang yang terpapar informasi tentang stunting	27,000,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	7,830,000	63.8	34 Provinsi	Kemkominfo
Promosi hasil Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan (Gemarikan)	Jumlah lokasi promosi hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	149.9	34 Provinsi	KKP
Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala kota	Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat Skala Kota	77,772	133,055	133,055	199,583	199,583	39,600.0	38 kab/kota	KemenPUPR, DAK, APBD
Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala permukiman	Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat Skala Permukiman	145,228	417,560	417,560	626,341	626,341	49,490.0	184 kab/kota	KemenPUPR, DAK, Pemda
Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) setempat skala kota	Jumlah IPLT Terbangun (unit)	24	69	92	139	138	5,397.9	149 Kab/Kota	KemenPUPR
Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) setempat skala individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik sesuai standar (rumah tangga)	1,697,767.2	2,355,824.8	2,355,824.8	3,533,737.2	3,533,737.2	64,878.0	514 Kab/Kota	KemenPUPR, DAK, Pemda, Masyarakat

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)	66	66	66	66	66	412.5	34 provinsi	KemenPUPR, Pemda
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)	66	66	66	66	66	247.5	34 provinsi	KemenPUPR, Pemda
Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penurunan stunting	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penurunan stunting	4	4	5	5	5	4.4	34 Provinsi	KPPPA
Penguatan intervensi stunting melalui Therapeutic Feeding Center, penyediaan obat, makanan tambahan dan alat antropometri	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan dukungan penguatan intervensi stunting	260	360	460	514	514	4,774.4	514 kabupaten/Kota	DAK/Pemda
KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit	Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	40	45	50	55	60	11,292.9		
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	90	90	90	90	90			
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B pada populasi berisiko	85	90	95	100	100			
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	416	436	458	482	514			
	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	80	93	106	150	190			
	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28			
	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	52	129	232	360	514			
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	324	374	424	474	514			
	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	77	80	85	90	95	9,721.4		
ProP : Pengendalian Penyakit Menular	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	80	85	90	90	90			
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	466	475	484	495	500			
	Persentase Kab/Kota yg melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko	85	90	95	100	100			
	Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	87	88	89	90	>90			
	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	136	190	207	220	236			
	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28			
Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems)	60	65	70	75	80	101.8	34 Provinsi	Kemkes
Peningkatan kekarantinaan kesehatan	Persentase kab/kota yang memiliki pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang mempunyai kapasitas sesuai standar dalam Pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masarakat	20	40	60	80	100	586.9	34 Provinsi	Kemkes

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Intensifikasi upaya eliminasi malaria	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	141	130	119	110	95	134.7	34 Provinsi	Kemkes
Intervensi eliminasi schistosomiasis	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28	22.0	28 Desa di 2 kabupaten (Poso dan Sigi)	Kemkes
Intervensi eliminasi filariasis	Jumlah kabupaten/kota dengan intervensi eliminasi filariasis	106	150	191	207	212	651.5	32 Provinsi	Kemkes
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	77	80	85	90	95	519.3	34 Provinsi	Kemkes
Penemuan dan pengobatan TBC	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage)	80	85	90	90	90	743.7	34 Provinsi	Kemkes
Pencegahan dan Pengendalian ISPA	Persentase kab/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana penumonia standar	50	52	55	57	60	35.6	34 Provinsi	Kemkes
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	90	90	90	90	90	148.2	472 kabupaten/kota	Kemkes
Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis	Persentase Kab/Kota yg melaksanakan deteksi dini Hepatitis B pada populasi berisiko	85	90	95	100	100	503.5	514 kabupaten/kota	Kemkes
Pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk negara	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	86	89	93	97	100	681.8	49 KKP	Kemkes
Kewaspadaan dini kejadian penyakit	Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	80	85	90	95	100	581.6	10 BTKLPP	Kemkes
Pengendalian anti microbial resistance	Persentase RS kelas A dan B Pendidikan yang melakukan surveilan AMR sesuai standar	20	40	60	80	100	10.9	Pusat	Kemkes
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB	Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis	100	100	100	100	100	1,788.1	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS	Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat program HIV/AIDS	100	100	100	100	100	2,802.5	34 Provinsi	Kemkes
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian Malaria	Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan	100	100	100	100	100	98.6	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
Penyediaan bahan habis pakai dan sarana intervensi pengendalian penyakit menular langsung	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan dukungan bahan habis pakai penyakit menular	350	243	-	-	-	310.7	34 Provinsi	DAK/Pemda
ProP : Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas	103	205	308	411	514	1,571.4		
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	324	374	424	474	514			
Deteksi dini faktor risiko PTM	Jumlah Kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%	52	129	232	360	514	462.5	52 kab/kota	Kemkes
Pelaksanaan pengendalian PTM terpadu di Puskesmas	Jumlah Kab/Kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas	103	205	308	411	514	173.3	103 kab/kota	Kemkes
Pelayanan berhenti merokok (konseling dan terapi)	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	50	75	100	125	150	107.7	50 kab/kota	Kemkes
Advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah kab/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	277	297	317	337	357	5.9	277 kab/kota	Kemkes
Deteksi dini gangguan indera	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi	155	206	308	360	514	51.4	155 kab/kota	Kemkes
Deteksi dini kanker	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80% populasi usia 30-59 tahun	283	309	360	411	514	98.0	283 kab/kota	Kemkes
Pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	45	60	75	90	100	39.4	34 Provinsi	Kemkes

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengawasan label dan iklan produk tembakau sesuai ketentuan	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60,000.0	60,200.0	60,400.0	60,600.0	60,800.0	10.2	34 Provinsi	BPOM
Penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular	Jumlah kab/kota yang mendapatkan dukungan alat deteksi dini penyakit tidak menular	274	120	120	-	-	623.1	35 Provinsi	DAK/Pemda
KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Jumlah kabupaten/kota sehat	110	220	280	380	420	102,904.8		
ProP : Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarang (SBS)	40	55	70	85	100	101,682.2		
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	110	220	280	380	420			
Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	110	220	280	380	420	76.0	34 Provinsi	Kemkes
Pengawasan kualitas air minum	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarang (SBS)	40	55	70	85	100	337.9	34 Provinsi	Kemkes
Pembangunan SPAM	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	60	64	68	72	76	291.2	34 Provinsi	Kemkes
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP	Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd)	3225	3225	3225	3225	3225	8,272.3	34 Provinsi	KemenPUPR
Perluasan SPAM	Jumlah SR	44258	44258	44258	44258	44258	4,425.8	34 Provinsi	DAK/Pemda
Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	25985	25985	25985	25985	25985	5,980.0	34 Provinsi	KemenPUPR
Peningkatan Kapasitas SPAM	Jumlah SR	221290	221290	221290	221290	221290	2,212.9	34 Provinsi	DAK/Pemda
Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM	Kapasitas SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd)	940	940	940	940	940	1,050.0	34 Provinsi	KemenPUPR
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BIP Terlindungi Individual/Komunal	Jumlah SR	36522	36522	36522	36522	36522	858.5	34 Provinsi	DAK/Pemda
Pembangunan rumah susun	Kumulatif jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BIP terlindungi individual/komunal	16948228	18572179	20354341	22310323	24457290	0.0	34 Provinsi	DAK/Pemda
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas (rumah tangga)	156000	156000	156000	156000	156000	15,677.0	34 Provinsi	KemenPUPR
Pengawasan pasar sehat	Jumlah pasar sehat yang memenuhi syarat kesehatan	2500	3000	3500	4000	4500	43.7	34 Provinsi	Kemkes
Penerapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PIAS) aman	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PIAS) aman	660	1,330	2,010	2,700	3,400	116.8	34 Provinsi	BPOM
Penerapan desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	211.0	427.0	648.0	874.0	1,105.0	172.2	34 Provinsi	BPOM
Intervensi pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	84.0	165.0	255.0	350.0	450.0	58.1	34 Provinsi	BPOM
Penyediaan alat penyehatan lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan dukungan alat penyehatan lingkungan	493	-	-	-	-	229.7	35 Provinsi	DAK/Pemda
ProP : Penguatan Promosi Germas	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	30	35	40	45	50	1,222.7		
	Persentase posyandu aktif	51	70	75	80	85			
Pembinaan Kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Germas	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	30	35	40	45	50	254.5	34 Provinsi	Kemkes
Pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja	308	334	360	385	411	166.9	Pusat dan 34 provinsi	Kemkes
Penyusunan pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	3	6	9	12	15	7.7	Pusat	Kemkes
Pembinaan posyandu aktif	Persentase Kab/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	51	70	90	100	100	182.7	34 Provinsi	Kemkes

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Promosi Makanan dan Minuman Sehat Nusantara	Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat Nusantara	300	400	500	600	700	62.5	34 Provinsi	Kemendag
Tersampaikannya kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasarakatan	Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasarakatan	11274	11274	11274	11274	11274	55.3	Pusat	Kemenpora
Tersampaikannya kampanye Olahraga di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Nonformal dan Informal	Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	17000	17000	17000	17000	17000	55.3	Pusat	Kemenpora
Tersampaikannya kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata	Jumlah peserta kampanye olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata	14020	14020	14020	14020	14020	302.5	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi	3	3	3	3	3	13.8	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya bantuan untuk Sarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi	59	58	58	58	58	121.5	Pusat	Kemenpora
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase puskesmas tanpa dokter	12	9	6	3	0	27,814.2		
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83			
	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	70	75	80	85	90			
	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	4478	4009	4720	6110	5706			
	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1028	751	1050	1169	891			
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85	90	92	94	96			
	Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	25	35	45	55	65			
	Persentase obat memenuhi syarat	82.8	85.1	87.5	89.9	92.3			
	Persentase makanan memenuhi syarat	74	78	83	87	90			
ProP : Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	4478	4009	4720	6110	5706	17,660.9		
	Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	80	85	90	95	100			
Pembinaan FKTP yang memiliki sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	48	58	70	85	100	15.2	34 Provinsi	Kemkes
Pembinaan rumah sakit yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	80	85	90	95	100	25.9	34 Provinsi	Kemkes
Pengembangan fasilitas rujukan di Kawasan Indonesia Timur	Jumlah rumah sakit UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan	2	1	2	1	1	1,236.9	3 Lokasi	Kemkes
Penyediaan sarpras RS Rujukan UPT Vertikal Pusat	Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	9	8	7	6	6	2,476.7	RS Kanker Dharmais; RS Hasan Sadikin; RS Sanglah	KPBU Kemkes
Penyusunan rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1	1	-	-	-	2.5	34 Provinsi	Kemkes

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembinaan RSUD di DTTPK (Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan)	Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina	7	14	21	28	35	24.1	34 Provinsi	Kemkes
Pembinaan puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan yang ditingkatkan SPA sesuai standar	Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar	250	200	200	200	200	16.3	34 Provinsi	Kemkes
Pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	18	51	84	117	150	324.9	34 Provinsi	Kemkes
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga	105	200	300.0	400.0	514.0	129.6	514 kabupaten/kota	Kemkes
Pelayanan rujukan non spesialistik di FKTP	Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik < 2%	40.0	50.0	60.0	80.0	100.0	37.9	34 Provinsi	Kemkes
UTD yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan Transfusi Darah	42	126	210	252	294	10.2	34 Provinsi	Kemkes
Penerapan telemedicine	Jumlah fasianke yang diajukan dalam melaksanakan telemedicine	67	134	201	268	335	60.2	34 Provinsi	Kemkes
Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	Persentase rumah sakit rujukan yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	20	40	60	80	100	57.2	34 Provinsi	Kemkes
Penerapan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) berbasis kompetensi fasianke	10	18	25	30	34	23.1	34 Provinsi	Kemkes
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu FKTP untuk diakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	4,478	4,009	4,720	6,110	5,706	59.1	34 Provinsi	Kemkes
Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kab/kota yang minimal 50% Puskesmasnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan santon lansia	45	50	55	60	65	113.1	34 Provinsi	Kemkes
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu rumah sakit untuk diakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang siap di akreditasi	1028	851	1195	1169	991	66.2	34 Provinsi	Kemkes
Peningkatan Sarana Prasarana RS Rujukan Regional/Provinsi/Nasional	Jumlah RS Rujukan yang mendapatkan dukungan anggaran peningkatan SPA	58	50	-	-	-	4,978.4	57 Kab/Kota	DAK/Pemda
Pembangunan RS Pratama	Jumlah RS Pratama yang dibangun	15	10	10	10	10	2,466.2	15 Kab/Kota	DAK/Pemda
Penyediaan sarpras Puskesmas DTPK	Jumlah Puskesmas DTPK yang mendapatkan dukungan peningkatan sarana prasarana	300	150	100	50	-	5,537.0	300 Puskesmas	DAK/Pemda
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas tanpa dokter	12	9	6	3	0	2,050.2		
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83			
	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	70	75	80	85	90			
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim	1356	1493	1200	1200	1200	239.9	100 puskesmas	Kemkes
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu	4177	5487	4000	4000	4000	270.0	500 puskesmas	Kemkes
Pendayagunaan dokter spesialis	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan	660	660	660	660	660	82.2	431 RS	Kemkes
Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	2020	1885	1785	1650	1540	633.8	34 Provinsi	Kemkes
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	0	500	1000	1500	1500	155.3	Pusat dan 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan	Kemkes
Pelatihan strategis sumber daya manusia kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapat pelatihan strategis	2700	2700	2700	2700	2700	182.4	34 Provinsi	Kemkes

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	52	104	156	208	260	170.2	Pusat dan 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan	Kemkes
Penugasan sementara (mobile detasering) tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan sementara	0	300	400	500	600	316.4	2 provinsi	Kemkes
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85	90	92	94	96	3,114.8		
	Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	91	92	93	94	95			
Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Jumlah fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	3000	4000	5000	6000	7000	102.7	Fasyankes di Provinsi/kabupaten/Kota	Kemkes
Rumah Sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS	70	75	80	85	90	33.2	RS Prov/kabupaten/ Kota	Kemkes
Penyediaan buffer obat dan perbekalan kesehatan program pelayanan kesehatan dasar	Jumlah paket buffer obat pelayanan kesehatan dasar yang disediakan	10	10	10	10	10	1,272.7	34 Provinsi	Kemkes
Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Jumlah instalasi farmasi Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	164	264	364	464	514	17.4	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Jumlah instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	68	136	204	272	340	24.6	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
Penyediaan vaksin untuk pneumonia (PCV)	Jumlah kab/kota dengan introduksi PCV	2	8	16	27	34	1,341.3	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat esensial	77	79	81	83	85	38.5	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang dikembangkan untuk siap dimanfaatkan oleh industri	Jumlah bahan baku sediaan farmasi produksi dalam negeri yang siap dimanfaatkan oleh industri	8	12	16	19	22	143.8	Jakarta, Jawa Barat, Bali	Kemkes
Penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal	Jumlah penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal	1	1	1	1	1	2.7	Jakarta	Kemkes
Produk Alkes dan PKRT yang di Awasi	Persentase produk alat kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat	90	90	90	95	95	31.7	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Kemkes
UMKM OT yang menerima Sertifikat CPOTB	Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima Sertifikat CPOTB Bertahap	42	54	65	76	87	13.7	33 Provinsi	BPOM
Permohonan ekspor impor Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	16300	16500	16700	16900	17100	5.3	33 Provinsi	BPOM
Pemberian Keputusan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	68	70	72	74	76	40.8	34 Provinsi	BPOM
Industri alat kesehatan yang memproduksi alat kesehatan di dalam negeri	Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri	7	7	7	7	7	46.6	Industri Alkes di Provinsi/kabupaten/ Kota	Kemenkes
ProP : Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	25	35	45	55	65	1,700.0		
	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan yang disusun	2	2	2	2	2			
	Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional	100	100	100	100	100			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan tata kelola program kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	25	35	45	55	65	111.2	34 Prov	Kemkes
Integrasi sistem informasi kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)	10	25	45	70	100	143.4	Pusat	Kemkes
Peningkatan kualitas data rutin kesehatan	Percentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin	0	20	30	50	60	12.0	Pusat	Kemkes
Rekomendasi penguatan sistem pencatatan data rutin program	Jumlah rekomendasi penguatan sistem pencatatan data rutin program	2	1	1	1	1	34.5	35 Provinsi	Kemkes
Penyusunan Rancangan Kebijakan Determinan Pembangunan Kesehatan	Jumlah rancangan kebijakan determinan pembangunan kesehatan yang dihasilkan	4	4	4	4	4	50.2	Pusat	Kemkes
Hasil Penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan	3	4	4	4	4	80.6	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Barat	Kemkes
Penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	1	1	1	1	1	251.1	Pusat	Kemkes
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang upaya kesehatan masyarakat	Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait upaya kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	111.5	34 provinsi	Kemkes
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah II	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah II	1	1	1	7	2	198.3	Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Maluku	Kemkes
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah V	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah V	1	1	1	6	2	120.9	Babel, Kalbar, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Pabar	Kemkes
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait sumber daya dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	10.6	34 Provinsi	Kemkes
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah I	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah I	1	1	1	7	2	201.8	Aceh, Riau, Jakarta, Jateng, DIY, NTT, Sulsel	Kemkes
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah IV	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah IV	1	1	1	7	2	106.4	Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulbar	Kemkes
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah III	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah III	1	1	1	7	2	236.6	Ada 7 Provinsi : Sumbar, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Malut, dan Papua	Kemkes
Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan yang disusun	2	2	2	2	2	30.8	Pusat	Kemkes
ProP : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	Percentase obat memenuhi syarat	80.8	83.6	86.6	90.0	92.3	3,288.3		
	Percentase makanan memenuhi syarat	78	80	82	84	86			
Pengawas obat dan makanan yang kompeten sesuai standar	Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	770	820	875	935	1,000	159.7	Pusat	BPOM
Pengembangan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi	Percentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	35	55	70	85	100	246.7	33 Provinsi	BPOM
Penindakan terhadap kejadian obat dan makanan	Tingkat keberhasilan penindakan obat dan makanan	50	52	54	56	58	179.8	33 Provinsi	BPOM
Pemeriksaan dan pengujian sampel makanan sesuai standar	Percentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85	192.5	33 Provinsi	BPOM
Pemeriksaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai standar	Percentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	262.0	33 Provinsi	BPOM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	67	48.0	33 Provinsi	BPOM
Pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana distribusi obat dan makanan di saryanfar yang memenuhi ketentuan	60	63	66	73	80	301.1	33 Provinsi	BPOM
Pemenuhan laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar good laboratory practice	75	80	85	90	95	1,597.8	33 Provinsi	BPOM
Penerapan manajemen risiko pada industri pangan olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan manajemen risiko	19	38	57	76	95	45.0	Pusat	BPOM
Pemberian Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ditindaklanjuti	60	61	62	63	64	35.1	Pusat	BPOM
Pemberian Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan sesuai standar	78	80	82	84	86	5.6	Pusat	BPOM
Pengawasan pangan olahan sesuai standar di Kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	50	125	200	275	350	26.0	33 Provinsi	BPOM
Pengawasan fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat sesuai standar	Persentase fasilitas produksi obat JKN, obat high risk lainnya, dan bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	84	86	88	90	92	18.2	33 Provinsi	BPOM
Pemberian Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78	79	80	81	82	46.8	Pusat	BPOM
Pemberian keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	60	63	66	69	72	47.8	33 Provinsi	BPOM
Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	72.4	33 Provinsi	BPOM
Pengembangan survei baseline data pengawasan obat dan makanan	Jumlah survei baseline data pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan	-	1	-	-	-	2.0	Pusat	BPOM
Pengembangan grand design penguatan laboratorium dan balai POM	Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan	-	5	20	30	40	2.0	Pusat	BPOM
PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	293,737,0		
	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51			
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8.75	8.85	8.95	9.06	9.16			
	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13.41	13.6	13.79	13.97	14.16			
KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	57,2 26,5 30,4	58,2 27,4 31,4	59,2 28,3 32,4	60,2 29,2 33,4	61,2 30,1 34,4	9,666.1		
	Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)	67.5	70.9	74.6	78.2	81.8			
ProP : Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif							996.8		
Kurikulum yang dikembangkan	Jumlah Kurikulum dan pembelajaran pendidikan umum yang dikembangkan	148	148	148	148	148	75.4		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	Jumlah Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	171	171	171	171	171	195.7		Kemdikbud
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	174.6		Kemdikbud
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	148,805	148,805	148,805	148,805	148,805	154.1		Kemdikbud
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	15,383	15,383	15,383	15,383	15,383	184.7		Kemdikbud
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	400	400	400	400	400	20.7		Kemdikbud
Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.8		Kemenag
Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	79.0		Kemenag
Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	Jumlah Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	4.5		Kemenag
Program Studi Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	Jumlah Program Studi yang Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	600	700	800	900	1,000	58.2	Pusat	Kemenristekdikti
Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	Jumlah Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	200	250	300	350	400	8.0	Pusat	Kemenristekdikti
Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	29.0		Kemenag
ProP : Peningkatan Kompetensi Pendidik							6,639.8		
Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	105.2		Kemdikbud
Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	676	676	676	676	676	150.3		Kemdikbud
Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	117.7		Kemdikbud
Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	Jumlah Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	21,219	21,219	21,219	21,219	21,219	499.8		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	138.9		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	3,388	3,388	3,388	3,388	3,388	133.3		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	3,388	3,388	3,388	3,388	3,388	135.8		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	150.8		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	136.5		Kemdikbud
Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	96.5		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	3,069	3,069	3,069	3,069	3,069	116.3		Kemdikbud
Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	39,564	39,564	39,564	39,564	39,564	1,022.1		Kemdikbud
Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14	14	14	14	14	58.1		Kemdikbud
Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	Jumlah Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	-	4,212	4,212	4,212	4,212	82.8		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1,508	1,508	1,508	1,508	1,508	49.2		Kemdikbud
Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	-	900	900	900	900	27.2		Kemdikbud
Peserta didik/Pengaji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah Peserta didik/Pengaji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	64.8		Kemdikbud
Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	204	204	204	204	204	16.6		Kemdikbud
Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Memperoleh Pembinaan Kemahiran Berbahasa Indonesia	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	27.9		Kemdikbud
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	Jumlah Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	40,510.00	40,510.00	40,510.00	40,510.00	40,510.00	829.4		Kemenag
Guru PAI yang meningkat kompetensinya	Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya	5,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	404.5		Kemenag
Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	166.8		Kemenag
Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	1,245.00	8,000.00	9,000.00	10,000.00	11,000.00	352.0		Kemenag
Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	0.00	78.00	100.00	200.00	300.00	5.1		Kemenag
KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	Jumlah KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	571.0		Kemenag
Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	4.2		Kemenag
Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	2.3		Kemenag
Penguatan KKG/MGMP	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penguatan KKG/MGMP	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	324.8		Kemenag
Peningkatan Kompetensi Guru	Jumlah Guru yang Meningkat Kompetensinya	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	226.3		Kemenag
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	9.3		Kemenag
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	71.9		Kemenag
Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	10.9		Kemenag
SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	915	1,000	1,100	1,200	1,300	155.8	Pusat	Kemenristekdikti
SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar	Jumlah SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar	380	500	600	700	800	22.9	Pusat	Kemenristekdikti
Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya	99	99	99	99	99	16.2	Pusat	Kemenag
Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	115	115	115	115	115	12.0	Pusat	Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya	42	42	42	42	42	13.5	Pusat	Kemenag
Dosen yang Tersertifikasi	Jumlah Dosen yang disertifikasi	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11.5	Pusat	Kemenag
Dosen yang bersertifikat	Jumlah Dosen yang disertifikasi	100	100	100	100	100	2.0	Pusat	Kemenag
Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	75.0	Daerah	Kemenag
Dosen PTA Katolik Tersertifikasi	Jumlah Dosen PTA Katolik yang Disertifikasi	50	50	50	50	50	1.5	Pusat	Kemenag
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	635	635	635	635	635	55.6	Pusat	Kemenag

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa PTKH	Jumlah Dosen dan Mahasiswa PTKH yang Ditingkatkan Kompetensinya	921	921	921	921	921	40.0	Pusat	Kemenag
Sertifikasi Dosen	Jumlah Dosen Yang Disertifikasi	50	50	50	50	50	0.5	Pusat	Kemenag
Dosen yang tingkatkan kompetensinya	Jumlah Dosen yang ditingkatkan kompetensinya	310	310	310	310	310	8.5	Pusat	Kemenag
SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	62.5	Pusat	Kemristekdikti
SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit	Jumlah SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	49.4	Pusat	Kemristekdikti
Kompetensi Guru Agama Khonghucu	Jumlah Guru yang Meningkat Kompetensinya	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1.8		Kemenag
Guru Agama Khonghucu Penerima Insentif	Jumlah Guru yang Menerima Insentif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.8		Kemenag
ProP : Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan							1,414.7		
Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	Jumlah Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	7	7	7	7	7	83.1		Kemdikbud
Model Penilaian Pendidikan	Jumlah Model Penilaian Pendidikan	9	9	9	9	9	49.3		Kemdikbud
Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	Jumlah Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	8,424,500	8,424,500	8,424,500	8,424,500	8,424,500	1,003.2		Kemdikbud
Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	90,000	105,000	120,000	135,000	150,000	86.8		Kemdikbud
Soal yang dikembangkan	Jumlah Soal yang dikembangkan	66,280	66,280	66,280	66,280	66,280	100.6		Kemdikbud
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	4,450.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29.8		Kemenag
Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	Jumlah Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	26.0		Kemenag
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	9.6		Kemenag
Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	26.4		Kemenag
ProP : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi							562.8		
Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	Jumlah Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	180.0		Kemdikbud
Model Media Pendidikan Berbasis TIK	Jumlah Model Media Pendidikan Berbasis TIK	11	11	11	11	11	21.0		Kemdikbud
Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Yang Memperoleh Pembinaan	Jumlah Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Yang Memperoleh Pembinaan	417	420	420	420	420	27.1		Kemdikbud
Satuan Kerja yang Terkoneksi Jaringan Online	Jumlah Satuan Kerja yang Terkoneksi Jaringan Online	170	170	170	170	170	93.5		Kemdikbud
Satuan Pendidikan Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran	9,460	10,000	10,500	11,000	11,500	117.4		Kemdikbud
Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	Jumlah Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	300	500	600	700	800	116.2		Kemdikbud
Sekolah Yang Menerapkan Pusat Sumber Belajar	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Pusat Sumber Belajar	-	65	65	65	65	7.6		Kemdikbud
ProP : Integrasi Softskill dalam Pembelajaran							52.0		
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	Jumlah Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	106	106	106	106	106	52.0		Kemdikbud
KP : Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (Persen) Pendidikan Tinggi	33.4	35.4	37.4	39.5	41.7	236,128.7		
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	105.5	105.5	104.4	104.4	104.4			
ProP : Sarana dan Prasarana Pendidikan							28,167.8		
Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/Direvitalisasi	250	300	350	400	450	273.5		Kemdikbud
Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/Direvitalisasi	-	25	25	25	25	135.9		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	-	500	500	500	500	150.2		Kemdikbud
SD-SMP Satu Atap yang dibangun	Jumlah SD-SMP Satu Atap yang dibangun	-	15	15	15	15	75.8		Kemdikbud
Sekolah Yang DIRENOVASI	Jumlah Sekolah Yang DIRENOVASI	5	5	5	5	5	49.8		Kemdikbud
Sekolah Yang DIRENOVASI	Jumlah Sekolah Yang DIRENOVASI	58	58	58	58	58	459.0		Kemdikbud
Sekolah Yang DIRENOVASI	Jumlah Sekolah Yang DIRENOVASI	132	132	132	132	132	373.9		Kemdikbud
Sekolah Yang DIRENOVASI	Jumlah Sekolah Yang DIRENOVASI	20	20	20	20	20	59.4		Kemdikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	6	6	6	6	6	148.4		Kemdikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	8	8	8	8	8	131.0		Kemdikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	8	8	8	8	8	209.2		Kemdikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	20	20	20	20	20	316.2		Kemdikbud
Asrama pada Madrasah yang dibangun	Jumlah Asrama pada Madrasah yang dibangun	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	24.8		Kemenag
Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	80.00	100.00	120.00	140.00	160.00	67.7		Kemenag
Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	80.00	250.00	300.00	350.00	400.00	79.0		Kemenag
Laboratorium Komputer MA yang dibangun	Jumlah Laboratorium Komputer MA yang dibangun	0.00	160.00	170.00	180.00	190.00	178.4		Kemenag
Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	Jumlah Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	0.00	160.00	170.00	180.00	190.00	178.4		Kemenag
Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	17.6		Kemenag
Madrasah yang direvitalisasi	Jumlah Madrasah yang direvitalisasi	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.8		Kemenag
Madrasah yang Ditingkatkan Mutu UKS/M	Jumlah Madrasah yang ditingkatkan mutu UKS dan sanitasinya	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	11.7		Kemenag
MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	Jumlah MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	451.7		Kemenag
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	72.2		Kemenag
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	9.1		Kemenag
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	0.00	300.00	350.00	400.00	450.00	93.5		Kemenag
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	0.00	300.00	350.00	400.00	450.00	107.0		Kemenag
Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang Direhabilitasi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang Direhabilitasi	80.00	250.00	300.00	350.00	400.00	79.0		Kemenag
Ruang kelas MA yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MA yang dibangun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	116.7		Kemenag
Ruang kelas MA yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MA yang direhabilitasi	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	229.8		Kemenag
Ruang kelas MI yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MI yang dibangun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	116.7		Kemenag
Ruang kelas MI yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MI yang direhabilitasi	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	229.8		Kemenag
Ruang kelas MTs yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MTs yang dibangun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	116.7		Kemenag
Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	229.8		Kemenag
Ruang kelas RA yang dibangun	Jumlah Ruang kelas RA yang dibangun	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	15.8		Kemenag
Ruang kelas RA yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas RA yang direhabilitasi	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	76.6		Kemenag
Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	6.4		Kemenag
Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan kualitasnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		Kemenag
Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	19.4		Kemenag

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	Jumlah Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	80	50	50	50	50	5,240.8	Pusat	Kemenristekdikti
Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarananya melalui SBSN	8	10	10	10	10	5,291.6	Pusat	Kemenag
Sarana dan Prasarana Perpustakaan pada PTKI	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarananya	58	58	58	58	58	43.0	Pusat	Kemenag
Sarana dan Prasarana PTKI	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarananya	58	58	58	58	58	400.0	Pusat	Kemenag
Sarana dan Prasarana PTK yang memenuhi Standar	Jumlah PTA yang direhabilitasi Sarana dan Prasarananya melalui SPTT/AK yang memenuhi standar	95	355	355	355	355	402.5	Pusat	Kemenag
Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	Jumlah Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	2	5	5	5	5	17.6	Pusat	Kemenristekdikti
Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	Jumlah Item Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	12	8	2	2	2	2,472.1	Pusat	Kemenristekdikti
Sarana Prasarana yang dibiayai melalui SBSN	Jumlah Item Sarana Prasarana yang dibiayai melalui SBSN	10	10	10	10	10	2,500.0	Pusat	Kemenristekdikti
Sarana Prasarana yang dibiayai melalui KPBUI	Jumlah Item Sarana Prasarana yang dibiayai melalui KPBUI	1	1	1	1	1	1,000.0	Pusat	Kemenristekdikti
Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama Khonghucu	Jumlah Sarana dan Prasarana	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	3.3		Kemenag
Sarana dan Prasarana madrasah Madrasah yang Diadakan (SBSN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	5,871.4		Kemenag
ProP : Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berkabut							200,597.7		
Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	Jumlah Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	135,581	135,581	135,581	135,581	135,581	1,373.7		Kemdikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	60.4		Kemdikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	94.6		Kemdikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	38.2		Kemdikbud
Sekolah yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	27.9		Kemdikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10,360,614	10,360,614	10,360,614	10,360,614	10,360,614	23,320.8		Kemdikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1,368,243	1,367,559	1,367,559	1,367,559	1,367,559	6,558.7		Kemdikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1,829,167	1,829,167	1,829,167	1,829,167	1,829,167	8,501.3		Kemdikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	4,369,968	4,369,968	4,369,968	4,369,968	4,369,968	15,065.5		Kemdikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	5,168	2,895	2,895	2,895	2,895	280.9		Kemdikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	4,842	2,427	2,427	2,427	2,427	238.6		Kemdikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	5,683	3,344	3,344	3,344	3,344	443.1		Kemdikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional	9,261	3,030	3,030	3,030	3,030	485.7		Kemdikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	3,294	4,056	4,056	4,056	4,056	336.5		Kemdikbud
Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	365,380	289,854	208,624	113,572	0	9,239.3	Pusat	Kemenristekdikti
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	5,148	7,798	8,198	8,898	9,148	658.4	Pusat	Kemenristekdikti
Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	297	400	500	600	700	7.6	Pusat	Kemenristekdikti
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa PPA	970	970	970	970	970	14.6	Pusat	Kemenag
Beasiswa BIDIK MISI	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa BIDIK MISI	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	76.0	Pusat	Kemenag

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Beasiswa Mahasiswa Miskin	Jumlah Mahasiswa penerima bantuan beasiswa Mahasiswa Miskin	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	15.6	Pusat	Kemenag
Bidik Misi PTKI	Jumlah Mahasiswa penerima bantuan beasiswa Bidik Misi PTKI	38,000	26,364	18,576	10,788	3,000	1,006.2	Pusat	Kemenag
Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	1,361	1,361	1,361	1,361	1,361	35.9	Pusat	Kemenag
Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	122.5	Pusat	Kemenag
Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	100.0	Pusat	Kemenag
Mahasiswa penerima beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa PPA	75	75	75	75	75	2.0	Pusat	Kemenag
Mahasiswa Penerima Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bidik Misi	20	20	20	20	20	1.0	Pusat	Kemenag
Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	Jumlah Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	29.6	Pusat	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	275	275	275	275	275	17.5	Pusat	Kemenag
PIP Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	Jumlah Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	1.0	Pusat	Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	30,176.00	30,176.00	30,176.00	30,176.00	30,176.00	79.7		Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	27,540.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	145.4		Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	53,556.00	53,556.00	53,556.00	53,556.00	53,556.00	314.2		Kemenag
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	105,100.00	105,100.00	105,100.00	105,100.00	105,100.00	462.4		Kemenag
Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	Jumlah Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7.4		Kemenag
Siswa MA penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MA penerima Bantuan PIP	320,372.00	320,372.00	320,372.00	320,372.00	320,372.00	1,879.5		Kemenag
Siswa MI penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MI penerima Bantuan PIP	939,607.00	939,607.00	939,607.00	939,607.00	939,607.00	2,480.5		Kemenag
Siswa MTs penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MTs penerima Bantuan PIP	745,086.00	745,086.00	745,086.00	745,086.00	745,086.00	3,278.3		Kemenag
Siswa SDTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SDTK Penerima BOS	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	10.7		Kemenag
PIP SDTK	Jumlah Siswa SDTK Penerima KIP	1,081.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	2.7		Kemenag
Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3.5		Kemenag
Siswa SMPTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMPTK Penerima BOS	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	18.1		Kemenag
PIP SMPTK	Jumlah Siswa SMPTK Penerima KIP	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	12.5		Kemenag
Siswa SMTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMTK Penerima BOS	7,928.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00	71.7		Kemenag
PIP SMTK/SMAK	Jumlah Siswa SMTK penerima KIP	7,022.00	7,022.00	7,022.00	7,022.00	7,022.00	46.7		Kemenag
Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	100	100	100	100	100	5.3	Pusat	Kemenag
Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000	2,000,000	63,320.0	Pusat	Kemristekdikti
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	17,565	37,565	62,565	92,565	145,130	3,733.3	Pusat	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	1,690	3,380	5,070	6,760	8,450	278.9	Pusat	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	4,842	9,684	14,526	19,368	24,210	798.9	Pusat	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	398	796	1,194	1,592	1,990	65.7	Pusat	Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	205	410	615	820	1,025	33.8	Pusat	Kemenag
Siswa MI penerima BOS	Jumlah Siswa MI penerima BOS	3,894,365.00	3,894,365.00	3,894,365.00	3,894,365.00	3,894,365.00	20,562.0		Kemenag
Siswa MTs penerima BOS	Jumlah Siswa MTs penerima BOS	3,358,773.00	3,358,773.00	3,358,773.00	3,358,773.00	3,358,773.00	21,675.0		Kemenag
Siswa MA penerima BOS	Jumlah Siswa MA penerima BOS	1,495,294.00	1,495,294.00	1,495,294.00	1,495,294.00	1,495,294.00	13,158.4		Kemenag
ProP : Penanganan Anak Tidak Sekolah							1,767.7		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Orang Dewasa memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Orang Dewasa yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	-	100,000	100,000	100,000	100,000	866.1		Kemdikbud
SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	Jumlah SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	-	500	500	500	500	84.8		Kemdikbud
Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	Jumlah Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	-	30	30	30	30	80.5		Kemdikbud
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	-	549	549	549	549	52.2		Kemdikbud
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	7	7	7	7	7	27.6		Kemdikbud
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	245	245	245	245	245	179.4		Kemdikbud
Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	500	500	500	500	500	36.8		Kemdikbud
Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	2,895	2,895	2,895	2,895	2,895	440.2		Kemdikbud
ProP : Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah							5,595.4		
Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	Jumlah Anak Usia Dini yang Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	-	6,500	6,500	6,500	6,500	52.5		Kemdikbud
Kabupaten/Kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	Jumlah Kabupaten/Kota yang Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	-	514	514	514	514	521.9		Kemdikbud
Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	Jumlah Lembaga PAUD yang Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	245.1		Kemdikbud
Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif	Jumlah Lembaga PAUD yang Menyelenggarakan Holistik Integratif	-	1,200	1,200	1,200	1,200	83.7		Kemdikbud
Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminar	Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminar	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.5		Kemenag
BOP RA	Jumlah Siswa RA penerima BOP	1,331,207.00	1,331,207.00	1,331,207.00	1,331,207.00	1,331,207.00	4,685.8		Kemenag
KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		16.1	17.4	18.7	20	21.3	17,015.5		
ProP : Revitalisasi LPTK							100.5		
Penyelenggaraan LPTK	Jumlah Penyelenggaraan LPTK	7	7	7	7	7	10.9	Pusat	Kemenag
LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)	Jumlah LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)	41	41	41	41	41	89.6	Pusat	Kemenristekdikti
ProP : Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik							13,806.7		
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	160.6		Kemdikbud
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	60	60	60	60	60	11.6		Kemdikbud
Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	50	50	50	50	50	19.3		Kemdikbud
Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	24,697	24,697	24,697	24,697	24,697	1,058.3		Kemdikbud
Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	20	20	20	20	20	9.9		Kemdikbud
Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	11,052	11,052	11,052	11,052	11,052	538.1		Kemdikbud
Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	210.2		Kemdikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	899	899	899	899	899	168.4		Kemdikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	483.3		Kemdikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	1,693	1,693	1,693	1,693	1,693	246.8		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	243.8		Kemdikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	90	90	90	90	90	18.7		Kemdikbud
SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	Jumlah SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	10,505	16,514	20,739	26,242	30,715	8,540.4	Pusat	Kemenristekdikti
GPAI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Jumlah GPAI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	2,000.00	2,200.00	2,400.00	2,600.00	2,800.00	53.5		Kemenag
Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	Jumlah Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	6,500.00	7,000.00	7,500.00	8,000.00	8,500.00	86.0		Kemenag
Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	Jumlah Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	5.5		Kemenag
Guru yang mengikuti Program PPG	Jumlah Guru yang mengikuti Program PPG	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00	34.4		Kemenag
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	14.7		Kemenag
Guru/Pengawas Madrasah penerima beasiswa S2	Jumlah Guru/Pengawas Madrasah yang menerima beasiswa S2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	46.9		Kemenag
Guru/Pengawas/Dosen PAI penerima Beasiswa S2	Jumlah Guru/Pengawas/Dosen PAI yang menerima Beasiswa S2	0.00	500.00	600.00	700.00	800.00	118.9		Kemenag
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	Jumlah KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	0.00	120.00	130.00	140.00	150.00	306.3		Kemenag
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	14.7		Kemenag
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Madrasah dan RA	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA yang Mendapatkan Pengembangan Karir	3,000.00	4,000.00	4,500.00	5,000.00	5,500.00	17.6		Kemenag
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,398.9		Kemenag
ProP : Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan							3,108.4		
Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	17,797	18,000	18,000	18,000	18,000	1,629.3		Kemdikbud
Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	238.6		Kemdikbud
Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	893	893	893	893	893	94.4		Kemdikbud
Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	630	630	630	630	630	79.8		Kemdikbud
Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	800	800	850	900	950	148.3		Kemdikbud
Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	500	500	550	600	650	74.7		Kemdikbud
Penataan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	Jumlah Penataan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	34	34	34	34	34	113.9		Kemdikbud
Penataan Guru Dikdas	Jumlah Penataan Guru Dikdas	34	34	34	34	34	52.6		Kemdikbud
Penataan Guru Dikmen	Jumlah Penataan Guru Dikmen	34	34	34	34	34	75.6		Kemdikbud
Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	Jumlah Daerah yang Melakukan Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	34	34	34	34	34	122.8		Kemdikbud
Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	427.7		Kemenag
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	2.2		Kemenag
Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	48.4		Kemenag

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Penjaminan Mutu Pendidikan	Percentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B: SD/MI SMP/MTS SMA/MA	80,11 74,54 73,65	81,19 76,01 74,53	82,28 77,48 75,41	83,37 78,95 76,29	84,46 81,33 80,86	11,326.2		
	Perguruan Tinggi Terakreditasi A	135.0	160.0	185.0	205.0	225.0			
ProP : Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi		64	66	68	71	73	7,284.9		
Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang Diakreditasi	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	1,185.1		Kemdikbud
Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional Nasional	Jumlah Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional Nasional	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	419.2		Kemdikbud
Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Formal yang Diakreditasi	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,525.1		Kemdikbud
Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	15,943	15,943	15,943	15,943	15,943	2,155.0		Kemdikbud
Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	214,312	214,312	214,312	214,312	214,312	959.2		Kemdikbud
SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Jumlah SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	10,795	10,795	10,795	10,795	10,795	146.0		Kemdikbud
Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)	Jumlah Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	820.4	Pusat	Kemenristekdikti
Madrasah dan RA yang Terakreditasi	Jumlah Madrasah dan RA yang Terakreditasi	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20.5		Kemenag
Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi	Jumlah Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	11.8		Kemenag
SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B	Jumlah SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	4.1		Kemenag
Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B	Jumlah Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B	425	500	500	500	500	21.0		Kemenag
PTKI yang Terakreditasi	Jumlah PTKI yang Terakreditasi	1	1	1	1	1	17.5		Kemenag
ProP : Perluasan Budaya Mutu Pendidikan							4,041.3		
Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Pengukuran	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Pengukuran	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	81.9		Kemdikbud
Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga/Mitra PAUD yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	120.2		Kemdikbud
Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	350	350	350	350	350	97.1		Kemdikbud
Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	216,924	216,924	216,924	216,924	216,924	106.7		Kemdikbud
Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	216,974	216,974	216,974	216,974	216,974	651.5		Kemdikbud
Sekolah Berbasis Komunitas	Jumlah Sekolah Berbasis Komunitas	-	425	425	425	425	112.0		Kemdikbud
Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	514	514	514	514	514	59.4		Kemdikbud
Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	Jumlah Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	-	280	280	280	280	66.0		Kemdikbud
Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	514	514	514	514	514	83.6		Kemdikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	650	650	650	650	650	409.7		Kemdikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	380.6		Kemdikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	9,871	9,871	9,871	9,871	9,871	198.0		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	-	125	125	125	125	30.8		Kemdikbud
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	200	200	200	200	200	85.9		Kemdikbud
Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	-	200	200	200	200	28.6		Kemdikbud
Program Studi Dibina Menjadi Prodi Unggul	Jumlah Program Studi Dibina yang Menjadi Prodi Unggul	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	51.6	Pusat	Kemristekdikti
Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	Jumlah Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	360	400	400	400	400	780.4	Pusat	Kemristekdikti
Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	29.3		Kemenag
Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Jumlah Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	268.0		Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	4.1		Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	5.2		Kemenag
Siswa Madrasah yang Berdaya Saing	Jumlah Siswa Madrasah dan RA yang Berdaya Saing	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	58.7		Kemenag
Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	Jumlah Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	5	11	14	14	14	303.7	Pusat	Kemristekdikti
Perguruan Tinggi Menerapkan SNDIKTI	Jumlah Perguruan Tinggi yang Menerapkan SNDIKTI	900	1,000	1,000	1,000	1,000	28.3	Pusat	Kemristekdikti
KP : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan							19,600.5		
ProP : Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan							2,739.2		
Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	-	100	100	100	100	105.7		Kemdikbud
Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan	-	34	34	34	34	80.9		Kemdikbud
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	35	35	35	35	35	44.3		Kemdikbud
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	192	192	192	192	192	43.4		Kemdikbud
Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Jumlah Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	8	8	8	8	8	78.6		Kemdikbud
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.2		Kemenag
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)	Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,351.0		Kemenag
ProP : Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan							16,709.4		
LAYANAN PERENCANAAN	Jumlah Layanan Perencanaan	1	1	1	1	1	124.5		Kemdikbud
PTA Katolik Negeri Penerima BOPTN	Jumlah PTA Katolik Negeri yang Menerima BOPTN	364	364	364	364	364	3.4	Pusat	Kemenag
PTA Penerima BOPTN	Jumlah PTA yang Menerima BOPTN	15,378	15,378	15,378	15,378	15,378	143.8	Pusat	Kemenag
PTKIN Penerima BOPTN	Jumlah PTKIN Penerima BOPTN	58	58	58	58	58	5,315.0	Pusat	Kemenag
Buku Pustaka (BOPTN)	Jumlah Buku yang diserahkan kepada PTN sebagai bantuan dari BOPTN	5,137	5,137	5,137	5,137	5,137	239.4	34 Propinsi	Kemristekdikti

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	Jumlah Laporan Kegiatan Mahasiswa PTN dengan bantuan dari BOPTN yang Dilaporkan	745	745	745	745	745	889.9	34 Propinsi	Kemenristekdikti
Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Jumlah Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM yang Dikembangkan dengan bantuan dari BOPTN	192	192	192	192	192	372.1	34 Propinsi	Kemenristekdikti
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	Jumlah PTN yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran melalui BOPTN	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	854.8	34 Propinsi	Kemenristekdikti
Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	Jumlah Bulan Rumah Sakit Pendidikan yang mendapat layanan bantuan operasional dari BOPTN	12	12	12	12	12	400.0	34 Propinsi	Kemenristekdikti
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH)	Jumlah PTN BH yang Mendapat Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH)	11	11	11	11	11	8,366.5	Pusat	Kemenristekdikti
ProP : Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan							151.8		
Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah SKPD yang Menyediakan Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	548	548	548	548	548	119.5		Kemdikbud
Layanan Data dan Informasi	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	32.3		Kemenag
PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	74.31	76.52	78.34	80.01	81.46	500.0		
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun			
KP : Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.33	56.5	56.5	58.17	57.67			
	Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak						103.6		
ProP : Penjaminan pemenuhan hak anak secara universalnya	Penjaminan pemenuhan hak anak secara universalnya						49.0		
Provinsi yang difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	4	4	5	5	5	5.5		KPPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak Berkebutuhan Khusus	2	2	3	3	3	11.6		KPPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan	Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan	5	5	6	6	6	8.3		KPPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	2	2	3	3	3	3.9		KPPPA
Provinsi Yang Difasilitasi dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	Jumlah provinsi Yang Difasilitasi dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	14	14	15	15	15	12.2		KPPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam Pembangunan Fasilitas Kreativitas dan Budaya Anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Pembangunan Fasilitas Kreativitas dan Budaya Anak	5	5	6	6	6	7.5		KPPPA
Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	Persentase anak yang mengikuti pendidikan dan pengentasan anak	60	70	80	90	100	0.0		Kemkumham
Klien Pemasyarakatan yang melanjutkan pendidikan di luar lembaga (definisi operasional?)	Persentase klien pemasyarakatan yang melanjutkan pendidikan di luar lembaga	20	25	30	35	40	0.0		Kemkumham
ABH yang memiliki kartu identitas anak	Persentase ABH yang memiliki kartu identitas anak (KIA) (level komponen)	60	70	80	90	100	0.0		Kemkumham
ProP : Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya							54.6		
Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	4	4	5	5	5	2.2		KPPPA

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme	4	4	5	5	5	2.2		KPPPA
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)	200	225	250	275	300	3.4		KPPPA
SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksplorasi di Lokasi Kebencanaan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksplorasi di Lokasi Kebencanaan	200	225	250	275	300	3.4		KPPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksplorasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksplorasi	2	2	3	3	3	5.5		KPPPA
Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak)	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak)	660	670	680	690	700	3.0		KPPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan sekolah Ramah anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan sekolah Ramah anak	5	5	6	6	6	9.1		KPPPA
Pekerja sektor anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Jumlah Pekerja sektor anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	9000	10000	10000	-	-	16.0		Kemnaker
Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA	Jumlah Wilayah yang Mendapat Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA	19	-	-	-	-	2.0		Kemkumham
Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instanse Teknis Lainnya	Jumlah APH yang Mengikuti Diklat Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA	270	-	-	-	-	2.7		Kemkumham
Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	Jumlah Peserta Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	160	-	-	-	-	2.1		MA
Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan	Jumlah Angkatan Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan	8	-	-	-	-	3.0		Kejaksaan Agung
KP : Peningkatan Perlindungan Perempuan							135.7		
ProP : Perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang							135.7		
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari KDRT	Jumlah Provinsi yang yang difasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari KDRT	10	10	10	10	10	24.9	34 Provinsi	KPPPA
Fasilitasi penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT	10	10	10	10	10	5.5	34 Provinsi	KPPPA
KIE Pencegahan dan Penanganan KDRT melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan KDRT melalui berbagai media	-	1	1	1	1	7.7	Pusat	KPPPA
Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Jumlah K/L dan provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	15	15	15	15	15	10.7	34 Provinsi	KPPPA
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan dan pemberdayaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	180	180	180	180	180	7.1	Pusat	KPPPA
Penyusunan pedoman perempuan tangguh bencana	Jumlah pedoman perempuan tangguh bencana	1	-	-	-	-	0.3	Pusat	KPPPA
Sosialisasi pedoman dan pelatihan perempuan tangguh bencana	Jumlah provinsi yang memperoleh sosialisasi pedoman dan pelatihan perempuan tangguh bencana	-	9	9	8	8	4.3	34 Provinsi	KPPPA
KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media	-	1	1	1	1	7.7	Pusat	KPPPA

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KIE Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan TPPO melalui berbagai media	1	1	1	1	1	9.4	Pusat	KPPPA
Penguatan kapasitas kelembagaan Gugus Tugas TPPO	Jumlah K/L yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan Gugus Tugas TPPO	21	21	21	21	21	18.2	34 Provinsi	KPPPA
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan korban TPPO	Jumlah Perempuan Korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan	100	100	100	100	100	8.3	Pusat	KPPPA
Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan	Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan	11	11	11	11	11	11.3	34 Provinsi	KPPPA
Layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	Jumlah Perempuan yang mendapat layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	200	200	200	200	200	5.0	Pusat	KPPPA
Fasilitasi penguatan kelompok BK-TKI	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelompok BK-TKI	4	8	8	8	6	5.6	34 Provinsi	KPPPA
KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui Berbagai Media	-	1	1	1	1	7.7	Pusat	KPPPA
Monitoring dan Evaluasi SPPT PKKTP	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi SPPT PKKTP	1	-	-	-	-	2.0	Pusat	Komnas Perempuan
KP : Kualitas Pemuda							260.7		
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan							41.4		
Tersusun dan termanfaatkannya naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0.4	Pusat	Kemenpora
Terlaksananya koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	6	6	6	6	6	41.0	Pusat	Kemenpora
ProP : Pencegahan Perilaku Beresiko							56.4		
Terfasilitasinya pemuda kader dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	28.2	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah keikutsertaan dalam Jambore Pemuda Indonesia	34	34	34	34	34	28.2	Daerah	
ProP : Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda							162.9		
Terfasilitasinya pemuda sebagai kader kewirausahaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	24.0	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya sentra kewirausahaan pemuda	Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi	34	34	34	34	34	20.0	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya pemuda dalam pendidikan kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (Kwarnas/Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	17	17	17	17	17	50.7	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	8.5	Pusat	
Terfasilitasinya pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	16.9	Pusat	
Terfasilitasinya pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	42.8	Pusat	
PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27.9				40	18,029.9		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25.6				50			
	Kawasan hutan yang dikelola dan/atau diserahkan kepada masyarakat	2 juta ha				10 juta ha			
	Bidang tanah yang dire distribusi	750,000				7,750,000			
	Bidang tanah yang dilegalisasi	6,286,087				56,286,087			
KP : Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Penyelenggaraan bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan ultra mikro bagi penduduk (KK)						2,584.2		
ProP : Fasilitasi Modal Usaha							2,584.2		
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	Penduduk miskin dan rentan yang memperoleh bantuan kelompok usaha	135,000	136,000	137,000	138,000	140,000	1,954.6	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro	Jumlah Kelompok yang Memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro	2,100,000	3,000,000	4,100,000	5,400,000	6,900,000	629.6	34 Provinsi	Kementerian Keuangan
ProP : Pembinaan keuangan keluarga dan investasi keluarga							0.0		
Bantuan Ekonomi Keluarga Sakinah	Jumlah keluarga yang Memperoleh Pelatihan Keluarga Sakinah						0.0	34 Provinsi	Kementerian Agama
Bantuan Ekonomi Produktif melalui Zakat dan Wakaf	Jumlah keluarga yang Memperoleh Zakat dan Wakaf Produktif						0.0	34 Provinsi	Kementerian Agama
KP : Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Desa yang mengembangkan keperantaraan usaha	11500	11600	11700	11800	11900	244.7		
	Pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya	8,687,613	8,687,613	8,687,613	8,687,613	8,687,613			
	Pengembangan kewirausahaan sosial	535	535	535	535	535			
ProP : Fasilitasi keperantaraan usaha produktif							218.5		
Desa yang Memperoleh Keperantaraan Usaha	Jumlah Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan terintegrasi dengan BUMDes	30 Desa	50.0						
Desa yang Memperoleh Keperantaraan Usaha	Jumlah BUMDes yang Dikembangkan Untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	500 Desa	500 Desa	500 Desa	500 Desa	500 Desa	168.5		
ProP : Penguatan pemberdayaan berdampak sosial							26.2		
Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Dunia Usaha Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	170	220	250	300	350	26.2	34 Provinsi	Kementerian Sosial
KP : Reforma Agraria	Luas bidang tanah yang dire distribusi dan dilegalisasi dalam rangka mengurangi ketimpangan Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	1,381,600	1,766,315	1,766,315	1,766,315	1,766,315	8,504.0		
	Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	34	34	34	34	34			
ProP : Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)							2,746.2		
Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	Jumlah Bidang Tanah yang Diinventarisasi	700,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	662.4	34 Provinsi	Kemen ATR/BPN
Terlaksananya Penertiban Tanah Terlantar	Jumlah Bidang Tanah Terlantar yang Diterbitkan	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	33.2	34 Provinsi	Kemen ATR/BPN
Teridentifikasi Data HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian	Jumlah Bidang Tanah hasil Data Pengendalian HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	50.6	34 Provinsi	Kemen ATR/BPN
Terlaksannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	820.0	820.0	820.0	820.0	820.0	2,000.0	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ProP : Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora							2,911.4		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Terlaksananya Redistribusi Tanah	Jumlah bidang tanah yang dire distribusi	481,600	866,315	866,315	866,315	866,315	2,911.4	34 Provinsi	Kemen ATR/BPN
Terlaksananya Legalisasi Tanah (Sertifikat Hak Atas Tanah)	Luas cakupan bidang tanah yang dilegalisasi	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0.0	34 Provinsi	Kemen ATR/BPN
ProP : Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA							2,846.4		
Terlaksananya operasional Gugus Tugas Reforma Agraria	Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria	72	535	535	535	535	2,772.4	34 Provinsi	Kemen ATR/BPN
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bagi Masyarakat Penerima TORA	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	34	34	34	34	34	74.0	34 Provinsi	Kemen ATR/BPN
KP : Perhutanan Sosial	Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	0.5	1	1.5	2	2.5	6,697.0		
ProP : Penyiapan Prakondisi Masyarakat Pedesaan dan Kawasan	Jumlah desa dalam dan sekitar kawasan hutan	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	2,250.0		
Kawasan hutan yang memperoleh izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IHPHS, HA	Luas kawasan hutan yang memperoleh izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IHPHS, HA	0.5	1	1.5	2	2.5	2,250.0		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ProP : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	500.0		
Peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat pelaku Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	500.0		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kominfo
ProP : Peningkatan kapasitas pendamping/penyuluhan kelompok masyarakat/desa hutan	Jumlah pendamping desa hutan	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	3,947.0		
Penyuluhan dan Pendamping yang kompeten bagi kelompok masyarakat	Jumlah pendamping	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,947.0		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44.8	46.6	48.4	50.2	52.1	190,830.9		
	Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University								
	a. Top 100	0	0	0	0	1			
	b. Top 300	1	1	1	1	2			
	c. Top 500	2	2	2	2	3			
	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43.0	45.0	47.0	48.0	50.0			
KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi	1,890,345	1,890,345	1,890,345	1,890,345	1,890,345	145,535.7		
	PT Vokasi berakreditasi A	8	10	12	14	16			
	Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi (orang)	1,829,664.0	1,913,804.0	1,997,944.0	2,082,084.0	2,166,224.0			
	Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi (orang)	60,681.0	64,224.0	67,767.0	71,310.0	74,853.0			
	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (orang) (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)	2 juta	2,2 juta	2,4 juta	2,6 juta	2,8 juta			
	Jumlah pemagangan dalam negeri (orang)	1.824.466 (SMK)	1.908.367 (SMK)	1.992.268 (SMK)	2.076.169 (SMK)	2.160.070 (SMK)			
	Jumlah pemagangan luar negeri (orang)	5.198 (SMK)	5.437 (SMK)	5.676 (SMK)	5.915 (SMK)	6.154 (SMK)			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							1,625.5		
Analisis Pasar Kerja pada Sektor Prioritas	Jumlah dokumen analisis pasar kerja pada sektor prioritas	8 Dokumen	35.4	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan				
Layanan Informasi Pasar Kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, badan job portal swasta	Jumlah informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, dan badan job portal swasta	1 Layanan	55.8	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan				
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	872.8	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri	1,822	3,000	5,000	7,500	8,000	248.7	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Kelembagaan Pendidikan Non Formal Industri	xxx						47.9		Kementerian Perindustrian
Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	xxx						62.8		Kementerian Perindustrian
Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan Kl	xxx						239.4		Kementerian Perindustrian
Kelembagaan Pendidikan Menengah Kerjuruan Industri	xxx						62.8		Kementerian Perindustrian
ProP : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							135,850.7		
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	743	743	743	743	743	91.3		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	105.2		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	556	556	556	556	556	94.6		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	157.0		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	1,997	1,997	1,997	1,997	1,997	145.8		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	106.5		Kemdikbud
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432	125.1		Kemdikbud
Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	-	2,000	2,000	2,000	2,000	265.8		Kemdikbud
SMK yang Melaksanakan Teaching Factory/Technopark	Jumlah SMK yang Melaksanakan Teaching Factory/Technopark	-	500	550	600	650	22,423.1		Kemdikbud
Sekolah yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Berlaku	Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Berlaku	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	291.7		Kemdikbud
Ruang Praktik Siswa/Keterampilan yang dibangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa/Keterampilan yang dibangun	-	800	850	900	950	3,500.0		Kemdikbud
Sekolah yang Direvitalisasi	Jumlah Sekolah yang Direnovasi/Direvitalisasi	557	768	939	1,152	1,408	59,955.2		Kemdikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	15	15	15	15	15	470.9		Kemdikbud
Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	2,261.2		Kemdikbud
Sekolah yang Bekerjasama dengan Industri dan Pendidikan Dual System	Jumlah SMK yang Bekerjasama dengan Industri dan Pendidikan Dual System	534	1,315	1,815	2,315	2,815	5,329.0		Kemdikbud
SMK yang Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	Jumlah SMK yang Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	280	280	280	280	280	133.6		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sekolah yang mendapatkan Pendidikan Karakter Kerja dan Pembinaan Minat Bakat	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pendidikan Karakter Kerja dan Pembinaan Minat Bakat	12	12	12	12	12	204.9		Kemendikbud
Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi	-	15	15	16	16	31.6		Kemendikbud
Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri		200	200	200	200	32.0	Pusat	Kemenristekdikti
Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		500	500	500	500	104.0	Pusat	Kemenristekdikti
Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi		500	500	500	500	52.0	Pusat	Kemenristekdikti
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan vokasi di Politeknik Pertanian	5,478	6,494	6,809	7,124	7,124	1,043.2		Kementerian Pertanian
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Jumlah S2 dan S3 yang difasilitasi tugas belajar	350	350	350	350	350	143.2		Kementerian Pertanian
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Kependidikan, serta Peserta Didik Pendidikan Vokasi Pertanian	Jumlah tenaga pendidik, kependidikan serta peserta didik yang ditingkatkan kompetensinya	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	90.6		Kementerian Pertanian
Pendampingan Program Prioritas Pembangunan Pertanian serta Fasilitasi Pengabdian Masyarakat di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Jumlah pendamping program prioritas pembangunan pertanian	1,750	2,200	2,200	2,200	2,200	396.5		Kementerian Pertanian
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	Jumlah wirausahawan muda pertanian dalam rangka regenerasi petani	1,513	1,600	1,700	1,800	1,800	346.0		Kementerian Pertanian
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Jumlah peserta pembelajaran pada SMK PP	22,427	22,500	22,600	22,700	22,700	114.9		Kementerian Pertanian
Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll)	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan (satker)	12	12	12	12	12	1,418.4		Kementerian Pertanian
Pemagangan bagi Mahasiswa dan Alumni Politeknik Pembangunan Pertanian	Jumlah peserta magang	250	300	400	500	500	39.0		Kementerian Pertanian
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian	Jumlah peserta pelatihan vokasi	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	607.1		Kementerian Pertanian
Pelatihan dan Fasilitasi Penumbuhan Petani Milenial Berorientasi Ekspor	Jumlah peserta pelatihan	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	50.0		Kementerian Pertanian
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (orang)	Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Berkompeten (orang)	8,318	9,173	10,633	12,286	13,115	1,185.8	19 UPT	KKP
Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan	21	22	22	22	22	764.4	19 UPT	KKP
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	17	14	14	14	10	36.4	19 UPT	KKP
Instruktur pemerintah dan swasta baru	Jumlah instruktur pemerintah dan swasta baru yang dilatih	2,160	240	160	160	160	168.5	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	7,693	8,890	9,620	10,350	11,080	743.5	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	433	423	423	424	424	3,358.6	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Pengembangan BLK Komunitas	Jumlah BLK Komunitas yang dikembangkan	2,000	500	500	500	500	4,000.0	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	228,820	225,000	250,000	260,000	275,000	9,559.4	34 Provinsi	Kementerian Ketenagakerjaan
Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi SDM Transportasi bersertifikat	xxx	411,191	452,310	497,541	547,295	602,025	11,556.6		Tersebar
Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	Jumlah tenaga teknis menengah kehutanan	470	470	470	470	470	380.6	SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.	KLHK
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	xxx	500	500	600	600	600	6.0		BATAN
Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	xxx	2	2	2	2	2	10.0		BATAN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	xxx	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	478.8		Kementerian Perindustrian
Mahasiswa dan Lulusan Program D I dan D II Berbasis Kompetensi	xxx	500	500	500	500	500	29.9		Kementerian Perindustrian
Siswa Aktif dan Lulusan Pendidikan Berbasis Kompetensi Pendidikan Kejuruan	xxx	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	209.5		Kementerian Perindustrian
Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (retooling dosen dan sertifikasi mahasiswa, penguatan kelembagaan, dan penguatan prodi bidang prioritas)	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi	43	43	43	43	43	1,753.2	Pusat	Kemenristekdikti
Peningkatan Daya Tampung Politeknik Eksisting	Jumlah Politeknik yang Ditingkatkan Daya Tampungnya	10	43	43	43	43	600.0	Pusat	Kemenristekdikti
Penambahan Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU	Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU yang Ditambah	43	43	43	43	43	495.0	Pusat	Kemenristekdikti
Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	450	450	450	450	450	380.6	SMK kabupaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	Jumlah Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	2	2	2	2	2	4.6	Pusat	Kemenristekdikti
ProP : Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							3,872.3		
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	300	1000	1250	1500	1750	2,802.4		Kemdikbud
Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan/Skill Development Fund	Pengembangan pola pendanaan pelatihan	1	1	1	1	1	28.7	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang ditingkatkan kualitas mutu lembaga	1,513	1,500	1,500	1,500	1,500	378.3	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center	Jumlah pusat pengembangan keahlian	20	22	24	25	25	303.8	Pusat	Kementerian Ketenagakerjaan
Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan dalam rangka Penyusunan Inpres tentang Peta Jalan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	xxx						0.0		Kemenko Perekonomian
Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	xxx						0.0		Kemenko Perekonomian
Jumlah SKKNI berbasis okupasi dan KKNI yang disusun	xxx	20	21	22	23	24	47.9		Kementerian Perindustrian
LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat	xxx	20	21	22	23	24	12.0	Pusat	Kementerian Perindustrian
Assessor Kompetensi Pendidikan Non Formal	xxx	290	291	292	293	294	23.9		Kementerian Perindustrian
Bangunan/Gedung Pendidikan Menengah Kejuruan Vokasi Industri	xxx	2	2	2	2	2	179.5		Kementerian Perindustrian
SMK yang Link And Match dengan Industri	xxx	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	95.8		Kementerian Perindustrian
ProP : Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi							4,187.2		
Siswa SMK yang Tersertifikasi	Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi	128,000	130,000	135,000	140,000	145,000	346.1		Kemdikbud
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Jumlah yang tersertifikasi	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	454.0		Kementerian Pertanian
Tenaga kerja yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	382,083	400,000	400,000	400,000	425,000	2,069.8		Kementerian Ketenagakerjaan
Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI	Jumlah skema sertifikasi kualifikasi KKNI	50	50	50	50	50	15.4		Kementerian Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan)	xxx	34,000	34,001	34,002	34,003	34,004	1,232.9		Kementerian Perindustrian
Tenaga Kerja Industri yang Tersertifikasi	xxx	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	59.8		Kementerian Perindustrian
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi ASN KLHK	Jumlah ASN KLHK yang bersertifikasi kompetensi	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0.0		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi nonaparatur LHK	Jumlah nonaparatur LHK yang bersertifikasi kompetensi	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0.0		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	375	410	450	500	550	9.2	Pusat	Kemenristekdikti
KP : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Persentase Prodi per bidang ilmu yang dikembangkan di PT (Sains keteknikan : sosial humaniora)	44,8 : 55,2	46,1 : 53,9	47,4 : 52,6	48,7 : 51,3	50 : 50	11,383.6		
	Persentase Lulusan PT per bidang ilmu yang dikembangkan di PT (Sains keteknikan : sosial humaniora)	42 : 58	42,7 : 57,3	43,4 : 56,6	44,1 : 55,9	45 : 55			
	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja	70	72	75	77	80			
	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	14300	15730	17303	19033	20937			
	Jumlah sitasi di jurnal internasional	5760	6336	6969	7666	8433			
	Jumlah KI yang didaftarkan	3751	4502	5402	6482	7779			
ProP : Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan							190.1		
Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT	115	120	130	135	150	190.1		Kemenristekdikti
ProP : Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian							10,905.2		
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	1	1	1	1	1	20.0	Pusat	Kemenag
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	1	1	1	1	1	20.0	Pusat	Kemenag
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	3,700	3,800	3,900	4,000	4,100	2,614.0	Pusat	Kemenristekdikti
Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	Jumlah Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	1,022	1,100	1,200	1,300	1,400	880.0	Pusat	Kemenristekdikti
Penelitian	pusat Data Kekayaan Hayati dan Kekayaan Intelektual	13,000	14,000	14,500	15,000	15,500	6,029.0	Pusat	Kemenristekdikti
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk dipublikasikan	Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk dipublikasikan	1,200	3,750	3,900	4,250	4,500	62.5	Pusat	Kemenristekdikti
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	800	2,650	2,800	3,000	3,150	74.7	Pusat	Kemenristekdikti
Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri (Teaching Industry)	Jumlah Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri	11	11	11	11	11	750.0	Pusat	Kemenristekdikti
Penelitian pada PTKI	Penelitian pada PTKI	1	5	10	15	20	66.3	Pusat	Kemenag
Penelitian yang Bermutu	Penelitian yang Bermutu	150	150	150	150	150	25.0	Daerah	Kemenag
Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	35	35	35	35	35	10.7	Pusat	Kemenag
Penelitian yang berkualitas	Penelitian yang berkualitas	325	325	325	325	325	56.3	Pusat	Kemenag
Penelitian yang mendapat HAKI	Penelitian yang mendapat HAKI	5	5	5	5	5	1.0	Pusat	Kemenag
Penelitian Dosen yang bermutu	Penelitian Dosen yang bermutu	116	116	116	116	116	272.6	Pusat	Kemenag
Penelitian Mahasiswa yang bermutu	Penelitian Mahasiswa yang bermutu	150	150	150	150	150	3.1	Pusat	Kemenag
Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	Jumlah Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	1	1	1	1	1	20.0	Pusat	Kemenristekdikti
ProP : Peningkatan Kualitas Lulusan PT							288.4		
Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	150,000	200,000	250,000	300,000	350,000	150.0		Kemenristekdikti
LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	Jumlah LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	43	43	43	43	43	91.4		Kemenristekdikti
Lulusan yang tersertifikasi di bidang nuklir	Jumlah lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	96	68	107	96	96	33.6		BATAN
	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir	15	20	20	20	20	13.4		
KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	Peringkat Global Innovation Index	80-85	80-85	80-85	75-80	75-80	30,655.4		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah paten yang diberikan (resident)	900	925	950	975	1,000			
ProP : Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan							22,919.1		
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Aplikasi Sistem Riset dan Pengembangan	1	1	1	1	1	20.0	Pusat	Kemenristekdikti
	Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA (KOORDINATOR PRN)	1	2	2	2	1	35.0		LAPAN
	Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Dinamika Atmosfer Ekuator Untuk Keselamatan Transportasi, Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	3	3	3	3	3	95.0		LAPAN
	Data citra resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	3650000	3650000	3650000	3650000	3650000	199.6		LAPAN
	Space Map untuk Multi Sektor (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	4					2.0		LAPAN
	Mission System Pesawat Tanpa Awak MALE (ANGGOTA PRN PESAWAT MALE KOMBATAN)	1	1	1	1	1	248.5		LAPAN
	Pesawat N219 Amphibi (KOORDINATOR PRN)	1	1	1	1	1	250.1		LAPAN
	Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah (KOORDINATOR PRN)	1	1				275.6		LAPAN
	Prototipe roket beringkat 100 KM (KOORDINATOR PRN)	1	1	1	1	1	1,905.0		LAPAN
	Decision Support Tools (DST) berbasis Sains dan Teknologi Atmosfer untuk mendukung Smart Water Management System	-	3	3	3	3	100.5		LAPAN
	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat		1				5.5		BPPT
	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	3.8		BPPT
	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	110.8		BPPT
	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	1.5		BPPT
	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	1	1	1	1	-	1.0		BPPT
	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	1	1	1	1	1	8.5		BPPT
	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	1	1	1	1	1	173.7		BPPT
	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi	1	1	1	1	1	1.0		BPPT
	Inovasi Teknologi Produksi Pembibitan Hortikultura	1	1	1	1	1	17.5		BPPT
	Inovasi Bioteknologi untuk Pengembangan Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	17.3		BPPT

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>Uji Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai untuk mendukung Bidang Maritim dan Transportasi</i>	1	1	1	1	1	8.7		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Pangan untuk Mencegah Stunting</i>	1	1	1	1	1	13.4		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk e-Services (e-Government dan e-Business)</i>	1	1	1	1	1	24.6		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	4.1		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	2.5		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	2.8		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	83.4		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Propulsi Kendaraan Berbasis Listrik</i>	1	1	1	1	1	25.0		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan</i>	3	3	3	3	3	596.7		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan</i>	1	1	1	1	1	0.9		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases</i>	1	1	1	1	1	77.3		BPPT
	<i>Produk bidang Transportasi Perkeretaapian</i>	2	2	2	2	2	1,373.6		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Implan Tulang Titanium dan Gigi</i>	2	2	2	2	2	120.2		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Bangunan Tahan Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun dan Murah</i>	1	1	1	1	1	10.0		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Station</i>	1	1	1	1	1	11.4		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan</i>	1	1	1	1	1	1.1		BPPT
	<i>Inovasi teknologi produksi bahan baku obat herbal</i>	1	1	1	1	1	13.7		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan</i>	1	1	1	1	1	8.6		BPPT
	<i>Inovasi Pengembangan Teknologi Maritim</i>	1	1	1	1	1	4.2		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik</i>	1	1	1	1	1	2.5		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik</i>	5	5	5	5	5	5.0		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala kecil</i>	1	1	1	1	1	331.6		BPPT
	<i>Inovasi Teknologi Industri Perkapalan</i>	5	5	5	5	5	363.0		BPPT
	<i>Vaksin Rekombinan dan HPV</i>	2	2	2	2	2	79.0		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat</i>						14.0		LIPI
	<i>Obat Berbasis OHT dan Fitofarmaka</i>	4	4	4	4	4	109.0		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat Amoksilin</i>		1	1	1	1	98.6		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Hasil Pengembangan Biosimilar Insulin</i>						67.0		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Bioteknologi Modern dan teknologi pendukung VUB Padi produktivitas tinggi</i>		3	3	2	2	26.0		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Teknologi VUB jagung potensi hasil tinggi</i>		1	1	1	1	4.1		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Teknologi VUB Kedelai potensi hasil tinggi</i>		1	1	1	1	7.5		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Teknologi pemuliaan dan produksi benih cabai berproduksi tinggi</i>		2	2	1	1	19.0		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Perbanyak massal umbi bawang varietas unggul untuk penyediaan benih</i>		2	2	2	2	19.0		LIPI
	<i>Riset dan Inovasi Bioteknologi modern bibit sapi potong unggul</i>		1	2	0	0	18.8		LIPI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Riset dan Inovasi Bioteknologi modern untuk pembentukan galur ayam lokal unggul		1	1	1	1	2.8		LIPI
	Riset dan Inovasi Mikrostruktur Komponen Rumah Tahan Gempa dan Tahan Api		1	1			15.8		LIPI
	Hasil Penelitian tentang Perubahan Masyarakat dalam Revolusi Digital	1	3	3	3	3	43.0		LIPI
	Hasil Penelitian tentang Penguatan Demokrasi Indonesia		1	1	1	1	12.0		LIPI
	Hasil Penelitian tentang Penguatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Nasional	1	3	3	3	3	43.0		LIPI
	Hasil Penelitian tentang Pengembangan Risk Culture Melalui Peningkatan Pengetahuan Kebencanaan yang Terintegrasi		1	1	1	1	12.0		LIPI
	Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Teknik	31	7	6	6	6	853.2		LIPI
	Radar Pertahanan Udara Nasional			1	1	1	36.0		LIPI
	Baterai Lithium Berlisensi Indonesia			1	1	1	44.0		LIPI
	Inovasi Teknologi Katalis Isomarisasi Untuk Produksi Greenfuel		1	1	1	1	16.0		LIPI
	Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumian untuk Ekosistem Perairan Darat dan Laut	5					13.1		LIPI
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Penguatan Riset Samudra Nasional	1	1	1	1	0	102.2		LIPI
	Model pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk mendukung tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs)	19	2	2	2	2	25.0		LAPAN
	Layanan Pengguna Bidang Pemanfaatan Penginderaan Jauh	100	3	3	3	3	29.8		LAPAN
	Satelit Mikro LAPAN-A4	1					1.0		LAPAN
	Riset dan Inovasi, ruang laut serta Sumberdaya samudra nasional - Blue Economy	4	4	4	4	4	425.0		LIPI
	Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary Ecoregion		2	2	2	2	84.0		LIPI
	Hasil Kajian Pembangunan Energi Listrik Tenaga Nuklir yang Berdaya Saing, Inklusif, dan BerkelaJutan Bagi Masyarakat di Indonesia		1	1	1	1	12.0		LIPI
	Core Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project	5	5		0	0	275.0		LIPI
	Konservasi & Manajemen Pengelolaan SDA: Perencanaan Pemanfaatan Ruang DAS Berbasis Integritas Fungsi Ekosistem Sungai untuk Mendukung Pembangunan Daerah		1	1	1	1	26.0		LIPI
	Teknologi Konservasi DAS : Decision Support System (DSS) & Konsep Pengelolaan untuk Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai (DAS)		1	1	1	1	42.0		LIPI
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pasca bencana	Produk Litbangnya Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	9	9	9	9	9	10.0		LAPAN
	Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot	1	1	1	1	1	15.0		LAPAN
	Informasi cuaca antariksa	3	3	3	3	3	47.9		LAPAN
	Konservasi dan Teknologi Pemanfaatan SDA : Daerah Aliran Sungai, Sungai, dan Danau	2	2	2	2	2	86.0		LIPI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Tersedianya Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (detektor radiasi yang beroperasi dan terintegrasi)	4	15	15	15	15	114.7		BAPETEN
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	1	1	1	1		14.1		BPPT
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	1	1	1	1	1	215.9		BPPT
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	2	2	2			7.1		BPPT
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	1	1	1	1	1	4.6		BPPT
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	5	5	5	5	5	135.5		BPPT
	Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (Ina-TEWS)	3		16	16	16	26.5		LIPI
	Inovasi Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana	1	1	1	1	1	2,250.0		BPPT
	Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel	1	1	1	1	1	10.0		BPPT
	Uji Teknologi dan Armada untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Rawan Bencana	4	4	4	4	4	101.0		BPPT
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	4	4	4	4	4	23.7		BPPT
	Pengadaan armada pendukung modifikasi Cuaca dan Peralatannya						360.0		BPPT
	Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebunian dan Kelautan untuk Kajian Potensi Bencana	3					4.1		LIPI
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai							0.0	Prov Banten	
	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang intek nuklir						0.0		
	Prototipe RF Radiosinovektori		1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Prototipe	4.2	Prov Banten	BATAN
	Prototipe Senyawa Bertanda untuk Diagnosis Spesifik Toksoplasmosis	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Prototipe	29.1		BATAN
	Prototipe Pengolahan Logam Tanah Jarang REOH (Ce, La, Nd, Pr, Sm)	-	1	1	1	1	3.4	DIY	BATAN
	Prototipe Pengolahan Logam Tanah Jarang dari Pasir Senotim (Y, Gd, Dy)	-	1	1	1	1	9.8	DIY	BATAN
	Prototipe Teknologi Pengujian dan Diagnosis Performa Unit Proses Industri	-	1	1	1	1	4.2	Pusat	BATAN
	Prototipe Sistem Pencitraan Komponen Proses Industri dengan Menggunakan Sumber Radiasi Gamma	-	11	1	1	1	7.0	Prov Banten	BATAN
	Roket Pemanfaatan Khusus	3					9.0	Pusat	LAPAN, Kementerian Pertahanan, BPPT
	Teknologi Operasi Terbang dan Diseminasi	2	2	2	2	2	5.0		LAPAN
	Litbangnya pesawat LAPAN Surveilance UAV (LSU)	-	-	-	-	-	0.0		LAPAN
	Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan Khusus	2					5.0		LAPAN
	Hasil pengembangan dan aplikasi alat kesehatan: clip anuarsima untuk implan bedah otak, implan tulang, dan karteter diaagnostik jantung	3	3	3	3	3	147.0		LIPI
	Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan Multimedia yang Terdiseminasi kepada Stakeholder	1	1	1	1	1	11.5		LIPI
	Hasil Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional		3	3	3	3	32.0		LIPI
	Repositori ilmiah nasional (RIN)	-	-	-	-	-	29.0		LIPI
	Inovasi Teknologi Hidrodinamika Bidang Maritim	3	3	3	3	3	29.5		BPPT
	Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara	21	4	5	5	7	735.0		LIPI
	Teknologi Kendaraan Listrik	1	1	1	1	1	873.0		LIPI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	1					315.0		LIPI
	Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka untuk Diagnosis dan Terapi	5					51.7		BATAN
Penelitian Flagship Riset Nasional	Penelitian Flagship Riset Nasional	22	43	43	43	43	2,100.0	Pusat	Kemenristekdikti
	Penelitian Inisiatif Sistem Inovasi Nasional	260	260	260	260	260	405.2		Kemenristekdikti
	Penelitian Pengembangan Teknologi Industri	24	50	60	70	80	316.4		Kemenristekdikti
	Hasil Penelitian Flagship Riset Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati	18	19	19	15	17	3,019.0		LIPI
	Hasil Penelitian Flagship Riset Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik	7	7	6	6	6	1,284.0		LIPI
	Hasil Penelitian Flagship Riset Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial	8	11	11	11	11	261.0		LIPI
	Hasil Penelitian Flagship Riset Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian	5	5	-	-	-	526.1		LIPI
	Hasil Penelitian Flagship Riset Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi Terapan	18					11.9		LIPI
	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur						138.5		BPPT
ProP : Pengembangan Research Power-House							5,176.3		
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek							0.0		
	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju keparahan bidang iptek nuklir	15	20	20	20	20	13.4	Pusat	BATAN
	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa DN	400	450	450	450	450	192.0	Pusat	Kemenristekdikti
	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa LN	250	200	230	260	260	470.5	Pusat	Kemenristekdikti
	Program Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis	220	240	300	350	500	176.9		LIPI
	Jumlah Perekayasa yang mendapatkan Beasiswa S3	103	103	103	103	103	115.7		BPPT
	Jumlah Perekayasa yang mendapatkan Beasiswa S2	54	54	54	54	54	0.0		
	Program Pembinaan Pejabat Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa						3.4		BPPT
	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM IPTEK	-	-	-	-	-	0.0		LAPAN
	Manajemen Talenta SDM Iptek						30.0		LIPI
	Kajian Kebijakan, Inovasi, Standar, TIK, Manajemen	-	-	-	-	-	0.0		LAPAN
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	Jumlah Lembaga Litbang Yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	138	138	138	138	138	225.0	Pusat	Kemenristekdikti
	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang Ditetapkan	114	120	126	131	138	184.0	Pusat	Kemenristekdikti
Penjaminan mutu Pranata Litbang	Jumlah Pranata Litbang yang Terakreditasi	55	60	65	70	75	20.0	Pusat	Kemenristekdikti
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Akselerator Elektron Energi Tinggi 10 MeV					1	200.0	Prov Banten	BATAN
	Pengembangan Sistem Pemantauan Radiasi Lingkungan	1					11.0		BATAN
	Pengembangan PLTN Skala Industri	1					75.0		BATAN
	Pemeliharaan, Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Keselamatan Pendukung Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka	1					34.8		BATAN
	Infrastruktur Produktif Cibinong Science and Technology Park (C-STP)	1					100.0	Kab. Bogor (Cibinong STP)	LIPI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual</i>	1	1	1			497.2	<i>Kab. Bogor (Cibinong STP)</i>	<i>LIPI</i>
	<i>Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi</i>	1	1				259.0	<i>Kab. Bogor (Cibinong STP)</i>	<i>LIPI</i>
	<i>Laboratorium proses dan pendukungnya untuk pangan tradisional yang berstandar current Good Manufacturing Practices (c-GMP)</i>	1					145.0	<i>Kab. Gunung Kidul, DI Yogyakarta</i>	<i>LIPI</i>
	<i>Fasilitas Lab. Instrumentasi Otomasi Agricultural Industri Mendukung Indonesia 4.0</i>		1				66.0	<i>Kab. Bogor (Cibinong STP)</i>	<i>LIPI</i>
	<i>Teknologi Pengemasan Makanan Olahan</i>	2	2	2	2	2	67.0	<i>Kota Bandung</i>	<i>LIPI</i>
	<i>Analytical Bioresources Integrated Laboratorium</i>		1				80.0	<i>Kab. Bogor (Cibinong STP)</i>	<i>LIPI</i>
	<i>Fasilitas kawasan geodiversitas Indonesia - Karang Sambung</i>		1	0	0	0	78.0		<i>LIPI</i>
	<i>Infrastruktur Iptek Strategis LIPI</i>			2	2	2	914.0		<i>LIPI</i>
	<i>Peningkatan Mutu infrastruktur riset sensor optoelektronik</i>			1			70.0	<i>Provinsi Banten</i>	<i>LIPI</i>
	<i>Bandar Antariksa Skala Kecil</i>	-	-	-	-	-	0.0		<i>LAPAN</i>
	<i>Penguatan Sistem Bank Data Penginderaan Jauh Nasional</i>	-	-	-	-	-	0.0		<i>LAPAN</i>
	<i>Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional</i>	-	4	4			270.0		<i>LAPAN</i>
	<i>Observatorium Nasional (Obsnas) di NTT</i>	1		-	-	-	164.5		<i>LAPAN</i>
	<i>Pembangunan Laboratorium Pengujian Komponen Pesawat Udara Berdasarkan Standar Internasional DO-160</i>	1	-	-	-	-	125.0		<i>LAPAN</i>
	<i>Laboratorium Terbang Nasional</i>	-	1	-	-	-	120.0		<i>LAPAN</i>
	<i>Laboratorium Observasi Atmosfer Maritim (Pameungpeuk Garut)</i>	-	1	-	-	-	0.0		<i>LAPAN</i>
<i>Perguruan Tinggi yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek</i>	<i>Jumlah Perguruan Tinggi yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek</i>	28	28	28	28	28	100.0	<i>Pusat</i>	<i>Kemenristekdikti</i>
<i>Lembaga litbang yang dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek</i>	<i>Jumlah Lembaga litbang yang dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek</i>	100	110	120	130	140	369.0	<i>Pusat</i>	<i>Kemenristekdikti</i>
ProP : Penciptaan ekosistem inovasi							2,552.0		
<i>Implementasi RIRN dan ARN</i>	<i>Infrastruktur STP Berbasis PT/LPNK Iptek Eksisting Yang Dikembangkan</i>	5	5	5	5	5	750.0	<i>Pusat</i>	<i>Kemenristekdikti</i>
	<i>Inkubator pada STP Eksisting yang Fungsional</i>	18	18	18	18	18	50.0	<i>Pusat</i>	<i>Kemenristekdikti</i>
<i>Peningkatan jumlah paten yang didaftarkan (resident)</i>	<i>Usulan kekayaan intelektual bidang iptek nuklir</i>	7	7	7	7	7	3.5	<i>Pusat</i>	<i>BATAN</i>
	<i>Strategi Penciptaan Ekosistem Inovasi indonesia</i>	2	2	2	2	2	25.0		<i>LIPI</i>
<i>Pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)</i>	<i>Inkubasi Bisnis Produk Iptek Nuklir</i>	3 Calon, 1 PPBT	8.5	<i>Pusat</i>	<i>BATAN</i>				
	<i>Penciptaan Perusahaan Perintis Berbasis Teknologi (PPBT) Hasil Litbang LIPI</i>	25	25	25	30	30	61.0		<i>LIPI</i>
<i>Produk Inovasi Litbang di Industri</i>	<i>Jumlah Produk Inovasi Litbang di Industri</i>	60	65	70	75	80	394.5	<i>Pusat</i>	<i>Kemenristekdikti</i>
<i>Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan</i>	<i>Jumlah Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan</i>	7	7	7	7	7	22.0	<i>Pusat</i>	<i>Kemenristekdikti</i>
<i>Taman Sains dan Teknologi yang dikembangkan</i>	<i>Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dikembangkan</i>	18	19	20	21	22	628.0	<i>Pusat</i>	<i>Kemenristekdikti</i>
	<i>Pengembangan STP Cibinong</i>						0.0		<i>LIPI</i>
<i>Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi</i>	<i>Jumlah Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi</i>	297	250	250	250	250	605.5	<i>Pusat</i>	<i>Kemenristekdikti</i>
<i>Klaster Inovasi</i>	<i>Jumlah klaster inovasi sebagai wahana kolaborasi N-Helix</i>	4	5	5	5	5	4.0		<i>Kemenristekdikti</i>
ProP : Peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang							8.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penguatan basis data riset/litbang industri melalui pelaksanaan survei belanja litbang industri	Percentase industri manufaktur yang terpetakan data belanja riset/litbangnya (persen)		80	90	100	100	0.0	Pusat	Kemenristek/BRIN
Fasilitasi platform kolaborasi multisumber pendanaan	Percentase kontribusi matching grant non APBN dalam pelaksanaan litbang di Kemenristek/BRIN						0.0		
Fasilitasi forum pendanaan inovasi (pitching)	Jumlah start-up teknologi yang mendapatkan dukungan pendanaan non APBN dari fasilitasi forum pendanaan inovasi		10	10	10	10	4.0		Kemenristek/BRIN
Optimalisasi pemanfaatan hasil Dana Abadi Penelitian	Percentase hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Intek		25	50	75	100	4.0	Pusat	Kemenristek/BRIN
KP : Prestasi Olahraga	Percentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	meningkat	35.40	meningkat	meningkat	40	3,256.1		
	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	2	N/A	N/A	N/A	3			
	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	1	N/A	N/A	N/A	3			
	Peringkat pada Asian Games	N/A	N/A	5	N/A	N/A			
	Peringkat pada Asian Para Games	N/A	N/A	4 s/d 6	N/A	N/A			
ProP : Pengembangan budaya olahraga							204.9		
Tersampaikannya kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasarakan	Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasarakan	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	25.1	Pusat	Kemendesa/PKBL
Tersampaikannya kampanye olahraga olimpik di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Nonformal dan Informal	Jumlah peserta olahraga olimpik yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17.5	Pusat	Kemendesa/PKBL
Tersampaikannya kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata	Jumlah peserta kampanye olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata	14,020	14,020	14,020	14,020	14,020	140.9	Pusat	Kemendesa/PKBL
Terfasilitasinya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi	3	3	3	3	3	21.4	Pusat	Kemendesa/PKBL
ProP : Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade							2,506.2		
Meningkatnya peserta PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan di daerah	Jumlah peserta PPLP/PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Di Daerah	1381	1381	1381	1381	1381	623.0	Pusat	Kemendesa/PKBL
Meningkatnya kualitas pengelolaan sentra keolahragaan dan sekolah khusus keolahragaan	Jumlah peserta olahraga di sekolah khusus keolahragaan	253	253	253	253	253	225.5	Pusat	Kemendesa/PKBL
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/atau multi event)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/atau multi event)	44	44	44	44	44	50.7	Pusat	Kemendesa/PKBL
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional (PON, Peparnas)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional (PON, Peparnas)	2	N/A	N/A	N/A	2	676.1	Pusat	Kemendesa/PKBL
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional (Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, SEA Games, ASEAN Para Games)	3	2	2	2	2	868.9	Pusat	Kemendesa/PKBL
Terfasilitasinya penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/atau multi event)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/atau multi event)	62	62	62	62	62	62.0	Pusat	Kemendesa/PKBL

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Penataan kelembagaan olahraga							24.2		
Terfasilitasinya pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpik, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	Jumlah pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpik, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	17	17	17	17	17	24.2	Pusat	Kemenpora
ProP : Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional							162.6		
Terfasilitasinya pengelola organisasi keolahragaan olimpik dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	Jumlah pengelola organisasi keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	29.6	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya pelatih dan instruktur dalam pengembangan tenaga keolahragaan	Jumlah pelatih dan instruktur yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	19.7	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya wasit dan juri cabang olahraga olimpik dalam pengembangan tenaga keolahragaan	Jumlah wasit dan juri cabang olahraga olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	19.7	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya tenaga keolahragaan olimpik dalam pengembangan tenaga keolahragaan di daerah	Jumlah tenaga keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan di daerah	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	93.5	Pusat	Kemenpora
ProP : Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional							329.6		
Terfasilitasinya bantuan untuk Prasarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	Jumlah fasilitasi prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	29	29	29	29	29	64.8	Pusat	Kemenpora
Terfasilitasinya bantuan untuk Sarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	59	58	58	58	58	264.8	Pusat	Kemenpora
ProP : Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan							28.6		
Tersusunnya Naskah Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang dapat dimanfaatkan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0.4	Pusat	Kemenpora
Terlaksananya Koordinasi dan Kemitraan Keolahragaan dengan Lembaga Lintas Sektoral, Antar Tingkat Pemerintah Daerah dan Luar Negeri	Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	10	10	10	10	10	28.2	Pusat	Kemenpora
JUMLAH							1,714,557.4		

MATRIKS PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2020 - 2024



MATRIK PEMBANGUNAN RANCANGAN RPJMN 2020-2024

PRIORITAS NASIONAL : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER	Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	72,84 (2018)	↑	↑	↑	↑	2,955.7		
KP : Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti							876.0		
ProP : Pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (bullying free school environment)							808.4		
Penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan	Siswa sekolah menengah pertama Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	4056	4056	4056	4056	4056	54.5		Kemdikbud
	Siswa sekolah dasar Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	2570	2570	2570	2570	2570	133.6		Kemdikbud
	Siswa pendidikan dan layanan khusus Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	500	500	500	500	500	34.2		Kemdikbud
	Siswa sekolah menengah atas Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	9414	9414	9414	9414	9414	237.7		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>Sekolah menengah kejuruan yang mendapatkan Pendidikan Karakter Kerja dan Pembinaan Minat Bakat</i>	1000	1000	1000	1000	1000	125.0		Kemdikbud
	<i>Sekolah yang menerapkan pendidikan karakter bangsa</i>	395	395	395	395	395	127.7		Kemdikbud
Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	Anak Remaja Mengikuti Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	20000	20000	20000	20000	20000	95.7		Kemdikbud
ProP : Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan							0.0		
Penguatan pendidikan agama di satuan pendidikan	Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	35	35	35	35	35	0.0		Kemenag
	<i>Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu</i>	100	100	100	100	100	0.0		Kemenag
	<i>Guru PAI yang meningkat kompetensinya</i>	5000	5000	5000	5000	5000	0.0		Kemenag
	<i>Sarana media dan sumber belajar PAI</i>	50	50	50	50	50	0.0		Kemenag

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>Kelembagaan Pendidikan Agama Islam yang bermutu</i>	100	100	100	100	100	0.0		Kemenag
	<i>Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya</i>	3003	3003	3003	3003	3003	0.0		Kemenag
	<i>Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya</i>	80	80	80	80	80	0.0		Kemenag
	<i>Sertifikasi Guru Agama Hindu</i>	300	300	300	300	300	0.0		Kemenag
	<i>Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya</i>	1900	1900	1900	1900	1900	0.0		Kemenag
	<i>Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan</i>	1245	1245	1245	1245	1245	0.0		Kemenag
ProP : Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan							67.6		
Penguatan pendidikan pramuka	<i>Organisasi kepramukaan (Kwarnas/Saka/Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi</i>	1800	1800	1800	1800	1800	16.9		Kemnpora

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyelenggaraan pembinaan pemuda berbakat, berkarya dan berinovasi	Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	17	17	17	17	17	50.7		Kemenpora
Penguatan penyelenggaran KKN Revolusi Mental							0.0		
KP : Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif							25.7		
ProP : Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya							2.4		
Tingkat mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal di PTSP Pusat	Tingkat mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal di PTSP Pusat						0.0		BKPM
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50	50	50	50	0.8	Pusat/Daerah	KemenPANRB
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Intansi di Wilayah II yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50	50	50	50	0.8	Pusat/Daerah	KemenPANRB
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Intansi di Wilayah III yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50	50	50	50	0.8	Pusat/Daerah	KemenPANRB

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi							23.3		
Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan peraturan perundangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun	Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS	25	25	25	25	25	0.5	Pusat	BKN
Penyelesaian dan Penyelidikan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	Jumlah rekomendasi penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku yang ditindaklanjuti	180	150	150	150	150 i	19.3	Pusat	KASN
Penegakan disiplin SDM Aparatur	Jumlah Instansi Pemerintah yang melakukan penegakan disiplin ASN	60	60	80	100	100	3.5	Pusat	KemenPAN RB
KP : Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini							410.4		
ProP : penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup							60.7		
Peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	72	73	74	75	76	30.3		BKKBN
Pengembangan karakter remaja	indeks karakter remaja	66	67	68	69	70	30.3		BKKBN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan bimbingan perkawinan pra nikah	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	250000	250000	250000	250000	250000	0.0		Kementerian Agama
	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan keluarga kristiani	35	35	35	35	35	0.0		Kementerian Agama
	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan keluarga bahagia	5000	5000	5000	5000	5000	0.0		Kementerian Agama
	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan keluarga sukinah	1559	1559	1559	1559	1559	0.0		Kementerian Agama
	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan keluarga Hittasukhaya	32	32	32	32	32	0.0		Kementerian Agama
ProP : peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga							341.9		
Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	Percentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	50	51	52	53	54	150.1		BKKBN
Pemberdayaan keluarga rentan	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS (pusat pelayanan keluarga sejahtera)	55000	56000	57000	58000	59000	56.7		BKKBN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga berwirausaha	11	11	12	12	13	129.2		BKKBN
Perluasan Provinsi yang mendapatkan pelatihan pengasuhan berbasis anak	Jumlah Provinsi yang Mendapatkan Pelatihan Pengasuhan Berbasis Hak Anak	3	3	3	3	4	5.9		KPPPA
Perluasan Pasangan Keluarga Sakinah yang Terbina	Jumlah Pasangan Keluarga Sakinah yang Terbina	7000	7000	7000	7000	7000	0.0		Kemeneg
ProP : Pewujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha							7.9		
Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Lingkungan Ramah Anak	Jumlah Provinsi yang mendapatkan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Lingkungan Ramah Anak	2	2	2	2	3	7.9		KPPPA
KP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental							348.9		
ProP : Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu							332.9		
Penguatan Gerakan Indonesia Melayani untuk Pelayanan Publik Prima							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia (%)	76	71	66	61	56	18.0		Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	20	25	30	35	40	15.0		Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah TPS 3R yang berfungsi dengan baik	15	20	25	30	35	15.0		Kemenko Kemaritiman dan Investasi
	Percentase pengurangan sampah nasional	7	12	17	22	27	18.0		Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah partisipasi semua pihak dalam aksi publik, edukasi, dan pendampingan terkait hidup bersih dan sehat	16	20	24	30	34	18.0		Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Peningkatan dan penyempurnaan peraturan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah peraturan perundungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait perilaku hidup bersih dan sehat	9	14	19	24	29	15.0		Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Penguatan perilaku tertib di ruang publik melalui Gerakan Indonesia Tertib	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Tertib	3	3	3	3	3	11.5		Kemenko Polhukhankam
Penguatan sinergi program peningkatan pendapatan melalui Gerakan Indonesia Mandiri							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	34	34	34	34	34	12.5		Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan komite nasional Revolusi Mental di tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK							0.0		
Perluasan diseminasi GNRM pada Masyarakat	Jumlah Layanan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1	1	1	1	1	148.4	Pusat	Kemenko PMK
Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	49	49	49	49	49	45.8	Pusat	Kemenko PMK
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	1	1	1	1	1	15.8	Pusat	Kemenko PMK
ProP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah							15.9		
Pembentukan dan penguatan agen-agen perubahan di tingkat desa							0.0		
Pembentukan ikon-ikon pelayanan publik di tingkat Kabupaten/Kota sebagai garda terdepan pelayanan dasar prima							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penguatan sekolah dasar sebagai pusat persemaian nilai Pancasila dan kader Revolusi Mental							0.0		
Pembentukan sekretariat/pokja di tingkat daerah yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK							0.0		
Jumlah daerah yang melaksanakan gerakan Revolusi Mental (Indonesia Tertib)	Jumlah daerah yang melaksanakan gerakan Revolusi Mental (Indonesia Tertib)	34	34	34	34	34	15.9	Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP : Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila							40.1		
ProP : Membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif							0.0		
Pembudayaan sinergi koperasi dalam UMKM dan usaha besar dalam peningkatan taraf hidup petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil di kabupaten/kota dan desa							0.0		
Pembudayaan sinergi koperasi dalam UMKM dan usaha besar untuk meningkatkan posisi tawar secara nasional							0.0		
Pengembangan pola kepemilikan dan bagi hasil dalam aktivitas sistem usaha tani, nelayan, buruh, pedagang kecil yang adil							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kaderisasi pendamping/penyuluhan untuk memperkuat pembentukan platform koperasi di tingkat kabupaten/kota dan desa							0.0		
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	3360	3360	3360	3360	3360	0.0	Pusat	Kemen KUKM
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	3360	3360	3360	3360	3360	0.0	Pusat	Kemen KUKM
ProP : Peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong							15.2		
Pengembangan produk-produk potensi lokal melalui pelatihan inovasi dan kreativitas pemuda, kelompok usaha, dan masyarakat							0.0		
Peningkatan etos kerja, budaya kewirausahaan berlandaskan gotong royong, dan wawasan kebangsaan terhadap pelaku UMKM lokal desa							0.0		
Institusionalisasi dan pengelolaan CSR, LSM, kewirausahaan sosial (sociopreneur), dan konsultan akademis yang bergerak dalam bidang kewirausahaan rakyat							0.0		
Memperkokoh integrasi sosial dan mengembangkan ekonomi lokal melalui objek pemajuan kebudayaan							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Jumlah Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan	2000	2000	2000	2000	2000	15.2	Pusat	Kemen KUKM
ProP : Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri							24.9		
Penguatan pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)							0.0		
Pemberdayaan Key Opinion Leader (KOL) untuk menggalakkan perilaku konsumsi cerdas dan penggunaan produk Indonesia							0.0		
Pembentukan 20 dan atau people market place model pasar rakyat sebagai pusat-pusat gerakan perubahan di masyarakat							0.0		
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi (brand activation) produk dalam negeri di pusat aktivitas publik							0.0		
Peningkatan pemberian label dan standarisasi terhadap produk dalam negeri							0.0		
Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	6500	6500	6500	6500	6500	21.4	Pusat	Kemendag

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Jumlah pelaku usaha yang dibina	Jumlah pelaku usaha yang dibina	500	500	500	500	500	3.4	Pusat	Kemendag
KP : Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme							1,254.6		
ProP : Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara							1,232.1		
Standardisasi kurikulum pendidikan Pancasila dan penguatan pendidikan Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	3	3	3	3	25.0	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
	Percentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0.0	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	3	3	3	3	3	22.5	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
	Percentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0.0	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	3	3	3	3	22.5	Pusat	Program Pembinaan Ideologi Pancasila

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan</i>	100	100	100	100	100	0.0	Pusat	Program Pembinaan Ideologi Pancasila
	<i>Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan</i>	3	3	3	3	3	47.0	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
	<i>Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan</i>	100	100	100	100	100	0.0	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
	<i>Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan</i>	100	100	100	100	100	0.0	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Penguatan ketahanan nasional	<i>Jumlah Kegiatan rembuk/sarasehan bela negara yang dihadiri oleh seluruh pimpinan K/L/D</i>	1	1	1	1	1	6.0	Pusat	Dewan Ketahanan Nasional
	<i>Jumlah Kegiatan munas bela negara yang dihadiri oleh seluruh K/L/D</i>	1	1	1	1	1	5.3	Pusat	Dewan Ketahanan Nasional
	<i>Jumlah instruktur tingkat nasional (Kader Wisesa) pada tiap K/L dan Pemda</i>	70	100	100	100	100	59.5	Pusat	Dewan Ketahanan Nasional
	<i>Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi bela negara</i>	4	4	4	4	4	17.5	Pusat	Dewan Ketahanan Nasional

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	0	1200	1200	1200	1200	97.3	Pusat dan Daerah	Lembaga Ketahanan Nasional
	Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	0	1200	1200	1200	1200	108.0	Pusat dan Daerah	Lembaga Ketahanan Nasional
	Terselenggaranya Sosialisasi/Dialog Wawasan Kebangsaan	190	800	800	800	800	50.1	Pusat dan Daerah	Lembaga Ketahanan Nasional
Pengembangan bela negara	Jumlah Kader Bela Negara yang memiliki Nilai-Nilai Bela Negara	42700	43000	43000	43000	43000	697.6	Pusat	Kementerian Pertahanan
	Jumlah Keterlibatan Warga Negara dalam Upaya Bela Negara	875	875	875	875	875	64.9	Pusat	Polri
Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	15	16	17	18	19	9.0	Daerah	Kementerian Dalam Negeri
ProP : Peningkatkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)							0.0		
Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa							0.0		
ProP : Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.							22.5		
Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	Jumlah dokumen rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan	3	3	3	3	3	22.5	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
	Percentase penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila	100	100	100	100	100	0.0	Pusat	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
ProP : Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara							0.0		
Evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara							0.0		
Evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara							0.0		
Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila							0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA	Nilai Dimensi Warisan Budaya	41,11 (2018)	↑	↑	↑	↑	6,553.5		
	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	30,55 (2018)	↑	↑	↑	↑			
	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	36,57 (2018)	↑	↑	↑	↑			
KP : Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal							1,097.2		
ProP : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	347	347	347	347	347	234.0		
Penguatan integrasikan Kebudayaan pada proses pembelajaran	Percentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapatkan proses pembelajaran	30.5	31	33	35	37	234.0	Pusat	Kemdikbud
ProP : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	Jumlah pemanfaat Museum Nasional, Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional	3361587	3361587	3361587	3361587	3361587	577.3		
Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri	Percentase museum yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	75	76	77	78	79	59.1		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Presentase koleksi museum yang dipamerkan (terhadap total koleksi)	45	49	52	53	57	75.6		Kemdikbud
	Jumlah kunjungan museum	1861792	1861792	1861792	1861792	1861792	170.0		Kemdikbud
	Jumlah kunjungan Galeri	1200472	1200472	1200472	1200472	1200472	75.0		Kemdikbud
	Jumlah Kunjungan Cagar budaya	987000	987000	987000	987000	987000	140.0		Kemdikbud
Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	254650	280110	308145	338945	372835	37.7	Pusat/Daerah	ANRI
	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	10120	10120	10120	10120	10120	19.8	Pusat/Daerah	ANRI
ProP : Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa							285.9		
Pengembangan dan pemanfaatan naskah kuno	Jumlah alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno dan budaya etnis nusantara	50	150	200	250	300	84.3	Jakarta (Pusat)	Perpustakaan Nasional RI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi	34765	34765	34765	34765	34765	24.0	Pusat	Perpustakaan Nasional RI
	Jumlah alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno	39750	39750	39750	39750	39750	34.0	Pusat	Perpustakaan Nasional RI
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	122851	293730	323823	356845	392970	58.6	Pusat/Daerah	ANRI
	Jumlah manuskrip yang diinventarisasi, dikaji dan dimanfaatkan	347	347	347	347	347	85.0		Kemdikbud
KP : Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat							1,167.5		
ProP : Pengembangan produk seni, budaya, dan film							511.9		
Peningkatan pemanfaatan produk seni	Jumlah produksi film, musik dan media baru yang didukung	30	35	40	45	50	378.0	Pusat	Kemdikbud
	Prosentase izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang diterbitkan	35	37	37	37	37	46.5	Pusat	Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Prosentase inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan yang didukung	45	47	47	47	47	47.4	Pusat	Kemdikbud
	Prosentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikaji dan dipetakan	20	20	20	20	8	40.0	Pusat	Kemdikbud
ProP : Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	Jumlah even/festival/caravan seni budaya yang dilaksanakan	10	10	10	10	10	276.5		
Peningkatan penyelenggaraan festival budaya	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	218	230	231	239	238	276.5		Kemdikbud
ProP : Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat							287.2		
Peningkatan pengelolaan cagar budaya	Percentase Cagar Budaya yang ditetapkan (terhadap yang terdaftar)	15	15	15	15	15	69.5		Kemdikbud
	Percentase Cagar Budaya yang dikembangkan (terhadap yang dilindungi)	34	37	40	43	45	217.7		Kemdikbud
	Jumlah Kunjungan Cagar budaya	987000	987000	987000	987000	987000	0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim							91.9		
Penyusunan kebijakan seni dan budaya bahari	Jumlah bahan kebijakan seni dan budaya bahari yang dihasilkan	7	7	7	7	7	21.9	Pusat	Kemenko Bidang Kemaritiman
Fasilitasi komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	5	12	18	24	30	30.0	7 provinsi	KKP
Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya maritim	Jumlah kekayaan budaya maritim yang dikembangkan atau dimanfaatkan	5	5	5	5	5	40.0		Kemdikbud
KP : Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif							3,483.8		
ProP : Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup							3,328.8		
Pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	30	40	45	45	45	114.5		Kemdikbud
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	Tersedianya data potensi konflik	48	55	60	65	70	47.3	Daerah	KLHK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Diterbitkannya SK Penetapan Hutan Adat	20	25	30	35	40	22.5	Pusat	KLHK
	SK Kelompok Usaha Perhutanan Sozial (SK KUPS) dan RKU/RPH/RKT	1000	1500	2000	2500	3000	305.0	Daerah	KLHK
	Diterbitkannya SK Penetapan Hutan Adat	20	25	30	35	40	25.0	Daerah	KLHK
	SK Kelompok Usaha Perhutanan Sozial (SK KUPS) dan RKU/RPH/RKT	1000	1500	2000	2500	3000	305.0	Daerah	KLHK
	Berita acara serah terima bantuan ekonomi produktif	1393	1500	2000	2500	3000	634.2	Pusat	KLHK
	Meningkatnya kinerja kelompok usaha Perhutanan Sosial	200	400	600	800	1000	600.0	Daerah	KLHK
	Jumlah mitra pendamping Perhutanan Sosial	50	100	150	200	250	136.8	Pusat	KLHK
	Tersedianya pendamping dalam pengembangan Perhutanan Sosial	2500	3000	3500	4000	4500	887.5	Pusat	KLHK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat	Jumlah provinsi yang dilaksanakan sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat	34	34	34	34	34	251.1	Pusat	Kementerian ATR/BPN
ProP : Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya							100.0		
Peningkatan dukungan terhadap komunitas adat dan penghayat kepercayaan	Prosentase komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	56	56	56	56	56	100.0		Kemdikbud
ProP : Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta							55.0		
Inventarisasi kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya	Prosentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya yang diinventarisasi	57	57	57	57	57	50.0		Kemdikbud
Pengembangan sistem dan data kekayaan intelektual komunal	Jumlah data KI komunal	120	120	120	120	120	5.0	Pusat	Kemenkumham
KP : Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia							185.0		
ProP : Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara							115.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penguatan diplomasi kebudayaan	Jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia yang dikirim	300	300	300	300	300	85.0		Kemdikbud
Penguatan diplomasi kebudayaan	Jumlah forum kebudayaan internasional yang diintervensi	10	10	10	10	10	30.0		Kemdikbud
ProP : penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri							70.0		
Penguatan kegiatan kebudayaan di luar negeri	Prosentase Diaspora Indonesia yang terlibat dalam kegiatan budaya Indonesia di Luar Negeri	60	60	60	60	60	50.0		Kemdikbud
	Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang memiliki program kebudayaan dan dikelola secara berkelanjutan	8	8	8	8	8	20.0		Kemdikbud
KP : Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan							620.0		
ProP : Pengelolaan dana perwalian kebudayaan							255.0		
Peningkatan fasilitasi melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	Jumlah fasilitasi yang diberikan melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	189	189	189	189	189	255.0		Kemendikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan							95.0		
Pengembangan SDM bidang kebudayaan	Jumlah SDM bidang kebudayaan yang memperoleh peningkatan kompetensi dan/atau sertifikasi	450	450	450	450	450	75.0		Kemendikbud
	Jumlah profesi bidang kebudayaan yang terstandarisasi dan tercantum dalam KBJI/KBLI	5	5	5	5	5	20.0		Kemendikbud
ProP : Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan							150.0		
Optimalisasi sarana dan prasarana publik menjadi ruang interaksi budaya masyarakat	Prosentase sarana dan prasarana publik yang dioptimalkan menjadi ruang interaksi budaya masyarakat	50	50	50	50	50	150.0		Kemendikbud
							0.0		Kemendikbud
ProP : Pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu							30.0		
Pengembangan pusat data milik pemerintah dan masyarakat tentang Kebudayaan	Jumlah pusat data milik pemerintah dan masyarakat yang tersambung dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	1	1	1	1	1	30.0		Kemendikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan							90.0		
Peningkatan kerja sama bidang kebudayaan	<i>Percentase PPKD yang menjadi rujukan penyusunan RKP dan RPJMD</i>	50	50	50	50	50	50.0		Kemendikbud
Peningkatan kerja sama bidang kebudayaan	<i>Jumlah kerjasama galeri di tingkat internasional</i>	4	4	4	4	4	40.0		Kemendikbud
PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	Indeks Kerukunan Umat Beragama						15,225.1		
KP : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama							5,341.1		
ProP : Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat							4,332.8		
Penyuluhan Honorer Konghucu	Penyuluhan Honorer Konghucu	145	145	145	145	145	8.7		Kementerian Agama
Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non-PNS	Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non-PNS	45000	45000	45000	45000	45000	2,700.0		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyuluhan Agama Islam yang Berkualitas	Penyuluhan Agama Islam yang Berkualitas	5000	5000	5000	5000	5000	208.6		Kementerian Agama
Penyuluhan Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	Penyuluhan Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	9000	9000	9000	9000	9000	540.0		Kementerian Agama
Pembinaan Penyuluhan Agama Kristen	Pembinaan Penyuluhan Agama Kristen	1370	2159	2159	2159	2159	98.6		Kementerian Agama
Penyuluhan Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	Penyuluhan Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	458	4000	4000	4000	4000	27.5		Kementerian Agama
Penyuluhan Agama Katolik yang Terbina	Penyuluhan Agama Katolik yang Terbina	375	300	300	300	300	7.5		Kementerian Agama
Tunjangan Penyuluhan/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS	Tunjangan Penyuluhan/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS	1700	1700	1700	1700	1700	102.0		Kementerian Agama
Kelompok Binaan Penyuluhan Hindu	Kelompok Binaan Penyuluhan Hindu	70	70	70	70	70	2.5		Kementerian Agama
Penyuluhan Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	Penyuluhan Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	2240	2240	2240	2240	2240	134.4		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyuluhan agama Buddha yang mendapatkan pembinaan kualitas SDM	Penyuluhan agama Buddha yang mendapatkan pembinaan kualitas SDM	50	40	40	40	40	1.8		Kementerian Agama
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	25000	25000	25000	25000	25000	500.0		
Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan	Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan	30	30	30	30	30	0.7		
Alumni Diklat Teknis Keagamaan Penyuluhan dan Penghulu	Alumni Diklat Teknis Keagamaan Penyuluhan dan Penghulu	30	30	30	30	30	0.5		
ProP : Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru							269.8		
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (lokasi)	Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (lokasi)	35	35	35	35	35	25.0		Kementerian Agama
Penyedian Kurikulum yang Berlaku	Penyedian Kurikulum yang Berlaku	566	566	566	566	566	41.8		
Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	182	182	182	182	182	10.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	100	100	100	100	100	12.5		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	133	133	133	133	133	12.5		
Dokumen Standar Nasional Pendidikan	Dokumen Standar Nasional Pendidikan	35	35	35	35	35	150.0		
Kemah Mahasiswa Lintas Agama	Kemah Mahasiswa Lintas Agama						0.0		
Kemah Siswa-Santri Lintas Agama	Kemah Siswa-Santri Lintas Agama						0.0		
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	120	120	120	120	120	18.0		
ProP : Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan							0.0		
ProP : Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran							738.5		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rumah Ibadah Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)	Rumah Ibadah Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)	590	1500	1500	1500	1500	558.5		Kementerian Agama
Rumah Ibadah Agama Kristen yang Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)	Rumah Ibadah Agama Kristen yang Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)	280	280	280	280	280	70.0		
Rumah Ibadah yang Difasilitasi (yang suci dan damai)	Rumah Ibadah yang Difasilitasi (yang suci dan damai)	30	30	30	30	30	7.5		
Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih (yang suci dan damai)	Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih (yang suci dan damai)	300	300	300	300	300	47.4		
Rumah Ibadah yang Mendapatkan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi/Pembangunan (yang suci dan damai)	Rumah Ibadah yang Mendapatkan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi/Pembangunan (yang suci dan damai)	60	60	60	60	60	30.0		
Rumah Ibadah yang bersih dan sehat (yang suci dan damai)	Rumah Ibadah yang bersih dan sehat (yang suci dan damai)	200	200	200	200	200	25.0		
Rumah Ibadat Agama Khonghucu	Rumah Ibadat Agama Khonghucu	2	2	2	2	2	0.1		Kementerian Agama
ProP : Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa	0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama							302.8		
ProP : Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama							10.7		
Penerapan Regulasi Kerukunan Umat Beragama	Penerapan Regulasi Kerukunan Umat Beragama	1	1	1	1	1	2.5		Kementerian Agama
Desa Sadar Kerukunan	Desa Sadar Kerukunan	52	52	52	52	52	5.7		Kementerian Agama
Desa Binaan Kerukunan Intern	Desa Binaan Kerukunan Intern	50	50	50	50	50	2.5		
ProP : Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa							179.0		
Pembinaan Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	Pembinaan Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	1000	1000	1000	1000	1000	30.0		Kementerian Agama
Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu	Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu	19	19	19	19	19	0.5		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	142	142	142	142	142	23.6		Kementerian Agama
Dialog Lintas Agama di Kecamatan	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	220	220	220	220	220	39.6		Kementerian Agama
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam	34	34	34	34	34	5.0		Kementerian Agama
Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen	Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen	23	61	61	61	61	59.0		Kementerian Agama
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik	35	48	48	48	48	9.7		Kementerian Agama
Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu	Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu	100	115	115	115	115	11.5		Kementerian Agama
Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	0	34	34	34	34	0.0		Kementerian Agama
Sarana dan Prasarana Kerukunan Hidup Umat Beragama	Sarana dan Prasarana Kerukunan Hidup Umat Beragama	9	9	9	9	9	0.0		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kampanye Hidup Rukun	Kampanye Hidup Rukun	34	34	34	34	34	0.0		Kementerian Agama
Pokja Lintas Lembaga Pemerintah	Pokja Lintas Lembaga Pemerintah	1	1	1	1	1	0.0		Kementerian Agama
Penyelesaian Konflik Keagamaan Bimas Islam	Penyelesaian Konflik Keagamaan Bimas Islam	35	35	35	35	35	0.1		Kementerian Agama
ProP : Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong							113.1		
Pembangunan SEKBER FKUB	Pembangunan SEKBER FKUB	6	6	6	6	6	2.2		Kementerian Agama
Operasional SEKBER FKUB Provinsi	Operasional SEKBER FKUB Provinsi	34	34	34	34	34	8.5		Kementerian Agama
Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	512	512	512	512	512	102.4		Kementerian Agama
KP : Penyelarasan relasi agama dan budaya							423.4		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama							15.0		
Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	1	1	1	1	1	2.5		Kemenag
Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	16	16	16	16	16	12.5		Kemenag
Promosi Kesenian Berbasis Keagamaan (syiar agama melalui seni dan budaya)	Promosi Kesenian Berbasis Keagamaan (syiar agama melalui seni dan budaya)						0.0		Kemenag, Kemenpar, Kemdikbud, Pemda
ProP : Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama							43.4		
Hasil Penelitian Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Hasil Penelitian Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	1	1	1	1	1	2.1		Kemenag
Hasil Pengembangan Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Hasil Pengembangan Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1	1	1	1	1	2.0		Kemenag
Hasil Penelitian Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Hasil Penelitian Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	1	1	1	1	1	39.3		Kemenag

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Karya seni dan budaya yang benafaskan agama yang dilestarikan dan dikembangkan	Karya seni dan budaya yang benafaskan agama yang dilestarikan dan dikembangkan						0.0		Kemenag, Kemdikbud
Buku, Naskah Kuno, dan Manuskrip Khazanah Keagamaan dan Kebudayaan yang disusun dan dipublikasikan	Buku, Naskah Kuno, dan Manuskrip Khazanah Keagamaan dan Kebudayaan yang disusun dan dipublikasikan						0.0		Kemenag, Kemdikbud, Perpusnas
ProP : Pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi							365.0		
Perayaan Berbasis Keagamaan yang Dikembangkan (sekaten, ngaben, dll)	Perayaan Berbasis Keagamaan yang Dikembangkan (sekaten, ngaben, dll)						0.0		Kemenag, Kemenpar, Pemda
Situs Berbasis Keagamaan yang Dilestarikan (candi, makam wali/ulama, masjid, gereja, pura, vihara, krenteng)	Situs Berbasis Keagamaan yang Dilestarikan (candi, makam wali/ulama, masjid, gereja, pura, vihara, krenteng)						0.0		Kemenpar, Kemenag, Pemda
Promosi Pariwisata Berbasis Keagamaan	Promosi Pariwisata Berbasis Keagamaan						0.0		Kemenag, Kemenpar, Kominfo, Pemda
Pesparawi Nasional	Pesparawi Nasional		1			1	57.5		Kemenag
Internalisasi Dharma Gita	Internalisasi Dharma Gita	1			1		57.5		Kemenag

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pesparani Nasional	Pesparani Nasional	1			1		57.5		Kemenag
Swayamvara Tripitaka Gatha (STG)	Swayamvara Tripitaka Gatha (STG)	1			1		57.5		Kemenag
Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	35		35		35	100.0		Kemenag
Dakwah dan Hari Besar Islam	Dakwah dan Hari Besar Islam	35	35	35	35	35	35.0		Kemenag
KP : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama							8,823.4		
ProP : Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan							5,077.3		
Penghulu yang Terbina	Penghulu yang Terbina	3000	3000	3000	3000	3000	100.0		Kementerian Agama
KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	2500	3078	3078	3078	3078	2,425.0		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Balai Nikah	Pembangunan Balai Nikah	228	128	128	128	128	1,781.3		Kementerian Agama
Buku dan Kartu Nikah	Buku dan Kartu Nikah	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	55.0		Kementerian Agama
Rehabilitasi KUA	Rehabilitasi KUA	100	100	100	100	100	75.0		Kementerian Agama
Sarana dan Prasarana KUA	Sarana dan Prasarana KUA	750	1000	1000	1000	1000	75.0		Kementerian Agama
Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	35	35	35	35	35	150.0		Kementerian Agama
Dakwah dan Hari Besar Islam	Dakwah dan Hari Besar Islam	35	35	35	35	35	35.0		Kementerian Agama
Ormas dan Lembaga Keagamaan	Ormas dan Lembaga Keagamaan	100	434	434	434	434	150.0		Kementerian Agama
Layanan Syariah	Layanan Syariah	100	544	544	544	544	10.6		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kitab Suci	Kitab Suci	600000	600000	600000	600000	600000	40.0		Kementerian Agama
Pengelolaan Hisab Rukyat	Pengelolaan Hisab Rukyat	1000	35	35	35	35	29.7		Kementerian Agama
Gedung Pusat Observasi Bulan	Gedung Pusat Observasi Bulan	1	1	1	1	1	3.5		Kementerian Agama
Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan	Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan	21	81	81	81	81	12.7		Kementerian Agama
Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan	Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan	8	12	12	12	12	5.0		Kementerian Agama
Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	14100	28924	28924	28924	28924	6.0		Kementerian Agama
Event Pesparawi Nasional	Event Pesparawi Nasional	2	42	42	42	42	12.5		Kementerian Agama
Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	235	235	235	235	235	29.4		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	35	35	35	35	35	5.5		Kementerian Agama
Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	16	35	35	35	35	12.5		Kementerian Agama
Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	50	40	40	40	40	3.8		Kementerian Agama
Lembaga Agama dan Keagamaan Yang Dibina	Lembaga Agama dan Keagamaan Yang Dibina	397	397	397	397	397	20.0		Kementerian Agama
Sarana dan Prasarana Keagamaan	Sarana dan Prasarana Keagamaan	1289	1289	1289	1289	1289	10.0		Kementerian Agama
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan	Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan	330	330	330	330	330	30.0		Kementerian Agama
Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	500	40	40	40	40	0.0		Kementerian Agama
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	35	35	35	35	35	0.0		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	135	160	160	160	160	0.0		Kementerian Agama
ProP : Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga							376.5		
Keluarga Sakinah yang Terbina	Keluarga Sakinah yang Terbina	18000	18000	18000	18000	18000	25.0		
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	241000	241000	241000	241000	241000	300.0		
Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	7	7	35	35	35	17.0		Kementerian Agama
Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	550	5000	5000	5000	5000	7.5		Kementerian Agama
Bimbingan Keluarga Sukinah	Bimbingan Keluarga Sukinah	1559	1559	1559	1559	1559	23.2		Kementerian Agama
Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	500	500	500	500	500	3.8		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal							42.3		
Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	10	10	10	10	10	6.0		Kementerian Agama
Naskah Standardisasi Halal	Naskah Standardisasi Halal	12	12	12	12	12	8.5		Kementerian Agama
Register Halal	Register Halal	228	228	228	228	228	3.7		Kementerian Agama
Sertifikat Halal	Sertifikat Halal	246	246	246	246	246	3.7		Kementerian Agama
Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	246	246	246	246	246	7.4		Kementerian Agama
Stakeholder JPH Yang Terbina	Stakeholder JPH Yang Terbina	5000	5000	5000	5000	5000	6.5		Kementerian Agama
Stakeholder JPH Yang Terawasi	Stakeholder JPH Yang Terawasi	389	389	389	389	389	6.5		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Haji dan Umrah							3,327.3		
Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	30	100	100	100	100	23.2		Kementerian Agama
Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	30	100	100	100	100	22.1		Kementerian Agama
Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	75	150	150	150	150	15.9		Kementerian Agama
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	231000	221000	221000	221000	221000	6.2		Kementerian Agama
Pengelolaan Asrama Haji	Pengelolaan Asrama Haji	1	1	1	1	1	17.8		Kementerian Agama
Pelayanan Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji	Pelayanan Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji	2	2	2	2	2	22.3		Kementerian Agama
Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler	Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler	10000	204000	204000	204000	204000	35.1		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	10	8	8	8	8	1,456.1		Kementerian Agama
Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	40	15	15	15	15	283.3		Kementerian Agama
Petugas haji yang profesional	Petugas haji yang profesional	50	2288	2288	2288	2288	1,362.4		Kementerian Agama
Bimbingan Jemaah Haji	Bimbingan Jemaah Haji	500	500	500	500	500	0.3		Kementerian Agama
Advokasi Haji	Advokasi Haji	12	204000	204000	204000	204000	8.6		Kementerian Agama
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	12	204000	204000	204000	204000	18.6		Kementerian Agama
Petugas Haji di Arab Saudi	Petugas Haji di Arab Saudi	1	1	1	1	1	15.5		Kementerian Agama
Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi	Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	15.9		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi	Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	12.6		Kementerian Agama
Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	11.4		
KP : Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan							334.4		
ProP : Pemberdayaan dana sosial keagamaan							108.2		
Aset wakaf terlindungi	Aset wakaf terlindungi	200	250	300	350	400	21.1		Kementerian Agama
Tanah wakaf tersertifikasi	Tanah wakaf tersertifikasi	350	400	450	500	550	10.8		Kementerian Agama
BWI yg memanfaatkan bantuan operasional	BWI yg memanfaatkan bantuan operasional	35	35	35	35	35	44.2		Kementerian Agama
Baznas yg memanfaatkan bantuan operasional	Baznas yg memanfaatkan bantuan operasional	35	35	35	35	35	13.8		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Lembaga zakat yg terakreditasi	Lembaga zakat yg terakreditasi	407	400	350	300	250	18.3		Kementerian Agama
ProP : Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat							139.0		
Orang yang melek perekonomian dan keuangan syariah	Orang yang melek perekonomian dan keuangan syariah	1500000	2000000	2500000	3000000	3500000	79.8		Kementerian Agama
Lembaga kemitraan ekonomi umat yg dikembangkan	Lembaga kemitraan ekonomi umat yg dikembangkan	14	20	25	30	35	10.0		Kementerian Agama
Lembaga yg mendoat pembinaan manajemen ekonomi umat	Lembaga yg mendoat pembinaan manajemen ekonomi umat	816	850	900	950	1000	49.2		Kementerian Agama
ProP : Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel							87.3		
xxx	xxx	3	3	3	3	3	31.6		Kementerian Agama
xxx	xxx	4	4	4	4	4	55.6		Kementerian Agama

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK	55					3,729.2		
KP : Peningkatan Budaya Literasi							2,736.4		
ProP : Pengembangan budaya kegemaran membaca							863.0		
Pengembangan budaya gemar membaca melalui perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	900	1198	1316	1450	1500	500.4	34 Provinsi	Perpustakaan Nasional RI
	Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca (Lokasi)	100	110	121	133	133	132.7		Perpustakaan Nasional RI
Pengembangan budaya literasi melalui TBM	Perluasan Akses Sumber Belajar Bermutu dan Cakupan Peserta Belajar	320	320	320	320	320	6.4	34 Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Penguatan Kapasitas Fasilitator	220	220	220	220	220	1.5	34 Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber	200	200	200	200	200	2.0	34 Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>Percentase jumlah siswa yang melakukan kegiatan membaca untuk kesenangan/membaca buku nonteks pelajaran 60 menit sehari</i>	5	10	5	15	10	110.0		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	<i>Rasio minimal ketersediaan buku nonteks pelajaran terhadap jumlah siswa 1</i>	5	10	5	15	10	110.0		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ProP : Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi							470.7		
Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional	<i>Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-jurnal yang dilengkapi</i>	574139	631553	688967	746381	746381	411.3	34 Provinsi	Perpustakaan Nasional RI
	<i>Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun</i>	350000	385000	423500	465850	512435	59.4	Jakarta (Pusat)	Perpustakaan Nasional RI
Pengembangan sistem perbukuan	<i>Jumlah pelaku perbukuan terbina</i>	102	300	420	540	600	0.0		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	<i>Jumlah buku pendidikan yang sesuai dengan standar mutu buku pendidikan (SMBP)</i>	4500	5000	5500	6000	6500	0.0		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ProP : Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial							1,402.7		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial (Daerah)	681	1054	1114	1114	1114	1,301.5		Perpustakaan Nasional RI
	Jumlah layanan Perpusnas berbasis inklusi sosial di Perpusnas (Perpusnas Jakarta)	13	14	15	16	16	61.3		Perpustakaan Nasional RI
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (UPT Bung Karno Blitar)	10	10	10	10	10	10.7		Perpustakaan Nasional RI
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (UPT Bung Hatta Bukittinggi)	10	10	10	10	10	10.7		Perpustakaan Nasional RI
Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra	Jumlah Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra (eksemplar)	46000	48000	50000	52000	54000	18.5	BLBI Abiyoso (Jawa Barat)	Kementerian Sosial
KP : Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra							130.7		
ProP : Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional							3.1		
Peningkatan negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia	Jumlah negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia	22	25	28	31	34	3.1		Kemdikbud

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas							127.6		
Pembinaan siswa dan komunitas terkait sastra	Jumlah warga sekolah yang terbina dalam mengapresiasi sastra	7016	8127	9238	10349	11460	98.9		Kemdikbud
	Jumlah komunitas bahasa dan sastra terbina	30	60	90	120	150	28.7		Kemdikbud
ProP : Revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa							0.0		
Perlindungan bahasa daerah yang terancam punah	Jumlah bahasa daerah terancam punah yang terlindungi	72	112	152	192	232	0.0		Kemdikbud
KP : Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta							325.8		
ProP : Peningkatan budaya riset dan eksperimentasi ilmiah sejak usia dini							317.8		
Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventor Award (paket)	Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventor Award (paket)	1	1	1	1	1	27.1	...	LIPI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembinaan dan pengiriman Tim Nasional pada Kompetisi Matematika dan Sains Internasional	Jumlah medali dan/atau penghargaan yang diperoleh dari Kompetisi Matematika dan Sains Internasional	1	1	1	1	1	4.8	34 Provinsi	Kementerian Ristek/BRIN
Pendampingan peneliti remaja oleh fungsional peneliti	Produk riset dan produk inovasi sederhana yang dihasilkan oleh siswa pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan oleh fungsional peneliti	0	200	200	200	200	40.0	34 Provinsi	Kementerian Ristek/BRIN
Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	2864	3000	3000	3000	3000	25.9	Pusat	Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi
Peningkatan budaya literasi dan inovasi	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran	10	20	10	30	20	220.0		Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi
ProP : Pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi							8.0		
Fasilitasi penguatan inovasi produksi di daerah yang berbasis sumber daya lokal	Jumlah produk inovasi industri di daerah yang berbasis sumber daya lokal yang dihasilkan	0	10	10	10	10	4.0	34 Provinsi	Kementerian Ristek/BRIN
Dukungan perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa	Jumlah teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa yang dikomersialisasikan	0	10	10	10	10	4.0	34 Provinsi	Kementerian Ristek/BRIN
KP : Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi							536.3		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengembangan mitra perpustakaan (library supporter)							271.6		
Mitra jejaring perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	500	625	781	977	1118	64.7	34 Provinsi	Perpustakaan Nasional RI
Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga Perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan	1417	1559	1715	1886	2035	115.6		Perpustakaan Nasional RI
Peningkatan peran pustakawan	Jumlah pustakawan yang tersertifikasi	740	780	820	860	860	36.0		Perpustakaan Nasional RI
Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang kompetensinya ditingkatkan	4000	4000	4000	5000	6000	51.5		Perpustakaan Nasional RI
Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan	Peningkatan Pelibatan Publik di TBM	38	38	38	38	38	2.8	34 Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan	Penguatan Tata Kelola TBM	27	27	27	27	27	1.0	34 Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ProP : Pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi							264.7		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
<i>Eksplorasi layanan perpustakaan berbasis digital</i>	<i>Jumlah Pojok Baca Digital (Lokasi)</i>	250	500	500	500	500	264.7	34 Provinsi	Perpustakaan Nasional RI
JUMLAH							28,463.5		

MATRIKS PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional 5: Infrastruktur

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2020 - 2024



Matrik Pembangunan Rancangan RPJMN 2020-2024

Prioritas Nasional : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94,00	94,63	95,00	1,121,896,1		
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86,00	87,00			
	Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60			
	Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00			
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 12,48% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 14,98% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 17,49% akses aman)	90% akses layak (termasuk 20% akses aman)			
	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarang (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0			
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72,92% penanganan; 3,70% pengurangan	73,70% penanganan; 5,51% pengurangan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	77,64% penanganan; 14,57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan			
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91,8% (JP: 23,6%, BIP: 68,1%)	93,8% (JP: 25,4% BIP: 68,4%)	95,9% (JP: 27,1% BIP: 68,7%)	97,9 (JP: 28,9, BIP: 69,0)	100 (JP: 30,4, BIP: 69,5)			
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)*	7,3	8,4	10	12,2	15			
	Volume tumpungan air per kapita (m3/kapita)	57,33	58,65	59,97	61,29	63,93			
	Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1			
	Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	118,000	118,150	118,150	118,175	118,175			
	Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20			
	Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	13,32	25,469	23,352	24,800	21,29			
	Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65			
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Perumahan Layak, Aman dan Terjangkau	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah, termasuk BUMN (unit)	136,153	42,847	52,000	72,000	87,000	283,632,2		
	Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	55,378	90,763	148,986	185,403	247,387			
	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA (rumah tangga)	58,460	85,000	110,000	135,000	161,540			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan (rumah tangga)	115,000	160,000	220,000	250,000	255,000			
	Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)	206,555	210,000	210,000	210,000	233,445			
	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48			
	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48			
	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	2	2	2	2	2			
ProP : Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah (unit)	136,153	42,847	52,000	72,000	87,000	98,885.6		
	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	55,378	90,763	148,986	185,403	247,387			
	Jumlah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) (persil)	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya baru yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah (unit)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	3,625.1	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	4,153	10,847	20,000	30,000	35,000	36,251.5	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBUs	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)				10,000	20,000	1,050.0	6 Metropolitan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	20,253	20,253	42,660	42,660	67,449	28,000.0	6 Metropolitan	BUMN
Pembangunan Rumah Layak Huni oleh BUMN	Jumlah rumah yang terbangun (unit)	35,125	70,510	106,326	142,743	179,938	20,000.0	34 Provinsi	BUMN
Pembangunan hunian tetap in situ	Jumlah hunian tetap yang terbangun (unit)	100,000	-	-	-	-	5,000.0	Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala	BNPB
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun (unit)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,051.0	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni secara Swadaya	Jumlah rumah swadaya baru yang terbangun (unit)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	2,887.5	34 Provinsi	DAK
Uji Coba Pra dan Paska Sertifikasi Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya yang terfasilitasi pra dan paska sertifikasi (unit)	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20.5	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ProP : Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi perumahan (rumah tangga)	115,000	160,000	220,000	250,000	255,000	139,677.7		
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan (rumah tangga)	58,460	85,000	110,000	135,000	161,540			
Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani bantuan pembiayaan perumahan melalui BP2BT (rumah tangga)	5,000	10,000	20,000	30,000	35,000	100.0	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga)	58,460	85,000	110,000	135,000	161,540	7.5	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi	Jumlah rumah tangga yang terverifikasi untuk mendapatkan subsidi perumahan (rumah tangga)	110,000	150,000	200,000	220,000	220,000	70.2	Pusat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bantuan pembiayaan perumahan melalui TAPERAS	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	60,000.0	Pusat	TAPERAS
Fasilitas pembiayaan perumahan melalui PT. SMF	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)	8,460	10,000	10,000	10,000	11,540	10,000.0	Pusat	PT. SMF
Subsidi Perumahan (FLPP)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan subsidi perumahan (FLPP) (rumah tangga)	110,000	150,000	200,000	220,000	220,000	69,500.0	34 Provinsi	Kementerian Keuangan (Subsidi)
ProP : Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas (rumah tangga)	206,555	210,000	210,000	210,000	233,445	21,017.9		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	Jumlah hunian yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi pemerintah (unit)	156,000	156,000	156,000	156,000	176,000	16,078.9	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tangga miskin yg memperoleh bantuan rehabs RTLH (unit)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	1,189.0	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni secara Swadaya	Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	36,555	40,000	40,000	40,000	43,445	3,750.0	34 Provinsi	DAK
ProP : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Jumlah kawasan perumahan dan permukiman baru yang mendapatkan peningkatan layanan infrastruktur dasar (kawasan)	2	2	2	2	2	8,158.6		
	Jumlah kawasan perumahan dan permukiman eksisting yang mendapatkan peningkatan layanan infrastruktur dasar (kawasan)	2	2	3	3	3			
Pembangunan PSU Rumah Umum	Jumlah rumah umum yang mendapatkan bantuan pembangunan PSU (unit)	22,500	200,000	200,000	200,000	200,000	8,158.6	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ProP : Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48	500.0		
Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah NSPK terkait penataan bangunan dan lingkungan (NSPK)	1	1	1	1	1	20.0	Pusat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	48	48	48	48	48	480.0	Kawasan Metropolitan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ProP : Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	2	4	4	5	5	15,392.5		
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah kawasan yang dikembangkan, dibangun, atau dibangun kembali (Hektar)	258	2200	2200	0	0	10,107.0	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah kawasan yang dibangun (Hektar)	963	2000	2000	0	0	4,960.0	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi	Jumlah unit rumah (Unit)	1000	1000	1000	1000	1000	325.5	34 Provinsi	DAK
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	77,700	133,000	133,000	200,000	200,000	347,737.2		
	Jumlah sambungan rumah SPALD-T yang terlayani skala permukiman (SR)	145,000	417,560	417,560	626,000	626,000			
	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	1,730,314	1,730,314	1,730,314	1,730,314	1,730,314			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	3,885,755	3,885,755	3,885,755	3,885,755	3,885,755			
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	223,005	255,938	316,630	376,145	409,078			
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	144,128	164,717	308,845	473,562	494,152			
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	66	66	62	62	52			
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	66	66	62	62	52			
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	15,600,000	17,100,000	19,100,000	21,600,000	24,600,000			
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (RT)	48,300,000	48,808,000	49,309,000	49,813,000	50,465,000			
	Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (RT)	5,030,000	5,858,000	7,100,000	8,772,000	10,892,000			
	Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	67	75	84	92	100			
	Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	6	4	3	1	0			
ProP : Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pembangunan SPAM Regional (lpd)	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	341,423.7		
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM (lpd)	4,042	6,062	8,083	10,104	12,125			
	Perluasan SPAM (SR)	288,712	433,068	577,423	721,779	866,135			
	Penurunan Non Revenue Water (NRW) PDAM (%)	31	30	28	27	25			
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota)	21	38	38	38	38			
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota)	82	184	184	184	184			
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	24	50	74	113	113			
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	39	33	67	101	97			
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	78	108	113	116	116			
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	12	13	25	37	37			
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd), SPAM berbasis Masyarakat	1,750	2,333	2,916	3,498	4,081	34,351.8	Seluruh Provinsi	Kementerian PUPR
Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	59,403	89,104	118,806	148,507	178,208	2,970.1	Seluruh Provinsi	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM baru dan peningkatan bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	1334	1778	2223	2667	3111	26,186.8	Seluruh Provinsi	DAK
Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	39823	59734	79645	99557	119468	1,991.1	Seluruh Provinsi	DAK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal	496,464	498,974	501,484	503,995	651,729	22,547.5	Seluruh provinsi	DAK dan Pemerintah Daerah
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd), SPAM berbasis Masyarakat	1,715.20	2,286.07	2,856.94	3,427.80	3,998.67	33,660.8	Seluruh provinsi	APBD
Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	37,555.73	56,333.60	75,111.47	93,889.33	112,667.20	1,877.8	Seluruh provinsi	APBD
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd), SPAM berbasis Masyarakat	1,271.63	1,694.87	2,118.10	2,541.34	2,964.57	24,955.7	Seluruh provinsi	KPBU, Hibah, dana lainnya
Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	290,293.50	435,440.25	580,587.00	725,733.75	870,880.50	14,514.7	Seluruh provinsi	KPBU, Hibah, dana lainnya
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	7360	7360	7360	7360	7360	22,052.0	38 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Pengembangan Sambungan Rumah (SR)	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	5000	5000	5000	5000	5000	111.0	38 Kab/Kota	DAK
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	131920	131920	131920	131920	131920	3,017.0	38 Kab/Kota	APBD; Masyarakat; Lainnya
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)	125,000	233,035	233,035	233,035	233,035	5,285.7	184 Kab/Kota	DAK
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	21,539.5	184 Kab/Kota	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	216,449	216,449	216,449	216,449	216,449	5,411.2	184 Kab/Kota	APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septic (RT)	2,102,372	2,102,372	2,102,372	2,102,372	2,102,372	53,300.0	Seluruh provinsi	APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septic (RT)	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	14,825.0	Seluruh provinsi	DAK
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	24	114	140	219	220	4,406.4	374 Kab/Kota	Kementerian PUPR
Truk Tinja	Jumlah truk tinja (unit)	137	137	274	411	411	610.0	374 Kab/Kota	DAK
Truk Tinja	Jumlah truk tinja (unit)	45	45	90	135	135	200.0	374 Kab/Kota	APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)	39	23	37	71	66	26,611.2	236 kab/kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		10	30	30	31	11,404.8	101 kab/kota	KPBU
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Truk Sampah	Jumlah truk sampah yang tersedia (unit)	1600	1600	1600	1601	1601	2,240.0	448 kab/kota	APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Alat Berat	Jumlah alat berat di TPA (unit)	39	33	67	101	97	1,617.6	337 kab/kota	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)	23	23	45	68	68	332.0	124 kab/kota	DAK
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)	167	195	224	252	280	1,644.0	124 kab/kota	DAK
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)	7	8	15	23	24	3,760.0	57 kab/kota	Kementerian PUPR
ProP : Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase PDAM yang memiliki Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 (%)	33	50	66	83	100	5,559.2		
	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Tarif Full Cost Recovery	103	103	103	103	103			
	Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll) (%)	20	40	60	80	100			
	Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (provinsi)	33	33	33	33	33			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik (kab/kota)	66	66	66	66	66			
	Jumlah desa/kelurahan yang telah Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (desa/kel) *akumulasi	32733	45733	58733	71733	83447			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum di kabupaten/kota	509	509	509	509	509	1.3	Seluruh provinsi	Kementerian PUPR
Peningkatan Kerjasama Investasi Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi	30	154	230	307	384	376.7	Seluruh provinsi	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM	30	154	230	307	384	884.0	Seluruh provinsi	Kementerian PUPR
Rekomendasi Penyelenggaraan SPAM	Jumlah rekomendasi PDAM yang difasilitasi dalam rangka peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban antara PDAM dan pelanakan	30	154	230	307	384	143.7	Seluruh provinsi	Kementerian PUPR
Implementasi Dokumen SSK (APBN)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)	66	66	66	66	66	264.0	Seluruh provinsi	Kementerian PUPR
Implementasi Dokumen SSK (APBD Provinsi)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)	66	66	66	66	66	82.5	Seluruh provinsi	Pemerintah Provinsi
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)	87	87	87	88	88	218.5	437 kab/kota	
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)	87	87	87	88	88	109.3	437 kab/kota	
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah (APBN)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota)	83	83	83	84	84	208.5	417 kab/kota	Kementerian PUPR
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah (APBD Provinsi)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota)	83	83	83	84	84	104.3	417 kab/kota	Pemerintah Provinsi
Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi implementasi STBM	11790	13000	13000	13000	11714	3,166.6	Seluruh provinsi	Kementerian Kesehatan
ProP : Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi (kab/kota)	66	66	64	58	54	716.8		
	Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun (NSPK)	4	4	4	4	4			
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum (Kab/Kota)	95	95	95	95	95			
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM (Kab/Kota)	101	101	102	102	102			
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SK Kepala Daerah tentang tariff FCR tentang tariff dan penyertaan modal	103	103	103	103	102			
Penyusunan Rancangan NSPK	Jumlah NSPK Sanitasi yang tersusun	4	4	4	4	4	16.0	Pusat	Kementerian PUPR
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	66	66	64	58	54	15.4	Pusat	Kementerian PUPR
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	66	66	64	58	54	15.4	Pusat	Kementerian Dalam Negeri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBD)	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	66	66	64	58	54	154.0	Seluruh provinsi	Pemda
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Air Minum di Daerah (APBD)	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang air minum (Kab/Kota)	101	101	102	102	102	508.0	Seluruh provinsi	Pemda
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan pengembangan SPAM yang tersusun	4	4	4	4	4	8.0	Pusat	Kementerian PUPR
ProP : Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Persentase PDAM yang memiliki dokumen Rencana Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	5	20	40	65	100	37.5		
	Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	514	514	514	514	514			
	Jumlah kab/kota yang memiliki effluent IPAL, IPLT, dan leachate TPA yang memenuhi syarat (kab/kota)		33	40	60	60			
Pengawasan terhadap Sarana Air Minum	Persentase kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (%)	5	20	40	65	100.0	4.0	514 Kab/Kota	Kementerian Kesehatan
Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Jumlah kab/kota yang memiliki dokumen RPAM (RPAM)	101	101	102	102	102	4.0	509 Kab/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)		33	40	60	60	29.5	Seluruh provinsi	KEMEN LHK
KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Terlindungi (m3/detik)	13.32	25.47	23.35	24.80	21.29	23,779.4		
	Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan Pengelolaan SDA Terpadu	0	5	17	21	21			
	Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management)	3	5	7	9	10			
ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Tambahan penyediaan air baku (m3/detik)	13.32	25.47	23.35	24.80	21.29	22,046.3		
	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah	3	5	7	9	10			
	Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah	3	5	7	9	10			
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)	0.25	0.12	0.10	0.29	0.20	287.9	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulaewsi Utara, Riau, Kepulauan Riau	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0.47	4.19	4.38	5.16	3.91	5,434.0	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	1.11	1.98	2.31	2.30	2.10	2,939.5	Kawasan Metropolitan Banjarmasin, Denpasar, Manado, Palembang, Makassar, Perkotaan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kota Baru Sofifi, Maja, Tanjungselor, Ibu Kota Negara	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, KSPN)	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	0.00	0.69	0.50	0.55	0.71	735.0	KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, KSPN Danau Toba, KSPN Padang-Bukittinggi, KI/KEK Galang Batang, KI Bintan Aerospace, KI Kemiringking, KEK/KSPN Tanjung Kelayang, KI Sadai, KI Tanjung Enim, KEK Tanjung Api-Api, KI Way Pisang, KEK/KSPN Tanjung Lesung, KSPN Borobudur dsk, KI Madura, KSPN Bali, KEK/KSPN Mandalika, KSPN Labuan Bajo, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong-Tanah Laut, KSPN Derawan-Berau, KI Batulicin, KEK Malay Batutu Trans Kalimantan, KI Tanah Kuning, KSPN Wakatobi, KI/KEK Palu, KSPN Manado-Likupang, KI/KEK Bitung, KEK/KSPN Morotai, KI Teluk Weda, KSPN Raja Ampat, KI/KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, KEK/KSPN Singosari, KI Sebalang, KI Brebes	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa	Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)	0.00	1.98	0.47	0.00	0.00	735.0	Kabupaten Cirebon, Pekalongan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)	0.00	5.20	4.14	3.43	4.79	5,265.0	Kabupaten Jember, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Malang, Kep. Selayar, Kediri, Banyumas, Cianjur	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	613.0	Wilayah Metropolitan Mebidangro, Jabodetabekpurjur, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertasusila	KPBU
Rehabilitasi infrastruktur penyedia air baku	Jumlah unit infrastruktur penyedia air baku yang direhabilitasi	13	15	20	25	20	1,953.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah titik pembangunan sumur air tanah untuk air baku	1000	500	500	500	500	1,854.0	Kawasan 3T dan rawan air	KESDM
Pengawetan dan pengisian kembali air tanah	Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan recharge air tanah	0	7	8	9	10	680.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pengembangan sistem penyediaan air baku terintegrasi (conjunctive use)	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah	0	7	8	9	10	1,360.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas	19	19	19	19	19	190.0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	KESDM
ProP : Penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan	0	3	3	3	4	153.3		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat yang memiliki kebijakan PSDA terpadu (wilayah sungai)	0	5	17	21	21			
Penetapan peraturan pemerintah terkait SDA	Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan	0	3	3	3	4	26.0	Pusat	Kementerian PUPR
Pembuatan dokumen pola dan rencana PSDA	Jumlah dokumen kebijakan PSDA wilayah sungai kewenangan pusat yang ditetapkan	29	38	47	56	64	105.3	Tersebar	Kementerian PUPR
Penyusunan dokumen penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	Jumlah pedoman penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	1	0	0	0	0	2.0	Pusat	Kementerian PUPR
Penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	Jumlah wilayah sungai yang dinilai kinerja pengelolaannya	0	2	2	3	3	20.0	Tersebar	Kementerian PUPR
ProP : Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management)	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan Sistem Informasi SDA	3	5	7	9	10	1,579.8		
	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi	3	5	7	9	10			
	Jumlah stasiun pemantauan kualitas air (unit)	80	24	22	17	16			
Pengembangan ICT (Information and Communication Technology)	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan ICT pengelolaan infrastruktur SDA	0	7	8	9	10	170.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pengembangan GIS (Geographic Information System) dan Pemodelan Sumber Daya Air	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan GIS dan pemodelan sumber daya air	0	7	8	9	10	510.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pengembangan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air	0	7	8	9	10	340.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pengembangan sistem informasi air tanah	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi air tanah	0	7	8	9	10	170.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pengembangan sistem informasi hidrogeologi	Jumlah CAT dengan sistem pengelolaan hidrogeologi terpadu	1	1	1	1	1	95.0	Tersebar	KESDM
Pengembangan sistem informasi hidrometeorologi terintegrasi	Jumlah provinsi yang mengembangkan sistem informasi hidrometeorologi terintegrasi	3	5	7	9	10	51.0	Tersebar	BMKG
Pembangunan stasiun pemantauan kualitas air	Jumlah stasiun pemantauan kualitas air di WS kritis yang dibangun	33	8	8	5	5	90.5	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Kementerian LHK
Pembangunan stasiun pemantauan kualitas air	Jumlah stasiun pemantauan kualitas air di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa yang dibangun	47	16	14	12	11	153.3	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Kementerian LHK
KP : Keselamatan dan Keamanan Transportasi	a. Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran						49,707.3		
	b. Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan								
	c. Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA								
	d. Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)								
ProP : Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR							24,223.0		
Penyediaan fasilitas keselamatan jalan (marka jalan, rambu jalan, pagar pengaman, dan penerangan jalan umum ATCS)	Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	33	33	33	33	33	7,500.0	Tersebar	Kemenhub
Pembangunan Balai uji kelaikan kendaraan bermotor (UPPKB)	Balai uji kelaikan kendaraaan (lokasi)				1		250.0	Bekasi	Kemenhub
Pembangunan Balai uji kelaikan kendaraan bermotor (UPPKB)	Balai uji kelaikan kendaraaan (lokasi)				1		1,750.0	Bekasi	Kemenhub
Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (unit)	67	70	73	75	77	1,170.0	Tersebar	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyediaan kapal navigasi	Jumlah kapal navigasi yang dibangun (unit)	10	14	18	22	25	3,000.0	Tersebar	Kemenhub
Penyediaan Vessel Traffic Services Terintegrasi	Jumlah Vessel Traffic Services Terintegrasi yang disediakan(unit)	15	20	25	30	35	5,026.0	Tersebar	Kemenhub
Pengadaan dan modernisasi sarana navigasi CNSA (Communication, Navigation, Surveillance dan Automation)	Jumlah sarana navigasi CNS/ATM disediakan dan dimodernisasi (Communication, Navigation, Surveillance/air traffic management system) (unit)						335.3	Tersebar	Kemenhub
Pengadaan Pesawat Udara Kalibrasi	Jumlah Pesawat Udara Kalibrasi yang dibangun (unit)	4	4	4	4	4	1,110.0	Tersebar	Kemenhub
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan	Jumlah perlengkapan SAR yang disediakan						0.0	Tersebar	Basarnas
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra darat	-Perlengkapan SAR matra darat (unit)						0.0	Tersebar	Basarnas
Penyediaan Rescue Truck Tipe I	Jumlah Rescue Truck Tipe I yang disediakan (unit)	6	6	6	6	6	162.0	Tersebar	Basarnas
Penyediaan Rescue Truck Tipe II	Jumlah Rescue Truck Tipe II yang disediakan (unit)	15	15	15	15	10	129.5	Tersebar	Basarnas
Penyediaan Rescue CarTipe I	Jumlah Rescue Car Tipe I yang disediakan (unit)	8	8	8	8	8	75.0	Tersebar	Basarnas
Penyediaan Rescue CarTipe II	Jumlah Rescue Car Tipe II yang disediakan (unit)	10	15	15	15	15	52.5	Tersebar	Basarnas
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra laut	-Perlengkapan SAR matra laut (unit)						0.0	Tersebar	Basarnas
Rescue Boat Kelas 1	Jumlah Kapal yang disediakan (unit)		1				175.3	Aceh, Denpasar, Ambon	Basarnas
Rescue Boat Kelas 2	Jumlah Kapal yang disediakan (unit)	6	6	6	6	6	1,752.0	Tersebar	Basarnas
Rigid Inflatable Boat Kelas 1	Jumlah Kapal yang disediakan (unit)	10	15	15	15	15	350.0	Tersebar	Basarnas
Rigid Inflatable Boat Kelas 2	Jumlah Kapal yang disediakan (unit)		15	15	15	15	270.0	Tersebar	Basarnas
- Landing Craft	Jumlah Kapal yang disediakan (unit)	50	70	70	80	80	157.5	Tersebar	Basarnas
- Rafting Boat	Jumlah Kapal yang disediakan (unit)		30	30	40	40	28.0	Tersebar	Basarnas
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra udara	-Perlengkapan SAR matra udara (unit)						0.0	Tersebar	Basarnas
Medium Helicopter	Jumlah Medium Helicopter yang disediakan (unit)		1	2			930.0	Medan, Tanjung Pinang, Tarakan, Makassar, Jayapura	Basarnas
ProP : Pembinaan dan Pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan							25,484.2		
Pengembangan SDM Transportasi yang kompeten	a. Jumlah SDM transportasi yang berkompeten (orang)	186625	225425	264225	303025	341825	25,000.0	Tersebar	Kemenhub
Pembentukan Road Safety Center/Sekretariat Keselamatan Jalan	b. Jumlah kelembagaan Keselamatan jalan yang dibentuk oleh Pemda (lokasi)						25.0	Tersebar	Kemenhub
Pengembangan SDM	c. Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten (orang)	10000	10000	10000	10000	10000	459.2	Tersebar	Basarnas
KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan)	20	20	20	20	20	39,067.9		
	Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air	20	20	20	20	20			
ProP : Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menetapkan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi	10	10	10	10	10	1,202.1		
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana geologi dan lingkungan	2	1	2	1	2			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah kabupaten/kota dengan peta risiko penurunan muka tanah	2	2	2	2	2			
Penyusunan pedoman rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana	Jumlah dokumen pedoman penyusunan rencana induk ketahanan bencana dan ketangguhan infrastruktur kritis terhadap hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	1	1	1	1	1	5.0	Terpusat	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menyelesaikan peta risiko dan rencana induk ketahanan bencana banjir	10	10	10	10	10	250.0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Palembang, Bengkulu, Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madura, Cilegon, Serang, Singkawang, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Palopo, Konawe, Gorontalo, Sorong, Bandung, Jabodetabek	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi	1		1		1	9.0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuefaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogyakarta	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami	1	1	1	1	1	15.0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu), Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado), Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan sekitarnya	Kementerian PUPR
Penyusunan rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir utara jawa	Jumlah kawasan perkotaan pesisir utara jawa yang memiliki rencana pengelolaan pesisir terpadu	1	1	1	1		40.0	Terpusat	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk penurunan tanah	Jumlah peta risiko penurunan tanah di kawasan prioritas	2	2	2	2	2	2.1		Kementerian ESDM
Peraturan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah peraturan penataan bangunan dan lingkungan	1	1	1	1	1	10.0		Kementerian PUPR
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	Jumlah kab/kota terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung dan penataan lingkungan	48	48	48	48	48	871.0	509 Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	Jumlah wilayah sungai yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir	20	20	20	20	20	25,618.0		
	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan tanah longsor	24	24	24	24	24			
	Jumlah wilayah sungai yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan bencana lumpur dan sedimen	5	5	5	5	5			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah provinsi yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir	20	20	20	20	20			
	Jumlah infrastruktur vital yang ditingkatkan ketahanannya terhadap risiko bencana	2	10	10	10	10			
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis	3	10	8	8	8	1,116.0	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Kementerian PUPR
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas	3	10	10	10	10	1,296.0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)	Jumlah kota dengan peningkatan sistem drainase utama	20	20	20	20	20	4,550.0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai melintasi perkotaan yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kementerian PUPR
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana bencana banjir	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan (km)	5	15	15	20	20	7,600.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen	Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis	2	10	12	12	12	485.0	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Kementerian PUPR
Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen	Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas	12	10	10	10	10	550.0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kementerian PUPR
Pembangunan dan peningkatan sabo dam penahan banjir dan sedimen di wilayah sungai prioritas	Jumlah sabo dam yang dibangun atau ditingkatkan	14	15	15	15	15	1,145.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pembangunan dan peningkatan tanggul penahan lumpur di wilayah terdampak bencana lumpur Sidoarjo	Panjang tanggul dan infrastruktur penahan lumpur sidoarjo yang direhabilitasi atau ditingkatkan (km)	10	10	8	7	5	400.0	Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Kementerian PUPR
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)	0.4	20.1	20.1	20.1	20.1	4,044.0	DKI Jakarta dan Semarang	Kementerian PUPR
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)	21.1	15	15	15	15	4,266.0	Kawasan prioritas lainnya dan pulau-pulau terluar	Kementerian PUPR
Ketahanan kawasan pesisir dan pulau kecil terluar	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketanggunhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kumulatif)	20	20	20	20	20	124.0	Kawasan pesisir dan pulau kecil terluar	Kementerian KP
Pembangunan dan peningkatan ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana	Jumlah infrastruktur vital yang ditingkatkan ketahanannya terhadap risiko bencana	2	10	10	10	10	42.0	Tersebar	Kementerian PUPR
ProP : Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan penggunaan air tanah	2	4	5	4	1	914.8		
	Jumlah wilayah sungai yang melakukan pengembangan peringatan dini bencana banjir	5	5	5	5	5			
	Jumlah kawasan yang membangun sistem peringatan dini bencana longsor	7	7	7	7	7			
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	16	19	19	19	19	312.0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	KESDM
Pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	16	19	19	19	19	280.8	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	KESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai kritis	4	4	4	4	4	72.0	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Kementerian PUPR
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai prioritas lainnya	3	3	3	3	3	125.0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kementerian PUPR
Pemasangan sistem peringatan dini di kawasan rawan longsor	Jumlah sistem peringatan dini bencana longsor yang dibangun	25	25	25	25	25	125.0	Tersebar	KESDM
ProP : Restorasi dan konservasi infrastruktur alami	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya (Km)	109	112	116	119	125	11,333.0		
	Jumlah wilayah sungai prioritas yang dikonservasi	4	4	4	4	4			
	Jumlah kawasan rawa dengan peningkatan tata kelola air	0	3	3	3	3			
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di WS kritis (Km)	23.66	40	40.5	41	41.5	3,851.5	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	Kementerian PUPR
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)	60	12	10	8	8	2,260.0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Kementerian PUPR
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Prioritas lainnya (Km)	34	40	40	40	40	4,050.0	Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir	Kementerian PUPR
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai kewenangan daerah yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya (Km)	15	20	25	30	35	875.0		DAK
Konservasi wilayah sungai	Jumlah wilayah sungai yang dikonservasi	4	4	4	4	4	56.5	Tersebar	Kementerian LHK
Pencegahan kebakaran hutan di kawasan rawa	Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan tata kelola airnya	0	3	3	3	3	240.0	Tersebar	Kementerian PUPR
KP : Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irrigasi	Jumlah volume tumpungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m ³) (Kumulatif)	1.69	2.58	3.25	3.69	7.11	377,972.0		
	Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif)	14	17	28	40	51			
	Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	24	24	24	24	27			
	Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif)	2	7	13	19	25			
	Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	8000	8150	8150	8175	8175			
ProP : Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tumpungan alami	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna	2	2	2	2	2	120.0		
	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan tumpungan alami	0	1	1	1	1			
Perencanaan pembangunan bendungan baru dengan protokol berkelanjutan	Jumlah dokumen perencanaan bendungan protokol berkelanjutan	1	1	1	1	1	50.0	Terpusat	Kementerian PUPR
Perencanaan pembangunan bendungan dengan skema KPBU	Jumlah dokumen perencanaan bendungan dengan skema KPBU	1	1	1	1	1	50.0	Terpusat	Kementerian PUPR
Perencanaan pengembangan tumpungan alami	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan tumpungan alami	0	1	1	1	1	20.0	Terpusat	Kementerian PUPR
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Jumlah pembangunan bendungan multiguna	9	17	9	7	16	141,094.5		
	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	1	1	1	1	1			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bendungan baru yang selesai dibangun	Jumlah bendungan baru yang selesai dibangun	11	11	12	7	4	38,025.7	Bendungan Marangkanayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pideko, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangoaan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Tigadihadji, Bendungan Sementok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Bener, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Bulango Ulu, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Way Apu, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Beringin Sila, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang, Bendungan Tiu Suntuk, Bendungan Jragung, Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Budong-Budong	Kementerian PUPR
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun	0	3	3	4	0	18,538.9	Tersebar	Kementerian PUPR
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun dengan skema KPBU	0	0	0	0	4	20,300.0	Bendungan Merangin, Bendungan Muara Juloi, Bendungan Lambakan, Bendungan Kusan	KPBU
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun	0	0	0	0	2	64,000.0	Bendungan Kayan (Kaltara), Bendungan Mentaranga (Kaltara)	BUMN dan/atau Swasta
Bendungan yang direhabilitasi	Jumlah bendungan yang sedang direhabilitasi /ditingkatkan	2	1	1	1	0	230.0	Bendungan Wonogiri, Benanga, Bilibili, Sutami	Kementerian PUPR
ProP : Optimalisasi dan pemanfaatan tumpungan	Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (Kumulatif)	14	17	28	40	51	97,377.8		
	Jumlah tumpungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya	6	7	7	7	7			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bendungan yang dimanfaatkan untuk PLTA	Jumlah energi listrik yang bersumber dari bendungan (MW)	112.7	1.7	27.4	33.9	2,261.9	68,251.4	Bendungan Bajulmati, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meniting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang	BUMN dan/atau Swasta
Bendungan yang dimanfaatkan untuk air baku	Jumlah debit air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik)	6.19	0.85	10.03	5.55	0.86	3,522.0	Bendungan Paya Seunara, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Teritip, Bendungan Gondang, Bendungan Sei Gong, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidoko, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan	Kementerian PUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi	Luas lahan irigasi yang diairi dari bendungan (Ha)	105,461	14,697	116,375	53,959	52,057	23,978.4	Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknomo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Paseloreng, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang	Kementerian PUPR
Tampungan alami yang direvitalisasi	Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi (kumulatif)	8	10	15	10	8	1,546.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya	Jumlah tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya	-	1	1	1	1	80.0	Tersebar	Kementerian PUPR
ProP : Peningkatan OP dan keamanan bendungan	Jumlah bendungan yang indeks risikonya turun (unit)	24	24	24	24	27	1,230.0		
	Jumlah bendungan dengan umur layanan yang meningkat (umur)	24	24	24	24	27			
Peningkatan keamanan bendungan yang memiliki risiko tinggi	Jumlah bendungan dengan risiko tinggi yang dirurunkan indeks resikonya	10	20	20	20	20	740.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Konservasi daerah tangkapan air bendungan	Jumlah konservasi daerah tangkapan air bendungan	10	17	9	7	12	305.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Penyelesaian sertifikasi operasi bendungan	Jumlah bendungan yang memiliki sertifikat operasi	10	17	9	7	12	185.0	Tersebar	Kementerian PUPR
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare)	45,000	125,000	125,000	125,000	125,000	136,920.7		
	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (Hektare)	883,082	519,995	499,995	499,995	499,995			
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat	Luas jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa kewenangan pusat yang dibangun (Hektare)	15,000	87,500	87,500	87,500	87,500	55,650.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun (Hektare)	30,000	37,500	37,500	37,500	37,500	12,600.0	Tersebar	Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat yang direhabilitasi (Hektare)	80,000	233,998	224,998	224,998	224,998	39,959.6	Tersebar	Kementerian PUPR
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi (Hektare)	783,082	285,997	274,997	274,997	274,997	28,411.1	Tersebar	Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	Luas jaringan daerah irigasi rawa yang direhabilitasi (Hektare)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	300.0	Tersebar	Kementerian PUPR
ProP : Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	Daerah Irigasi yang mengelola pengukuran data realisasi alokasi air (Kumulatif)	1	2	3	2	1	842.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah daerah irigasi dengan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi	5	10	10	10	11			
Pengembangan sistem water accounting	Jumlah sistem data pemantauan ketersediaan air yang dibangun (kumulatif)	-	1	1	1	1	70.0	Terpusat	Kementerian PUPR
Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)	Jumlah daerah irigasi dengan pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)	1	2	3	2	1	417.0	Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan	Kementerian PUPR
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi	Jumlah daerah irigasi dengan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi	5	10	10	10	11	355.0	Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan	Kementerian PUPR
ProP : Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernalai ekonomi tinggi	Luas lahan komoditas pertanian bernalai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare)	8,000	8,150	8,150	8,175	8,175	387.0		
Penyediaan air untuk komoditas perkebunan rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk perkebunan rakyat	-	1	1	2	2	72.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Penyediaan air untuk komoditas peternakan rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk peternakan rakyat	-	2	2	2	2	96.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Penyediaan air untuk komoditas hortikultura rakyat	Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk hortikultura	-	3	3	3	3	144.0	Tersebar	Kementerian PUPR
Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat	Luas irigasi tambak rakyat yang dibangun (Hektare)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	75.0	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB	Kementerian PUPR
PP : PENGUATAN KONEKTIVITAS	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)						987,444.6		
	Jumlah pelabuhan utam (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)								
	Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)								
	Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)								
KP : Konektivitas Jalan	a. Panjang jalan baru yang dibangun (km)						627,961.9		
	b. Persentase kondisi mantap jalan nasional (persen)								
	c. Persentase kondisi mantap jalan provinsi (persen)								
	d. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (persen)								
ProP : Pembangunan Jalan Strategis	Panjang Jalan Lintas Utama Pulau dibangun (km)						50,485.0		
Akses pusat pertahanan Natuna	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	15	15	8	8	1,099.0	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Jembatan Klarik Cs	Panjang jembatan yang dibangun (m)					224	107.3	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Jalan lintas Batam	Panjang jalan yang dibangun (km)					2	64.0	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Jalan lintas Bintan	Panjang jalan yang dibangun (km)				25		250.0	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Jalan perbatasan Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)	12	0	0	0	0	98.4	Kalimantan Barat	KemenPUPR
Jalan perbatasan Kaltara	Panjang jalan yang dibangun (km)	47	70	36	19	19	3,238.5	Kalimantan Utara	KemenPUPR
Jalan perbatasan NTT	Panjang jalan yang dibangun (km)	33	50	45	45	5	3,703.3	Nusa Tenggara Timur	KemenPUPR
Jalan Trans Kepulauan NTT	Panjang jalan yang dibangun (km)				7		30.0	Nusa Tenggara Timur	KemenPUPR
KEK Danau Toba	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	17	13	13	13	1,333.0	Sumatera Utara	KemenPUPR
Lintas Barat Aceh	Panjang jalan yang dibangun (km)					10	100.0	Aceh	KemenPUPR
Lintas barat Jambi	Panjang jalan yang dibangun (km)					15	85.0	Jambi	KemenPUPR
Lintas Pantura Banten	Panjang jalan yang dibangun (km)			150			85.0	Banten	KemenPUPR
Penggantian Jembatan Pantura Banten (cs)	Panjang jembatan yang dibangun (m)					150	75.0	Banten	KemenPUPR
Lintas penghubung Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	29	57	57	57	2,330.7	Kalimantan Barat	KemenPUPR
Lintas Penghubung Sumsel	Panjang jalan yang dibangun (km)			5			37.0	Sumatera Selatan	KemenPUPR

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Lintas Penghubung Sumut	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	10	10	6	6	475.6	Sumatera Utara	KemenPUPR
Lintas Selatan Kalsel	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Kalimantan Selatan	KemenPUPR (KPB)U
Lintas Tengah Aceh	Panjang jalan yang dibangun (km)	32	11	11	11	11	1,790.4	Aceh	KemenPUPR
Jembatan Sp. Uning - Takengon	Panjang jembatan yang dibangun (m)					300	140.0	Aceh	KemenPUPR
Lintas Tengah Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun (km)			1			11.8	Jawa Timur	KemenPUPR
Lintas Tengah Kalimantan	Panjang jalan yang dibangun (km)	20	13	13	6	6	562.6	Kalimantan Tengah	KemenPUPR
Lintas Timur Riau	Panjang jalan yang dibangun (km)					20	193.0	Riau	KemenPUPR
Lintas Timur Sumatera	Panjang jalan yang dibangun (km)					65	387.0	Lampung	KemenPUPR
Lintas Utara Bali	Panjang jalan yang dibangun (m)		1083	1083	933		1,050.0	Bali	KemenPUPR
Pansela Jawa Tengah	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	2	0	0	0	68.5	Jawa Tengah	KemenPUPR
Pansela Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun (km)	38	54	60	60	36	2,496.6	Jawa Timur	KemenPUPR
Pansela Yogyakarta	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	18	6	6	0	495.1	Yogyakarta	KemenPUPR
Penanganan Jalan dampak bencana Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)	786					1,016.0	Sulawesi Tengah	KemenPUPR
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	Panjang jembatan yang dibangun (m)	37					325.0	Sulawesi Tengah	KemenPUPR
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan Sulawesi Tengah	Panjang jembatan yang dibangun (m)					4	32.8	Sulawesi Tengah	KemenPUPR
Pengembangan wilayah untuk daerah tertinggal	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Papua Barat	KemenPUPR
Penghubungan lintas timur dan barat Sumatera	Panjang jalan yang dibangun (km)				15		125.0	Bengkulu	KemenPUPR
Penghubungan lintas utara - selatan Gorontalo	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	20	20			960.0	Gorontalo	KemenPUPR
Penghubungan lintas utara - selatan Jabar	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	0	0	0	0	136.6	Jawa Barat	KemenPUPR
Perbatasan Kaltim	Panjang jalan yang dibangun (km)	63	55	32	6	6	1,580.3	Kalimantan Timur	KemenPUPR
Jalan Trans/Perbatasan Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	110	110	90	90	90	5,923.6	Papua	KemenPUPR
Perkotaan (Imogiri - Sentolo)	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Yogyakarta	KemenPUPR (KPB)U
Pulau Pulau Kecil Terluar	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	25	25	25	25	1,680.0	Maluku	KemenPUPR
Jembatan Samota	Panjang jembatan yang dibangun (m)					200	150.0	Nusa Tenggara Barat	KemenPUPR
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Kepulauan Riau	KemenPUPR (KPB)U
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi)	Panjang jembatan yang dibangun (m)						0.0	Sumatera Selatan	KemenPUPR (KPB)U
Jembatan Muna-Buton	Panjang jembatan yang dibangun (m)					110	800.0	Sulawesi Tenggara	KemenPUPR
Jalan Akses dan Jembatan Pulau Balang	Panjang jembatan yang dibangun (m)					1909	549.3	Kalimantan Timur	KemenPUPR
Jembatan Pulau Laut	Panjang jembatan yang dibangun (m)					150	1,500.0	Kalimantan Selatan	KemenPUPR
Jembatan Lewamori	Panjang jembatan yang dibangun (m)					300	500.0	Nusa Tenggara Barat	KemenPUPR
Jembatan Bian	Panjang jembatan yang dibangun (m)					140	180.0	Papua	KemenPUPR
Jembatan Kapota	Panjang jembatan yang dibangun (m)					40	250.0	Sulawesi Tenggara	KemenPUPR
Jembatan Kapuas 3	Panjang jembatan yang dibangun (m)					200	300.0	Kalimantan Barat	KemenPUPR
Jembatan Srandaan	Panjang jembatan yang dibangun (m)					220	700.0	Yogyakarta	KemenPUPR
Jembatan Kahayan 2	Panjang jembatan yang dibangun (m)					140	300.0	Kalimantan Tengah	KemenPUPR
Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	0	0	5	5	256.8	Jawa Tengah, Jawa Timur	KemenPUPR
Jalan akses KI Weda	Panjang jalan yang dibangun (km)					25	275.0	Maluku Utara	KemenPUPR
Lintas Seram (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	5	5	5	5	250.0	Maluku	KemenPUPR
Trans Mentawai (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	9	13	12	12	11	716.5	Sumatera Barat	KemenPUPR
Trans Nias (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	5	5	5	5	305.9	Sumatera Utara	KemenPUPR
Trans Pulau Buton (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	5	5	5	4	279.7	Sulawesi Tenggara	KemenPUPR
Trans Pulau Muna (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	8	8	7	7	436.8	Sulawesi Tenggara	KemenPUPR
Trans Pulau Simeleu (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	9	8	8	7	476.0	Aceh	KemenPUPR
Trans Pulau Enggano (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	8	8	7	7	436.8	Bengkulu	KemenPUPR
Trans Pulau Kei Besar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	16	23	22	21	20	1,274.2	Maluku	KemenPUPR
Trans Pulau Wetar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	12	17	17	16	15	960.2	Maluku	KemenPUPR
Trans Pulau Moa (DAK)	Panjang jalan yang dibangun (km)	7	10	10	9	9	567.6	Maluku	KemenPUPR
Trans Pulau Selaru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	7	10	9	9	9	541.4	Maluku	KemenPUPR
Trans Pulau Aru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	9	9	8	8	502.2	Maluku	KemenPUPR
Trans Pulau Babar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	7	10	10	9	9	567.6	Maluku	KemenPUPR
Trans Pulau Buru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	9	9	8	8	502.2	Maluku	KemenPUPR
Trans Pulau Sumba (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	18	27	26	25	23	1,483.5	Nusa Tenggara Timur	KemenPUPR

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Trans Pulau Biak (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	13	19	18	18	17	1,054.4	Papua	KemenPUPR
Jalan Lingkar Pulau Morotai (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	14	10	10	10	0	422.8	Maluku Utara	
Jembatan Sambas Besar	Panjang jembatan yang dibangun (m)					1000	1,860.0	Kalimantan Barat	
ProP : Pembangunan Jalan Tol	Panjang jalan yang dibangun (km)						567,846.0		
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol yang dibangun (km)								
Jalan Tol Non Trans Jawa (APBN)							3,986.0	Tersebar (Jawa)	KemenPUPR
Jalan Tol Non Trans Jawa (KPBU)							126,440.0	Tersebar (Jawa)	Badan Usaha
Jalan Tol Jabodetabek (APBN)							0.0	Tersebar (Jabotabek)	KemenPUPR
Jalan Tol Jabodetabek (KPBU)							110,823.0	Tersebar (Jabotabek)	Badan Usaha
Jalan Tol Trans Jawa (APBN)							0.0	Tersebar (Jawa)	KemenPUPR
Jalan Tol Trans Jawa (KPBU)							43,308.0	Tersebar (Jawa)	Badan Usaha
Jalan Tol Trans Sumatera (APBN)							22,910.0	Tersebar (Sumatera)	KemenPUPR
Jalan Tol Trans Sumatera (KPBU)							213,995.0	Tersebar (Sumatera)	Badan Usaha
Jalan Tol Kalimantan (APBN)							2,663.0	Tersebar (Kalimantan)	KemenPUPR
Jalan Tol Kalimantan (KPBU)							25,505.0	Tersebar (Kalimantan)	Badan Usaha
Jalan Tol Sulawesi (APBN)							3,061.0	Tersebar (Sulawesi)	KemenPUPR
Jalan Tol Sulawesi (KPBU)							15,155.0	Tersebar (Sulawesi)	Badan Usaha
ProP : Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	Panjang jalan yang dibangun (km)						5,819.9		
Akses KEK Galang Batang I	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	2	0	0	0	11.8	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Akses KEK Mandalika	Panjang jalan yang dibangun (km)	(lahan)	6	6	6	0	1,399.8	Nusa Tenggara Barat	KemenPUPR
Akses KEK Seimangke	Panjang jalan yang dibangun (km)					10	30.0	Sumatera Utara	KemenPUPR
Akses KEK Sorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	7	7	7	7	444.1	Papua Barat	KemenPUPR
Akses KI Bintuni	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Papua Barat	KemenPUPR (KPBU)
Akses KI Gresik	Panjang jalan yang dibangun (km)						5	60.0	Jawa Timur
Akses KI Madura	Panjang jalan yang dibangun (km)						5	50.0	Jawa Timur
Akses KI Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)						3	30.0	Jawa Tengah
Akses KI Jorong	Panjang jalan yang dibangun (km)						6	60.0	Kalimantan Selatan
Akses KI Batu Licin	Panjang jalan yang dibangun (km)						6	60.0	Kalimantan Selatan
Akses KI Surya Borneo	Panjang jalan yang dibangun (km)						1	10.0	Kalimantan Tengah
Akses KI Ketapang	Panjang jalan yang dibangun (km)						12	123.0	Kalimantan Barat
Akses KI KemungkinG	Panjang jalan yang dibangun (km)						5	50.0	Jambi
Akses KI Wai Pisang	Panjang jalan yang dibangun (km)						2	20.0	Lampung
Akses KI/KEK Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)						7	60.0	Sulawesi Tengah
Akses KIPI Tanah Kuning	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	0	0	12.5	12.5	600.0	Kalimantan Utara	KemenPUPR
Akses KSPN Borobudur	Panjang jalan yang dibangun (km)			20			175.0	Yogyakarta	KemenPUPR
Akses KSPN Labuan Bajo	Panjang jalan yang dibangun (km)	6.681	21	21	21	21	1,402.2	Nusa Tenggara Timur	KemenPUPR
Akses KSPN Wakatobi	Panjang jalan yang dibangun (km)						225.0	Sulawesi Tenggara	KemenPUPR
Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	Panjang jalan yang dibangun (km)						223.0	Jawa Timur	KemenPUPR
Akses Likupang (KPBU)	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Sulawesi Utara	KemenPUPR (KPBU)
Akses wisata Samota (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)					150	300.0	Nusa Tenggara Barat	KemenPUPR
Jalan akses KEK Arun Lhoksumawe	Panjang jalan yang dibangun (km)						48.0	Aceh	KemenPUPR
Jalan akses KEK Tanjung Lesung	Panjang jalan yang dibangun (km)			10	10		165.0	Banten	KemenPUPR
Jalan akses KI Sadai	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Bangka Belitung	KemenPUPR
Jembatan Nibung 1-2	Panjang jembatan yang dibangun (m)				160		40.0	Bangka Belitung	KemenPUPR
Jalan akses KSPN Sabang (Pulau Weh)	Panjang jalan yang dibangun (km)		15				85.0	Aceh	KemenPUPR
Jalan akses wisata daerah (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)			21			148.0	Aceh	KemenPUPR
ProP : Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal)	Panjang jalan yang dibangun (km)						3,110.8		
Akses Bandara Bima	Panjang jalan yang dibangun (km)					4	45.0	Nusa Tenggara Barat	KemenPUPR
Akses Bandara Samsoedin Noer	Panjang jalan yang dibangun (km)					2	20.0	Kalimantan Selatan	KemenPUPR
Akses Bandara Tambelan (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)						42.0	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Akses Bandara Waingapu	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	5	0	0	0	120.0	Nusa Tenggara Timur	KemenPUPR
Akses ke simpul transportasi	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	1	1	1	1	67.2	Kalimantan Timur	KemenPUPR

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Akses Pelabuhan Depapre	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	2	0	0	0	72.0	Papua	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Gresik	Panjang jalan yang dibangun (km)				5		60.0	Jawa Timur	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Kuala Enok	Panjang jalan yang dibangun (km)				4		40.0	Riau	KemenPUPR
Akses pelabuhan Kuala Tungkal	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	2.5	2.5	2.5	2.5	240.0	Jambi	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Pancur	Panjang jalan yang dibangun (km)			3.5			30.0	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Parlimbungan Ketek	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	5.625	6	6	6	636.0	Sumatera Utara	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Patimban	Panjang jalan yang dibangun (km)	8	0	0	0	0	130.0	Jawa Barat	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Pelaihari (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)				5		50.0	Kalimantan Selatan	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Penyeberangan (dari PKN)	Panjang jalan yang dibangun (km)					20	193.0	Riau	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Sangata	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	0	0	0	0	48.0	Kalimantan Timur	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Sintete	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	1.25	1.25	1.25	1.25	120.0	Kalimantan Barat	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api	Panjang jalan yang dibangun (km)					8	80.0	Sumatera Selatan	KemenPUPR
Akses Pelabuhan Teluk Tapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	8	8	8	8	816.0	Sumatera Barat	KemenPUPR
Akses Stasiun Gede Bage	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	6.05	2			193.6	Jawa Barat	KemenPUPR
Akses Terminal Tipe A Liwas	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	0	0	3	0	72.0	Sulawesi Utara	KemenPUPR
Akses Terminal Tipe A Padang	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	0	0	1.5	0	36.0	Sumatera Barat	KemenPUPR
ProP : Preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	Persentase mantap jalan nasional (%)	950	950	950	950	950	0.0		
ProP : Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	Persentase mantap jalan provinsi, Kab/kota (%)	70/59	71/60	72/62	73/63	75/65	0.0		
ProP : Pengembangan Wilayah Suramadu							700.3		
Penyiapan kawasan siap bangun	luas lahan kawasan (hektar)	50 Ha	50 Ha	50 Ha	23 Ha		391.7	Provinsi Jawa Timur	
Stimulasi infrastruktur	Panjang jalan dibangun/dipelihara (Km)	22,8 Km	26,3 Km	24,8 Km	31,1 Km	29,4 Km	308.6	Provinsi Jawa Timur	
KP : Konektivitas Kereta Api	Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda)(km)						155,007.9		
	Persentase kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index kategori 1 dan 2 (persen)								
	Panjang jalur KA yang beroperasi (km)								
	Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)								
ProP : Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota (angkutan Barang dan Penumpang)	Panjang jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						113,720.0		
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhokseumawe)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)		13.3				307.5	Aceh	Kemenhub
Pembangunan KA Trans Sumatera (Sei liput - Langsa - Lhok seumawe)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	6				30	1,535.0	Sumatera Utara - Aceh	Kemenhub
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei Liput)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	35					300.0	Sumatera Utara - Aceh	Kemenhub
Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut - Kota Pinang - Pondok S2-Rantau Prapat)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	33					1,134.0	Sumatera Utara	Kemenhub
Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut - Duri-Pekan baru)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					10	372.0	Riau	Kemenhub
Pembangunan KA Trans Sumatera (Jambi - Betung)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					5	350.0	Jambi	Kemenhub
Pembangunan KA Kota Padang - Bengkulu (KPBUI)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					6	207.8	Bengkulu	Kemenhub, KPBUI
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					432	25,500.0	Jakarta, Jawa Timur	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPB)U)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)		142				52,600.0	Jakarta, Jawa Barat	Kemenhub
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Cicalempka-Banjar; Kiara Condong - Cicalempaka)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	0	0		37.9	91.2	6,692.0	Jawa Barat	Kemenhub
Reaktivasi Jalur KA Pariaman-Naras - Sungai Limau	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)				11		730.0	Sumatera Barat	Kemenhub
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung-Pandeglang-Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)				17	17	1,260.0	Banten	Kemenhub
Reaktivasi jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulana; Cikudapateh-Ciwidey)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					24	360.0	Jawa Barat	Kemenhub
Pembangunan KA Makassar - Pare Pare (KPB)U)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)						2,300.0	Sulawesi Selatan	Kemenhub, KPB
Pembangunan KA Makassar - Pare Pare (APBN)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	62	39	43	9	8	9,440.3	Sulawesi Selatan	Kemenhub, KPB
Pembangunan Jalur Ganda KA (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	23		20	25		1,460.0	Jawa Timur	Kemenhub
Pembangunan KA Mengwitani - Singaraja (APBN)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					14	320.0	Bali	Kemenhub, KPB
Pembangunan KA Mengwitani - Singaraja (KPB)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					14	2,700.0	Bali	Kemenhub, KPB
Pembangunan KA Trans Kalimantan (Balik papan - Samarinda; Ibu kota Negara) (APRN)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					20	450.0	Kalimantan Timur	Kemenhub
Pembangunan KA Trans Kalimantan (Balik papan - Samarinda; Ibu kota Negara) (KPB)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					20	800.0	Kalimantan Timur	Kemenhub
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (APBN)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					10	300.0	Sumatra Utara	Kemenhub,KPB
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (KPB)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					10	1,100.0	Sumatra Utara	Kemenhub,KPB
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjang; Gunung mas - Katingan; Kutai Barat - Paser - Balikpapan; Tanjung Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Banjar masin) KPB	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					14	3,001.4	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan	Kemenhub, Pemda, KPB, Badan Usaha
Pembangunan Jalur Ganda KA Banjar - Kroya (APBN)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)					14	500.0	Jawa Tengah	KPB, Badan Usaha
ProP : Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dipelihara (km)						19,945.7		
	Terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (%)								
Peningkatan dan Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	15	25	50	20	30	1,672.3	Banten	Kemenhub
Peningkatan Jalur (KA Araskabu - Tebing Tinggi - Rantau Prapat dan Tebing Tinggi - Siantar)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	128	40	40	60	45	1,870.2	Sumatera Utara	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Jalur KA (Padang - Pariaman ; Padang- Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	14	5	20	20	10	1,316.9	Sumatera Barat	Kemenhub
Peningkatan Jalur KA (Lahat - Lubuk Linggau)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	8	20	30	30	6	749.0	Sumatera Selatan	Kemenhub
Peningkatan Jalur KA (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	91	20	20	30	53	729.0	Jawa Tengah	Kemenhub
Peningkatan Jalur KA (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	65	60	70	70	60	908.3	Jawa Timur	Kemenhub
Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)	1	1	1	1	1	12,700.0	Tersebar	Kemenhub
ProP : Pembangunan KA akses Bandara:	Terbangunnya KA akses Bandara (lokasi)						2,342.2		
	Terbangunnya KA akses Bandara (km)								
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	Terbangunnya KA akses Pelabuhan (km)	2					7.5	Jawa Tengah	Kemenhub
Pembangunan KA akses Pelabuhan Teluk Lamong	Terbangunnya KA akses Pelabuhan (km)					4	30.0	Jawa Timur	Kemenhub
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tarahan (KPBPU)	Terbangunnya KA akses Pelabuhan (km)					5	500.0	Lampung	Kemenhub
Pembangunan KA akses Pelabuhan Garongkong	Terbangunnya KA akses Pelabuhan (km)				5		500.0	Sulawesi Selatan	Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	Terbangunnya KA akses Bandara (km)	13					40.0	Jawa Tengah	Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara Raden Intan	Terbangunnya KA akses Bandara (km)					13	164.7	Lampung	Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	Terbangunnya KA akses Bandara (km)		6				1,100.0	DIY	Kemenhub
ProP : Penyediaan PSO dan Subsidi							19,000.0		
Penyediaan Kewajiban Pelayanan Publik Perkeretaapian (APBN Non Kemenhub)	Tersedianya Dana PSO Perkeretaapian (paket)	1	1	1	1	1	17,000.0	Tersebar	Kemenhub
Penyediaan Subdidi Perintis KA	Tersedianya Layanan Subsidi Perkeretaapian (lintas)	8	9	9	10	10	2,000.0	Tersebar	Kemenhub
KP : Konektivitas Laut	Jumlah pelabuhan pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (pelabuhan)						173,396.5		
	Jumlah trayek subsidi tol laut (trayek)								
ProP : Pengembangan pelabuhan utama (hub)	Terselenggaranya standardisasi infrastruktur dan pengelolaan 7 pelabuhan utama (hub)						113,000.0		
-Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	1	1	1	1	1	25,000.0	Sumatera Utara	Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta
-Pelabuhan Kijing	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Kijing	1	1	1	1	1	12,500.0	Kalimantan Barat	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
-Pelabuhan Tanjung Priok	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok	1	1	1	1	1	5,000.0	DKI Jakarta	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
-Pelabuhan Tanjung Perak	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak	1	1	1	1	1	5,500.0	Jawa Timur	Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta
-Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar	1	1	1	1	1	10,000.0	Sulawesi Selatan	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
-Pelabuhan Bitung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung	1	1	1	1	1	25,000.0	Sulawesi Utara	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
-Pelabuhan Sorong	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong	1	1	1	1	1	30,000.0	Papua Barat	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
ProP : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	Terselenggaranya pengembangan pelabuhan laut						45,003.0		
Pelabuhan Tanjung Emas	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan	1	1	1	1	1	10,000.0	Jawa Tengah	Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelabuhan Patimban	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	1	1	1	30,000.0	Jawa Barat	Kemenhub, Swasta
Pelabuhan Kendal	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan			1	1		150.0	Jawa Tengah	Kemenhub, Pemda, Badan Usaha
Pelabuhan Nabire	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					39.0	Papua	Kemenhub
Pelabuhan di NTT (pelabuhan baru)	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan						400.0	NTT	Kemenhub, Pemda, Badan Usaha
Pelabuhan Merauke	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1	1		45.0	Papua	Kemenhub
Pelabuhan di Ambon (pelabuhan baru)	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan						560.0	Maluku	Kemenhub, Pemda, Badan Usaha
Pelabuhan Labuhan Bajau	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	1			42.0	Sumatera Barat	Kemenhub
Pelabuhan Mansalean	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	1			27.7	Sulawesi Tengah	Kemenhub
Pelabuhan Teluk Sasah	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	1			36.3	Kepulauan Riau	Kemenhub
Pelabuhan Gane Dalam	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	1			26.0	Maluku Utara	Kemenhub
Pelabuhan Sawaerma	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	1			45.0	Papua	Kemenhub
Pelabuhan Pulau Bunyu	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1	1			90.0	Kalimantan Utara	Kemenhub
Pelabuhan Mesuji	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				35.0	Lampung	Kemenhub
Pelabuhan Sarmi	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					49.0	Papua	Kemenhub
Pelabuhan Tahuna	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				22.5	Sulawesi Utara	Kemenhub, Badan Usaha
Pelabuhan Seba	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				110.0	NTT	Kemenhub
Pelabuhan Bau-Bau	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				36.0	Sulawesi Tenggara	Kemenhub, Badan Usaha
Pelabuhan Wanci	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				90.0	Sulawesi Tenggara	Kemenhub, Badan Usaha
Pelabuhan Ba'a	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				33.8	NTT	Kemenhub
Pelabuhan Soasio	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				37.5	Maluku Utara	Kemenhub
Pelabuhan Saumlaki	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				67.5	Maluku	Kemenhub, Badan Usaha
Pelabuhan Tual	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan			1	1		45.0	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Namlea	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan						25.0	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Tanjung Batu Kundur	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					25.0	Kep. Riau	Kemenhub
Pelabuhan Larantuka	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					45.0	NTT	Kemenhub
Pelabuhan Moor	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					22.5	Papua	Kemenhub
Pelabuhan Jampea	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					25.0	Sulawesi Selatan	Kemenhub
Pelabuhan Geser	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					25.0	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Gorom	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					22.5	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Raijua	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					22.5	NTT	Kemenhub
Pelabuhan Wini	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					45.0	NTT	Kemenhub
Pelabuhan Moa	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					25.0	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Ujung Jabung	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				80.0	Jambi	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelabuhan Pelaihari	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			11.3	Kalimantan Selatan	Kemenhub
Pelabuhan Maloy	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			40.5	Kalimantan Timur	Kemenhub
Pelabuhan Depapre	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			50.0	Papua	Kemenhub
Pelabuhan Malarko	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			90.0	Kep. Riau	Kemenhub
Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan			1	1		90.0	Kep. Riau	Kemenhub
Pelabuhan Kariangau (Balikpapan)	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan						200.0	Kalimantan Timur	Kemenhub
Pelabuhan Palaran (Samarinda)	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan						200.0	Kalimantan Timur	Kemenhub
Pelabuhan Dompak	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					50.0	Kep. Riau	Kemenhub
Pelabuhan Tanjung Mocoh	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1					75.0	Kep. Riau	Kemenhub
Pelabuhan Serui	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				75.0	Papua	Kemenhub, Badan Usaha
Pelabuhan Kilo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1	1		50.0	NTB	Kemenhub
Pelabuhan Anggrek	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				47.5	Gorontalo	Kemenhub
Pelabuhan Belang-Belang	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			90.0	Sulawesi Barat	Kemenhub
Pelabuhan Tobelo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			90.0	Maluku Utara	Kemenhub
Pelabuhan Kaimana	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			90.0	Papua Barat	Kemenhub
Pelabuhan Pomako	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			90.0	Papua Barat	Kemenhub
Pelabuhan Dobo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			90.0	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Banggai	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			90.0	Sulawesi Tengah	Kemenhub
Pelabuhan Labuan Bajo (Multipurpose)	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1			90.0	NTT	Kemenhub, Badan Usaha
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			812.0	Kabupaten Donggala	Kementerian Perhubungan (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			130.5	Kabupaten Donggala	Kementerian Perhubungan (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			101.5	Kabupaten Donggala	Kementerian Perhubungan (PHLN)
ProP : Pelabuhan Mendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	Terbangunnya pelabuhan pendukung kawasan prioritas (kumulatif)						664.6		
Pelabuhan Benoa	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1	1	1	184.6	Bali	Kemenhub, Badan Usaha
Pelabuhan Sanur, Bali	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1	1		150.0	Bali	Kemenhub, Badan Usaha
Pelabuhan Tanah Ampo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan				1	1	90.0	Bali	Kemenhub
Pelabuhan Cruise Labuan Bajo	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	1				90.0	NTT	Kemenhub (KPBU)
Pelabuhan Gili Trawangan	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		1	1	1		150.0	NTB	Kemenhub
ProP : Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	Jumlah rute angkutan laut tetap dan teratur mendukung Tol Laut (kumulatif)						8,896.9		
Subsidi Tol Laut	Jumlah rute angkutan tol laut tetap dan teratur (trayek)	21	22	23	24	25	2,398.0	Tersebar	Kemenhub, BUMN, Swasta
Subsidi Angkutan Laut Perintis	Jumlah rute angkutan laut perintis (trayek)	113	113	113	113	113	6,498.9	Tersebar	Kemenhub
ProP : Pengembangan teknologi informasi pelayaran	Tersedianya teknologi informasi pelayaran (kumulatif)						4,500.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengadaan peralatan bongkar muat	jumlah pengadaan peralatan	25	25	25	25	25	2,500.0	Tersebar	Kemenhub, BUMN, Swasta
Penyelegaraan penggerakan alur pelayaran	lokasi penggerakan alur pelayaran (lokasi)	8	8	8	8	8	2,000.0	Tersebar	Kemenhub
ProP : Pengembangan teknologi informasi pelayaran	Tersedianya teknologi informasi pelayaran (kumulatif)						1,332.0		
Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu	terlaksananya pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu (lokasi)	20	22	24	19	20	1,332.0	Tersebar	Kemenhub, BUMN, Swasta
KP : Konektivitas Udara	Jumlah rute jembatan udara						22,014.3		
	Jumlah bandara baru yang dibangun								
	Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya								
	Jumlah bandara perairan (waterbased airport) yang dibangun								
ProP : Jembatan udara							6,404.7		
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	Pengembangan Bandara :						0.0	Kabupaten Yahukimo-Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Elelim	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	397.5	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Wamena	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	653.7	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Tanah Merah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	834.7	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Magellum	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47.1	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Korowai Batu	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	108.1	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Nop Goliath	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	525.8	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Korupun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.0	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Mozes Kolangin	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	779.5	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Oksibil	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	240.0	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Ilaga	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	487.7	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Manokwari	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	250.0	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	- Bandara Mulia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	90.5	Papua	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Papua	Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	35 Rute	35 Rute	35 Rute	35 Rute	35 Rute	1,940.1	Papua	Kemenhub
ProP : Pengembangan Bandara mendukung kawasan prioritas	a. Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)						39.9		
	b. Pembangunan Water Based Airport (Seaplane) mendukung pariwisata kepulauan/perairan (lokasi)								
	c. Masterplan pengaturan hub/spoke/feede kebandarudaraan (dokumen)								
1. Pengembangan Bandara Kalimara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi					35.4	Kabupaten Berau-Kalimantan Timur	Kemenhub
2. Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi					4.5	Kabupaten Morotai-Maluku Utara	Kemenhub
ProP : Pengembangan 10 bandara hub primer	Jumlah bandara yang dikembangkan						10,130.0		
1. Bandara Soekarno-Hatta	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	1	0	0	0	0	6,500.0	Kota Tangerang-Banten	Kemenhub, BUMN
2. Bandara Minangkabau	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	450.0	Kabupaten Padang Pariaman-Sumatera Barat	Kemenhub, BUMN
3. Bandara Supadio	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	350.0	Pontianak	Kemenhub, BUMN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
4. Bandara Sultan Syarif Kasim II	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	180.0	Kota Pekanbaru	Kemenhub, BUMN
5. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	200.0	Balikpapan	Kemenhub, BUMN
6. Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	900.0	Kabupaten Badung-Bali	Kemenhub, BUMN
7. Bandara Lombok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	350.0	Nusa Tenggara Barat	Kemenhub, BUMN
8. Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	250.0	Kota Makassar-Sulawesi Selatan	Kemenhub, BUMN
9. Bandara Samratulangi	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	100.0	Sulawesi Utara	Kemenhub, BUMN
10. Bandara Sentani	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	400.0	Kabupaten Jayapura-Papua	Kemenhub, BUMN
11. Bandara Juanda	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	250.0	Kabupaten Jayapura-Papua	Kemenhub, BUMN
12. Bandara Kualanamu	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	0	0	0	0	0	200.0	Sumatera Utara	Kemenhub, BUMN
ProP : Pembangunan 25 bandara baru	Jumlah bandara baru yang dibangun						5,299.6		
Pengembangan Bandara Kalimara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	0	0	0	0	35.4	Kabupaten Berau-Kalimantan Timur	Kemenhub
Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	0	0	0	0	50.0	Kabupaten Morotai-Maluku Utara	Kemenhub
Pengembangan Bandara Matahara (Wakatobi)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	288.2	Kabupaten Wakatobi	Kemenhub
Pengembangan Bandara Labuhan Bajo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	391.0	Kabupaten Manggarai Barat	Kemenhub
Pengembangan Bandara Sibisa	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	0	80.0	Kabupaten Parapat	Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	115.0	Kabupaten Bulungan	Kemenhub
Pengembangan Bandara Bersujud (Batuilicin)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	0	1 Lokasi	1 Lokasi	0	45.0	Kabupaten Tanah Bumbu	Kemenhub
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	245.0	Kota Palu	Kemenhub
Pengembangan Bandara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	55.0	Kabupaten Bintuni	
Pengembangan Bandara Bintuni	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	45.0	Kabupaten Bintuni	Kemenhub
Rehabilitasi dan pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana	Jumlah bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	0.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Maimun Saleh	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	60.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Lasikin	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	85.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Binaka	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	90.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Lasondre	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	55.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Rokot	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	500.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Enggano	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	1 paket	0	0	75.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Tambelan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	20.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	85.0	0	

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Letung	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	50.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	49.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Pangsuma	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	60.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Data Dawai	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	45.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Long Apung	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	35.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Yuwai Semaring	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	45.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Nunukan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	55.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Maratua	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	75.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Harun Thohir	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	65.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Naha	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	60.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Melongguane	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	40.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Miangas	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	45.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Gebe	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	35.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Rampi	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	80.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Seko	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	50.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Tardamu	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	65.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara D.C. Saundale	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	64.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Inanwatan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	72.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Enarotali	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	82.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Mulia	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	70.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Mindiptana	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	35.0	0	
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Koroaway Batu	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	45.0	0	

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	1 paket	0	0	0	68.0	0	
Rehabilitasi /peningkatan kapasitas bandara	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	0.0	0	
Bandara Marinda (Waisai)	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	13.2	Kabupaten Raja Ampat-Papua Barat	
Bandara Dewadaru-Karimunjawa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	13.2	Kabupaten Jepara-Jawa Tengah	
Bandara Pangsuma-Putussibau	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	32.0	Kabupaten Kapuas Hulu-Kalimantan Barat	
Bandara Namrole	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	30.1	Kabupaten Buru Selatan-Maluku	
Bandara Dobo	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	25.0	Kabupaten Kepulauan Aru-Maluku	
Bandara Saumlaki	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	36.7	Kabupaten Maluku Tenggara Barat-Maluku	
Bandara Dumatubun-Langgur (Karel Sadsutubun - Langgur)	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	50.0	Kabupaten Maluku Tenggara-Maluku	
Bandara M. Salahuddin-Bima	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	143.0	Kabupaten Bima-Nusa Tenggara Barat	
Bandara Mau-Alor	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	16.1	Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur	
Bandara Soa-Bajawa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	43.5	Kabupaten Ngada-Nusa Tenggara Timur	
Bandara Haliwen-Atambua	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	10.4	Kabupaten Belu-Nusa Tenggara Timur	
Bandara Bandanaira	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	99.0	Maluku	
Bandara Muko Muko	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	80.8	Kabupaten Muko-Muko-Bengkulu	
Bandara Oesman Sadik-Labuha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	27.0	Kabupaten Halmahera Selatan-Maluku Utara	
Bandara Buli-Maba	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	90.0	Kabupaten Halmahera Timur-Maluku Utara	
Bandara Sanana	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	80.0	Kabupaten Kepulauan Sula-Maluku Utara	
Bandara Rendani/Manokwari	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	1	1	1	1	136.65	772.0	Kota Manokwari-Papua Barat	
Bandara Kuffar	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	80.0	Kabupaten Seram Timur-Maluku	
Bandara Kepi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	15.0	Kabupaten Mappi-Papua	
Bandara Mopah	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)	1	1	0	0	0	33.0	Kabupaten Merauke-Papua	
ProP : Pembangunan bandara perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata							140.0		
Bandara Perairan Raja Ampat	Jumlah bandara perairan yang dibangun	0	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	30.0	Kabupaten Raja Ampat-Papua Barat	Kemenhub
Bandara Perairan Pulau Bawah	Jumlah bandara perairan yang dibangun	0	1 Lokasi	1 Lokasi	0	0	30.0	Kabupaten Bintan-Kepulauan Riau	Kemenhub
Bandara Perairan Gili Iyang	Jumlah bandara perairan yang dibangun	0	0	1 Lokasi	1 Lokasi	0	25.0	Kabupaten Sumenep-Jawa Timur	Kemenhub
Bandara Perairan Pulau Senua	Jumlah bandara perairan yang dibangun	0	0	0	1 Lokasi	1 Lokasi	35.0	Kabupaten Natuna-Kepulauan Riau	Kemenhub
Bandara Perairan Pulau Widi	Jumlah bandara perairan yang dibangun	0	0	0	0	1 Lokasi	20.0	Kabupaten Halmahera Selatan-Maluku Utara	Kemenhub
KP : Konektivitas Darat	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun						9,063.9		
ProP : Pembangunan 35 pelabuhan penyeberangan baru	Pelabuhan penyeberangan pada jalur logistik yang dibangun						3,600.0		
Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo (Sumut)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1					100.0	Sumut	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul (Bali)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1					100.0	Bali	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelabuhan Penyeberangan Sampelan (Bali)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1					100.0	Bali	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Siompu (Sultra)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1					100.0	Sultra	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Kadatua (Sultra)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1					100.0	Sultra	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Leti (Maluku)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1					100.0	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Kaimana (Papua Barat)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Papua Barat	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Sikabaluan (Sumbar)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Sumbar	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Dolong (Sulteng)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Sulteng	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Sermata (Maluku)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Makalehi (Sulut)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Sulut	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Batanta (Papua Barat)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Papua Barat	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Letung (Kepri)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Kepri	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Weda (Maluku)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Maluku	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Salawati (Papua Barat)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Papua Barat	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Merauke (Papua)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Papua	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Pangkalaseang (Sulteng)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun		1				100.0	Sulteng	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan P. Burung (Riau)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun			1			100.0	Riau	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Maritaing (NTT)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun			1			100.0	NTT	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Dakal (Riau)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun			1			100.0	Riau	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Bade (Papua)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun			1			100.0	Papua	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan P. Merbau (Riau)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun			1			100.0	Riau	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Tarempa (Kepri)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun			1			100.0	Kepri	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Siladen (Sulut)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun			1			100.0	Sulut	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Serasan (Kepri)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun			1			100.0	Kepri	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Karimata (Kalbar)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun				1		100.0	Kalbar	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Talise (Sulteng)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun				1		100.0	Sulteng	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Pasokan (Sulteng)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun				1		100.0	Sulteng	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Waren (Papua)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun				1		100.0	Papua	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan (Sumbar)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun				1		100.0	Sumbar	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung (Riau)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun				1		100.0	Riau	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Manggar (Babel)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun				1		100.0	Babel	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih (Riau)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun					1	100.0	Riau	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Wairiang (NTT)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun					1	100.0	NTT	Kemenhub
Pelabuhan Penyeberangan Kawio (Sulut)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun					1	100.0	Sulut	Kemenhub

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelabuhan Penyeberangan Pulau Seliu (Babel)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun					1	100.0	Babel	Kemenhub
ProP : Pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	Terminal penumpang dan barang antar negara						338.9		
Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun	1	1	1	-	-	73.0	Kalimantan	Kemenhub
Terminal Nanga Badau	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun			1	1		50.0	Kalimantan	Kemenhub
Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun				1	1	50.0	Kalimantan	Kemenhub
Terminal Jagoibabang	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun			1	1		50.0	Kalimantan	Kemenhub
Terminal Motaa'in	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun	1	1				17.0	NTT	Kemenhub
Terminal Motamasin	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun	1	1				50.0	NTT	Kemenhub
Terminal Wini	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun	1	1				25.2	NTT	Kemenhub
Terminal Skouw	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun	1	1				23.8	Papua	Kemenhub
ProP : Pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)						780.0		
Kaledupa-Tomia-Binongko (Sultra)	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1					30.0	Sultra	Kemenhub
Bombana-Tg Phising	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1					30.0	Sultra	Kemenhub
Tg Uban-Matak-Penagi (Kepri)	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1					30.0	Kepri	Kemenhub
Alai Insit-Pecah Buyung (Riau)	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1					30.0	Riau	Kemenhub
Sri Menanti-Krg Baru (Sumsel)	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1					30.0	Sumsel	Kemenhub
Tk. Dalam-Tk Bungus	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)		1				30.0	Sumut	Kemenhub
Sei Asam-Sunyat	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)		1				30.0	Kepri	Kemenhub
Patani-Gebe	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)		1				30.0	Maluku Utara	Kemenhub
Tk.Dalam-Gn.Sitoli-P.Pulau Batu	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)		1				30.0	Sumut	Kemenhub
Kisar-Leti-Moa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)		1				30.0	Maluku	Kemenhub
Bastiong-Moti	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)			1			30.0	Maluku Utara	Kemenhub
Sapudi-Kangean	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)			1			30.0	Jatim	Kemenhub
Kep. Mentawai	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)			1			30.0	Sumbar	Kemenhub
Dobo-Lamerang	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)			1			30.0	Maluku	Kemenhub
Cadangan Perintis KBI	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)			1			30.0	Tersebar	Kemenhub
Patumbukan-P.Tanah Jampea	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)				1		30.0	Sumsel	Kemenhub
Sofifi-Makian-Kayoa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)				1		30.0	Maluku Utara	Kemenhub
Teor-Kesui	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)				1		30.0	Maluku	Kemenhub
Penagi-Sintete	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)				1		30.0	Kalbar	Kemenhub
Garongkong-Kariangau	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)				1		30.0	Sulsel-Kaltim	Kemenhub
Kaimana-Pomako	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)					1	30.0	Papua Barat	Kemenhub
Babang-P.Mandioli	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)					1	30.0	Maluku Utara	Kemenhub

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pamana-Kewapante	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)					1	30.0	NTT	Kemenhub
Manokwari-Serui	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)					1	30.0	Papua Barat	Kemenhub
Wahai-Foley-Arar	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)					1	30.0	Papua Barat	Kemenhub
Cadangan Perintis KTI	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)					1	30.0	Tersebar	Kemenhub
ProP : Pengembangan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB)							4,345.0		
Penyelegaraan Keperintisan Angkutan jalan	Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani (lintas)	350	375	450	500	550	1,895.0	Tersebar	Kemenhub
Penyelegaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)	275	300	315	325	335	2,450.0	Tersebar	Kemenhub
PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)						137,803.5		
KP : Transportasi Perkotaan	Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)						137,566.3		
	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (kota)								
	Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (kota)								
ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel dan jalur khusus BRT (kota)						115,603.5		
Metropolitan Jakarta	Jumlah koridor angkutan massal berbasis rel yang dibangun (koridor)								
	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)								
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	1,670.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda, KPB
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	26,150.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda, KPB
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	29,800.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	350.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	4,050.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda, KPB
c. Perkeretaapian Jabodetabek (km) (APBN)	Panjang jalur yang dibangun (Km)					33	2,000.0	DKI Jakarta	Kemenhub
d. Elevated Loopline (KPBU)	Panjang jalur yang dibangun (Km)			8			4,140.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda, KPB
d. Elevated Loopline (APBD)	Panjang jalur yang dibangun (Km)			8			23,460.0	DKI Jakarta	Kemenhub, Pemda, KPB
e. KA Outer Jabodetabek (APBN)	Panjang jalur yang dibangun (Km)				5	5	500.0	DKI Jakarta	Kemenhub
Metropolitan Surabaya	Jumlah koridor angkutan massal berbasis rel yang dibangun (koridor)								
	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)								
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	1,708.5	Jawa Timur	Kemenhub, Pemda, KPB

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Rel (KPB)U	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	335.0	Jawa Timur	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	100.0	Jawa Timur	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (KPB)U	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	670.0	Jawa Timur	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	500.0	Jawa Timur	Kemenhub, Pemda, KPB
c. KA Komuter Gerbang Kertasusila	Panjang jalur yang dibangun (Km)					4	1,000.0	Jawa Timur	Kemenhub
Metropolitan Medan	Jumlah koridor angkutan massal berbasis rel yang dibangun (koridor)								
	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)								
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	3,000.0	Sumatera Utara	Kemenhub, Pemda, KPB
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (KPB)U	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	670.0	Sumatera Utara	Kemenhub, Pemda, KPB
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	1,330.0	Sumatera Utara	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	390.0	Sumatera Utara	Kemenhub, Pemda, KPB
c. KA Komuter (Medan - Binjai - Besitang)	Panjang jalur yang dibangun (Km)					20	400.0	Sumatera Utara	Kemenhub
Metropolitan Bandung	Jumlah koridor angkutan massal berbasis rel yang dibangun (koridor)								
	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)								
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	3,390.0	Jawa Barat	Kemenhub, Pemda, KPB
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (KPB)U	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	670.0	Jawa Barat	Kemenhub, Pemda, KPB
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	1,330.0	Jawa Barat	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	60.0	Jawa Barat	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (KPB)U	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	720.0	Jawa Barat	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	80.0	Jawa Barat	Kemenhub, Pemda, KPB
c. Pembangunan Jalur Ganda KA dan elektrifikasi Kiara Condong - Cicalengka	Panjang jalur yang dibangun (km)				10	17	1,500.0	Jawa Barat	Kemenhub
Metropolitan Semarang	Jumlah koridor angkutan massal berbasis rel yang dibangun (koridor)								
	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)								
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	1,500.0	Jawa Tengah	Kemenhub, Pemda, KPB

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (KPB)U)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	1,500.0	Jawa Tengah	Kemenhub, Pemda, KPB
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	310.0	Jawa Tengah	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	150.0	Jawa Tengah	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	510.0	Jawa Tengah	Kemenhub, Pemda, KPB
Metropolitan Makassar	Jumlah koridor angkutan massal berbasis rel yang dibangun (koridor)								
	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (koridor)								
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	1,000.0	Sulawesi Selatan	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)					1	150.0	Sulawesi Selatan	Kemenhub, Pemda, KPB
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)					1	510.0	Sulawesi Selatan	Kemenhub, Pemda, KPB
ProP : Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transortasi							10,000.0		
Pengembangan kawasan TOD (KPB)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (KPB)	1	1	1	1	1	10,000.0	Jabodetabek	Kemenhub, Pemda, KPB
ProP : Perkotaan Besar Lainnya	Jumlah koridor angkutan massal berbasis rel yang dibangun (koridor)						1,504.7		
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Ibu Kota Negara	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)	1					404.7	Kalimantan Timur	Kemenhub, Pemda, KPB
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kota Lainnya	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)	1	1	1	1	1	500.0	Tersebar	Kemenhub, Pemda, KPB
Elektrifikasi jalur KA Jogja-Solo	Panjang jalur yang dibangun (Km)						600.0	Jawa Tengah, Yogyakarta	Kemenhub
ProP : pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan							7,048.8		
Fly Over Bitung	Panjang Fly Over terbangun (m)		300	300			175.0	Banten	KemenPUPR
Fly Over Kopo	Panjang Fly Over terbangun (m)		433	433	433		381.2	Jawa Barat	KemenPUPR
Fly Over Canguk	Panjang Fly Over terbangun (m)				125	125	53.9	Jawa Tengah	KemenPUPR
Fly Over Madiun (Yos Sudarso)	Panjang Fly Over terbangun (m)				300	300	75.0	Jawa Timur	KemenPUPR
Fly Over Sp. Kabil	Panjang Fly Over terbangun (m)		215	215			379.0	Kepulauan Riau	KemenPUPR
Fly Over Gatot Subroto	Panjang Fly Over terbangun (m)		530				148.8	Sumatera Utara	KemenPUPR
Fly Over Pinang Baris	Panjang Fly Over terbangun (m)			270	270		151.6	Sumatera Utara	KemenPUPR
Fly Over Gamping	Panjang Fly Over terbangun (m)			500	500		215.5	Yogyakarta	KemenPUPR
Fly Over/Underpass Mendukung Major Project KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa Fase 1 Jakarta-Semarang	Panjang Fly Over terbangun (m)						5,346.0	Jawa Barat, Jawa Tengah	KemenPUPR
Underpass Bulak Kapal	Panjang Underpass terbangun (m)	167	433				122.9	Jawa Barat	KemenPUPR
ProP : Pembangunan jalan lingkar perkotaan	Panjang jalan yang terbangun (km)						3,409.3		
Lingkar Pulau Weh	Panjang jalan yang dibangun (km)			4			40.0	Aceh	KemenPUPR
Jalan Lingkar Luar Selatan Medan	Panjang jalan yang dibangun (km)						0.0	Sumatera Utara	KemenPUPR (KPB)
Jalan lingkar perkotaan Sulawesi	Panjang jalan yang terbangun (km)	2	29.955	29.955	18.45	17.45	2,530.2	Sulawesi Selatan	KemenPUPR
Jalan lingkar perkotaan Jawa	Panjang jalan yang terbangun (km)	7		15.6			350.1	Jawa Timur	KemenPUPR
Jalan Lingkar Pekalongan	Panjang jalan yang terbangun (km)						0.0	Jawa Tengah	KemenPUPR (KPB)
Pembangunan Jalan Lingkar Temanggung - Parakan	Panjang jalan yang terbangun (km)						0.0	Jawa Tengah	KemenPUPR (KPB)

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Jalan Lingkar Rembang - Lasem	Panjang jalan yang terbangun (km)						0.0	Jawa Tengah	KemenPUPR (KPB)U)
Jalan Tambakreja - Bantarsari (Lingkar Sidareja)(Pansela)	Panjang jalan yang terbangun (km)	2	0	0	0	0	25.0	Jawa Tengah	KemenPUPR
Jalan lingkar Utara Lamongan (DAK/APBN)	Panjang jalan yang terbangun (km)			6.9			91.0	Jawa Timur	KemenPUPR
Pembangunan Jalan Lingkar Tuban	Panjang jalan yang terbangun (km)						0.0	Jawa Timur	KemenPUPR (KPB)U)
Jalan Lingkar Samarinda	Panjang jalan yang terbangun (km)	0	3.885	3.885	3.885	3.885	373.0	Kalimantan Timur	KemenPUPR
ProP : Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan	6	8	10	12	14	0.0		
KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Persentase pelanggan layanan jaringan tetap pita lebar (%)	2.5	3.8	5.1	6.4	7.5	74.8		
	Persentase kota/kab yang menerapkan masterplan konsep kota cerdas (kota)	20	40	60	80	100			
ProP : Pengembangan TIK Perkotaan	Persentase Penetrasi pelanggan Layanan Jaringan tetap pita lebar	13,29	16,25	20,83	25,42	30,00	74.8		
	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasi inovasi teknologi dalam kerangka Smart City	10	20	30	40	50			
Penetrasi fixed broadband	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pita lebar terhadap total rumah tangga dengan kecepatan (>=10 Mbps) (kumulatif)	13,29	16,25	20,83	25,42	30,00	26.0	Pusat	Kemenkominfo
Gerakan menuju Smart City	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi mengimplementasi inovasi teknologi dalam kerangka Smart City (kumulatif)	10	20	30	40	50	18.5	Tersebar	Kemenkominfo
Pengembangan layanan terintegrasi nomor darurat	Persentase kabupaten kota yang menyelenggarakan layanan 112 (kumulatif)	10	20	30	40	50	30.3	Tersebar	Kemenkominfo
Pengembangan sistem kebencanaan terintegrasi	Persentase K/L/D/I yang terintegrasi sistem kebencanaan (Kumulatif)	31	36	40	45	50	0.0		Kemenkominfo
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/Kota)						56.2		
ProP : Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	7	7	7	7	9	56.2		
	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management	2	3	3	3	1			
	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan air minum dan air limbah yang terintegrasi (kab/kota/kawasan)	0	0	1	1	1			
	Jumlah NSPK terkait layanan air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit)	1	1	0	0	0			
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management	7	7	7	7	9	29.6	Kota Medan, Palembang, Kota Tangerang, Jakarta, Kota Bandung, Bandung, Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Bekasi, Kota Semarang, Kendal, Demak, Semarang, Kota Salatiga, Grobongan, Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Kota Denpasar, Bangli, Gianyar, Tabanan, Kota Banjarmasin, Banjar Baru, Barito Kuala, Banjar, Kota Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Maja, Sorong	KPB)U

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	2	3	3	3	1	9.6	Denpasar, Gianyar, Kota Palembang, Kota Makassar, Banjar, Jakarta, Kota Bandung, Bogor, Bekasi, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Depok	KPBU
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	0	0	1	1	1	15.0	Kota Medan, Kota Pelembang, Kota Bogor	Kementerian PUPR
NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah NSPK yang tersusun (unit)	1	1	0	0	0	2.0	Pusat	Kementerian PUPR
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/Kota)						56.2		
ProP : Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	7	7	7	7	8	56.2		
	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management	3	3	4	4	4			
	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan air minum dan air limbah yang terintegrasi (kab/kota/kawasan)	0	0	1	1	1			
	Jumlah NSPK terkait layanan air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit)	1	1	0	0	0			
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management	7	7	7	7	9	29.6	Kota Medan, Palembang, Kota Tangerang, Jakarta, Kota Bandung, Bandung, Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Bekasi, Kota Semarang, Kendal, Demak, Semarang, Kota Salatiga, Grobongan, Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Kota Denpasar, Bangli, Gianyar, Tabanan, Kota Banjarmasin, Banjar Baru, Barito Kuala, Banjar, Kota Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Maja, Sorong	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	2	3	3	3	1	9.6	Denpasar, Gianyar, Kota Palembang, Kota Makassar, Banjar, Jakarta, Kota Bandung, Bogor, Bekasi, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Depok	KPBU
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	0	0	1	1	1	15.0	Kota Malang, Kota Palembang, dan DKI/ Kota Bogor	Kementerian PUPR
NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah NSPK yang tersusun (unit)	1	1	0	0	0	2.0	Pusat	Kementerian PUPR
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Jumlah hunian baru layak yang terbangun di perkotaan (unit)	10,000	36,500	36,500	36,500	36,500	50.0		
ProP : Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	2	2	2	2	2	50.0		
Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Peremajaan Kawasan kumuh	Jumlah kawasan yang disediakan infrastruktur dasar dalam rangka peremajaan	2	2	2	2	2	50.0	34 Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	99.9	100	100	100	100	1,157,739.5		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1,161	1,195.75	1,230.5	1,265.25	1,300			
	Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	3.45	3.45	3.50	3.50	3.50			
KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	Susut jaringan (%)	9.20	9.01	8.93	8.78	8.60	113,994.2		
	Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8			
	Bauran EBT di pembangkitan (%)	11.7	12.50	13.30	14.10	15			
ProP : Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	Jumlah penambahan kapasitas EBT Kumulatif (MW)	933	1,697	1,501	1,065	2,287	113,994.2		
Peningkatan standarisasi dan labelling	Jumlah Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi (draft)	3	3	3	3	3	3.5		
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (rekomenadasi)	1	1	1	1	1	3.0	Pusat	KESDM
Pembangunan SPKLU	Jumlah Penambahan SPKLU (Unit) (akumulasi)	168	390	693	1,030	1,558	0.0	Tersebar	Badan Usaha
Pengembangan smart grid	Jumlah pengembangan smart grid (lokasi)	5 di Bali	Beberapa Distribusi di P. Jawa	Beberapa Distribusi di P. Jawa	Beberapa Distribusi di P. Jawa	Interkoneksi Smart Grid di Jamali	1,450.0	Sistem Jamali	Badan Usaha
Pembangunan PLTP	Jumlah kapasitas penambahan PLTP (MW)	140	80	132	300	375	71,709.8	Aceh, Banten, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Badan Usaha
Pembangunan PLTM, PLTA, PLTMH	Jumlah kapasitas penambahan PLTM, PLTA, dan PLTMH(MW)	922	1,623	1,208	1,264	2,245	38,193.0	Tersebar	Badan Usaha
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)	37.23	50.00	55.00	62.00	73.00	875.0	Kota Medan, Kota Palembang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Utara, Kota Manado, Kota Makassar	KESDM
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	1,760.0	DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, Kota Manado, Kab. Bantul, Kab. Tuban, Kab. Banyumas	Pemda
KP : Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	SAIDI rata-rata nasional (jam/pelanggan)	18	15	10	5	1	164,161.6		
	Penyediaan gas (SBM)	176,637	185,530	194,869	204,680	214,983			
ProP : Perluasan Jaringan Gas Kota	Pembangunan Jaringan Gas Kota (SR) (Kumulatif)	293,533	150,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	14,861.2		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui APBN	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN)	266,070	100,000				4,168.1	Tersebar	KESDM
Infrastruktur jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		50,000	839,555	800,000	800,000	3,937.9	Provinsi: Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Badan Usaha	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (BU)	-	583,930	-	-	-	6,715.2	Tersebar	Badan Usaha
Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Jumlah Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (dokumen)	8	8	8	8	8	40.0		KESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan)	76,958	79,240	81,522	83,804	86,086	149,300.3		
	Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur)	83	76	72	56	43			
Peningkatan kehandalan sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB)	Durasi pemadaman Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB) (Penurunan Durasi Pemadaman (jam))	On going	On going	On going	On going	47.99	2,440.0	Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	PLN
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Kalsel & Kaltim	Durasi pemadaman Sistem Kalsel & Kaltim (Penurunan Durasi Pemadaman (jam))	On going	On going	On going	On going	14.29	815.0	Sistem Kalsel & Kaltim	PLN
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar	Durasi pemadaman Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar (Penurunan Durasi Pemadaman (jam))	On going	On going	On going	On going	16.36	1,460.0	Sistem Sulsel, Sultra, Sulbar	PLN
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Papua	Durasi pemadaman Sistem Papua (Penurunan Durasi Pemadaman (jam))	On going	On going	On going	On going	26.41	384.0	Sistem Papua	PLN
Penambahan Jaringan Distribusi	Jumlah Penambahan Jaringan Distribusi (kms)	51,923	51,430	50,937	50,443	49,950	141,820.0		Badan Usaha
Penambahan Jaringan Gardu Distribusi	Jumlah Penambahan Gardu Distribusi (MVA)	4,617	4,646	4,675	4,704	4,733	0.0		Badan Usaha
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi	1	1	1	1	1	10.9	Pusat	KESDM
Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah rekomendasi peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	4	4	4	4	4	9.8	Pusat	KESDM
Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg	Jumlah paket konversi mitan ke LPG (unit)	522,616	250,397	117,289	50,000	50,000	509.3	Tersebar	KESDM
Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga	Jumlah Layanan Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga (layanan)	1	1	1	1	1	30.5		KESDM
Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur)	Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur)	83	76	72	56	43	0.0		Badan Usaha
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Kawasan 4T	Jumlah PLTS Terpusat (Unit)	0	0	5	5	5	1,050.0		KESDM
Pengembangan Biogas Komunal	Jumlah Biogas Komunal (Unit)	24	24	24	24	24	143.0	Tersebar	KESDM
Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik	Jumlah Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik (rekomendasi)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.3		KESDM
Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1	1	1	1	1	10.5	Pusat	KESDM
Penyaluran Subsidi Listrik	Jumlah alokasi subsidi listrik (triliun)						320.6	Pusat	Kemenkeu
Rekomendasi Subsidi Energi Tepat Sasaran	Jumlah rekomendasi penentuan dan pelaksanaan kebijakan harga dan subsidi bahan bakar (rekomendasi)	9	9	9	9	9	279.4	Pusat	KESDM
Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil							0.0		
Tangki Penyimpanan LPG							0.0		
KP : Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	Penjualan tenaga listrik (TWh)	265.2	279.4	299.5	320	350	879,583.7		
	Cadangan operasional BBM (hari)	23	23	23	23	23			
ProP : Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Jumlah Penambahan Kapasitas Pembangkit (kumulatif) (GW)	3062	4286	5035	4899	4218	206,183.7		
	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/ Rekomendasi)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
Penambahan kapasitas pembangkit PLTU	Jumlah Penambahan PLTU (MW)	5,697	2,601	1,205		50	133,735.0	Tersebar	Badan Usaha
Penambahan kapasitas pembangkit PLTU MT	Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	-	840	600	900		32,760.0	Tersebar	Badan Usaha
Penambahan kapasitas pembangkit PLTG/GU/MG	Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	2,384	370	990	880	70	39,429.6	Tersebar	Badan Usaha
Pengembangan Jaringan Transmisi	Jumlah Penambahan Jaringan Transmisi (kms)	4,460	4,766	4,632	3,520	1,692	0.0		Badan Usaha

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Gardu Induk	Jumlah penambahan gardu induk (MVA)	13,947	8,460	7,510	3,900	4,490	0.0		Badan Usaha
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik	1	1	1	1	1	24.7	Pusat	KESDM
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk	1	1	1	1	1	24.3	Pusat	KESDM
Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/ Rekomendasi)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.7		KESDM
Peningkatan kebijakan harga	Jumlah Kebijakan harga energi dan tarif (rekomenadasi)	1	1	1	1	1	10.0		
Pemetaan potensi PLTS	Jumlah potensi terukur PLTS (MW)	20	120	120	120	120	25.2		KESDM
Pemetaan potensi PLTBayu	Jumlah potensi terukur PLTBayu (MW)	20	200	200	200	200	33.2		KESDM
Pemetaan potensi PLTA/Mini/Mikro (MW)	Jumlah potensi terukur PLTA/Mini/Mikro (MW)	20	120	120	120	120	30.0		KESDM
Pemetaan potensi PLTBio	Jumlah potensi terukur PLTBio (MW)	20	60	60	60	60	15.6		KESDM
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut	Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider (dokumen)	Akuisisi Data dan Pra-FS di Nusa Lembongan	Akuisisi Data dan Pra-FS di Sumbawa	FS di Nusa Lembongan	FS di Sumba		12.8	Bali dan NTT	KESDM
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut	Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider (dokumen)	Akuisisi Data dan Pra-FS di Selat Sunda	Akuisisi Data dan Pra-FS di NTT	FS di Selat Sunda	FS di NTT		12.2	Selat Sunda dan NTT	KESDM
Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan	Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan (wilayah)	2	2	2	2	2	2.6	Kab. Bangli, Kab. Maluku Tengah	KESDM
Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan (Wilayah)	5	5	5	4	3	4.3	Kab. Sukabumi, Kab. Kuningan, Kab. Tegal, Kab. Manggarai Barat, Kab. Buru	KESDM
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi	Jumlah Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi (Rekomendasi)	8	10	10	10	10	55.6		KESDM
Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi	Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi (Wilayah)	3	3	3	3	3	1.9		KESDM
ProP : Pembangunan Kilang Minyak Bumi	Jumlah peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif) (ribu BOPD)	1,151.00	1,151.00	1,176.00	1,276.00	1,276.00	637,000.0		
Peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi RDMP (unit)	Jumlah RDMP (Balikpapan, Cilacap , Balongan) (Unit)	On going	On going	1 (Stage-I Balongan 25 Ribu BCPD)	1 (Stage-II Balikpapan 100 Ribu BCPD)	on going	203,000.0	Balikpapan, Cilacap , Balongan, Dumai	Badan Usaha
Peningkatan infrastruktur kilang minyak GRR Tuban (unit)	b. Jumlah Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR) Tuban (Unit)	Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat General Engineering Design, Site Development	Financing dan EPC	Financing dan EPC	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	224,000.0	Tuban	Badan Usaha
Peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi GRR Bontang (unit)	c. Jumlah Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR) Bontang	Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development	AMDAL, BED-FEED	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	210,000.0	Bontang	Badan Usaha
ProP : Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalimantan (kms)					2,219	36,400.0		
Pembangunan Pipa gas Bumi Kaltim - Kalsel	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)					208.8	36,400.0	Bontang-Banjarmasin	Badan Usaha
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalsel-Kaltim	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)					76.8	0.0	Banjarmasin-Palangkaarya	Badan Usaha
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalteng - Kalbar	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)					407.2	0.0	Palangkaraya-Pontianak	Badan Usaha
Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi(km)	15,300	15,800	16,300	16,800	17,300	0.0		KESDM

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan sektor TIK	7,3-8,1	7,3-8,1	7,3-8,1	7,3-8,1	7,3-8,1	49,418.2		
	Persentase pengguna internet (Persentase)	72.60	74.20	79.20	80.70	82.30			
	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar : a. 3G (Existing Q2 2019 : 96,3%) b. 4G (Existing Q2 2019 : 97,59%)	a. 96,5 b. 98							
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70.00	72.00	73.00	74.00	75.70			
KP : Penunasan Infrastruktur TIK	Persentase desa yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G)	91.95	92.50	93.00	94.00	95.00	45,759.8		
	Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik broadband hingga kecamatan (Persentase)	36.42	37.15	42.85	50.00	60.00			
	Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 1000 Mbns)	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00			
	Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	1.00	0.75	0.60	0.40	0.25			
	Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	53.00	60.00	70.00	75.00	80.00			
	Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	90.00	91.00	93.00	94.00	95.00			
ProP : Pengembangan infrastruktur pitalebar	Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik hingga kecamatan (kumulatif)	36.42	37.15	42.85	50.00	60.00	33,507.6		
	Persentase desa yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband 4G	91.95	92.50	93.00	94.00	95.00			
Penggelar jaringan tetap pitalebar	Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik di kecamatan (kumulatif)	36.42	37.15	42.85	50.00	60.00	319.3	Tersebar	Kemenkominfo
Penggelar jaringan tetap pitalebar	Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik di kecamatan (kumulatif)	36.42	37.15	42.85	50.00	60.00	434.0	Tersebar	Badan usaha
Fasilitasi Ducting bersama	Jumlah kabupaten/kota yang memanfaatkan ducting bersama	2	4	6	8	10	9.0	Tersebar	Kemenkominfo
BAKTI Sinyal/Last mile	Desa non komersial yang mendapatkan akses broadband (kumulatif)	5,052	5,052	5,052	5,052	5,052	12,398.0	Tersebar	Kemenkominfo
Sewa kapasitas satelit	Kapasitas satelit yang disewa (Gbps)	21	30	39	39	28	9,937.0	Tersebar	Kemenkominfo
BAKTI Satria Satelit Republik Indonesia	Kapasitas penyediaan satelit multi fungsi SATRIA (Gbps)	-	-	-	150	150	2,802.0	Tersebar	Kemenkominfo
Bakti Akses Internet	Jumlah lokasi penyediaan akses internet broadband (kumulatif)	12,000	27,000	42,000	61,000	91,000	6,838.0	Tersebar	Kemenkominfo
	Penyediaan perangkat komputer/laptop di sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, dan lain-lain						0.0	Tersebar	Kemenkes, Kemdiknas, Kemendagri, Kemenhan, Polri, Pemda
Penataan spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung ekonomi digital Indonesia	Penambahan spektrum Frekuensi Radio untuk broadband (Kumulatif)	30 MHz (2.3%)	50 MHz (3.8%)	1050 MHz (80%)	1120 MHz (85.5%)	1310 MHz (100%)	136.5	Pusat	Kemenkominfo
Pengembangan infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	Jumlah penyediaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	25	27	27	26	23	336.2	Tersebar	Kemenkominfo
Pengembangan infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	Persentase pengembangan infrastruktur Digital Licensing dalam mendukung smart service Layanan Publik (kumulatif)	50	60	70	80	100	145.9	Pusat	Kemenkominfo

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penataan bidang telekomunikasi untuk mendukung ekonomi digital	Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turannya: 1. RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) 2. RUU Telekomunikasi (UU 36 Tahun 1999) 3. RUU Pos (UU 38 Tahun 2009) 4. RUU OMNIBUSLAW 5. Aturan Turunan	1.Pengesahan RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) 2. Naskah akademik RUU OMNIBUSLAW (Bidang Telekomunikasi dan Penyiaran) 3. Naskah akademik RUU Telekomunikasi 4. Naskah akademik RUU	1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi 2. Naskah dan DIM RUU Pos 3. Naskah aturan turunan UU Penyiaran	1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi 2. Naskah dan DIM RUU Pos 3. Pengesahan aturan turunan UU Penyiaran	1. Pengesahan RUU Telekomunikasi 2. Pengesahan RUU Pos	1. Naskah aturan turunan UU 2. Naskah aturan turunan UU Pos	151.7	Pusat	Kemenkominfo
ProP : Pengembangan infrastruktur penyiaran	Percentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	53.00	60.00	70.00	75.00	80.00	5,256.2		
Sistem infrastruktur penyiaran digital	Jumlah lokasi infrastruktur penyiaran TV digital	44 headend	50 Lokasi Pemancar dan 10 Lokasi Studio	60 Lokasi Pemancar dan 15 Lokasi Studio	74 Lokasi Pemancar dan 5 Lokasi Studio	55 lokasi pemancar	4,021.3	Tersebar	Kemenkominfo
Implementasi sistem penyiaran digital	Percentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	53.00	60.00	70.00	75.00	80.00	251.2	Tersebar	Kemenkominfo
Implementasi penyiaran radio digital	Implementasi penyiaran radio digital •Simulcast AM dan DRM 30 (MF) •Simulcast FM dan DRM+ (VHF Band 2)	-	-	-	50.00	100.00	0.0	Tersebar	Kemenkominfo
Penataan spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung ekonomi digital Indonesia	Pelaksanaan optimalisasi pita spektrum frekuensi radio untuk penyiaran digital	1	1	1	-	1	25.7	Pusat	Kemenkominfo
Sarana dan prasarana infrstruktur penyiaran TV publik	Jumlah unit infrastruktur penyiaran TV publik	70	80	90	100	100	858.0	Tersebar	LPP TVRI
Sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran Radio publik	Jumlah pengembangan infrastruktur stasiun radio publik (stasiun)	15	15	15	15	15	100.0	Tersebar	LPP RRI
ProP : Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan							6,996.0		
Penyelenggaraan pusat data nasional	Jumlah penyediaan data center nasional (kumulatif)	1 paket sewa cloud dan persiapan lahan	konstruksi	2 data center	konstruksi tambahan 2 data center	4 data center (kumulatif)	6,996.0	Pusat	Kemenkominfo
KP : Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Percentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	564.1		
	Jumlah UMK yang naik kelas dari UMK menjadi usaha menengah (dari total 62.8 Juta)	16,800	33,600	50,400	67,200	84,000			
	Percentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	40	60	80	90	100			
ProP : Pemanfaatan TIK layanan pemerintah	Percentase K/L/D yang memiliki layanan administrasi terintegrasi	40.00	60.00	80.00	90.00	100.00	157.0		
	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00			
Penyelenggaraan layanan e-government (SPBE) Nasional	Percentase layanan cloud pemerintah dan interoperabilitas SPBE	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	91.0	Pusat	Kemenkominfo
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform (kumulatif)	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	46.0	Pusat	Kemenkominfo
Penetapan aplikasi generik untuk penggunaan bersama instansi pemerintahan	Dokumen penetapan aplikasi generik yang dikembangkan dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	10.0	Pusat	KEMENPANRB
Integrasi layanan instansi pemerintahan	Percentase (%) K/L/D yang memiliki layanan administrasi dan layanan publik terintegrasi	40.00	60.00	80.00	90.00	100.00	10.0	Pusat	KEMENPANRB
ProP : Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif)	-	-	1.00	2.00	3.00	407.1		
	Percentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7	4,5-5,7			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Fasilitasi startup menjadi unicorn	Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif)	-	-	1	2	3	7.2	Tersebar	Kemenkominfo
Digital technopreneur	Jumlah startup aktif yang terbentuk	25	27	29	31	33	251.4	Tersebar	Kemenkominfo
Pengembangan platform ekonomi digital pada sektor strategis	Fasilitasi platform ekonomi digital pada sektor-sektor strategis (kumulatif)	4 sektor	4 sektor	4 sektor	4 sektor	4 sektor	79.0	Pusat	Kemenkominfo
Pengembangan teknologi digital pada kawasan prioritas	Jumlah implementasi teknologi digital di kawasan prioritas/fokus pemerintah (kumulatif)	14	20	25	30	35	69.5	Tersebar	Kemenkominfo
Pengembangan teknologi digital pada kawasan strategis	Jumlah implementasi teknologi digital di kawasan prioritas/fokus pemerintah (kumulatif) :						0.0	Tersebar	Kemenkominfo
KP : Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) (kumulatif)	50,000	100,000	150,000	200,000	250,000	3,094.3		
	Jumlah K/L yang menggunakan Big Data Nasional (kumulatif)	-	3	6	9	12			
ProP : Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi							398.8		
Implementasi Big Data Nasional	Persentase K/L yang menggunakan Big Data Nasional (kumulatif)	-	3	6	9	12	0.0	Pusat	Kemenkominfo
Kajian pengembangan platform Big Data	Persentase Modeling big data bidang teknologi digital	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	7.0	Pusat	Kemenkominfo
Pengendalian konten negatif	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun	120,000	144,000	172,800	207,360	248,832	380.7	Pusat	Kemenkominfo
Regulasi Perlindungan data pribadi	Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Pengesahan RUU PDP	Naskah aturan turunan RUU PDP	Naskah aturan turunan RUU PDP	-	-	4.1	Pusat	Kemenkominfo
Perlindungan data pribadi	Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di pemerintah (K/L/D)	-	-	-	K/L : 100% Provinsi : 50%	K/L : 100% Provinsi : 100%	6.9	Pusat	Kemenkominfo
ProP : Pengembangan literasi dan keahlian TIK							1,199.6		
Fasilitasi literasi digital bagi masyarakat	Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi Masyarakat	35,000	40,000	45,000	50,000	55,000	47.5	Tersebar	Kemenkominfo
Pelatihan SDM bidang TIK	Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital (kumulatif)	50,000	100,000	150,000	200,000	250,000	1,152.1	Tersebar	Kemenkominfo
ProP : Pengembangan dan fasilitasi industri TIK							1,496.0		
Penyusunan kebijakan dan regulasi perangkat TIK	Kebijakan dan standardisasi teknologi baru	1	1	1	1	1	78.5	Pusat	Kemenkominfo
Pelaksanaan pengujian perangkat TIK	Persentase penyelesaian laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	100	100	100	100	100	105.0	Pusat	Kemenkominfo
Pengembangan Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Persentase pemenuhan standar pengujian perangkat berstandar internasional	30	50	70	90	100	1,312.5	Pusat	Kemenkominfo
JUMLAH							3,454,301.9		

MATRIKS PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional 6: Lingkungan Hidup

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2020 - 2024



Matrik Pembangunan Rancangan RPJMN 2020-2024

Prioritas Nasional : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	84.10	84.20	84.30	84.40	84.50	34,083.7		
	Indeks Kualitas Air	55.10	55.20	55.30	55.40	55.50			
	Indeks Kualitas Air Laut	58.50	59.00	59.50	60.00	60.50			
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	61.60	62.50	63.50	64.50	65.50			
KP : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	1,139	1,141	1,141	1,141	1,141	14,954.2		
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	1,668	2,625	3,000	3,375	3,750			
	Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional (juta ha)	89	89	89	89	89			
	Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun terhadap baseline (Rerata luas karhutla tahun 2015 s.d. 2019)	2	2	2	2	2			
	Luas kawasan konservasi	27	27	27	27	27			
	Luas Kawasan Konservasi Perairan	23.40	24.20	25.10	26.00	26.90			
	Akurasi informasi meteorologi	75.7	76.7	77.7	78.7	79.7			
	Akurasi informasi klimatologi	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0			
ProP : Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	Jumlah stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis, online, dan kontinyu	111	188	197	153	130	1,836.8		
	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara secara otomatis, online, dan kontinyu	15	30	31	31	32			
	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya	34	34	34	34	34			
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS	10	25	26	26	27	264.1	Tersebar	KEMEN LHK
Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Jumlah stasiun pemantauan kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu	71	148	157	113	90	900.0	15 DAS prioritas pemulihan	KEMEN LHK
Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya	34	34	34	34	34	91.2	34 provinsi	KEMEN LHK
Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan	Jumlah Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan yang Dibangun	1	0	0	0	0	74.0	Provinsi Banten	KEMEN LHK
Sertifikasi laboratorium lingkungan hidup	Jumlah sertifikasi laboratorium lingkungan hidup daerah yang diterbitkan	6	6	6	6	6	15.0	6 wilayah pulau	KEMEN LHK
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat pemantauan kualitas udara otomatis)	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS	5	5	5	5	5	47.4	Tersebar	DAK LH
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat pemantauan kualitas air otomatis)	Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu	40	40	40	40	40	307.8	15 DAS prioritas pemulihan	DAK LH
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat laboratorium uji kualitas air dan merkuri)	Jumlah kab/kota yang memperoleh penambahan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri	37	37	37	37	37	137.3	Seluruh Indonesia	DAK LH
ProP : Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	1,668	2,625	3,000	3,375	3,750	153.9		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	1,668	2,625	3,000	3,375	3,750			
	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	20	25	30	40	50			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	80	85	90	110	113			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	300	350	400	450	500			
Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	1,668	2,625	3,000	3,375	3,750	20.5	34 provinsi	KEMEN LHK
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	1,668	2,625	3,000	3,375	3,750	75.8	34 provinsi	KEMEN LHK
Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	20	25	30	40	50	10.2	34 provinsi	KEMEN LHK
Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	80	85	90	110	113	11.4	34 provinsi	KEMEN LHK
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	300	350	400	450	500	6.5	34 provinsi	KEMEN LHK
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)	-	33	40	60	60	29.5	Seluruh provinsi	KEMEN LHK
ProP : Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	Persentase Informasi Meteorologi yang Berkualitas	80	81	82	82	83	2,460.0		
	Persentase Informasi Klimatologi yang berkualitas	76	77	79	80	82			
Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II	Jumlah stasiun yang menyediakan layanan informasi cuaca digital skala desa/kelurahan dengan scaling up weather capacity II	-	1	10	34	-	346.2	34 provinsi	BMKG
Informasi meteorologi maritim melalui Strengthening of Marine Meteorology	Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi meteorologi maritim	20	20	20	20	20	1,792.3	100 pelabuhan	BMKG
Informasi peringatan dini windshear	Jumlah bandara yang memperoleh informasi peringatan dini windshear	4	3	2	2	3	321.5	14 bandara	BMKG
ProP : Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	2,391.5		
	Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/ neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	100	125	150	200	300			
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	865.5	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KEMEN LHK
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pelaksanaan pemadaman udara /pemantauan dari udara	170	170	170	170	170	197.7	34 provinsi	KEMEN LHK
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	75	75	75	75	75	18.4	Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.	KEMEN LHK
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi	60	60	60	60	60	14.7	Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat	KEMEN LHK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan kapasitas desa dalam pengolahan lahan rendah asap dan tanpa bakar	Jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan penanganan pasca bencana	39	39	39	39	39	45.2	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KEMENTAN
	Jumlah desa yang dilakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan pengolahan lahan rendah asap dan tanpa bakar	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0		KEMENTAN
	Jumlah desa yang menjadi sentra produksi rendah asap bagi komoditas utama	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0		KEMENTAN
Fasilitasi dan pembinaan tata kelola air daerah rawan kebakaran	Jumlah desa yang dilakukan pembangunan infrastruktur tata air adaptif terhadap kekeringan	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,250.0	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KEMEN PU&PERA
Peningkatan kapasitas masyarakat atau desa dalam deteksi dan pencegahan dini karhutla	Jumlah desa yang dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat atau desa dalam deteksi dan pencegahan dini karhutla	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	BNPB
Koordinasi kerangka hukum, penyusunan kluster, dan mekanisme pembiayaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Peraturan terkait pencegahan karhutla	3	3	3	3	3	0.0	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
Koordinasi implementasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya koordinasi antar instansi pencegahan karhutla	12	12	12	12	12	0.0	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
Peningkatan koordinasi Pemerintah Provinsi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya koordinasi Pemerintah Provinsi dalam pencegahan karhutla	8	8	8	8	8	0.0	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KEMENDAGRI
Pengembangan mekanisme insentif dan peningkatan kapitas desa mengakses dana untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan	Peraturan insentif penggunaan dana desa	2	2	2	2	2	0.0	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KEMENDES, PDT & TRANS
Pengembangan mekanisme insentif dan peningkatan kapitas desa mengakses dana untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan karhutla	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KEMENDES, PDT & TRANS
ProP : Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	518	730	840	960	1,080	619.5		
	Jumlah produk ramah lingkungan yang terregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	15	20	30	40			
Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	518	730	840	960	1,080	142.4	34 provinsi	KEMEN LHK
Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	20	20	20	20	20	11.4	pusat	KEMEN LHK
Dokumen Penerapan Standar	Jumlah Dokumen Penerapan Standar	25	25	25	25	25	9.9	pusat	KEMEN LHK
Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	5	15	20	30	40	7.6	pusat	KEMEN LHK
Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (TPB 12)	Jumlah Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	2	2	2	2	2	1.0	pusat	KEMEN LHK
Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline	23,56	23,56	23,58	25,24	25,25	51.3	34 provinsi	KEMEN LHK
Peningkatan Kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS	Jumlah Lembaga/forum peduli DAS yang meningkatkan kapasitasnya	34	34	34	34	34	340.0	34 provinsi	KEMEN LHK
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimanfaatkan	33	65	65	65	65	55.9	Pusat	KEMEN LHK
ProP : Pencegahan Kehilangan Keaneharagaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	65	65	65	65	65	5,355.1		
	Luas kawasan konservasi	27	27	27	27	27			
	Jumlah Kawasan Konservasi Laut yang dikelola secara berkelanjutan	10	14,5	17,5	19	20			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	6	8	12	16	20			
	Jumlah areal konservasi insitu yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	22	32	44	55	66			
	Jumlah Kebun Raya yang dikelola	2	2	3	3	3			
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	65	65	65	65	65	61.0	34 Provinsi	KEMEN LHK
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	552	552	552	552	552	122.1		KEMEN LHK
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	500	1500	2500	3500	4,500	2,747.3		KEMEN LHK
Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	11	22	33	44	55	54.9		KEMEN LHK
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,000.0		KEMEN LHK
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	1	1,6	1	0	0	300.0		KEMEN LHK
Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Luasan kawasan konservasi baru	700,000	800,000	900,000	900,000	900,000	40.0	9 Provinsi	KKP
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Luas Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif)	10,000,000	14,500,000	17,500,000	19,000,000	20,000,000	330.7	46 Lokasi	KKP
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jumlah jejaring, Kemitraan konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	25	25	25	25	25	69.0	Pusat	KKP
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	8	12	16	20	61.5	Pusat	KKP
Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	35	40	45	50	55	18.8	Daerah	KKP
Kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi	Jumlah kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi	4	4	4	4	4	5.8	Tersebar	KEMEN ESDM
Cagar Biosfer untuk Pengelolaan Biodiversitas Indonesia	Jumlah cagar biosfer baru yang diinisiasi, ditetapkan dan dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mencegah kehilangan kehati	5	4	4	4	4	12.5		LIPI
Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya yang Siap Diresmikan dan Dibuka Untuk Umum	Jumlah taman tematik dan taman border terbangun	16	16	18	18	18	43.0	10 lokasi	LIPI
	Jumlah koleksi tumbuhan terkonservasi di Kebun Raya	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	23.0	12 lokasi	LIPI
	Jumlah koleksi tumbuhan tertanam di Kebun Raya	2,800	2,800	3,000	3,000	3,000	8.5	14 lokasi	LIPI
	Jumlah SDM pengelola Kebun Raya yang terlatih	300	300	300	300	300	4.0	2 lokasi	LIPI
	Jumlah Hasil Penelitian tentang Kajian Dampak KR Terhadap Kualitas Lingkungan dan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Sekitar	4	4	4	4	4	6.0	10 lokasi	LIPI
	Jumlah bibit tanaman untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau di Indonesia	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7.5	6 lokasi	LIPI
	Jumlah pengawasan dan pembinaan perkebunrayaan	43	43	43	43	43	7.5	43 lokasi	LIPI
	Jumlah model pemanfaatan energi ramah lingkungan di kebun raya Indonesia	2	2	2	2	2	5.0	10 lokasi	LIPI
Penyusunan dan Pengesahan SRAK species terancam punah	Jumlah spesies tumbuhan terancam punah yang memiliki SRAK	0	1	0	0	1	1.0	2 lokasi	LIPI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Strategi dan Rencana Aksi (SRAK) species tumbuhan terancam kepunahan yang dilaunching	0	1	0	0	1	1.0	2 lokasi	LIPI
Monitoring Sebaran, Keragaman Jenis, dan Reproduksi untuk TSL yang terancam	Jumlah Rekomendasi Ilmiah Perdagangan Tumbuhan dan satwa liar terkait CITES	15	30	30	30	30	75.0		LIPI
Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah kawasan konservasi yang dibangun sarana dan prasarana	30	40	45	50	55	350.0	34 provinsi	Pemda/DAK
ProP : Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tersedianya data & informasi Sumber Daya Alam (SDA), Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dan Neraca SDA	14	24	24	28	28	2,137.5		
	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	65	65	65	65	65			
Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	65	65	65	65	65	1,831.5	Pusat dan Daerah	KEMEN LHK
Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	4	4	4	5	5	5.0	Pusat	KEMEN LHK
Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	1	1	1	1	1	15.0	Pusat	KEMEN LHK
Pusat Informasi Geopark	Jumlah pusat informasi geopark/geologi	2	2	2	2	2	49.2	Tersebar	KEMEN ESDM
Survei pengembangan geoheritage	Jumlah rekomendasi penetapan geoheritage	-	4	4	4	4	10.2	Tersebar	KEMEN ESDM
Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	4.3		Kementerian
Sumberdaya Genetik yang Terkarakterisasi	Sumberdaya Genetik yang Terkarakterisasi	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	3.7		Kementerian
Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA	Sistem penginderaan jauh yang terbangun	1	1	1	1	1	35.0	Pusat	LAPAN
Data Indonesian Deep Sea Research and Monitoring (I-Dream) untuk Kawasan Timur Indonesia	Jumlah data Indonesian Deep Sea Research and Monitoring yang dihasilkan	1	1	1	1	1	27.6		LIPI
monitoring sebaran, Keragaman Jenis, dan Reproduksi untuk TSL yang terancam	Jumlah jenis terancam yang terdata dan terjaga populasinya (jenis) melalui dukungan Non Detrimental Finding	2	2	2	2	2	20.0		LIPI
Penambahan informasi dan validasi jenis jenis lindungan dan endemik secara digital Indonesian Biodiversity Information Facility (INABIF)	Jumlah Penambahan informasi jenis flora dan fauna lindungan dan endemik yang tervalidasi secara online sebagai dasar informasi kehilangan kehati	150	150	150	100	150	17.0		LIPI
Pengumpulan data dan informasi daya dukung dan daya tampung satwa prioritas	Jenis Satwa Prioritas (5) dengan informasi data dayadukung dan daya tampung	1	1	1	1	1	10.0	Kawasan konservasi KLHK	LIPI
Ekplorasi kehati di lokasi terpilih di Indonesia Timur dan Pengelolaan hasil Koleksi Flora, fauna dan Mikroorganisme sebagai rujukan nasional (Konservasi melalui koleksi sebagai rujukan nasional)	Jumlah penambahan koleksi spesimen jenis flora, fauna dan mikroorganisme dan informasi genetiknya yang tersimpan dalam koleksi ilmiah nasional koleksi kehati	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	18.0		LIPI
Pemetaan flora dan fauna terpilih (endemik, langka, dan terancam)	Jumlah Peta jenis flora dan fauna endemik, langka, dan terancam		1	1	1	1	4.0		LIPI
Pembangunan Biobank Plasma Nutfah dan Hidupan Liar untuk mencegah kepunahan	Jumlah koleksi jaringan biologis jenis flora fauna sebagai referensi BioBank	500	500	500	500	500	20.0		LIPI
	Jumlah Pusat Koleksi Xylarium beserta informasi dan databasenya di propinsi terpilih	5	5	5	5	5	7.0		LIPI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Karakterisasi dan Valuasi Kawasan Ekosistem Esensial: Karst, gambut dan danau. Jawa, Sumatera Indonesia Timur	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terkarakterisasi kehati untuk rekomendasi pencegahan kehilangan kehati	3	3	3	3	3	25.0		LIPI
Penggalian informasi kehati pulau-pulau kecil terluar (Indonesia Timur: Wetar, Alor, kep Halmahera dll), Indonesia Barat: Kep Anambas/Siantan/Bajau/Natuna)	Jumlah kawasan ekosistem pulau-pulau kecil yang terkarakterisasi informasi kehati (bioprospeksi & karakteristik kayu), serta etnobiologinya untuk rekomendasi pencegahan kehilangan kehati	1	1	1	1	1	35.0		LIPI
KP : Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	64.80	67.10	68.51	69.20	69.80	8,877.2		
	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut terhadap baseline	20	30	40	50	60			
	Jumlah limbah B3 yang terkelola	89.44	98.68	107.99	117.22	126.49			
ProP : Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	42	52	62	72	82	1,131.4		
	Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	53	60	70	70	70			
	Jumlah daerah operasional Manggala Agni yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	24	24	24	24	24			
Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum	4	10	20	20	20	124.6	Sungai Citarum	KEMEN LHK
Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air	49	50	50	50	50	277.1	14 DAS Prioritas	KEMEN LHK
Pemantauan Sampah Laut dan Coastal Clean Up	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up	40	50	60	70	80	25.2	34 provinsi	KEMEN LHK
Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut	2	2	2	2	2	5.8	Batam, Bintan	KEMEN LHK
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	8	8	8	8	8	35.8	15 Lokasi	KKP
Coral Reef Rehabilitation and Management Program	Jumlah data status sumber daya pesisir yang disediakan	5	5	5	5	5	663.1	34 provinsi	LIPI
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	14.00	16.40	17.99	18.90	19.70	3,042.9		
	Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	50.80	50.70	50.52	50.30	50.10			
Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah pengurangan timbulan sampah	5.65	6.23	6.81	7.14	7.48	100.9	34 provinsi	KEMEN LHK
Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah pengurangan timbulan sampah	8.35	10.17	11.18	11.76	12.22	162.7	34 provinsi	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah penanganan timbulan sampah	19.26	19.19	19.12	19.05	18.97	673.9	34 provinsi	KEMEN LHK
Penanganan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah penanganan timbulan sampah	31.54	31.51	31.40	31.25	31.13	1,105.4	34 provinsi	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	Jumlah fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF) yang terbangun	0	1	1	1	1	1,000.0	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)	KEMEN LHK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	10% (5 ton)	10% (5 ton)	20% (10 ton)	20% (10 ton)	20% (10 ton)	76.1		
	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	5	5	5	5			
Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	5	5	5	5	70.1	25 provinsi	KEMEN LHK
Pengembangan pengemulsi hayati untuk meningkatkan ekstraksi emas sebagai substitusi produk impor	Jumlah PESK (Pertambangan Emas Skala Kecil) yang memanfaatkan Teknologi hijau ekstraksi emas	1	1	1	2	2	6.0		LIPI
ProP : Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	2	-	2	-	-	4,626.8		
	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	6	7	7	7			
Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	6	7	7	7	547.7	32 provinsi (diutamakan kota ibukota provinsi)	KEMEN LHK
Pengelolaan limbah medis di dalam fasyankes	Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	2,600	3,000	4,850	6,250	8,800	63.2	34 Provinsi	KEMKES
Pengembangan mesin pendaur ulang limbah medis ramah lingkungan	Jumlah rumah sakit daerah yang mempergunakan pengolahan limbah kantong plastik infus	6	8	10	10	10	12.0	Jawa, dan Sulawesi	LIPI
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sumatera (1 unit)	pembangunan fisik	pembangunan fisik	operasi	operasi	operasi	1,000.0	Sumatera Utara (Kab. Batubara/Kab. Simalungun) / Sulawesi Selatan / Jambi	KPBU
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumapua	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua / Sumapupa (1 unit)	Studi/Kajian (OBC dan FBC)	pembangunan fisik	pembangunan fisik	operasi	operasi	1,001.0	Sulawesi Selatan (Kab. Barru/Kab. Pangkajene Kepulauan/Kab. Bantaeng/Kab. Gowa)	KPBU
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Kalimantan (1 unit)	Studi/Kajian (OBC dan FBC)	pembangunan fisik	pembangunan fisik	operasi	operasi	1,001.0	Kalimantan Timur (Kab. Kutai Timur/Kab. Kutai Kartanegara)	KPBU
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa Timur	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Jawa Timur (1 unit)	Studi/Kajian (SP)	Studi/Kajian (OBC dan FBC)	pembangunan fisik	pembangunan fisik	operasi	1,002.0	Jawa Timur (Kab. Lamongan)	SWASTA
KP : Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	301,800	335,000	335,000	335,000	335,000	6,393.5		
	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	260,000	220,000	270,000	220,000	230,000			
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	20	21	22	24	26			
	Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	25	25	25	25	25			
ProP : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,516.3		
	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1,800	35,000	35,000	35,000	35,000			
Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,858.7	7 provinsi	KEMEN LHK
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1,800	35,000	35,000	35,000	35,000	1,657.6	12 provinsi	KEMEN LHK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan secara nasional	5,577.5	5,680.0	5,790.0	5,890.0	5,990.0	1,162.4		
	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan	250,000	200,000	250,000	200,000	200,000			
Peningkatan luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000			
	Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	77.5	80.0	90.0	90.0	90.0	381.1	4 provinsi	KEMEN LHK
Lahan reklamasi pertambangan	Luas lahan reklamasi pertambangan	5,500	5,600	5,700	5,800	5,900	214.1	17 provinsi	KEMEN ESDM
Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	Jumlah lahan terkontaminasi limbah non-institusi yang terpulihkan	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000	533.4		KEMEN LHK
Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan	250,000	200,000	250,000	200,000	200,000	33.2		KEMEN LHK
Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan	2	2	2	2	2	0.6		Kementan
ProP : Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	20	21	22	24	26	37.9		
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	16	16	16	16	16	0.0	30 Lokasi	KKP
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	4	5	6	8	10	37.9	34 provinsi	KEMEN LHK
ProP : Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1,006.0		
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,000.0		KEMEN LHK
Reintroduksi species tumbuhan terancam punah	Jumlah species tumbuhan terancam punah yang direintroduksi ke habitat asal	1	1	1	1	1	3.0	5 lokasi	LIPI
Peningkatan jumlah species tumbuhan terancam punah di populasi	Jumlah bibit yang direintroduksi	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3.0	5 lokasi	LIPI
ProP : Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	Jumlah Kebun Raya Baru yang dikembangkan/inisiasi	2	2	2	2	2	671.0		
	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	10	10	10	10	10			
	Jumlah spesies tumbuhan terancam punah yang terkonservasi di Kebun Raya	4	4	4	4	4			
Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	10	10	10	10	10	499.2	Pusat dan Daerah	KEMEN LHK
Pengembangan entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati	Jumlah entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6.8	Pusat dan Daerah	KEMEN LHK
Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun	5	5	5	5	5	100.0	Medan, Pekanbaru, Surabaya, Denpasar, Ambon, Manado, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Jayapura	KEMEN LHK
Pengembangan Kebun Raya Baru untuk mendukung konservasi spesies terancam punah di habitat ex-situ	Jumlah Masterplan Kebun Raya Baru yang akan diaplikasikan	3	3	3	3	3	45.0	15 lokasi	LIPI
Konservasi Spesies Tumbuhan Terancam Punah	Jumlah spesies tumbuhan terancam punah yang dilakukan assessment	4	4	4	4	4	6.0	15 lokasi	LIPI
	Jumlah bibit spesies terancam punah	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4.0	10 lokasi	LIPI
	Jumlah koleksi kehati sebagai sumber restocking dan konservasi tumbuhan dalam bentuk Bank Biji, Bank Polen, Bank Spora	500	500	500	500	500	10.0	4 lokasi	LIPI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	50	60	65	68	70	3,858.7		
	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	219	387	427	472	540			
	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1,700,000	1,750,000	1,800,000	1,850,000	1,900,000			
	Jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	5	8	6	10	5			
ProP : Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung	30	30	30	35	35	28.1		
Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	7	7	8	7	23.1	34 provinsi	KEMEN LHK
KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya tampung	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis Dokumen Daya Dukung Daya tampung	30	30	30	30	30	5.0	34 provinsi	KEMEN LHK
ProP : Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,556.2		
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Mampu Menerapkan Sistem Izin Lingkungan yang berfokus pada penurunan beban pencemar lingkungan hidup dengan berbasis sistem informasi dalam rangka Mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS	20	50	100	100	100			
	Jumlah dilaksanakannya Operasi Pengamanan Hutan	250	250	250	250	250			
Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1,700,000	1,900,000	2,150,000	2,150,000	2,100,000	548.4	33 provinsi	KEMEN LHK
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	110	250	300	380	400	1,161.2	34 provinsi	KEMEN LHK
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK	1,000	1,500	1,700	1,950	2,100	548.2	Pusat	KEMEN LHK
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	550	700	800	900	201.7	Pusat	KEMEN LHK
Penguatan Sistem Kajian Dampak Lingkungan serta Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Pengembangan dan penerapan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan (sistem), Penguatan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja sistem kajian dampak lingkungan (Prov)	3	3	3	3	3	46.7	34 provinsi	KEMEN LHK
Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK	Jumlah data spesies kayu pada aplikasi AIKO KLHK	0	1,050	1,150	1,250	1,350	50.0	Pusat	KEMEN LHK
ProP : Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terselesaikannya kasus pidana LHK sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	173	285	315	350	400	1,274.5		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	46	102	112	122	140			
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	173	285	315	350	400	632.1	Pusat	KEMEN LHK
Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	46	102	112	122	140	330.6	Pusat	KEMEN LHK
PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	210	500	600	750	1,000	311.7	Pusat	KEMEN LHK
PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Percentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	44,519.1		
	Percentase potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	0.34	0.28	0.27	0.26	0.25			
	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0			
KP : Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN	0.36	0.47	0.77	1.06	1.36	21,651.8		
	Percentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	90.00	92.00	94.00	96.00	100.00			
ProP : Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	5	5	5	5	5	365.8		
	Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	15	15	15	15	15			
	Jumlah Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	100	100	100	100	100			
Penyusunan peta likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional, dan kawasan industri	Jumlah peta likuifaksi yang disusun	2	2	2	2	2	2.0	Pusat	KEMEN ESDM
Penyusunan peta potensi land subsidence kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	Jumlah peta potensi land subsidence yang disusun	2	2	2	2	2	2.0	Pusat	KEMEN ESDM
Penguatan Data dan informasi Bencana Geologi	Jumlah Peta Geologi Bersistem dan Bertema	12	12	12	12	12	19.5	Pusat	KEMEN ESDM
Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketahanan bencana geologi	Jumlah kabupaten/wilayah yang terlayani sosialisasi mitigasi bencana geologi	11	29	29	29	29	15.3	Pusat dan daerah	KEMEN ESDM
Layanan Peningkatan Sarana Pusat Pengendali Operasi Kebencanaan	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pusdalops	10	10	10	10	10	58.0	34 Provinsi	BNPB
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Tersusun	6	6	6	6	6	14.9	34 Provinsi	BNPB
Layanan Peningkatan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	Jumlah layanan data dan informasi kebencanaan	8	8	8	8	8	120.5	Pusat	BNPB
Layanan Kehumasan	Jumlah layanan Budaya Sadar Bencana	7	7	7	7	7	29.8	34 Provinsi	BNPB
Dokumen Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Risiko Bencana	6	6	6	6	6	11.5	Pusat	BNPB
Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana	7	7	7	7	7	29.8	34 Provinsi	BNPB
Masyarakat Dan Aparatur Pemda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah Masyarakat Dan Aparatur Pemda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	390	390	390	390	390	8.3	34 Provinsi	KEMENDES, PDT & TRANS
Pengurangan risiko krisis kesehatan	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	117	123	124	124	124	54.2	6 provinsi, 26 kota, 85 kabupaten	KEMKES
ProP : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	14	14	14	14	14	306.9		
	Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	3	3	3	3	3			
Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34	34	34	34	34	6.6	34 Provinsi	KEMENDAGRI

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5	5	5	5	5	9.1	34 Provinsi	KEMENDAGRI
Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	34	34	34	34	34	5.4	34 Provinsi	KEMENDAGRI
Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara	Jumlah peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara	828	828	828	828	828	272.5	Pusat	KEMEN PU&PERA
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi	1		1		1	9.0	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuefaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogyakarta	KEMEN PU&PERA
Rekomendasi Strategi Pengembangan Sistem Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Mitigasi Risiko Bencana	1 Paket Rekomendasi	4.3	34 Provinsi	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN				
ProP : Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	jumlah kab/kota yang memiliki Standar Minimal Peralatan dan logistik kebencanaan	200	225	250	275	300	12,155.5		
	Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	65	70	75	80	85			
Layanan Pengadaan dan Distribusi Logistik Kebencanaan	Terlaksananya Pengadaan Logistik Kebencanaan	34	34	34	34	34	110.5	34 Provinsi	BNPB
Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan	Jumlah Lokasi yang mendapatkan bantuan peralatan kebencanaan	110	110	110	110	110	232.1	34 Provinsi	BNPB
Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Penanganan Darurat dan Pemulihan Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana	500	2,000	2,000	2,000	2,000	56.0	Pusat	KEMENSOS
Dokumen Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Logistik Kebencanaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelegaran Logistik Penanggulangan Bencana	13	13	13	13	13	53.6	Pusat	BNPB
Dokumen Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Peralatan Kebencanaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Peralatan Kebencanaan	8	8	8	8	8	41.3	Pusat	BNPB
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana tanah longsor	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan	25	25	25	25	25	3,750.0	Tersebar	KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan sabo dam penahan banjir dan sedimen di wilayah sungai prioritas	Jumlah sabo dam yang dibangun atau ditingkatkan	21	15	15	15	15	1,620.0	Tersebar	KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana	Jumlah infrastruktur vital yang ditingkatkan ketahannya terhadap risiko bencana	2	10	10	10	10	42.0	Tersebar	KEMEN PU&PERA
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)	12	12	10	8	8	6,250.0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	KEMEN PU&PERA
ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian)	50	50	50	50	50	90.5		
	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana (dokumen)	55	55	55	55	55			
Master Plan Kawasan Rawan Bencana	jumlah rekomendasi teknis kawasan rawan bencana yang disusun	2	2	2	2	2	20.1	Pusat	KEMEN ATR/BPN
Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah kajian risiko bencana tersusun	3	3	3	3	3	25.4	Pusat	BNPB
Penegakkan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah rekomendasi geologi terpadu untuk daerah perkotaan	4	4	4	4	4	45.0	20 kota	KEMEN ESDM
ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2,505.6		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase waktu Respon penanganan darurat kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100			
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Jumlah Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	40	40	40	40	40	0.0	34 provinsi	BASARNAS
Rekomendasi dan Kebijakan Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar	Tersusunnya Rekomendasi Pemberian dan Kebijakan Bantuan Kebutuhan Dasar	45	45	45	45	45	32.0	34 provinsi	BNPB
Penanggulangan Krisis Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan	35	35	35	35	35	30.8	Kabupaten/kota terdampak bencana dan DTPK	KEMKES
Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (Orang)	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	503.9	34 Provinsi	KEMENSOS
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	Jumlah penduduk di lokasi rawan bencana yang memperoleh pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi	214,952	214,952	214,952	214,952	214,952	838.0	34 Provinsi	KEMENSOS
Pengelolaan Operasi SAR	Jumlah Dokumen Penggerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR	39	39	39	39	39	0.0	34 provinsi	BASARNAS
Operasi Penanganan Darurat	Terselenggaranya Operasi Penanganan Darurat Bencana	21	21	21	21	21	1,092.9	34 provinsi	BNPB
Layanan Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	Layanan Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	70	70	70	70	70	8.0	34 provinsi	BNPB
ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	50	75	90	100	100	232.6		
	Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	5	5	5	5	5			
Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah Lokasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik	4	4	4	4	4	29.8	34 provinsi	BNPB
Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana	Jumlah Lokasi Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi di Wilayah Pascabencana	13	13	13	13	13	27.2	34 provinsi	BNPB
Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial di Daerah Pascabencana	Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial di Daerah Pascabencana	4	4	4	4	4	7.0	34 provinsi	BNPB
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Revitalisasi Pasar di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Bencana	20	21	22	23	24	110.1	34 provinsi	KEMEN KUKM
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Jumlah penanganan dampak perubahan iklim	20	20	20	20	20	5.5	34 Provinsi	KEMENTERAN
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	30	30	30	30	30	25.4	34 Provinsi	KEMENDIKBUD
Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Penanganan Darurat dan Pemulihian Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihian Sosial Pada Saat Pasca Bencana	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	27.6	34 provinsi	KEMENSOS
ProP : Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Jumlah sistem mitigasi multi ancaman bencana (MHEWS) terpadu	1	1	1	1	1	5,994.7		
	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	200	200	200	200	200			
	Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multi ancaman bencana	514	514	514	514	514			
	Kenaikan indeks kesiapsiagaan bencana	0.0040	0.0044	0.0048	0.0053	0.0059			
Informasi Gempabumi dan Tsunami dengan pemasangan seismograf	Jumlah penambahan peralatan seismograf untuk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami	117	56	55	55	55	889.1	34 Provinsi	BMKG
Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	Jumlah Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	300	50	50	50	50	1,365.8	34 Provinsi	BMKG

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Sekolah Lapang Geofisika untuk pemahaman masyarakat terhadap informasi gempabumi dan tsunami	Jumlah peserta yang meningkat pemahaman terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami melalui sekolah lapang geofisika	300	900	900	900	900	24.4	34 Provinsi	BMKG
Informasi Kerentanan Seismik di Kota Besar	Jumlah kota besar yang dilakukan studi informasi kerentanan seismik	5	2	2	2	2	12.0	13 kota	BMKG
Operasional Aloptama MKG yang Prima	Persentase alat operasional utama MKG yang laik operasi	90	91	92	93	94	1,838.3	34 provinsi	BMKG
Jaringan komunikasi yang handal	Peningkatan persentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi	92	93	94	95	96	900.0	34 provinsi	BMKG
Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi	Jumlah pos pengamatan gunungapi yang dikembangkan	10	13	13	13	14	141.8	Pusat dan Daerah	KEMEN ESDM
Penguatan sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan	Jumlah Lokasi sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan	8	17	17	17	17	303.0	34 provinsi	KEMEN ESDM
Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System	Jumlah Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System	3	3	3	3	3	15.0	Jawa Barat	LIPI
Sistem Peringatan Dini Bencana	Jumlah Sistem Peringatan Dini Terpasang 6 Lokasi	6	6	6	6	6	24.9	34 provinsi	BNPB
Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk dan dikembangkan	120	120	120	120	120	63.5	34 provinsi	BNPB
Layanan Mitigasi Bencana	Jumlah lokasi yang menerima layanan mitigasi bencana	16	16	16	16	16	29.8	34 provinsi	BNPB
Stasiun InaCORS yang Terbangun	Jumlah Stasiun CORS Pemetaan Skala Besar dan Geodinamika yang dibangun dalam Rangka Mendukung Mitigasi Bencana (InaTEWS)	30	45	45	45	45	242.5	Seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan peta sebaran multi bencana BMKG	BIG
Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun	Jumlah Stasiun Pasang Surut yang dibangun untuk pemetaan skala besar, serta dalam rangka mendukung program mitigasi bencana (InaTEWS)	26	31	31	31	31	136.6	Seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan peta sebaran multi bencana BMKG	BIG
Titik Pantau Geodinamika yang terkelola	Jumlah stasiun CORS yang beroperasi di lokasi sebaran sesar gempa	90	90	90	90	90	8.0	34 provinsi	BIG
KP : Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	0.256	0.176	0.166	0.154	0.141	22,867.3		
	Persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	0.009	0.019	0.020	0.019	0.018			
	Persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	0.054	0.057	0.058	0.064	0.064			
	Persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	0.024	0.023	0.021	0.022	0.022			
ProP : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketanggunannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	12	12	12	12	12	16,722.6		
	Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen	20	20	20	20	20			
	Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	10	13	14	13	10			
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketanggunannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketanggunannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	12	12	12	12	12	140.0	Daerah	KKP
Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	10	10	12	12	13	25.0	34 provinsi	KKP
Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	2	2	3	4	4	10.0	11 WPP	KKP
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	Jumlah kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya	4	5	5	5	5	17.9	Daerah	KKP

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	16	16	16	16	16	0.0	30 Lokasi	KKP
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengaman pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	5	6.5	7	6.5	5	9,000.0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	KEMEN PU&PERA
	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya	15	15	15	15	15	7,500.0	Kawasan prioritas lainnya dan pulau-pulau terluar	KEMEN PU&PERA
Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove/pantai	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.0	33 provinsi	KEMEN LHK
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Meteorologi Maritim (Sekolah Lapang Nelayan)	Jumlah nelayan yang meningkat pemahamannya terhadap informasi cuaca maritim dan peringatan dini cuaca melalui sekolah lapang nelayan/SLN	500	1,360	1,360	1,360	1,360	29.7	34 provinsi	BMKG
Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan	217	225	228	231	235	0.0	Tersebar	Kemenhub
ProP : Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Terbangunnya infrastruktur penyedia air baku	5	7	9	12	14	5,083.1		
Pengembangan Sistem Data dan Informasi DAS Realtime	Jumlah Sistem Data dan Informasi DAS Realtime yang dikembangkan	1	1	1	1	1	194.0		KEMEN LHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	56,000	40,000	30,000	25,000	20,000	0.0	33 provinsi	KEMEN LHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	3000	5000	5000	5000	5000	502.0		KEMEN LHK
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air	0.00	5.20	4.14	5.06	3.16	4,387.1	Kabupaten Jember, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Malang, Kep. Selayar, Kediri, Banyumas, Cianjur	Kementerian PUPR
ProP : Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	200	200	200	200	200	264.6		
	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman iklim melalui Sekolah Lapang Iklim	40	51	58	66	66			
Penanganan Dampak Perubahan Iklim	Jumlah penanganan dampak perubahan iklim	75	75	75	75	75	11.0	31	Kementerian
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan kebun	Jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi dalam penanggulangan dampak perubahan iklim	9	9	9	9	9	45.2		Kementerian
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan kebun	Jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan penanganan pasca bencana	39	39	39	39	39	0.0		Kementerian
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	200	200	200	200	200	146.5	22	Kementerian
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim	2	2	2	2	2	5.2	1	Kementerian
Teknologi Adaptasi Perubahan iklim	Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan iklim	1	1	1	1	1	7.6	1	Kementerian
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Iklim Terapan (Sekolah Lapang Iklim)	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman iklim melalui Sekolah Lapang Iklim	1,000	1,275	1,450	1,650	1,650	49.1	281 lokasi	BMKG
Penerapan Penanganan DPI	Penerapan Penanganan DPI	550	560	570	580	590	0.0	15 provinsi sentra padi	KEMENTERIAN
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0.0		KEMENTERIAN
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	200	200	200	200	200	0.0		Kementerian
ProP : Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS)	110	220	280	380	420	797.0		
LAYANAN Pengendalian Penyakit Arbovirosis	Percentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD<49/100.000	70	75	80	85	90	37.6	34 provinsi	KEMKES

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembinaan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS)	110	220	280	380	420	76.0	34 Provinsi	KEMKES
Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems)	60	65	70	75	80	101.8	34 Provinsi	KEMKES
Kewaspadaan dini kejadian penyakit	Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	80	85	90	95	100	581.6	10 BTKLPP	KEMKES
PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi	4.4	4.7	5.3	5.8	6.1	220,062.7		
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan	48.4	51.1	51.7	54.4	53.5			
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah	8.3	8.8	9.0	9.0	9.1			
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU	1.0	2.2	6.7	12.8	18.9			
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan	6.5	6.6	6.8	7.0	7.3			
KP : Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional	13.4	14.5	15.7	17.9	19.5	167,850.5		
	Intensitas energi primer	139.5	138.0	136.6	135.2	133.8			
	Penurunan Intensitas Energi Final	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80			
ProP : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Kapasitas terpasang pembangkit EBT	11.5	13.4	14.9	16.6	19.2	167,848.4		
PLTA, dan PLT Mini Mikrohidro	Kapasitas terpasang	6,600.8	7,834.8	8,071.9	8,572.8	10,303.7	74,996.7		KESDM, BUMN, Swasta
PLT Panas Bumi (PLTP)	Kapasitas terpasang	2,273.3	2,353.3	2,485.3	2,785.3	3,160.3	42,270.0		KESDM, BUMN, Swasta
PLT Bioenergi	Kapasitas terpasang	2,142.0	2,293.8	2,778.7	2,937.9	3,189.9	24,656.0		KESDM, BUMN, Swasta
PLT Surya (PLTS)	Kapasitas terpasang	351.4	736.0	1,034.1	1,371.8	1,557.3	17,931.6		KESDM, BUMN, Swasta
PLT Bayu (PLTB)	Kapasitas terpasang	143.5	173.5	533.5	902.5	1,012.5	7,919.8		KESDM, BUMN, Swasta
PLT EBT Lain	Kapasitas terpasang	0.0	7.0	7.0	7.0	7.0	74.3		KESDM, BUMN, Swasta
Pembangunan kilang BBN	Tahapan Pembangunan Green Refinery Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per Day di RUIII Plaju	Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition)	Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision)	EPC	EPC	Start Up dan On Stream (Mid 2024)	0.0		KESDM, BUMN, Swasta
ProP : Efisiensi dan Konservasi Energi	Peningkatan Implementasi SKEM	3	2	1	0	0	2.1		
Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum	Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya	3	2	1	-	-	2.1	Pusat	KEMEN ESDM
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel dan jalur khusus BRT	-	-	-	-	6	0.0	Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Makasar	KEMENHUB
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kota Lainnya	Jumlah kota	1	1	1	1	1	0.0	34 Ibukota Provinsi	KEMENHUB
Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan	6	8	10	12	14	0.0	Tersebar	KEMENHUB
Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda)	Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda)	175	201	64	106	863	0.0	Tersebar	KEMENHUB

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	301,800	335,000	335,000	335,000	335,000	16,320.6		
	Luas hutan dan lahan yang terelabilitasi secara nasional	366,000	370,000	380,000	375,000	370,000			
ProP : Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,516.3		
	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1,800	35,000	35,000	35,000	35,000			
Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,858.7	7 provinsi	KEMEN LHK
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1,800	35,000	35,000	35,000	35,000	1,657.6	12 provinsi	KEMEN LHK
ProP : Reforestasi	Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	366,000	370,000	380,000	375,000	370,000	7,097.7		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	56,000	40,000	30,000	25,000	20,000	6,540.5	33 provinsi	KEMEN LHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	502.0		KEMEN LHK
Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi	Luas penanaman di hutan produksi	310,000	330,000	350,000	350,000	350,000	55.2		KEMEN LHK
ProP : Pengurangan Laju Deforestasi	Laju Deforestasi	350,000	340,000	330,000	320,000	310,000	1,616.2		
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	65	65	65	65	65	0.0		KEMEN LHK
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi	Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi secara partisipatif	7	10	8	6	3	0.0		KEMEN LHK
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	552	552	552	552	552	0.0		KEMEN LHK
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	200	200	200	200	200	0.0		KEMEN LHK
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11	22	33	44	55	0.0		KEMEN LHK
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0.0		KEMEN LHK
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	1	1,6	1	0	0	300.0		KEMEN LHK
Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	Jumlah Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	486.3	33 provinsi	KEMEN LHK
KPH yang masuk kategori Maju	Jumlah KPH yang masuk kategori Maju	20	40	60	80	110	0.0		KEMEN LHK
Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	4	8.5	9	9	3	830.0		KEMEN LHK
ProP : Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Rasio luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terhadap kebutuhan lahan pertanian	50	55	60	65	70	4,090.5		
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	Teknologi	1	1	1	1	1	11.9	pusat	KEMENTERIAN
Optimasi Lahan	Optimasi Lahan pertanian	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2,655.4		KEMENTERIAN
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Unit Pengolahan Pupuk Organik/UPPO	500	500	500	500	500	824.2		Kementerian
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	66	66	66	66	66	70.8		Kementerian
Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	25	25	25	25	25	165.4		Kementerian
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup perlusian dan perlindungan lahan pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup perlusian dan perlindungan lahan pertanian	33	33	33	33	33	362.6		KEMENTERIAN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	64.80	67.10	68.51	69.20	69.80	35,390.1		
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill	3,885,755	3,885,755	3,885,755	3,885,755	3,885,755			
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R	223,005	255,938	316,630	376,145	409,078			
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	144,128	164,717	308,845	473,562	494,152			
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	14.00	16.40	17.99	18.90	19.70	35,390.1		
	Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	50.80	50.70	50.52	50.30	50.10			
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru	39	33	67	101	97			
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R	78	108	113	116	116			
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPST	12	13	25	37	37			
Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah pengurangan timbulan sampah	5.65	6.23	6.81	7.14	7.48	100.9	34 provinsi	KEMEN LHK
Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah pengurangan timbulan sampah	8.35	10.17	11.18	11.76	12.22	162.7	34 provinsi	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah penanganan timbulan sampah	19.26	19.19	19.12	19.05	18.97	673.9	34 provinsi	KEMEN LHK
Penanganan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah penanganan timbulan sampah	31.54	31.51	31.40	31.25	31.13	1,105.4	34 provinsi	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	Tersedianya fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	0	1	1	1	1	1,000.0	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)	KEMEN LHK
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun	39	23	37	71	66	26,611.2	236 kab/kota	KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun	23	23	45	68	68	332.0	124 kab/kota	DAK
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun	167	195	224	252	280	1,644.0	124 kab/kota	DAK
KP : Pengembangan Industri Hijau	Jumlah standar dan kelembagaan Industri Hijau yang dikembangkan	5	5	5	5	5	41.9		
	Jumlah rencana aksi penanganan masalah limbah B3 sektor industri	1	1	1	1	1			
ProP : Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	Jumlah standar dan kelembagaan Industri Hijau yang dikembangkan	5	5	5	5	5	23.9		
Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	Jumlah pedoman/dokumen Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	5	5	5	5	5	9.0	Pusat	KEMENPERIN
Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau/RSIH yang dikembangkan	5	5	5	5	5	15.0	Pusat	KEMENPERIN
ProP : Manajemen Limbah Industri	Jumlah rencana aksi penanganan masalah limbah B3 sektor industri	1	1	1	1	1	18.0		
Penanganan masalah limbah B3 sektor industri	Jumlah rencana aksi penanganan masalah limbah B3 sektor industri	1	1	1	1	1	18.0	Pusat	KEMENPERIN
KP : Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove/pantai	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	459.7		
ProP : Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	Jumlah lokasi pemulihian kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai	16	16	16	16	16	459.7		
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	16	16	16	16	16	187.4	30 Lokasi	KKP
Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove/pantai	1000	1000	1000	1000	1000	150.2	Daerah	KEMEN LHK

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	Jumlah kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkatkan kapasitasnya	34	34	34	34	34	122.1		KEMEN LHK
JUMLAH						298,665.6			

MATRIKS PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional 7: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2020 - 2024



Matrik Pembangunan Rancangan RPJMN 2020-2024

Prioritas Nasional : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI							17,215.0		
KP : Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75.30	75.35	75.40	75.45	75.50	14,097.2		
ProP : Penguatan Penyelenggara Pemilu	Terwujudnya penguatan penyelenggara Pemilu di Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	6,385.8						
Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu	Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	2,235.0	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	638.6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	319.3	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	638.6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	1,277.2	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Bawaslu				
Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	1,277.2	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Bawaslu				
ProP : Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	Tersusunnya UU Bidang Politik yang lebih komprehensif	Usulan Draf Inisiatif Perubahan UU Parpol	Pengesahan Perubahan UU Parpol	N/A	N/A	N/A	0.0		
ProP : Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik	126.376.418 suara sah	7,679.9						
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR	9 partai politik	7,679.9	Pusat	Kemendagri				
ProP : Penguatan Demokrasi Internal Partai Politik	Terlaksananya peningkatan kualitas demokrasi internal partai politik	9 partai politik	9 partai politik	9 partai politik	9 partai politik	9 partai politik	0.0		
ProP : Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik	Terlaksananya peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas partai politik	9 partai politik	9 partai politik	9 partai politik	9 partai politik	9 partai politik	0.0		
ProP : Penguatan Pokja Demokrasi	Terlaksananya penguatan Pokja IDI di 15 Provinsi	15 Provinsi	15 Provinsi	15 Provinsi	15 Provinsi	15 Provinsi	31.5		
Penguatan Pokja Demokrasi	Jumlah daerah yang skor IDI-nya meningkat	15 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	31.5	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Kemendagri
KP : Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	82.00	82.50	83.00	83.50	84.00	709.5		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Skor IDI Variabel Kesetaraan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	76.89	77.90	78.82	79.67	80.47			
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	45	43	41	39			
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	N/A	N/A	N/A	22.52%			
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	20%			
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	17%			
ProP : Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu dan Pusat Pengawasan Partisipatif di 549 satker (Nasional, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota)	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 148 daerah	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 248 daerah	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 348 daerah	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 448 daerah	Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 549 daerah	425.6		
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	106.4	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	21.3	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	63.8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah KPÜ Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	85.1	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	42.6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Bawaslu				
Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif	Pusat Pengawasan Partisipatif 148 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 248 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 348 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 448 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 549 daerah	63.8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Bawaslu
Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Pilotting	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	19 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	42.6		Bawaslu
ProP : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil	Terbentuknya Komisi Masyarakat Sipil	Penataan Regulasi	Persiapan Pembentukan	Pembentukan	Pembentukan	Pembentukan	0.0		
ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	Terlaksananya pemilu yang akuntabel dan sinergis	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	283.9						
Penguatan Pengawasan Netralitas ASN	Jumlah kementerian/lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	85.2	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Bawaslu				
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	71.0	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				
Peningkatan kompetensi SDM KPU	Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan: Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	127.8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Presentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	70	71	71	72	72	2,408.3		
	Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas	80	83	85	90	95			
ProP : Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	Terintegrasinya tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	2 Dokumen	555.4						
Penata Kelolaan Komunikasi Publik	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D	2 Dokumen	2.8	Pusat	Ditjen IKP, Kemkominfo				
Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	Percentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan PIKP sesuai dengan peraturan yang berlaku	65	70	75	85	90	11.1	Pusat	Ditjen IKP, Kemkominfo
	Percentase (%) Mitra Strategis (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM, Media Tradisional, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Bako Humas, Petugas Informasi Publik/PIP, dan lain-lain) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	65	70	75	80	85	475.2	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Ditjen IKP, Kemkominfo
Peyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 (*)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan (16.10.2 b)	72	80	90	100	110	8.9	Pusat	Komisi Informasi Pusat
Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (**)	Jumlah Badan Publik yang Informatif (16.10.2 a; 16.10.2 b; 16.10.2 c)	35	40	45	55	60	18.2	Pusat	Komisi Informasi Pusat
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen	35	40	45	50	39.3	Pusat	Komisi Informasi Pusat
ProP : Penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	Percentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	60	63	65	68	70	45.3		
Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik	Jumlah Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik Melalui Petugas Informasi Publik	500	550	600	650	700	16.6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Ditjen IKP, Kemkominfo
Pemanfaatan informasi publik program dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, luar ruang, tatap muka dan pertunra)	Percentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T yang mendapat akses informasi publik	65	68	70	73	75	6.6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Ditjen IKP, Kemkominfo
	Percentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap konten informasi publik	55	58	60	63	65	22.1	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	Ditjen IKP, Kemkominfo
ProP : Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	40,000	40,000	45,000	45,000	50,000	1,629.7		
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Profesional	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang memperoleh Pelatihan dan Sertifikasi (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	40,000	40,000	45,000	45,000	50,000	1,465.5	Pusat	Balitbang, Kemkominfo
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	Percentase (%) penerima beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu	90	90	90	95	95	164.2	Pusat	Balitbang, Kemkominfo
ProP : Peningkatan literasi TIK masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	2,000	2,200	2,500	3,000	3,500	8.3		
Pengenalan TIK kepada masyarakat	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	2,000	2,200	2,500	3,000	3,500	8.3	Pusat	Balitbang, Kemkominfo
ProP : Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	1 Kajian	7.0						
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big Data Pemerintah	Jumlah Kajian Strategis Penerapan Big Data Pemerintah	1 Kajian	7.0	Pusat	Balitbang, Kemkominfo				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	Indeks Kemerdekaan Pers	70	70	71	71	72	53.8		
Pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	Persentase (%) pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	85	85	90	90	90	3.5	Pusat	Dewan Pers
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	Persentase (%) provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	78	80	83	85	90	28.4	Pusat	Dewan Pers
Pendataan dan verifikasi perusahaan pers	Jumlah perusahaan pers yang diverifikasi secara faktual	250	500	500	600	700	4.3	Pusat	Dewan Pers
	Persentase (%) perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual	80	80	80	80	80	0.0		Dewan Pers
Sertifikasi Jurnalis	Jumlah wartawan yang tersertifikasi jurnalis	456 orang	1100 orang	1100 orang	1100 orang	1244 orang	17.6	Pusat	Dewan Pers
Pelatihan Jurnalis	Jumlah wartawan yang mendapat pelatihan jurnalistik	480 orang	1157 orang	1157 orang	1157 orang	1300 orang	0.0	Pusat	Dewan Pers
	Persentase (%) jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers	98	98	98	98	98	0.0	Pusat	Dewan Pers
ProP : Peningkatan kualitas lembaga penyiaran	Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	23	57	58	59	59	108.8		
Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang Memenuhi Standar Peraturan Perundangan Bidang Penyiaran	Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan (Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke media)	15 (TV Berjaringan) 4 (Radio Berjaringan) 4 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 20 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 21 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 22 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 22 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	74.9	Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia
Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	7	9	11	13	15	30.4	Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia
Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio	Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan	96	97	98	99	99	3.5	Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia
PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95	95	95	95	95	3,064.9		
KP : Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	32.9	38.8	46.6	58.3	71.9	1,662.0		
	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0			
ProP : Peningkatan dan Intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	32.9	38.8	46.6	58.3	71.9	86.5		
Perundingan batas dan Kerja Sama Kelautan Maritim INA dgn 9 negara tetangga	Persentase perundingan batas dan kerja sama perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga	100%	100%	100%	100%	100%	16.6	Pusat	Kemenlu
Perundingan Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas	Persentase penetapan batas dan kerja sama perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga	100%	100%	100%	100%	100%	5.5	Pusat	Kemenlu
Kesepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	5	5	5	5	5	26.5	Pusat	Kemendagri
Tanda batas negara	Jumlah tanda batas negara	120	225	200	200	200	31.5	Pusat	BIG
Peta batas negara	Jumlah peta batas negara	32	20	20	20	20	2.5	Pusat	BIG
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	6	20	20	17	15	1.4	Pusat	BIG
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	3	20	20	20	20	2.5	Pusat	BIG
ProP : Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	34.40	34.80	35.20	35.60	36.00	1,575.5		
	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50			
	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	21.50	21.75	22.00	22.25	22.50			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	17.20	17.40	17.60	17.80	18.00			
Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan	55.9%	56.6%	57.2%	57.9%	50.9%	332.8	Pusat	Kemenlu
	Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan	30.1%	30.5%	30.8%	31.2%	27.7%	0.0		
	<i>Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri</i>	30.1%	30.5%	30.8%	31.2%	31.5%	0.0		
	Tingkat pengembangan sistem informasi.	34.4%	34.8%	35.2%	35.6%	36.0%	0.0		
	Tingkat kepuasan pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel.	17.2%	17.4%	17.6%	17.8%	18.0%	0.0		
	Indeks SDM K/L/I/Perwakilan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	4.3%	4.4%	4.4%	4.5%	4.5%	0.0		
	Persentase Kasus Umum yang diselesaikan	83.0%	86.0%	89.0%	91.0%	94.5%	0.0		
	Persentase Kerja Sama di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Ditandatangani	21.5%	21.8%	22.0%	22.3%	22.5%	0.0		
	Persentase Standar / Panduan Teknis di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterapkan	17.2%	17.4%	17.6%	17.8%	18.0%	0.0		
	Persentase Produk Hukum Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Disahkan	21.5%	21.8%	22.0%	22.3%	22.5%	0.0		
	Persentase SDM K/L/I/Perwakilan RI yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	17.2%	17.4%	17.6%	17.8%	18.0%	0.0		
	Persentase Kertas Kerja Analisa Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Dihasilkan	8.6%	8.7%	8.8%	8.9%	9.0%	0.0		
	Persentase Rekomendasi Kemenlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan Internasional	30.1%	30.5%	30.8%	31.2%	31.5%	0.0		
	Persentase Rekomendasi Kemenlu yang Diterima dalam Kebijakan / Regulasi Nasional terkait Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	30.1%	30.5%	30.8%	31.2%	31.5%	0.0		
	Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign (PAC) Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	25.8%	26.1%	26.4%	26.7%	27.0%	0.0		
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI	TBD	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3.0	Pusat	Kemenlu
Perlindungan dan Pelayanan Konsuler WNI/BHI (Perwakilan RI)	Jumlah WNI/BHI yang Mendapat Perlindungan (orang)	230000	241500	253575	266254	279566	704.7	Perwakilan RI	Kemenlu
Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Atase di 12 negara	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri secara prosedural	250000	260000	270000	280000	300000	170.0	UEA, Brunei, Hong kong, Jeddah, Jordan, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Qatar, Riyadh, Singapura, Taiwan	Kemnaker

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural	Pelaksanaan pembekalan akhir keberangkatan	179.860 CTKI/TKI	200.000 CTKI/TKI	230.000 CTKI/TKI	260.000 CTKI/TKI	300.000 CTKI/TKI	190.0	Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	BNP2TKI
CTKI/TKI yang terlindungi	Penanganan/pemulangan RKI Bermasalah	18.000 TKI	17.000 TKI	15.000 TKI	13.000 TKI	10.500 TKI	175.0	Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	BNP2TKI
KP : Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular	96	120	151	191	240	726.9		
ProP : Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerjasama pembangunan internasional	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST (Rp Miliar)	161.6	187.1	216.9	251.9	293.0	683.8		
	Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular	96	120	151	191	240			
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Jumlah Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	560	560	560	560	560	135.0	Pusat	Kemristekdikti
Bantuan Kerja sama Teknis Indonesia	Jumlah Kegiatan Bantuan teknis Indonesia	23	24	25	26	27	95.7	Pusat	Kementerian Luar Negeri
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Keuangan	Jumlah kegiatan KSST Bidang Keuangan	1	1	1	1	1	12.3	Pusat	Kementerian Keuangan
Beasiswa Dharmasiswa dan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing	Jumlah negara penerima beasiswa	172	172	172	172	172	352.2	Pusat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah kegiatan KSST Bidang Pekerjaan Umum	2	2	3	3	4	14.0	Pusat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah kegiatan KSST Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	2	1	1	2	2	5.0	Pusat	Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan KSST Bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	2	2	2	8.3	Pusat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan KSST Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana	2	3	4	5	5	12.9	Pusat	BKKBN
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pertanian	Jumlah kegiatan KSST Bidang Pertanian	1	1	1	1	1	2.9	Pusat	Kementerian Pertanian
KSST Bidang Peningkatan Kapasitas	Jumlah Kegiatan Kerja Sama Teknik Luar Negeri	15	17	19	21	23	21.0	Pusat	Kementerian Sekretariat Negara
Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Jumlah Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	1	1	1	1	1	13.5	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas
Koordinasi dan kerjasama internasional antar negara kepulauan	Jumlah kerja sama internasional antar negara kepulauan	1	1	1	1	1	11.0	Pusat	Kemenko Bidang Kamaritiman
ProP : Penciptaan lingkungan yang mendukung (enabling environment) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	Tingkat Partisipasi Aktor Non Pemerintah dalam Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	2,2-2,38%	2,48-2,55%	2,65-2,74%	2,84-2,96%	2,96-3,16%	43.1		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat di forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral	90	90	90	90	90	2.8		Kemenlu
	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	70	70	70	70	70	0.0		
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi dan sosial di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum multilateral	90	90	90	90	90	23.2		Kemenlu
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	90	90	90	90	90	17.1		Kemenlu
	Indeks respon positif stakeholders terhadap informasi database kebijakan perdagangan	4	4	4	4	4	0.0		
	Peningkatan kemampuan melalui capacity building diplomasi ekonomi multilateral	80	80	80	80	80	0.0		
KP : Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	Indeks citra Indonesia di dunia internasional	3.8	3.836	3.882	3.942	4	230.1		
ProP : Penyusunan kebijakan diplomasi publik dan turunannya	Indeks citra Indonesia di dunia internasional	3.8	3.836	3.882	3.942	4	230.1		
Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia Terpromosikan dengan Baik dan Tepat Sasaran	Persentase Dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap kegiatan diplomasi publik Indonesia	95	95	96	97	97	159.0		Kemenlu
	Persentase hadirnya konstituen domestik/internasional dan negara sahabat dalam kegiatan diplomasi publik Indonesia	95	95	95	95	95	0.0		
Diplomasi Digital dan Informasi hubungan luar negeri yang kuat	Persentase peningkatan jumlah pengunjung portal situs Kemenlu	25	25	25	25	25	49.0		Kemenlu
	Persentase peningkatan impresi dan engagement pada media sosial Kemenlu	20	20	20	20	20	0.0		
	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	91	92	93	94	95	0.0		
	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	85	85	86	86	87	0.0		
	Nilai keterbukaan informasi publik	80.5	81	81.5	82	82.5	0.0		
Rekomendasi terkait pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi strategis dan personil	Persentase Penyusunan Laporan Keamanan Informasi, Personal, dan Kerja Sama Keamanan Diplomatik sesuai target	85	85	85	85	85	22.1		Kemenlu
	Penyusunan rekomendasi keamanan informasi, personal, dan kerja sama keamanan diplomatik sesuai target	85	85	85	85	85	0.0		
	Persentase tindak lanjut rekomendasi Keamanan Informasi, Personal, dan Kerja Sama Keamanan Diplomatik	75	76	77	78	79	0.0		
KP : Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	10	11	13	14	16	445.9		
ProP : Peningkatan inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	10	11	13	14	16	395.1		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	90	90	90	90	90	22.8	Pusat	Kemenlu
	Jumlah sidang/ pertemuan internasional di bidang hak asasi manusia dan kemanusiaan yang diprakarsai oleh indonesia di forum multilateral	5	5	5	5	5	0.0		
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral	80	80	80	80	80	4.5	Pusat	Kemenlu
	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan multilateral	70	70	70	70	70	0.0		
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	80	80	80	80	80	3.8	Pusat	Kemenlu
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	93	94	95	96	97	16.0	Pusat	Kemenlu
	Jumlah sidang /pertemuan Internasional dibidang Keamanan Internasional dan perlucutan Senjata yang diprakarsai oleh Indonesia di Forum Multilateral	8	9	10	11	12	0.0		
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase Rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah masal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara	90	91	92	93	94	1.9	Pusat	Kemenlu
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di forum multilateral	90	91	92	93	94	12.2	Pusat	Kemenlu
	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	80	81	82	83	84	0.0		
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup	85	85	85	85	85	0.4	Pusat	Kemenlu
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	90	90	90	90	90	4.7	Pusat	Kemenlu
Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Diplomasi Maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	90	90	90	90	90	22.2	Pusat	Kemenlu

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	90	90	90	90	90	3.2	Pusat	Kemenlu
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Presentase Rekomendasi dari forum kerjasama multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	90	90	90	90	90	4.6	Pusat	Kemenlu
Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Presentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	90	90	90	90	90	2.2	Pusat	Kemenlu
Kepemimpinan dan Peran Aktif Indonesia pada Berbagai Forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	87	87	88	90	90	26.5	Pusat	Kemenlu
Diplomasi maritim yang kuat di forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	90	90	91	92	92	0.6	Pusat	Kemenlu
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Sosial Budaya yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	72	73	74	75	76	9.4	Pusat	Kemenlu
	Persentase penyelesaian permohonan registrasi Organisasi Kemasyarakatan Asing	70	71	72	73	74	0.0		
Pemenangan Indonesia di Berbagai Pencalonan yang Pemilihannya dilakukan di Tahun 2020	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral	75	75	75	75	75	8.3	Pusat	Kemenlu
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN	95	95	95	95	95	24.5	Pusat	Kemenlu
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN	95	95	95	95	95	28.0	Pusat	Kemenlu
Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN	95	95	95	95	95	83.2	Pusat	Kemenlu
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN	95	95	95	95	95	52.4	Pusat	Kemenlu
Layanan Setnas ASEAN Indonesia	xxx	1 Layanan	26.3	Pusat	Kemenlu				
Kesepakatan Kerjasama di kawasan Sub Sahara Afrika	xxx	1 Dokumen	-	-	-	-	18.7	Pusat	Kemenlu
Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	xxx	1 Dokumen	-	-	-	-	18.7	Pusat	Kemenlu
ProP : Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB	Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Peran Indonesia dalam Forum Multilateral	95	-	-	-	-	38.0		
Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB	Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Peran Indonesia dalam Forum Multilateral	95	-	-	-	-	38.0	Pusat/Perwakilan	Kemenlu

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	12.8		
Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	12.8	Pusat	Kemenlu
PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	13,002.5		
KP : Penataan Regulasi	Persentase judicial review yang dikabulkan oleh MK dan MA	12,15% dan 11,05%	11,15% dan 10,05%	10,15% dan 9,05%	9,15% dan 8,05%	8,15% dan 7,05%	1,253.9		
ProP : Pembentukan Pusat Legislasi Nasional	Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi * target diakumulasi	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	1,236.0		
Tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	1 Dokumen					1,215.0	Pusat	Kemenkumham
Pedoman konsultasi publik	Penyusunan pedoman konsultasi publik	1 Kegiatan					0.2	Pusat	Kemenkumham
Penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi	Aplikasi penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi	1 Paket					0.3	Pusat	Kemenkumham
Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4.0	Pusat	Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU berdasarkan Putusan MK	Penyusunan Anotasi UU berdasarkan Putusan MK	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	1.5	Pusat	Mahkamah Konstitusi
Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	15.0	Pusat	Komnas Perempuan
ProP : Pembaruan Substansi Hukum	Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	1 UU (KUHP)	1 UU (Kepailitan)	1 UU (Fidusia)	1 UU (Badan Usaha)	1 (Hukum Acara Perdata)	17.9		
RUU KUHP/KUHAP	RUU KUHP/KUHAP yang diundangkan	1 Dokumen					1.8	Pusat	Kemenkumham
RUU Hukum Acara Perdata	RUU Hukum Acara Perdata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.0	Pusat	Kemenkumham
RUU Badan Usaha	Kebijakan pendukung penyusunan NA RUU Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen				5.2	Pusat	Kemenkumham
RUU Badan Usaha	Penyusunan NA RUU Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			0.5	Pusat	Kemenkumham
RUU Jaminan Fidusia	RUU Jaminan Fidusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			0.9	Pusat	Kemenkumham
RUU Kepailitan	RUU Kepailitan	1 Dokumen	1 Dokumen				0.6	Pusat	Kemenkumham
KP : Perbaikan Sistem Peradilan	1. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek enforcing contracts 2. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek resolving insolvency 3. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek getting credits 4. Persentase Pelaku Residivis	1. Peringkat 120 2. Peringkat 30 3. Peringkat 30 4. 11%	1. Peringkat 110 2. Peringkat 28 3. Peringkat 28 4. 10,5%	1. Peringkat 100 2. Peringkat 24 3. Peringkat 24 4. 10%	1. Peringkat 80 2. Peringkat 24 3. Peringkat 24 4. 9,5%	1. Peringkat 70 2. Peringkat 20 3. Peringkat 20 4. 9%	1,102.3		
ProP : Optimalisasi Sistem Perdata	Persentase eksekusi putusan perdata (perbandingan jumlah eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	10.2		
Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	Jumlah Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.4	Pusat	Mahkamah Agung
Pengembangan Implementasi e-court e-litigasi	Jumlah Sistem Pengembangan Implementasi e-court e-litigasi	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	5.8	Pusat	Mahkamah Agung
ProP : Keadilan Restoratif	Jumlah kebijakan implementasi keadilan restoratif di masing-masing lembaga terkait	4 Kebijakan	TBD	TBD	TBD	TBD	40.1		
Implementasi Keadilan Restoratif	Penyusunan Juknis Implementasi Keadilan Restoratif	1 Juknis					0.3	Pusat	Kejaksaan
Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Laporan Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.9	Pusat	Kejaksaan
Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	16.4	Pusat	Kemenkumham
Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Jumlah BAPAS yang menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	17 Bapas	17 Bapas	17 Bapas	17 Bapas	17 Bapas	9.0	Wilayah	Kemenkumham

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Jumlah Surat Keterangan Korban Penanganan pelanggaran HAM yang berat	450 Surat Keterangan	7.5	Pusat	Komnas HAM				
ProP : Dukungan TIK di Bidang Hukum dan Peradilan	Jumlah satuan kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	214 Wilayah Kerja	TBD	TBD	TBD	TBD	1,052.0		
Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	156 Satker	410.2	Daerah	Kejaksaan				
Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	Jumlah Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	2 Sistem	45.8	Daerah	Kejaksaan				
Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	Jumlah Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	460 Satker	124.1	Daerah	Kejaksaan				
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	Jumlah Wilayah yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	33 Wilayah	2.0	Daerah	Kemenkumham				
Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	Jumlah Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	33 Wilayah	2.0	Daerah	Kemenkumham				
Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	Jumlah Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	5.1	Daerah	MA
Sosialisasi dan Bimtek SPPT TI di Pengadilan Percontohan	Jumlah Sosialisasi dan Bimtek SPPT TI di Pengadilan Percontohan	115 Pengadilan	6.3	Daerah	MA				
Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi SPPT TI	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi SPPT TI	1 Pedoman	1.6	Daerah	MA				
Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	4 Desain	3.8	Pusat	Kemenkominfo				
Sistem Redudansi atau HA Server Layanan SPPT TI	Jumlah Sistem Redudansi atau HA Server Layanan SPPT TI	1 Sistem	259.5	Pusat	BSSN				
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum	6 Rekomendasi	33.6	Pusat	Kemenkoplhukam				
Sistem Aplikasi e Manajemen Penyidikan	Jumlah Unit Sistem Aplikasi e Manajemen Penyidikan	727 Unit	145.7	Pusat	POLRI				
Karakterisasi putusan	Jumlah Putusan yang dilakukan Karakterisasi	35 putusan	12.5	Pusat	Komisi Yudisial				
KP : Penguanan Sistem Anti Korupsi	IPAK	4,00	4,03	4,06	409%	4,14	10,145.1		
ProP : Optimalisasi Upaya Anti Korupsi	Survey Penilaian Integritas	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	10,145.1		
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	1,338.8	Daerah	Kemenkumham				
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	878.2	Daerah	Kemenkumham				
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	3,718.7	Daerah	Kemenkumham				
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	1,338.8	Daerah	Kemenkumham				
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	1,338.8	Daerah	Kemenkumham				
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	1,338.8	Daerah	Kemenkumham				
Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	Jumlah Laporan Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	1 Laporan	13.5	Pusat	Kemenkumham				
Diklat Pemulihan Aset	Jumlah Angkatan Diklat Pemulihan Aset	4 Angkatan	9.5	Pusat	Kejaksaan				
Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	20 Laporan	49.1	Pusat	Kejaksaan				
Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	Jumlah Satker yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	31 Satker	9.0	Daerah	Kejaksaan				
Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	Jumlah Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	31 Kegiatan	4.0	Pusat	Kejaksaan				
Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	106 LHP	9.2	Daerah	MA				
Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	83 LHP	6.1	Daerah	MA				
Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	105 LHP	10.8	Daerah	MA				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	53 LHP	6.8	Daerah	MA				
Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	2 laporan	0.5	Pusat	MK				
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Jumlah Instansi yang dilakukan Survei Penilaian Integritas	84 Instansi	28.8	Pusat	KPK				
Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	2 laporan	45.7	Pusat	KPK				
KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Indeks Akses terhadap Keadilan	65-70	65-70	71-80	71-80	71-80	501.2		
ProP : Penguatan akses layanan keadilan	1. Jumlah pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi 2. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin	1. 5425 orang dan 722 kegiatan 2. 3.153.854 nerka	1. 7025 orang dan 938 kegiatan 2. 3.636.329 nerka	1. 7025 orang dan 938 kegiatan 2. 3.363.329 nerka	1. 7025 orang dan 938 kegiatan 2. 3.368.196 nerka	1. 9169 orang dan 1221 kegiatan 2. 3.368.196 nerka	495.2		
Layanan Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	111.584 Jam Layanan	55.8	Pusat	MA				
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	3888 Perkara	26.4	Pusat	MA				
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	0.4	Pusat	MA
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	11.272 perkara	11.272 perkara	11.272 perkara	11.272 perkara	11.272 perkara	16.1	Pusat	MA
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	26.207 perkara	59.2	Pusat	MA				
Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	Jumlah Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	124.246 jam layanan	56.6	Pusat	MA				
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	4191 perkara	5.0	Pusat	MA				
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	42 Perkara	42 Perkara	42 Perkara	42 Perkara	42 Perkara	0.2	Pusat	MA
Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8.640 Jam Layanan	4.8	Pusat	MA				
Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Jumlah Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	1 Rekomendasi	2.5	Pusat	Komnas Perempuan				
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah Orang Penerima Bantuan Hukum Litigasi	5699 orang	228.0	Daerah	Kemenkumham				
Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	758 Kegiatan	40.4	Daerah	Kemenkumham				
ProP : Pemberdayaan Hukum Masyarakat	Pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	1 Kegiatan	TBD	TBD	TBD	TBD	6.0		
Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	Jumlah Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	2 Standar Norma dan Setting	6.0	Pusat	Komnas HAM				
PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85	13,938.1		
	Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85			
	Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70			
KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Persentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	90	100	100	100	100	228.0		
	Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	65	80	95	100	100			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	37	49	61	73	85				
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	10	15	20	25	30				
ProP : Manajemen Talenta Nasional ASN	Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN	-	-	-	87 K/L	34 Provinsi	146.9			
Kebijakan Pola Karir Nasional sesuai dengan Manajemen Talenta Nasional ASN	Jumlah kebijakan pola karir nasional	1 Kebijakan	-	-	-	-	2.0	Pusat	KEMENPANRB	
Data ASN yang Akurat dan Komprehensif	Jumlah Data ASN	1 Database	-	-	-	-	10.5	Pusat	BKN	
Penerapan Manajemen Talenta ASN	Jumlah K/L/D yang menerapkan manajemen talenta ASN	-	-	-	87 K/L	34 Provinsi	6.0	Pusat	KEMENPANRB	
Human Capital Development Plan (HCDP) Nasional	Jumlah HCDP Nasional	-	-	1 Dokumen	-	-	20.0	Pusat	KEMENPPN/BAPPENAS	
Critical Occupation List (COL) Nasional	Jumlah dokumen COL Nasional	-	1 Dokumen	-	-	-	14.0	Pusat	KEMENPPN/BAPPENAS	
Sistem Talent Pool JPT Nasional	Jumlah Sistem Talent Pool JPT Nasional	-	-	-	1 Upgrade Sistem	-	3.0	Pusat	BKN	
Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)	Jumlah Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)	1 Sistem	-	-	-	-	1.5	Pusat	LAN	
Pemetaan kompetensi ASN (JPT dan JA) melalui Assesment Center	Jumlah ASN (JPT dan JA) yang terpetakan kompetensinya melalui assesment center	2000 Orang	100% jumlah JPT dan JA terpetakan kompetensinya	-	-	-	3.8	Pusat/Daerah	BKN	
Penerapan sekolah kader ASN	Jumlah lulusan sekolah kader ASN	-	100 Peserta	100 Peserta	100 Peserta	100 Peserta	83.1	Pusat	LAN	
Gap analysis kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan	Jumlah dokumen gap analysis	-	1.0	1.0	-	-	3.0	Pusat	LAN	
ProP : Peningkatan Profesionalitas ASN	Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	54 IP	108 IP	162 IP	216 IP	270 IP	81.1			
Skenario model kesejahteraan ASN (insentif untuk ASN High Performance, insentif untuk ASN di daerah 3T dan risiko tinggi)	Laporan rekomendasi kebijakan	3 Kajian	-	-	-	-	1.2	Pusat	LAN	
Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir instansi	72 IP	137 IP	137 IP	137 IP	138 IP	15.3	Pusat	BKN	
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas	Jumlah kebijakan	-	1 kebijakan	-	-	-	1.0	Pusat	KEMENPANRB	
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP pensiun ASN	Jumlah kebijakan	-	1 kebijakan	-	-	-	1.0	Pusat	KEMENPANRB	
Kebijakan insentif untuk ASN High Performance, di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi	Jumlah kebijakan insentif untuk ASN di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi	-	-	1 Kebijakan	-	-	1.0	Pusat	KEMENPANRB	
Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah	Jumlah IP yang dilakukan Penilaian Penerapan Sistem Merit	-	100 IP	100 IP	100 IP	100 IP	6.5	Pusat/Daerah	KASN	
Pembinaan Penerapan Sistem Merit	Jumlah IP yang dilakukan pembinaan penerapan sistem merit	67 IP	70 IP	70 IP	70 IP	70 IP	7.3	Pusat/Daerah	KASN	
Penerapan Manajemen Kinerja ASN	Jumlah IP yang menerapkan manajemen kinerja ASN sesuai PP 30/2019	25 IP	204 IP	204 IP	202 IP	-	15.0	Pusat/Daerah	BKN	
Kebijakan penataan jabatan fungsional	Jumlah kebijakan	1 kebijakan	-	-	-	-	1.0	Pusat/Daerah	KEMENPANRB	
Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan ASN	Jumlah Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	-	-	-	1.0	Pusat/Daerah	LAN	
Pengembangan Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance	Jumlah Kebijakan/modul/pedoman	-	2 kebijakan/modul/pedoman	-	-	-	1.0	Pusat/Daerah	LAN	
Pengembangan Model Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance	Jumlah Kebijakan/modul/pedoman	-	1 kebijakan/modul/pedoman	-	-	-	1.0	Pusat/Daerah	LAN	
Kebijakan Smart Office	Jumlah Kebijakan	1 Kebijakan	-	-	-	-	1.0	Pusat/Daerah	KEMENPANRB	
Pembangunan Integritas ASN	Jumlah ASN yang mengisi survey integritas	10%	-	-	-	-	0.1	2.0	Pusat/Daerah	KEMENPANRB

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kebijakan ketentuan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN	Jumlah Kebijakan	-	1 Perpres	-	-	-	1.0	Pusat/Daerah	KEMENPANRB
Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	Jumlah IP yang patuh dalam pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku	270 IP	390 IP	510 IP	630 IP	719 IP	19.3	Pusat	KASN
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	5.5	Pusat	KASN
KP : Transformasi pelayanan publik	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Keputuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	135	142.00	150.00	157.00	164.00	169.7		
ProP : Pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	1. Tersedianya portal pelayanan publik Pemerintah Pusat 2. Tersedianya portal pelayanan publik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	2 Portal	14.0		
Review dan pemetaan sektor pelayanan strategis (dasar dan perizinan	Jumlah sektor layanan strategis yang direview/dipetakan	-	2 sektor layanan strategis	-	-	-	1.0	Pusat/Daerah	KEMENPAN RB
Integrasi data dan informasi pelayanan publik sektor strategis dalam SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk ke dalam SIPP	-	2 sektor pelayanan (dasar dan perizinan)	-	-	-	2.0	Pusat/Daerah	KEMENPANRB
Integrasi proses bisnis pelayanan publik tingkat pusat	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang distandarisasi proses bisnisnya	-	1 PermenPAN RB tentang Standar Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	1 sektor pelayanan	1 sektor pelayanan	-	3.0	Pusat	KEMENPANRB
Integrasi proses bisnis pelayanan publik tingkat daerah	Jumlah sektor pelayanan dasar yang diintegrasikan proses bisnisnya	-	1 Permendagri tentang Road Map integrasi proses bisnis pelayanan publik di daerah	2 sektor pelayanan dasar	3 sektor pelayanan dasar	-	3.0	Daerah	KEMENDAGRI
Pembangunan portal pelayanan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah portal pelayanan publik	-	-	-	-	2 portal	5.0	Pusat/Daerah	KEMENKOMINFO
ProP : Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Keputuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	135	142.0	150.0	157.0	164.0	103.1		
Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Pengaduan dalam LAPOR-SP4N	Prosentase laporan pengaduan yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%	8.3	Pusat	KEMENPANRB
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (external complaint handling)	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan	6000	6,300	6,600	6,800	7,000	90.8	Pusat/Daerah	OMBUDSMAN RI
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	4.0	Pusat	KEMENPANRB
ProP : Penguatan ekosistem inovasi	Jumlah unit pelayanan publik (UPP) yang mereplikasi inovasi	500	500	500	500	500	36.6		
Pembangunan hub (pusat pengetahuan) inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang direplikasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	5.0	Daerah	KEMENPANRB
Pengembangan Jejaring Inovasi Daerah	Fasilitasi dan pendampingan daerah dalam penerapan replikasi inovasi daerah	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	25.0	Daerah	KEMENDAGRI
Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah lab inovasi pelayanan publik	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	6.6	Daerah	LAN
ProP : Penguatan pelayanan terpadu	Jumlah Mal Pelayanan Publik di Kota Besar/Sedang/KEK	9 MPP	9 MPP	9 MPP	9 MPP	9 MPP	16.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Integrasi Data, Proses, dan Standar Pelayanan MPP	Jumlah kebijakan integrasi data, proses, dan standar pelayanan MPP	1 Perpres	-	-	-	-	1.0	Pusat	KEMENPANRB
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	15.0	Daerah	KEMENPANRB
KP : Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional	Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	70		80		100	13,172.5		
	Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	50		60		80			
	Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	20		30		50			
ProP : Penataan kelembagaan dan proses bisnis instansi pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang tata kelembagaannya	23	21	21	21	21	75.9		
Kebijakan penataan eselonisasi	Jumlah kebijakan penataan eselonisasi	1 PermenPAN	-	-	-	-	0.3	Pusat	KEMENPANRB
Penataan kelembagaan bidang polhukam	Jumlah K/L yang ditata	8 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	19.6	Pusat	KEMENPANRB
Penataan kelembagaan bidang perekonomian dan kemaritiman	Jumlah K/L yang ditata	8 K/L	8 K/L	8 K/L	8 K/L	8 K/L	22.0	Pusat	KEMENPANRB
Penataan kelembagaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah K/L yang ditata	7 K/L	7 K/L	7 K/L	7 K/L	7 K/L	16.5	Pusat	KEMENPANRB
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang polhukam	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	8 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	4.9	Pusat	KEMENPANRB
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	18 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5.4	Pusat	KEMENPANRB
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	8 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	4.7	Pusat	KEMENPANRB
Arsitektur Kelembagaan Pemerintah	Jumlah rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah	-	-	-	1 rancangan arsitektur	1 arsitektur	2.5	Pusat	KEMENPANRB
ProP : Penerapan SPBE terintegrasi	- Integrasi portal pelayanan publik - Integrasi portal administrasi pemerintahan					1 portal	13,096.6		
Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional	Jumlah Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	1 Perpres	-	-	-	-	1.8	Pusat	KEMENPANRB
Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Jumlah Portal arsitektur SPBE	-	1 Portal	-	-	-	5.0	Pusat	KEMENPANRB
Penyusunan Undang-Undang SPBE	Jumlah UU SPBE	-	1 NA	1 RUU	1 RUU	1 UU	11.0	Pusat	KEMENPANRB
Penyusunan kebijakan tatakelola pelaksanaan Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Permen PAN	1. PermenPAN RB tentang Peta Rencana SPBE Nasional 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Evaluasi SPBE	1. PermenPAN RB tentang Pedoman Penyusunan Arsitektur SPBE 2. PermenPAN RB tentang Pedoman SDM SPBE	1. PermenPAN RB tentang Pedoman Manajemen Perubahan 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Proses Bisnis	-	-	3.0	Pusat	KEMENPANRB
Penyusunan kebijakan manajemen data dan informasi implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Permen PPN	1 Permen PPN tentang Manajemen Data dan Informasi			-	-	1.0	Pusat	KEMENPPN/BAPPENAS
Penyusunan kebijakan infrastruktur dan aplikasi SPBE	Jumlah Peraturan Menteri Kominfo yang mendukung implementasi SPBE	8	8	8	8	8	20.0	Pusat	KemenKominfo
Penyusunan kebijakan Manajemen Pengetahuan implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Perka BPPT	3 Perka	-	-	-	-	1.0	Pusat	BPPT
Penyusunan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Perka BSSN	1 Perka	-	-	-	-	1.0	Pusat	BSSN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta Pemantauan dan Evaluasi di Pusat dan Daerah	Jumlah Sistem Terintegrasi	Tersedianya aplikasi umum Perencanaan dan Penganggaran	Integrasi internal pemerintah daerah	Integrasi antara Kab/Kota dengan provinsi	Integrasi desa dengan kab/kota	Integrasi sistem tingkat pusat	10.0	Pusat	KEMENPPN/BAPPENAS
Pembangunan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi ASN Terintegrasi	1 Sistem	-	-	-	-	10.7	Pusat	BKN
Penerapan e-Arsip terintegrasi	Instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	75 Instansi	167 Instansi	171 Instansi	168 Instansi	122 Instansi	37.0	Pusat/Daerah	ANRI
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional	Jumlah penyediaan data center nasional	1 paket sewa cloud dan persiapan lahan	konstruksi	2 data center	konstruksi tambahan 2 data center	4 data center (kumulatif)	6,996.0	Pusat	KemenKominfo
	Terselenggaranya jalur komunikasi yang berkualitas dan aman dalam penyelenggaraan layanan SPBE	Tersedianya akses yang memadai bagi penyelenggaraan aplikasi umum	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 100.000 ASN	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 500 ribu ASN	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 1 juta ASN	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 4 juta ASN	5,930.0	Pusat	KemenKominfo
Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase terwujudnya interoperabilitas antara layanan SPBE	100	100	100	100	100	20.0	Pusat	KemenKominfo
Pembangunan Portal Data Nasional	Terbangunnya integrasi data dan pengelolaan portal data nasional	-	-	-	1 Data Terintegrasi	1 Data Terintegrasi	5.1	Pusat	KEMENPPN/BAPPENAS
Audit Infrastruktur SPBE	Terlaksanakannya audit infrastruktur nasional SPBE	1 Perangkat alat bantu/tools audit aplikasi	1 Perangkat alat bantu/tools audit infratruktur	1 Audit Infrastruktur Nasional	1 Audit Infrastruktur Nasional	1 Audit Infrastruktur Nasional	44.0	Pusat	BPPT
Audit Aplikasi Umum SPBE	Terlaksanakannya audit aplikasi umum SPBE	-	4 Audit Aplikasi Umum	0.0	Pusat	BPPT			
KP : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95	367.9		
	Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95			
	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP	77	80	82	83	85			
	Persentase Instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95			
	Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	94	96	98	100	100			
	Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	85	87	90	100	100			
	Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	50	55	65	75	80			
ProP : Perluasan implementasi sistem integritas							39.8		
Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	100 WBK/WBBM	100 WBK/WBBM	120 WBK/WBBM	140 WBK/WBBM	160 WBK/WBBM	39.8	Pusat/Daerah	KEMENPANRB
ProP : Penguatan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	Persentase Instansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	- K/L = 20,69% - Prov = 5% - Kab/Kota = 5%	- K/L = 42,53% - Prov = 15% - Kab/Kota = 10%	- K/L = 56,32% - Prov = 30% - Kab/Kota = 15%	- K/L = 68,97% - Prov = 40% - Kab/Kota = 25%	- K/L = 79,31% - Prov = 62% - Kab/Kota = 39%	328.1		
	Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	35%	40%	45%	50%	55%			
Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko	Jumlah kebijakan/pedoman pelaksanaan manajemen resiko	1 Kebijakan	-	-	-	-	2.3	Pusat	BPKP

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Kementerian/ Lembaga / Provinsi/kab/kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5	K/L = 18 IP (20,69%) Provinsi = 2 IP (5%) Kab/kota = 25 IP (5%)	K/L = 37 IP (42,53%) Provinsi = 6 IP (15%) kab/kota = 51 IP (10%)	K/L = 49 IP (56,32%) Provinsi = 10 IP (30%) kab/kota = 76 IP (15%)	K/L = 60 IP (66,97%) Provinsi = 14 IP (40%) kab/kota = 127 IP (25%)	K/L = 69 IP (79,31%) provinsi = 23 IP (62%) kab/kota = 200 IP (39%)	164.2	Pusat	BPKP
Monitoring UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3	Jumlah UKPBJ yang mencapai maturitas Level 3	100 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ	11.1	Pusat/Daerah	LKPP
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	616 IP	275 IP	245 IP	195 IP	135 IP	10.2	Pusat/Daerah	KEMENPANRB
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	616 IP	625 IP	625 IP	625 IP	625 IP	44.2	Pusat/Daerah	KEMENPANRB
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Percentase K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	K/L = 32 Instansi Daerah = 38 Prov/Kab/Kota	K/L = 7 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota	K/L = 14 Instansi Daerah = 27 Prov/Kab/Kota	K/L = 16 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota	K/L = 8 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota	77.3	Pusat	ANRI
Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	75 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	122 Rekomendasi	18.8	Pusat	ANRI
ProP : Penguatan perencanaan dan penganggaran	TBD						0.0		
Standarisasi Bagan Akun dan Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk mendukung Kebijakan Fiskal Nasional	Ditetapkannya PP BAS untuk Pemda dan Terseedianya data transaksi Pemerintah Daerah seluruh Indonesia	50% pemda	100% pemda	-	-	-	0.0		Kementerian Keuangan; Kemendagri: Bappenas
Standarisasi informasi kinerja (anggaran dan kegiatan) pusat dan daerah	Jumlah dokumen standarisasi	1 Dokumen		-	-	-	0.0		Kementerian Keuangan; Kemendagri: Bappenas
PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index						206,823.6		
	Global Terorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24			
	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
KP : Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38.24	38.14	38.00	37.90	37.80	5,433.8		
	Indeks Risiko Terorisme (Target)	54.46	54.36	54.26	54.16	54.00			
	Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	300	250	200	150	100			
	Angka Kejadian Konflik	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
	Angka Korban Pengungsi Internal	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
ProP : Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	Clearance Rate Terorisme	75%	75%	77%	79%	80%	904.2		
	Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar naham radikal terorisme.	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan			
	Jumlah Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	51 Kegiatan	53 Kegiatan	58 Kegiatan	60 Kegiatan	63 Kegiatan			
	Jumlah K/L yang berpartisipasi aktif dalam Sinergisitas penanggulangan terorisme	38 Institusi	40 Institusi	44 Institusi	48 Institusi	50 Institusi			
Penanganan Kasus Terorisme	Jumlah Kasus Terorisme yang Ditangani	15 Kasus	17 Kasus	20 Kasus	22 Kasus	25 Kasus	1.8	Pusat	POLRI
Identifikasi dan Sosialisasi Tindak Pidana Terorisme	Jumlah kegiatan identifikasi dan sosialisasi Tindak Pidana Terorisme	156 Kegiatan	157 Kegiatan	160 Kegiatan	162 Kegiatan	165 Kegiatan	1.8	Pusat	POLRI
Pencegahan Terorisme	Jumlah Kegiatan Pencegahan Terorisme	48 Kegiatan	50 Kegiatan	55 Kegiatan	57 Kegiatan	60 Kegiatan	1.8	Pusat	POLRI

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme.		187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	196.5	Pusat	BNPT
Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme	Jumlah Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme		90 Koordinasi	93 Koordinasi	95 Koordinasi	97 Koordinasi	49.6	Pusat	BNPT
Kegiatan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Jumlah Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)		32 FKPT	32 FKPT	32 FKPT	32 FKPT	132.3	Pusat	BNPT
Wilayah Prioritas kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	Jumlah Wilayah prioritas Kegiatan Pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi		3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	44.7	Pusat	BNPT
Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	Jumlah Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	30.4	Pusat	BNPT
Kegiatan Kontra Radikalasi	Jumlah Kegiatan Kontra Radikalasi		48 Operasi	48 Operasi	48 Operasi	48 Operasi	192.6	Pusat	BNPT
Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	Jumlah Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.5	Pusat	BNPT
Operasi Intelijen Kontra Terorisme	Jumlah operasi intelijen terorisme	3670 Laporan	2898 Laporan	2999 Laporan	3104 Laporan	3104 Laporan	101.5	Pusat	BIN
Operasi intelijen separatisme	Jumlah operasi intelijen separatisme	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	76.5	Pusat	BIN
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	50 Orang	100 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	15.1	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	10,000 Orang	10,000 Orang	10,000 Orang	10,000 Orang	10,000 Orang	53.2	34 Provinsi	Kementerian Sosial
ProP : Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan	Jumlah Obyek Vital dan Target Rentan yang mendapat Pengamanan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	Jumlah Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat	POLRI
Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	Jumlah Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat	POLRI
ProP : Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Jumlah Pos Pamtas, Posal, Pos Pol SubSektor dan PLBN yang dibangun	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	3,473.2		
	Panjang Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
Pembangunan Pos Pamtas	Jumlah Pos Pamtas yang dibangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	230.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan Pos AL	Jumlah pos AL yang dibangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	300.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan	Jumlah Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan yang dibangun	8 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	35.2	Daerah	POLRI
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun	Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
Pembangunan JIPP	Panjang JIPP	200 Km	550 Km	550 Km	550 Km	450 Km	2,884.0	Pusat	Kemenhan
Penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem Hankam	Jumlah Penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem Hankam						0.0		
Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat	Jumlah Pilar Batas Negara Wilayah Darat yang diidentifikasi	50 km	50 km	50 km	50 km	50 km	7.5	Pusat	BNPP
Identifikasi/inventarisasi Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara yang diidentifikasi/diinventarisasi	20 Pilar	20 Pilar	20 Pilar	20 Pilar	20 Pilar	10.0	Pusat	BNPP
Pelatihan aparatur pemerintah di kawasan perbatasan yang dilatih	Jumlah aparatur pemerintah di kawasan perbatasan yang dilatih	300 Orang	TBD	TBD	TBD	TBD	1.5	Pusat	BNPP
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam	Jumlah Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam yang difasilitasi pemberdayaan	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	5.0	Pusat	BNPP
ProP : Penanganan Konflik Secara Humanis	Tertanggunginya Potensi Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten	27 Kasus	25 Kasus	23 Kasus	21 Kasus	19 Kasus	380.5		
	Jumlah Satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	TBD	TBD	TBD	TBD	100%			

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Brigade Mobil	Jumlah anggota satuan Brigade Mobil yang mendapatkan pelatihan Harkatpuan dalam Penanganan Konflik Secara Humanis	9.684 Orang	10.168 Orang	10.676 Orang	11.209 Orang	11.715 Orang	52.4	Pusat dan Daerah	POLRI
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Samapta Baharkam	Jumlah anggota Satuan Samapta yang mendapatkan Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis	170 Orang	0.9	Pusat dan Daerah	POLRI				
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Binmas	Jumlah anggota Satuan Binmas yang mendapatkan Peningkatan kemampuan personel Korbinmas	3.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	23.0	Pusat dan Daerah	POLRI
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	61%	62%	63%	64%	65%	33.8	Pusat dan Daerah	Kemendagri
Deteksi Dini oleh Aparat Pusat dan Daerah	Jumlah aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar	200 Orang	220 Orang	240 Orang	260 Orang	280 Orang	8.5	Pusat dan Daerah	Kemendagri
Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	41930 orang	261.9	34 Provinsi	Kementerian Sosial				
ProP : Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Diselamatkan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	675.9		
	Jumlah Warga KKB yang Berhasil di Reintegrasi	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana	Jumlah Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana	6 Kegiatan	468.3	Pusat	Kemenhan				
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Korbrimob	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	3 Kegiatan	6.1	Pusat dan Daerah	POLRI				
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Korpolair	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	3 Kegiatan	6.1	Pusat dan Daerah	POLRI				
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Pusdokkes	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	3 Kegiatan	6.1	Pusat dan Daerah	POLRI				
Korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	120000 Orang	189.5	34 Provinsi	Kementerian Sosial				
KP : Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	Pemenuhan MEF	72%	79%	86%	93%	100%	158,135.3		
	Persentase Kontribusi Industri Pertahanan	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%			
ProP : Pengadaan Alutsista	Jenis Alutsista yang diadakan	77 Jenis	50,000.0						
Alutsista Mabes TNI	Jenis Alutsista Strategis Mabes TNI yang diadakan	9 Jenis	2,500.0	Pusat	Kemenhan				
Alutsista TNI AD	Jenis Alutsista TNI AD yang diadakan	23 Jenis	15,000.0	Pusat	Kemenhan				
Alutsista TNI AL	Jenis Alutsista TNI AL yang diadakan	25 Jenis	15,000.0	Pusat	Kemenhan				
Alutsista TNI AU	Jenis Alutsista TNI AU yang diadakan	20 Jenis	17,500.0	Pusat	Kemenhan				
ProP : Pemeliharaan dan perawatan alutsista	Jenis Alutsista dengan Persentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	53 Jenis	95,000.0						
Alutsista TNI AD	Jenis Alutsista TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	18 Jenis	20,000.0	Pusat	Kemenhan				
Alutsista TNI AL	Jenis Alutsista TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	20 Jenis	30,000.0	Pusat	Kemenhan				
Alutsista TNI AU	Jenis Alutsista TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	15 Jenis	45,000.0	Pusat	Kemenhan				
ProP : Pembangunan sarana-prasarana pertahanan	Jumlah M2 pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan	40000	40000	40000	40000	40000	2,000.0		
Pembangunan Sarpras Mabes TNI	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras Mabes TNI	10000	10000	10000	10000	10000	500.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan Sarpras TNI AD	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AD	10000	10000	10000	10000	10000	500.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan Sarpras TNI AL	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AL	10000	10000	10000	10000	10000	500.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan Sarpras TNI AU	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AU	10000	10000	10000	10000	10000	500.0	Pusat	Kemenhan
ProP : Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	Unit Rumah Dinas	2000 unit	2000 unit	4000 unit	6000 unit	6000 unit	6,947.0		

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Rumah Sakit meningkat Akreditasinya	9 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit			
Pembangunan Rumah Negara Mabes TNI	Jumlah Negara Rumah Negara Mabes TNI yang dibangun	100	50	100	150	150	110.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AD	Jumlah Negara Rumah Negara TNI AD yang dibangun	693	1500	3000	4500	4500	3,013.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AL	Jumlah Negara Rumah Negara TNI AL yang dibangun	215	300	600	900	900	640.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AU	Jumlah Negara Rumah Negara TNI AU yang dibangun	147	150	300	450	450	334.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AD	Jumlah RS TNI AD yang di-Upgrade	5	2	2	2	2	1,350.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AL	Jumlah RS TNI AL yang di-Upgrade	2	2	2	2	2	750.0	Pusat	Kemenhan
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AU	Jumlah RS TNI AU yang di-Upgrade	2	2	2	2	2	750.0	Pusat	Kemenhan
ProP : Pembangunan Pertahanan Siber	Jumlah Sistem Siber Pertahanan	4 Sistem	2,000.0						
Pembangunan Pertahanan Siber Mabes TNI	Jumlah Sistem Pertahanan Siber Mabes TNI	1 Sistem	500.0	Pusat	Kemenhan				
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AD	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AD	1 Sistem	500.0	Pusat	Kemenhan				
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AL	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AL	1 Sistem	500.0	Pusat	Kemenhan				
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AU	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AU	1 Sistem	500.0	Pusat	Kemenhan				
ProP : Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	Jenis Alphalhankam yang dikembangkan	3 Jenis	2,188.3						
PTTA MALE	Tahap Prototipe	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	88.3	Pusat	Kemenhan
Propelan	Terbangunnya Sarana Produksi Propelan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	2,100.0	Pusat	Kemenhan
KP : Penguatan Keamanan Laut	Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	25,579.2		
ProP : Penguatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini Terpadu	Relay Time	300 menit	240 menit	180 menit	120 menit	60 menit	7,648.4		
	Response Time	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
Pengadaan Peralatan Puskodal Opskamla	Jumlah Peralatan Puskodal Opskamla yang diadakan	10	12	9	9	5	4,542.6	Pusat	Bakamla
Pengadaan Peralatan Coastal Radar	Jumlah Peralatan Coastal Radar yang diadakan	-	8	8	8	8	530.9	Pusat	Bakamla
Pengadaan Peralatan Sensor Long Range Camera	Jumlah Peralatan Sensor Long Range Camera yang diadakan	3	13	8	8	8	1,181.6	Pusat	Bakamla
Pengadaan Communication System	Jumlah Communication System yang diadakan	4	8	8	8	8	382.8	Pusat	Bakamla
Pengadaan Maritime Security Mission System	Jumlah Maritime Security Mission System yang diadakan	-	11	-	-	-	96.8	Pusat	Bakamla
Pengadaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)	Jumlah Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang diadakan	0	0	16	8	8	205.2	Pusat	Bakamla
Pengadaan Airborne Maritime Surveillance	Jumlah Airborne Maritime Surveillance yang diadakan	0	0	1	1	0	708.4	Pusat	Bakamla
ProP : Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	Persentase Cakupan Operasi Keamanan Laut	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	17,238.8		
Pengadaan sarana prasarana operasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	88 paket	-	-	-	-	42.7	Pusat	Bakamla
Pengadaan Kapal Keamanan Laut	Jumlah kapal keamanan laut yang diadakan	4 kapal	20 kapal	7 kapal	12 kapal	6 kapal	4,185.3	Pusat	Bakamla
Pengadaan Senjata	Jumlah senjata yang diadakan	1014 pucuk	36 pucuk	-	-	-	1,834.9	Pusat	Bakamla
Pengadaan Amunisi	Jumlah amunisi yang diadakan	1 paket	-	1 paket	-	-	70.0	Pusat	Bakamla
Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	Jumlah hari operasi keamanan dan keselamatan laut	365	365	365	365	365	1,640.2	Pusat	Bakamla
Operasi laut bersama terkoordinasi bilateral	jumlah kegiatan operasi laut bersama terkoordinasi bilateral	6	6	6	6	6	66.6	Pusat	Bakamla
Operasi Udara	Jumlah jam terbang Operasi Udara	3804 jam terbang	3805 jam terbang	3806 jam terbang	3807 jam terbang	3808 jam terbang	2,071.6	Pusat	Bakamla
Operasi Udara bersama terkoordinasi bilateral	Jumlah kegiatan operasi udara bersama terkoordinasi bilateral	4 Operasi	66.6	Pusat	Bakamla				
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi	1 Sistem	69.0	Pusat	KKP				
Operasional Kapal Pengawas	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI	150 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	2,435.4	Pusat	KKP

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Operasional Pesawat Patroli	Jumlah hari operasi pesawat patroli	150 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180.7	Pusat	KKP
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Jumlah hari operasional speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat	50 Hari Operasi	279.8	Pusat dan Daerah	KKP				
Kapal pengawas yang dibangun	Jumlah kapal pengawas yang dibangun	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	916.7	Pusat	KKP
Speed Boat Pengawas yang dibangun	Jumlah speedboat pengawas yang dibangun	11 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	175.4	Pusat	KKP
Armada Pengawasan yang siap operasi	Jumlah armada pengawasan yang siap operasional	103 Unit	115 Unit	128 Unit	141 Unit	154 Unit	575.0	Pusat dan Daerah	KKP
Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	Jumlah bangunan/pos pengawasan yang tersedia	18 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	284.0	Pusat	KKP
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	1010 Kelompok	1050 Kelompok	1100 Kelompok	1150 Kelompok	1200 Kelompok	32.8	Pusat dan Daerah	KKP
Operasi Udara bersama terkoordinasi bilateral	Jumlah kegiatan operasi udara bersama terkoordinasi bilateral	4 Operasi	15.9	Pusat	Bakamla				
Patroli Wilayah Perbatasan Laut	Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Perbatasan	351 Jam	366 Jam	380 Jam	394 Jam	408 Jam	1,108.5	Pusat dan Daerah	POLRI
Patroli Wilayah Selat Malaka	Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Selat Malaka	1.053 Jam	1.088 Jam	1.123 Jam	1.158 Jam	1.193 Jam	1,086.0	Pusat dan Daerah	POLRI
Operasi Keamanan Perairan	Jumlah Operasi Keamanan Perairan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	101.7	Pusat dan Daerah	POLRI
ProP : Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	Clearance Rate Tindak Pidana Laut	75%	75%	80%	80%	80%	692.0		
Penyelesaian Tindak Pidana di laut	Jumlah Kasus Keamanan Laut yang Ditangani	108 Kasus	119 Kasus	131 Kasus	144 Kasus	158 Kasus	692.0	Pusat dan Daerah	POLRI
Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing	Jumlah Tindak Pidana Illegal Fishing yang Ditangani	151 Kasus	156 Kasus	159 Kasus	164 Kasus	166 Kasus	0.0	Pusat dan Daerah	POLRI
KP : Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1.86%	1.86%	1.86%	1.69%	1.69%	5,287.4		
	Crime Rate	129 orang / 100.000 penduduk	128 orang / 100.000 penduduk	128 orang / 100.000 penduduk	127 orang / 100.000 penduduk	127 orang / 100.000 penduduk			
	Pelayanan Publik Polri yang Prima	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
ProP : Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika	85%	86%	87%	88%	89%	18.8		
	Jumlah Kawasan yang Pulih dari Tanaman Terlarang	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Narkotika	Jumlah laporan kajian hukum sistem peradilan pidana narkotika	1 Laporan	-	-	-	-	2.0	Pusat	BNN
Laporan hasil Kajian Desain Strategi Active Defense Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah Laporan Kajian Desain Strategi "Active Defense" dalam pencegahan peredaran gelap narkotika	1 Laporan	-	-	-	-	4.0	Pusat	BNN
Data Aset Jaringan TPPU Narkotika hasil Asset Tracing	Jumlah Data Aset Jaringan TPPU Narkotika hasil Asset Tracing	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		BNN
Laboratorium Uji Narkoba Daerah yang Operasional	Jumlah Laboratorium Uji Narkoba yang dibangun/diupgrade	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		BNN
Gugus Tugas Khusus yang melakukan pengawasan jalur masuk narkotika internasional	Jumlah Gugus Tugas Khusus yang melakukan pengawasan jalur masuk narkotika internasional	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		BNN
Operasionalisasi Pos Interdiksi	Jumlah Pos Interdiksi yang Operasional	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		BNN
Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang Diintervensi Program Alternative Development	Jumlah Kawasan yang Beralih ke Tanaman Pengganti (Alternative Development)	6 Kawasan	TBD	TBD	TBD	TBD	6.3	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Medan, Banjarmasin, Makassar	BNN
Titik lokasi lahan tanaman ganja yang dimusnahkan	Jumlah Titik lokasi lahan tanaman narkotika yang dimusnahkan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		BNN
Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	Jumlah Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		BNN
Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	2,7 Ton	2,6 Ton	2,5 Ton	2,4 Ton	2,3 Ton	0.0	Pusat dan Daerah	POLRI
Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika	Jumlah Jaringan Sindikat Narkotika yang Terungkap	78 Jaringan	77 Jaringan	76 Jaringan	75 Jaringan	74 Jaringan	0.0	Pusat dan Daerah	POLRI
Penanganan Kasus Kejahatan Narkotika	Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika yang Ditangani	39.000 Kasus	38.000 Kasus	37.000 Kasus	36.000 Kasus	35.000 Kasus	6.6	Pusat dan Daerah	POLRI
Penanganan Kasus TPPU Terkait Narkotika yang Ditangani	Jumlah Kasus TPPU terkait Narkotika yang ditangani	7 Kasus	8 Kasus	9 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	0.0	Pusat dan Daerah	POLRI

Keterangan : Angka Sementara, Dalam Tahunannya Dapat Dimutakhirkan Melalui RKP Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Pelaksanaan dan Pemutakhiran Sumber Pendanaan

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
ProP : Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja	50.03	51	52	53	53.51	880.1		
	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika								
	a. Aspek Fisik	6.0%	6.5%	7.0%	7.5%	8.00%			
	b. Aspek Psikologis	6.0%	6.5%	7.0%	7.5%	8.00%			
	c. Aspek Hubungan Sosial	5.0%	5.5%	6.0%	6.5%	7.00%			
	d. Aspek Sumber Daya Lingkungan	4.0%	4.5%	5.0%	5.5%	6.00%			
	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	3.07	3.1	3.13	3.16	3.2			
Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi SPM	10 Fasilitas	8.8	Pusat dan Daerah	BNN				
Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah petugas agen (pendamping) pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	12.7	Pusat dan Daerah	BNN				
Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	19270 Orang	20,000 Orang	20,000 Orang	20,000 Orang	20,000 Orang	731.7	34 Provinsi	Kementerian Sosial
Penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Jumlah Penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	9500 Orang	10000 Orang	10500 Orang	11000 Orang	11500 Orang	108.3	34 Provinsi	Kementerian Kesehatan
Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Pemkab/Pemkot yang diadvokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat dan Daerah	BNN
Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba)	Jumlah desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa	173 Desa	173 Desa	173 Desa	173 Desa	173 Desa	18.6	Daerah	BNN
"Remaja Teman Sebaya" Anti Narkotika	Jumlah "Remaja Teman Sebaya" Anti Narkotika	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat dan Daerah	BNN
Pelatihan Pengembangan Soft Skill Bagi SMP & SMU Sederajat	Jumlah SMP & SMU sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat dan Daerah	BNN
Operasionalisasi Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi SPM	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat dan Daerah	BNN
Pelatihan Kompetensi Teknis Rehabilitasi Bagi Agen Pemulihan	Jumlah Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat dan Daerah	BNN
Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat dan Daerah	BNN
ProP : Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	Clearance Rate Tindak Pidana TPPO serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	83%	83%	84%	84%	85%	69.0		
Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Jumlah RPK Sesuai SPM yang Dibangun	3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	69.0	Daerah	POLRI
Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	Jumlah Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya yang Ditangani	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0	Pusat dan Daerah	POLRI
ProP : Peningkatan Layanan Kepolisian yang Profesional, Modern, dan Terpercaya	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	2,174.0		
	Clearance Rate	64%	64%	65%	66%	67%			
	Clearance Rate Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan TPPU	57%	58%	59%	59%	60%			
Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	Jumlah SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
Pembangunan SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	Jumlah SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
Pembangunan SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	Jumlah SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	Jumlah M2 Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
Penanganan Tindak Pidana Umum	Jumlah Kasus Kejahatan yang Ditangani	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU	Jumlah Kasus Kejahatan Perbankan dan TPPU yang Ditangani	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
Pembangunan Command Centre	Jumlah Command Center yang dibangun	5 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	1,287.0	Daerah	POLRI
Optimalisasi Perangkat Data Center	Jumlah Perangkat Data Center yang dioptimalisasikan	42 Unit	-	-	-	-	42.6	Daerah	POLRI
Pembangunan Aplikasi E-Manajemen	Jumlah Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan	727 Unit	-	-	-	-	29.1	Daerah	POLRI
Pembangunan SKCK Online	Jumlah SKCK Online yang dibangun dan di upgrade	100 Unit dan 928 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	61.2	Daerah	POLRI
Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	Jumlah Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	4 Polda	4.0	Daerah	POLRI				
Pembangunan Big Data Polri	Sistem Single Data Entry Polri	-	Tahap 1 (1paket)	Tahap 2 (1paket)	Tahap 3 (1 paket)	Tahap 4 (1 Paket)	750.0	Daerah	POLRI
ProP : Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	Jenis dan Jumlah Almatsus dan Alpalkam Kepolisian	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
	Persentase Almatsus dan Alpalkam Kontribusi Industri Pertahanan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	1 Paket	0.0	Pusat	POLRI				
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	8 Paket	0.0	Pusat	POLRI				
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Intelijen Intelijen Keamanan	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan	14 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	6 Paket	0.0	Pusat	POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam TIK	Jumlah Almatsus dan Alpalkam TIK	5 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0.0	Pusat	POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	1 Paket	0.0	Pusat	POLRI				
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	10 Paket	0.0	Pusat	POLRI				
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0.0	Pusat	POLRI
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Produksi Industri Pertahanan	Kontribusi Almatsus dan Alpalkam Produksi Industri Pertahanan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Industri Industri/Pabrikan Dalam Negeri	Kontribusi Almatsus dan Alpalkam Pada Industri/Pabrikan Dalam Negeri	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	0.0		
ProP : Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan Anggota POLRI	Jenis dan jumlah Diklat Profesional	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	2,145.5		
	Persentase Pemenuhan Rumah Negara Polri	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi Akreditasi A, B, dan C	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD			
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	76%	77%	78%	79%	80%			
Sertifikasi Profesi Anggota Polri	Jumlah Anggota yang memiliki Sertifikat Profesi	500 Orang	708.8	Pusat	POLRI				
Pemenuhan Rumah Negara Polri	Jumlah Unit Rumah Negara Polri	6 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1,248.9	Daerah	POLRI
Pemenuhan Rumah Sakit Polri	Jumlah Rumah Sakit Polri yang Dibangun dan di Upgrade	Dibangun : 2 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 2 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit	0.0	pusat	POLRI
Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	0.76	0.77	0.78	0.79	0.8	187.8	Pusat dan Daerah	POLRI
KP : Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Skor Global Cyber Security Index	0.792	0.792	0.826	0.826	0.838	12,387.9		
ProP : Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber	Skor Pilar Technical pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0.159	0.159	0.171	0.171	0.175	11,101.0		
	Skor Pilar Organizational pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0.13	0.13	0.133	0.133	0.136			
Perluasan Cakupan Area National Cybersecurity Operation Center	Jumlah Cakupan Perluasan Area National Cybersecurity Operation Center	10 Titik	1,500.0	Pusat	BSSN				

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Pembangunan kapasitas National Computer Security Incident Response Team (Nat-CSIRT)	Jumlah sistem simulasi incident response	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	-	743.0	Pusat	BSSN
Pembangunan Sistem Monitoring Pengendalian Informasi	Jumlah sistem monitoring pengendalian informasi	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	450.0	Pusat	BSSN
Penguatan National Data Center	Pusat data nasional berstandar internasional	-	1 DC berstandar Internasional (Tahap 1)	1 DC berstandar Internasional (Tahap 2)	1 DC berstandar Internasional (Tahap 3)	-	600.0	Pusat	BSSN
Pembangunan Infrastruktur Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	Jumlah sistem VVDP	-	1 Sistem	-	-	-	50.0	Pusat	BSSN
Pembangunan Information Sharing and Analysis Center (ISAC)	Jumlah sistem ISAC	-	1 Sistem	-	-	-	50.0	Pusat	BSSN
Penguatan Infrastruktur Center of Excellence	Center of Excellence keamanan siber nasional	-	-	-	-	-	1,200.0	Pusat	BSSN
Penyusunan Regulasi Manajemen Krisis Keamanan Siber Nasional	Regulasi manajemen krisis siber	1 Regulasi	-	-	-	-	8.0	Pusat	BSSN
Peningkatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber	Nilai budaya keamanan siber masyarakat	4 Nilai	-	-	-	-	8.2	Pusat	BSSN
Penerapan Standar Kriptografi pada Sektor Ekonomi Digital yang bersifat interoperabilitas	Jumlah PSE yang sudah menerapkan standar kriptografi	100 PSE	-	-	-	-	1.4	Pusat	BSSN
Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber	Jumlah peralatan teknologi intelijen siber	0	TBD	TBD	TBD	TBD	6,150.0	Pusat	BIN
Pembangunan dan Penguatan CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	Jumlah peralatan teknologi intelijen siber	0	TBD	TBD	TBD	TBD	35.0	Pusat	BIN
Pengembangan Sistem Pertahanan Siber	Jumlah sistem pertahanan siber yang dikembangkan	5 sistem	6 sistem	3 sistem	2 sistem	3 sistem	58.0	Pusat	KEMHAN
Revitalisasi infrastruktur dan jaringan siber Pushansiber	presentase peningkatan kualitas jaringan	100%	-	-	-	-	65.0	Pusat	KEMHAN
Sistem Pengamanan Pangkalan (Smart Building Pushansiber)	Jumlah pangkalan yang diberikan sistem pengamanan	1 pangkalan	-	-	-	1 pangkalan	64.0	Pusat	KEMHAN
Peningkatan 11 unit Server Data Center Pushansiber	Jumlah sub sistem dari Server Data Center	11 unit	-	-	-	-	2.4	Pusat	KEMHAN
Pengadaan Hardware dan Software baru di Puslabfor Sentul* (Pengadaan melalui PLN dengan asumsi 1 USD= Rp 14.500)	Jumlah Peralatan Labforensik yang diadakan	-	-	1 Paket	-	1 Paket	58.0	Pusat dan Bidlabfor Polda	POLRI
Peralatan Digital Forensik	Jumlah Peralatan Laboratorium Forensik yang diadakan	-	-	1 Paket	-	1 Paket	58.0	Pusat dan Bidlabfor Polda	POLRI
ProP : Pembangunan dan Penguatan CERT (ComputerEmergency Response Team)	Skor Pilar Technical pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0.159	0.159	0.171	0.171	0.175	312.2		
Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah	15 K/L/D	25 K/L/D	27 K/L/D	27 K/L/D	27 K/L/D	31.6	Pusat	BSSN
Pembentukan CSIRT pada Sektor IIKN	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor IIKN	-	1 Entitas	1 Entitas	-	-	7.5	Pusat	BSSN
Membangun Kemampuan penanganan insiden di sektor ekodig (manajemen krisis siber). PGP dan Sertifikat Digital (penguatan insiden siber. capacity building)	Jumlah PSE yang memiliki kemampuan menangani insiden respon	100 PSE	100 PSE	100 PSE	100 PSE	100 PSE	4.5	Pusat	BSSN
Pembangunan Sistem Cyber Intelegent Analytica Pushansiber	waktu analisa ancaman/ serangan siber	15 menit	-	-	-	-	126.5	Pusat	KEMHAN
Pengembangan Laboratorium Offensive dan Defensive Pushansiber	Jumlah peralatan Laboratorium Offensive dan Defensive	-	20 offensive dan 12 defensive	-	-	-	99.9	Pusat	KEMHAN
Pengembangan Peralatan dan Kapasitas Tim CERT Pushansiber	Jumlah Peralatan dan kapasitas Tim CERT	-	3 paket	-	-	-	39.7	Pusat	KEMHAN
Pengadaan Anti Drone	Jumlah Peralatan Anti Drone	-	-	1 paket	-	-	2.5	Pusat	KEMHAN
ProP : Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	Skor Pilar Cooperation pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0.12	0.12	0.139	0.139	0.144	143.9		
Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	Jumlah Laporan Intelijen Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	0	TBD	TBD	TBD	TBD	83.9	Pusat	BIN

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024			
Kerjasama Regional, Bilateral dan Multilateral Bidang Keamanan Siber	Jumlah kegiatan kerjasama bidang keamanan siber		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.0	Pusat	BSSN
ProP : Penguatan Kapasitas SDM Keamanan Siber	Skor Pilar Capacity Building pada Global Cybersecurity Index (GCI)	0.189	0.189	0.189	0.189	0.189	507.9		
Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk K/L/D	200 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	14.6	Jakarta	BSSN
Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber	Jumlah Lulusan Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan siber dan sandi untuk K/L/D	100 Lulusan	37.7	Jakarta	BSSN				
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandi K/L/D	Pendidikan Pelatihan Fungsional Sandi K/L/D	100 Lulusan	27.6	Jakarta	BSSN				
Penyelenggaraan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN yang mengikuti Program Born to Defence	500 Lulusan	31.8	Jakarta	BSSN				
National Cyber Exercise Drill Test	Jumlah peserta yang mengikuti National Cyber Excercise Drill Test	1230 Orang	1250 Orang	1300 Orang	1400 Orang	1450 Orang	60.7	Pusat	BSSN
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Bidang Digital Forensik	Jumlah CHFI dan ECII yang terbentuk di Puslabfor, Bid Labfor Polda, Dittipidsiber Bareskrim dan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda	57 lulusan	8.6	Pusat	POLRI				
Peningkatan Kapasitas SDM Siber Polri	Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi, pelatihan, dan capacity building siber	269 lulusan	21.9	Pusat	POLRI				
Penguatan Kapasitas SDM Keamanan Siber	Jumlah lulusan	0	TBD	TBD	TBD	TBD	244.0	Pusat	BIN
Pendidikan dan Pelatihan TIK di Bidang Siber	Jumlah SDM TIK Bidang Siber	100 lulusan	61.1	Pusat	KEMHAN				
ProP : Penyelesaian Kejahatan Siber	Clearance Rate Tindak Pidana Siber	61%	62%	63%	64%	65%	322.9		
Penanganan Tindak Pidana Siber	Jumlah penanganan tindak pidana siber	1,247 Kasus	230.9	Pusat	Polri				
Penyelidikan Online Dittipidsiber	Penyelidikan Online Dittipidsiber : 1080 Laporan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda : 48 Laporan	2712 laporan	2712 laporan	2712 laporan	2712 laporan	2712 laporan	92.0	Pusat	Polri
JUMLAH						254,044.2			



*Kementerian PPN/
Bappenas*

Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310
Telp: (021)31936207 Fax: (021)3145374
www.bappenas.go.id